



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pembangunan merupakan salah satu pendukung agar Pembangunan Daerah dapat berjalan dengan baik, efisien dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan umum dan Pembangunan berkelanjutan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka konsistensi antara perencanaan Pembangunan dengan penggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, perlu menyusun rencana kerja pemerintah daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dimaksudkan untuk:

- a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026; dan
- b. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD 2025 - 2029 dan RPJPD Tahun 2025 - 2045.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 bertujuan sebagai :

- a. pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2026;
- b. pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, Prioritas dan Plafon anggaran sementara, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa tengah tahun anggaran 2026; dan
- c. acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota tahun 2026.

Pasal 4

Dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 5

RKPD Tahun 2026 terdiri atas:

- a. narasi RKPD Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. data dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- c. rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi jawa tengah tahun anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 November 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 18 November 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
197007291996031001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026



RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

[Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Nomor 28) tanggal penetapan 18 November 2025
tanggal pengundangan 18 November 2025]



buku I

www.bappeda.jatengprov.go.id
COPYRIGHT 2025

**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-7
1.5. Sistematika	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2 Kondisi Demografi	II-9
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-15
2.2.1 Kondisi Ketahanan Pangan	II-19
2.3 Kondisi Perekonomian Daerah	II-22
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-22
2.3.2 PDRB Per Kapita	II-30
2.3.3 Inflasi	II-34
2.3.4 Rasio Gini dan Indeks Williamson	II-35
2.3.5 Indeks Daya Saing Daerah	II-37
2.3.6 Investasi	II-39
2.3.7 Pertanian	II-44
2.3.8 Koperasi, usaha kecil, dan menengah	II-53
2.3.9 Perdagangan	II-57
2.3.10 Perindustrian	II-60
2.3.11 Pariwisata	II-61
2.3.12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-62
2.3.13 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	II-74
2.3.14 Perhubungan	II-79
2.3.15 Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Desa	II-91
2.4 Kondisi Sumber Daya Manusia	II-93
2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-93
2.4.2 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	II-94
2.4.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II-95
2.4.4 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	II-97
2.4.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	II-99
2.4.6 Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-100
2.4.7 Pendidikan	II-101
2.4.8 Kesehatan	II-105
2.4.9 Kesejahteraan Sosial	II-116
2.4.10 Tenaga kerja	II-121
2.4.11 Perlindungan Perempuan dan Anak	II-128
2.4.12 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	II-132
2.4.13 Kepemudaan dan olahraga	II-134
2.4.14 Perpustakaan	II-137

2.4.14	Transmigrasi.....	II-139
2.5	Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta	
	Kebencanaan	II-140
2.5.1	Daya Dukung dan Daya Tampung	II-140
2.5.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	II-143
2.5.3	Perubahan Iklim	II-144
2.5.4	Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.....	II-147
2.5.5	Rehabilitasi Lahan Kritis dan Ekosistem Pesisir	II-150
2.5.6	Konservasi dan Perlindungan Hutan	II-152
2.5.7	Pemanfaatan hutan dan Kapasitas Pengelolaan Hutan	II-153
2.5.8	Pertambangan	II-155
2.5.9	Penataan Ruang	II-159
2.5.10	Energi dan Sumber Daya Mineral	II-169
2.5.10	Penanggulangan Bencana	II-182
2.6	Kondisi Tata Kelola Pemerintahan	II-206
2.6.1	Indeks Reformasi Birokrasi	II-206
2.6.2	Pelayanan Publik	II-207
2.6.3	Demokrasi	II-209
2.6.4	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	II-210
2.6.5	Penelitian dan Pengembangan.....	II-216
2.6.6	Kebudayaan.....	II-219
2.6.7	Kearsipan	II-221
2.6.8	Akuntabilitas Kinerja	II-222
2.6.9	Manajemen ASN	II-223
2.6.10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-226
2.6.11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-229
2.6.12	Perencanaan	II-234
2.6.13	Keuangan	II-235
2.6.14	Pengawasan.....	II-236
2.6.15	Pertanahan	II-238
2.7	Kondusivitas Daerah.....	II-242
2.8	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan	
	Realisasi RPD Sampai Dengan Tahun 2024	II-244
2.9	Permasalahan Pembangunan	II-245
2.9.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-245
2.9.2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-255
2.9.3	Isu Strategis Daerah	II-266
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ...	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Dinamika Perekonomian Global	III-1
3.1.2	Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional.....	III-3
3.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah	III-4
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-7
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-12
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-16
3.2.4	Sumber Pendanaan Lainnya	III-19

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN	
2026	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-2
4.2.1 Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-2
4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	IV-4
4.2.3 Prioritas Pembanguna Nasional dalam RKP Tahun 2026	IV-10
4.2.4 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional Tahun 2026	IV-11
4.3 Program Prioritas Gubernur Dan Wakil Gubernur.....	IV-26
4.3.1 Program Prioritas	IV-26
4.3.2 Program Intervensi.....	IV-29
4.3.3 Program Aksi.....	IV-33
4.3.4 Program Taktis.....	IV-42
4.4 Inovasi Pembangunan Daerah.....	IV-270
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	V-1
5.1 Kondisi Kabupaten/Kota.....	V-1
5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	V-1
5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	V-2
5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	V-4
5.1.4 Persentase Penduduk Miskin	V-5
5.1.5 Persandingan Capaian Indikator Makro	V-7
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota.	V-9
5.3 Kebijakan Pembangunan Berbasis Wilayah Pengembangan.....	V-10
5.3.1 Arahan Per Wilayah Pengembangan	V-11
5.4 Target Indikator Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Capaian Provinsi.....	V-30
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	VI-1
6.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2026.....	VI-1
6.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	VI-2
6.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar	VI-2
6.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	VI-8
6.2.3 Urusan Pilihan.....	VI-18
6.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	VI-25
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VII-1
7.1 Indikator Kinerja Utama.....	VII-1
7.2 Indikator Kinerja Daerah	VII-2
7.3 Indikator Kinerja Program	VII-12
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1 Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah	II-3
Tabel	2.2 Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019	II-4
Tabel	2.3 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah, 2020-2024	II-9
Tabel	2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2024	II-9
Tabel	2.5 Kepadatan Penduduk per Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024	II-10
Tabel	2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2020-2024 dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024	II-11
Tabel	2.7 Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....	II-13
Tabel	2.8 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-14
Tabel	2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024	II-15
Tabel	2.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024	II-19
Tabel	2.11 Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak Provinsi Jawa Tengah (2017-2024)	II-20
Tabel	2.12 Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024	II-21
Tabel	2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%).....	II-26
Tabel	2.14 PDRB Per Kapita Provinsi Se Pulau Jawa (Juta Rp)	II-31
Tabel	2.15 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (Juta Rupiah)	II-32
Tabel	2.16 Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2020 – 2024.....	II-39
Tabel	2.17 Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2024.....	II-40
Tabel	2.18 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah.....	II-50
Tabel	2.19 Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....	II-53
Tabel	2.20 Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024.....	II-54
Tabel	2.21 Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....	II-54
Tabel	2.22 Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari Tahun 2019-2024 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	II-55
Tabel	2.23 Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....	II-57
Tabel	2.24 Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (Juta US\$)	II-57

Tabel	2.25	Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (Juta US\$)	II-58
Tabel	2.26	Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (Juta US\$)	II-58
Tabel	2.27	Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....	II-59
Tabel	2.28	Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024.....	II-59
Tabel	2.29	Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 Triwulan III	II-60
Tabel	2.30	Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024.....	II-60
Tabel	2.31	Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....	II-61
Tabel	2.32	Capaian Indikator Kinerja Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-61
Tabel	2.33	Kondisi Permukaan Jalan Sesuai Kewenangan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	II-62
Tabel	2.34	Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....	II-63
Tabel	2.35	Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	II-63
Tabel	2.36	Kondisi Permukaan Provinsi Jawa Tengah Menurut Lebar Jalan Tahun 2024	II-65
Tabel	2.37	Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024	II-66
Tabel	2.38	Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024	II-66
Tabel	2.39	Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024.....	II-67
Tabel	2.40	Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah	II-69
Tabel	2.41	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2017 – 2024.....	II-70
Tabel	2.42	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2024.....	II-71
Tabel	2.43	Jumlah embung di Jawa Tengah berdasarkan sumber pendanaanya.....	II-71
Tabel	2.44	Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....	II-72
Tabel	2.45	Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis.....	II-72
Tabel	2.46	Hasil Pendataan Kondisi Bangunan Gedung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-73
Tabel	2.47	Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	II-76
Tabel	2.48	Pembangunan Baru Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....	II-76

Tabel	2.49	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024	II-78
Tabel	2.50	Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 melalui APBD Provinsi	II-78
Tabel	2.51	Sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	II-79
Tabel	2.52	Capaian Kualitas Pelayanan Transportasi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2024.....	II-79
Tabel	2.53	Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....	II-80
Tabel	2.54	Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-81
Tabel	2.55	Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2020 – 2024.....	II-81
Tabel	2.56	Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2024	II-82
Tabel	2.57	Perkembangan Pelayanan ASDP Tahun 2020 – 2024	II-83
Tabel	2.58	Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara Tahun 2020 – 2024.....	II-84
Tabel	2.59	Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024.....	II-84
Tabel	2.60	Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024.....	II-85
Tabel	2.61	Perlengkapan Jalan Terpasang Tahun 2020 – 2024	II-85
Tabel	2.62	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan Ruas Jalan Provinsi 2023-2024.....	II-86
Tabel	2.63	Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022 - 2024.....	II-86
Tabel	2.64	Pelaksanaan Ramp Check di Terminal Tipe B Jawa Tengah Tahun 2022-2024.....	II-86
Tabel	2.65	Perlintasan Rel Kereta Api di Jawa Tengah Tahun 2024.....	II-87
Tabel	2.66	Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	II-87
Tabel	2.67	Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan Tahun 2024.....	II-88
Tabel	2.68	Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Tahun 2020 – 2024.....	II-89
Tabel	2.69	Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Tahun 2021 – 2024.....	II-89
Tabel	2.70	Rekapitulasi Perbandingan Pendapatan dan Biaya Operasional Layanan Trans Jateng Tahun 2018-2024	II-90
Tabel	2.71	Operasional dan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 - 2024.....	II-90
Tabel	2.72	Penumpang Masa Angkutan Lebaran dan Nataru Tahun 2019-2024.....	II-91
Tabel	2.73	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Tahun 2024	II-97
Tabel	2.74	Perkembangan Komponen Indeks Ketimpangan Gender 2020-2024.....	II-99
Tabel	2.75	Perkembangan Komponen IPG 2019-2024 Provinsi Jawa Tengah	II-101

Tabel	2.76	Perkembangan Komponen Indeks Ketimpangan Gender 2018-2022.....	II-101
Tabel	2.77	Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018 – 2023.....	II-102
Tabel	2.78	Capaian Partisipasi Pendidikan Menengah di Jawa Tengah (Persen)	II-103
Tabel	2.79	Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....	II-103
Tabel	2.80	Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024	II-104
Tabel	2.81	Persentase Pendidik yang Tersertifikasi Pada Jenjang Pendidikan Menengah di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)	II-104
Tabel	2.82	Persentase Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)	II-109
Tabel	2.83	Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2021-2023.....	II-111
Tabel	2.84	Prevalensi Stunting Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-112
Tabel	2.85	Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....	II-113
Tabel	2.86	Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024.....	II-114
Tabel	2.87	Cakupan Kepesertaan UHC Tahun 2024.....	II-114
Tabel	2.88	Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-116
Tabel	2.89	Jumlah dan Kondisi Bangunan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-117
Tabel	2.90	Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-117
Tabel	2.91	Pembentukan SLRT Desa/Kelurahan 2023-2024	II-118
Tabel	2.92	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....	II-123
Tabel	2.93	Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024	II-124
Tabel	2.94	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%).....	II-125
Tabel	2.95	Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....	II-125
Tabel	2.96	Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....	II-126
Tabel	2.97	Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024	II-126
Tabel	2.98	Jumlah Not in Employment, Education or Training (NEET) di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024	II-127
Tabel	2.99	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2019 - 2024	II-127

Tabel 2.100	Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024	II-129
Tabel 2.101	Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Di Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-129
Tabel 2.102	Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak 2020-2024	II-130
Tabel 2.103	Data Perkawinan Usia Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-131
Tabel 2.104	Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024.....	II-132
Tabel 2.105	Perkembangan Tribina 2020-2024	II-133
Tabel 2.106	Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 2024	II-135
Tabel 2.107	Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah pada Kejuaraan Tingkat Nasional.....	II-136
Tabel 2.108	Capaian Indeks Pembangunan Olahraga Jawa Tengah Tahun 2024	II-137
Tabel 2.109	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024 (Orang)	II-137
Tabel 2.110	Koleksi Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	II-138
Tabel 2.111	Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....	II-140
Tabel 2.112	Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-147
Tabel 2.113	Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....	II-149
Tabel 2.114	Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024.....	II-149
Tabel 2.115	Penanganan Lahan Kritis (Penanaman/ Vegetatif) di Jawa Tengah	II-150
Tabel 2.116	Penanganan Lahan Kritis (Sipil Teknis/ Bangunan KTA) di Jawa Tengah	II-151
Tabel 2.117	Perkembangan Kelembagaan Desa Peduli DAS Lestari di Jawa Tengah	II-151
Tabel 2.118	Rehabilitasi Mangrove Di Jawa Tengah	II-151
Tabel 2.119	Kerusakan Kawasan Hutan di Jawa Tengah	II-152
Tabel 2.120	Produksi Kayu di Jawa Tengah	II-153
Tabel 2.121	Penggunaan Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK di Jawa Tengah	II-153
Tabel 2.122	Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah.....	II-154
Tabel 2.123	Perkembangan Nilai Transaksi Ekonomi KTH di Jawa Tengah	II-154
Tabel 2.124	Perkembangan Nilai Ekonomi KUPS di Jawa Tengah.....	II-155
Tabel 2.125	Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2019-2024	II-157
Tabel 2.126	Perkembangan <i>Good Mining Practice</i> (GMP) di Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024.....	II-158

Tabel 2.127	Update Status RTRW Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Tengah Per 3 November 2025.....	II-159
Tabel 2.128	Progress Legislasi RDTR Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Per 3 November 2025 terdapat 64 RDTR yang sudah (3)Perda/(61)Perkada	II-163
Tabel 2.129	Rata – Rata Luasan RTH Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023.....	II-167
Tabel 2.130	Tabel Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang Tahun 2024	II-168
Tabel 2.131	Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....	II-173
Tabel 2.132	Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....	II-174
Tabel 2.133	Indeks Ketersediaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....	II-178
Tabel 2.134	Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-201
Tabel 2.135	Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020– 2024.....	II-202
Tabel 2.136	Jumlah Korban Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024.....	II-202
Tabel 2.137	Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024	II-203
Tabel 2.138	Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-203
Tabel 2.139	Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2024.....	II-204
Tabel 2.140	Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024	II-205
Tabel 2.141	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2020 - 2024	II-205
Tabel 2.142	Data Bantuan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024.....	II-205
Tabel 2.143	Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-208
Tabel 2.144	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.....	II-213
Tabel 2.145	Program/ Indikator Kinerja Tingkat Capaian Kinerja 2020-2024.....	II-214
Tabel 2.146	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	II-215
Tabel 2.147	Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/ Implementasi Penelitian Tahun 2019-2024	II-217
Tabel 2.148	Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng yang difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant Tahun 2019-2023.....	II-218
Tabel 2.149	Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-219
Tabel 2.150	Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-219
Tabel 2.151	Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Jawa Tengah.....	II-220

Tabel 2.152	Lembaga/SDM Kesenian Berdasarkan Wilayah Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2024.....	II-220
Tabel 2.153	Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Jawa Tengah Tahun 2024.....	II-221
Tabel 2.154	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019-2023.....	II-222
Tabel 2.155	Jumlah Pengunjung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-222
Tabel 2.156	Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....	II-223
Tabel 2.157	Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024	II-224
Tabel 2.158	Jumlah ASN Berdasarkan Usia Tahun 2024	II-224
Tabel 2.159	Jumlah Fasilitasi Tugas Belajar PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....	II-225
Tabel 2.160	Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2019-2024	II-225
Tabel 2.161	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Tahun 2024.....	II-230
Tabel 2.162	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023	II-235
Tabel 2.163	Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....	II-236
Tabel 2.164	Penetapan lokasi aktif Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah Tahun 2024.....	II-238
Tabel 2.165	Capaian Penerbitan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024.....	II-239
Tabel 2.166	Capaian Kinerja urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-239
Tabel 2.167	Pelatihan Yang Telah Dilakukan dalam Rangka Mendukung Akses Reforma Agraria.....	II-241
Tabel 2.168	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....	II-243
Tabel 2.169	Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPKD Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPD Tahun 2024 - 2026	II-244
Tabel 3.1	Kinerja dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global (%)	III-1
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026	III-5
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024.....	III-8
Tabel 3.1	Kinerja dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global (%)	III-1
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026	III-5
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024.....	III-8
Tabel 3.4	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024 (%).....	III-9

Tabel	3.5 Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	III-10
Tabel	3.6 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....	III-10
Tabel	3.7 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2024.....	III-12
Tabel	3.8 Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	III-13
Tabel	3.9 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....	III-16
Tabel	3.10 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024.....	III-17
Tabel	3.11 Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	III-17
Tabel	3.12 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....	III-17
Tabel	3.13 Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....	III-18
Tabel	3.14 Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	III-19
Tabel	3.15 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	III-20
Tabel	3.16 Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	III-21
Tabel	3.17 Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Triwulan II Tahun 2025	III-23
Tabel	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2026.....	IV-1
Tabel	4.2 Telaah Terhadap Pokok – Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....	IV-3
Tabel	4.3 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Daerah Tahun 2026.....	IV-11
Tabel	4.4 Keselarasan Kebijakan RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026.....	IV-12
Tabel	4.5 Dukungan Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026 Terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2026.....	IV-14
Tabel	4.6 Penjabaran Program Prioritas	IV-27
Tabel	4.7 Penjabaran Program Intervensi	IV-30
Tabel	4.8 Penjabaran Program Aksi.....	IV-35
Tabel	4.9 Penjabaran Program Taktis.....	IV-43
Tabel	4.10 Penjabaran Prioritas Daerah Tahun 2026	IV-51
Tabel	4.11 Penjabaran Program Strategis Nasional (ProSN)	IV-269
Tabel	5.1 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024.....	V-1
Tabel	5.2 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024.....	V-3
Tabel	5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024.....	V-4
Tabel	5.4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2024.....	V-5

Tabel	5.5	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah	V-12
Tabel	5.6	Target Capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026.....	V-30
Tabel	6.1	Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	VI-29
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....	VII-1
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	VII-2
Tabel	7.3	Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	VII-12

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Hubungan Antar Dokumen	I-6
Gambar	2.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah	II-1
Gambar	2.2	Peta Evaluasi Curah Hujan Bulan Desember 2024 Jawa Tengah.....	II-3
Gambar	2.3	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024.....	II-16
Gambar	2.4	Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2024	II-17
Gambar	2.5	Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....	II-18
Gambar	2.6	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun (2020-2024)	II-19
Gambar	2.7	Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah Tahun (2020-2024).....	II-20
Gambar	2.8	Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	II-21
Gambar	2.9	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2024 (c-to-c)	II-23
Gambar	2.10	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Se-Pulau Jawa Tahun 2024 (c-to-c, %).....	II-23
Gambar	2.11	Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (c-to-c, %)	II-24
Gambar	2.12	Kontribusi dan Pertumbuhan Perekonomian Jawa Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2024 (%).....	II-25
Gambar	2.13	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 (persen)	II-28
Gambar	2.14	Peranan/Kontribusi Kabupaten/Kota Terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (persen)	II-29
Gambar	2.15	Peranan/Kontribusi Kabupaten/Kota Terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (persen)	II-30
Gambar	2.16	PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2022-2024	II-31
Gambar	2.17	Rata-Rata PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 (Juta Rupiah).....	II-34
Gambar	2.18	Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2024 (%).....	II-35
Gambar	2.19	Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-35
Gambar	2.20	Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-36
Gambar	2.21	Indeks Williamson Per Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.....	II-37
Gambar	2.22	Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Komponen Pembentuk Tahun 2022 dan 2023.....	II-37
Gambar	2.23	Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Pilar Tahun 2023	II-38

Gambar 2.24	Capaian Skor IDSD Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	II-38
Gambar 2.25	Jumlah Kepeminatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Asal Negara	II-41
Gambar 2.26	Jumlah Kepeminatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Sektor	II-41
Gambar 2.27	Jumlah Izin yang Diterbitkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024	II-42
Gambar 2.28	Nilai PMTB dan Kontribusi PMTB Terhadap PDRB Jawa Tengah (ADHB) Tahun 2019 – 2024 (%)	II-43
Gambar 2.29	Nilai ICOR dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.....	II-44
Gambar 2.30	Perkembangan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai di Jawa Tengah Tahun 2021-2025.....	II-45
Gambar 2.31	Perkembangan Produksi Bawang Merah dan Cabai Besar Tahun 2021-2025	II-46
Gambar 2.32	Perkembangan Produksi Tebu, Kopi, Kelapa Tahun 2021-2025	II-46
Gambar 2.33	Perkembangan Produksi Daging, Susu, Telur Tahun (2020-2024)	II-47
Gambar 2.34	Perkembangan Populasi Sapi Potong, Kambing, dan Ayam Tahun (2020-2024)	II-48
Gambar 2.35	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-49
Gambar 2.36	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-51
Gambar 2.37	Produksi Garam (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-52
Gambar 2.38	Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-52
Gambar 2.39	Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2024 (%).....	II-69
Gambar 2.40	Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m3) Tahun 2019 – 2024	II-71
Gambar 2.41	Penanganan RTLH Provinsi Jawa Tengah status Desember 2024	II-77
Gambar 2.42	Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah	II-80
Gambar 2.43	Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah	II-82
Gambar 2.44	Peta Jaringan Loop Rel Kereta Api di Jawa Tengah.....	II-84
Gambar 2.45	Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2023 dan 2024.....	II-92
Gambar 2.46	IPM Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-94
Gambar 2.47	Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024.....	II-95
Gambar 2.48	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-96
Gambar 2.49	Perkembangan IKG Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-98
Gambar 2.50	Perkembangan IDG Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-99

Gambar 2.51	Perkembangan Komponen IDG Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-100
Gambar 2.52	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024	II-105
Gambar 2.53	Tren Kasus Kematian Ibu Tahun 2020-2024.....	II-106
Gambar 2.54	Tren Kasus Kematian Bayi Tahun 2020-2024	II-107
Gambar 2.55	Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2020-2024	II-107
Gambar 2.56	Tren Kasus Balita Gizi Buruk (BB/TB) Tahun 2020 -2024	II-108
Gambar 2.57	Angka Prevalensi Stunting Berdasarkan SKI Tahun 2023	II-110
Gambar 2.58	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2024 (Februari-Agustus) (%)	II-119
Gambar 2.59	Peta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	II-119
Gambar 2.60	Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2024.....	II-120
Gambar 2.61	Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agustus 2024	II-120
Gambar 2.62	TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%).....	II-121
Gambar 2.63	Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024 (%)	II-121
Gambar 2.64	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2018-2024(Juta Rupiah)	II-122
Gambar 2.65	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2024 (Juta Rupiah)	II-123
Gambar 2.66	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2024 (%).....	II-124
Gambar 2.67	Nilai IPLM Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-139
Gambar 2.68	Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Air Provinsi Jawa Tengah	II-141
Gambar 2.69	Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah	II-142
Gambar 2.70	Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Pangan Provinsi Jawa Tengah	II-142
Gambar 2.71	Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah	II-143
Gambar 2.72	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024.....	II-144
Gambar 2.73	Peta Kerentanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	II-145
Gambar 2.74	Tren Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2023.....	II-146
Gambar 2.75	Kontribusi Sektor Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (%)	II-146
Gambar 2.76	Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah	II-156
Gambar 2.77	Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah dan DIY.....	II-170
Gambar 2.78	Sebaran Pembangkit Operasi 150-500 KV di Jawa Tengah dan DIY	II-170
Gambar 2.79	Sebaran Pembangkit Operasi 20 KV di Jawa Tengah dan DIY	II-171
Gambar 2.80	Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2024 (GWh)	II-172

Gambar 2.81	Program Listrik Gratis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2024 Tahunan (Unit).....	II-173
Gambar 2.82	Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2024.....	II-175
Gambar 2.83	Potensi Teknis EBT Jawa Tengah.....	II-176
Gambar 2.84	Peta Infrastruktur dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Region III	II-177
Gambar 2.85	Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Semarang-Demak	II-179
Gambar 2.86	Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Pekalongan-Pemalang	II-180
Gambar 2.87	Land subsidence rate in the North Coast of Central Java Indonesia based on Sentinel-1 SAR data in 2016–2021	II-181
Gambar 2.88	Pembangunan Infrastruktur Konservasi Air Tanah.....	II-182
Gambar 2.89	Peta Bahaya Banjir Provinsi Jawa Tengah.....	II-183
Gambar 2.90	Peta Bahaya Banjir Bandang Provinsi Jawa Tengah	II-184
Gambar 2.91	Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Provinsi Jawa Tengah	II-185
Gambar 2.92	Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Provinsi Jawa Tengah.....	II-186
Gambar 2.93	Peta Bahaya Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah	II-187
Gambar 2.94	Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah.....	II-188
Gambar 2.95	Peta Bahaya Kekeringan Provinsi Jawa Tengah.....	II-189
Gambar 2.96	Peta Bahaya Tanah Longsor Provinsi Jawa Tengah	II-190
Gambar 2.97	Peta Bahaya Tsunami Provinsi Jawa Tengah.....	II-191
Gambar 2.98	Peta Bahaya Epidemi Provinsi Jawa Tengah.....	II-192
Gambar 2.99	Peta Bahaya Kegagalan Teknologi Provinsi Jawa Tengah.....	II-193
Gambar2.100	Peta Bahaya Covid-19 Provinsi Jawa Tengah.....	II-194
Gambar2.101	Peta Bahaya Likuifaksi Provinsi Jawa Tengah	II-195
Gambar2.102	Peta Bahaya Letusan Gunung Api Dieng	II-196
Gambar2.103	Peta Bahaya Letusan Gunung Api Lawu.....	II-196
Gambar2.104	Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merapi	II-197
Gambar2.105	Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merbabu	II-198
Gambar2.106	Peta Bahaya Letusan Gunung Api Slamet	II-198
Gambar2.107	Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sumbing	II-199
Gambar2.108	Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sindoro.....	II-200
Gambar2.109	Peta Bahaya Letusan Gunung Api Ungaran.....	II-200
Gambar2.110	Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah.....	II-203
Gambar2.111	Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-206
Gambar2.112	Hasil Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-208
Gambar2.113	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-209
Gambar2.114	Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-211
Gambar2.115	Penghargaan tertinggi Nasional SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia	II-212

Gambar2.116	Presentase Penduduk yang Terfasilitasi Pengurusan Dokumen KTP-el (%) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-226
Gambar2.117	Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (%)	II-227
Gambar2.118	Presentase Jumlah Data Kependudukan yang Terintegrasi dalam Sistem IKD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-228
Gambar2.119	Klasifikasi Tingkat Kemandirian Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (Persen).....	II-230
Gambar2.120	Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2023 dan 2024.....	II-231
Gambar2.121	Presentase Desa yang Memiliki Pasar Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	II-232
Gambar2.122	Jumlah Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) Di Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-233
Gambar2.123	Sebaran Jumlah Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-233
Gambar2.124	Sebaran Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-234
Gambar2.125	Indeks Integritas Nasional Jawa Tengah dibandingkan Nasional Tahun 2021-2023.....	II-237
Gambar2.126	Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023.....	II-243
Gambar 4.1	Kegiatan Dokter Spesialis Keliling	IV-270
Gambar 5.1	Infografis tentang Sebaran Kondisi Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi yang disandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah	V-7
Gambar 5.2	Infografis tentang Sebaran Kondisi Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi yang dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah	V-8
Gambar 5.3	Infografis Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....	V-9
Gambar 5.4	Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah.....	V-10
Gambar 5.5	Pembagian Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	V-11

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada Tahun 2024 menandai terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini ditegaskan dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025, yang mengakomodir visi, misi serta program Kepala Daerah terpilih. Sehingga perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 merupakan implementasi tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029.

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 disusun juga dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029. Dengan demikian, RKPD Tahun 2026 mendukung pencapaian Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih serta Program Prioritas Nasional.

Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipedomani dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2026 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan-peraturan turunannya. Selain itu beberapa permendagri yang juga dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 yaitu Permendagri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 juga memperhatikan proyeksi target dalam RKPD Tahun 2025. Dalam RKPD Tahun 2026 juga memuat hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2025, disamping rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berpedoman pada kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 diarahkan dalam rangka “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”, upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi antara lain: (1) peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan; (2) penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan; (3) pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (4) penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal; (5) pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan; (6) penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; (7) peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*); (8) pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah”, dengan prioritas daerah meliputi: (1) Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah; (2) Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif Dan Berbasis Lingkungan; dan (3) Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter. Selanjutnya, RKPD Tahun 2026 disusun dengan menyinergikan program strategis Jawa Tengah dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antarwilayah, lintas sektor, dan *pentahelix* pelaku pembangunan. Pengembangan pola kerja sama antarwilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah Jawa Tengah.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), bawah-atas (*bottom-up*),

serta berorientasi tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Selain itu penyusunan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result*, berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen RKPD Tahun 2026 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 meliputi: 1) Persiapan yaitu penyampaian surat edaran Gubernur Jawa Tengah tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan, serta pedoman penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2026; 2) Konsultasi publik sekaligus pembukaan masa musrenbang; 3) Forum perangkat daerah; 4) Musrenbang wilayah (musrenbangwil) dan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah (rakortekrenbangda); 5) Musrenbang provinsi; 6) Fasilitasi RKPD Tahun 2026 oleh Kemendagri; 7) Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan DPRD dalam bentuk dialog interaktif eksekutif dan legislatif; dan 8) Penetapan RKPD Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

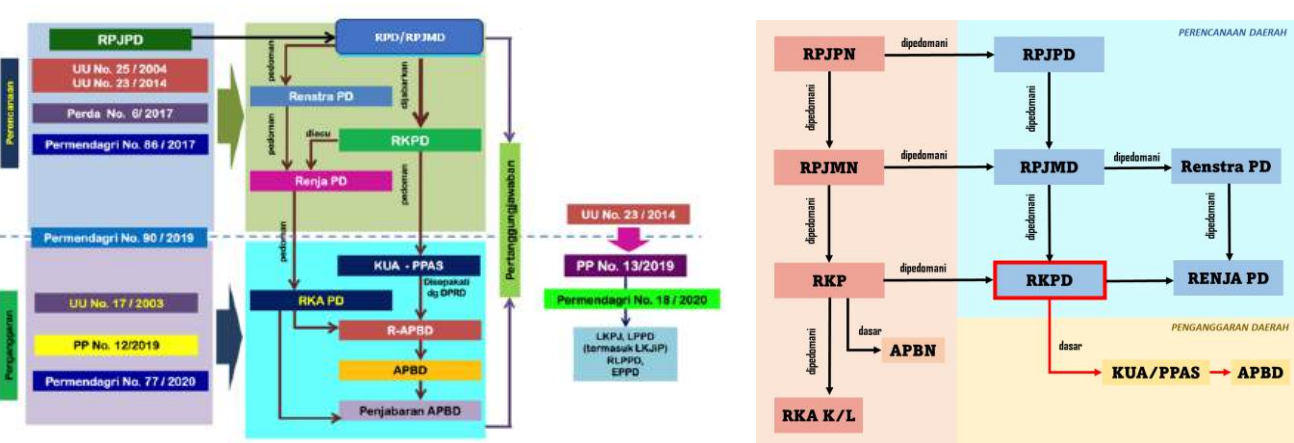
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 12; Tambahan Lembaran Daerah 153);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361).

1.3. Hubungan Antar dokumen

Dokumen RKPD menjadi bagian dari proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban dalam manajemen pembangunan berkelanjutan. Dalam penyusunannya, RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan berpedoman dengan RKP Tahun 2026. Dimana kemudian RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). RKPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS pada tahapan penganggaran. Selanjutnya pada saat pertanggungjawaban, dokumen RKPD akan dipertanggungjawabkan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah (LKPD), sehingga RKPD sebagai dokumen tahunan memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran hingga pertanggungjawaban.



Sumber: diolah

Gambar 1.1.
Hubungan Antardokumen

Penyusunan dokumen RKPD memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/ *sustainable development goals* (SDGs), rancangan *road map* reformasi birokrasi, strategi penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan *stunting*, pangan dan gizi, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengurangan risiko bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2026.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026; dan
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

- Provinsi Jawa Tengah yang tertuang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026; dan
 3. Menjadi acuan penyalarsan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota.

1.5. Sistematika

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

1. **Buku I**, dokumen RKPD Tahun 2026 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antardokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2024 dan capaian RPJMD sampai dengan tahun 2024; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi perekonomian daerah; arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dalam RPJMD, telaah pokok pikiran, keselarasan prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta inovasi pembangunan daerah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi sebagai panduan penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

2. **Buku II**, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, terdiri dari:
 - 1) Capaian Indikator Kinerja Utama;
 - 2) Capaian Indikator Kinerja Daerah;
 - 3) Capaian Indikator Kinerja Program.
3. **Buku III**, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

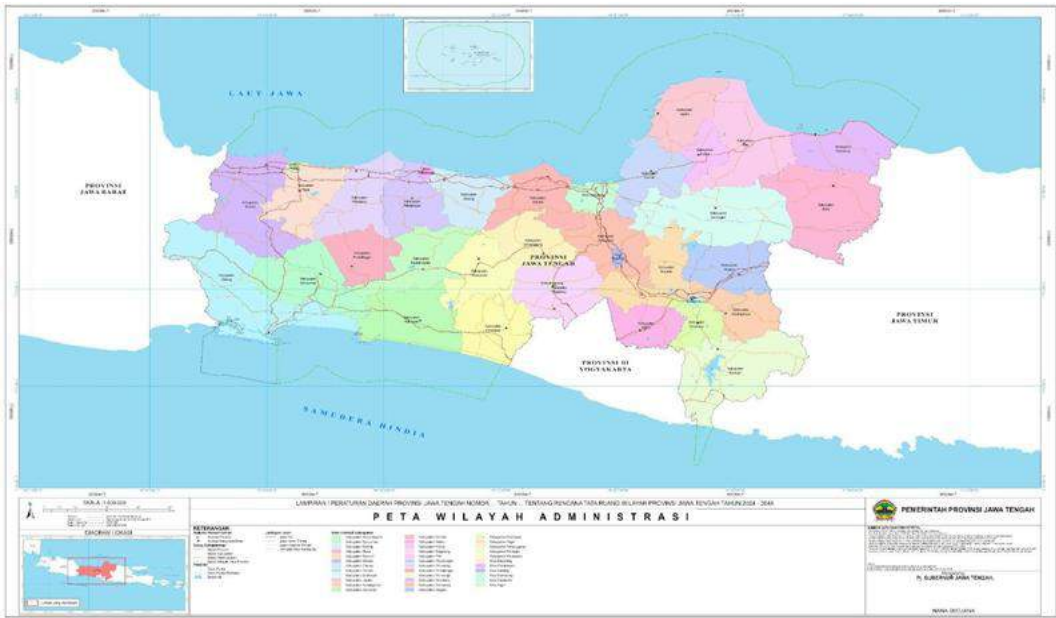
Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km² atau sebesar 25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Secara administrasi terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan, serta meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, Provinsi DIY pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Laut Jawa pada bagian utara, dan Samudera Hindia pada bagian Selatan.

b. Letak Geografis dan Kondisi Topografi

Secara geografis terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur, sehingga secara ekonomi posisi sangat strategis karena berada di antara dua titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta – Surabaya). Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Topografi wilayahnya sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Dengan kemiringan lereng yang beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.



Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah. 2023

Gambar 2.1.

Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

c. Kondisi Geologi

Kondisi geologi terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api rata-rata mempunyai tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Jenis tanah meliputi *organosol*, *alluvial*, *planosol*, *litosol*, *regosol*, *andosol*, *grumosol*, *mediteran*, *latosol*, *podsolik*, dan didominasi jenis tanah *latosol*, *aluvial*, serta *gromosol* yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Potensi sumber daya mineral yang tersebar meliputi 32 jenis mineral non logam (*Phospat*, *Asbes*, *Talk*, *Mika*, *Leusite*, *Oker*, *Granit*, *Dasit*, *Diorit*, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, *Kaolin*, *Feldspar*, *Gips*, *Bentonite*, Batuapung, *Trass*, *Diatome*, *Marmer*, Batu gamping, *Dolomit*, *Basal*, *Andesit*, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, *Kalsit*, *Zeolit*, Sirtu, Batu Sabak, *Toseki*), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

d. Kondisi Hidrologi

Jawa Tengah memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak dengan 18 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas untuk dipulihkan yaitu DAS Serayu, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Progo (Jateng, DIY), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Citanduy (Jabar, Jateng), DAS Bodri, DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Garang, DAS Serang, DAS Babakan, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Comal, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Luk Ulo, dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Dalam Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Jawa Tengah terdapat 10 (sepuluh) Wilayah Sungai (WS) yang kewenangan pengelolaannya terbagi pada kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Sungai yang pengelolaannya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah Wilayah Sungai Pemali Comal (panjang sungai 930,44 km dan luas DAS 4.425,36 km²) dan Wilayah Sungai Bodri Kuto (panjang sungai 355,03 km dan luas DAS 1.647,40 km²). Sedangkan 6 (enam) WS lainnya merupakan WS kewenangan Pusat dan 2 (dua) WS kewenangan kabupaten/kota.

Tabel 2.1.
Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah

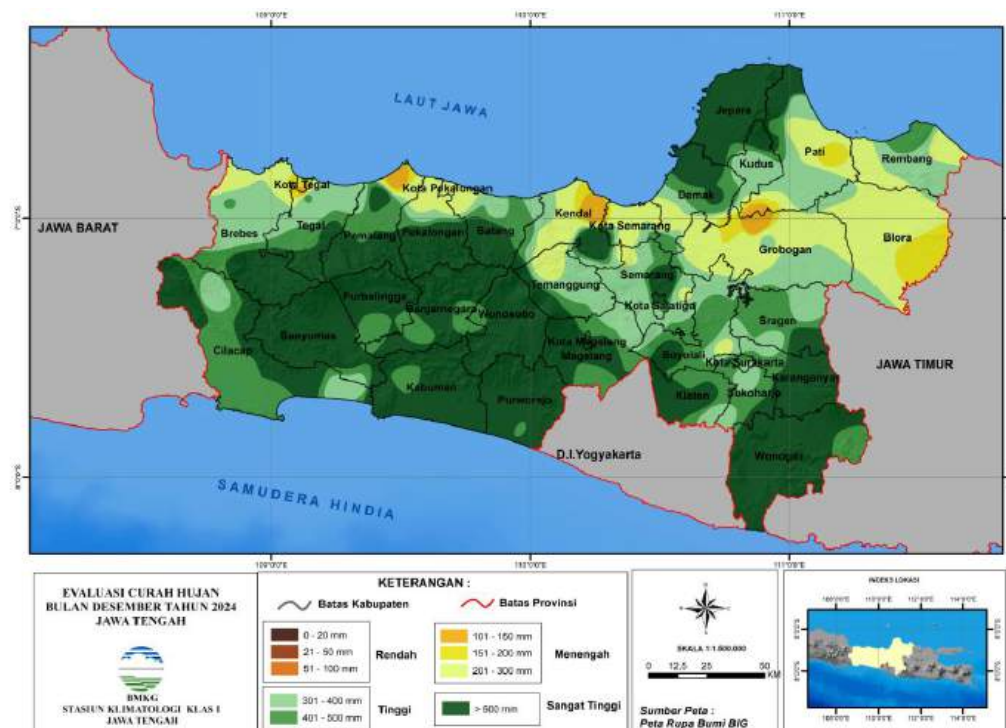
Kewenangan	Wilayah Sungai	Luas DAS (km²)
Pusat	Cimanuk Cisanggarung	6.888,35
	Jratun Seluna	9.576,01
	Bengawan Solo	19.778,00
	Progo Opak Serang	3.238,89
	Serayu Bogowonto	7.344,61
	Citanduy	4.450,44
Provinsi	Pemali Comal	4.425,36
	Bodri Kuto	1.647,40
Kabupaten/Kota	Wiso Gelis	654,27

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015

e. Kondisi Klimatologi

Suhu udara rata-rata tahun 2023 berkisar antara 26,7°C sampai dengan 30,4°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 67,0 persen sampai dengan 87,0 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Geofisika Banjarnegara yaitu sebesar 2.799 mm3 dan hari hujan terbanyak juga tercatat di Stasiun Geofisika Banjarnegara sebanyak 161 hari.

Berdasarkan hasil evaluasi curah hujan oleh BMKG Stasiun Klimatologi Klas I Jawa Tengah pada bulan Desember 2024, curah hujan di Jawa Tengah umumnya berkisar antara 301–500 mm bahkan hingga >500 mm. Kecuali sebagian wilayah timur laut Kab. Brebes, Kota Tegal; sebagian wilayah timur laut Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kab. Kendal, Kota Semarang, Kab. Grobogan, Kab. Pati, Kab. Blora dan wilayah barat dan timur Kab. Rembang Curah Hujan 101-300 mm.



Sumber: Peta Rupa Bumi BIG, 2024

Gambar 2.2.
Peta Evaluasi Curah Hujan Bulan Desember 2024
Jawa Tengah

f. Penggunaan Lahan

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.438.683,70 hektar. Penggunaan lahan paling besar adalah sawah dengan luas 1.181.758,99 hektar (34,39%), dan luas penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah Kebun dengan luas 638.419,21 hektar (18,58%) dan Permukiman seluas 558.687,35 hektar (16,26%). Luas lahan sawah provinsi di Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2016, karena pada tahun tersebut luas lahan sawah sebesar 991.524 hektar (30,47). Penambahan luas lahan sawah merupakan salah satu komitmen Jawa Tengah dalam menjaga ketahanan pangan. Penggunaan lahan di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Cagar Alam	2.770,02	0,08
2	Danau	16.731,58	0,49
3	Hutan Lindung	86.866,17	2,53
4	Hutan Produksi Terbatas	181.439,19	5,28
5	Hutan Produksi Tetap	366.459,45	10,66
6	Industri	10.547,83	0,31
7	Kebun	638.419,21	18,58
8	Lahan Terbuka	5.179,25	0,15
9	Mangrove	2.894,14	0,08
10	Pasir Darat	178,62	0,01
11	Permukiman	558.687,35	16,26
12	Sawah	1.181.758,99	34,39
13	Semak	30.941,91	0,90
14	Suaka Margasatwa	102,48	0,00
15	Sungai	23.718,78	0,69
16	Taman Hutan Raya	2.318	0,01
17	Taman Nasional	11.888,17	0,35
18	Taman Nasional Laut	183,65	0,01
19	Taman Wisata Alam	216,39	0,01
20	Tambak	56.925,79	1,66
21	Tegalan	260.456,73	7,58
	TOTAL	3.438.683,70	100,00

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022

g. Potensi Pengembangan Wilayah

Setiap wilayah di Jawa Tengah memiliki potensi dan karakter yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, beberapa wilayah harus tetap dilindungi dan dipertahankan dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alamnya.

Dalam upaya pengembangan potensi wilayah di Jawa tengah, sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044, telah terbagi 10 (sepuluh) wilayah pengembangan yang terdiri dari Wilayah Pengembangan (WP) WP Bregasmalang, WP Petanglong, WP Kedungsepur, WP Jekuti, WP Banglor, WP Subosukawonosraten, WP Gelangmanggung, WP Wonobanjar, WP Keburejo, dan WP Cibalingmas.

Potensi wilayah secara umum tertuang dalam Arahana penataan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044 yang terbagi sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dibawah ini:

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, penggaraman, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, permukiman, pembuangan hasil pengerukan di laut, serta transportasi.

a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 550.351 hektar yang tersebar di 29 kabupaten dan Kota Semarang.

b) Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan perkebunan rakyat seluas 578.861 hektar berada di 29 kabupaten dan Kota Semarang

c) Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian seluas $\pm$ 1.325.499 hektar yang diarahkan dikembangkan di 29 Kabupaten dan 4 Kota (kecuali Kota Surakarta dan Kota Magelang) di Jawa Tengah. Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas paling sedikit 1.025.255 hektar.

d) Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan seluas $\pm$ 1.434.663 hektar, terbagi menjadi

- 1) perikanan budi daya di darat berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
- 2) perikanan budi daya di laut berada di Kabupaten Jepara.
- 3) perikanan tangkap di laut berada di pesisir utara dan pesisir selatan Jawa Tengah.

e) Kawasan Penggaraman

Kawasan Penggaraman dengan luas $\pm$ 9.460 hektar yang berada di Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Demak.

f) Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan luas $\pm$ 15.843 hektar yang terbagi menjadi:

- 1) wilayah pertambangan di darat yang meliputi pengelolaan wilayah pertambangan di Kendeng Selatan; Kendeng Muria; Semarang-Demak; Ungaran- Telomoyo; Solo dan sekitarnya; Merapi; Serayu Selatan; Serayu Tengah; Slamet Selatan; Slamet Utara; Serayu Utara; dan Sewu Lawu.
- 2) kawasan panas bumi yang meliputi Wilayah Kerja Panas Bumi di wilayah Dataran Tinggi Dieng; wilayah Candi Umbul Telomoyo; Wilayah Gunung Ungaran; Wilayah Gunung Lawu; Wilayah Baturraden; dan Wilayah Guci.

g) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri dengan luas ± 53.530 hektar berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Semarang.

h) Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata dengan luas ± 2.329 hektar meliputi:

- 1) Kawasan strategis pariwisata Nasional (KSPN) yaitu pada KSPN Borobudur dan sekitarnya; KSPN Dieng dan sekitarnya; KSPN Merapi-Merbabu dan sekitarnya; KSPN Karimunjawa dan sekitarnya; KSPN Sangiran dan sekitarnya; dan KSPN Karst Pacitan dan sekitarnya
- 2) Kawasan Pariwisata Provinsi yang tersebar pada Destinasi Pariwisata Baturraden dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Solo-Sangiran dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Borobudur-Dieng dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Tegal-Pekalongan dan sekitarnya; dan Destinasi Pariwisata Rembang-Blora dan sekitarnya.

i) Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan luas ± 744.587 hektar.

j) Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut

Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut dengan luas ± 5.575 hektar berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, dan perairan pesisir sekitar Kota Semarang.

k) Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi dengan luas ± 68.575 hektar berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, Kota Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kota Semarang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang, perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kota Tegal, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes.

l) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan luas ± 4.231 hektar berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten

Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung terdiri atas Badan air; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan konservasi; kawasan pencadangan konservasi di laut; kawasan Cagar Budaya; dan kawasan ekosistem mangrove.

a) Badan Air

Badan air dengan luas ± 25.840 hektar berupa badan air sungai, danau, embung, dan waduk berada di seluruh Kabupaten/Kota.

b) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan luas ± 83.803 hektar berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosobo.

c) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat dengan luas ± 16.020 hektar berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosobo.

d) Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi darat dan laut pesisir dengan luas ± 139.059 hektar tersebar pada:

- 1) Kabupaten Cilacap meliputi Cagar Alam Nusakambangan Barat, Cagar Alam Nusakambangan Timur, dan Taman Wisata Alam Gunung Selok;
- 2) Kabupaten Banjarnegara meliputi Cagar Alam Telogo Dringo, Cagar Alam Telogo Sumurup, dan Cagar Alam Pringombo I dan II;
- 3) Kabupaten Wonosobo berupa Cagar Alam Pantodomas dan Taman Wisata Alam Telogo Warno/Pengilon;
- 4) Kabupaten Wonogiri berupa Cagar Alam Donoloyo dan Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegara I/ Ngargoyoso;
- 5) Kabupaten Sragen berupa Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan;
- 6) Kabupaten Blora meliputi Cagar Alam Bekutuk dan Cagar Alam Cabak I/II;

- 7) Kabupaten Rembang berupa Cagar Alam Gunung Butak, Cagar Alam Sumber Semen, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Karang Jahe;
 - 8) Kabupaten Jepara meliputi Cagar Alam Keling I, Cagar Alam Keling II/III, Cagar Alam Kembang, Cagar Alam Gunung Celing, Taman Nasional Karimunjawa, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Panjang;
 - 9) Kabupaten Demak berupa Kawasan Konservasi di Perairan di wilayah Betahwalang;
 - 10) Kabupaten Semarang meliputi Cagar Alam Gebugan, Cagar Alam Sepakung, dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
 - 11) Kabupaten Kendal berupa Cagar Alam Pager Wunung Darupono;
 - 12) Kabupaten Batang meliputi Cagar Alam Peson Subah I, Cagar Alam Peson Subah II, Cagar Alam Kecubung Ulolanang, dan Kawasan Konservasi Ujungnegoro;
 - 13) Kabupaten Pemalang meliputi Cagar Alam Bantarbolang, Cagar Alam Curug Bengkawah, dan Cagar Alam Moga;
 - 14) Kabupaten Tegal berupa Cagar Alam Sub Vak 18 C/19 B, Taman Wisata Alam Guci, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Karang Jeruk;
 - 15) Kabupaten Brebes berupa Cagar Alam Telogo Ranjeng;
 - 16) Kabupaten Magelang berupa Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
 - 17) Kabupaten Boyolali berupa Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
 - 18) Kabupaten Klaten berupa Taman Nasional Gunung Merapi; dan
 - 19) Kabupaten Karanganyar berupa Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegara I/Ngargoyoso dan Taman Wisata Alam Grojogan Sewu.
- e) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut
- Kawasan pencadangan konservasi di laut dengan luas $\pm$ 13.291 hektar berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kebumen, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap.
- f) Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Cagar Budaya dengan luas $\pm$ 133 hektar berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.
- g) Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan ekosistem mangrove dengan luas $\pm$ 12.684 hektar berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kota Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang perairan pesisir sekitar Kabupaten Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kabupaten

Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang.

2.2.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebanyak 37.892.283 jiwa, naik sebesar 1,37 juta jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada Tahun 2020 yaitu sebesar 36.516.035. Dengan laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2024 (Juni) yaitu 0,99% per tahun. Jumlah Penduduk dan Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah serta Rasio Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju pertumbuhan per tahun (%)	Rasio jenis kelamin
2020	36.516.035	1,17	101,15
2021	36.742.501	0,83	101,11
2022	37.032.410	0,81	101,07
2023	37.540.962	1,01	101,03
2024	37.892.283	0,99	101,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September), 2021-2024: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2024 (Pertengahan tahun/Juni)

Dari sisi komposisi, sejak tahun 2020 hingga 2024 penduduk Jawa Tengah masih didominasi penduduk laki laki yang ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin dikisaran 101. Tahun 2024 jumlah laki laki sebesar 19,03 juta jiwa sedangkan perempuan sebesar 18,85 juta jiwa. Jika dilihat dari umur, penduduk Jawa Tengah didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 26,2 juta jiwa sedangkan usia non produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) sebesar 11,66 juta jiwa. Hal ini menjadikan Jawa Tengah memiliki angka rasio ketergantungan dibawah 50 atau sebesar 44,50% yang menandakan Jawa Tengah masih berada pada kondisi bonus demografi.

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2024

Kelompok Umur 0-75	Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
0-4	1.440.081	1.380.947	2.821.028	104,28
5-9	1.378.561	1.315.609	2.694.170	104,79
10-14	1.395.870	1.328.217	2.724.087	105,09
15-19	1.439.699	1.353.655	2.793.354	106,36
20-24	1.460.294	1.378.228	2.838.522	105,95
25-29	1.488.880	1.407.702	2.896.582	105,77

30-34	1.474.221	1.407.917	2.882.138	104,71
35-39	1.448.588	1.402.027	2.850.615	103,32
40-44	1.394.537	1.374.008	2.768.545	101,49
45-49	1.328.158	1.341.449	2.669.607	99,01
50-54	1.211.728	1.245.766	2.457.494	97,27
55-59	1.079.549	1.133.546	2.213.095	95,24
60-64	897.410	954.994	1.852.404	93,97
65-69	699.640	749.890	1.449.530	93,30
70-74	476.014	528.313	1.004.327	90,10
75+	424.512	552.273	976.785	76,87
Total	19.037.742	18.854.541	37.892.283	100,97

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Sementara itu, mendasarkan pada kondisi sebaran luas wilayah dan jumlah penduduk kab/kota di Jawa Tengah terlihat bahwa terdapat permasalahan serius di Jawa Tengah terkait persebaran penduduk yang tidak merata. Jika melihat tabel di bawah, nampak bahwa Kota Surakarta mengalami kepadatan penduduk yang cukup besar yaitu 11.302 penduduk per Km2 disusul Kota tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Semarang. Sementara kepadatan penduduk yang relatif rendah Blora, Wonogiri, Rembang, Purworejo dan Grobogan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kepadatan penduduk berfokus pada daerah- daerah perkotaan yang notabene sebagai pusat pertumbuhan. Tentu ini menjadi tantangan bagi Jawa Tengah ke depan untuk bagaimana menciptakan persebaran penduduk yang merata dengan dukungan pembangunan/pusat pertumbuhan yang merata pula.

Tabel 2.5.
Kepadatan Penduduk per Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024

Kabupaten dan Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2024	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (jiwa per) Tahun 2024
Kabupaten Cilacap	2.027.379	2.323,93	872
Kabupaten Banyumas	1.847.097	1.391,15	1.328
Kabupaten Purbalingga	1.037.637	805,76	1.288
Kabupaten Banjarnegara	1.057.562	1.144,90	924
Kabupaten Kebumen	1.414.754	1.334,10	1.060
Kabupaten Purworejo	795.033	1.081,96	735
Kabupaten Wonosobo	920.506	1.011,62	910
Kabupaten Magelang	1.341.447	1.129,98	1.187
Kabupaten Boyolali	1.099.850	1.096,59	1.003
Kabupaten Klaten	1.292.800	701,50	1.843
Kabupaten Sukoharjo	941.650	493,53	1.908
Kabupaten Wonogiri	1.054.145	1.905,74	553
Kabupaten Karanganyar	961.909	803,05	1.198
Kabupaten Sragen	1.004.761	994,57	1.010
Kabupaten Grobogan	1.506.374	2.023,85	744
Kabupaten Blora	907.993	1.957,29	464
Kabupaten Rembang	665.237	1.037,54	641

Kabupaten dan Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2024	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (jiwa per) Tahun 2024
Kabupaten Pati	1.370.821	1.572,90	872
Kabupaten Kudus	883.322	447,44	1.974
Kabupaten Jepara	1.232.880	1.020,25	1.208
Kabupaten Demak	1.252.970	977,77	1.281
Kabupaten Semarang	1.089.767	1.019,27	1.069
Kabupaten Temanggung	814.879	864,83	942
Kabupaten Kendal	1.064.812	1.008,12	1.056
Kabupaten Batang	838.187	857,27	978
Kabupaten Pekalongan	1.019.006	892,91	1.141
Kabupaten Pemalang	1.541.685	1.137,41	1.355
Kabupaten Tegal	1.674.803	983,90	1.702
Kabupaten Brebes	2.065.501	1.742,81	1.185
Kota Magelang	122.431	18,56	6.596
Kota Surakarta	528.044	46,72	11.302
Kota Salatiga	201.270	54,98	3.661
Kota Semarang	1.708.833	370,00	4.618
Kota Pekalongan	321.095	46,20	6.950
Kota Tegal	285.843	39,08	7.314
Provinsi Jawa Tengah	37.892.283	34.337,48	1.104

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pada Tahun 2024, terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Tahun 2024, kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Tegal yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,28 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Kebumen dengan laju pertumbuhan sebesar 1,27 persen, diikuti Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Pemalang sebesar 1,25 persen. Sedangkan 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kota Magelang sebesar 0,24 persen dan terendah kedua adalah Kota Surakarta sebesar 0,26 persen.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)
Tahun 2020-2024 dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Laju Pertumbuhan Penduduk Thn 2024
Cilacap	1.944.857	1.963.824	1.988.622	2.007.82	2.027.380	1,03
Banyumas	1.776.918	1.789.630	1.806.013	1.828.573	1.847.100	1,06
Purbalingga	998.561	1.007.794	1.019.840	1.027.333	1.037.640	1,05
Banjarnegara	1.017.767	1.026.866	1.038.718	1.047.226	1.057.560	1,04
Kebumen	1.350.438	1.361.913	1.376.825	1.397.55	1.414.750	1,27
Purworejo	769.880	773.588	778.257	788.26	795.030	0,89

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Laju Pertumbuhan Penduduk Thn 2024
Wonosobo	879.124	886.613	896.346	909.66	920.510	1,25
Magelang	1.299.859	1.305.512	1.312.573	1.330.65	1.341.450	0,85
Boyolali	1.062.713	1.070.247	1.079.952	1.090.12	1.099.850	0,94
Klaten	1.260.506	1.267.272	1.275.850	1.284.386	1.292.800	0,7
Sukoharjo	907.587	911.603	916.627	932.680	941.650	1,01
Wonogiri	1.043.177	1.049.292	1.057.087	1.051.08	1.054.150	0,31
Karanganyar	931.963	938.808	947.642	955.116	961.910	0,75
Sragen	976.951	983.641	992.243	997.48	1.004.760	0,77
Grobogan	1.453.526	1.460.873	1.470.150	1.492.89	1.506.370	0,96
Blora	884.333	886.147	888.224	901.621	907.990	0,75
Rembang	645.333	647.766	650.770	660.166	665.240	0,83
Pati	1.324.188	1.330.983	1.339.572	1.359.364	1.370.820	0,89
Kudus	849.184	852.443	856.472	874.632	883.320	1,06
Jepara	1.184.947	1.188.510	1.192.811	1.221.086	1.232.880	1,02
Demak	1.203.956	1.212.377	1.223.217	1.240.510	1.252.970	1,07
Semarang	1.053.094	1.059.844	1.068.492	1.080.648	1.089.770	0,9
Temanggung	790.174	794.403	799.764	808.446	814.880	0,84
Kendal	1.018.505	1.025.020	1.033.367	1.052.826	1.064.810	1,2
Batang	801.718	807.005	813.791	828.883	838.190	1,1
Pekalongan	968.821	976.504	986.455	1.007.384	1.019.010	1,21
Pemalang	1.471.489	1.484.209	1.500.754	1.523.622	1.541.690	1,25
Tegal	1.596.996	1.608.611	1.623.595	1.654.836	1.674.800	1,28
Brebes	1.978.759	1.992.685	2.010.617	2.043.077	2.065.500	1,16
Kota Magelang	121.526	121.610	121.675	122.150	122.430	0,24
Kota Surakarta	522.364	522.728	523.008	526.870	528.040	0,26
Kota Salatiga	192.322	193.525	195.065	198.920	201.270	1,24
Kota Semarang	1.653.524	1.656.564	1.659.975	1.694.743	1.708.830	0,89
Kota Pekalongan	307.150	308.310	309.742	317.524	321.100	1,19
Kota Tegal	273.825	275.781	278.299	282.781	285.840	1,15
Jawa Tengah	36.516.035	36.742.501	37.032.410	37.540.962	37.892.283	0,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) 2020 (September), 2021–2024: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak homogen di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka pertumbuhan penduduk. Meskipun angka pertumbuhan penduduk di Jawa

tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, akan tetapi tidak berarti peningkatan jumlah penduduk juga rendah. Secara absolut pertumbuhan penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar bila dibandingkan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa.

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan dan masih harus dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan pembangunan wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Tabel 2.7.
Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah
Tahun 2019-2024

Tahun	Jawa Tengah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) eks- karesidenan					
		Banyumas	Kedu	Surakarta	Pekalongan	Pati	Semarang
2019	1.053	1.018	929	1.099	1.203	860	1.209
2020	1.113	1.112	994	1.174	1.320	863	1.214
2021	1.120	1.122	1.000	1.180	1.329	866	1.221
2022	1.078	1.134	1.008	1.189	1.342	870	1.228
2023	1.093	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2024	1.104	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023).

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-Karesidenan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Karesidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km² diikuti eks-Karesidenan Semarang 1.228 jiwa/km², sedangkan eks-Karesidenan Pati memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km². Eks-Karesidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk 6.845 jiwa/km² yang merupakan wilayah terpadat keempat di Jawa Tengah dan Kota Tegal dengan kepadatan 7.014 jiwa/km² yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Kota dengan penduduk terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk 11.367 jiwa/km². Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di sekitarnya. Para pendatang yang mencari rezeki di Kota Surakarta tersebut pada akhirnya memilih untuk bermukim di kota tersebut sehingga menambah populasi di wilayah yang luasnya hanya 46,01 km².

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2020-2024, angka beban ketergantungan di Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 angka beban ketergantungan Jawa Tengah sebesar 44,50 persen, artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 44 penduduk tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Berdasarkan komposisi usia penduduk, meningkatnya angka beban ketergantungan lebih dipengaruhi oleh meningkatnya proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah maupun proporsinya. Pada tahun 2020 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 7,72 dan terus meningkat menjadi 9,05 persen pada tahun 2024. Di sisi lain, proporsi penduduk usia 0-14 tahun semakin menurun dari tahun ke tahun tetapi dari sisi jumlah mengalami fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2020 proporsi penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 22,43 persen dan terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 21,74 persen. Sedangkan dari sisi jumlah penduduk usia 0-14 tahun pada tahun 2020 sebesar 8.190.778 jiwa terus menurun pada tahun 2021 hingga tahun 2022 sebesar 8.123.792 jiwa, kemudian pada tahun 2023 hingga 2024 terus meningkat menjadi sebesar 8.239.285 jiwa.

Sementara proporsi penduduk usia produktif sendiri cenderung menurun tipis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, proporsinya penduduk usia 15-64 tahun mencapai 69,85 persen, terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 69,20 persen, tetapi dari sisi jumlah justru terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2020 sebesar 25.506.691 jiwa terus meningkat hingga tahun 2024 sebesar 26.222.356 jiwa.

Tabel 2.8.
Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65+ Tahun	Angka Beban Ketergantungan (%)
2020	8.190.778	25.506.691	2.818.566	43,16
2021	8.148.545	25.619.556	2.924.400	43,42
2022	8.123.792	25.768.441	3.140.177	43,71
2023	8.223.922	26.048.918	3.268.122	44,11
2024	8.239.285	26.222.356	3.430.642	44,50

Sumber: BPS Jawa Tengah 2024 (*Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, terakhir diperbarui 5 September 2024*)

Peningkatan proporsi penduduk usia tua dapat dimaknai sebagai hal yang positif karena hal tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan karena jika penduduk usia tua tersebut semakin banyak maka akan semakin meningkatkan angka beban ketergantungan.

Peningkatan jumlah penduduk usia produktif disebut sebagai bonus demografi. Kondisi ini juga merupakan dua sisi mata uang yang saling berseberangan. Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya jika lapangan usaha yang ada saat ini ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia produktif tersebut, maka justru akan mendorong peningkatan instabilitas sosial dan politik. Bonus demografi yang terjadi di Jawa Tengah sepertinya mulai berakhir. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan 0,35 poin dari tahun sebelumnya.

Hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah dengan mendorong peningkatan kualitas penduduk usia produktif yang saat ini proporsinya masih sangat besar. Jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik, maka akan mampu menanggung beban ketergantungan yang kemungkinan akan semakin besar di masa mendatang.

2.2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah digambarkan dengan kondisi kemiskinan. Kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada periode September 2024 sebesar 9,58 persen (3.396,34 ribu orang) menurun sebesar 0,89 persen dibanding periode Maret 2024 sebesar 10,47 persen. Jika dibandingkan dengan periode Maret tahun 2023 menurun sebesar 1,19 persen (395,16 ribu orang) dari 10,77 persen (3.791,50 ribu orang).

Berdasarkan daerah tempat tinggal selama setahun terakhir yaitu tahun 2023–2024, persentase penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 1,42 persen (257,25 ribu orang) dari 11,87 persen (1.969,84 ribu orang) menjadi 10,45 persen (1.712,59 ribu orang). Sementara di perkotaan persentase penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 0,95 persen (137,91 ribu orang) dari 9,78 persen (1.821,66 ribu orang) menjadi 8,83 persen (1.683,75 ribu orang).

Tabel 2.9.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Penduduk Miskin					
	(ribu orang)			(%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	1.890,49	2.229,44	4.119,93	10,57	13,20	11,84
2021	1.847,09	2.086,92	3.934,01	10,16	12,44	11,25
2022	1.852,17	2.006,06	3.858,23	10,02	12,05	10,98

Tahun	Penduduk Miskin					
	(ribu orang)			(%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2023	1.821,66	1.969,84	3.791,50	9,78	11,87	10,77
2024	1.683,75	1.712,59	3.396,34	8,83	10,45	9,58

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 (Rilis Periode September)
 Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional



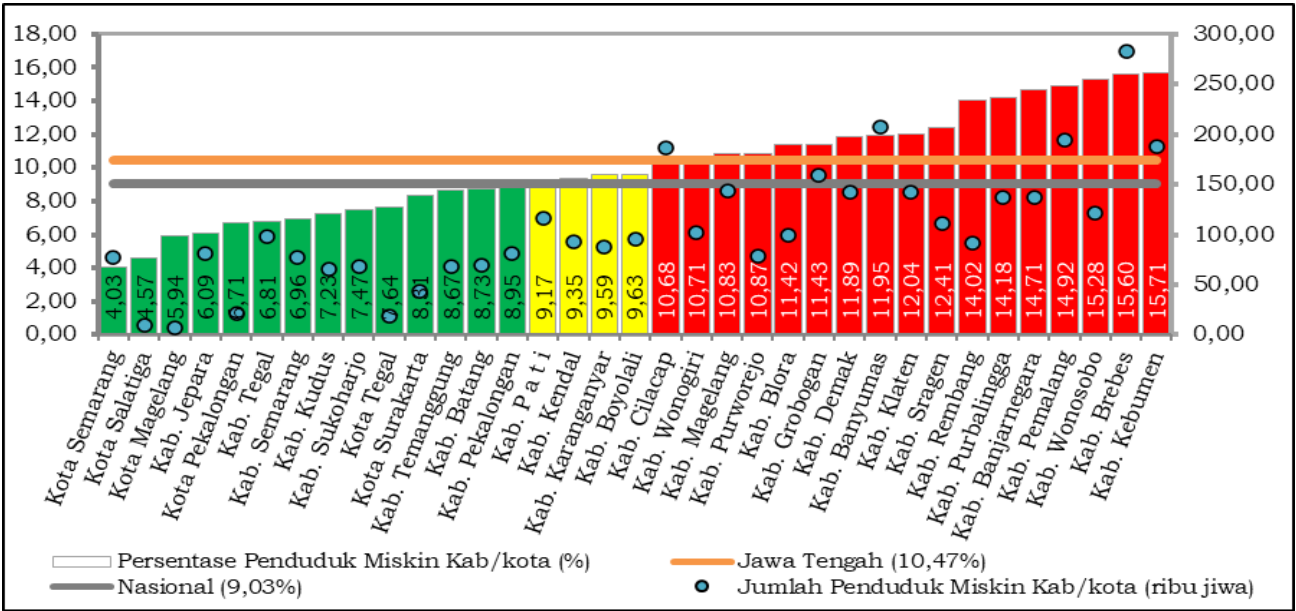
Sumber: BPS, Rilis Periode September 2024.
 Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret

Gambar 2.3.
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota mendasarkan data per Maret tahun 2024 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 17 kabupaten meliputi Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Rembang, Sragen, Klaten, Banyumas, Demak, Grobogan, Blora, Purworejo, Magelang, Wonogiri dan Cilacap;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 4 kabupaten meliputi Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Kendal dan Pati;

3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 14 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang, Temanggung, Kota Surakarta, Kota Tegal, Sukoharjo, Kudus, Semarang, Tegal, Kota Pekalongan, Jepara, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

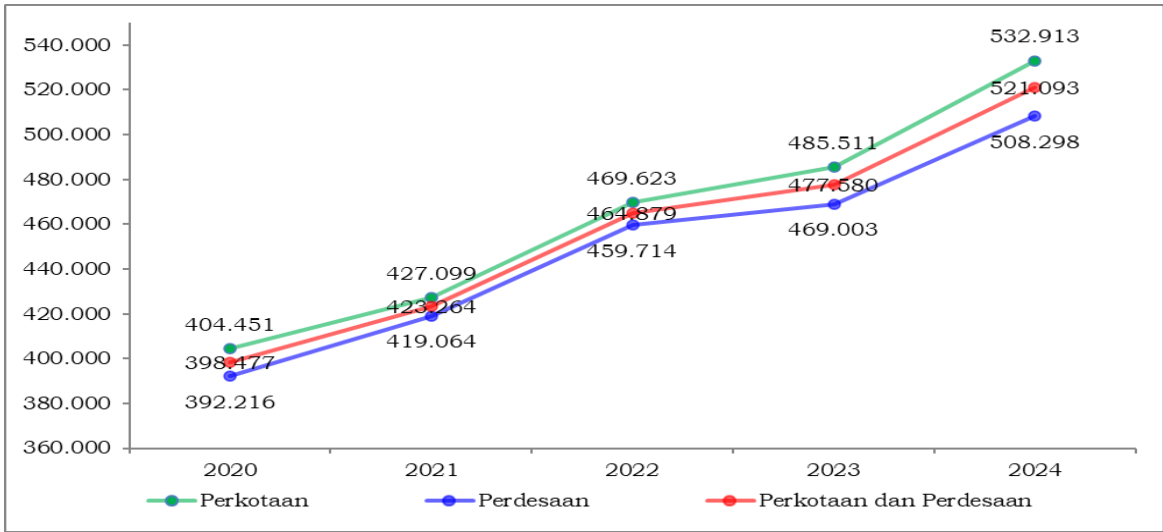


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.4.
Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2024

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2024 sebesar Rp 521.093 per kapita per bulan, meningkat 9,11 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 477.580 per kapita per bulan.

Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan tahun 2024 sebesar Rp 532.913 per kapita per bulan atau naik 9,76 persen dari kondisi tahun 2023 yang sebesar Rp 485.511 per kapita per bulan. Sedangkan Garis Kemiskinan di perdesaan tahun 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 8,38 persen menjadi sebesar Rp 508.298 per kapita per bulan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp 469.003 per kapita per bulan.



Sumber: BPS, Rilis Periode September 2020-2024, diolah.
 Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

Gambar 2.5.
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020–2021 mengalami peningkatan dari 1,835 pada tahun 2020 menjadi 1,938 pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 1,753 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 1,749 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, P1 kembali turun dibandingkan tahun 2023 dari sebesar 1,749 menjadi 1,601.

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal di perkotaan dan pedesaan, nilai P1 tahun 2024 di pedesaan sebesar 1,723 masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan sebesar 1,497. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di pedesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

Selain dilihat dari P1, gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020–2021 meningkat dari 0,431 pada tahun 2020 menjadi 0,459 pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 0,422 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 0,415 pada tahun 2023. Sementara pada tahun 2024 turun lagi dari tahun sebelumnya yaitu dari 0,415 menjadi 0,365.

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal di perkotaan dan pedesaan, nilai P2 pada tahun 2024 di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Tahun 2024, nilai P2 untuk daerah perkotaan sebesar 0,347 sedangkan di daerah pedesaan sebesar 0,365. Angka ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di pedesaan lebih lebar dibandingkan perkotaan.

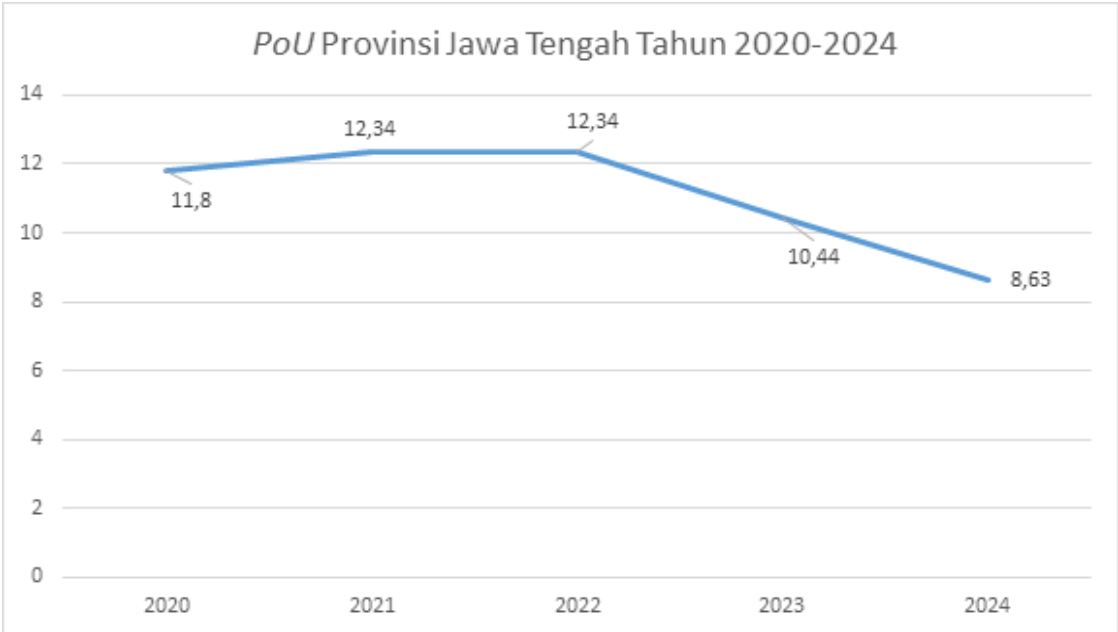
Tabel 2.10.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	1,746	2,147	1,938	0,419	0,502	0,459
2021	1,640	1,879	1,753	0,407	0,439	0,422
2022	1,673	1,835	1,749	0,410	0,420	0,415
2023	1,497	1,723	1,601	0,347	0,386	0,365
2024	1,611	2,073	1,835	0,385	0,479	0,431

Sumber: BPS, Rilis Periode September 2020-2024, diolah.
 Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

2.2.1. Kondisi Ketahanan Pangan

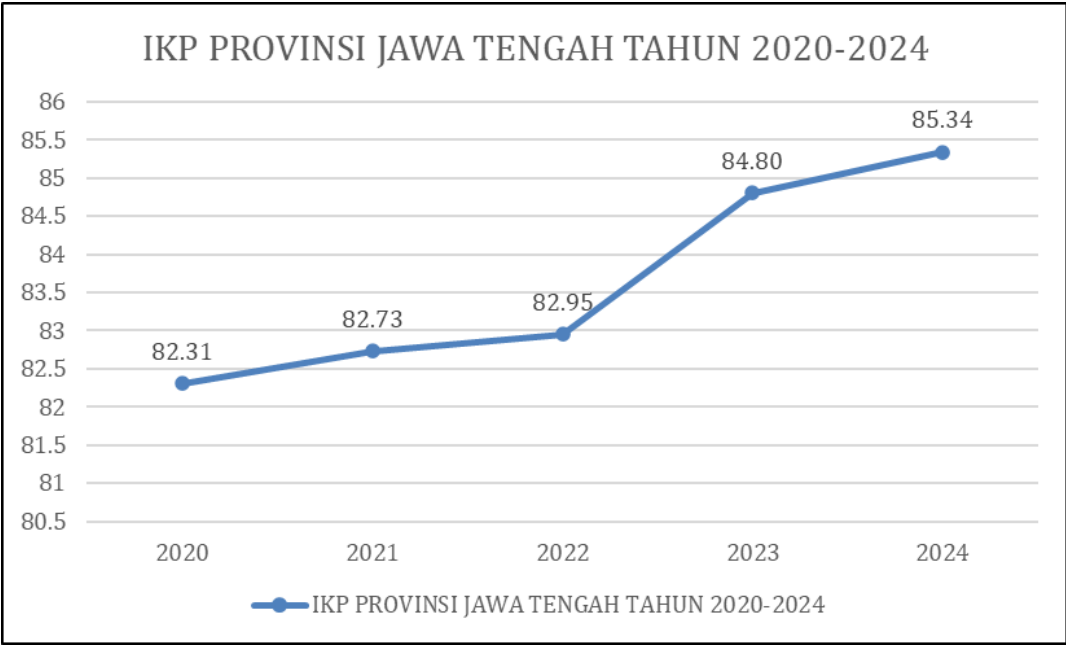
Kondisi Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah diukur dengan indikator *PoU* (*Prevalence of Undernourishment*) dan IKP (Indeks Ketahanan Pangan). *Prevalence of Undernourishment*/Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu. Kondisi *PoU* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 menunjukkan trend fluktuatif dan mengalami penurunan cukup signifikan pada Tahun 2024 dengan capaian sebesar 8,63



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2025

Gambar 2.6.
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun (2020-2024)

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan nilai komposit dari tiga pilar yaitu: (1) Ketersediaan; (2) Keterjangkauan; dan (3) Pemanfaatan. Kurun waktu 2020-2024 IKP Provinsi Jawa Tengah menunjukkan trend meningkat dengan angka Tahun 2024 sebesar 85,34.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024.

Gambar 2.7.
Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah
Tahun (2020-2024)

Aspek ketersediaan pangan digambarkan melalui angka ketersediaan energi, protein dan lemak, yaitu ketersediaan zat gizi per kapita yang terkandung dalam makanan yang siap dikonsumsi setiap penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah mencapai angka ketersediaan energi sebesar 3,805 kkal/hari dengan ketersediaan protein 96,87 gram/hari dan lemak sebesar 56,32 gram/hari.

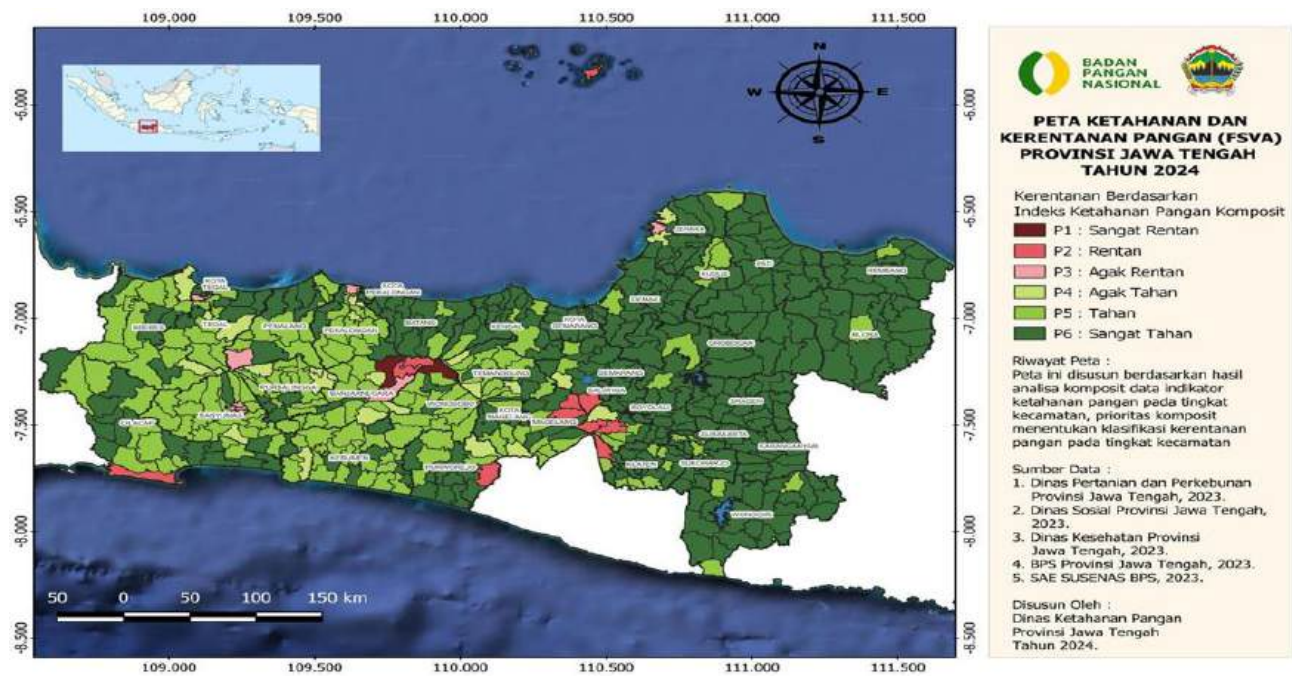
Tabel 2.11.
Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak
Provinsi Jawa Tengah (2017-2024)

Tahun Penyusunan	ATAP	Energi (kkal/hari)			Protein (gram/hari)			Lemak (gram/hari)		
		Total	Nab	Hew	Total	Nab	Hew	Total	Nab	Hew
2017	2016	4,055	3,925	130	109.03	97.84	11.19	62	55.24	6.76
2018	2017	4,027	3,886	141	114.46	98.77	15.69	60.88	52.92	7.96
2019	2018	3,730	3,605	125	87.83	75.45	12.38	76.24	68.38	7.86
2020	2019	3,732	3,604	128	87.97	74.69	13.27	40.41	32.75	7.65
2021	2020	3,736	3,607	129	98.17	84.51	13.66	56.38	48.74	7.63
2022	2021	3,797	3,680	118	95.98	83.82	11.75	57.99	50.82	7.17
2023	2022	4,021	3,904	117	90,23	78,35	11,88	73,71	66,52	7,19
2024	2023	3,805	3,565	239	96,87	76,09	20,78	56,32	39,94	16,39

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Kondisi ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan melalui peta *Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)*. Peta FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan dan disusun berdasarkan aspek ketersediaan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan. Berdasarkan hasil analisa FSVA Tahun 2024 diperoleh informasi bahwa daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3 sebanyak 24 kecamatan (4,17%) sedangkan daerah tahan pangan prioritas 4-6

sebanyak 552 kecamatan (95,83%). Terjadi penurunan daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3 sebanyak 13 kecamatan (35,13%) jika dibandingkan analisa FSVA Tahun 2023 yaitu sebanyak 37 kecamatan.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.8.
Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pemanfaatan pangan individu dapat dilihat dari keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam kurun waktu Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Tengah masih harus mengupayakan peningkatan konsumsi pangan hewani yang masih dibawah standar, meskipun pada Tahun 2024 Skor PPH mencapai 93,99. Disisi lain masih banyak terjadi pemborosan pangan yang perlu segera ditangani.

Tabel 2.12.
Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024

	Kelompok Pangan	Standar	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Umbi-umbian	2,5	1,1	0,9	0,9	1,1	1,2	2,5
	Pangan Hewani	24,0	20,0	20,4	21,0	22,9	22,5	18,84
	Minyak & lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Buah/biji berminyak	1,0	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,15
	Kacang-kacangan	10,0	6,4	6,1	6,3	8,0	8,2	10,00
	Gula	2,5	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9	2,5
	Sayur & buah	30,0	29,5	27,1	26,0	30,0	30,0	30,0
	Lain-lain	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skor PPH Jateng	100,0	89,6	87,1	86,7	94,4	94,2	93,99
	Skor PPH Nasional	100,0	90,8	87,9	87,2	92,9	94,1	93,5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, 2025.

2.3. Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian daerah Jawa Tengah dapat digambarkan dari beberapa indikator kinerja antara lain pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, rasio Gini, indeks Williamson, dan indeks daya saing daerah (IDSD). Kinerja perekonomian daerah Jawa Tengah didukung dengan kinerja sektor-sektor unggulan daerah yaitu pertanian, koperasi dan UKM, perdagangan, industri pengolahan, dan pariwisata. Selain itu juga, perekonomian daerah Jawa Tengah didukung oleh iklim investasi yang baik, kondisi infrastruktur yang mantap dan transportasi yang menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, serta pembangunan perekonomian berbasis desa. Gambaran keseluruhan kondisi perekonomian daerah sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.

Kinerja ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga ditengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga Tahun 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 4,95 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,97 persen (c-to-c). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 4,92% (c-to-c), namun lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 5,03% (c-to-c).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2024 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Kawasan Jawa setelah DIY (5,03%; c-to-c), Banten (4,79%; c-to-c) serta diatas dengan pertumbuhan Jawa Timur (4,93%; c-to-c) dan DKI Jakarta sebesar (4,90%; c-to-c). Dari sisi pangsa, Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 3,05 persen (c-to-c), ekspor tumbuh 4,25 persen (c-to-c), investasi tumbuh 1,88 persen (c-to-c), ditopang oleh proses pengerjaan Proyek Strategis Nasional dan proyek swasta di Jawa Tengah yang masih berlangsung.

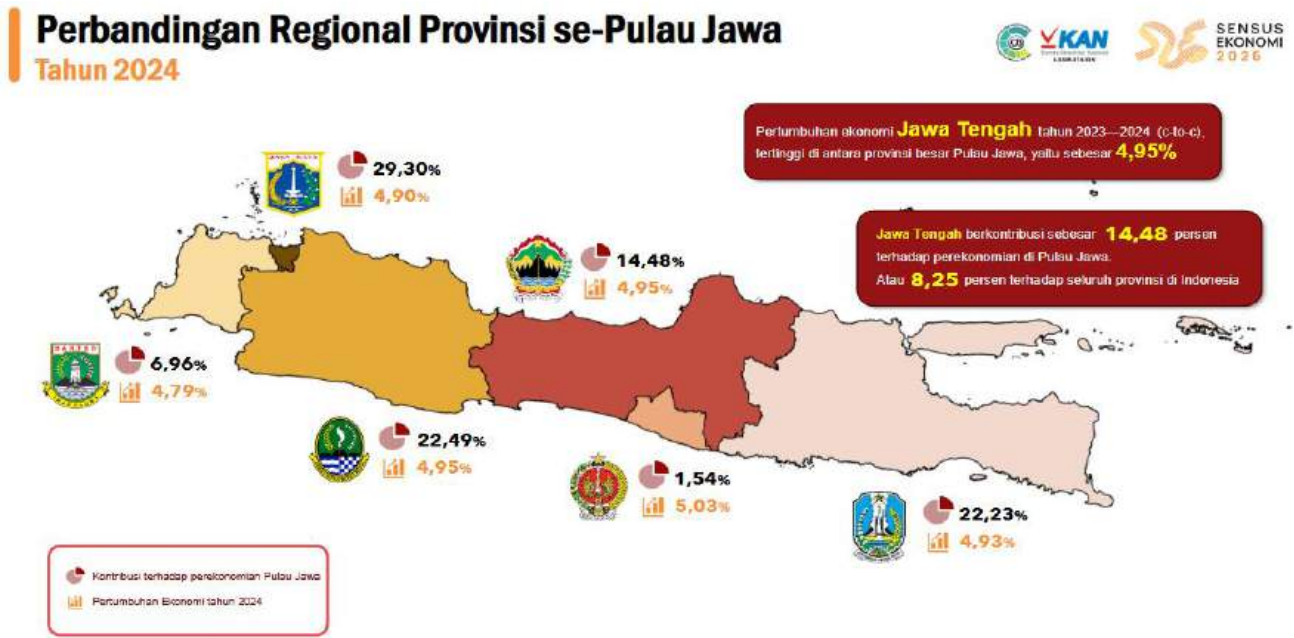
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kenaikan sektor industri pengolahan serta konstruksi. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 1,15 persen (c-to-c) sejalan dengan peningkatan impor bahan baku industri. Impor bahan baku meningkat sebesar 4,22 persen (yoy), terutama bersumber dari impor bahan baku alas kaki akibat kenaikan demand di AS dan Eropa. Sementara itu, peningkatan kinerja di sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 0,83 persen (c-to-c).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.9.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2024 (c-to-c)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2024 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Kawasan Jawa setelah DIY (5,03%; c-to-c), Banten (4,79%; c-to-c) serta diatas dengan pertumbuhan Jawa Timur (4,93%; c-to-c) dan DKI Jakarta sebesar (4,90%; c-to-c). Dari sisi pangsa, Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.



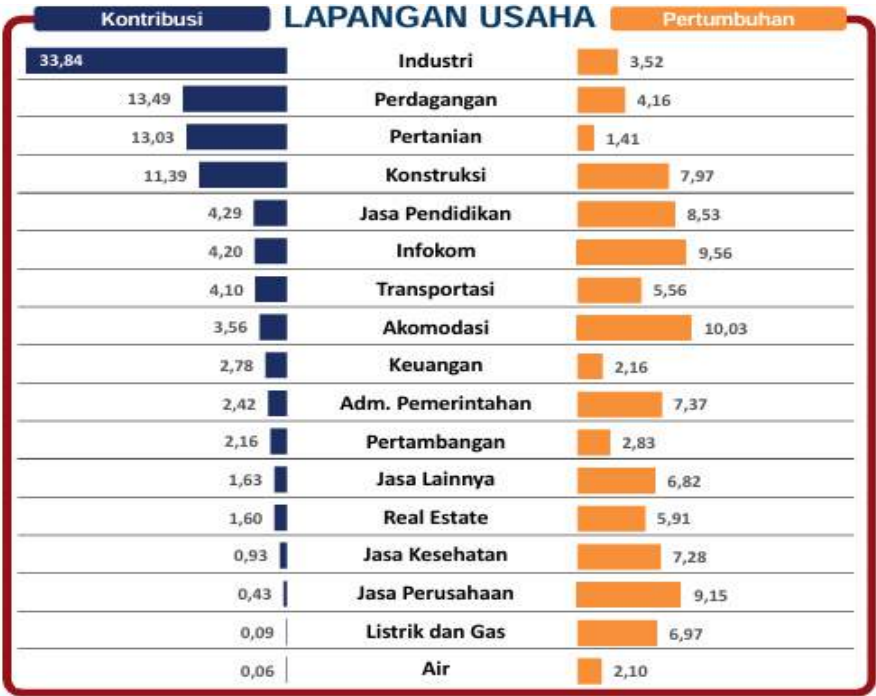
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.10.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Se-Pulau Jawa Tahun 2024 (c-to-c, %)

Pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan melalui sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu

diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2024 didominasi oleh tiga (3) lapangan usaha yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar 33,84 persen, Lapangan Usaha Perdagangan berkontribusi sebesar 13,49 persen, sementara Lapangan Usaha Pertanian berkontribusi sebesar 13,03 persen.



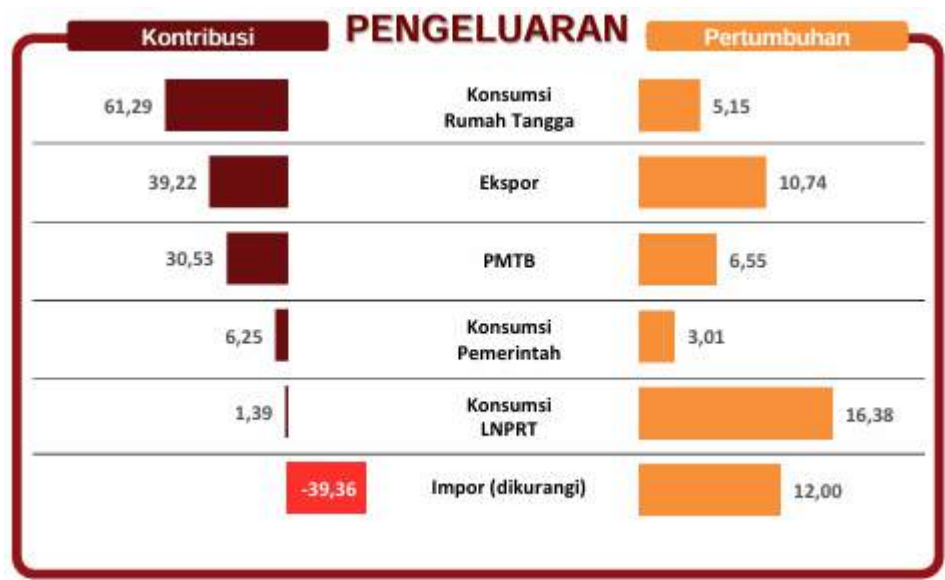
Sumber: BPS Jateng, 2025.

Gambar 2.11.

Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (c-to-c, %)

Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 adalah Akomodasi Makan dan Minum yang tumbuh sebesar 10,03 persen, kemudian disusul oleh Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 9,56 persen, dan kemudian Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 9,15 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Tengah seperti Industri Pengolahan hanya sebesar 3,52 persen, Perdagangan tumbuh sebesar 4,16 persen, sementara itu Pertanian tumbuh 1,41 persen.

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran semua komponen pengeluaran juga mengalami pertumbuhan yang positif. Tahun 2024 struktur ekonomi didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang berkontribusi sebesar 61,29 persen, selanjutnya Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) memiliki kontribusi sebesar 39,22 persen, sementara itu Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto memiliki kontribusi sebesar 30,53 persen.



Sumber: BPS Jateng, 2025.

Gambar 2.12.

Kontribusi dan Pertumbuhan Perekonomian Jawa Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2024 (%)

Pada Tahun 2024 pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga *Non-Profit* yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 16,38 persen seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas partai politik pada pemilu 2024. Kemudian Komponen Pengeluaran Impor tumbuh sebesar 12 persen, disusul oleh Komponen Pengeluaran Ekspor yang tumbuh sebesar 10,74 persen. Sementara Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi 61,29 persen tumbuh sebesar 5,15 persen. Pertumbuhan positif konsumsi rumah tangga antara lain didorong oleh momentum liburan natal dan tahun baru.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang terus membaik pasca pandemi Covid-19 tahun 2020 juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2021 tumbuh positif dibandingkan tahun 2020, kecuali Kabupaten Kudus yang mengalami kontraksi sebesar -1,54 persen yang diakibatkan karena industri tembakau di Kudus masih mengalami pertumbuhan negatif. Namun demikian, pada tahun 2022, semua kabupaten/kota telah tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Boyolali dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,33 persen, diikuti oleh Kota Surakarta sebesar 6,25 persen, dan Kabupaten Grobogan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98 persen. Sedangkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Kudus sebesar 2,23 persen, Kabupaten Blora 2,68 persen, dan Kabupaten Wonosobo 5,02 persen. Tahun 2023 di tengah perlambatan ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang (5,79 persen) mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan terendah adalah Kabupaten Kudus (2,19 persen). Hanya ada 4 Kabupaten / Kota yang tumbuh positif dari capaian Tahun 2022 yaitu Kabupaten Pekalongan (tumbuh 0,03), Kota Semarang (tumbuh 0,06), Kabupaten Cilacap (tumbuh 0,19) dan Kabupaten Blora (tumbuh 0,44). Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Brebes sebesar 1,87 persen dan Kabupaten Grobogan sebesar 1,00 persen.

Tabel 2.13.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024 (%)

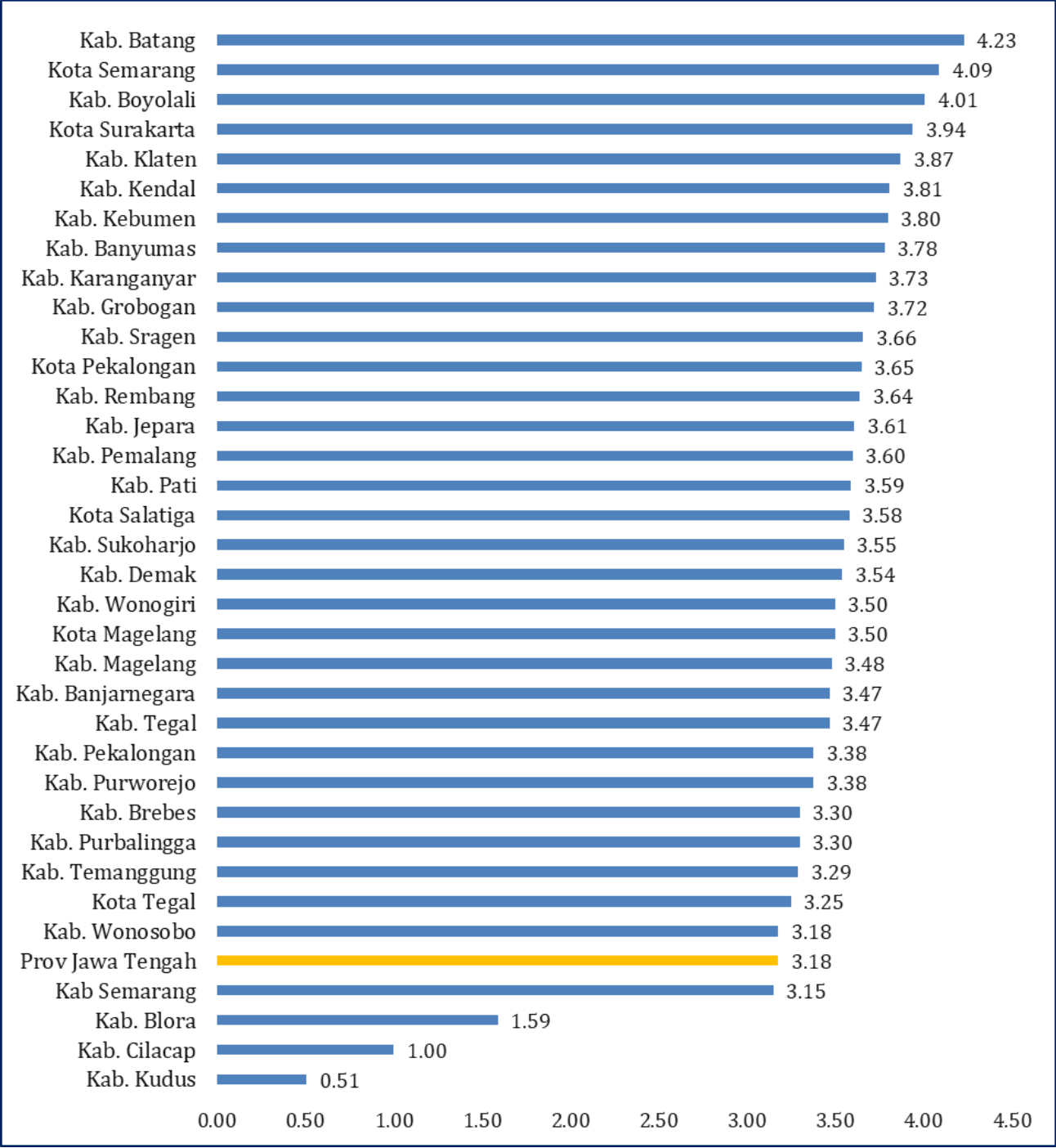
No	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Cilacap	2.27	-10.28	2.15	5.13	5.34	2.65
2	Kabupaten Banyumas	6.32	-1.65	4.00	5.86	5.40	5.29
3	Kabupaten Purbalingga	5.64	-1.18	3.19	5.41	4.51	4.55
4	Kabupaten Banjarnegara	5.6	-1.32	3.26	5.29	4.98	5.11
5	Kabupaten Kebumen	5.52	-1.45	3.71	5.79	5.66	5.30
6	Kabupaten Purworejo	5.44	-1.61	3.31	5.36	5.07	4.79
7	Kabupaten Wonosobo	5.57	-1.64	3.68	5.02	4.30	4.57
8	Kabupaten Magelang	5.3	-1.67	3.48	5.46	5.04	5.06
9	Kabupaten Boyolali	5.96	-1.20	4.63	6.33	5.63	4.64
10	Kabupaten Klaten	5.48	-1.17	3.82	5.90	5.70	5.11
11	Kabupaten Sukoharjo	5.92	-1.70	3.82	5.61	5.06	4.97
12	Kabupaten Wonogiri	5.14	-1.41	3.35	5.63	4.98	4.93
13	Kabupaten Karanganyar	5.76	-1.87	3.57	5.87	5.53	5.54
14	Kabupaten Sragen	5.9	-1.81	3.75	5.76	5.23	5.39
15	Kabupaten Grobogan	5.37	-1.57	3.78	5.98	4.98	5.41
16	Kabupaten Blora	4.05	-4.56	3.68	2.68	3.10	3.06
17	Kabupaten Rembang	5.2	-1.49	3.85	5.55	5.20	5.08
18	Kabupaten Pati	5.81	-1.16	3.38	5.56	5.02	5.13
19	Kabupaten Kudus	3.09	-3.11	-1.54	2.23	2.19	2.78
20	Kabupaten Jepara	6.02	-1.92	4.63	5.95	5.17	4.22
21	Kabupaten Demak	5.36	-0.23	2.62	5.25	5.01	5.06
22	Kabupaten Semarang	5.39	-2.67	3.63	5.31	4.74	4.73
23	Kabupaten Temanggung	5.05	-2.13	3.34	5.2	5.00	5.04
24	Kabupaten Kendal	5.71	-1.51	3.89	5.69	5.56	5.42
25	Kabupaten Batang	5.39	-1.29	4.88	5.97	5.53	6.03
26	Kabupaten Pekalongan	5.35	-1.89	3.54	5.11	5.14	5.02
27	Kabupaten Pemalang	5.8	-0.61	4.28	5.08	4.14	5.11
28	Kabupaten Tegal	5.56	-1.48	3.71	5.14	4.93	5.07
29	Kabupaten Brebes	5.76	-0.47	2.57	5.61	3.74	5.02
30	Kota Magelang	5.41	-2.45	3.20	5.77	5.45	5.56
31	Kota Surakarta	5.78	-1.76	4.01	6.25	5.57	5.61
32	Kota Salatiga	5.90	-1.68	3.35	5.53	5.34	5.37
33	Kota Semarang	6.81	-1.85	5.16	5.73	5.79	5.62
34	Kota Pekalongan	5.50	-1.87	3.59	5.76	5.44	5.34
35	Kota Tegal	5.77	-2.29	3.12	5.16	5.01	5.22
	Jawa Tengah	5.36	-2.65	3.33	5.31	4.97	4.95
	Nasional	5.02	-2.07	3.70	5.31	5.05	5.03

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pada tahun 2022, hampir semua kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan diatas 5 persen kecuali Kabupaten Kudus dan Kabupaten Blora masing-masing 2,21 persen dan 2,66 persen. Pada tahun 2023, perekonomian kabupaten/kota di Jawa Tengah tumbuh kisaran 2 sampai 5 persen dimana Kabupaten Kudus tumbuh paling rendah sebesar 2,19 persen sedangkan

Kota Semarang tumbuh paling tinggi dibandingkan kabupaten kota lain di Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,79 persen. Selanjutnya pada tahun 2024, perekonomian kabupaten/kota di Jawa Tengah tumbuh kisaran 2 sampai 6 persen dimana Kabupaten Cilacap tumbuh paling rendah sebesar 2,65 persen sedangkan Kota Batang tumbuh paling tinggi dibandingkan kabupaten kota lain di Jawa Tengah tumbuh sebesar 6,03 persen hal tersebut didukung oleh adanya Kawasan Industri Terpadu Batang yang diresmikan pada tahun 2024.

Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024 tertinggi dialami Kabupaten Batang yaitu sebesar 4,23 persen dan terendah dialami Kabupaten Kudus yaitu sebesar 0,51 persen. Secara rata-rata 5 tahun terakhir pertumbuhan Kabupaten Kudus mengalami pertumbuhan paling kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya, dengan kisaran pertumbuhan per tahun antara -3,11 sampai 2,78 persen. Rendahnya rata2 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus selama 2020-2024 disebabkan karena tahun 2020 dan 2021 mengalami kontraksi ekonomi secara berturut-turut, dan setelah pandemi covid-19 berakhir, Kabupaten Kudus hanya mampu tumbuh kisaran 2 persen. Pada Gambar 2.10 dibawah ini menunjukkan bahwa terdapat 31 Kabupaten Kota yang mengalami rata-rata pertumbuhan di atas pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Semarang, Blora, Cilacap dan Kudus mengalami rata-rata pertumbuhan di bawah Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020-2024.

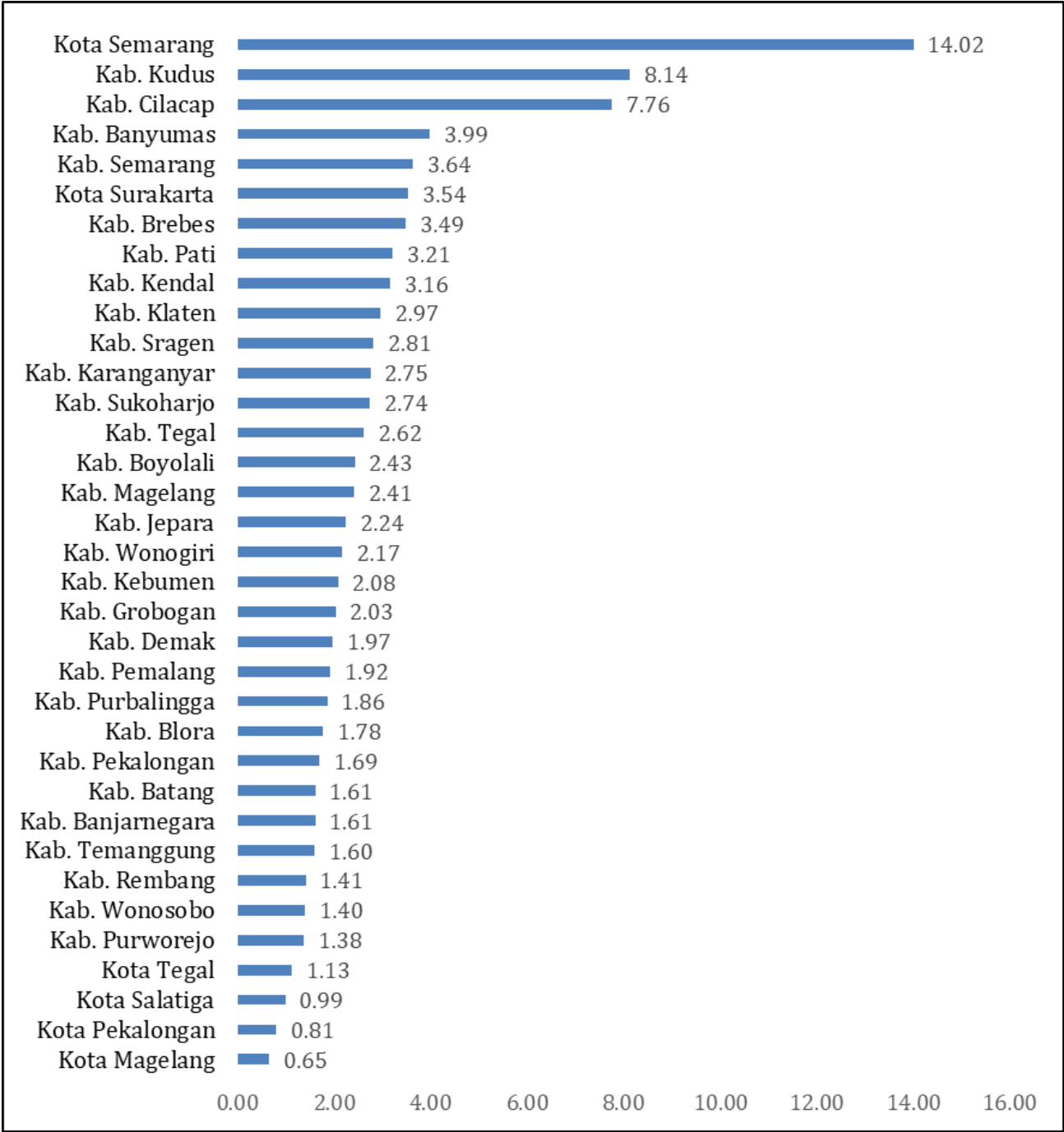


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.13.
Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 (persen)

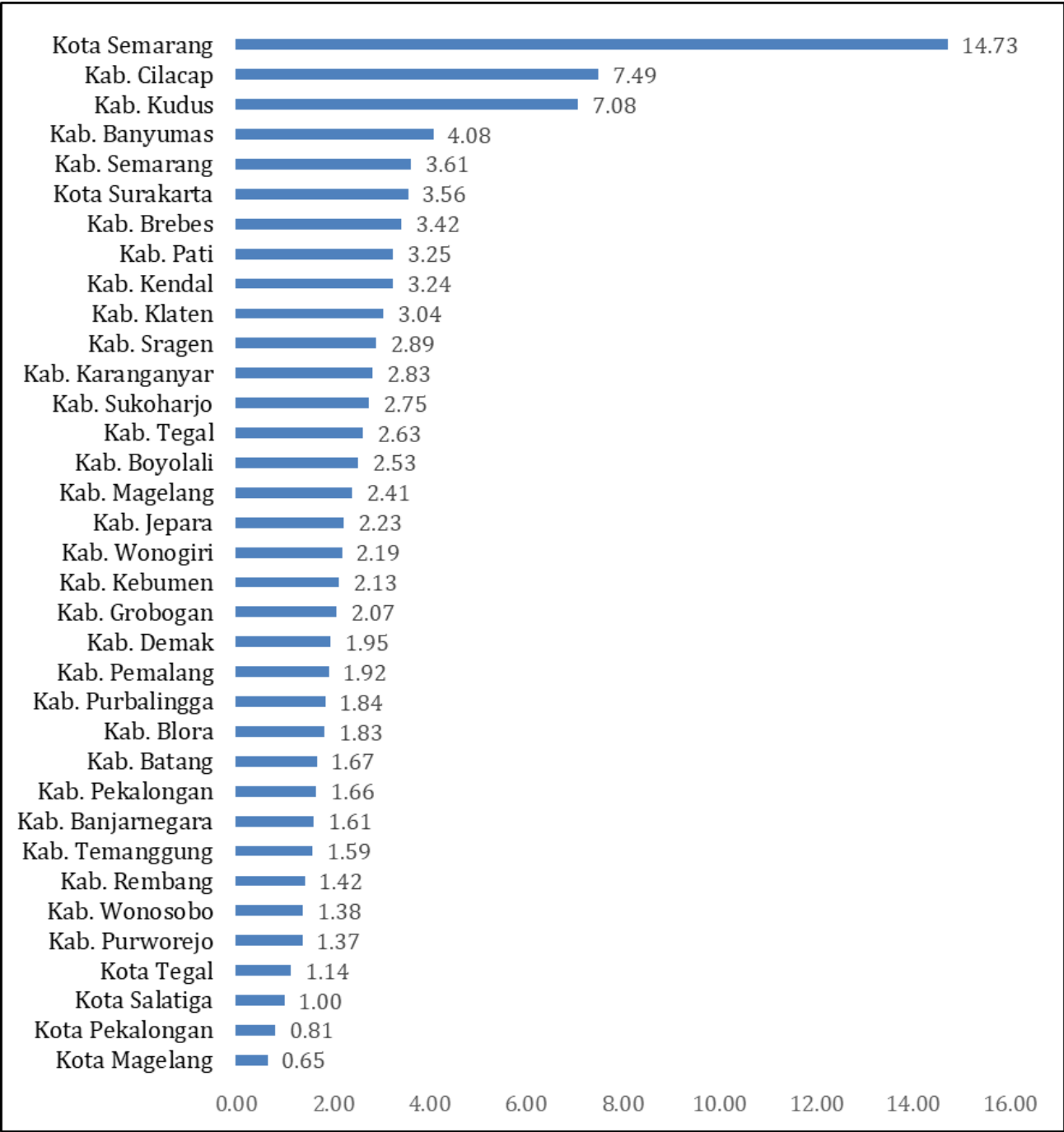
Perekonomian Jawa Tengah tentunya ditopang aktivitas ekonomi dari 35 Kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Tahun 2020 Kota Semarang, memberikan peran terbesar terhadap perekonomian Jawa Tengah yaitu sebesar 14,02 persen, diikuti Kabupaten Kudus dan Kabupaten Cilacap masing-masing memberikan kontribusi 8,14 persen dan 7,76 persen. Di sisi lain, Kota Salatiga, Kota Pekalongan dan Kota Magelang menyumbang aktivitas ekonomi paling kecil di Jawa Tengah. Hal yang sama terjadi pada tahun 2024 bahwa perekonomian Jawa Tengah masih di dominasi oleh Kota Semarang, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kudus. Sementara itu, Kota Salatiga, Kota Pekalongan dan Kota Magelang masih memberikan kontribusi terkecil terhadap ekonomi Jawa Tengah.

Perlu kita cermati bahwa antara tahun 2020 dan 2024 terdapat 19 Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan peranan. Kemudian terdapat 5 kabupaten/kota yang peranannya tetap yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pemalang, Kota Magelang, dan Kota Pekalongan. Di sisi lain terdapat 11 kabupaten mengalami penurunan peranan. Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kudus meskipun memberikan peranan besar namun selama periode 5 tahun terakhir mengalami penurunan peranan. Hal ini disebabkan rata-rata pertumbuhan kedua kabupaten ini jauh lebih rendah dibanding kabupaten/kota yang lain sehingga berdampak pada penurunan peranan terhadap ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Kota Tegal dan Kota Salatiga meskipun perannya relatif kecil terhadap ekonomi Jawa Tengah namun selama 5 tahun terakhir peranannya mengalami peningkatan.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.14.
Peranan/Kontribusi Kabupaten/Kota Terhadap Perekonomian
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (persen)



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.15.
Peranan/Kontribusi Kabupaten/Kota Terhadap Perekonomian
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (persen)

2.3.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Selama kurun waktu tahun 2022-2024, PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2024 PDRB Per Kapita Jawa Tengah sebesar 47,97 Juta Rupiah mengalami pertumbuhan sebesar 6,21 persen dibanding dengan tahun 2023 yang sebesar 45,17 Juta Rupiah. Jika dibandingkan dengan Nasional, PDRB Per kapita Jawa Tengah masih di bawahnya, namun selalu menunjukkan tren yang membaik atau naik.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.16
PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2022-2024

Jika dibandingkan dengan provinsi se-Pulau Jawa, PDRB per kapita Jawa Tengah tahun 2024 berada di urutan terakhir atau ke enam. Sedangkan PDRB per kapita tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 344,35 juta, diikuti Provinsi Jawa Timur (Rp 75,77 juta) dan Provinsi Banten (Rp 70,28 juta).

Tabel 2.14.
PDRB Per Kapita Provinsi Se Pulau Jawa (Juta Rp)

Provinsi	PDRB Perkapita 2024 (Juta Rupiah)
DKI Jakarta	344,35
Jawa Timur	75,77
Banten	70,28
Jawa Barat	56,08
DIY	51,47
Jawa Tengah	47,97

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Sebaran PDRB per kapita per kabupaten/kota se- Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.15.
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024 (Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Cilacap	66.39	53.92	55.74	60.88	65.95	67.08
2	Kabupaten Banyumas	32.02	30.28	31.79	34.71	37.6	40.15
3	Kabupaten Purbalingga	26.81	25.2	26.23	28.35	30.39	32.15
4	Kabupaten Banjarnegara	23.51	21.38	22.26	24.11	25.96	27.64
5	Kabupaten Kebumen	23.44	20.8	21.69	23.63	25.59	27.29
6	Kabupaten Purworejo	26.1	24.26	25.31	27.33	29.42	31.19
7	Kabupaten Wonosobo	23.91	21.49	22.38	24.02	25.65	27.19
8	Kabupaten Magelang	25.3	25.01	26.12	28.37	30.57	32.60
9	Kabupaten Boyolali	33.33	30.83	32.61	35.91	39.2	41.69
10	Kabupaten Klaten	34.01	31.74	33.37	36.52	39.92	42.74
11	Kabupaten Sukoharjo	41.63	40.7	42.65	46.32	49.88	53.08
12	Kabupaten Wonogiri	30.42	28.01	29.28	32.15	35.15	37.72
13	Kabupaten Karanganyar	41.94	39.82	41.62	45.45	49.42	53.36
14	Kabupaten Sragen	42.7	38.83	40.81	44.69	48.69	52.19
15	Kabupaten Grobogan	19.89	18.79	19.67	21.51	23.28	24.90
16	Kabupaten Blora	30.16	27.16	30.32	34.59	35.22	36.60
17	Kabupaten Rembang	29.82	29.39	30.91	33.76	36.55	38.77
18	Kabupaten Pati	34.34	32.74	34.12	37.19	40.29	43.05
19	Kabupaten Kudus	127.52	129.14	126.95	132.34	138.7	145.60
20	Kabupaten Jepara	24.14	25.49	26.78	28.96	31.14	32.90
21	Kabupaten Demak	22.62	22.1	22.77	24.64	26.62	28.30
22	Kabupaten Semarang	47.3	46.67	48.79	52.87	56.71	60.18
23	Kabupaten Temanggung	28.17	27.33	28.46	30.84	33.29	35.49
24	Kabupaten Kendal	44.03	41.9	43.94	47.73	51.63	55.26
25	Kabupaten Batang	28.22	27.02	28.57	31.06	33.64	36.26
26	Kabupaten Pekalongan	25.59	23.6	24.44	26.08	27.91	29.66
27	Kabupaten Pemalang	19.65	17.6	18.46	19.88	21.24	22.63
28	Kabupaten Tegal	24.57	22.15	23.14	24.95	26.85	28.49
29	Kabupaten Brebes	25.65	23.83	24.52	26.59	28.19	30.04
30	Kota Magelang	72.45	71.7	75.49	82.66	89.91	96.56
31	Kota Surakarta	92.83	91.17	96.11	106.26	114.8	122.53
32	Kota Salatiga	68.89	69.14	72.17	78.26	84.32	89.83
33	Kota Semarang	105.93	114.19	123.04	135.33	146.87	156.57
34	Kota Pekalongan	35.59	35.36	36.95	40.12	43.29	45.99
35	Kota Tegal	61.47	55.72	57.95	63.22	67.76	72.28
	Provinsi Jawa Tengah	39.39	36.96	38.57	41.95	45.20	47,97
	Nasional	59.30	57.30	62.20	71.00	75.00	78.60

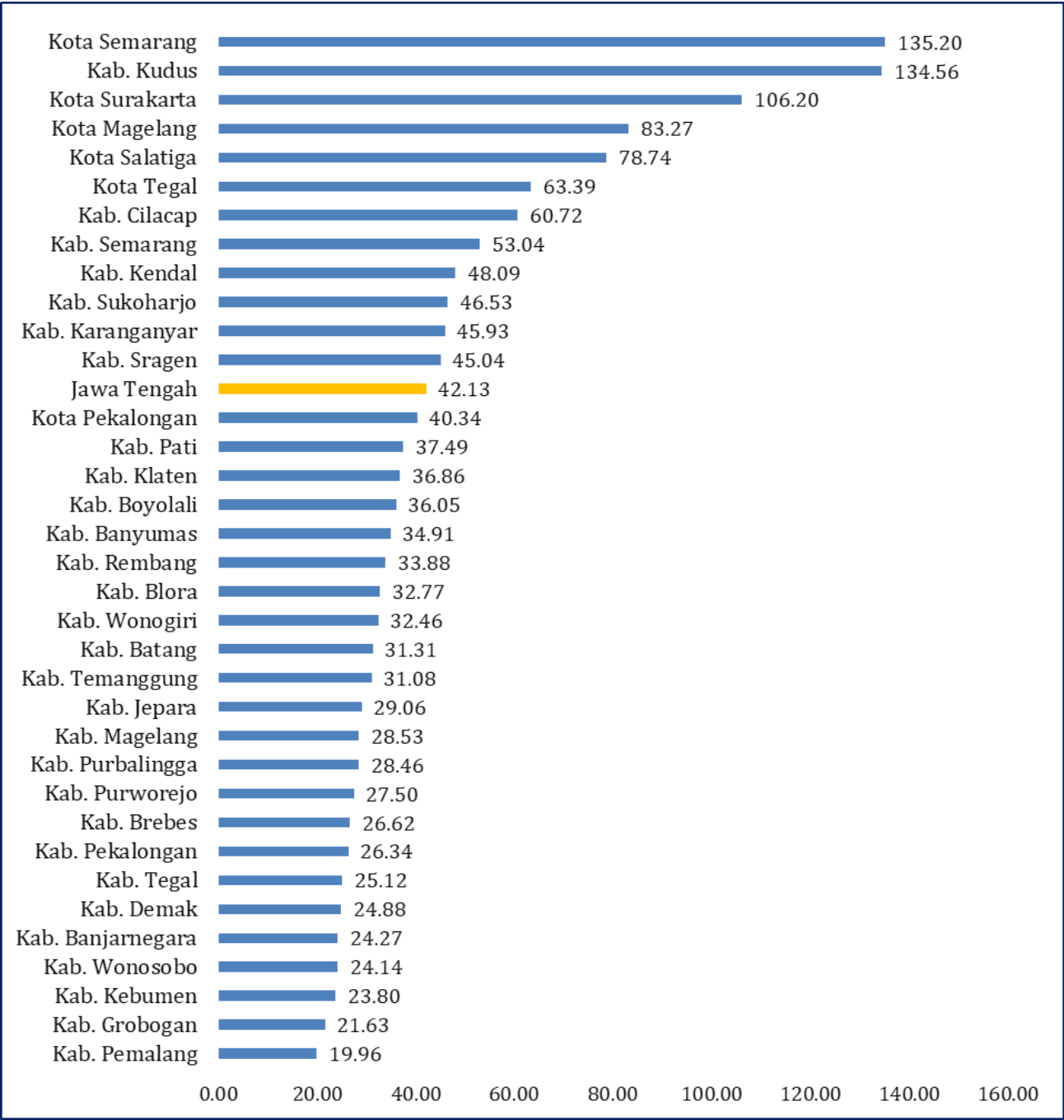
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Terdapat 12 kabupaten/kota dengan PDRB per kapita di atas capaian Jawa Tengah (lebih dari Rp.47,97 juta). Adapun sebanyak tiga kabupaten/kota memiliki PDRB per kapita di atas Rp100 juta yaitu Kota Semarang (Rp. 156,57 Juta), Kabupaten Kudus (Rp. 145,60 Juta), dan Kota Surakarta (Rp. 122,53 Juta). Sedangkan 23 Kabupaten/Kota lainnya memiliki PDRB Perkapita di bawah PDRB per kapita Jawa Tengah (kurang dari Rp.47,97 juta).

Jika dilihat PDRB Perkapita selama kurun waktu Tahun 2020-2024 terdapat 12 Kabupaten/kota yang memiliki rata-rata PDRB perkapita lebih tinggi

dibandingkan rata-rata PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah dan terdapat 23 kabupaten/kota yang rata-rata PDRB perkapitanya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki rata-rata PDRB perkapita tertinggi yaitu 135,20 juta rupiah diikuti Kabupaten Kudus nilainya 134,56 juta rupiah dan Kota Surakarta 106,20 juta rupiah.

Besarnya nilai PDRB perkapita tidak hanya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang dihasilkan, akan tetapi juga dipengaruhi jumlah penduduk wilayah tersebut. Kota Magelang adalah kota yang memiliki peranan PDRB terendah se Jawa Tengah dari tahun 2020-2024, hal ini terlihat dari peranan yg paling kecil terhadap ekonomi Jawa Tengah. Namun Kota Magelang memiliki PDRB perkapita relatif tinggi (urutan ke-4) dibanding kabupaten/kota di Jawa Tengah. Demikian juga Kota Salatiga dan Kota Tegal. Hal ini karena jumlah penduduk di ketiga kota ini relatif sedikit dibanding kabupaten/kota lain. Sementara itu, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pemalang menghasilkan nilai PDRB yang relatif besar dibanding Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Tegal namun rata-rata PDRB perkapita 2020-2024 kedua kabupaten tersebut adalah yang terendah di Jawa Tengah.



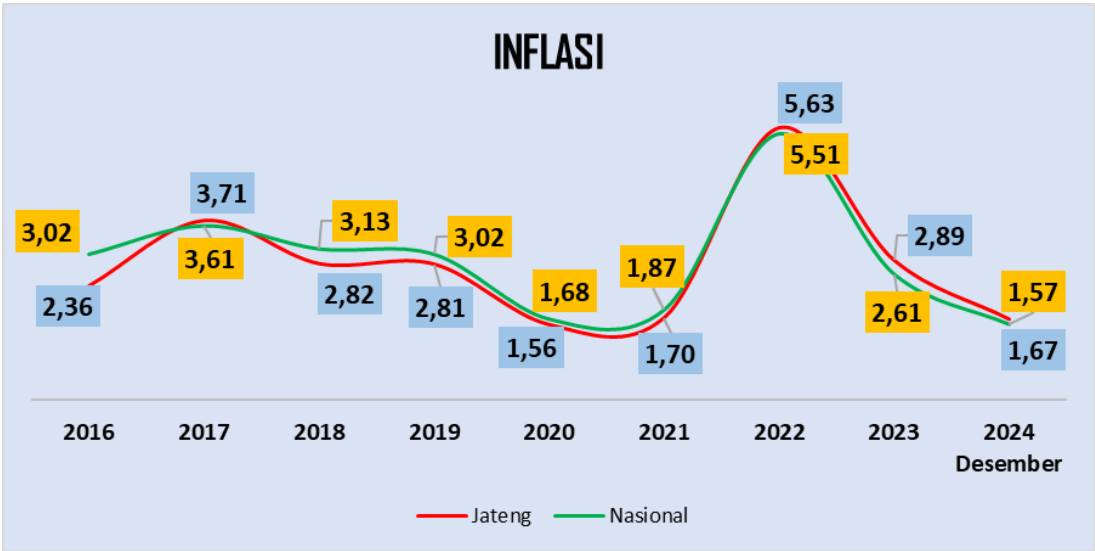
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.17.
Rata-Rata PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 (Juta Rupiah)

2.3.3. Inflasi

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2021 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1-3 persen, bahkan tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2022 terjadi kenaikan laju inflasi di Jawa Tengah menjadi sebesar 5,63 persen. Pada tahun 2024 terjadi penurunan laju inflasi menjadi sebesar 1,67 persen, meskipun tingkat inflasi Jawa Tengah masih lebih tinggi dibanding tingkat inflasi Nasional. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya semua indeks kelompok pengeluaran terutama komponen makanan dan minuman. Penyebab utama inflasi bulan Desember 2024 adalah emas perhiasan, beras, minyak goreng, kopi bubuk,

Sigaret Kretek Mesin (SKM), bahan bakar rumah tangga, nasi dengan lauk, mobil, bawang putih, dan lain sebagainya. Sedangkan penahan utama inflasi di Jawa Tengah adalah penurunan harga cabai merah, cabai rawit, bensin, telepon seluler, dan cabai hijau.



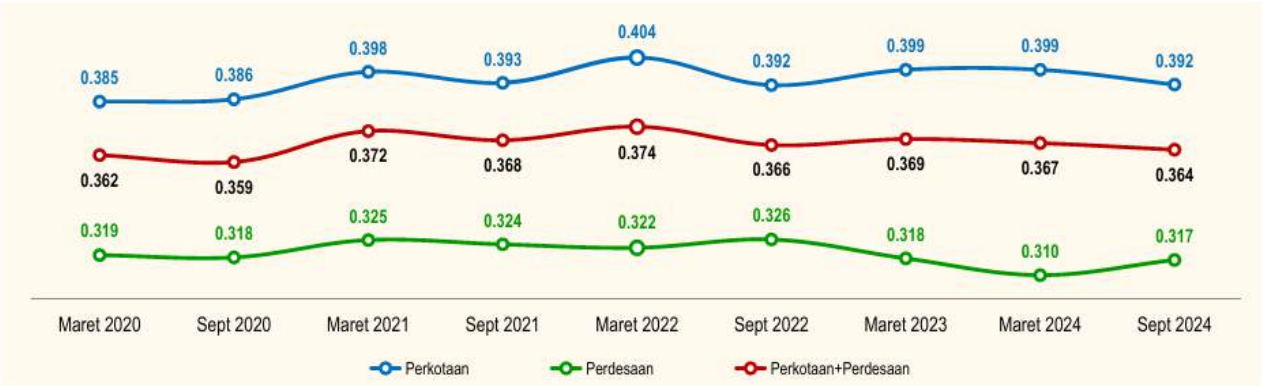
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.18.
Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – 2024 (%)

2.3.4. Rasio Gini dan Indeks Williamson

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0-1, semakin tinggi nilai menunjukan ketimpangan yang semakin tinggi. Kondisi ketimpangan di Jawa Tengah yang digambarkan dari angka *gini ratio* pada periode 2013-2023 terlihat berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2013 yaitu sebesar 0,390. Pada Maret 2023 Gini Ratio mengalami sedikit kenaikan dibandingkan September 2022, yaitu dari 0,366 menjadi 0,369, atau naik sebesar 0,003 poin.

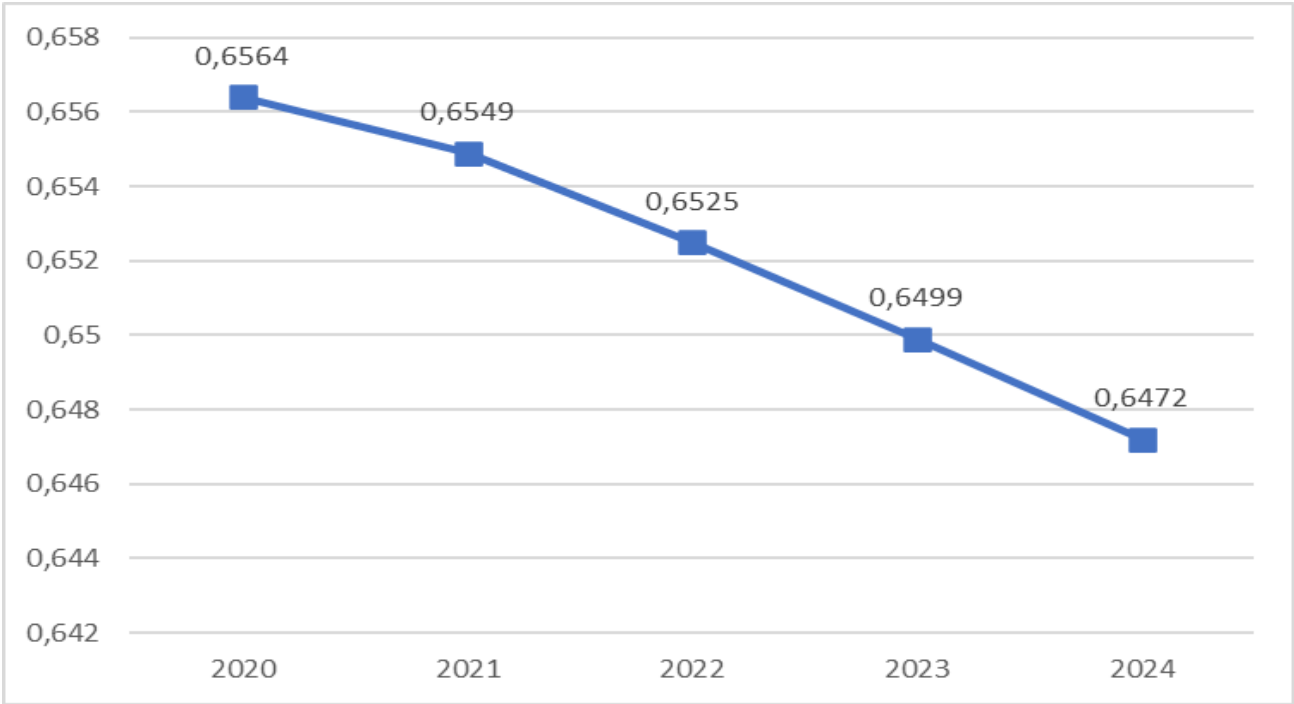
Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini di perkotaan pada September 2024 sebesar 0,392 mengalami penurunan sebesar 0,007 point dibandingkan rasio gini pada Maret 2023 yang sebesar 0,399. Sementara itu di daerah perdesaan rasio gini pada September 2024 sebesar 0,317 mengalami penurunan sebesar 0,001 point dibandingkan rasio gini Maret 2023 yang sebesar 0,318. Dari data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.19.
Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

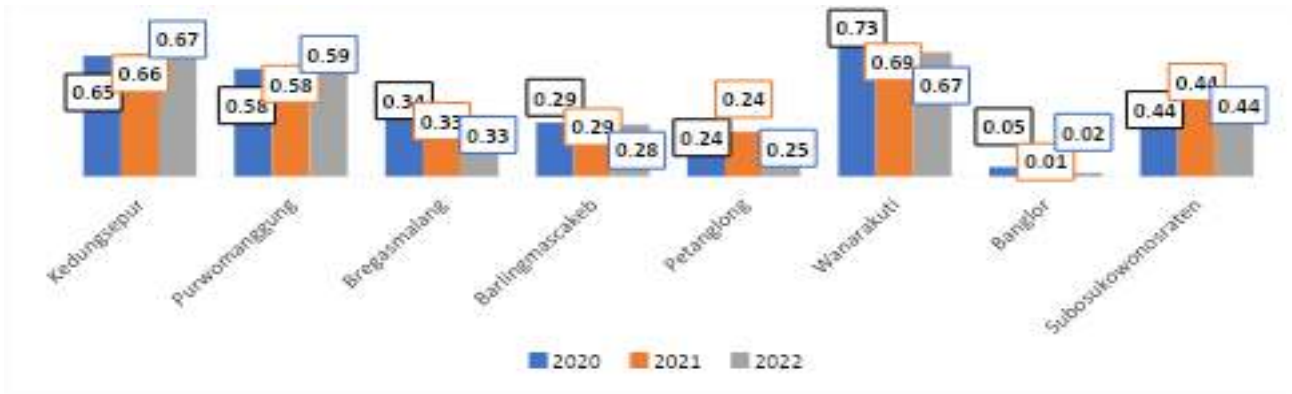
Indeks Williamson merupakan suatu instrument dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah lain yang lebih tinggi. Apabila nilai Indeks Williamson mendekati angka 0 maka pembangunan suatu wilayah dianggap sangat merata, sedangkan apabila nilai indeks semakin jauh dari 0, maka terdapat ketimpangan pembangunan di suatu wilayah. Pada tahun 2024 Indeks Williamson Jawa Tengah sebesar 0,6472 mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 0,6499.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.20.
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Jika melihat Indeks Williamson berdasarkan wilayah pengembangan, pada tahun 2022 wilayah pengembangan Wanarakuti lebih tinggi dibandingkan wilayah pengembangan yang lainnya yaitu sebesar 0,667. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan pembangunan antarwilayah yang cukup besar. Wilayah pengembangan yang kategori ketimpangannya sedang adalah wilayah Purwomangung. Sementara itu Banglor memiliki Indeks Williamson yang paling rendah yang menandakan bahwa wilayah tersebut pembangunannya merata, dimana karakteristik daerahnya hampir mirip yaitu pertanian dan pariwisata.

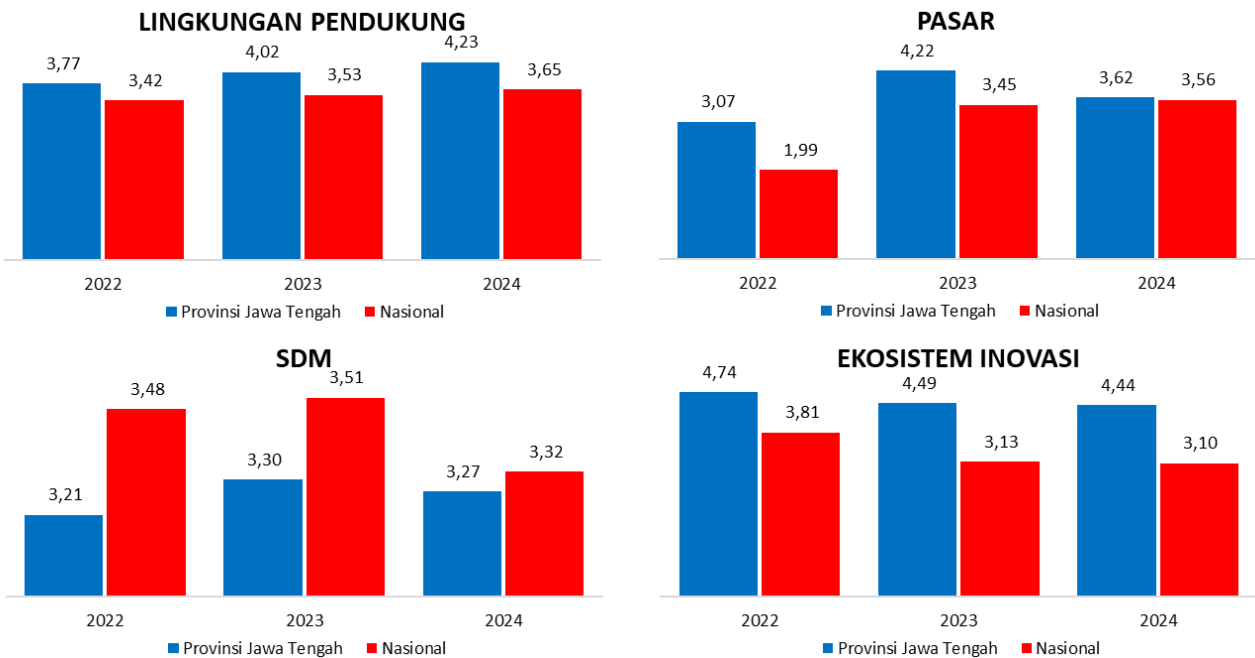


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Gambar 2.21.
Indeks Williamson Per Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

2.3.5. Indeks Daya Saing Daerah

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) didasarkan pada empat komponen pembentuk, yaitu ekosistem inovasi, pasar sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung. Terdapat 12 pilar dan 64 indikator yang merepresentasikan ke-4 komponen pembentuk tersebut. Berdasarkan nilai IDSD yang dikeluarkan oleh BRIN, capaian IDSD Jawa Tengah pada tahun 2024 tumbuh lebih rendah sebesar 0,29 persen. Skor IDSD Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 3,84.

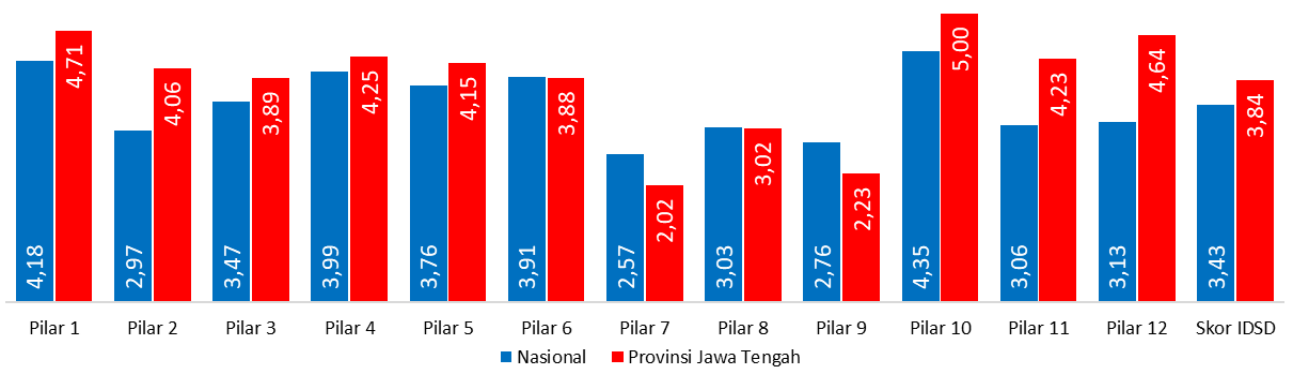


Sumber : BRIN, 2025.

Gambar 2.22.
Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Komponen Pembentuk Tahun 2022 - 2024

Dari keempat komponen pembentuk IDSD Jawa Tengah, hanya komponen lingkungan pendukung yang mengalami peningkatan. Penurunan cukup tajam pada komponen pasar disebabkan karena penurunan capaian pilar 9/sistem keuangan akibat penyesuaian pada beberapa indikator pembentuk. Sementara berdasarkan capaian ke-12 pilar IDSD, Jawa Tengah mampu tumbuh lebih baik

dibandingkan Nasional pada pilar 1 (4,90 persen), pilar 3 (2,37 persen), pilar 4 (17,08 persen), pilar 5 (0,24 persen) dan pilar 6 (10,23 persen).

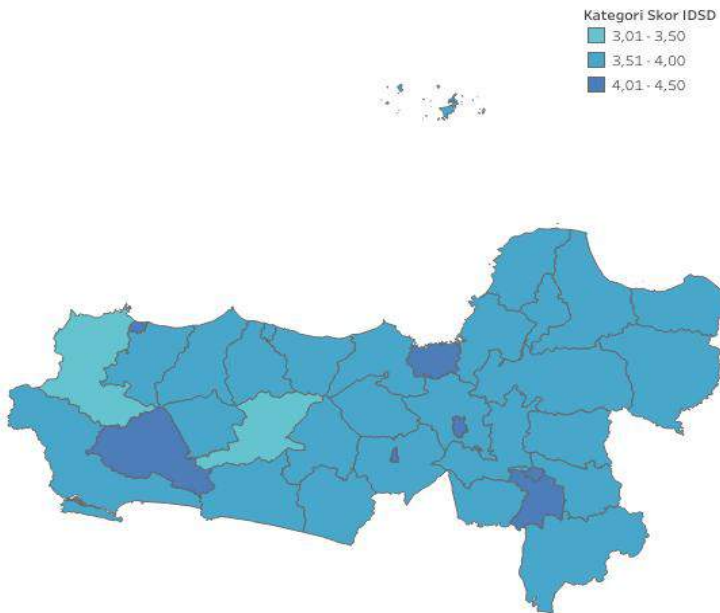


Sumber: BRIN, 2025

Gambar 2.23.
Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Pilar Tahun 2024

Capaian skor IDSD pada 35 Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa masih cukup banyak Kabupaten/Kota yang memiliki skor IDSD di bawah angka provinsi. Meski memiliki capaian IDSD yang lebih rendah dari provinsi, namun pertumbuhannya mampu lebih tinggi dari angka pertumbuhan provinsi.

Wilayah yang memiliki skor IDSD lebih tinggi dibandingkan provinsi antara lain, Kabupaten Sukoharjo (4,11), Kabupaten Banyumas (4,01), Kabupaten Semarang (3,87), Kabupaten Purworejo (3,85) dan Kabupaten Klaten (3,84), termasuk 6 wilayah Kota di Jawa Tengah. Sementara itu, lima wilayah dengan pertumbuhan terendah pada tahun yang sama antara lain, Kabupaten Grobogan (6,63 persen), Kabupaten Brebes (7,06 persen), Kabupaten Pekalongan (7,44 persen), Kota Pekalongan (7,50) dan Kota Surakarta (7,60 persen)



Sumber : BRIN, 2025

Gambar 2.24.
Capaian Skor IDSD Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024

2.3.6. Investasi

Sebagai salah satu komponen pengungkit pertumbuhan ekonomi, Jawa Tengah memerlukan investasi yang tinggi dan berkualitas. Mengacu pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), karakteristik realisasi investasi Jawa Tengah Tahun 2024 didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Asing (PMA) yang mencapai 35,37 triliun rupiah dari total realisasi investasi sebesar 88,44 triliun rupiah. Realisasi investasi tersebut mengalami kenaikan 14,83 persen dibanding tahun 2023 yang sebesar 77,02 triliun rupiah. Perkembangan realisasi nilai investasi secara detail sebagaimana pada Tabel 2.14. Dari sisi jumlah proyek, jumlah proyek PMDN di tahun 2024 jauh lebih besar dibanding PMA yakni 54.526 proyek PMDN berbanding 11.289 proyek PMA. Seluruh proyek tahun 2024 tersebut telah menyerap tenaga kerja sebanyak 409.338 orang yang terbagi pada tenaga kerja di PMA sebanyak 250.957 orang dan serapan tenaga kerja di PMDN sebanyak 158.381 orang.

Tabel 2.16.
Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan LKPM Tahun 2020 – 2024

Tahun	Nilai Realisasi Investasi (Rp Triliun)				
	PMA	PMDN		Jumlah	Pertumbuhan (%)
		LKPM	Non-LKPM		
2020	19,63	30,61	5,83	56,70	-5,80
2021	21,4	31,31	7,08	59,79	6,56
2022	33,9	24,99	9,52	68,41	4,40
2023	23,14	32,98	20,90	77,02	12,59
2024	35,37	33,30	19,77	88,44	14,83

Sumber: DPMPSTP Provinsi Jawa Tengah, 2024.

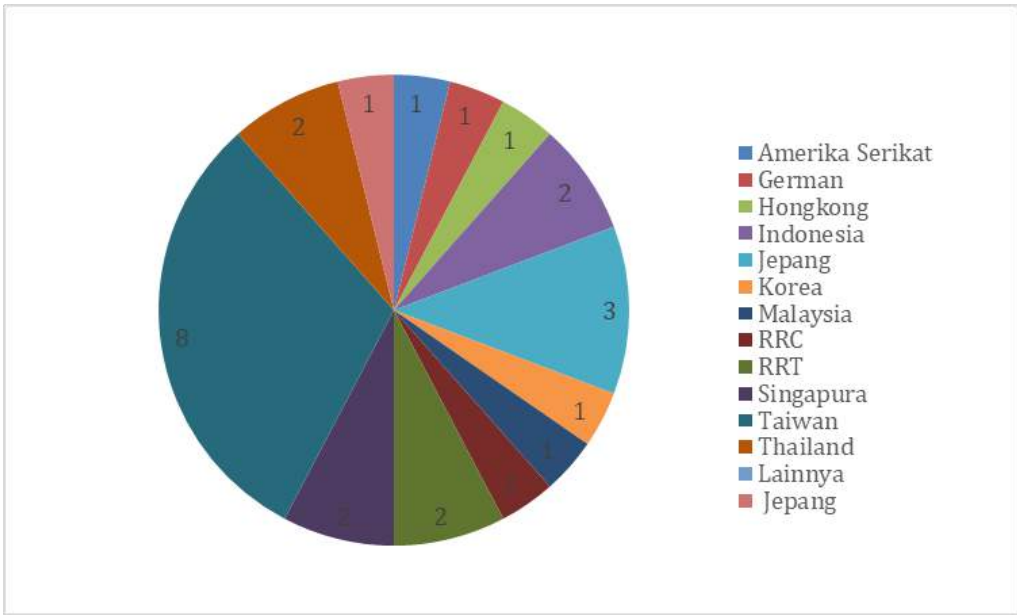
Kinerja realisasi investasi di Jawa Tengah tersebut didukung dengan keberadaan kawasan industri yang ada, terutama penambahan tenant di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Sebagaimana Tabel 2.2, dua kawasan industri terbesar di Jawa Tengah tersebut berkontribusi besar terhadap realisasi investasi di Jawa Tengah. Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri yang ada di Jawa Tengah terus diupayakan melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur pendukung, energi, air baku dan peningkatan pengelolaan Kawasan Industri yang lebih berkualitas. Selain itu usulan KITB menjadi Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan akan semakin meningkatkan minat pelaku usaha untuk merealisasikan investasi di Jawa Tengah. Potensi peningkatan investasi dari Kawasan Industri masih terbuka mengingat masih tersedianya lahan serta semakin meningkatnya dukungan infrastruktur yang tersedia.

Tabel 2.17.
Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Nama Kawasan Industri	Pengelola	Total Luas	Lahan Digunakan	Lahan Tersedia	Jumlah Tenant
1.	Kawasan Industri Kendal (Kawasan Ekonomi Khusus)	PT. Kawasan Industri Kendal	1.000 Ha	933 Ha	43 Ha	117
2.	Grand Batang City	PT. Kawasan Industri Terpadu Batang	3100 Ha	339 Ha	150 Ha (Fase 2)	28
3.	Batang Industrial Park	PT. Perkebunan dan Industri Segajung	287 Ha	99 Ha	4.2 Ha (3 kavling)	14
4.	Jatengland Industrial Park Sayung	PT. Jawa Tengah Lahan Andalan	300 Ha	172.29 Ha	100 Ha	21
5.	Aviarna Industrial Estate	PT. Bumi Raya Perkasa Nusantara	462 Ha (Tahap I 64 Ha)	62.2 Ha	399.8 Ha	4
6.	Kawasan Industri Wijayakusuma	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	266 Ha	115 Ha	52,8 Ha	138
7.	BSB Industrial Park	PT. Karyadeka Alam Lestari	112 Ha	72,56 Ha	2,6 Ha (area yang ditawarkan) tidak dalam satu hamparan	52
8.	Kawasan Industri Cilacap	PT. Cilacap Segara Artha	82 Ha	-	-	-
9.	Kawasan Industri Candi	PT. Indo Permata Usahatama	350 Ha	350 Ha	-	n/a
10.	Kawasan Industri Candi	PT. Dibya Jaya Makmur	300 Ha	±300 Ha	Beberapa ribu m ² tidak dalam satu hamparan	n/a

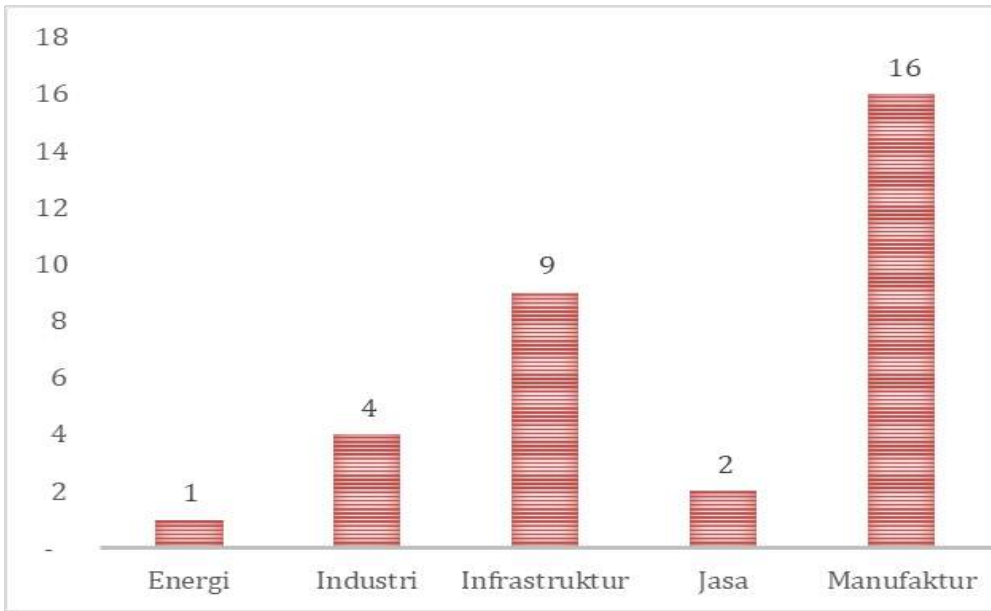
Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan realisasi investasi melalui berbagai program dan kegiatan antara lain peningkatan promosi investasi, pelayanan perizinan, serta pengembangan iklim investasi. Dari promosi investasi dihasilkan kepeminatan melalui kegiatan *business forum* dan *business meeting*. Penyelenggaraan Central Java Investment Business Forum (CJIBF) Tahun 2024 bekerja sama dengan Bank Indonesia setidaknya menghasilkan 12 Letter of Intent (LoI) dengan total rencana investasi sebesar Rp 8,83 triliun. Di luar CJIBF, terdapat 20 LoI dari berbagai negara dan berbagai sektor sehingga total terdapat 32 LoI di Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana pada Gambar. Taiwan merupakan negara dengan kepeminatan terbanyak diikuti oleh Jepang, Singapura, Tiongkok, dan Thailand. Dari 32 kepeminatan tersebut, sektor manufaktur merupakan kepeminatan terbanyak dengan 16 kepeminatan disusul infrastruktur sebanyak 9 kepeminatan dan industri sebanyak 4 kepeminatan.



Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.25.
Jumlah Kepeminatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Asal Negara

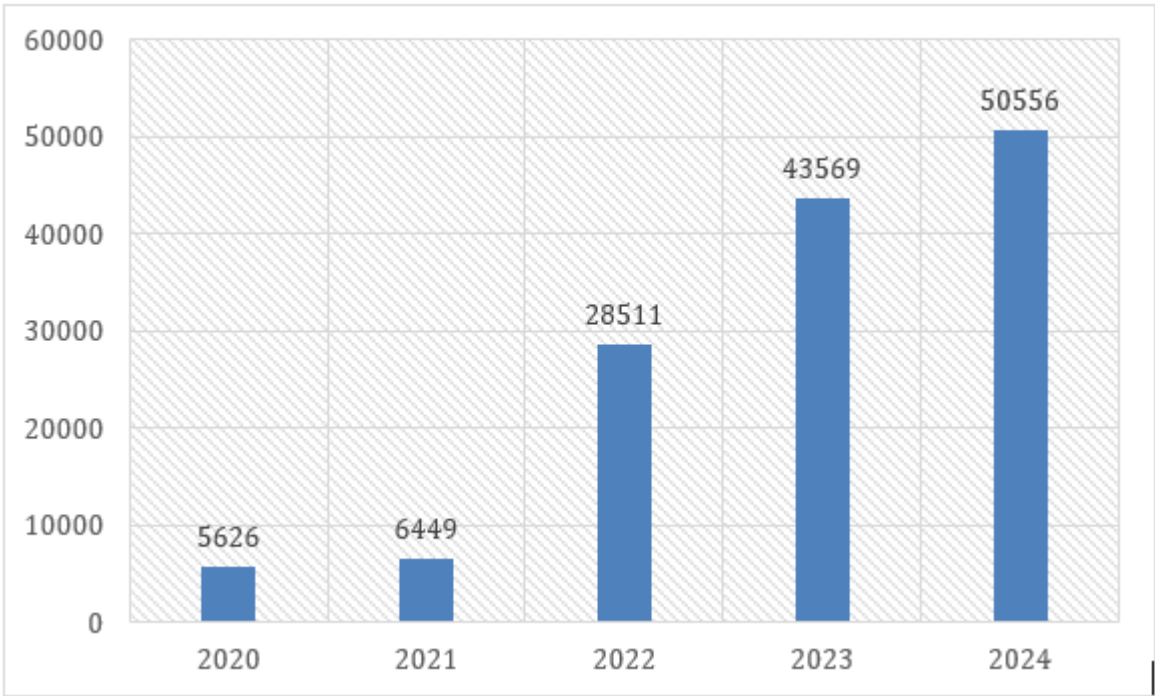


Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.26.
Jumlah Kepeminatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Sektor

Selain promosi investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong peningkatan pelayanan perizinan. Data DPMPTSP menunjukkan tren peningkatan jumlah izin yang diterbitkan dari sebanyak 5.626 izin pada Tahun 2020 menjadi 50.556 pada Tahun 2024 (data hingga bulan Oktober). Berbagai program dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan perizinan antara lain melalui terobosan Layanan Konsultasi dan Pendampingan Terpadu Secara Elektronik (Lakon-e Pandu), Pekan Layanan Sistem Investasi Jos dan Handal (Pena Si Johan), JEBOL IKAN (jemput bola perizinan kapal ikan kewenangan Provinsi, serta layanan perizinan secara online menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng) yang telah dilengkapi dengan fitur digital signature, maupun digitalisasi promosi melalui aplikasi Central Java Investment Platform (CJIP).

Selain itu, dalam rangka mempermudah dan memperluas layanan perizinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memfasilitasi pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dan telah beroperasi 35 MPP di 35 Kabupaten/Kota.

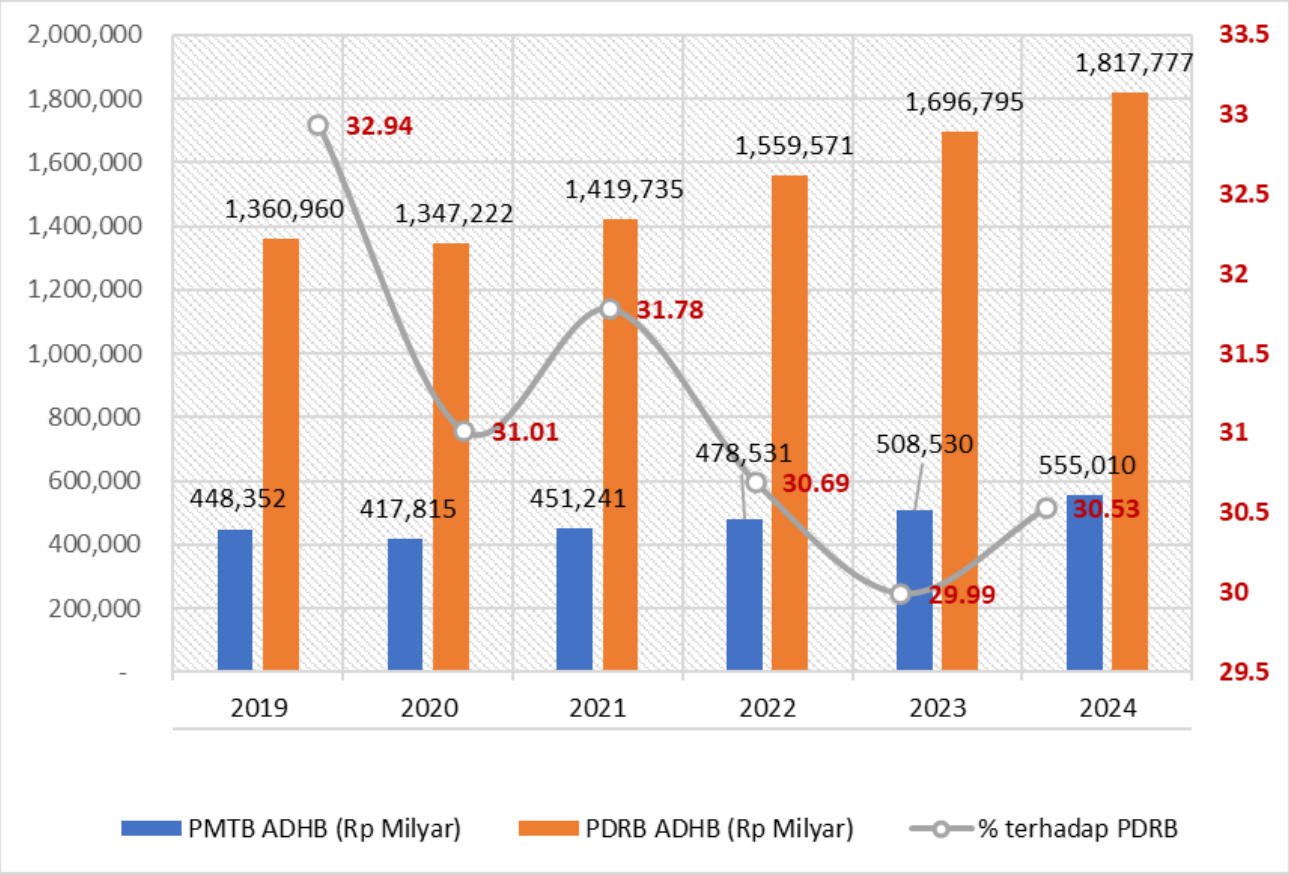


Sumber: DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.27.
Jumlah Izin yang Diterbitkan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 - 2024

Upaya mendorong peningkatan investasi Jawa Tengah juga dilakukan melalui berbagai regulasi. Pemerintah Provinsi Jateng telah menerbitkan Perda No 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Pergub No 36 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pemberian insentif dan kemudahan fiskal maupun non fiskal bagi investor. Terkait penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal, telah diterbitkan Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

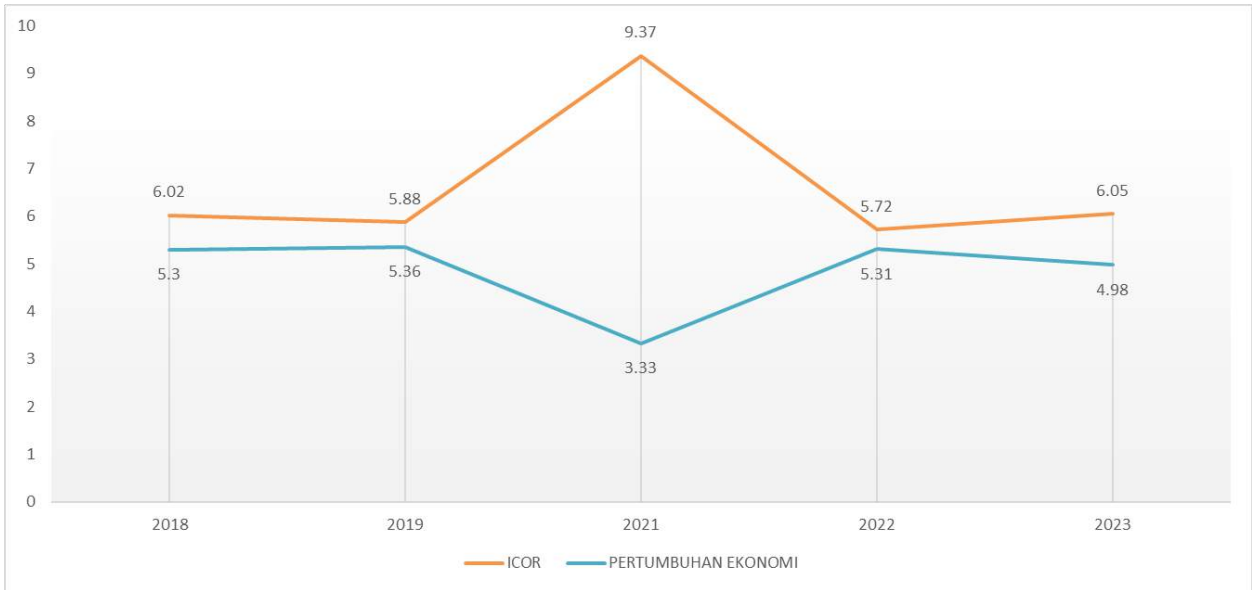
Sejauh apa peran investasi pada perekonomian Jawa Tengah tercermin dari kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang modal seperti bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya. Gambar 2.24 menunjukkan bahwa nilai PMTB pada periode 2019-2024 mengalami peningkatan. Tahun 2019 nilai PMTB Jawa Tengah mencapai Rp 448,35 Triliun meningkat menjadi Rp 555,01 Triliun pada Tahun 2024. Nilai PMTB ini didominasi oleh PMTB bangunan dengan rata-rata mencapai 85%. Namun demikian dari sisi kontribusi PMTB terhadap PDRB (ADHB), terjadi tren penurunan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2024. Tahun 2019 kontribusi PMTB terhadap PDRB sebesar 32,93% sedangkan pada tahun 2024 kontribusi PMTB menjadi 30,53%.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.28.
Nilai PMTB dan Kontribusi PMTB Terhadap PDRB Jawa Tengah (ADHB)
Tahun 2019 – 2024 (%)

Efisiensi investasi di suatu daerah menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha yang dicerminkan dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Nilai ICOR menunjukkan besarnya tambahan modal (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi dapat terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah, apakah bersifat capital intensive atau labour intensive. Angka ICOR Jawa Tengah hingga 2023 masih relatif tinggi sebesar 6,05 (Gambar 2.5). Tingginya nilai ICOR ini menunjukkan penggunaan modal yang belum efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.29.
Nilai ICOR dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

2.3.7. Pertanian

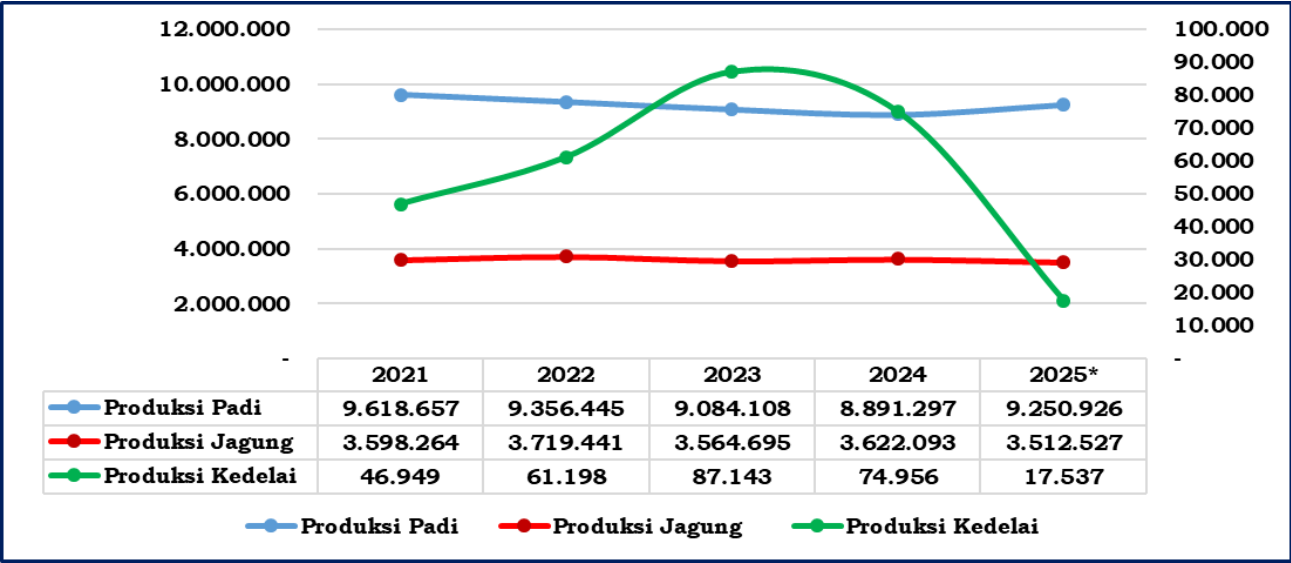
a. Produksi Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan sebagai basis penumpu pangan di Jawa Tengah dan penyokong tercapainya swasembada pangan nasional. Hal tersebut didukung dengan Jawa Tengah salah satu sentra padi di Pulau Jawa. Potensi pertanian Jawa Tengah didukung melalui sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pada kurun waktu 2021-2025, jumlah produksi pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan relatif fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan perubahan iklim atau cuaca yang tidak dapat diprediksi yang sangat berpengaruh terhadap hasil panen petani di Jawa Tengah, selain hal tersebut, kualitas SDM petani juga masih membutuhkan intervensi untuk dapat memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah produksi di sektor pertanian. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi salah satu faktor pembangunan pada Pembangunan Ekonomi Hijau.

Pada periode tahun 2021-2024 komoditas padi mengalami trend yang menurun. Hal tersebut dikarenakan perubahan standar pengukuran produksi pada komoditas padi menggunakan kerangka sampling area (KSA). Pada tahun 2024 terjadi penurunan produksi komoditas padi dikarenakan adanya penurunan luas panen padi sebanyak 91,07 hektare atau 5,54 persen dibandingkan luas panen padi di tahun 2023 yang sebesar 1,64 juta hektare. Bencana banjir di bulan Januari-Februari Tahun 2024 di beberapa wilayah sentra produksi dan kekeringan menyebabkan keterbatasan air sehingga terjadi gagal panen dan penurunan luas panen.

Produksi pada komoditas jagung juga masih fluktuatif dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 karena adanya kenaikan luas panen sebanyak 0,07 hektare atau 17,59 persen dibandingkan luas panen pada tahun sebelumnya. Sedangkan pada komoditas kedelai, produksinya menurun dikarenakan luas tanam kedelai yang semakin menurun, petani kedelai masih bergantung pada bantuan benih, dan minat petani untuk menanam kedelai berkurang dibandingkan komoditas lain karena belum adanya jaminan harga. Faktor lain

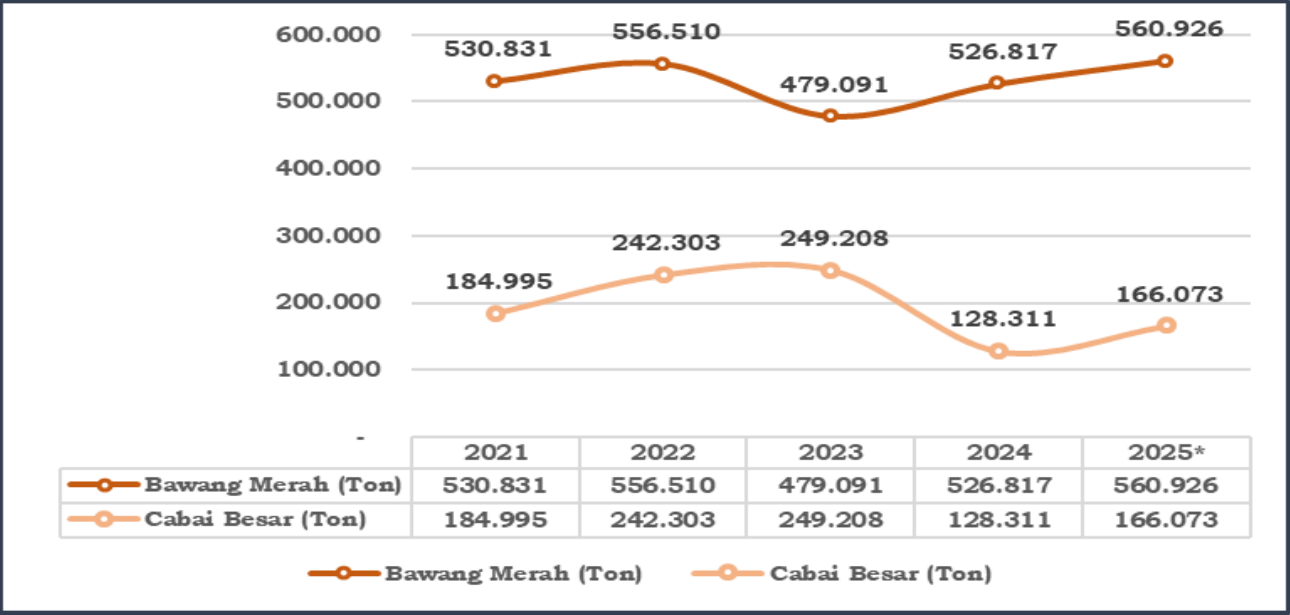
termasuk kerentanan terhadap hama penyakit, kurangnya dukungan dari industri benih unggul dan kemitraan, serta tantangan budidaya yang dianggap lebih berisiko dibandingkan komoditas lain.



Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2025.

Gambar 2.30.
Perkembangan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai di Jawa Tengah Tahun 2021-2025

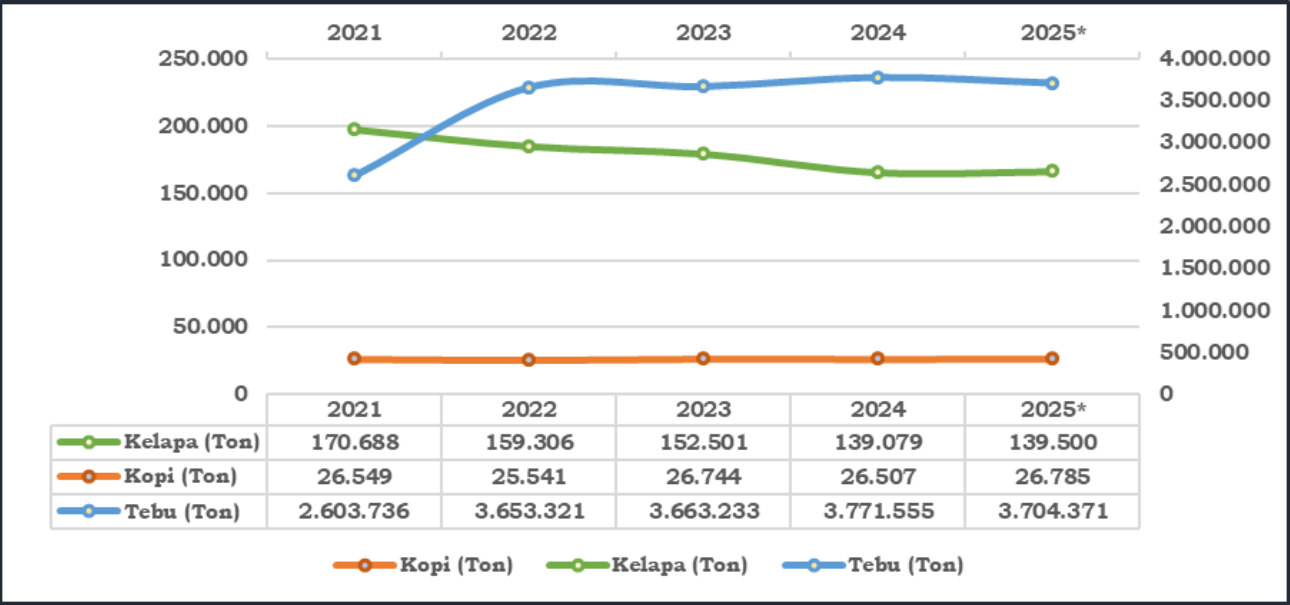
Untuk sub sektor hortikultura, komoditas utama di Jawa Tengah terdiri dari bawang merah dan cabai besar. Produksi bawang merah dan cabai besar pada kurun waktu Tahun 2020 - 2024 mengalami fluktuasi, dengan produksi tertinggi cabai besar pada Tahun 2023 sebesar 249.208 Ton. Terjadi penurunan produksi Cabai yang diakibatkan bencana banjir pada bulan januari-februari tahun 2024 di beberapa wilayah sentra produksi dan kekeringan yang menyebabkan mundurnya jadwal tanam akibat keterbatasan air. Pada komoditas bawang merah dan cabai besar masih diperlukan intervensi pada penyimpanan hasil panen dan fasilitasi distribusi untuk menjaga stabilitas stok dan harga mengingat komoditas ini menjadi pemicu inflasi meskipun Jawa Tengah termasuk kedalam provinsi produsen bawang merah dan cabai nasional.



Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Gambar 2.31.
Perkembangan Produksi Bawang Merah dan Cabai Besar
Tahun 2021-2025

Sementara itu, komoditas strategis tanaman perkebunan di Jawa Tengah terdiri dari tebu, kopi, dan kelapa. Produksi komoditas tebu mengalami peningkatan produksi dari tahun 20200 hingga 2024, upaya peningkatan produktivitas pada komoditas tebu antara lain melalui bongkar roton dan penggunaan bibit unggul. Demikian juga dengan produksi kopi dan kelapa juga mengalami fluktuasi dengan produksi kopi tertinggi pada tahun 2024 sebesar 26.744 ton pada tahun 2023 dan produksi kelapa sebanyak 174.041 juta ton pada tahun 2020. Pada tahun 2024, produksi kopi mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca. Dalam menunjang peningkatan produksi komoditas pertanian, diperlukan optimalisasi pengelolaan lahan aset kebun untuk budidaya perbenihan yang berkualitas dan penerapan teknologi perbenihan pada komoditas strategis.

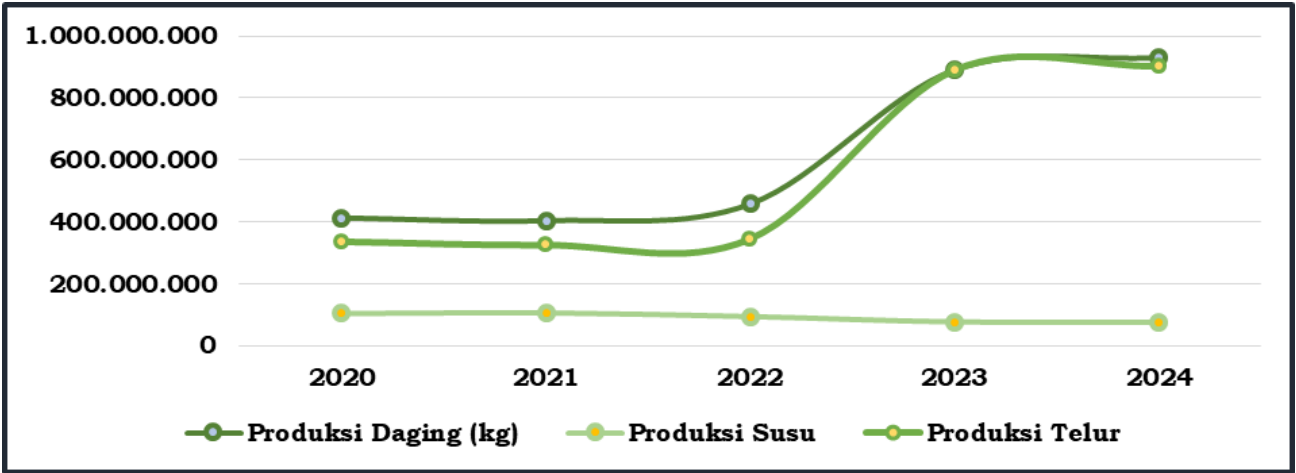


Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2025

Gambar 2.32.
Perkembangan Produksi Tebu, Kopi, Kelapa Tahun 2021-2025

b. Produksi Peternakan

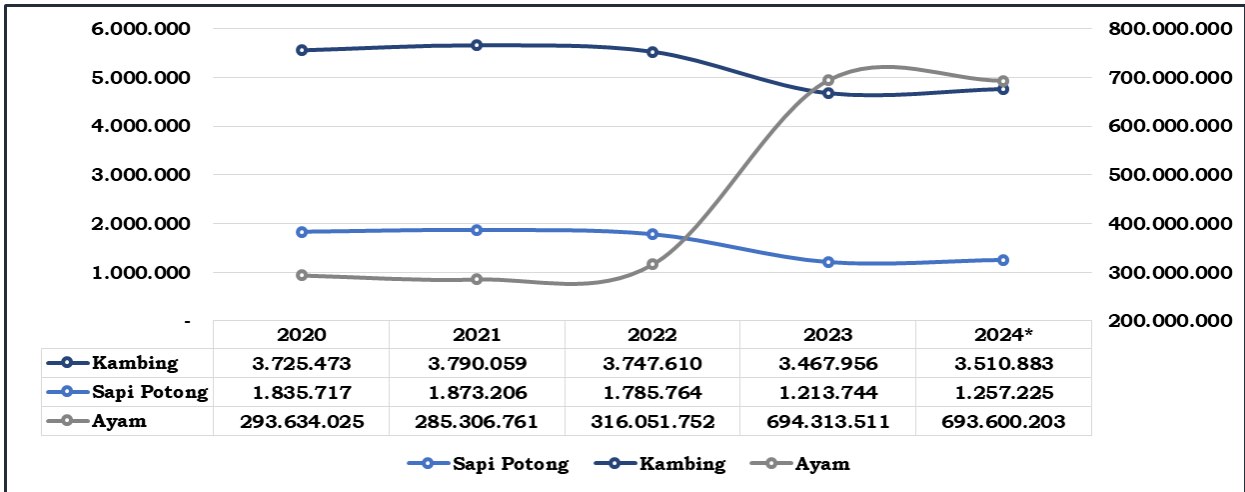
Produksi hasil peternakan pada daging, dan telur di Jawa Tengah dari tahun 2020-2024 relatif mengalami peningkatan, sedangkan produksi susu relatif mengalami penurunan. Produksi daging tertinggi pada Tahun 2024 sebesar 930.177.944 Kg, produksi susu tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 105.613.011 Kg dan produksi telur mencapai titik tertinggi pada Tahun 2024 sebesar 902.097.949 Kg. Tantangan dalam peningkatan produksi susu adalah adanya penurunan populasi sapi perah dan penurunan kualitas genetik sapi perah di Jawa Tengah. Banyak peternak sapi perah beralih ke usaha lain dianggap lebih menguntungkan. Faktor ketersediaan hijauan pakan dan masih ditemukan peredaran pakan konsentrat belum sesuai SNI yang mengakibatkan produksi tidak optimal. Selanjutnya tantangan peningkatan produksi telur yaitu antara lain harga pakan yang tinggi, ketersediaan pakan asal jagung yang belum berlanjut sementara ketergantungan terhadap jagung sangat tinggi produktivitas. Produksi daging, telur dan susu dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 2024

Gambar 2.33.
Perkembangan Produksi Daging, Susu, Telur
Tahun (2020-2024)

Pada kurun waktu Tahun 2020-2024, jumlah populasi sapi potong dan kambing cenderung mengalami penurunan sedangkan untuk ayam cenderung naik khususnya pada tahun 2022. Salah satu penyebab penurunan populasi ternak disebabkan oleh penyakit hewan menular strategis (PHMS).



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 2024

Gambar 2.34.
Perkembangan Populasi Sapi Potong, Kambing, dan Ayam
Tahun (2020-2024)

c. Produksi Perikanan dan Kelautan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah, selain itu juga diarahkan untuk menginisiasi Pembangunan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau. Pembangunan Ekonomi Biru ditopang oleh tiga pilar antara lain pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pada pilar ekonomi didukung oleh perikanan tangkap, perikanan budidaya, manufaktur berbasis kelautan, dan pariwisata berbasis kelautan; pilar lingkungan didukung oleh kualitas sumber daya, konservasi laut, dan energi terbarukan; serta pilar sosial didukung oleh ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan yang berkurang. Sedangkan pada Pembangunan Ekonomi Hijau, aspek perikanan budidaya menjadi salah satu faktor pembangunnya.

Di sisi lain, terkait aspek ketahanan pangan, sektor kelautan dan perikanan ditopang oleh perikanan tangkap dan budidaya; pengelolaan kawasan pesisir termasuk di dalamnya pergaraman; pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pada perikanan tangkap tren produksi perikanan tangkap fluktuatif dari tahun 2020-2024, hal ini disebabkan karena: (1) Implementasi kebijakan Perikanan Ikan Terukur (PIT) yang ditunda sampai 31 Desember 2025 sehingga nelayan dapat mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan asal; (2) Adanya petugas enumerator dari Kementrian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas mendata jumlah ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor, Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo dan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak; dan (3) Cuaca atau iklim pada tahun 2024 relatif aman terkendali sehingga nelayan (kapal besar) dapat melaut untuk menangkap ikan. Perkembangan produksi perikanan tangkap ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.35.
Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan tangkap, Provinsi Jawa Tengah memiliki 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Secara umum Pelabuhan Perikanan di Jawa Tengah telah memiliki kriteria yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kapasitas dermaga maupun kolam pelabuhan dan *breakwater* (penahan gelombang) mengingat semakin meningkatnya jumlah kapal.

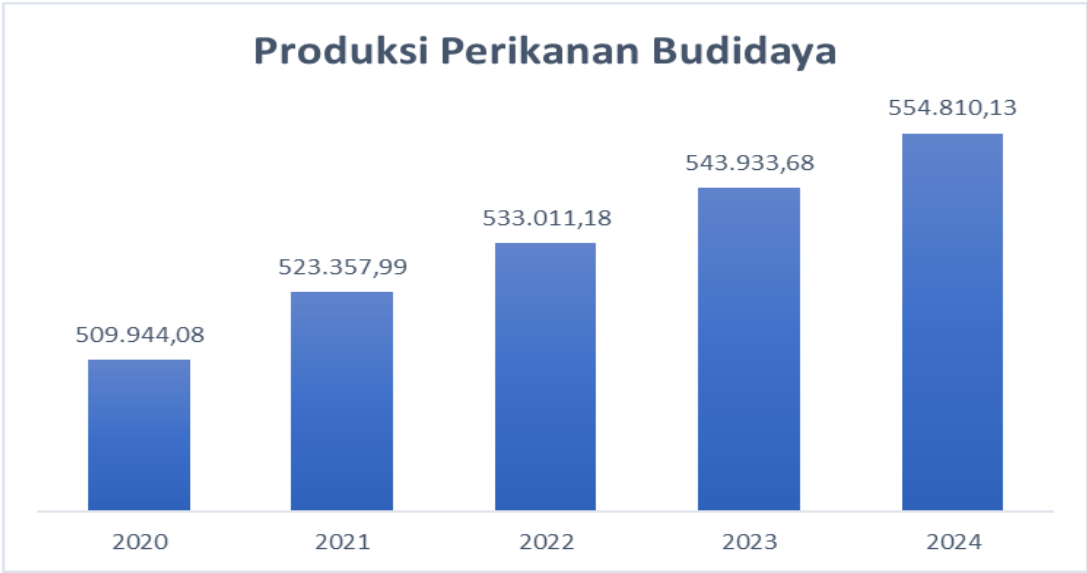
Tabel 2.18.
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah

KRITERIA TEKNIS :		PPP Tegalsari	PPP Karimunjawa	PPP Tasikagung	PPP Bajomulyo	PPP Morodemak	PPP Tawang	PPP Klidanglor	PPP Wonokerto	PPP Asemdayong	PPP Larangan	PPP Lohgending
<i>Fasilitas</i>	<i>Standar</i>											
Tambat labuh Kapal	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT
Panjang Dermaga	≥ 100 m	694 m	160 m	2400 m	693 m	400 m	450 m	300 m	450 m	215 m	130 m	414 m
Kedalaman Kolam	Min >2 m	sesuai	Sesuai	Sesuai	sesuai	sesuai	Sesuai	Sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	Sesuai
Daya tampung	30 Unit Kapal/Total 300 GT	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal
Lahan	5 Ha	16.3 Ha	16,4 Ha	9,659 Ha	6,36 Ha	3,9 Ha	0,7 Ha	50 Ha	0,8 Ha	2,2 Ha	5,1 Ha	18,7 Ha
PENUNJANG :												
Hasil Perikanan	rata-rata 5 Ton/Hari	169 Ton	5,2 Ton	19,2 Ton	87 Ton	13 Ton	1,5 Ton	51 Ton	0,5 Ton	29 Ton	2,8 Ton	0,9 Ton
Terdapat Industri Pengolahan Ikan	Perusahaan / UPI mikro	27	5	220	10	127	Ada	62	Ada	95	Ada	Ada
Industri Penunjang Lainnya	perusahaan	478	1	2	19	4	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
KETERANGAN :												
Jumlah Kapal		335	358	359	318	46	759	153	421	253	138	83
< 10 GT		1	351	0	0	0	700	0	332	227	109	83
10-30 GT		54	7	155	34	46	59	114	89	26	29	0

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Sehubungan dengan risiko kecelakaan yang dihadapi nelayan saat melaut cukup tinggi, maka perlu diberikan perlindungan kepada nelayan dalam bentuk asuransi nelayan. Asuransi nelayan diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi individu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan paruh waktu, nelayan buruh, wanita nelayan dan ABK kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).

Sektor produksi perikanan budidaya relatif mengalami peningkatan karena didukung dengan peningkatan luas lahan budidaya dan adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan. Perkembangan produksi perikanan budidaya ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025

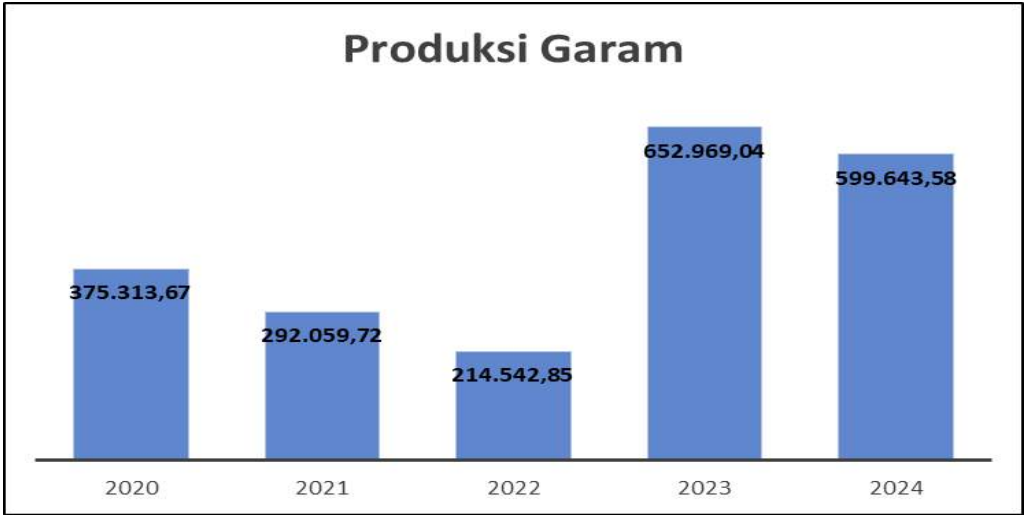
Gambar 2.36.
Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan budidaya, Provinsi Jawa Tengah memiliki sepuluh loka perikanan budidaya berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Budidaya Air Tawar dan Payau Nomor B.22151/DJPB/X/2021, bahwa pemerintah provinsi berperan sebagai penyedia induk unggul dan benih bermutu di lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Dalam lima tahun terakhir, produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan. Namun terdapat beberapa tantangan dalam mengelola perikanan budidaya antara lain kondisi prasarana dan sarana yang belum memadai, serta penurunan kualitas dan kuantitas induk nila, lele, dan gurame. Penurunan kualitas induk tersebut menyebabkan calon induk yang dihasilkan menurun performa dan jumlahnya. Penurunan performa terjadi pada induk kelas GGPS (*Great Grand Parent Stock*), kelas GPS (*Grand Parent Stock*) maupun benih kelas sebar.

Selain itu, pada aspek kelestarian sumber daya ikan perlu dilakukan upaya pelestarian ikan jenis endemik lokal Jawa Tengah, misalnya jenis ikan beong, wader, nilem, tawes, derbang, gabus, dan dewa. Upaya pelestarian ini memberi manfaat untuk aspek konservasi maupun aspek ekonomi. Dalam aspek konservasi berfungsi untuk mempertahankan dari kepunahan plasma nutfah serta mempertahankan keanekaragaman jenis ikan lokal di perairan umum. Sedangkan secara ekonomi akan meningkatkan pendapatan nelayan perairan umum daratan

karena ikan endemik memiliki rasa yang khas, unik serta bermanfaat bagi kesehatan sehingga harganya mahal. Namun masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu belum adanya prasarana dan sarana secara khusus untuk mengembangkan ikan endemik.

Sedangkan pada pergaraman, secara umum produksi garam cenderung fluktuatif mengalami peningkatan di tahun 2023 namun menurun kembali di tahun 2024. Perkembangan produksi garam ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.37.
Produksi Garam (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Di sisi lain, tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah pada periode 2020 – 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih berada di bawah angka nasional. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.38.
Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Angka konsumsi ikan Jawa Tengah masih dibawah nasional disebabkan beberapa hal yaitu antara lain masih terdapat pemahaman yang salah di masyarakat bahwa ikan dapat memberikan dampak buruk berupa gatal, bau amis,

dan alergi; harga produk ikan relatif lebih tinggi dibandingkan sumber protein lainnya; serta ragam pengolahan ikan yang belum bervariasi. Sedangkan pada aspek pengolahan masih didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil dengan segala keterbatasan terutama pada aspek pemenuhan standar kelayakan produksi.

2.3.8. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Jumlah koperasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 jumlah koperasi sebanyak 19.447 unit dan pada tahun 2024 sebanyak 21.624 unit, hal tersebut didukung dengan adanya kebijakan kemudahan dalam membentuk koperasi melalui disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, meskipun jumlah koperasi mengalami kenaikan tetapi tingkat keaktifan cenderung menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2020 persentase koperasi aktif sebesar 67,35% dan pada tahun 2024 persentase koperasi aktif sebesar 45,71%. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian Jawa Tengah dan kinerja koperasi. Secara lengkap data koperasi se-Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19.
Persentase Koperasi Aktif Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Koperasi	19.447	20.777	21.018	21.276	21.624
2.	Jumlah Koperasi aktif	13.090	10.770	10.327	10.621	9.886
3.	Prosentase Kopereasi Aktif (%)	67,35	48,16	49,13	48,22	45,71

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2024

Hasil pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi dapat dilihat dari capaian indikator persentase koperasi sehat. Persentase koperasi sehat di Jawa Tengah mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 sebesar 23,44 persen sedangkan pada tahun 2024 sebesar 35,40 persen, hal ini didukung adanya kolaborasi antar bidang dalam pembinaan koperasi melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan sehingga koperasi mampu meningkatkan kualitas dan kinerja koperasi dalam kelembagaan dan usahanya. Untuk Perkembangan tingkat Kesehatan koperasi di Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.20
Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Se-Jawa Tengah (KSP/USP)	12.774	12.903	13.166	13.218	12.876
2.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Provinsi (KSP/USP) yang dinilai kesehatannya	128	222	375	390	274
3.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (unit)	30	29	89	106	97
4.	Prosentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (%)	23,44	13,06	23,73	27,18	35,40

Sumber: Dinkop UKM Prov. Jateng, 2024.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara sinergi bersama dengan segenap pihak senantiasa melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan. Jumlah UMKM yang telah dibina menunjukkan peningkatan dari sebanyak 167.391 unit pada tahun 2020 menjadi 193.200 unit pada tahun 2024. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM juga meningkat dari sebesar 1.298.007 orang pada tahun 2020 menjadi sebanyak 1.367.433 orang pada tahun 2024. Aset UMKM juga meningkat dari sebesar 38,353 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 39,506 miliar rupiah pada tahun 2024. Demikian juga omset mengalami peningkatan dari sebesar 67,087 miliar pada tahun 2020 menjadi 69,774 miliar pada tahun 2024. Secara rinci data UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21.
Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UMKM Binaan	UMKM	167,391	173,431	180,579	187.746	193.200
	- Produksi/Non Pertanian	UMKM	57,527	60,449	65,063	70.519	75.565
	- Pertanian	UMKM	27,653	28,284	28,400	28.483	28.555
	- Perdagangan	UMKM	62,083	63,965	65,979	67.098	67.256
	- Jasa	UMKM	20,128	20,733	21,137	21.646	21.824
2	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	1,298,007	1,311,015	1,330,343	1.352.136	1.367.433
3	Asset	Rp. Milyar	38,353	38,521	38,898	39.221	39.506
4	Omzet	Rp. Milyar	67,087	68,242	68,581	69.381	69.774

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2024.

Dukungan kredit perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank menjadi hal yang cukup penting dalam rangka pengembangan UMKM. Penyaluran kredit bagi UMKM dapat dilihat dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari tahun 2020-2024 per kabupaten/kota yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22.

Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari Tahun 2019-2024 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Penyaluran Kur per wilayah	Tahun											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)
1	KAB. CILACAP	41,355	960,285,860,282	49,966	1,394,346,710,619	67,017	2,129,737,861,185	71,016	2,624,919,833,453	52.614	1.840.190.849.426	56.275	2.176.554.998.479
2	KAB. BANYUMAS	55,115	1,282,747,263,690	62,067	1,722,310,316,244	81,032	2,592,038,105,781	84,593	3,076,948,656,311	60.395	2.111.050.542.451	53.699	2.006.136.712.509
3	KAB. PURBALINGGA	25,654	602,714,584,855	27,689	803,732,756,908	40,839	1,299,152,047,779	40,276	1,442,972,839,914	32.626	1.058.008.932.917	31.673	1.126.294.944.936
4	KAB. BANJARNEGARA	29,766	632,705,263,546	36,186	899,705,181,588	42,432	1,251,222,195,514	44,733	1,521,610,585,804	29.647	1.003.269.757.964	33.845	1.266.746.284.449
5	KAB. KEBUMEN	25,513	573,708,207,067	34,149	952,579,273,357	42,936	1,388,686,443,433	41,576	1,645,011,183,407	32.372	1.233.727.118.960	32.993	1.328.623.172.069
6	KAB. PURWOREJO	21,332	408,576,873,790	28,451	698,850,237,182	35,719	1,027,427,376,945	36,796	1,332,611,684,888	24.644	959.659.862.318	25.431	1.050.975.866.811
7	KAB. WONOSOBO	23,057	515,131,370,783	29,502	786,462,223,780	32,089	1,087,479,988,575	34,258	1,335,876,474,453	24.735	963.015.421.204	25.826	1.060.812.027.276
8	KAB. MAGELANG	32,030	732,548,594,861	40,950	1,097,838,191,734	46,039	1,460,713,188,234	49,489	1,867,082,199,837	33.043	1.272.358.457.628	35.678	1.420.970.721.587
9	KAB. BOYOLALI	31,959	828,780,579,519	37,366	1,112,557,697,460	45,996	1,606,818,765,940	49,694	2,077,453,794,156	32.841	1.480.605.654.608	34.456	1.589.131.804.968
10	KAB. KLATEN	37,544	982,285,115,877	51,196	1,444,646,931,716	61,939	2,121,148,190,896	63,467	2,681,277,315,450	38.966	1.830.230.807.851	39.400	1.717.336.765.089
11	KAB. SUKOHARJO	25,087	706,836,957,302	34,744	1,081,776,881,390	42,854	1,582,353,275,797	41,976	1,920,002,945,800	29.850	1.464.647.494.075	30.205	1.509.879.776.765
12	KAB. WONOGIRI	25,496	685,671,001,093	35,877	1,087,998,374,407	46,919	1,590,755,342,861	49,380	2,044,594,999,547	26.632	1.187.220.565.189	30.638	1.317.800.477.108
13	KAB. KARANGANYAR	27,911	722,856,807,398	35,901	1,088,590,422,286	43,330	1,569,531,753,495	44,436	2,053,690,544,527	28.001	1.442.136.910.636	34.262	1.774.156.628.605
14	KAB. SRAGEN	34,534	899,981,114,268	40,635	1,300,547,042,229	52,677	2,013,289,872,710	54,400	2,541,688,588,633	33.726	1.672.257.577.725	36.412	1.884.137.795.221
15	KAB. GROBOGAN	49,175	979,056,006,113	67,026	1,542,288,553,779	82,266	2,405,075,535,917	89,416	3,173,851,980,803	54.037	2.088.427.262.757	60.687	2.550.340.446.916
16	KAB. BLORA	57,549	1,210,374,601,719	73,654	1,699,912,069,917	75,130	2,104,246,917,986	76,514	2,611,075,351,064	41.764	1.592.526.050.133	44.895	1.866.536.759.518
17	KAB. REMBANG	25,223	544,814,780,697	28,769	699,336,336,217	32,345	1,010,725,024,881	36,240	1,369,369,188,553	27.307	1.015.201.535.982	29.269	1.189.514.476.245
18	KAB. PATI	66,826	1,486,154,011,274	79,555	2,249,691,305,260	80,544	2,797,359,822,366	83,493	3,631,451,274,447	60.426	2.562.022.051.348	64.454	2.943.916.562.267
19	KAB. KUDUS	23,425	589,874,956,352	26,887	780,606,313,383	29,209	1,061,448,572,509	32,328	1,436,607,198,786	24.712	1.060.003.420.780	26.153	1.232.991.782.451
20	KAB. JEPARA	35,160	740,258,155,922	36,752	954,019,977,024	46,850	1,474,838,409,206	50,478	1,976,896,899,818	44.487	1.601.310.865.169	44.884	1.775.401.178.345
21	KAB. DEMAK	32,212	769,213,338,424	36,477	1,020,473,479,231	42,974	1,527,633,391,898	48,849	2,037,771,456,030	33.056	1.483.481.605.841	33.236	1.564.267.574.419

No	Penyaluran Kur per wilayah	Tahun											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)
22	KAB. SEMARANG	30,419	765,945,740,676	41,340	1,098,366,277,769	44,383	1,651,074,085,410	46,723	2,095,318,514,959	35.194	1.578.501.891.832	38.600	1.760.403.004.350
23	KAB. TEMANGGUNG	23,732	522,430,931,880	32,682	812,940,656,417	37,125	1,149,057,568,683	40,697	1,449,775,849,161	30.305	1.143.186.858.793	34.026	1.274.053.034.598
24	KAB. KENDAL	27,899	652,804,255,069	39,596	999,378,230,464	42,382	1,403,642,495,261	44,397	1,722,038,355,016	27.483	1.174.300.275.683	30.529	1.350.043.946.362
25	KAB. BATANG	21,407	443,649,337,912	24,481	661,257,570,763	32,120	1,066,373,925,602	37,065	1,353,706,515,946	22.069	867.802.657.859	27.971	1.123.930.321.588
26	KAB. PEKALONGAN	18,725	378,276,899,231	24,150	629,124,933,039	31,580	981,476,531,591	35,577	1,222,824,400,202	23.116	784.239.646.945	26.415	963.447.959.436
27	KAB. PEMALANG	36,203	739,922,402,326	48,814	1,164,357,376,954	62,162	1,773,175,921,199	65,552	2,157,929,858,009	50.393	1.560.358.775.470	51.534	1.743.797.669.782
28	KAB. TEGAL	47,475	1,021,705,034,995	56,474	1,432,849,120,987	73,900	2,057,898,435,824	77,384	2,450,206,822,298	45.317	1.442.753.480.818	40.304	1.509.602.156.513
29	KAB. BREBES	75,573	1,417,876,938,238	86,856	1,956,644,782,697	93,977	2,558,951,345,370	102,660	3,080,273,062,920	66.398	1.898.270.289.270	64.224	2.116.342.110.100
30	KOTA MAGELANG	3,417	79,949,600,586	4,993	130,892,399,071	4,793	159,603,112,815	4,827	216,101,106,000	3.129	136.664.736.790	3.095	142.417.831.698
31	KOTA SURAKARTA	13,086	391,251,167,491	19,305	593,619,780,111	30,071	1,047,482,051,404	27,952	1,290,010,839,228	18.082	857.645.792.443	15.266	773.410.157.103
32	KOTA SALATIGA	4,771	128,492,192,604	5,926	179,309,053,998	5,676	220,769,639,245	6,110	320,100,400,000	4.213	228.617.475.000	5.125	276.689.049.791
33	KOTA SEMARANG	21,371	695,195,395,549	31,861	1,070,732,933,645	37,328	1,702,978,989,436	42,230	2,430,847,721,262	27.294	1.756.872.111.550	28.495	1.715.623.025.186
34	KOTA PEKALONGAN	6,464	150,943,612,600	7,247	224,298,605,237	10,143	323,354,337,497	11,052	386,682,529,242	8.870	272.832.250.604	7.538	286.935.040.629
35	KOTA TEGAL	7,676	229,764,739,800	7,889	262,776,282,173	9,515	360,062,578,224	10,930	464,287,866,282	5.847	218.073.616.271	6.306	282.556.332.469

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2024.

2.3.9. Perdagangan

Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2016 hingga tahun 2024 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Jawa Tengah dan hingga saat ini merupakan tiga besar sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan, dan pertanian. Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan tahun 2024 sebesar 1.817.776,96 Miliar rupiah, dan memberikan kontribusi terhadap total PDRB ADHB Jawa Tengah sebesar 13,49 persen. Nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2019-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23.
Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai total PDRB (Miliar Rp)	1.360.960,13	1.347.222,49	1.419.735,15	1.559.140,36	1.695.621,57	1.817.776,96
2	Nilai Sektor Perdagangan (Miliar Rp)	187.064,45	181.860,78	195.399,04	212.208,01	230.730,97	245.177,13
3	Kontribusi (%)	13,75	13,5	13,76	13,61	13,61	13,49

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Total ekspor Jawa Tengah selama tahun 2019-2024 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang menurun karena pengaruh dari pandemi Covid-19 dan pada tahun 2023 dikarenakan terjadi perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan utama ekspor. Nilai ekspor tahun 2022 tercatat sebesar US\$11.777,91 juta, menurun menjadi sebesar US\$10.229,18 juta pada tahun 2023, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi sebesar US\$11.181,64 juta. Ekspor Jawa Tengah terdiri dari ekspor migas dan nonmigas dengan proporsi lebih besar pada ekspor nonmigas, yang selama kurun waktu tahun 2018-2020 trennya sejalan dengan tren nilai ekspor total di Jawa Tengah. Nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah pada tahun 2022 tercatat sebesar US\$8.11.210,92 juta, menurun menjadi sebesar US\$9.868,62 juta pada tahun 2023, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi sebesar US\$10.763,68 juta.

Tabel 2.24.
Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (Juta US\$)

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor	8.516,70	8.088,30	10.733,44	11.777,91	10.229,18	11.181,64
- Migas	303,86	384,06	438,99	566,99	360,56	417,96
- Non Migas	8.212,84	7.704,24	10.294,45	11.210,92	9.868,62	10.763,68

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025.

Sementara itu, total nilai impor Jawa Tengah selama tahun 2019-2024 cukup fluktuatif, di mana pada tahun 2020 trennya menurun, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021-2022, menurun kembali pada tahun 2023 dan meningkat pada tahun 2024. Nilai impor Jawa Tengah tahun 2019-2024 tercatat sebesar US\$12.567,62 juta menurun menjadi US\$8.719,80 juta tahun 2020, kemudian meningkat menjadi US\$11.781,79 juta pada tahun 2021 dan US\$15.013,61 juta pada tahun 2022, menurun kembali pada tahun 2023 menjadi US\$14.497,42 juta dan meningkat pada tahun 2024 menjadi US\$14.544,51 juta.

Untuk impor nonmigas Jawa Tengah yang pada tahun 2024 mencatatkan nilai sebesar US\$7.842,32 juta, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar US\$7.461,36 juta. Perkembangan nilai impor Jawa Tengah baik migas dan nonmigas dapat dilihat di tabel sebagai berikut.

Tabel 2.25.
Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024 (Juta US\$)

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Impor	12.567,62	8.719,80	11.781,79	15.013,61	14.497,42	14.544,51
- Migas	3.906,03	2.154,76	4.440,52	7.435,63	7.036,06	6.702,19
- Non Migas	8.661,59	6.565,04	7.341,27	7.577,98	7.461,36	7.842,32

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Neraca perdagangan Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami defisit, di mana selama tahun 2019-2024 mengalami penurunan defisit. Pada tahun 2022, neraca perdagangan Jawa Tengah mengalami defisit sebesar US\$3.235,70 juta, meningkat pada tahun 2023 menjadi US\$4.268,24 juta, kemudian menurun menjadi US\$3.362,87 juta pada tahun 2024. Defisit dalam neraca perdagangan Jawa Tengah pada tahun 2024 dipicu oleh defisit sektor migas sebesar US\$6.284,23 juta. Sementara di sisi lain, sektor nonmigas pada tahun 2024 mencatatkan surplus pada neraca perdagangan Jawa Tengah sebesar US\$32.921,36 juta. Perkembangan neraca perdagangan Jawa Tengah tahun 2019- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26.
Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024 (Juta US\$)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor	8.516,70	8.088,30	10.733,44	11.777,91	10.229,18	11.181,64
- Migas	303,86	384,06	438,99	566,99	360,56	417,96
- Non Migas	8.212,84	7.704,24	10.294,45	11.210,92	9.868,62	10.763,68
Impor	12.567,62	8.719,80	11.781,79	15.013,61	14.497,42	14.544,51
- Migas	3.906,03	2.154,76	4.440,56	7.435,63	7.036,06	6.702,19
- Non Migas	8.661,59	6.565,04	7.341,23	7.577,98	7.461,36	7.842,32
Surplus/Defisit	(4.050,92)	(631,5)	(1.048,35)	(3.235,70)	(4.268,24)	(3.362,87)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Guna mendukung peningkatan ekspor nonmigas Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi penerbitan sertifikasi mutu barang. Untuk penerbitan sertifikasi mutu barang sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami capaian yang fluktuatif.

Tabel 2.27.

Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Jenis Usaha Perdagangan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri (Angka Pengenal Impor - unit)	2.437	1.767	1.925	2.019	n/a	n/a
2	Jumlah jenis barang bersertifikat mutu (jenis)	5 jenis barang	7 jenis barang	6 jenis barang	7 jenis barang	7 jenis barang	3 jenis barang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dalam rangka pelaksanaan konsumen cerdas, yang diharapkan konsumen dapat untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan mutu dan kualitas maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan kabupaten/kota melakukan upaya perlindungan konsumen. Namun demikian apabila terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Jumlah LPKSM sampai dengan tahun 2024 sebanyak 32 unit yaitu di 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Tabel 2.28.

Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (kab/kota)	8	4	1	0	n/a	1
2	Jumlah kabupaten/kota memiliki Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM (kab/kota)	18 di 9 Kab/Kota	18 di 9 Kab/Kota	3 di 3 kab kota	5 di 4 Kab/Kota	n/a	32 di 18 Kab/Kota
3	Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kabupaten/kota (%)	111 kasus (100%)	27 kasus (100%)	6 kasus (100%)	0 kasus (-)	n/a	15 Kasus (100%)
4	Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) (jenis)	3.512	2.741	1.228	305	n/a	191

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Lebih lanjut dalam rangka lebih memperkuat daya tahan industri dan perdagangan di dalam negeri telah diinisiasi pula upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; serta memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Adapun sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat; peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN); peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; serta peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

2.3.10. Perindustrian

Kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk sektor industri pada tahun 2024 Triwulan III sebesar 152,913 juta rupiah, dan memberikan kontribusi sebesar 33,29 persen terhadap total PDRB yang sebesar 0,459 miliar rupiah. Nilai dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2019 – 2024 Triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29.
Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 Triwulan III

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024 TW III
1	Nilai total PDRB (Juta Rp)	1.362.457.380,57	1.347.922.689,03	1.420.799.908,38	1.157.316.832,47	1.696.795.419,3	459.406.000
2	Nilai Sektor Industri (Juta Rp)	468.992.159,77	464.609.134,06	487.445.099,28	392.749.654,42	577.429.037,01	152.913.000
3	Kontribusi (%)	34,41	34,47	34,31	33,94	34,03	33,29

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Capaian pertumbuhan industri besar di Jawa Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. IKM di tahun 2019 sebanyak 327.110 unit usaha meningkat dibanding tahun 2024 yang sebesar 240.491 unit usaha.

Tabel 2.30.
Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024

No	Jenis Industri	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Besar	1.584	1.591	2.417	2.982	n/a	2.680*
2	Kecil dan Menengah	327.110	327.200	912.421	204.608	n/a	240.491*

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dari sejumlah industri yang berkembang di Jawa Tengah, beberapa jenis industri menjadi industri unggulan daerah dan dijadikan sebagai kompetensi inti industri meliputi industri mebel, tekstil produk tekstil, makanan ringan, mesin dan perlogaman, komponen otomotif, dan kerajinan. Pola pengembangan industri tersebut diarahkan melalui pendekatan pembentukan klaster industri potensial untuk meningkatkan jejaring dan rantai nilai industri unggulan daerah yang melibatkan industri utama, industri pendukung dan usaha terkait. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk kelembagaan klaster industri sebanyak 20 klaster terdiri dari 6 klaster logam mesin dan tekstil, 7 klaster komponen otomotif, elektronika, aneka, serta 7 klaster agro, kimia dan hasil hutan.

Tabel 2.31.
Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024

No	Jenis industri	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	jumlah klaster logam, mesin, tekstil	6	6	6	6	6	6
2	jumlah klaster komponen otomotif, elektronika dan aneka	7	7	7	7	7	7
3	Jumlah klaster agro, kimia dan hasil hutan	6	6	6	7	7	7
	Jumlah klaster industri	19	19	19	20	20	20

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

2.3.11. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Dalam pelaksanaannya capaian indikator kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.32.
Capaian Indikator Kinerja Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	2,99	3,03	3,29	3,40	3,56 %
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	-7,98	5,92	16,99	11,24	10,03%
3	Rata-rata jumlah pengeluaran belanja wisatawan Nusantara	NA	NA	4.184.389	4.364.318	5.682.188
4	Rata-rata Jumlah Pengeluaran belanja Wisatawan Mancanegara	NA	NA	\$ 670	\$ 627,85	\$ 713,75
5	Rata-rata lama tinggal Wisnus	1,31	1,3	1,36	1,35	1,33
6	Rata-rata lama tinggal Wisman	1,94	2,4	2,49	2,15	1,99
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	78.290	1.793	144.691	464.719	498.272
6	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	22.629.085	21.332.409	46.565.437	56.485.087	59.314.385

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
7	Daya Tarik Wisata (DTW)	982	1130 (DTW Alam 418, DTW Budaya 175, DTW Buatan 365)	1235 (DTW Alam 607, DTW Budaya 172, DTW Buatan 456)	1393(DTW Alam 693, DTW budaya 232, DTW buatan 468)	1607 (DTW Alam 750, DTW Budaya 267 dan DTW Buatan 590)
8	Jumlah Desa Wisata	Na	717	818	776	885 Desa Wisata
9	PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	na	1,89	1,93	2,07	na
10	Pelaku Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	200 orang	150 orang	160 orang	330 Orang	295 orang
11	Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	Na	160 orang	210 orang	410 orang	480 orang

Sumber: Dinporapar Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 3,40% (2023) menjadi 3,53% (2024), Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata sebesar 10,47 % merupakan tertinggi dibanding 17 sektor lapangangan usaha lainnya. Jumlah kunjungan wisatawan juga mengalami kenaikan sebanyak 56.946.806 (2023) menjadi 59.812.658 (2024) yang terdiri dari wisatawan nusantara 59.314.385 orang dan Wisatawan Mancanegara 498.272. Adapun kontribusi PDRB sektor ekonomi kreatif sebesar 2,07 % di tahun 2023.

2.3.12. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. . Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan di Jawa Tengah sebesar 31.902,80 km yang terbagi sesuai kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan provinsi sebesar 7,65 persen;
2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 87,40 persen;
3. Kewenangan Nasional sebesar 4,96 persen.

Sedangkan jalan tol yang sudah fungsional sepanjang 393,01 km dalam kondisi baik. Kondisi jalan kewenangan provinsi tahun 2024 yang telah sesuai dengan standar yaitu lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton adalah sepanjang 1311,12 km atau 53,73 persen. Kondisi jalan sesuai kewenangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33.
Kondisi Permukaan Jalan Sesuai Kewenangan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Kewenangan	Kondisi Ruas Jalan								Total Panjang Jalan (Km)
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
Nasional	653,39	41,33	873,96	55,28	53,60	3,39	0,00	0,00	1.580,95
Provinsi	2024	1.584,63	64,94	647,33	26,52	131,92	5,42	76,24	3,12
Kabupaten/ Kota	15.192,77	54,49	7.007,02	25,13	2.839,23	10,18	2.842,71	10,20	27.881,73
Jumlah Jateng	17.430,79	54,64	8.528,30	26,73	3.024,75	9,49	2.918,95	9,15	31.902,80
Jalan Tol	393,01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,01

Perkembangan kondisi jalan kewenangan provinsi dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kondisi permukaan jalan baik sejak tahun 2019 dengan total panjang Jalan Provinsi 2.404,74 km (sesuai SK Gubernur No. 620/2 tahun 2016 tentang Penetapan Status Jalan sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah) mengalami penurunan hingga tahun 2021. Berdasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 622/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah, total panjang Jalan Provinsi mengalami perubahan menjadi 2.440,12 km karena adanya upgrade ruas-ruas Jalan Kabupaten yang strategis dan disesuaikan dengan fungsi jalan. Penanganan jalan-jalan Kabupaten yang berubah status menjadi Jalan Provinsi baru dimulai pada tahun 2024. Kemantapan jalan pada tahun 2024 sebesar 91,46% (64,94% baik dan 26,52% sedang). Meskipun kondisi mantap meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 90,88%, namun kondisi jalan baik menurun sebesar 4,56%. Jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, kondisi ini dapat menurun sehingga menjadi rusak.

Kondisi permukaan Jalan Provinsi mantap tahun 2024 dengan total panjang jalan sesuai update adalah 91,46% dengan rincian seperti ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.34.
Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

Tahun	Kondisi								Panjang Jalan Provinsi (Km)
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
2020	1.869,69	77,75	312,13	12,98	222,93	9,27	0,000	0,00	2.404,74
2021	1.871,61	77,83	313,45	13,03	219,682	9,14	0,000	0,00	2.404,74
2022	2.010,27	83,60	213,89	8,89	68,33	2,84	112,25	4,67	2.404,74
2020	1.869,69	77,75	312,13	12,98	222,93	9,27	0,000	0,00	2.404,74
2023	1.716,04	70,33	487,79	19,99	124,32	5,09	111,97	4,59	2.440,12
2024	1.584,63	64,94	647,33	26,52	131,92	5,42	76,24	3,12	2.440,12

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Adapun persebaran kondisi jalan kewenangan kabupaten/kota untuk tiap-tiap daerah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35.
Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2024								Total Panjang (km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
1	Banjarnegara	489,630	55,27	182,180	20,57	123,850	13,98	90,140	10,18	885,80

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2024								Total Panjang (km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
2	Banyumas	734,102	55,81	258,650	19,66	187,005	14,28	135,590	10,31	1.315,347
3	Batang	367,72	68,04	93,33	17,27	35,56	6,58	43,85	8,11	540,45
4	Blora	394,96	43,11	176,150	19,23	56,250	6,14	288,740	31,518	916,10
5	Boyolali	471,219	69,91	89,543	13,29	59,054	8,76	54,184	8,04	674,00
6	Brebes	440,251	36,38	318,632	26,33	170,740	14,11	280,571	23,18	1.210,19
7	Cilacap	750,286	58,28	238,763	18,55	93,774	7,28	204,552	15,89	1.287,38
8	Demak	390,23	42,90	359,95	39,57	86,10	9,47	73,31	8,06	909,58
9	Grobogan	579,046	61,44	231,441	24,56	22,396	2,38	109,506	11,62	942,39
10	Jepara	429,18	50,25	323,93	37,93	69,21	8,10	31,71	3,71	854,03
11	Karanganyar	357,43	41,02	366,20	42,03	82,15	9,43	65,55	7,52	871,33
12	Kebumen	411,81	40,49	335,54	32,99	166,83	16,40	102,97	10,12	1.017,15
13	Kendal	413,27	52,80	242,32	30,96	70,54	9,01	56,59	7,23	782,71
14	Klaten	346,42	48,06	259,15	35,95	105,82	14,68	9,46	1,31	720,85
15	Kudus	199,27	34,33	334,35	57,60	31,42	5,41	15,39	2,65	580,42
16	Magelang	651,19	63,80	235,85	23,11	95,52	9,36	38,10	3,73	1.020,66
17	Pati	908,85	72,34	120,45	9,59	96,24	7,66	130,74	10,41	1.256,29
18	Pekalongan	313,275	44,89	233,091	33,40	60,573	8,68	90,957	13,03	697,896
19	Pemalang	500,66	65,38	74,04	9,67	75,93	9,92	115,09	15,03	765,72
20	Purbalingga	370,46	38,89	280,94	29,49	207,91	21,83	93,29	9,79	952,60
21	Purworejo	119,94	15,83	359,58	47,45	164,28	21,68	113,99	15,04	757,79
22	Rembang	277,42	46,69	145,48	24,48	36,28	6,11	135,02	22,72	594,20
23	Semarang	420,07	57,26	224,96	30,66	57,70	7,87	30,89	4,21	733,62
24	Sragen	813,21	79,71	59,13	5,80	71,57	7,01	76,34	7,48	1.020,25
25	Sukoharjo	509,36	83,84	96,62	15,90	1,22	0,20	0,37	0,06	607,57
26	Tegal	408,44	47,80	149,42	17,49	208,38	24,39	88,30	10,33	854,54
27	Temanggung	481,800	74,07	96,603	14,85	47,454	7,30	24,619	3,78	650,48
28	Wonogiri	1.284,00	82,23	108,724	6,96	118,786	7,61	49,900	3,20	1.561,41
29	Wonosobo	318,326	33,22	313,449	32,71	98,823	10,31	227,716	23,76	958,31
30	Kota Magelang	71,54	57,36	30,37	24,35	21,09	16,90	1,73	1,39	124,73
31	Kota Pekalongan	92,51	61,56	34,47	22,94	12,55	8,35	10,74	7,15	150,27
32	Kota Salatiga	226,31	67,06	84,07	24,91	22,77	6,75	4,32	1,28	337,47
33	Kota Semarang	422,677	50,325	360,727	42,95	29,427	3,50	27,070	3,22	839,90
34	Kota Surakarta	108,46	46,60	96,19	41,33	26,78	11,51	1,30	0,56	232,73

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2024								Total Panjang (km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
35	Kota Tegal	119,459	46,379	92,733	36,00	25,253	9,80	20,126	7,81	257,57
	JUMLAH	15.192,77	54,49	7.007,02	25,13	2.839,23	10,18	2.842,71	10,20	27.881,73

Sumber: DPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, mengamanatkan 10 tahun terhitung sejak diundangkan jalan provinsi harus sesuai dengan standar. Standar jalan provinsi dilihat dari aspek dimensi jalan (lebar perkerasan jalan minimal 7 m), aspek konstruksi perkerasan jalan (muatan sumbu terberat sebesar 8 ton) dan aspek ketersediaan bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan (saluran drainase dan dinding penahan tanah serta bahu jalan).

Sampai dengan tahun 2024, panjang Jalan Provinsi yang telah sesuai dengan standar (dari sisi lebar jalan ≥ 7 m dan konstruksi sesuai MST 8 ton) sepanjang 1.311,12 km atau 53,73%. Sedangkan jalan provinsi yang telah sesuai dengan standar dengan kondisi permukaan mantap adalah sepanjang 1.236,46 km atau mencapai 50,67 persen dari total panjang Jalan Provinsi. Penyesuaian standar jalan provinsi perlu dilakukan secara bertahap utamanya untuk penuntasan jalan yang mempunyai nilai strategis dengan tetap menjaga kondisi permukaan seluruh Jalan Provinsi.

Tabel 2.36.
Kondisi Permukaan Provinsi Jawa Tengah Menurut Lebar Jalan Tahun 2024

No.	Lebar Perkerasan Jalan	Panjang (km)	Persentase (%)	Kondisi							
				Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
				(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%
1	≥ 7 m	1311,12	53,73	953,47	39,07	282,99	11,60	52,84	2,17	21,83	0,89
2	< 7 m	1129,00	46,27	631,11	25,86	364,39	14,92	79,08	3,25	54,42	2,23
Total		2440,12	100,00	1584,58	64,94	647,38	26,52	131,92	5,42	76,24	3,12

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

a. Air Minum dan Sanitasi

Cakupan akses air minum jaringan perpipaan pada tahun 2024 sebesar 52,48 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 48,78 persen, sedangkan cakupan akses air minum aman pada tahun 2024 sebesar 40,86 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 38,75 persen. Kemudian terkait cakupan akses air limbah domestik aman pada tahun 2024 sebesar 9,72 persen mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 9,91 persen, dikarenakan tidak sebandingnya pembangunan sarana prasarana pendukung akses air limbah domestik aman dengan laju peningkatan jumlah penduduk, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akses air limbah domestik aman, belum optimalnya operasionalisasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terbangun di kabupaten/kota, dan belum siapnya kabupaten/kota

menerapkan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) sebagai upaya percepatan akses sanitasi aman.

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh air minum aman di Jawa Tengah telah dibangun SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2025 telah terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas, Keburejo, dan Petanglong, dan SPAM Regional Wosusokas. Sedangkan SPAM Regional dalam proses penyiapan *readiness criteria* (RC) pembangunan antara lain SPAM Regional Dadimuria, Maslancip, Randugunting, dan SPAM Regional Jragung. Kemudian dalam rangka percepatan pencapaian akses menyeluruh air limbah domestik aman, sedang dalam proses pembangunan IPLT Regional Purbalingga-Banjarnegara.

Tabel 2.37.
Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Akses Air Minum					
	Aman	32,24	34,06	36,93	38,75	40,86
	Jaringan Perpipaan	43,74	44,37	48,82	48,78	52,48
2	Akses Air Limbah Domestik					
	Aman	10,69	10,75	9,94	9,91	9,72

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

Capaian akses air minum dan sanitasi Provinsi Jawa Tengah merupakan akumulasi capaian seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Maka dalam rangka mewujudkan pengelolaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, dilakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelola layanan air minum dan air limbah domestik di kabupaten/kota. Hingga tahun 2024, capaian dan kondisi pengelolaan sarana prasarana akses air minum dan air limbah domestik di kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.38.
Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Kab/Kota	Capaian Akses Air Minum (%)		Kondisi SPAM Perkotaan (PDAM) Sumber: Buku BPPW 2024		
		Aman	Perpipaan	Kapasitas Produksi (Lps)	Idle Capacity (Lps)	Status Full Cost Recovery (FCR)
1	Cilacap	23,28	31,99	1.225,00	305,00	FCR
2	Banyumas	32,38	32,89	916,05	814,32	FCR
3	Purbalingga	48,40	49,65	603,16	195,84	FCR
4	Banjarnegara	27,16	28,77	105,62	17,78	FCR
5	Kebumen	18,46	30,95	310,67	129,33	FCR
6	Purworejo	32,00	32,00	274,76	8,77	FCR
7	Wonosobo	50,88	90,54	750,27	395,02	FCR
8	Magelang	36,54	55,23	880,99	216,51	FCR

No.	Kab/Kota	Capaian Akses Air Minum (%)		Kondisi SPAM Perkotaan (PDAM) Sumber: Buku BPPW 2024		
		Aman	Perpipaan	Kapasitas Produksi (Lps)	Idle Capacity (Lps)	Status Full Cost Recovery (FCR)
9	Boyolali	39,31	56,21	397,50	296,50	FCR
10	Klaten	35,58	35,58	555,90	18,00	FCR
11	Sukoharjo	14,90	28,87	371,09	109,91	FCR
12	Wonogiri	27,62	43,37	325,49	242,27	FCR
13	Karanganyar	30,99	77,10	659,00	12,00	FCR
14	Sragen	20,55	44,46	893,62	151,27	FCR
15	Grobogan	25,99	26,86	291,00	17,00	FCR
16	Blora	19,51	52,31	254,00	30,00	FCR
17	Rembang	27,56	35,61	241,19	53,75	FCR
18	Pati	40,76	68,64	397,16	77,54	Non FCR
19	Kudus	24,40	37,50	492,00	250,70	FCR
20	Jepara	20,95	32,38	622,00	195,50	Non FCR
21	Demak	41,47	81,42	510,00	114,00	FCR
22	Semarang	40,62	42,90	543,62	28,68	FCR
23	Temanggung	19,16	79,68	456,99	152,01	FCR
24	Kendal	80,07	56,46	731,87	125,50	FCR
25	Batang	40,40	47,00	571,85	42,15	FCR
26	Pekalongan	58,00	58,00	295,00	61,00	FCR
27	Pemalang	41,26	44,95	457,84	125,16	FCR
28	Tegal	35,94	36,33	400,24	12,64	FCR
29	Brebes	21,30	21,69	678,56	124,30	FCR
30	Kota Magelang	88,21	91,35	630,51	11,73	FCR
31	Kota Surakarta	60,08	60,70	774,71	191,29	Non FCR
32	Kota Salatiga	93,69	93,69	351,79	186,25	FCR
33	Kota Semarang	65,46	82,35	3.446,29	1213,00	FCR
34	Kota Pekalongan	86,89	86,89	328,00	135,00	FCR
35	Kota Tegal	60,22	62,37	335,57	56,81	FCR
	Jawa Tengah	40,86	52,48	21.079,31	6.116,53	32 FCR dari 35

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024; dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah DJCK Kementerian PU, 2024

Tabel 2.39.
Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Limbah Domestik
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Kab/Kota	Akses Air Limbah Domestik (%)		Kondisi Layanan Air Limbah Domestik			
		Layak	Aman	Nama IPLT	Kapasitas Renc. (m3/hr)	Status Operasi	Truck Tinja (unit)
1	Cilacap	92,68	2,51	IPLT Tritih Lor	22	Operasi	3
2	Banyumas	93,45	2,46	IPLT Gunung Tugel	22	Operasi	2
3	Purbalingga	95,37	0,00	-	-	-	-
4	Banjarnegara	85,12	0,00	-	-	-	-

No.	Kab/Kota	Akses Air Limbah Domestik (%)		Kondisi Layanan Air Limbah Domestik			
		Layak	Aman	Nama IPLT	Kapasitas Renc. (m3/hr)	Status Operasi	Truck Tinja (unit)
5	Kebumen	87,96	3,67	IPLT Kaligending	10	Operasi	3
				IPLT Semali	30	Operasi	
6	Purworejo	95,36	4,06	IPLT Gunung Tumpeng	10	Operasi tidak layak	1
7	Wonosobo	70,71	2,14	IPLT Wonorejo	10	Operasi tidak layak	1
8	Magelang	92,28	1,51	-	-	-	-
9	Boyolali	98,33	29,24	IPLT Winong	10	Operasi	1
10	Klaten	100,00	1,60	IPLT Jomboran	15	Operasi	2
11	Sukoharjo	95,95	2,31	IPLT Mojorejo	22	Operasi	2
12	Wonogiri	99,86	0,79	IPLT Ngadirojo	10	Operasi	2
13	Karanganyar	99,89	3,34	IPLT Mojogedang	10	Operasi	3
14	Sragen	88,39	3,25	IPLT Tanggan	12	Operasi	3
15	Grobogan	77,76	22,24	IPLT Ngembak	15	Operasi	3
16	Blora	90,13	5,55	IPLT Temurejo	8	Operasi tidak layak	1
17	Rembang	96,67	1,06	IPLT Landoh	10	Tidak Operasi	1
18	Pati	100,00	16,94	IPLT Sukoharjo	15	Operasi	3
19	Kudus	98,52	3,53	IPLT Tanjungrejo	12	Operasi	1
20	Jepara	78,92	3,60	IPLT Bandengan	15	Operasi	3
21	Demak	83,33	5,78	IPLT Kalikondang	10	Operasi	1
22	Semarang	97,47	0,72	-	-	-	-
23	Temanggung	95,38	2,97	IPLT Sanggrahan	8	Operasi	2
24	Kendal	91,91	0,81	-	-	-	-
25	Batang	83,22	5,56	IPLT Randu Kuning	22	Operasi	2
26	Pekalongan	95,92	62,00	IPLT Kab. Pekalongan	10	Operasi	2
27	Pemalang	97,12	53,20	IPLT Pegongsoran	12	Operasi	3
28	Tegal	92,55	1,77	IPLT Kedungjati	25	Operasi	2
29	Brebes	88,62	1,50	-	-	-	-
30	Kota Magelang	98,81	11,52	IPLT Dumpoh	20	Operasi	4
31	Kota Surakarta	97,03	61,04	IPLT Putri Cempo	45	Operasi	12
32	Kota Salatiga	96,64	13,37	IPLT Ngronggo	15	Operasi	3
33	Kota Semarang	92,47	2,99	IPLT Tambak Lorok	70	Operasi	1
34	Kota Pekalongan	99,08	2,91	IPLT Degayu	10	Operasi	1

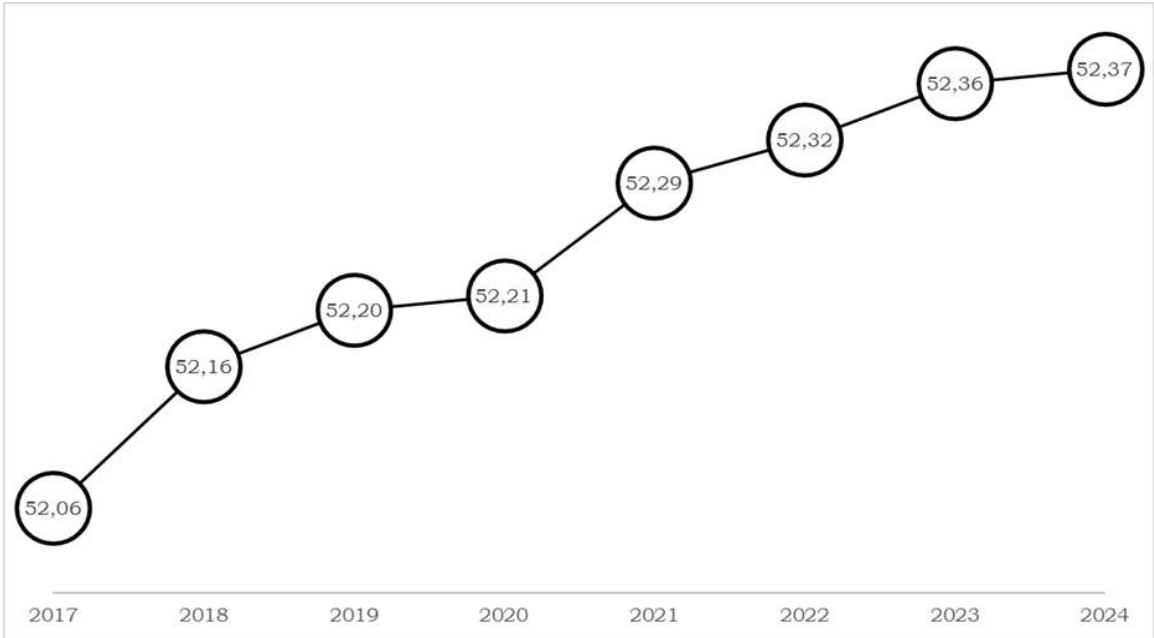
No.	Kab/Kota	Akses Air Limbah Domestik (%)		Kondisi Layanan Air Limbah Domestik			
		Layak	Aman	Nama IPLT	Kapasitas Renc. (m3/hr)	Status Operasi	Truck Tinja (unit)
35	Kota Tegal	87,82	4,27	IPLT Muarareja	15	Operasi	2
	Jawa Tengah	92,42	9,72	-	-	-	-

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024.

b. Infrastruktur Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai (WS) yang pengelolaannya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah WS Pemali Comal (panjang 946,35 km/luas DAS 4.898,54 km2) dan WS Bodri Kuto (panjang 377,32 km/luas DAS 1.282,85 km2).

Kondisi baik sungai kewenangan provinsi pada tahun 2024 tercatat 52,37 persen (728,35 km dari 1.390,78 km), sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 52,36 persen. Hal ini merupakan hasil kegiatan normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai dan konservasi DAS.



Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.39.
Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2024 (%)

Kebutuhan air irigasi rata-rata per tahun sebesar 19.636.378.014 m³/tahun dengan asumsi memperhitungkan/mendasarkan pada rencana kebutuhan air MT 1 (musim tanam pertama) sampai dengan MT 3 (musim tanam ketiga). Dukungan terhadap ketahanan pangan ditempuh dengan pengelolaan irigasi serta pembangunan penampungan air seperti waduk dan embung.

Tabel 2.40.
Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kewenangan Daerah Irigasi	Luas Area (ha)	% Dari Total Luas	Jumlah Daerah Irigasi
1.	Pusat	347.674	36,45%	37
2.	Provinsi	86.865	9,11%	108

No.	Kewenangan Daerah Irigasi	Luas Area (ha)	% Dari Total Luas	Jumlah Daerah Irigasi
3.	Kab/Kota	519.265	54,44%	11.401
Total Jawa Tengah		953.804	100,00%	11.546

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 Tahun 2015.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Namun demikian, dalam kurun waktu tahun 2017-2024 masih terdapat jaringan irigasi dalam kondisi rusak sedang hingga rusak ringan yang jumlahnya cukup besar sehingga masih perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi. Pengelolaan irigasi diukur dengan indikator IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) guna menunjukkan efektivitas fungsi irigasi yang dikelola.

Pengukuran IKSI mempertimbangkan aspek meliputi: kondisi prasarana fisik, tingkat produktivitas tanam, kondisi sarana penunjang, organisasi personalia/pengelola, serta dokumentasi. Kategori IKSI terbagi dalam kriteria sangat baik, baik, kurang, dan jelek. Lebih rinci terkait kriteria:

- a. Sangat Baik : nilai IKSI > 80% dan nilai tingkat kerusakan < 10%;
- b. Baik : nilai IKSI > 70% dan nilai tingkat kerusakan 10% - 20%;
- c. Kurang : nilai IKSI > 55% dan nilai tingkat kerusakan 20% - 40%;
- d. Jelek : nilai IKSI < 55% dan nilai tingkat kerusakan > 40%.

Pada tahun 2017 IKSI jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada angka 74,55 (kriteria Baik), namun pada akhir tahun 2024 menurun pada angka 69,11 (kriteria Kurang). Hal ini menunjukkan perlu ditingkatkannya penanganan Operasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala yang bersifat perbaikan, serta Rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membantu rehabilitasi daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan bidang Sarana Prasarana.

Tabel 2.41.
Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi
Tahun 2017 – 2024

Tahun	IKSI Kewenangan Provinsi	Kriteria
2017	74,55	Baik
2018	73,81	Baik
2019	73,95	Baik
2020	74,32	Baik
2021	75,95	Baik
2022	68,27	Kurang
2023	68,87	Kurang
2024	69,11	Kurang

Sumber:DinasPUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Ketersediaan air baku di Jawa Tengah (pemenuhan kebutuhan air minum) mengalami peningkatan dari tahun 2017 dari 58,5 persen menjadi 62,5 persen di tahun 2024.

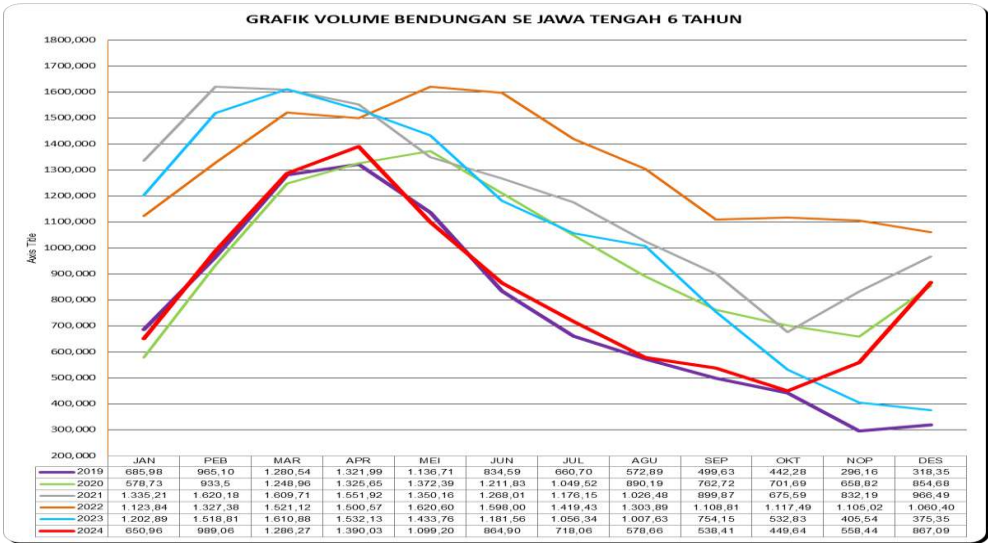
Tabel 2.42.

Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2017 – 2024

Uraian	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kebutuhan Air Baku (juta m ³ /tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	745,02	750,25	755,35	760,33	760,33	770,08	774,99	774,99
Ketersediaan Air Baku (juta m ³ /tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	435,84	456,83	466,78	466,78	467,62	477,45	484,4	484,4
Ketersediaan Air Baku (%)	58,5	60,89	61,8	61,39	61,50	62	62,5	62,5

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2024



Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023 update terbaru s/d 2024.

Gambar 2.40.

Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m³)

Tahun 2019 – 2024

Ketersediaan air waduk dari tahun 2019 hingga tahun 2024 memiliki pola yang hampir sama yaitu volume tertinggi berkisar antara bulan Maret sampai dengan bulan April dan volume terendah pada bulan Oktober sampai dengan bulan November, hal ini terkait dengan fungsi waduk yang menampung air pada musim hujan dan menyuplai kebutuhan air pada musim kemarau. Dari data ketersediaan air baku sebesar 62,5% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih perlu melakukan upaya agar pada saat ketersediaan air waduk mengalami penurunan kebutuhan air tetap bisa terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, untuk mencukupi kebutuhan air melalui pembangunan prasarana penampungan air berupa waduk, embung, serta long storage

Tabel 2.43.

Jumlah Embung di Jawa Tengah Berdasarkan Sumber Pendanaan

No	Instansi/Lembaga	Sumber Pendanaan	Embung (Lokasi)	Long Storage (Lokasi)	Jumlah (Lokasi)
1.	Pemerintah Pusat (BBWS)	APBN	142	3	145
2.	Pemerintah Pusat (BNPB)	APBN	2	-	2
3.	Dinas PUSDATARU	APBD	76	17	93

No	Instansi/Lembaga	Sumber Pendanaan	Embung (Lokasi)	Long Storage (Lokasi)	Jumlah (Lokasi)
4.	Distanbun	APBD	4	-	4
		APBN	512	-	512
5.	DLHK	DAK	390	-	390
6.	Pemkab (Bankeu)	APBD	13	-	13
7.	CSR/TJSLP	Hibah	3	-	3
TOTAL			1.142	20	1.162

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023.

c. Jasa Konstruksi

Sertifikasi Hasil Uji pada tahun 2024 mencapai 1.100 SHU mengalami penurunan kondisi jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 1.395 SHU. Sedangkan pelaku jasa konstruksi yang difasilitasi di tahun 2024 sejumlah 1.920 orang bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2023 sejumlah 1.140 orang.

Tabel 2.43.

Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sertifikasi Hasil Uji (SHU)	1.080	750	1.138	2.312	2.702	1.395	1.100
2	Informasi Jasa Kontruksi pelaksanaan event/ pameran}	4	4	0	1	4	4	4
3	Pelaku Jasa Kontruksi (orang) sosialisasi, bintek terkait jakon (peraturan jasa konstruksi, HSD, HSPK, dsb),	2.038	2.798	3.288	1.000	1.260	1.140	1.920

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2025

d. Bangunan Gedung Milik Daerah

Hingga tahun 2022, Bangunan Gedung Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1.030 komplek, Pendataan teknis Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah sudah dilakukan terhadap sejumlah 189 komplek, Bantuan Teknis untuk pengelolaan Bangunan Gedung Milik Daerah telah diberikan kepada 147 komplek bangunan Gedung.

Tabel 2.44.

Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis

Lokasi Pendataan Teknis BGMD	TA	JUMLAH
BGMD Kab, Rembang + Kab, Blora	2019	51
BGMD Kota + Kab Pekalongan	2020	36
BGMD Kab, Pemalang	2021	27
BGMD Kab, Brebes	2022	32
BGMD Kota + Kab Tegal	2023	43
BGMD Kab. Wonogiri	2024	35
BGMD Kab. Sukoharjo	2024	32

Lokasi Pendataan Teknis BGMD	TA	JUMLAH
BGMD Kab. Sragen	2024	29
BGMD Kab. Karanganyar	2024	28
TOTAL		313

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dari jumlah tersebut sejak tahun 2019 telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung dan telah terdata untuk 12 wilayah kabupaten/kota, dengan hasil penilaian sebagai berikut.

Tabel 2.45.
Hasil Pendataan Kondisi Bangunan Gedung Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah BGMD		Telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung					
		Komplek	Unit	Kondisi Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Kondisi Khusus	Renovasi
1	DKI Jakarta	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Banjarnegara	24	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Banyumas	45	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Batang	19	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Blora	23	353	27	313	13	0	0	0
6	Kab. Boyolali	36	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Brebes	32	405	0	365	26	9	0	5
8	Kab. Cilacap	37	-	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Demak	21	-	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Grobogan	20	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Jepara	29	-	-	-	-	-	-	-
12	Kab. Karanganyar	26	439	0	438	1	0	0	0
13	Kab. Kebumen	32	-	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Kendal	29	-	-	-	-	-	-	-
15	Kab. Klaten	34	-	-	-	-	-	-	-
16	Kota Magelang	14	-	-	-	-	-	-	-
17	Kota Pekalongan	16	166	0	156	8	2	0	0
18	Kota Salatiga	15	-	-	-	-	-	-	-
19	Kota Semarang	110	-	-	-	-	-	-	-
20	Kota Surakarta	37	-	-	-	-	-	-	-
21	Kota Tegal	15	118	21	95	2	0	0	0

No	Lokasi	Jumlah BGMD		Telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung					
		Komplek	Unit	Kondisi Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Kondisi Khusus	Renovasi
22	Kab. Kudus	18	-	-	-	-	-	-	-
23	Kab. Magelang	21	-	-	-	-	-	-	-
24	Kab. Pati	27	-	-	-	-	-	-	-
25	Kab. Pekalongan	20	325	0	319	1	5	0	0
26	Kab. Pemalang	27	361	1	349	7	4	1	0
27	Kab. Purbalingga	25	-	-	-	-	-	-	-
28	Kab. Purworejo	34	-	-	-	-	-	-	-
29	Kab. Rembang	28	407	26	378	3	0	0	0
30	Kab. Semarang	42	-	-	-	-	-	-	-
31	Kab. Sragen	31	574	0	569	5	0	0	0
32	Kab. Sukoharjo	29	498	5	484	7	2	0	0
33	Kab. Tegal	28	369	43	308	10	5	3	0
34	Kab. Temanggung	24	-	-	-	-	-	-	-
35	Kab. Wonogiri	37	441	0	437	4	0	0	0
36	Kab. Wonosobo	24	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.030	4456	123	4211	87	27	4	5

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.3.13. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

a. Perkembangan Jumlah dan Kebutuhan Rumah

BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) secara rutin menghitung persentase rumah tangga menurut status rumah layak huni. Pada tahun 2024 persentase rumah tangga yang mendiami rumah layak huni di Jawa Tengah mencapai 71,76 persen, dengan kata lain, rumah tangga yang masih menempati rumah tidak layak huni sebesar 28,24 persen. Berdasarkan data tersebut, dilakukan pengolahan data untuk mengetahui jumlah rumah dan rumah layak huni pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.46.
Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Asumsi Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni
Cilacap	513.520	311.707
Banyumas	470.293	315.096

Kabupaten/Kota	Asumsi Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni
Purbalingga	245.080	155.160
Banjarnegara	257.973	110.335
Kebumen	352.253	261.125
Purworejo	205.724	148.471
Wonosobo	236.404	123.379
Magelang	334.358	231.743
Boyolali	288.766	209.384
Klaten	332.341	313.663
Sukoharjo	228.853	210.911
Wonogiri	283.814	252.821
Karanganyar	237.647	223.531
Sragen	272.612	220.925
Grobogan	415.184	235.824
Blora	239.865	129.239
Rembang	171.901	130.627
Pati	377.336	312.736
Kudus	203.860	186.736
Jepara	297.327	165.106
Demak	317.290	254.848
Semarang	286.180	214.692
Temanggung	205.533	125.087
Kendal	266.192	183.965
Batang	197.163	110.155
Pekalongan	216.881	166.109
Pemalang	338.856	229.846
Tegal	344.258	271.379
Brebes	492.063	368.309
Kota Magelang	25.321	19.819
Kota Surakarta	100.073	73.204
Kota Salatiga	49.146	41.804
Kota Semarang	362.708	244.502
Kota Pekalongan	56.040	45.981
Kota Tegal	51.856	44.539
Prov. Jawa Tengah	9.261.697	6.646.194

Sumber: BPS, diolah, 2024

Masih tingginya angka kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 324.803 unit pada akhir tahun 2024 maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dalam rangka pemenuhan backlog kepemilikan melalui Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat. Program Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Provinsi Jawa Tengah baru dimulai tahun 2020. Berikut ini adalah capaian pembangunan baru rumah di Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai sumber pembiayaan dari tahun 2019-2024.

Tabel 2.47.
Pembangunan Baru Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

Tahun	Sumber Pembiayaan					Jumlah
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	Asosiasi Perumahan	CSR & Swadaya	
2019	1.279	-	-	11.483	-	12.762
2020	25	205	-	30.193	-	30.423
2021	220	186	-	30.595	5.799	36.800
2022	2.201	326	143	24.709	224	27.603
2023	221	900	151	57.364	3.842	62.478
2024	629	581	107	52.986	818	55.121
Total	4.575	2.198	401	207.330	10.683	225.187

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2024.

a. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

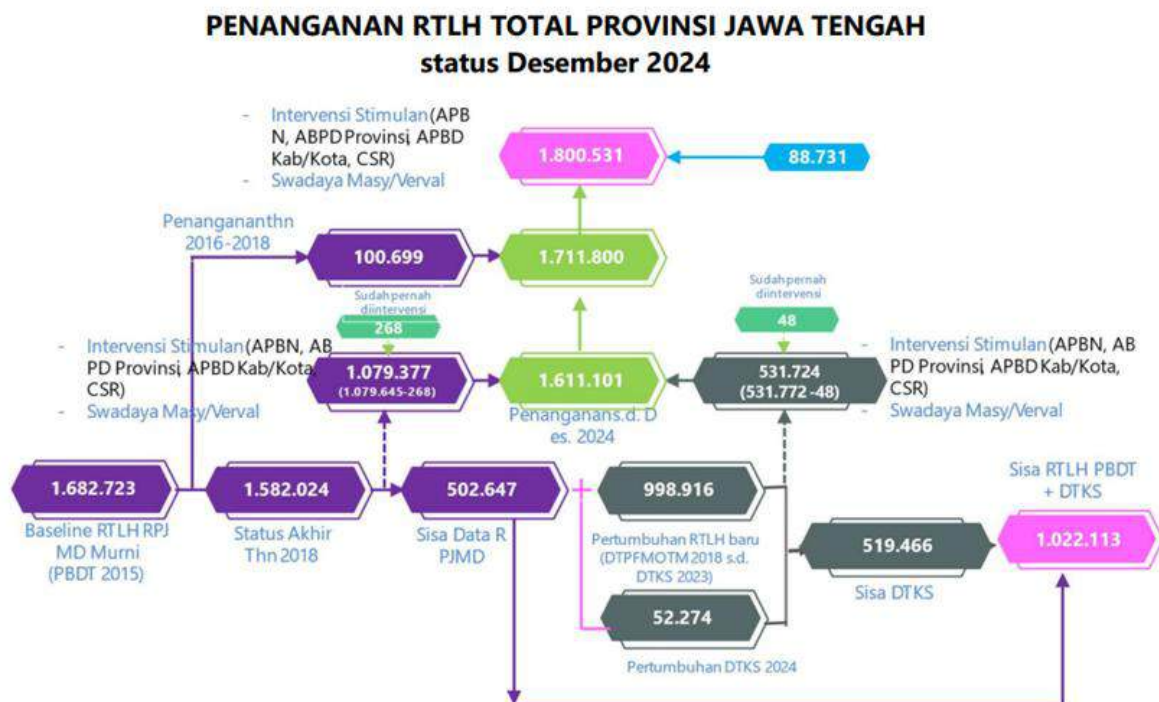
Perkembangan penanganan RTLH melalui berbagai sumber pendanaan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48.
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024

Tahun	Sumber Pembiayaan				Verivali lapangan	JUMLAH TOTAL SESUAI LKPJ
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	CSR & Swadaya		
2019	36.725	23.208	26.651	15.986	-	102.570
2020	48.809	10.298	12.855	3.268	-	75.230
2021	32.623	11.293	11.370	1.593	397.572	454.451
2022	35.771	11.487	12.714	2.659	231.279 (Cat. Data)	293.910
2023	26.542	16.592	12.229	2.610	372.771	430.744
2024	8.995	17.535	10.135	4.530	-	51.195
Total	199.465	90.413	85.954	30.646	1.001.622	1.408.100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2024.

Intervensi stimulan Peningkatan kualitas RTLH dari berbagai sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, *Corporate Social Responsibility* (CSR), BAZNAS dan lain-lain sampai dengan tahun 2024 pada data PBDT Tahun 2015 adalah sebanyak 1.079.377 unit. Sisa RTLH berdasarkan PBDT sebanyak 502.647 unit. Selain data PBDT setiap tahun terdapat penambahan RTLH melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sampai dengan tahun 2024 sebanyak 52.274 unit dan melalui DTPFMOTM 2018 sampai dengan DTKS 2023 sebanyak 998.916 unit. Angka tersebut telah diintervensi dari berbagai sumber anggaran sebanyak 531.724 unit, sehingga sisa RTLH dari DTKS tersebut sebanyak 519.466 unit. Jadi total sisa RTLH yang belum tertangani (PBDT dan DTKS) sebanyak 1.022.113 unit. Sehingga total RTLH yang terintervensi dari berbagai sumber anggaran sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1.800.531 unit.



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.41.

Penanganan RTLH Provinsi Jawa Tengah status Desember 2024

Penanganan RTLH dilakukan dengan dua cara yaitu bantuan stimulan material dan usulan atas kondisi rumah berdasar data yang masuk. Penanganan RTLH pada tahun 2024 dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan sebanyak 51.195 Unit dengan rincian dari sumber anggaran APBN sebanyak 18.995 Unit, sumber anggaran APBD Prov sebanyak 17.535 Unit, sumber anggaran APBD kabupaten/ kota sebanyak 10.135 Unit, sumber anggaran CSR sebanyak 2.517 Unit dan sumber anggaran Swadaya Masyarakat sebanyak 2.013 Unit.

b. Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan intervensi terhadap pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana Provinsi. Melalui bantuan sosial pembangunan baru rumah dan peningkatan kualitas rumah terdampak bencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan. Adapun rekap penanganan rumah korban bencana pemerintah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49. Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 melalui APBD Provinsi							
No	JENIS PENANGANAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PK Bencana	150	105	118	51	345	175
2	PB Bencana	0	11	23	19	122	35
	Jumlah	150	116	141	70	467	210

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2023.

c. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan hasil review ulang SK Kumuh Kabupaten/Kota pada tahun 2024 s.d. Triwulan I Tahun 2025 dalam rangka penyusunan RPJMN 2025-2029 luasan kawasan kumuh sebesar 5.203,43 Ha dengan rincian sebagai berikut,

Tabel 2.50. Sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah TW. I Tahun 2025					
NO	NAMA KAB/KOTA	SISA LUASAN KUMUH 2024			Total
		<10 Ha	10-15 Ha	>15 Ha	
1	Kab. Cilacap	0,00	0,00	43,76	43,76
2	Kab. Banyumas	16,87	8,34	26,37	51,58
3	Kab. Purbalingga	56,70	45,31	163,33	265,34
4	Kab. Banjarnegara	77,99	83,70	270,55	432,24
5	Kab. Kebumen	99,20	52,14	0,00	151,34
6	Kab. Purworejo	4,27	5,60	0,00	9,87
7	Kab. Wonosobo	54,54	96,85	444,69	596,08
8	Kab. Magelang	113,40	74,66	53,26	241,32
9	Kab. Boyolali	0,00	0,00	31,72	31,72
10	Kab. Klaten	18,86	10,14	39,18	68,180
11	Kab. Sukoharjo	443,64	51,63	113,07	608,35
12	Kab. Wonogiri	0,00	16,73	31,73	48,46
13	Kab. Karanganyar	57,91	10,25	12,84	81,00
14	Kab. Sragen	6,75	0,00	6,28	13,03
15	Kab. Grobogan	30,63	0,00	68,06	98,69
16	Kab. Blora	35,78	12,16	276,48	324,42
17	Kab. Rembang	36,19	54,04	91,53	181,75
18	Kab. Pati	0,80	19,99	4,15	24,94
19	Kab. Kudus	6,50	0,00	23,96	30,46
20	Kab. Jepara	41,60	0,00	20,75	62,35
21	Kab. Demak	0,00	40,46	68,42	108,83
22	Kab. Semarang	40,91	10,17	130,30	181,37
23	Kab. Temanggung	3,67	20,81	66,06	90,54
24	Kab. Kendal	52,73	10,32	33,10	96,15
25	Kab. Batang	5,53	10,75	48,54	64,82
26	Kab. Pekalongan	19,28	21,79	172,30	213,38
27	Kab. Pemalang	0,00	10,81	186,35	197,16
28	Kab. Tegal	32,16	36,82	105,20	174,19
29	Kab. Brebes	258,12	69,18	82,21	409,51
30	Kota Magelang	5,63	4,96	0,00	10,59
31	Kota Surakarta	28,73	0,00	28,67	57,40
32	Kota Salatiga	25,89	0,00	0,00	25,89

NO	NAMA KAB/KOTA	SISA LUASAN KUMUH 2024			Total
		<10 Ha	10-15 Ha	>15 Ha	
33	Kota Semarang	12,36	15,13	17,09	44,58
34	Kota Pekalongan	23,21	12,66	90,45	126,32
35	Kota Tegal	0,00	0,00	37,80	37,80
	TOTAL	1.609,84	805,40	2.788,19	5.203,43

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2025

2.3.14. Perhubungan

Kualitas pelayanan transportasi di Jawa Tengah sejak Tahun 2022 diukur dari Indeks Pelayanan Transportasi yang memperhitungkan aspek **konektivitas** jaringan transportasi (Rasio Konektivitas Provinsi), tingkat **keselamatan** transportasi (Rasio Kecelakaan per 1 Juta Keberangkatan) dan kualitas pelayanan **angkutan umum** (*On Time Performance*). Adapun perkembangan capaian peningkatan kualitas pelayanan transportasi di Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.51.

Capaian Kualitas Pelayanan Transportasi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian Provinsi		
			2022	2023	2024
	INDEKS PELAYANAN TRANSPORTASI		5,767	5.997	6,050
1.	Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0,299	0,373	0,400
a.	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Angka	0,283	0,340	0,360
b.	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	Angka	0,389	0,501	0,510
c.	Rasio Konektivitas Trans. Laut dan ASDP	Angka	0,230	0,310	0,330
2.	Rasio Kecelakaan Bus AKDP (1 Juta Keberangkatan)	Angka	16,906	16,698	16,090
3.	On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi	%	82,21	84,19	84,60
a.	OTP Angkutan Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng)	%	86,60	88,20	89,79
b.	OTP Kereta Api Masa Lebaran dan Nataru	%	90,00	90,39	91,01
c.	OTP Pesawat Masa Lebaran dan Nataru	%	70,00	74,00	73,01
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Angka	79,75	80,13	82,50
1.	Pelayanan Terminal Penumpang Tipe B	Angka	77,67	79,17	81,16
2.	Pelayanan Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng)	Angka	81,75	80,75	82,50
3.	Penerbitan Kartu Pengawasan (KP) dan Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Angka	82,79	82,56	82,54

Catatan : Indeks Pelayanan Transportasi ada sebagai indikator pada RPD Prov. Jateng 2024-2026

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

1. Konektivitas Jaringan Transportasi

Konektivitas jaringan transportasi terdiri dari : Angkutan Darat (terminal, trayek angkutan umum, halte Trans Jateng); Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP); Angkutan Laut; Angkutan Udara, Perkeretaapian dan Angkutan Aglomerasi Kawasan Perkotaan.

a) Terminal Penumpang

Terminal penumpang di Jawa Tengah pada Tahun 2024 masih didominasi oleh Tipe C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.52.

Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2024

No	Jumlah Terminal dan Kewenangannya	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terminal tipe A (Pusat)	19	19	19	19	19
2.	Terminal tipe B (Provinsi)	24	24	24	24	23
3.	Terminal tipe C (Kabupaten/Kota)	178	178	178	178	178
	Total Terminal di Jawa Tengah	221	221	221	221	220

Sumber: Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Bappeda Kab./ Kota, 2025.

Persebaran terminal tipe A dan tipe B, jika dibandingkan dengan kebutuhan mendasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Sampai dengan tahun 2024 masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 7 (tujuh) kabupaten/kota dan tipe B di 10 (sepuluh) kabupaten/kota. Penurunan jumlah Terminal Tipe B di 2023 sejumlah 24 menjadi 23 di Tahun 2024 karena 2 terminal di Kabupaten Purworejo (Nampurejo dan Suryonegaran) yang sudah tidak efektif digantikan dengan Terminal Kutoarjo. Upaya pemenuhan jumlah dan persebaran Terminal Tipe B di Jawa Tengah berupa Pembangunan Terminal Kutoarjo di Kabupaten Purworejo yang dimulai sejak tahun 2020. Terminal Kutoarjo selain sebagai simpul transportasi juga direncanakan sebagai simpul perekonomian dengan *branding* *Keburejo Hangout Point*, dimana terdapat sentra UMKM, kuliner khas unggulan serta diselenggarakan event secara periodik dan terjadwal. Kelebihan Terminal Kutoarjo selain letaknya sangat strategis dipinggir jalan nasional juga terintegrasi dengan Stasiun Kutoarjo serta menjadi ujung layanan Trans Jateng koridor Kutoarjo - Borobudur dan terdapat layanan Kereta Api Komuter Prameks Jurusan Kutoarjo - Yogyakarta.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.42.

Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah

Jumlah kendaraan masuk ke terminal tipe B. pada Tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena lesunya usaha angkutan umum.

Tabel 2.53.

Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B Tahun 2020 - 2024

No.	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bis Besar	202.640	149.252	271.242	264.998	209.242
2.	Bis Sedang	71.036	57.057	77.349	76.828	58.655
3.	Bis Kecil	64.756	34.883	58.901	56.000	41.1255
4.	Mobil Penumpang Umum	39.846	21.365	45.254	48.280	40.082
5.	Total	378.278	262.557	452.746	446.106	349.104

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

b) Trayek Angkutan Umum

Jumlah armada angkutan umum mengalami penurunan dari dari tahun ke tahun, selain merupakan lanjutan dampak dari pandemi Covid-19 juga masyarakat lebih berminat menggunakan moda angkutan pribadi.

Tabel 2.54.

Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek)	902	902	902	902	902
2.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek)	272	272	272	272	272
3.	Angkutan wisata (kendaraan)	4.666	3.093	2.754	2.754	3.994
4.	Jumlah bus (unit)	12.737	12.737	10.825	6.881	10.626
5.	Mobil Penumpang Umum (unit)	397.667	397.667	397.667	397.667	397.667

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

c) Halte Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Untuk mendukung konektivitas jaringan transportasi aglomerasi perkotaan diperlukan peningkatan cakupan wilayah yang terlayani koridor Trans Jateng untuk memudahkan penumpang naik dan turun. Pemenuhan kebutuhan halte Trans Jateng dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi masih belum optimal, masih ada 36,70% yang belum terbangun.

Tabel 2.55.

Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2024

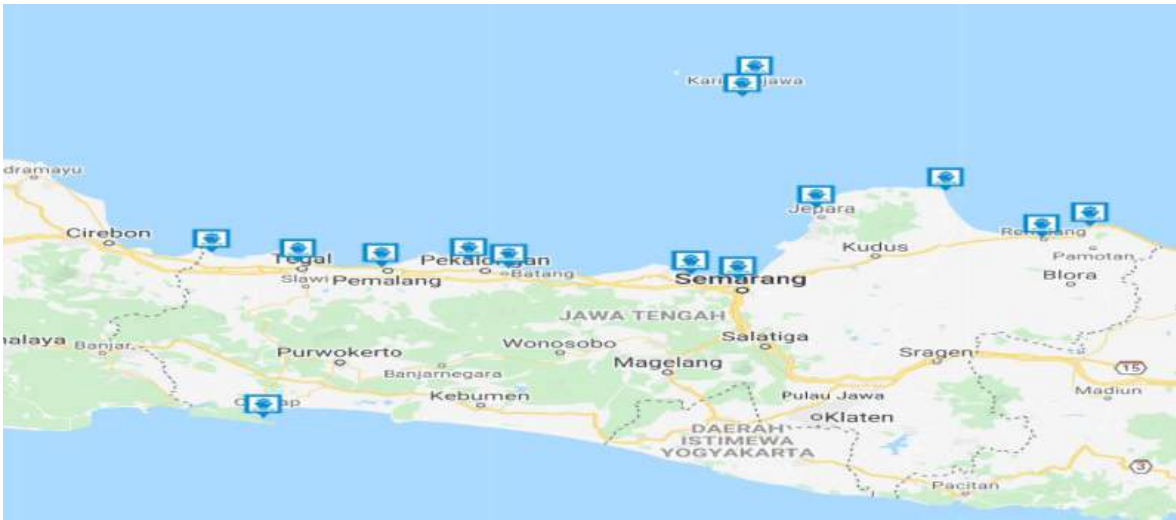
Koridor Trans Jateng	Inventarisasi Halte			
	Kebutuhan	Terbangun		Belum Terbangun *
		Aset Pemprov	Aset Kab/Kota/Swasta	
Kota Semarang – Bawen	94	40	55	2
Purwokerto – Purbalingga	62	55	6	0
Kota Semarang – Weleri	53	40	13	0
Kab. Magelang – Kutoarjo	49	34	0	11
Surakarta – Sumberlawang	85	25	5	63
Kota Semarang – Grobogan	69	23	0	49
Surakarta – Wonogiri	122	15	47	69
Total	534	232	121	196

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Catatan : * Halte yang belum terbangun di beberapa tempat sudah dilengkapi rambu bus stop/MMT.

d) Perhubungan Laut

Terdapat 14 Pelabuhan yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 2 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap dan Tegal), 8 Pelabuhan Pengumpan Regional (Batang, Kendal, Jepara, Legon Bajak, Karimunjawa, Juwana, Tasik Agung dan Sluke), dan 3 Pelabuhan Lokal (Brebes, Pekalongan dan Pemalang). Pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun, sampai dengan akhir tahun 2024 proses penlimpahan aset belum diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.43.

Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah

Kondisi pelabuhan pengumpan regional di Jawa Tengah secara umum, laju sedimentasi pada kolam labuh dan alur pelayaran sangat tinggi yang memerlukan upaya penanganan berupa normalisasi secara berkala dengan periode 3 – 4 tahun sekali. Akibat sedimentasi tinggi kolam dermaga penyeberangan Pelabuhan Kendal mengalami pendangkalan, yang mengakibatkan KM Kali Bodri yang melayani penyeberangan Kendal - Kumai sering kandas sehingga sejak akhir 2024 tidak lagi melayani lintas penyeberangan dimaksud.

e) Aktivitas Penyeberangan

Pelabuhan penyeberangan yang ada di Jawa Tengah melayani lintas Jepara – Karimunjawa dan Semarang – Karimunjawa. KMC Kartini yang merupakan aset Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jepara yang usianya sudah tua (16 tahun) sehingga kinerjanya sudah tidak optimal. Saat ini terdapat beberapa kapal yang melayani penyeberangan ke Karimunjawa. Mendasarkan pertimbangan dimaksud, KMC Kartini dalam proses penghapusan aset. Terdapat beberapa instansi pemerintah yang berminat untuk menerima aset kapal dimaksud. Adapun kinerja dari pelayanan ASDP sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.56.

Perkembangan Pelayanan ASDP Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penumpang KM. Muria (orang)/KMC. Siginjai	30.924	29.890	43.755	50.943	62.402
2.	Penumpang KMC. Bahari Ekspres 1 (Jepara – Karimunjawa) (orang)	27.162	45.410	107.447	153.348	168.571

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

f) Perhubungan Udara

Terdapat 3 bandara komersial operasional yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Adi Sumarmo Boyolali dan JB. Soedirman Purbalingga, serta 3 bandara perintis operasional yaitu Bandara Dewadaru Karimunjawa Jepara, Tunggul Wulung Cilacap dan Ngloram Blora.

Mendasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2024 tanggal 2 April 2024, status Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Sumarmo diturunkan dari Bandara Internasional menjadi Bandara Domestik. Perkembangannya sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 147 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024, Bandara A. Yani ditetapkan sebagai Bandara domestik yang dapat melayani penerbangan keluar negeri yang menunjang industri perdagangan (kargo). Hasil upaya pendorongan pengembalian status internasional, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 26 Tahun 2025 tanggal 25 April 2025 Bandara Ahmad Yani Semarang kembali ditetapkan sebagai Bandara Internasional. Untuk Bandara Adi Sumarmo mendasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 146 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 ditetapkan sebagai Bandara domestik yang dapat melayani penerbangan keluar negeri untuk kepentingan Kegiatan Umroh.

Perkembangan selanjutnya, mendasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Penetapan Bandara Udara Internasional ditetapkan 36 bandar udara internasional, 2 diantaranya berada di Jawa Tengah yaitu Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Kota Semarang dan Adi Soemarmo Kabuoaten Boyolali.

Jumlah penumpang di Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.57.
Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bandara	6	6	6	6	6
2	Bandara Ahmad Yani					
	Penumpang domestik (orang)	1.342.341	884.970	1.618.109	2.100.836	2.281.301
	Penumpang internas. (orang)	35.728	9	77	4.867	145
	Barang domestik (kg)	9.157.070	6.763.331	6.222.664	9.797.900	15.351.204
	Barang internasional (kg)	239.699	1.212.031	3.578.079	4.341.238	3.481.791
3	Bandara Adi Soemarmo					
	Penumpang domestik (orang)	516.780	427.536	839.773	1.164.953	1.025.149
	Penumpang internas. (orang)	17.198	15	33.739	84.698	94.861
	Barang domestik (kg)	1.596.685	1.856.723	1.760.287	3.066.899	6.957.110
	Barang internasional (kg)	-	15.158	0	2.180	1.867.049

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

g) Perkeretaapian

Panjang jalur kereta api di Jawa Tengah Tahun 2024, sepanjang 1.680,26 km/sp, terdiri dari 929,50 km/sp jalur rel aktif/operasional (55,32%) dan 750,757 km jalur rel non aktif/belum operasional (44,68%). Posisi Jawa Tengah yang sangat strategis karena berada diantara 2 kota besar (Jakarta dan Surabaya), jalur rel di Jawa Tengah sangat padat, sehingga pembangunan rel ganda kereta api (*double track*) pada Lintas Utara dan Lintas Selatan diperlukan lanjutan sampai dengan tuntas semua dengan rel ganda. Dari 929,50 km/sp rel aktif terdiri dari 292,44 km/sp jalur tunggal dan 637,06 km/sp jalur ganda.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.44.
Peta Jaringan Loop Rel Kereta Api di Jawa Tengah

Tabel 2.58.
Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penumpang (orang)	8.318.591	4.982.954	6.434.642	21.498.258	24.640.416
2.	Barang terangkut (ton)	1.902.245	2.661.209	2.053.983	2.107.754	2.111.418
3.	Stasiun Kereta (buah)	106	115	115	116	116
4.	Perlintasan KA (unit)	1.369	1369	1369	1369	1.369

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

2. Keselamatan Transportasi

Untuk meningkatkan keselamatan dilakukan upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi diantaranya: Pemasangan fasilitas keselamatan jalan, Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); Pelaksanaan ramp check; Peningkatan jumlah kendaraan laik jalan; Penanganan perlintasan sebidang; dan Pemenuhan fasilitas penyeberangan sungai.

a) Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Korban kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2020-2024, rata-rata korban jiwa setiap tahunnya sebesar ±4.020 jiwa sehingga rata-rata setiap hari terdapat 11 orang yang meninggal dunia di jalan atau hampir dalam 2 jam, 1 nyawa hilang di jalan.

Tabel 2.59.
Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Jumlah				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Laka	Kejadian	21.396	22.521	30.730	31,425	31.444
2.	Korban MD	Jiwa	3.508	3.750	4.409	4,302	4.130
3.	Tingkat Fatalitas/ 100.000 penduduk	Angka	9,61	10,21	11,91	11,62	10,89
4.	Korban Luka Berat	Orang	48	77	77	60	63
5.	Korban Luka Ringan	Orang	24.495	25.847	35.869	36,915	37.275
6.	Kerugian Materiil	Rp. 000,-	14.746.525	16.836.435	24.819.905	44.763.625	37.369.660

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, 2025.

b) Perlengkapan Jalan (Fasilitas Keselamatan) di Ruas Jalan Provinsi

Tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan jalan ruas jalan provinsi masih sangat rendah, namun selalu meningkat setiap tahun, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.60.
Perlengkapan Jalan Terpasang Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, RPPJ, Marka, Guard-rail, LPJU, APILL, WL, Deliniator, Cermin Tikung, dan ATCS) terpasang (%)	16,93	25,06	30,03	38,66	63,00
2.	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (%)	4,55	9,09	17,88	45,45	45,45
3.	Pemasangan Rambu Jalan (Buah)	-	478	245	385	100
4.	Pemasangan RPPJ (Buah)	-	46	-	29	8
5.	Pemasangan APILL (Unit)	-	2	-	2	-
6.	Pemasangan Guardrail (Beam)	30	176	31	116	-
7.	Pemasangan Marka Jalan (m ¹)	-	52.444	73.976	108.450	16.044
8.	Pemasangan LPJU (Buah)	150	174	355	721	46

Catatan : Pada 2023 terdapat mengacu pada definisi operasional indikator berdasarkan RPD 2024-2026 dimana tidak memperhitungkan deliniator dan ATCS, serta terdapat perubahan panjang jalan provinsi.
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

c) Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)

Pada Tahun 2024 di ruas jalan provinsi masih terdapat 70 titik ruas jalan yang termasuk kategori Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang belum tertangani. Untuk DRK yang sudah di rehabilitasi tetap diperlukan upaya monitoring dan evaluasi dampak penanganan DRK terhadap peningkatan keselamatan di titik DRK dimaksud.

Tabel 2.61.
Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan Ruas Jalan Provinsi 2023 - 2024

No.	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan (BPSPP)	2023		2024	
		DRK (Lokasi)	%	DRK (Lokasi)	%
1.	BPSPP Wilayah I Kelas A (Wilayah Semarang)	18	20,93	17	24,29
2.	BPSPP Wilayah II Kelas B (Wilayah Pati)	16	18,60	13	18,50
3.	BPSPP Wilayah III Kelas A (Wilayah Surakarta)	9	10,47	7	10,00
4.	BPSPP Wilayah IV Kelas A (Wilayah Magelang)	14	16,28	11	15,71
5.	BPSPP Wilayah V Kelas B (Wilayah Banyumas)	4	4,65	2	2,86
6.	BPSPP Wilayah VI Kelas A (Wilayah Pekalongan)	25	29,07	20	28,57
Jumlah		86	100,00	70	100,00

Catatan : Jumlah DRK per BPSPP sesuai Pergub 27/2023 tentang RAKLLAJ Prov. 2023-2028
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

d) Kendaraan Laik Jalan

Untuk meningkatkan keselamatan transportasi diperlukan peningkatan jumlah kendaraan yang laik jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, kewenangan Pemerintah Provinsi pada pelaksanaan pembinaan. Semakin banyak Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji sebagai salah satu indikator penting terwujudnya keselamatan di jalan.

Tabel 2.62.

Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022 - 2024

No.	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	KBWU yang Diuji	446.658	344.850	324.379
2.	KBWU Lulus Uji	436.863	333.487	313.927
3.	KBWU Tidak Lulus Uji	9.561	7.817	8.480
	Jumlah	446.658	344.850	324.379

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

e) Ramp Check di Terminal Tipe B Jawa Tengah

Ramp check bertujuan untuk meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan. Sesuai dengan kewenangannya pelaksanaan ramp check dilakukan pada 23 Terminal Tipe B dengan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.63.

Pelaksanaan Ramp Check di Terminal Tipe B Tahun 2022 - 2024

Tahun	Jumlah Kendaraan			Jenis Pelanggaran		
	Diperiksa	Tidak Melanggar	Melanggar	Administrasi	Operasional	Teknis
2022	37.564	28.559	9.005	8.353	0	2.000
2023	21.920	16.971	4.949	4.567	0	382
2024	39.112	29.589	9.523	8.281	881	361

Catatan : Pada 2020 - 2021 pelaksanaan rampcheck di Terminal Tipe B tidak ada (refocusing)

Sumber: Dinas Perhubungan Jawa Tengah, 2025

f) Perlintasan Jalur Kereta Api dengan Jalan

Terdapat 1.369 titik perlintasan rel kereta api dengan jalan, sebagian besar di jalan kabupaten/kota, sebagian kecil berupa perlintasan tidak sebidang dan masih banyak yang belum dilengkapi dengan palang pintu. Perlintasan sebidang di perkotaan berpotensi berkontribusi menyebabkan kemacetan dan yang belum dilengkapi dengan palang pintu berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu-lintas.

Tabel 2.64.

Perlintasan Rel Kereta Api di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Status Jalan	Jumlah Perlintasan Dengan Rel KA		Perlintasan Tidak Sebidang				Perlintasan Sebidang			
				Fly Over		Underpass		Berpalang Pintu & Dijaga		Tidak Ada Palang Pintu	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1.	Nasional	39	2.78	10	41.67	6	7.06	22	5.93	1	0.11
2.	Provinsi	27	1.83	1	4.17	1	0.00	24	6.47	1	0.11
3.	Kab/Kota	1.303	95.39	13	54.17	78	92.94	325	87.60	887	99.78
	Jumlah	1.369	100	24	100	85	100	371	100	889	100

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

g) Fasilitas Penyeberangan Sungai

Untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diperlukan peningkatan kondisi dan kinerja angkutan penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi (kewenangan pemerintah provinsi).

Tabel 2.65.

Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Sisi Dermaga	Fasilitas Penyeberangan	
			Dermaga	Lampu Penerangan
1.	Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Lutungmati (Kabupaten Batang)	Permanen (2023)	Ada (2019)
		Desa Tegalsari (Kabupaten Kendal)	Permanen (2023)	Ada (2018)
2.	Sungai Kalkutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Yosorejo (Kabupaten Batang)	Non Permanen	Ada (2021)
		Desa Jatipurwo (Kabupaten Kendal)	Permanen (2023)	Ada (2021)
3.	Sungai Pemali Kab. Brebes – Kab. Tegal	Desa Tegalwangi (Kabupaten Brebes)	Non Permanen	Ada (2022)
		Desa Bojong (Kabupaten Tegal)	Non Permanen	Ada (2022)
4.	Sungai Kaligangsa Kab. Brebes – Kota Tegal	Ds Randusangawetan (Kabupaten Brebes)	Non Permanen	Ada (2019)
		Desa Kajongan (Kota Tegal)	Non Permanen	Ada (2023)
5.	Sungai Bengawan Solo Surakarta – Sukoharjo	Desa Sangkrah (Kota Surakarta)	Non Permanen	Belum Ada
		Desa Gading (KabupatemSukoharjo)	Non Permanen	Belum Ada

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

3. Pelayanan Angkutan Umum

Upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi OTP, diantaranya: peningkatan kualitas layanan angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) dan fasilitasi penyediaan angkutan umum saat *peak season* (lebaran, natal dan tahun baru).

a) Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan di Jawa Tengah dilayani oleh Trans Jateng, kondisi Tahun 2024 telah terdapat pelayanan di 7 (tujuh) koridor. Dari 10 Wilayah Pengembangan (WP) baru dilakukan kajian perencanaan di 5 WP dengan total jumlah kebutuhan sejumlah 18 koridor. Pada Tahun 2024 - 2025 tidak terdapat penambahan koridor, peningkatan pelayanan di Tahun 2024 berupa penambahan jumlah bus, 2 bus di koridor Semarang - Kendal dan 1 bus di koridor Surakarta - Wonogiri dan Tahun 2025 berupa penambahan rotasi dan jam pelayanan pada koridor Semarang - Grobogan dan Surakarta - Wonogiri serta dilakukan kajian Pra FS pada WP Jekuti.

Tabel 2.66.

Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan Tahun 2024

No.	Wilayah Aglomerasi	Jaringan Trayek
1	KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, Grobogan)	1. Semarang – Bawen (Op. 7 Juli 2017)
		2. Semarang – Kendal (Op. 28 Oktober 2019)
		3. Semarang – Demak
		4. Semarang – Grobogan (Op.13 Oktober 2021)
2	SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten)	5. Boyolali – Surakarta
		6. Surakarta – Sragen (Op. 3 September 2020)
		7. Surakarta – Karanganyar
		8. Surakarta – Wonogiri (Op. 8 Agustus 2023)
		9. Sukoharjo – Klaten
3	BARLINGMASCAKEB	10. Purwokerto – Purbalingga (Op. 13 Agus. 2018)

No.	Wilayah Aglomerasi	Jaringan Trayek
	(Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap & Kebumen)	11. Purwokerto – Wangon
4	PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung)	12. Terminal Secang – Muntilan (via Borobudur)
		13. Terminal Secang – Terminal Parakan
		14. St. Kutoarjo – Borobudur (Op. 1 Sep. 2020)
5	PETANGLONG (Kota Pekalongan, Batang, Kabupaten Pekalongan)	15. Pekalongan - Wiradesa - Kajen
		16. Pekalongan - Kedungwuni - Kajen
		17. Pekalongan - Batang - Banyuputih - Limpung
		18. Weleri - Banyuputih

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan yang dilayani Trans Jateng memiliki kontribusi riil terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mendukung peningkatan pengguna moda transportasi umum di perkotaan (target 2030 = 32 persen). Pengguna transportasi umum diharapkan selalu meningkat seiring dengan peningkatan penumpang Trans Jateng.

Tabel 2.67.
Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Tahun 2020 – 2024

No	Wilayah Pengembangan/ Koridor TransJateng	Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kedungsepur					
1.	T. Bawen – Stas. Tawang (Juli 2017)	1.054.091	1.136.921	1.686.921	1.954.632	2.024.614
2.	T. Mangkang – T. Bahurekso (Nov. 2019). Diperpanjang ke Weleri (Agus. 2022)	592.411	682.477	1.235.294	1.479.581	1.583.926
3.	T. Penggaron – T. Godong – T. Gubug (Okt.2021)	-	133.380	774.188	925.977	1.117.710
	Barlingmascakeb					
4.	Purwokerto – Purba lingga (Agus. 2018)	613.804	673.120	1.261.351	1.344.065	1.435.938
	Subosukowonosraten					
5.	Tirtonadi – Sumberlawang via Sangiran (Sept. 2020)	55.442	327.786	676.153	810.218	883.874
6.	Tirtonadi – Wonogiri (Agustus 2023)	-	-	-	471.794	1.345.894
	Purwomanggung					
7.	Kutoarjo – Borobudur (September 2020)	106.124	485.848	872.555	1.047.738	1.107.786
Total 7 Koridor		2.421.872	3.439.532	6.506.462	8.034.005	9.499.742

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pada tahun 2021 mulai dilakukan survey perhitungan jumlah perpindahan kendaraan pribadi ke moda angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) untuk mengetahui kontribusi Trans Jateng dalam meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum perkotaan. Hal ini untuk meningkatkan dukungan dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada indikator pengguna moda transportasi umum di perkotaan. Hasil survey Kepuasan Masyarakat terkait perpindahan moda sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.68.

Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Tahun 2021 – 2024

No.	Koridor	Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng (%)			
		2021	2022	2023	2024
1.	Semarang-Bawen	43,79	46,06	44,66	44,44
2.	Purwokerto-Purbalingga	59,05	52,81	50,14	50,86
3.	Semarang-Kendal	36,94	41,21	50,29	49,72
4.	Kutoarjo-Borobudur	43,22	47,84	44,57	56,47
5.	Solo-Sangiran Via Sumberlawang	49,28	48,16	55,03	58,23
6.	Semarang-Gubug Via Godong	-	56,15	56,80	53,89
7.	Solo – Sukoharjo – Wonogiri	-	-	-	52,84
Persentase Total Perpindahan Kendaraan Pribadi ke Trans Jateng		46,39	48,16	50,12	52,22

Catatan : Survey Moda Shifting Trans Jateng mulai dilakukan pada Tahun 2021
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Proporsi biaya operasional penumpang terlayani menunjukkan tingkat efektifitas anggaran, semakin kecil proporsi semakin tinggi efektifitas anggaran yang dikeluarkan. Kinerja Trans Jateng pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari efektivitas anggaran (proporsi biaya operasional per penumpang) sebesar Rp11.904,- lebih efisien dibanding Tahun 2019 (sebelum pandemi) sebesar Rp13.354.- Hal yang sama untuk proporsional antara pendapatan dan biaya operasional Tahun 2024 sebesar 28,40 persen sudah lebih tinggi dibandingkan Tahun 2019 (sebelum pandemi) sebesar 25,42 persen.

Tabel 2.69.

Rekapitulasi Perbandingan Pendapatan dan Biaya Operasional Layanan Trans Jateng Tahun 2018-2024

Tahun	Total Operasional (Rp. 000,-)	Total Pendapatan (Rp. 000,-)	Proporsi Pendapatan & Operasional (%)	Jumlah Penumpang Terlayani (orang)	Proporsi Biaya Operasional Per Penumpang (Rp/penumpang)
1	2	3	$4=(3:2)\times100\%$	5	$6=3:5$
2018	28.000.000	6.621.215	23,647	2.238.590	12.508,-
2019	45.904.608	11.668.972	25,420	3.437.459	13.354,-
2020	64.111.322	8.722.194	13,605	2.419.549	26.497,-
2021	90.982.851	12.549.852	13,794	3.439.532	26.452,-
2022	93.761.160	22.405.562	23,685	6.506.462	14.410,-
2023	105.942.854	27.454.138	25,583	8.034.005	13.187,-
2024	113.081.887	32.472.937	28.404	9.499.742	11.904,-
Total	541.784.682	89.421.933	22,332	35.575.339	15.229

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Manfaat layanan Trans Jateng yang langsung dirasakan masyarakat adalah berkurangnya biaya transportasi, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan lain dalam mendukung peningkatan kesejahteraan. Bagi pemerintah terdapat penghematan anggaran yang dikeluarkan terkait bahan bakar yang bersubsidi. Penghematan konsumsi bahan bakar selain bermanfaat untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup juga untuk memenuhi prioritas pembangunan lain.

Beralihnya masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum (*mode shifting*) dapat mengatasi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keselamatan dan menghemat biaya peningkatan kapasitas infrastruktur jalan. Mulai 2022 mulai diukur manfaat layanan Trans Jateng yang dibandingkan dengan biaya atau anggaran yang dikeluarkan sebagaimana tabel berikut. Beberapa manfaat lain yang belum diperhitungkan dalam tabel berikut diantaranya: penurunan emisi, penurunan kemacetan, penurunan kecelakaan lalu lintas, pergerakan perekonomian.

Tabel 2.70.
Operasional dan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 - 2024

No	Uraian	Tahun (Rp. 000,-)		
		2022	2023	2024
1.	Total Biaya Operasional Trans Jateng			
	a. Biaya Operasional Kendaraan (BOK)	72.935.587	82.982.804	92.031.251
	b. Biaya Tenaga Kerja (Gaji Crew)	19.166.873	21.127.030	22.657.423
	c. Biaya Prasarana (Shelter, dll)	1.658.700	1.833.500	871.560
	d. Total Biaya (1a+1b+1c)	93.761.160	105.942.854	115.560.234
2.	Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng			
	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22.405.562	27.454.138	32.472.937
	b. Estimasi Penghematan Biaya Perjalanan Masyarakat	36.763.473	45.880.510	50.177.948
	c. Estimasi Penghematan Subsidi BBM	12.825.370	14.861.343	22.890.512
	d. Total Nilai Manfaat (2a+2b+2c)	71.994.406	88.195.991	105.541.397
3.	Proporsi Anggaran & Manfaat (2d:1d)x100%	76,78%	83,2%	91,33%

Catatan : Survey dan perhitungan manfaat layanan Trans Jateng mulai dilaksanakan pada tahun 2022
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Beberapa nilai manfaat layanan angkutan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) yang belum dikapitasikan diantaranya: penurunan kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas, peningkatan kualitas udara, peningkatan keselamatan lalu lintas dan pengendalian inflasi.

b) Angkutan Masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Saat lebaran, natal dan tahun baru merupakan penyelenggaraan angkutan pada masa lalu lintas tinggi (*peak season*) yang melibatkan beberapa *stakeholder* untuk menciptakan kelancaran lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, dan terkendali. Setelah pandemi terdapat lonjakan pada tahun sebelumnya dikarenakan tidak diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Tabel 2.71.
Penumpang Masa Angkutan Lebaran dan Nataru Tahun 2019-2024

No	Jumlah Penumpang	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Lebaran	16.329.328	NA	7.851.683	24.343.824	30.474.683	24.343.824
a.	Angkutan Umum	8.179.814	NA	5.295.715	15.477.634	17.895.047	15.477.634
b.	Pribadi	8.149.514	NA	2.555.968	8.866.190	12.579.636	8.866.190
2.	Nataru	11.482.975	NA	15.653.528	16.978.216	17.072.434	16.978.216
a.	Angkutan Umum	3.660.441	NA	11.446.488	9.986.033	11.803.434	9.986.033
b.	Pribadi	7.822.534	NA	4.207.039	6.992.183	5.269.000	6.992.183
Total		27.812.303	NA	23.505.211	41.322.039	47.547.137	41.322.039

Catatan : Pada Tahun 2020 merupakan puncak dari pandemi Covid-19, terdapat pembatasan kegiatan
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

2.3.15. Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Desa

Pengembangan ekonomi masyarakat desa di Jawa Tengah secara umum dapat dilihat melalui dukungan peran lembaga ekonomi desa dan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian desa. Perekonomian desa merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong kemandirian desa. Ekonomi desa melibatkan berbagai pihak, baik Masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah daerah, pihak ketiga (swasta), maupun lembaga ekonomi yang dibentuk oleh desa. Lembaga ekonomi desa yang berperan penting dalam Upaya peningkatan pendapatan desa melalui optimalisasi potensi lokal desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, sampai dengan Tahun 2024, masih terdapat beberapa desa belum memiliki BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli desa. Berikut merupakan data terkait desa di Jawa Tengah

Tabel 2.72.

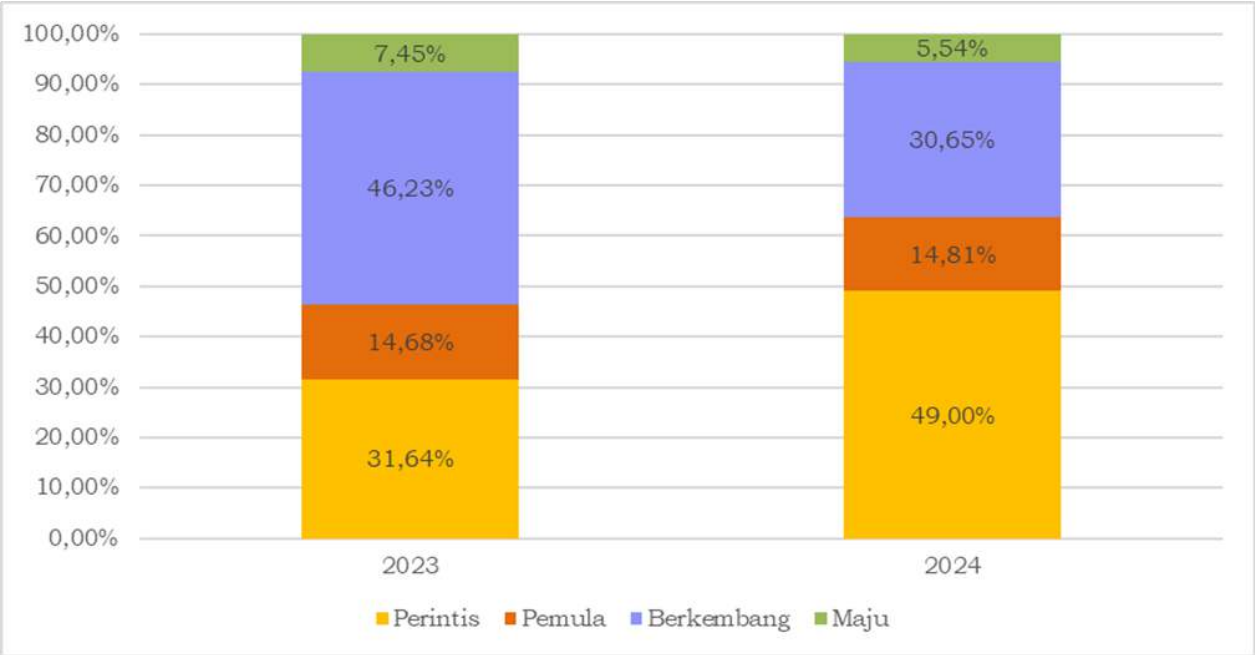
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten	Desa	Jumlah Desa Sudah Membentuk BUM Desa		Jumlah Desa Belum Membentuk BUM Desa	
			Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
1	Banjarnegara	266	262	98,50	4	1,50
2	Banyumas	301	300	99,67	1	0,33
3	Batang	239	228	95,40	11	4,60
4	Blora	271	270	99,63	1	0,37
5	Boyolali	261	222	85,06	39	14,94
6	Brebes	292	292	100,00	0	0,00
7	Cilacap	269	269	100,00	0	0,00
8	Demak	243	214	88,07	29	11,93
9	Grobogan	273	273	100,00	0	0,00
10	Jepara	184	184	100,00	0	0,00
11	Karanganyar	162	160	98,77	2	1,23
12	Kebumen	449	449	100,00	0	0,00
13	Kendal	266	260	97,74	6	2,26
14	Klaten	391	391	100,00	0	0,00
15	Kudus	123	112	91,06	11	8,94
16	Magelang	367	356	97,00	11	3,00
17	Pati	401	401	100,00	0	0,00
18	Pekalongan	272	253	93,01	19	6,99
19	Pemalang	212	211	99,53	1	0,47
20	Purbalingga	224	224	100,00	0	0,00
21	Purworejo	469	468	99,79	1	0,21
22	Rembang	287	263	91,64	24	8,36
23	Semarang	208	202	97,12	6	2,88
24	Sragen	196	196	100,00	0	0,00

No	Kabupaten	Desa	Jumlah Desa Sudah Membentuk BUM Desa		Jumlah Desa Belum Membentuk BUM Desa	
			Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
25	Sukoharjo	150	147	98,00	3	2,00
26	Tegal	281	268	95,37	13	4,63
27	Temanggung	266	258	96,99	8	3,01
28	Wonogiri	251	251	100,00	0	0,00
29	Wonosobo	236	211	89,41	25	10,59
	JUMLAH	7810	7595	97,25	215	2,75

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2024

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat 2,75 persen atau 215 Desa di Jawa Tengah yang belum membentuk BUMDes. Desa-desanya tersebut perlu didorong agar dapat membentuk BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian desa. Sementara itu, apabila dilihat dari klasifikasi perkembangannya, BUMDes dapat dikategorikan dalam kelas perintis, pemula, berkembang, dan maju. Klasifikasi BUMDes saat ini mengacu pada Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Berikut merupakan grafik klasifikasi perkembangan BUMdes Jawa Tengah Tahun 2023 dan Tahun 2024.



Gambar 2.45.
Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan grafik tersebut, sebagian besar BUMDes di Jawa Tengah masih ada di klasifikasi perintis dan berkembang. Sementara itu, BUMDes dengan klasifikasi maju masih sedikit, hanya 5,54%. Perlu komitmen dan upaya bersama yang kuat dari berbagai pihak, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar

kedepannya BUMDes di Jawa Tengah dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya, terutama dalam mendukung perekonomian desa. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala perkembangan BUMDes di Jawa Tengah diantaranya adalah keterbatasan akses permodalan, kapasitas SDM yang kurang memadai, manajemen/pengelolaan yang belum optimal, minimnya kerjasama, kurangnya sarana prasarana pendukung, belum optimalnya inovasi dalam diversifikasi produk, dan belum adanya dukungan kebijakan/regulasi yang mendukung.

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan perdesaan, yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk 149 kawasan perdesaan. 149 kawasan perdesaan tersebut dikembangkan melalui potensi tematik masing-masing kawasan yang berbeda-beda. Tema pengembangannya diantaranya adalah pertanian, wisata, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri kecil.

2.4. Kondisi Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia di Jawa Tengah dilakukan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Gambaran kinerja hasil pembangunan sumber daya manusia Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga), dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing didukung kinerja berbagai sektor antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Gambaran keseluruhan kondisi sumber daya manusia sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

2.4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

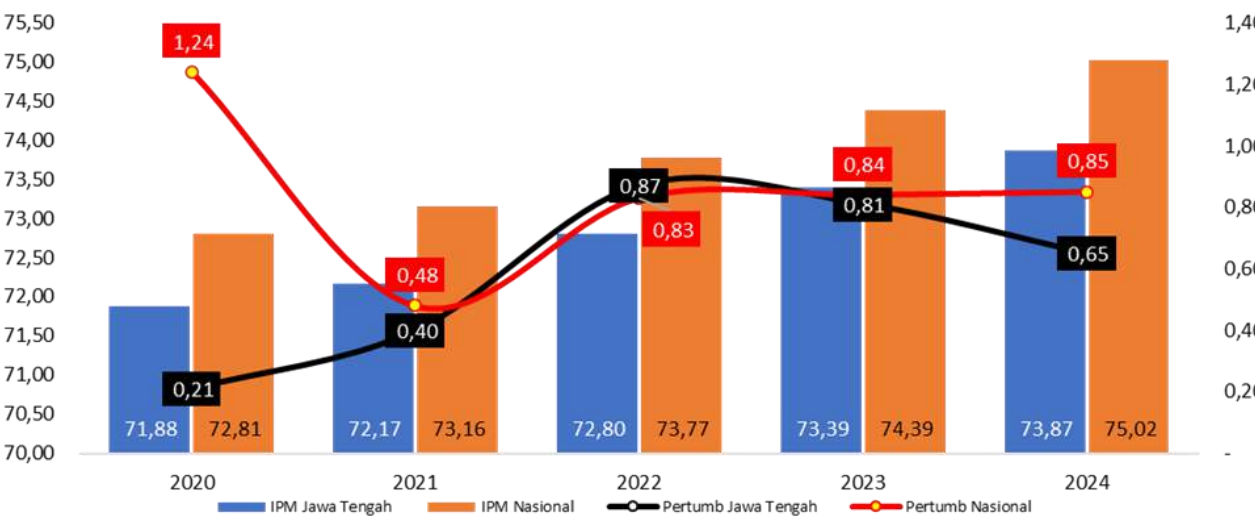
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang direpresentasikan dalam 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak. Ketiga dimensi tersebut diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai dimensi kesehatan serta Pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai dimensi kehidupan layak. Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata *geometric*, artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian komponen lainnya, sehingga ketiga dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020

hingga 2024, namun masih berada di bawah capaian nasional, demikian pula dengan laju pertumbuhannya.

Capaian tiga komponen IPM yaitu RLS penduduk Usia 25 tahun ke atas, HLS dan Pengeluaran per kapita disesuaikan berada di bawah nasional, namun tidak demikian halnya dengan komponen UHH yang berada di atas nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional.

RLS penduduk Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas dan usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2024, namun laju pertumbuhan mulai menurun dari tahun 2022. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat RLS menunjukkan gambaran rata-rata tingkat pendidikan yang ditempuh penduduk di Jawa Tengah. Upaya intervensi melalui pendidikan non formal dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan RLS di Jawa Tengah.

Berbeda dengan RLS, pertumbuhan HLS Jawa Tengah menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 namun kembali melambat di tahun terakhir. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya penyediaan layanan pendidikan perlu menjadi perhatian sehingga diharapkan Program Wajar 13 Tahun dapat tercapai.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.46.
IPM Jateng dan Nasional Tahun 2020-2024

2.4.2. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Berperan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan kualitas bangsa. Keluarga juga menjadi lingkungan pertama dan utama untuk pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral, cinta kasih, agama, moral, budaya dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat, sehingga terbentuknya keluarga berkualitas sangat penting untuk mendukung kualitas masa depan bangsa. Terkait dengan pembangunan keluarga telah dirilis indeks Pembangunan Keluarga oleh BKKBN yang merupakan indeks untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan. Capaian Ibangga Jawa Tengah periode 2021 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang meningkat yaitu dari 56,1 menjadi 63,9 dan masuk pada kategori berkembang. Angka Ibangga Jawa Tengah juga lebih baik dari nasional yang secara trend juga

mengalami perkembangan meningkat yaitu dari 54,01 di tahun 2021 menjadi 62,4 di tahun 2024.



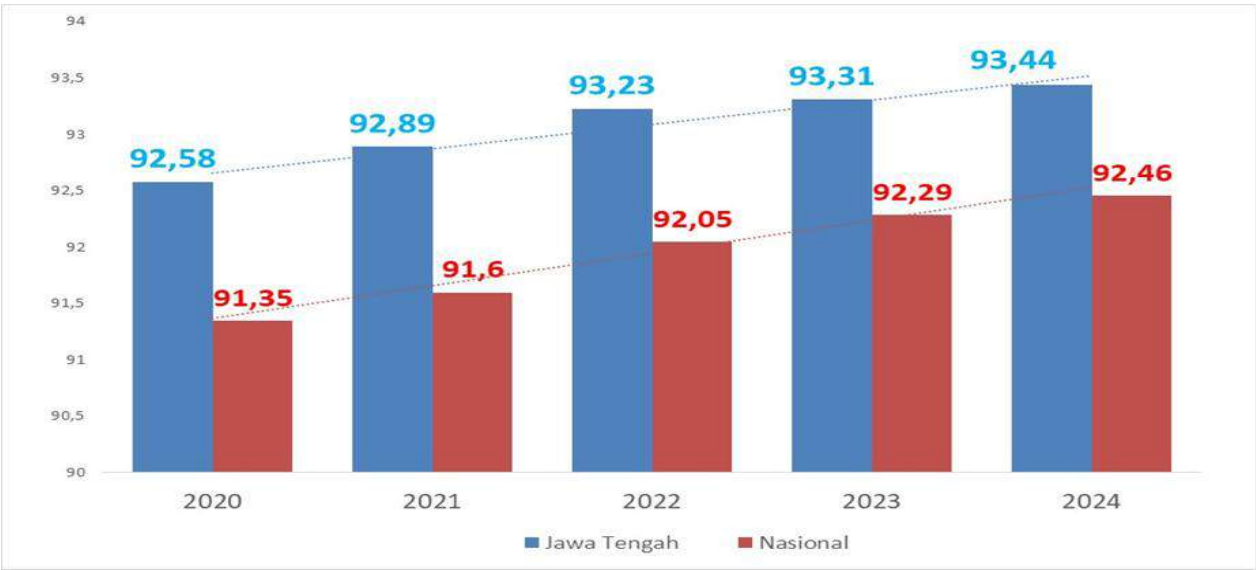
Sumber: BKKBN, 2025

Gambar 2.47.
Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024

2.4.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Ketimpangan gender diukur dari indeks komposit bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

IPG Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2020-2024 berada di atas nasional dan menunjukkan tren kecenderungan yang terus meningkat. Namun demikian, trend peningkatan Jawa Tengah mulai melambat dan sebaliknya pada angka nasional mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga mulai mengejar angka Jawa Tengah. Perlu untuk diperkuat kembali untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih berkualitas.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.48.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan komponen pembentuk IPG, diketahui bahwa komponen Usia Harapan Hidup (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, perempuan selalu tertinggal dibandingkan laki-laki. Atas kondisi tersebut maka aspek pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesadaran di sektor pendidikan bagi perempuan menjadi kunci agar tercipta kesetaraan gender. Sementara itu bagi laki-laki, pola/gaya hidup yang kurang sehat perlu untuk direduksi agar laki-laki memiliki harapan hidup yang lebih berimbang dibanding perempuan.

Pada tahun 2024 UHH perempuan di Jawa Tengah telah mencapai 77,68 tahun, sementara laki-laki mencapai 73,13 tahun. Nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti yang mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Sementara seiring dengan adanya gap UHH antara laki-laki dan perempuan maka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami hal yang sama, tercatat tahun 2024, HLS perempuan sebesar 13,04 tahun sedangkan laki-laki sebesar 12,77 tahun. Dari angka HLS tersebut tentu memberikan harapan di masa mendatang bahwa perempuan memiliki potensi untuk bersaing dengan laki-laki bidang pendidikan. Harapan itu kian terlihat jika melihat kondisi tren perkembangan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dimana perkembangan untuk rata-rata lama sekolah kelompok perempuan periode 2020-2024 lebih baik dibanding laki-laki, meskipun secara angka pertahunnya masih unggul laki-laki. Tercatat bahwa RLS perempuan meningkat sebesar 0,39 poin dari tahun 2020 (7,24) ke tahun 2024 (7,63) sedangkan laki-laki sebesar 0,27 poin yaitu dari 8,16 pada tahun 2020 menjadi 8,43 pada tahun 2024. Jika pola ini terus konsisten tentu tidak menutup kemungkinan RLS perempuan bisa menyalip laki-laki di masa depan.

Sedangkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar 10,892 juta rupiah per kapita per tahun, jauh di bawah laki-laki sebesar 16,690 juta rupiah per kapita per tahun. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar

tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya. Selain itu juga karena perempuan lebih banyak berada pada sektor usaha informal atau nonformal yang terkadang tidak tercatat resmi.

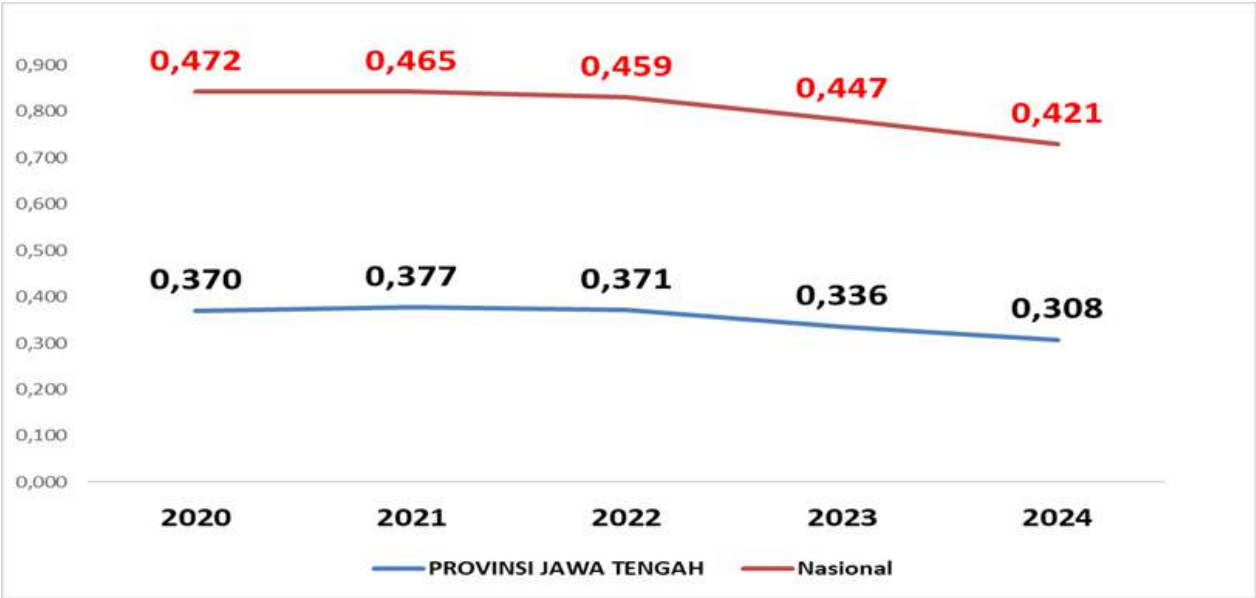
Tabel 2.73.
Perkembangan Komponen IPG 2020-2024 Provinsi Jawa Tengah

Komponen IPG	2020	2021	2022	2023	2024
RLS Laki-Laki	8,16	8,17	8,31	8,42	8,43
RLS Perempuan	7,24	7,34	7,55	7,62	7,63
HLS Laki-Laki	12,70	12,71	12,72	12,76	12,77
HLS Perempuan	12,79	12,93	12,99	13,03	13,04
AHH laki-Laki	72,51	72,61	72,71	72,95	73,13
AHH Perempuan	76,3	76,42	76,53	76,62	77,68
PENGELUARAN PER KAPITA laki-Laki	15,031	15,253	15,606	16,102	16.690
PENGELUARAN PER KAPITA Perempuan	9,274	9,805	10,098	10,513	10.892

Sumber: BPS, 2025.

2.4.4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Kondisi kesetaraan gender di Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan perkembangan yang makin membaik. Tercatat Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2024 sebesar 0,308 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2020 yang sebesar 0,370 dan IKG Jawa Tengah lebih baik dibanding nasional yaitu di angka 0,421 di tahun 2024 yang juga mengalami penurunan dibanding tahun 2020 (0,472). Tren penurunan ini memberikan arti bahwa ketimpangan gender yang terjadi di Jawa Tengah semakin mengecil atau kesetaraan gender yang semakin membaik, namun upaya mereduksi ketimpangan masih perlu terus dilakukan guna meningkatkan kesetaraan gender yang lebih baik lagi dimasa mendatang. Dilihat dari indikator pembentuk dimensi IKG terdapat beberapa indikator yang mengalami perkembangan membaik namun ada juga yang mengalami perkembangan memburuk.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.49.
Perkembangan IKG Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Pada dimensi kesehatan reproduksi terdapat dua indikator pembentuk yaitu proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). MTF membaik dari 0,041 pada tahun 2020 menjadi 0,018 pada tahun 2024, MHPK20 membaik dari 0,254 di tahun 2020 menjadi 0,249 di tahun 2024.

Dimensi pemberdayaan dibentuk dua indikator yaitu persentase keterwakilan di legislatif dan persentase pendidikan SMA ke atas. Keterwakilan legislatif perempuan mengalami perkembangan pasang surut pada rentang yang masih di kategori rendah yaitu dibawah 30 persen. Tercatat persentase keterwakilan perempuan di legislatif tahun 2024 sebesar 17,65 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2023 (22 persen). Hasil pemilu legislatif tahun 2024 ternyata belum mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, meskipun upaya sosialisasi dan peningkatan literasi pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen terus dilakukan dewasa ini. Sedangkan indikator persentase penduduk dengan minimal SMA ke atas, perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Tercatat tahun 2024, laki-laki sebesar 35,72 persen sedangkan perempuan 29,61 persen. Namun dari sisi perkembangannya tercatat kontribusi perempuan mengalami peningkatan sebesar 2,23 persen yaitu dari 26,97 persen di tahun 2020 meningkat menjadi 29,61 persen di tahun 2024. Peningkatan ini melebihi laki-laki yang hanya meningkat sebesar 1,97 persen dari 32,85 persen pada tahun 2020 menjadi 35,72 persen di tahun 2024. Peningkatan pada kontribusi perempuan tersebut menyiratkan akan harapan bahwa perempuan pelan tapi pasti akan mulai mengejar ketertinggalannya dengan laki-laki di sektor pendidikan.

Dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama kurun waktu 2020-2024 TPAK perempuan dan laki-laki semakin meningkat. TPAK perempuan pada tahun 2020 sebesar 57,54 persen menjadi 61,82 persen pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 1,38 persen. Sedangkan TPAK laki-laki pada tahun 2020 sebesar 81,68 persen menjadi 85,66 persen pada tahun 2024 atau meningkat

sebesar 2,84 persen. TPAK perempuan baik nilai maupun peningkatannya masih tertinggal dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan perempuan di sektor ketenagakerjaan masih sulit untuk bersaing dengan laki-laki.

Tabel 2.74.
Perkembangan Komponen Indeks Ketimpangan Gender 2020-2024

Komponen IKG		2020	2021	2022	2023	2024
Dimensi Kesehatan Reproduksi						
Proporsi perempuan yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF)		0,041	0,042	0,042	0,027	0,018
Proporsi 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia <20 tahun (MHPK20)		0,254	0,267	0,264	0,260	0,249
Dimensi Pemberdayaan						
Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA	laki-laki	32,85	32,26	34,14	34,82	35,72
	perempuan	26,97	26,82	28,79	29,20	29,61
Persentase anggota legislatif	laki-laki	81,2	81,67	80	78	82,35
	perempuan	18,8	18,33	20	22	17,65
Dimensi Ekonomi						
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	laki-laki	81,68	81,94	83,74	84,52	85,66
	perempuan	57,54	57,58	58,31	58,92	61,82

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.

2.4.5. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Peran partisipasi aktif perempuan dalam bidang ekonomi dan politik, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan di Jawa Tengah yang diukur dengan Indeks Pemberdayan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang masih cukup baik dibanding capaian tahun 2020, meskipun capaian tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023.

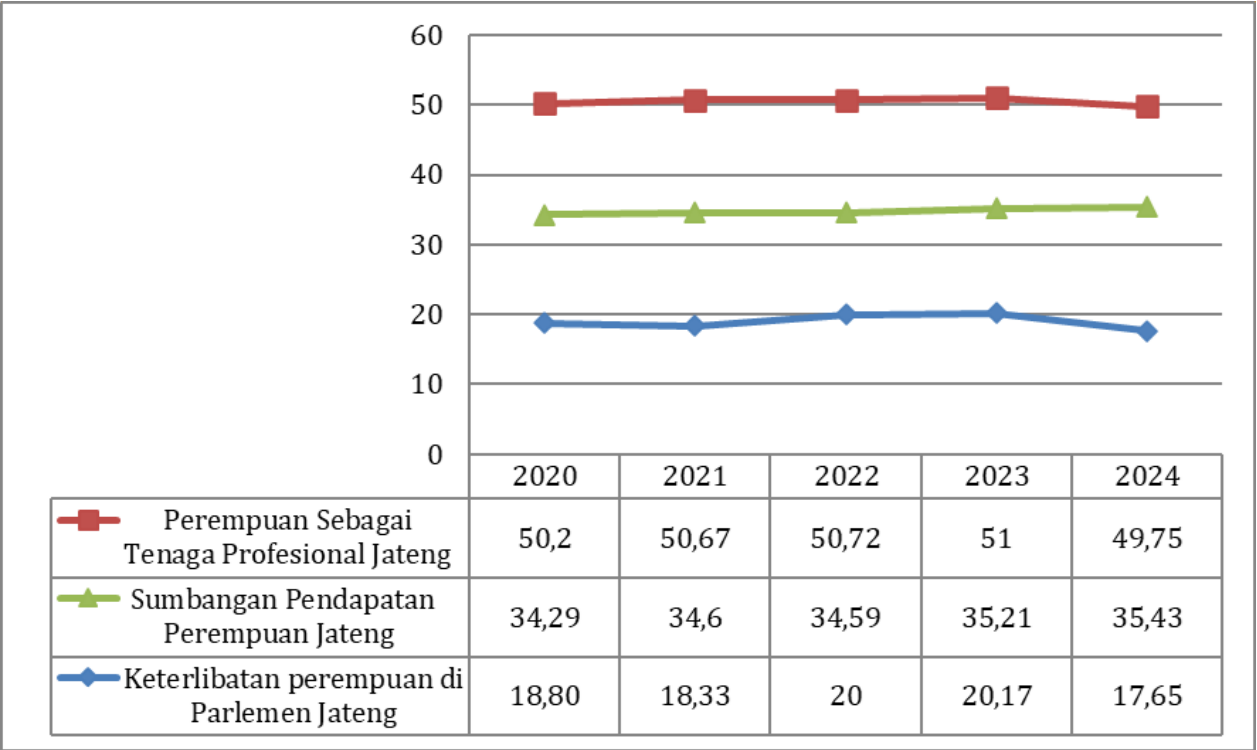


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar.2.50.
Perkembangan IDG Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Faktor yang menyebabkan menurunnya angka IDG Jawa Tengah di tahun 2024 adalah menurunnya keterwakilan perempuan di parlemen yang

turun cukup besar dibanding tahun 2023 (20,17) yaitu menjadi 17,65% di tahun 2024 dan perempuan sebagai tenaga profesional yang juga menurun dari 51% di tahun 2023 menjadi 49,75%. Kondisi ini tentu memprihatinkan ditengah makin gencarnya upaya pengarusutamaan gender diberbagai sektor pembangunan, juga masih kuatnya faktor budaya patriarkhi, motivasi perempuan yang masih rendah, keterbatasan ekonomi dan amasih adanya diskriminasi diberbagai sektor menjadikan kelompok perempuan masih pada posisi belum menguntungkan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar.2.51.
Perkembangan Komponen IDG Jawa Tengah Tahun 2020-2024

2.4.6. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, salah satunya sebagai solusi atas permasalahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Oleh sebab itu, kebudayaan perlu dijadikan landasan untuk menentukan arah dan pencapaian pembangunan. Atas latar belakang tersebut, pada tahun 2018 disusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pembangunan kebudayaan sekaligus sebagai acuan lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK memotret pembangunan kebudayaan melalui 7 dimensi sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.77

IPK Jawa Tengah cenderung lebih baik dibandingkan nasional. Meskipun meningkat, namun kinerjanya mengalami penurunan. Penurunan kinerja yang cukup signifikan terdapat pada dimensi ekonomi budaya. Menurunnya kinerja dimensi ekonomi budaya mengindikasikan bahwa minat masyarakat rendah untuk menjadikan aktivitas seni budaya sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan ekonomi mereka. Hal tersebut bisa saja terjadi karena “pasar budaya lokal” di Jawa Tengah belum memberikan *reward* yang menjanjikan untuk para pelaku seni budaya lokal. Selain itu, pengukuran ekonomi kreatif/industri ekonomi kreatif juga belum terukur dalam dimensi ini.

Tabel 2.75.
Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018-2023

Dimensi IPK	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ekonomi Budaya	37,67	44,45	37,17	25,96	44,00	45,11
Pendidikan	69,71	71,46	72,64	71,21	73,56	73,50
Ketahanan Sosial Budaya	79,57	80,30	80,97	72,37	74,02	75,61
Warisan Budaya	55,16	51,95	45,58	50,12	52,31	53,13
Ekspresi Budaya	44,70	45,45	43,69	34,79	41,59	46,35
Budaya Literasi	51,64	56,67	59,90	50,00	53,36	56,63
Gender	60,05	58,95	58,57	58,28	58,88	59,61
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah	60,05	60,94	59,12	55,24	59,43	60,89
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional	53,74	55,91	54,65	51,90	55,13	57,13

Sumber: Kemenbud, 2024.

2.4.7. Pendidikan

Keberhasilan pencapaian Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun salah satunya ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan penduduk usia 7-18 tahun, dan sekaligus merupakan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Capaian SPM Pendidikan Jawa Tengah pada tahun 2024 berdasarkan Rapor Pendidikan-Kemendikdasmen masih kurang, yaitu 77,26 kategori Tuntas Pratama. Partisipasi pendidikan menengah dan khusus di Jawa Tengah masih rendah. Untuk usia 16-18 tahun hanya berkisar 71 persen, sedangkan usia 4-18 tahun penyandang disabilitas lebih rendah pada kisaran 56 persen.

Tabel 2.76.
Capaian Partisipasi Pendidikan Menengah di Jawa Tengah (Persen)

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	
	16 – 18 Tahun	4 – 18 Tahun Penyandang disabilitas
2021	70,79	n/a
2022	70.81	23,21
2023	70,87	56,70
2024	71,60	56,70

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikdasmen, 2025.

Memperkuat hal tersebut, data Pusdatin Kemendikdasmen mencatat masih terdapat penduduk usia sekolah di Jawa Tengah yang Belum Pernah Bersekolah (BPB), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan Drop Out (DO), yang kemudian dikategorikan sebagai kelompok Anak Tidak Sekolah (ATS), sebesar 329.748 jiwa yang didominasi kategori LTM pada jenjang SMP sebanyak 32 persen .

Tabel 2.77.
Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah per April 2025

NO	ATS BPB	JUMLAH ANAK	NO	ATS LTM	JUMLAH ANAK
1	USIA < 7 TAHUN	0	1	LULUS SD LTM	36.021
2	USIA 7 – 12 TAHUN	20.236	2	LULUS SMP LTM	105.361
3	USIA 13 – 15 TAHUN	20.737		JUMLAH	141.382
4	USIA > 15 TAHUN	56.781			
	JUMLAH	97.754			
NO	ATS DO	JUMLAH ANAK	NO	JENIS ATS	JUMLAH ANAK
1	DO DARI PAUD	3	1	ATS BPB	97.754
2	DO DARI SD	15.890	2	ATS DO	90.612
3	DO DARI SMP	38.855	3	ATS LTM	141.382
4	DO DARI SMA/SMK	35.864		JUMLAH TOTAL	329.748
	JUMLAH	90.612			

Sumber: Pusdatin Kemendikdasmen (2025).

Tingkat penyelesaian pendidikan selama 2 tahun terakhir juga menunjukkan kecenderungan menurun sebesar 58,35 di tahun 2023 dari 58,75 di tahun 2022, dan konsisten di bawah angka Nasional sebesar 66,79 (Sumber: BPS, 2024). Kondisi ini memperlihatkan perlunya pencegahan dan penanganan secara serius terhadap ATS di Jawa Tengah, mengingat penanganan ATS juga merupakan bagian dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pendidikan sepanjang hayat untuk semua.

Jumlah ATS yang masih cukup banyak di Jawa Tengah ditengarai karena belum meratanya layanan pendidikan menengah atau disebut dengan wilayah blankspot layanan pendidikan menengah. Hasil identifikasi menunjukkan masih terdapat 22 kecamatan di Jawa Tengah tersebar di Kabupaten Temanggung, Kebumen, Banjarnegara, Grobogan, Klaten, Wonogiri, Pati, Sragen, Boyolali, Karanganyar dan Rembang. Selain itu, sebagian masyarakat masih belum menganggap pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang salah satunya sebagai upaya meningkatkan derajat dan kesejahteraan masyarakat, kondisi ini ditemukan di lapangan dalam pelaksanaan Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Tengah.

Selain akses pemerataan layanan pendidikan, mutu pendidikan juga masih menjadi persoalan di Jawa Tengah. Mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri. Relevansi pendidikan, kualitas guru, kondisi sarana prasarana pendidikan serta kemampuan literasi dan numerasi siswa dapat menggambarkan kondisi mutu pendidikan di Jawa Tengah.

Relevansi pendidikan ditunjukkan dengan kualitas lulusan pendidikan terutama pada kesesuaian lulusan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja. Data memperlihatkan bahwa serapan tamatan SMK belum optimal, ditandai dengan penurunan jumlah lulusan SMK yang bekerja, sebaliknya jumlah lulusan SMK yang berwirausaha justru mengalami peningkatan. Namun demikian, dari hasil penilaian Rapor Pendidikan Kemendikdasmen Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik untuk tingkat penyerapan lulusan SMK di Jateng sudah mencapai 89,87 persen. Kondisi ini menggambarkan adanya

kecenderungan serapan lulusan SMK lebih banyak ke arah berwirausaha daripada bekerja di dunia usaha maupun industri.

Tabel 2.78.

Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024

Uraian	Skor Rapor Pendidikan			
	2021	2022	2023	2024
✓ Penyerapan lulusan SMK	38,51	92,53	89,32	89,87
✓ Lulusan yang melanjutkan studi	11,58	13,74	14,87	8,93
✓ Lulusan yang bekerja	38,51	60,71	53,52	58,72
✓ Lulusan yang berwirausaha	27,72	18,07	20,93	22,21
✓ Keselarasan bidang kerja	28,90	64,69	44,63	66,09
✓ Masa tunggu bekerja/wirausaha	8,92	3,25	3,88	3,66

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikdasmen, 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan peningkatan keterserapan lulusan SMK pada DUDI salah satunya melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa SMK yang sesuai kebutuhan DUDI serta mengoptimalkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat untuk SMK melalui program *Center of Excellent* (CoE).

Mutu pendidikan juga dapat dilihat melalui kualitas guru yang tersertifikasi. Kemendikdasmen melalui rilis Neraca Pendidikan mencatat pendidik tersertifikasi pada jenjang SMK dan pendidikan khusus masih di bawah 50 persen, meski secara keseluruhan cakupan pendidik tersertifikat jenjang pendidikan menengah mengalami peningkatan.

Tabel 2.79.

Persentase Pendidik yang Tersertifikasi Pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)

Tahun	SMA	SMK	SLB
2019	66,70	43,60	52,20
2020	65,10	44,20	46,10
2021	57,10	44,20	40,30
2022	56,10	45,40	40,00
2023	59,10	48,40	45,00

Sumber: Neraca Pendidikan Kemendikdasmen, 2024

Mutu pendidikan lainnya tergambarkan melalui kondisi sarpras pendidikan di Jawa Tengah. Jawa Tengah masih memiliki ruang kelas kondisi rusak berat, sedang maupun ringan. Pada tahun 2023, ruang kelas dengan kategori rusak berat mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 3,74 persen dan 1,26 persen. Peningkatan tersebut sebagai akibat dari meningkatnya kejadian bencana alam (angin topan, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan gelombang pasang) pada tahun yang sama di Jawa Tengah. Terhadap kondisi tersebut, maka pemerintah berupaya melakukan peningkatan sarpras pendidikan melalui rehabilitasi sarpras pendidikan baik dengan optimalisasi APBN (DAK Fisik Sarpras Pendidikan) maupun APBD.

Tabel 2.80.
Persentase Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)

Tahun	SMA			SMK		
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat
2019	28,55	70,17	1,28	30,26	69,06	0,69
2020	58,41	41,59	-	55,72	44,28	-
2021	57,24	42,76	-	53,10	46,90	-
2022	73,87	23,66	2,47	71,92	27,35	0,73
2023	68,47	27,79	3,74	74,47	24,28	1,26

Sumber: BPS, 2024

Kemampuan literasi dan numerasi juga gambaran mutu pendidikan dari segi proses. Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa serta mampu menganalisa dan memahami konsep, sedangkan numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai literasi dan numerasi secara umum mengalami peningkatan pada tahun 2024, begitupun dengan persentase kabupaten/kota dan satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembelajaran secara perlahan di Jawa Tengah.

Tabel 2.81.
Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2021-2024

Capaian*	Jenjang	Skor Literasi	Skor Numerasi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum		Persentase Satpendik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum		Nilai Karakter
				Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi	
2021	SMA**	67,18	52,84	8,57	0,00	32,80	6,11	56,51
	SMK	63,64	51,10					54,53
	SDLB	61,63	52,55					55,89
	SMPLB	63,68	57,20					56,58
	SMALB	59,72	49,94					57,25
2022	SMA**	68,79	56,56	45,71	0,00	48,52	19,81	57,03
	SMK	64,14	53,71					55,21
	SDLB	60,61	52,58					58,31
	SMPLB	60,21	56,99					58,21
	SMALB	56,24	52,26					56,21
2023	SMA**	73,82	61,46	77,14	34,29	64,89	48,02	57,35
	SMK	70,37	59,07					55,71
	SDLB	67,87	64,28					61,82
	SMPLB	64,91	65,38					58,60
	SMALB	61,30	56,74					56,02
2024	SMA**	77,37	64,88	85,71	20,00	68,50	62,69	57,03
	SMK	73,01	61,57					55,45
	SDLB	71,58	71,27					62,75
	SMPLB	72,83	70,68					60,15

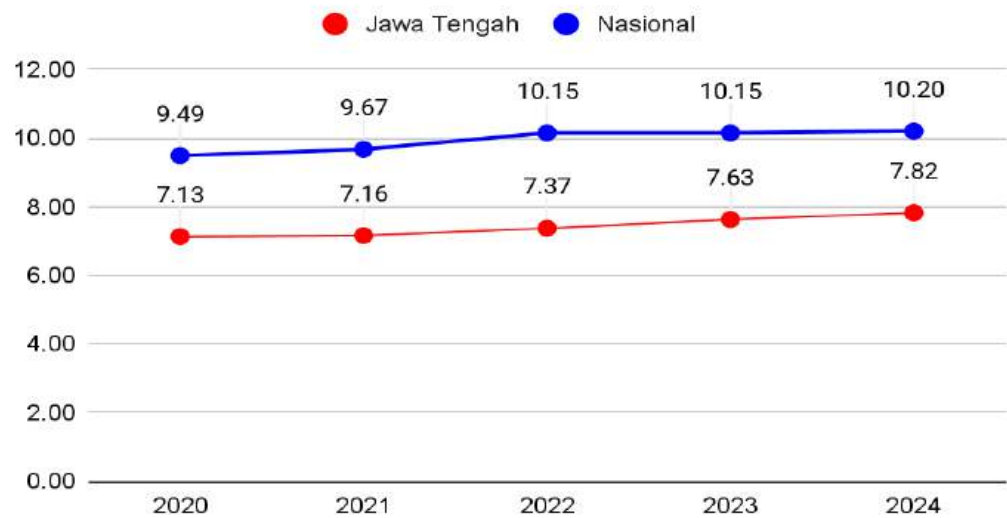
Capaian*	Jenjang	Skor Literasi	Skor Numerasi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum		Persentase Satpendik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum		Nilai Karakter
				Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi	
	SMALB	72,42	68,36					59,88

Sumber: Kemendikdasmen, 2025

*) tahun capaian merupakan t-1 dari tahun rilis Rapor Pendidikan

**) merupakan nilai rata-rata dari SMA Umum dan SMA Keagamaan

Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi siswa, namun juga nilai karakter siswa. Rapor Pendidikan juga telah memuat pengukuran nilai karakter siswa yang mengukur kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai -nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, kreativitas, nalar kritis kebhinekaan global, serta kemandirian. Penerimaan terhadap siswa dari kelompok rentan seperti kurang mampu secara ekonomi dan disabilitas merupakan bagian dari perwujudan nilai karakter siswa.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.52.

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024

Tantangan lain terkait pendidikan di Jawa Tengah adalah dominasi pendidikan tertinggi yang ditamatkan berada pada jenjang SD/MI (24,39 persen), sementara untuk pendidikan tinggi hanya di angka 7,82 persen. Capaian tersebut jauh di bawah angka Nasional yang dominasi berada pada jenjang SM/MA (30,85 persen) dan untuk jenjang pendidikan tinggi sebesar 10,20%.

2.4.8. Kesehatan

a. Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita

1) Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan program kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama

masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 2021-2024 dari 199 menjadi 74,73 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini hampir mencapai target RPJMN 2024 sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, masih diperlukan upaya dalam percepatan penurunan AKI untuk mencapai target SGDs yaitu sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Kondisi Kematian ibu dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami trend penurunan, hal ini dilakukan dengan upaya Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. Kabupaten/ Kota dengan jumlah kasus kematian ibu tertinggi adalah Brebes sebanyak 54 kasus. Kabupaten/ Kota dengan kasus kematian ibu terendah adalah Kota Tegal dengan 1 kasus, diikuti Kota Magelang dan Kota Salatiga dengan 2 kasus. Sebesar 71,66 persen kematian maternal di Provinsi Jawa Tengah terjadi pada waktu nifas.

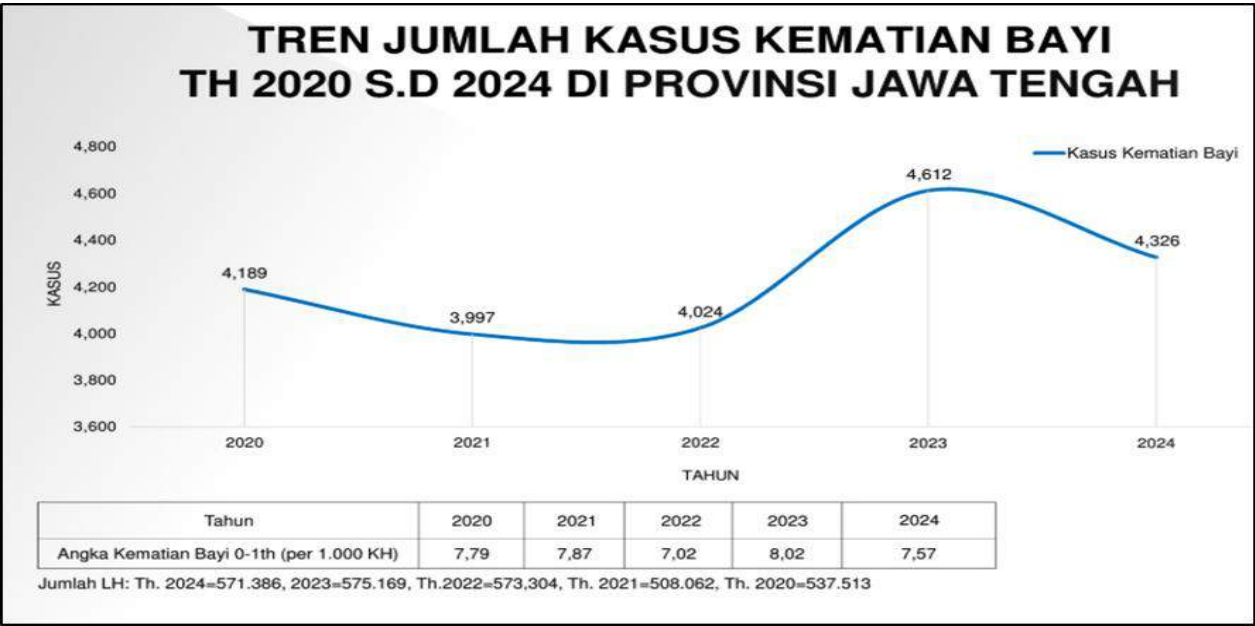


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.53.
Tren Kasus Kematian Ibu Tahun 2020-2024

Angka Kematian Bayi (AKB) periode tahun 2020 hingga 2024 mengalami *trend* yang fluktuatif yaitu sebesar 4.189 kasus pada tahun 2020 menjadi sebesar 4.326 kasus pada tahun 2024. Secara absolut jumlah kasus kematian bayi masih tinggi. Faktor penyebab kematian bayi antara lain gangguan pernafasan dan jantung, kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan

yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan komplikasi kehamilan. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Kasus kematian bayi di Jawa Tengah Tertinggi di Kabupaten Grobogan sebanyak 241 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 12 kasus.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.54.
Tren Kasus Kematian Bayi Tahun 2020-2024

Angka Kematian Balita (AKABA) di Jawa Tengah pada 2020 sampai dengan tahun 2024 sangat fluktuatif. Menunjukkan tren membaik dari 8.99 per 1.000 KH pada 2020 menjadi 8.57 per 1.000 KH pada 2024.Kasus Kematian Balita Tertinggi di Kabupaten Grobogan sebanyak 279 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 12 kasus. Beberapa penyebab kematian balita antara lain pneumonia, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain infeksi penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita. Masih perlu upaya edukasi dan peningkatan pemahaman orang tua dan pengasuh untuk menerapkan pola asuh secara benar kepada balita.



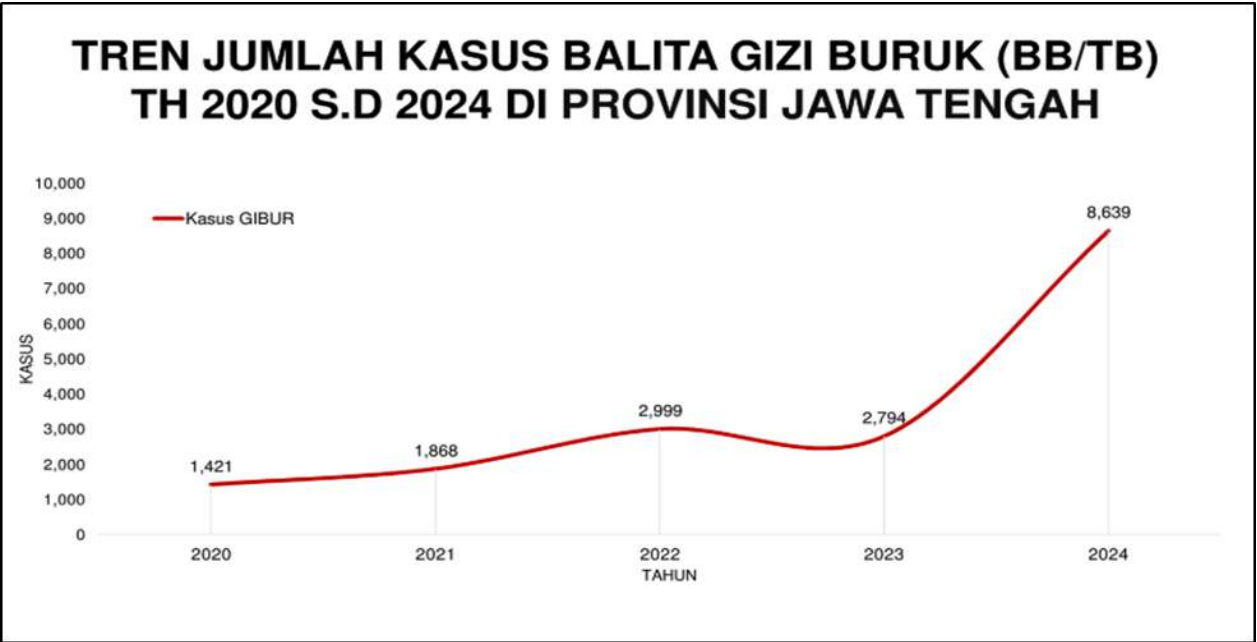
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.55.
Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2020-2024

2) Kasus gizi buruk

Kasus gizi buruk di Jawa Tengah mengindikasikan peningkatan pula dari 1.421 pada tahun 2020 menjadi 8.639 pada tahun 2024. Hal ini terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi gizi buruk yaitu: ekonomi, sanitasi, pendidikan orang tua, dan perilaku orang tua. Kemiskinan salah satu determinan sosial-ekonomi, merupakan akar dari ketiadaan pangan, tempat mukim yang berjejalan, dan tidak sehat serta ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan. Malnutrisi masih saja melatar belakang penyakit dan kematian anak. Kurang kalori protein sesungguhnya berpeluang menyerap siapa saja, terutama bayi dan anak yang tengah tumbuh-kembang.

Gizi buruk cenderung menyerang setelah mereka berusia 12 bulan. Penilaian status gizi masyarakat memerlukan kebijakan yang menjamin setiap anggota masyarakat mendapatkan makanan yang cukup jumlah dan mutunya. Gizi yang diperoleh seorang anak melalui konsumsi makanan setiap hari. Kecukupan zat gizi berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak. Kasus gizi buruk bukanlah jenis penyakit yang datang tiba-tiba begitu saja. Tetapi karena proses yang menahun terus bertumpuk dan menjadi kronik saat mencapai puncaknya. Masalah defisiensi gizi khususnya menjadi perhatian karena berbagai penelitian menunjukkan adanya efek jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak manusia.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.56.

Tren Kasus Balita Gizi Buruk (BB/TB) Tahun 2020 -2024

Permasalahan gizi yang terjadi di Jawa Tengah secara umum disebabkan oleh masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu lama maupun infeksi berulang yang mengganggu intake zat gizi menyebabkan masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek (stunting). Kekurangan gizi dalam waktu singkat, misalnya karena wabah penyakit dan kelaparan menyebabkan masalah gizi akut sehingga mengakibatkan anak menjadi kurus (*underweight* dan *wasted*). Selain permasalahan kekurangan gizi, kelebihan gizi juga menimbulkan masalah karena menyebabkan anak menjadi obesitas. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa tren

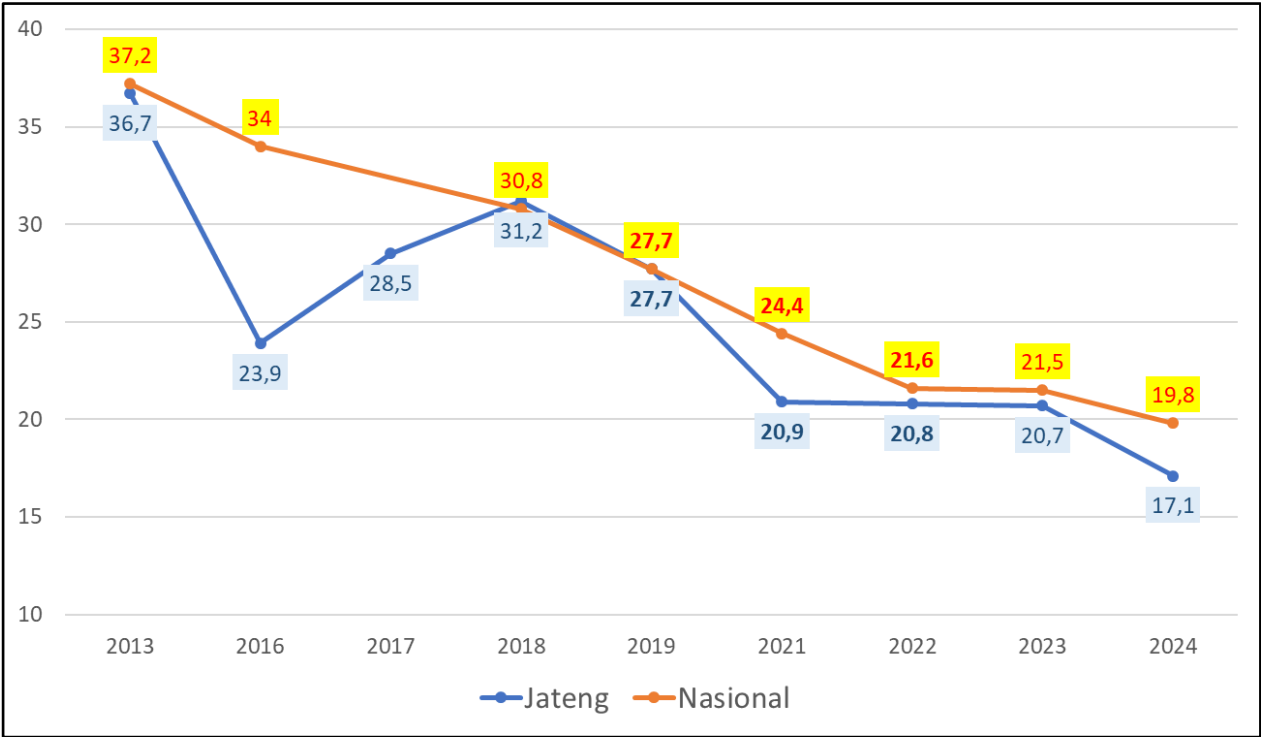
permasalahan gizi di Jawa Tengah menunjukkan angka yang semakin membaik. Prevalensi balita *underweight* tahun 2021 sebesar 14 persen meningkat pada tahun 2022 menjadi 17,6 persen namun pada tahun 2023 turun menjadi 14.4 persen, Balita *wasting* tahun 2021 sebesar 6,7 persen meningkat menjadi 7,1 persen pada 2023. Prevalensi balita *stunted* turun dari 20,9 persen pada 2021 menjadi 20,7 persen pada 2023. Berdasarkan standar WHO, suatu wilayah dikatakan baik jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prevalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi kronis apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan memiliki permasalahan gizi kronis dan akut apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen. Berdasarkan standar tersebut, Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah dengan permasalahan gizi kronis dan akut.

Percepatan penurunan stunting pada Balita merupakan program prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029, dengan target prevalensi stunting turun hingga 14 persen. Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam mendukung upaya Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini dibuktikan dengan angka prevalensi stunting di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan terus menerus dari tahun 2021 sebesar 20,9 persen menjadi 17,1 persen di tahun 2024. Upaya untuk terus menurunkan prevalensi stunting di Jawa Tengah tahun 2026 ditargetkan turun menjadi 17 persen.

Tabel 2.82.
Prevalensi Stunting Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Stunting	Sumber
2020	-	Tidak dilakukan pengukuran karena pandemi
2021	20,9%	Survey Status Gizi Indonesia
2022	20,8%	Survey Status Gizi Indonesia
2023	20,7 %	Survey Kesehatan Indonesia
2024	17,1 %	Survey Status Gizi Indonesia

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2024



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2024

Gambar 2.57.
Angka Prevalensi Stunting Berdasarkan SSGI Tahun 2024

Stunting disebabkan oleh berbagai faktor mulai kehamilan, usia kehamilan, status gizi ibu, berat badan lahir rendah, panjang lahir pendek. Risiko ini semakin tinggi bila terjadi infeksi berulang setelah lahir terutama diare dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Di tingkat keluarga, faktor sosial ekonomi dan pendidikan orang tua turut berperan penting. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah, pendapatan keluarga yang tidak mencukupi, dan kondisi sanitasi yang buruk berhubungan secara positif dengan kejadian stunting.

3) Penyakit Menular dan Tidak Menular

Perubahan pola penyakit sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Pengendalian penyakit menular dilakukan terhadap penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

a) Kondisi Penyakit Menular

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Provinsi Jawa Tengah adalah TB, HIV/AIDS, Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka kesakitan DBD (Incidence Rate/IR DBD) di Jawa Tengah mengalami kenaikan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 yaitu menjadi 48,07 per 100.000 penduduk setelah tahun sebelumnya di angka 17,73 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kesakitan DBD (CFR DBD) mengalami

penurunan yaitu dari 2,2 persen pada tahun 2023 menjadi 1,5 persen pada tahun 2024.

Angka Kesakitan Malaria (API) Pada Tahun 2024 tidak ditemukan Kasus *Indigenous* Malaria sehingga capaiannya dengan Tahun 2023 sebesar 0,02. Jumlah Kasus Malaria di Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 723 kasus, dengan capaian tertinggi di Kota Salatiga dan Capaian Terendah di Kota Tegal.

Sementara itu, capaian penemuan kasus TB (TC) mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 118 persen menjadi 90 persen pada tahun 2024, dengan jumlah penemuan 87.706 kasus TB di Jawa Tengah. keberhasilan pengobatan TB (SR TB) mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 87 persen menjadi sebesar 86 persen di tahun 2024. Penemuan kasus TB semakin membaik seiring dengan dilakukannya deteksi dini oleh petugas Puskesmas yang langsung turun ke masyarakat serta peran Balai Kesehatan Masyarakat milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pada aspek non kesehatan, rumah yang tidak sehat, status gizi masyarakat dan perilaku tidak sehat menjadi pemicu dan pemberat kasus TB.

Pada penyakit HIV/AIDS perlu masih perlu diwaspadai secara serius, berdasarkan data Tahun 2024 mengalami peningkatan penemuan, tercatat kasus HIV AIDS dari 5.722 kasus di tahun 2023 menjadi 6.509 kasus di tahun 2024. Kasus HIV/AIDS perlu menjadi perhatian bersama dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Meskipun kinerja pelayanan HIV/AIDS semakin baik, hal ini dipengaruhi karena semakin efektifnya *pemanfaatan Voluntary Counseling Test (VCT)* di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Tabel 2.83.
Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	API Malaria (%)	TC (%)	SR TB (%)	Kasus ODHIV
2020	16,30	1,9	0,009	51	84,5	4.298
2021	12,80	2,71	0,024	53	83,5	3.543
2022	33,69	2,08	0.028	79	84,5	4.429
2023	17,73	2,2	0,02	118	87	5.722
2024	44,9	1,45	0,02	90	86	6.509

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

b) Kondisi Penyakit Tidak Menular (PTM)

Peningkatan beban akibat penyakit tidak menular sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh atau obesitas, pola makan tidak sehat, kurang

aktivitas fisik, dan merokok serta alkohol. Peningkatan PTM dapat mengakibatkan penurunan produktivitas penduduk karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti hipertensi, *diabetes mellitus*, dan kanker. Berdasarkan data 2024 menunjukkan bahwa jumlah penderita hipertensi mengalami kenaikan sebesar 5.632.593 kasus dibandingkan kasus Tahun 2023 sebesar 5.032.288 kasus. Begitu juga untuk penyakit kanker mengalami kenaikan dari Tahun 2023 sebesar 16.570 menjadi 21.019 di Tahun 2024. Namun untuk Hipertensi mengalami tren penurunan dari 670.252 kasus pada tahun 2023 menjadi 667.145 kasus di tahun 2024.

Tabel 2.84.

**Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020–2024**

Tahun	Jenis PTM		
	Diabetes Milletus	Hipertensi	Kanker
2020	582.559	2.543.732	12.702
2021	467.365	3.329.052	12.886
2022	613.524	4.695.927	17.292
2023	670.252	5.032.288	16.570
2024	667.145	5.632.593	21.019

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

b. Kepesertaan dan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kesehatan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) berkaitan dengan sebuah sistem yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan tersebut. UHC merupakan cakupan kepesertaan program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 98 persen dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta JKN. Jumlah kabupaten/kota yang belum mencapai UHC minimal 98 persen sebanyak 6 kabupaten meliputi (Kabupaten Boyolali, Rembang, Tegal, Temanggung, Wonosobo).

Tabel 2.85.
Cakupan Kepesertaan Aktif UHC Tahun 2024

No.	Kota/Kabupaten	Penduduk Nasional	Jumlah Peserta	Pencapaian UHC	Peserta Aktif	Tingkat Keaktifan
1	KAB. BANJARNEGARA	1.068.347	1.061.352	99,35%	758.714	71,02%
2	KAB. BANYUMAS	1.864.665	1.834.437	98,38%	1.410.580	75,65%
3	KAB. BATANG	849.686	839.153	98,76%	636.113	74,86%
4	KAB. BLORA	925.434	908.618	98,18%	644.921	69,69%
5	KAB. BOYOLALI	1.110.346	1.072.288	96,57%	835.734	75,27%
6	KAB. BREBES	2.059.458	2.024.610	98,31%	1.521.768	73,89%
7	KAB. CILACAP	2.037.899	2.019.052	99,08%	1.328.243	65,18%
8	KAB. DEMAK	1.250.863	1.243.573	99,42%	988.652	79,04%
9	KAB. GROBOGAN	1.517.987	1.518.312	100,02%	984.248	64,84%
10	KAB. JEPARA	1.275.501	1.252.428	98,19%	801.007	62,80%
11	KAB. KARANGANYAR	952.132	943.422	99,09%	729.406	76,61%
12	KAB. KEBUMEN	1.441.425	1.428.889	99,13%	1.073.058	74,44%
13	KAB. KENDAL	1.093.046	1.082.110	99,00%	814.454	74,51%
14	KAB. KLATEN	1.300.142	1.285.231	98,85%	1.045.196	80,39%
15	KAB. KUDUS	874.796	866.760	99,08%	700.610	80,09%
16	KAB. MAGELANG	1.337.411	1.314.323	98,27%	931.589	69,66%
17	KAB. PATI	1.379.022	1.359.771	98,60%	968.484	70,23%
18	KAB. PEKALONGAN	1.026.546	1.031.595	100,49%	773.020	75,30%
19	KAB. PEMALANG	1.588.826	1.584.093	99,70%	1.177.807	74,13%
20	KAB. PURBALINGGA	1.053.565	1.052.030	99,85%	815.725	77,43%
21	KAB. PURWOREJO	809.121	795.710	98,34%	601.649	74,36%
22	KAB. REMBANG	662.787	647.702	97,72%	537.093	81,04%
23	KAB. SEMARANG	1.085.196	1.064.742	98,12%	852.563	78,56%
24	KAB. SRAGEN	1.021.435	1.011.679	99,04%	687.265	67,28%
25	KAB. SUKOHARJO	913.950	899.602	98,43%	702.800	76,90%
26	KAB. TEGAL	1.727.497	1.680.536	97,28%	1.100.893	63,73%
27	KAB. TEMANGGUNG	820.736	793.821	96,72%	592.494	72,19%
28	KAB. WONOGIRI	1.063.902	1.070.069	100,58%	750.737	70,56%
29	KAB. WONOSOBO	942.199	919.049	97,54%	758.714	71,02%
30	KOTA MAGELANG	128.591	129.410	100,64%	115.015	89,44%
31	KOTA PEKALONGAN	318.182	312.875	98,33%	238.896	75,08%
32	KOTA SALATIGA	198.372	197.768	99,70%	176.533	88,99%
33	KOTA SEMARANG	1.699.585	1.713.830	100,84%	1.398.037	82,26%
34	KOTA SURAKARTA	588.419	579.180	98,43%	507.540	86,25%
35	KOTA TEGAL	293.818	293.200	99,79%	234.638	79,86%
	JAWA TENGAH :	38.280.887	37.831.220	98,83%	28.194.196	73,42%

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

2.4.9. Kesejahteraan Sosial
a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kondisi kesejahteraan sosial di Jawa Tengah selain masih dihadapkan pada tingginya angka kemiskinan juga masih tingginya penduduk yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS). Berdasarkan perkembangan data PPKS lima tahun terakhir, PPKS di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang sedikit menurun bersamaan dengan semakin meningkatnya jumlah penanganan di dua tahun terakhir yaitu di tahun 2023 dan 2024. Selama tiga tahun berturut turut penanganan PPKS hanya sebesar 0,47 persen dari total populasi yang secara jumlah mengalami pasang surut. Sementara itu di tahun 2023 jumlah penanganan PPKS meningkat di angka 325.010 (8,03 persen) dikarenakan adanya tambahan komponen intervensi yaitu BLT DBHCHT dan BLT DID. Sementara itu di tahun 2024 komponen BLT DID sudah tidak ada lagi sehingga cakupan penanganan PPKS menurun menjadi sebesar 2,46 persen. Beberapa komponen penanganan PPKS selain BLT antara lain Program Kartu Jateng Sejahtera (KJS), pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dalam panti milik pemerintah subsidi permakanan panti swasta, bantuan KUBE dan penanganan korban bencana alam/sosial. Kondisi ini tentu masih jauh dari cukup untuk menangani PPKS di Jawa Tengah jika hanya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi semata. Dibutuhkan peran

semua pihak baik pemerintah kabupaten/kota, swasta maupun lembaga sosial lainnya dalam penanganan PPKS sesuai peran dan fungsinya masing-masing agar cakupan penanganan PPKS dapat meningkat.

Tabel 2.86.

Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Populasi PPKS (Orang)	Jumlah Penanganan (Orang)	Persentase
1	2020	4.056.054	19.214	0,47
2	2021	4.654.151	19.214	0,47
3	2022	4.579.790	19.214	0,47
4	2023	4.112.263	325.010	8,03
5	2024	4.007.316	112.474	2,46

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2023.

b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Sementara itu, peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diharapkan dapat menjadi faktor dominan dalam penyelenggaraan sosial termasuk membantu para PPKS untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya belum dapat diharapkan sepenuhnya. Beberapa hal yang masih menjadi tantangan pada PSKS dalam menjalankan perannya yaitu terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM PSKS, termasuk tingkat kesejahteraan SDM PSKS yang masih rendah sehingga berpengaruh pada komitmen dalam penyelenggaraan sosial maupun pengkaderisasian SDM PSKS. Data perkembangan jumlah PSKS menunjukkan bahwa jumlah PSKS makin menurun sejak tahun 2020 sebesar 32.165 PSKS menjadi 24.669 PSKS pada tahun 2024.

Tabel 2.87.

Kondisi PSKS Tahun 2020-2024

No	Jenis	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Karang Taruna (KT)	8.562	8.562	8.562	4.712	4.712
2	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	866	866	866	866	867
3	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	12.540	11.440	11.440	11.377	11.377
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	576	576	576	576	576
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	38	38	37	38	38
6	Dunia Usaha	63	63	56	58	58
7	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	1.123	1.123	1.019	1.345	1.344
8	Family Care Unit (FCU)	2	2	1	11	11
9	Sakti Peksos	63	63	69	Mulai 2023 sdh tidak ada sakti peksos berubah menjadi	-

No	Jenis	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
					pendamping resos yang merupakan gabungan pekos anak, pendamping disabilitas, pendamping LU dan konselor Napsa / peksos adiksi	
10	Pekerja Sosial Profesional (PSP)/Fungsional	117	117	123	136	126
11	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	38	38	38	228	38
12	Penyuluh Sosial Fungsional	25	25	46	36	36
13	Penyuluh Sosial Masyarakat	77	77	77	2.023	126
14	PPNS	3	3	3	1	1
15	Pelopor Perdamaian	230	230	245	230	225
16	SDM PKH	5.495	5.495	5026	5097	4.992
17	SLRT	21	21	21	31	35
18	Puskesmas	306	385	405	116	116
	Total	32.165	31.145	30.632	26.870	24.669

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025.

c. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan SPM Sosial mendasarkan pada capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa layanan terhadap rehabilitasi sosial dalam panti untuk anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta dan layanan penanganan saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana telah mencapai 100 persen. Namun demikian, capaian 100 persen belum menunjukkan *coverage* seluruh kebutuhan penanganan di Jawa Tengah dan masih sebatas sasaran yang ditangani saja. Kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya kapasitas sarpras, pendanaan dan SDM panti. Berikut tabel capaian pelaksanaan SPM Sosial Tahun 2023.

Tabel 2.88.
Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Penerima layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	4.275 Orang	4.275 Orang	100	21.258.122.000	20.930.788.722	98,46
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di dalam panti	2.898 Orang	2.898 Orang	100	16.603.623.000	16.467.216.840	99,18
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia Terlantar di dalam panti	1.955 Orang	1.955 Orang	100	15.735.623.000	15.596.432.000	99,12
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan & pengemis di Dalam panti	1.110 Orang	1.110 Orang	100	6.299.674.000	6.166.769.000	97,89
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat & Setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	10.450 Orang	10.450 Orang	100	2.989.918.000	2.976.232.900	99,54
	Jumlah	20.688 Orang	20.688 Orang	100	62.886.960.000	62.137.439.462	99,54

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

d. Penanganan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Urusan sosial mempunyai peranan besar dalam memberikan pelayanan umum khususnya terkait dengan layanan pemenuhan kesejahteraan sosial. Beberapa layanan yang tersedia dan menjadi kewenangan provinsi antara lain layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS terlantar di dalam panti, dan layanan SLRT/Puskessos.

(1) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Panti

Layanan PPKS dalam Panti menghadapi beberapa tantangan antara lain kondisi sarpras panti, kapasitas dan kuantitas SDM panti serta pemenuhan layanan panti yang terbatas. Kondisi sarpras panti mengalami perkembangan yang terus memburuk secara fisik jika dilihat dari kondisi bangunan. Tercatat bangunan rusak berat tahun 2024 sebanyak 55 unit meningkat dibanding tahun 2023 yang sebanyak 50 unit. Demikian juga dengan rusak ringan yang makin bertambah dari 133 di tahun 2023 menjadi 146 di tahun 2024. Kondisi bangunan ini tentu menjadi tantangan ke depan di tengah upaya penanganan PPKS yang makin berkualitas guna melahirkan purna bina para penghuni panti.

Tabel 2.89.
Jumlah dan Kondisi Bangunan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Panti/ Rumpel	Jumlah Unit Bangunan	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
1	2020	54	789	570	105	70	44
2	2021	54	789	548	110	73	58
3	2022	54	790	548	111	73	58
4	2023	54	n/a	597	133	-	50
5	2024	56	803	590	146	12	55

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Dari sisi SDM Panti, beberapa kebutuhan tenaga layanan yang ada saat ini masih jauh dari kebutuhan untuk memberikan layanan di 56 panti/rumah pelayanan sosial. Beberapa pos SDM yang dibutuhkan antara lain pekerja sosial terampil dari kebutuhan 57 orang baru tersedia 27 orang, pekerja sosial ahli dari kebutuhan 426 orang baru tersedia 107, penyuluh sosial ahli dari 104 kebutuhan baru tersedia 36 orang, perawat dari 68 orang hanya tersedia 4 orang.

Tabel 2.90.
Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

PEKSOS TERAMPIL		PEKSOS AHLI		PENYSOS AHLI		PERAWAT		DOKTER	
Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan
27	57	107	426	36	104	4	68	1	1

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025

Kondisi terbatasnya panti milik provinsi baik menyangkut kapasitas maupun SDM sehingga dalam penanganan PPKS kurang optimal, maka penting untuk mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan PPKS. Sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan rumah singgah yang berfungsi untuk melakukan penanganan PPKS yang sifatnya sementara dan melakukan *assessment* terhadap PPKS hasil penjangkaran. Sampai dengan tahun 2023 tercatat baru 27 kabupaten/kota yang telah memiliki rumah singgah baik dibiayai APBD masing-masing maupun bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah. Tersisa delapan kabupaten/kota yang belum memiliki rumah singgah yaitu Cilacap, Banjarnegara, Pemalang, Wonosobo, Sukoharjo. Kab. Semarang, Kudus, dan Kota Magelang.

(2) Layanan Puskessos-SLRT

Puskessos-SLRT sebagai lembaga dan sistem layanan untuk membantu dalam program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (berupa mengidentifikasi kebutuhan, menangani aduan dan sebagai rujukan masyarakat miskin/rentan miskin) masih dihadapkan pada tantangan pada konsistensi/ keaktifan layanan dikarenakan terbatasnya kapasitas SDM pengelola dan kurangnya kemitraan dengan pemangku kepentingan termasuk dunia usaha. Selain itu juga masih terbatasnya

Puskessos-SLRT yang belum merata terbentuk di semua desa/kelurahan. Kondisi sampai dengan tahun 2024, tercatat total Puskessos-SLRT tingkat desa/kelurahan telah terbentuk sebanyak 2.393, meningkat dibanding tahun 2023 yang sebesar 1.166 puskesmas-SLRT.

Tabel 2.91.

Pembentukan SLRT Desa/Kelurahan 2023-2024

Sumber Dana	Pembentukan Puskessos-SLRT Desa/Kelurahan TA 2024	Pembentukan Puskessos-SLRT Desa/Kelurahan TA 2024
APBN	64	64
APBD Prov	122	122
APBD Kab/Kota	500	1.348
APBD Desa	480	859
Total	1.166	2.393

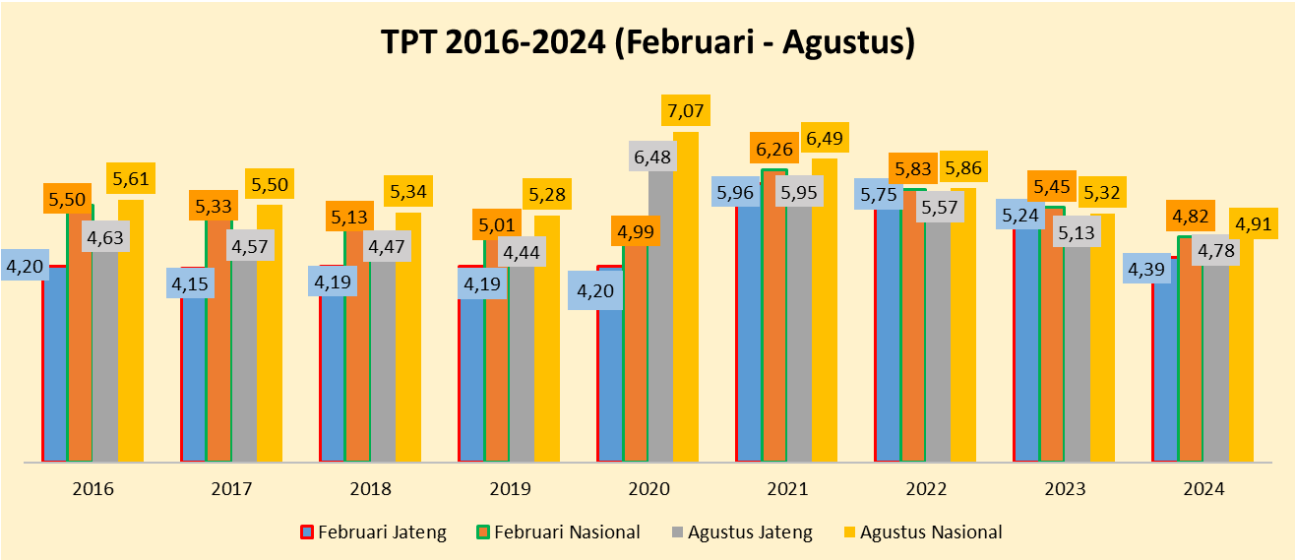
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025

e. Pemberian Bantuan Sosial dan Ekonomi

Upaya penanganan kemiskinan melalui bantuan kepada masyarakat non produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah dilaksanakan tiap tahunnya sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan termasuk penurunan angka kemiskinan ekstrim. Tahun 2024 telah tersalurkan bantuan KJS senilai Rp 370.000 per orang per bulan yang mencakup total sasaran sebanyak 12.764 penerima manfaat. Sementara itu untuk bantuan pengembangan produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2024 telah tersalurkan bantuan stimulus modal sebesar Rp20.000.000 per KUBE (20 orang anggota) sebanyak 1000 KUBE. Tantangan dari pelaksanaan KUBE adalah keberlanjutan usaha dan replikasi ke kelompok lainnya yang perlu untuk terus ditingkatkan sehingga melalui KUBE diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memandirikan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

2.4.10. Tenaga kerja

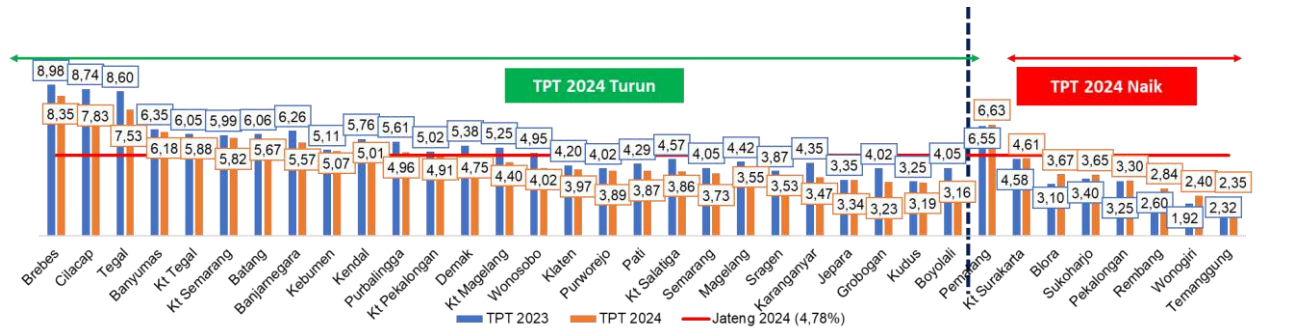
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Agustus 2024 sebesar 4,78 persen turun sebesar 0,35 persen poin dari kondisi TPT pada Agustus 2023 yang sebesar 5,13 persen. Di tingkat nasional TPT Agustus 2024 lebih besar dari Jawa Tengah yaitu sebesar 4,91 persen turun sebesar 0,41 persen poin dibandingkan dengan TPT Nasional bulan Agustus 2023.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.58.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016–2024 (Februari-Agustus) (%)

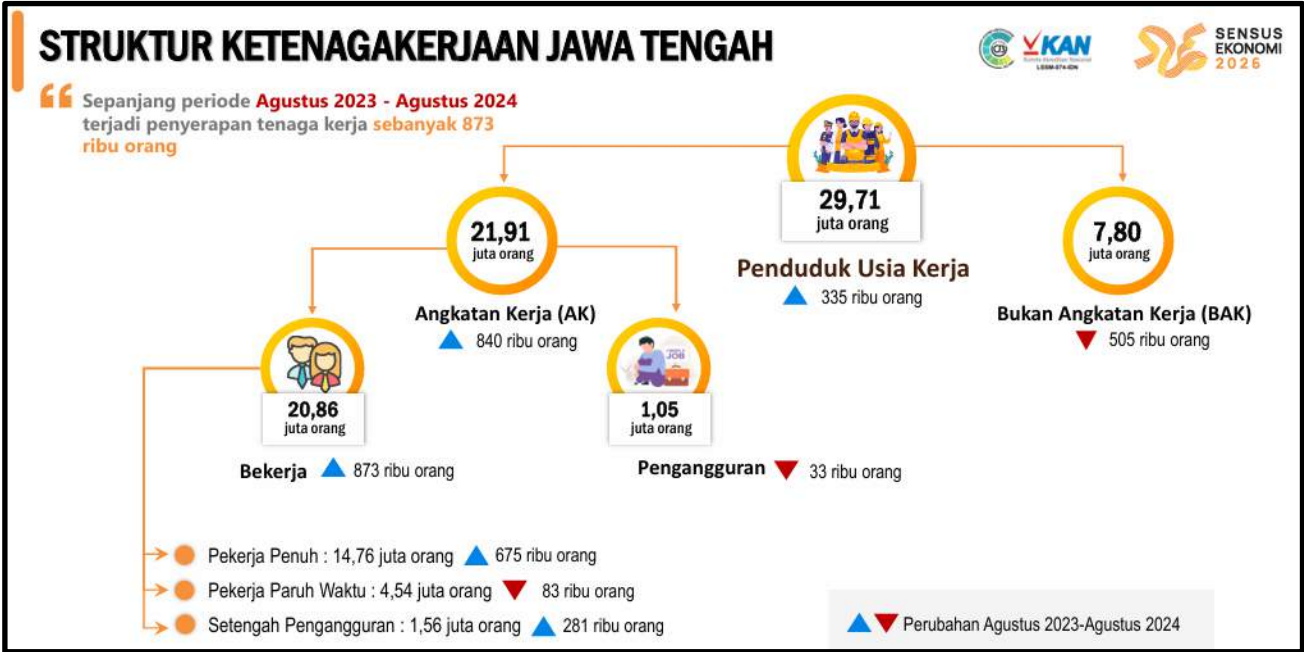
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 menunjukkan perbaikan. Terdapat 22 Kabupaten/Kota dengan capaian TPT di bawah capaian provinsi dan terdapat 12 Kabupaten/Kota dengan capaian TPT di atas Jawa Tengah atau lebih rendah. Dari 35 Kab/kota di Jawa Tengah terdapat 9 Kab/Kota yang mengalami kenaikan TPT di tahun 2024 yaitu Kab Pemalang, Kota Surakarta, Kab Blora, Kab Sukoharjo, Kab Pekalongan, Kab Rembang, Kab Wonogiri, dan Kab Temanggung.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.59.
Peta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024

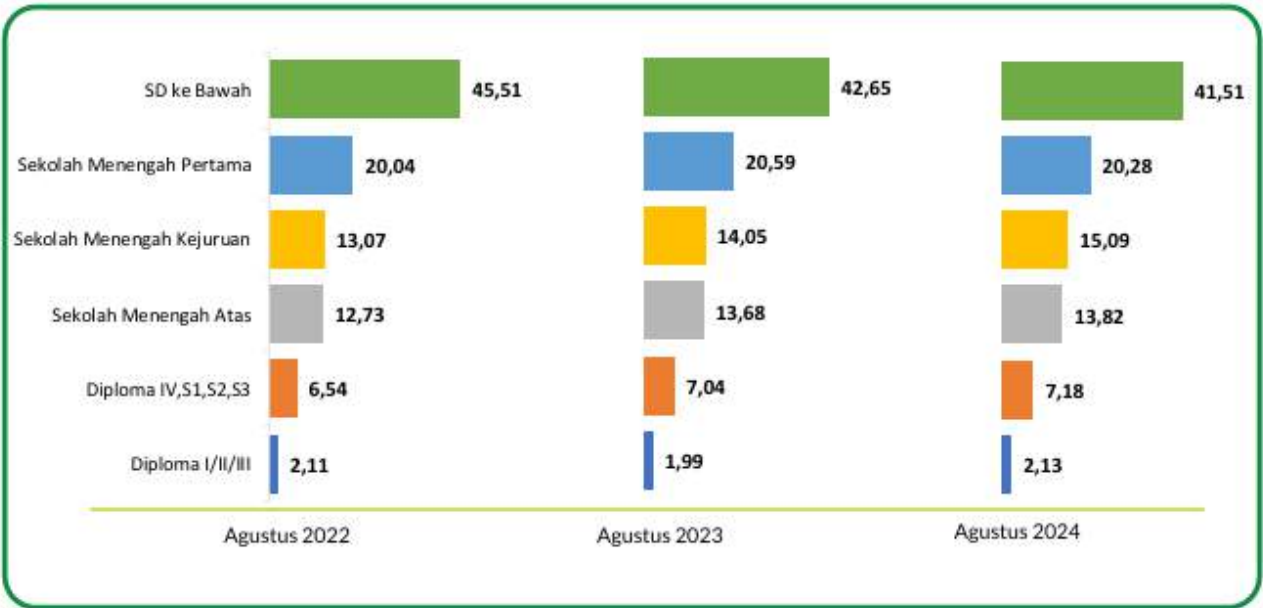
Salah satu imbas dari persoalan kependudukan dan dihadapi hampir di semua wilayah adalah pengangguran. Bahkan di negara maju pun pengangguran masih menjadi masalah serius. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut rendah. Tingkat tenaga kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai menambah beban persoalan yang ada. Struktur ketenagakerjaan di Jawa Tengah tahun 2024 menurut BPS, diperlihatkan pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.60.
Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2024

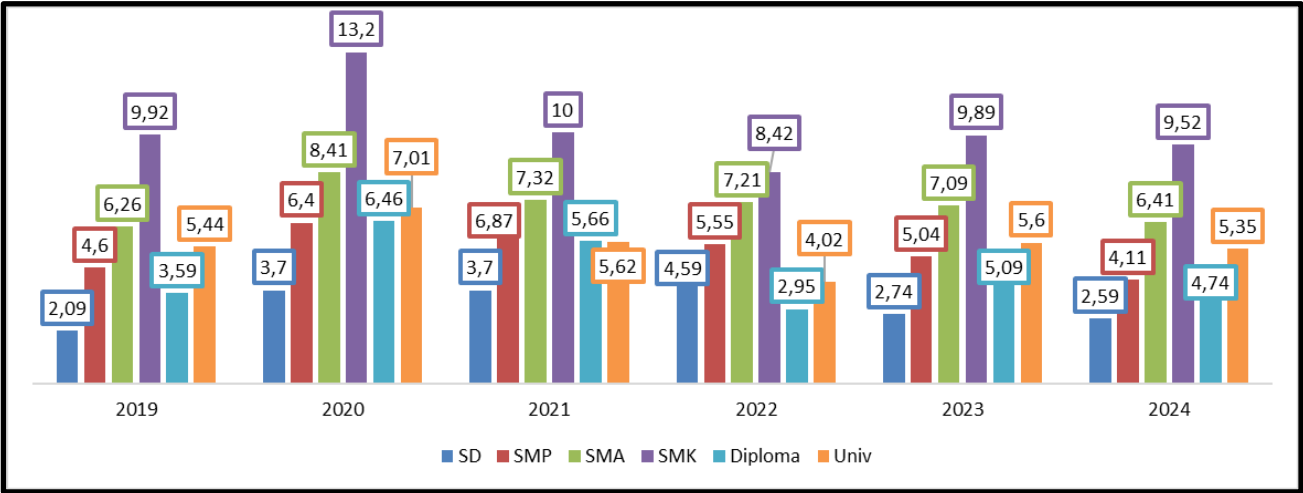
Dari 37,54 juta jiwa penduduk Jawa tengah, 29,71 juta jiwa merupakan penduduk usia kerja dengan jumlah Angkatan Kerja (AK) sebesar 21,91 juta orang. Dimana sebanyak 20,86 juta orang bekerja dan 1,05 juta orang pengangguran. Meskipun jumlah bekerja lebih banyak dibandingkan pengangguran, namun secara kualitas perlu mendapatkan perhatian khusus. Mengingat karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah sebesar 41,51 persen merupakan lulusan SD ke bawah, dan 20,28 persen merupakan lulusan SMP. Hal ini menandakan bahwa kualitas tenaga kerja Jawa Tengah masih rendah/*low skill*.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.61.
Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022-2024

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2024 TPT tertinggi berasal dari lulusan SMK sebesar 9,52 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 9,89. Meskipun mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya, kondisi ini tetap menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengingat filosofi adanya SMK agar para lulusan kejuruan sudah siap kerja atau bahkan sudah di rekrut oleh dunia usaha atau industri sebelum lulus. Namun dalam kondisi riil nya masih ada kesenjangan antara keterampilan lulusan SMK dengan kebutuhan industri. Jika dilihat secara keseluruhan, TPT untuk semua lulusan mengalami penurunan baik itu lulusan SD, SMP, SMA, SMK, Diploma maupun Universitas.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.62.
TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.63.
Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024 (%)

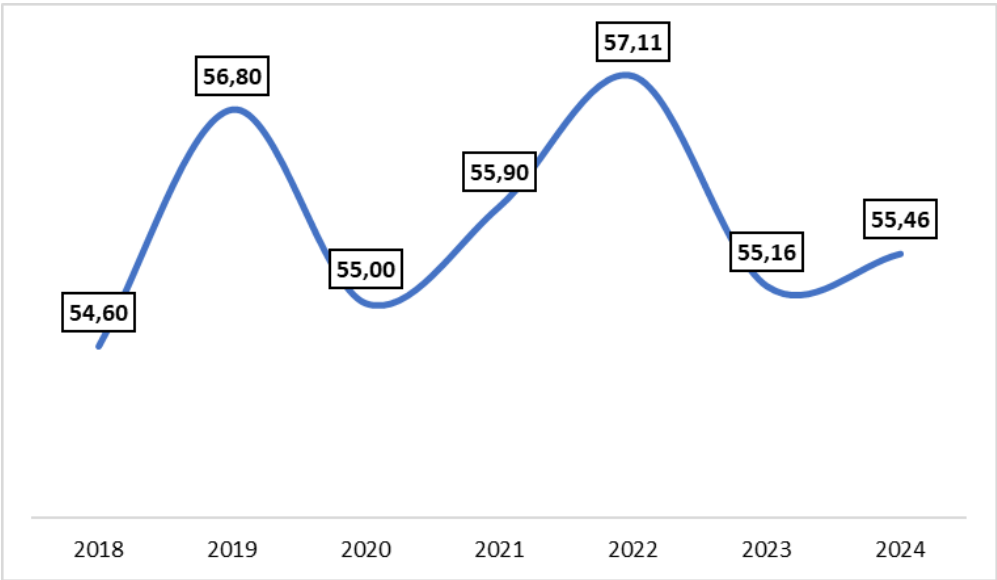
Pada tahun 2024 sebanyak 70,78 persen penduduk bekerja Jawa Tengah merupakan pekerja penuh waktu, sementara sebanyak 29,22 persen penduduk bekerja tidak penuh waktu (Jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) dimana

terbagi menjadi 21,74 persen merupakan pekerja paruh waktu (Bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak mencari pekerjaan lain) dan 7,48 persen merupakan setengah pengangguran (Bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan sedang mencari pekerjaan lain). Dibandingkan dengan tahun 2023, pekerja setengah pengangguran mengalami kenaikan dari 6,40 persen menjadi 7,48 persen atau naik sebesar 281 ribu orang. Sementara pekerja paruh waktu mengalami penurunan dari 23,11 persen menjadi 21,74 persen. Mengalami penurunan 1,37 persen poin atau turun 83 ribu orang.

Tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 55,46 juta rupiah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 55,16 juta rupiah. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kualitas sumber daya manusia, kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang sangat pesat, dukungan upah dan insentif pekerja, dan lain sebagainya.

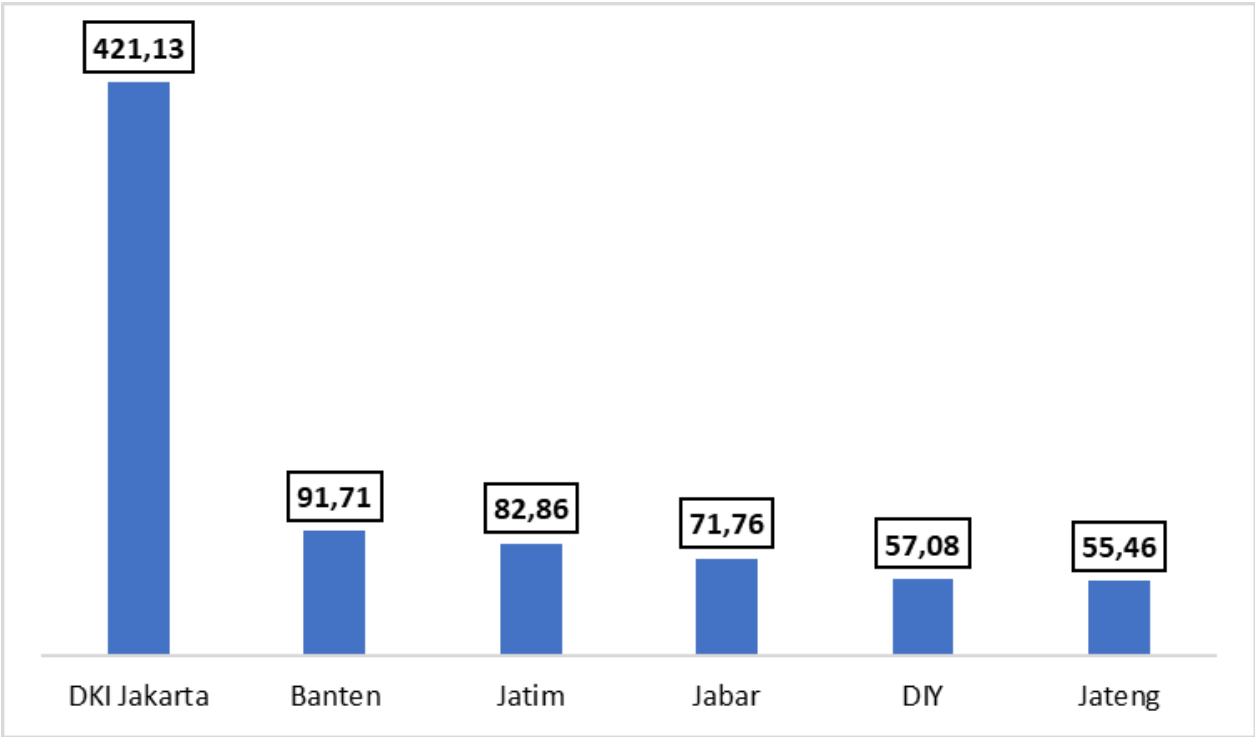
Peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat penting karena menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Jika produktivitas suatu sektor tinggi akan diikuti oleh pendapatan pekerja yang semakin tinggi sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi berdampak pada perekonomian suatu daerah karena nilai tambahnya semakin tinggi.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, tingkat produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 421,13 juta rupiah, kemudian disusul oleh Provinsi Banten yang sebesar 91,71 juta rupiah, dan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 82,86 juta rupiah. Sementara Provinsi Jawa Tengah menempati posisi terendah setelah Provinsi DIY yang sebesar 57,08 juta rupiah.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.64.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah
Tahun 2018-2024(Juta Rupiah)



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.65.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2024 (Juta Rupiah)

Rasio kesempatan kerja pada tahun 2024 sebesar 70,21 persen naik 2,17 persen poin dibanding dengan tahun 2023 yang sebesar 68,04 persen. Rasio kesempatan kerja yang naik ini menandakan bahwa peluang penduduk usia kerja untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti kondisi perekonomian yang semakin tumbuh hingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, investasi yang meningkat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Adanya peningkatan kesempatan kerja merupakan suatu indikator yang positif bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan karena menunjukkan semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pekerjaan dibanding dengan sebelumnya.

Tabel 2.92.
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

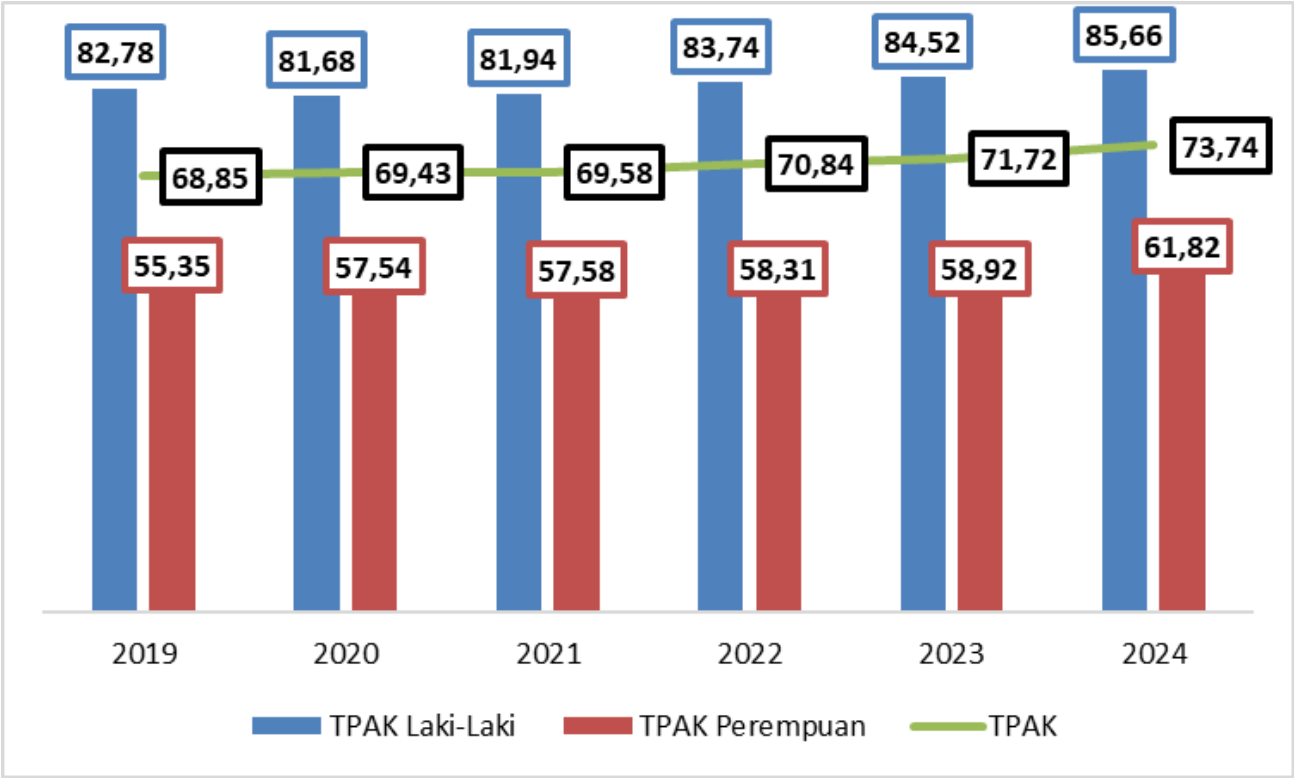
No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1.	2019	17.440.000	26.610.000	69,22
2.	2020	17.540.000	27.010.000	64,93
3.	2021	17.835.770	27.253.914	65,45
4.	2022	18.390.459	27.490.000	66,90
5.	2023	19.990.000	29.380.000	68,04
6.	2024	20.860.000	29.710.000	70,21

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024.

Tabel 2.93.
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Penduduk Usia Kerja (orang)	Angkatan Kerja*)	TPAK (%)
1.	2019	26.610.000	18.421.193	68,85
2.	2020	27.010.000	18.751.277	69,43
3.	2021	27.250.000	18.963.993	69,58
4.	2022	27.490.000	19.474.934	70,84
5.	2023	29.380.000	21.070.000	71,72
6.	2024	29.710.000	21.910.000	73,74

Sumber: BPS 2024 diolah dari Sakernas.
Keterangan : *) data per Agustus tahun bersangkutan.



Sumber: BPS 2024 diolah dari Sakernas.
Keterangan : *) data per Agustus tahun bersangkutan

Gambar 2.66.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2024 (%)

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki lebih tinggi dibanding dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Pada tahun 2024 TPAK Laki-laki sebesar 85,66 persen mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 yang sebesar 84,52 persen. TPAK Perempuan juga mengalami kenaikan dari 58,92 persen di tahun 2023 menjadi 61,82 persen di tahun 2024. Jika dilihat dari tahun 2019-2024, TPAK Laki-Laki selalu lebih tinggi dibanding dengan TPAK Perempuan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang dianggap sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya, sementara budaya yang berkembang di masyarakat, perempuan dianggap memiliki kewajiban mengurus rumah tangga

dan anak. Namun persepsi ini semakin lama terlihat semakin menunjukkan perubahan, hal ini dilihat dari tren dari TPAK Perempuan dari tahun 2019-2024 yang selalu mengalami kenaikan, ini menandakan bahwa semakin banyak perempuan yang masuk dalam dunia kerja, dan ini bisa menjadi indikator yang positif karena semakin terlihat adanya kesetaraan gender. TPAK Perempuan yang meningkat disebabkan berbagai faktor seperti peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, perubahan normal sosial atau budaya yang berkembang di masyarakat, peningkatan kesempatan kerja terutama bagi perempuan, dan lain sebagainya.

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2019-2024 cenderung meningkat. Namun di tahun 2020 kondisinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana di tahun 2019 sebesar 70,27 persen menjadi 37,07 persen di tahun 2020. Kondisi ini merupakan salah satu dampak terjadinya pandemi Covid-19 dimana perekonomian terpuruk akibat pandemi. Namun di tahun 2021 mulai kembali meningkat sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah, hingga pada tahun 2024 persentase pencari kerja yang ditempatkan naik menjadi 71,30 persen. Untuk itu ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja.

Tabel 2.94.
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024 (%)

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2019	300.098	210.889	70,27
2020	220.763	81.835	37,07
2021	269.810	136.611	50,63
2022	322.041	227.088	70,52
2023	332.644	236.491	71,09
2024	315.458	224.930	71,30

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2019-2024 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

Tabel 2.95.
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti
Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Jumlah Perusahaan (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Peserta Program Jamsostek
1	2019	69.866	1.781.754
2	2020	76.196	1.908.465
3	2021	83.511	2.003.518
4	2022	89.016	3.196.431
5	2023	103.666	2.318.493
6	2024	104.911	3.315.253

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) berfluktuasi selama tahun 2018-2024. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang disebabkan karena dampak pandemi Covid-19. Kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2022, hal ini dikarenakan pertambahan dari sektor informal seperti pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani (LMDH Kehutanan), Perangkat Desa (ASN/Non ASN), dan sebagainya. Sementara itu pada tahun 2024 jumlah tenaga kerja non formal yang terdaftar program Jamsostek mengalami penurunan dari sebelumnya 1.441.492 orang di tahun 2023 menjadi 845.619 orang.

Tabel 2.96.
Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal
yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang) Peserta Program Jamsostek
1	2019	1.378.435
2	2020	892.866
3	2021	310.785
4	2022	1.192.763
5	2023	1.441.492
6	2024	845.619

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2019-2024 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah kasus hubungan industrial sebanyak 124 kasus yang 100 persen terselesaikan. Tahun-tahun berikutnya jumlah kasus menurun dan kasus tersebut meningkat pada tahun 2022 dan 2023 namun juga kasus tersebut dapat diselesaikan 100 persen sejalan dengan meningkatnya pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Di tahun 2024, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 82 kasus yang 100 persen dapat terselesaikan.

Tabel 2.97.
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2019	124	100% terselesaikan
2	2020	96	100% terselesaikan
3	2021	35	100% terselesaikan
4	2022	66	100% terselesaikan
5	2023	124	100% terselesaikan
6	2024	82	100% terselesaikan

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Not in Employment, Education or Training (NEET) adalah penduduk usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan (sekolah), dan tidak dalam pelatihan. Jumlah NEET di Jawa Tengah relatif meningkat sejak tahun 2017 dari 1.044.465 orang menjadi 1.205.564 orang pada tahun 2019, demikian pula pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.298.297 orang. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.097.209 orang. Namun pada tahun 2022 jumlah NEET mengalami peningkatan menjadi 1.101.412 orang. Namun NEET menurun kembali di tahun 2024 menjadi 1.009.075 orang atau 17,94 persen. Meskipun demikian, hal ini menandakan bahwa dalam masyarakat masih terdapat banyak orang yang mempunyai ketergantungan secara permanen pada orang tua dan dapat menjadi beban ekonomi keluarga.

Tabel 2.98.
Jumlah *Not in Employment, Education or Training* (NEET) di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Jumlah <i>NEET</i> (orang)	Penduduk Usia Kerja Muda	Persentase
1	2019	1.205.564	5.524.810 orang	21,82
2	2020	1.298.297	5.407.899 orang	24,00
3	2021	1.097.209	5.388.228 orang	20,36
4	2022	1.101.412	5.388.513 orang	20,44
5	2023	1.185.589	5.648.751 orang	20,98
6	2024	1.009.075	5.627.036 orang	17,94

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun oleh perusahaan selama periode tahun 2019-2024 mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Tabel 2.99.
Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2019 - 2024

No	Tahun	Jumlah <i>Peraturan Perusahaan</i> (PP)	Jumlah <i>Perjanjian Kerja Bersama</i> (PKB)
1	2019	3.967	579
2	2020	4.230	614
3	2021	4.540	661
4	2022	4.641	661
5	2023	4.6481	662
6	2024	NA	NA

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024.

2.4.11. Perlindungan Perempuan dan Anak

Perempuan dan anak merupakan satu dari kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian serius khususnya perlindungan dari kekerasan maupun perlakuan tidak adil lainnya. Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi senyap alias tidak dilaporkan sedangkan yang dilaporkan masih relatif rendah. Adanya budaya malu dan takut melaporkan masih menjadi kendala dalam mengungkapkan keseluruhan kasus kekerasan di masyarakat, sehingga perlu upaya masif untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar meningkatkan keberanian masyarakat melaporkan baik saat mengalami kekerasan atau mengetahui adanya kasus kekerasan. Namun disisi lain juga perlu dilakukan langkah preventif (pencegahan) maupun kuratif (penanganan) dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait dengan pencegahan kekerasan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berupaya dengan membuat program-program yang sekiranya mampu berdampak pada penurunan kasus kekerasan antara lain program “Ayo Rukun” di sekolah, “Ngopi Penak” (Ngobrol Topik Perempuan dan Anak), “Jogo Konco”, “Serat Kartini” (Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini), sedangkan untuk penanganan telah terbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Ke depan tentu program maupun layanan yang ada tersebut perlu untuk terus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik lagi bagi tercapainya kondisi perempuan dan anak yang terlindungi.

Sementara itu, berdasarkan data perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2020-2024 menunjukkan kondisi yang membaik, tercatat rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari sebesar 8,49 di tahun 2020 menjadi 7,99 di tahun 2024, namun angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yang sebesar 7,44. Kenaikan rasio kasus kekerasan di tahun 2024 nampaknya membawa dampak yang signifikan pada angka rasio korban kekerasan perempuan dan anak, dimana tahun 2024 tercatat 8,42, naik dibanding tahun 2023 yang sebesar 8,02, meskipun angka tahun 2024 tersebut masih lebih baik dibanding tahun 2020 yang sebesar 8,99. Namun setidaknya ini menjadi *signal warning* bagi upaya pencegahan tindak kekerasan yang ternyata masih belum ada tanda-tanda keberhasilannya dalam penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meskipun disisi lain meningkatnya data kekerasan juga dapat dimaknai atau menandakan bahwa masyarakat mulai mengalami peningkatan dalam memberanikan diri untuk melaporkan. Sementara itu, khusus rasio korban kekerasan terhadap perempuan mengalami perbaikan di tahun 2024 yaitu di angka 4,38 menurun dibanding tahun 2023 yang sebesar 4,64 maupun tahun 2020 yang sebesar 5,75. Sedangkan rasio korban kekerasan terhadap anak perlu perhatian di tahun 2024 yaitu sebesar 11,15 yang naik dari tahun 2023 (9,86), meskipun masih dibawah angka tahun 2020 yang sebesar 12,15.

Tabel 2.100.
Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Rasio Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban kekerasan terhadap anak (per 100.000 penduduk)
2020	8,49	8,99	5,75	12,15
2021	8,35	8,97	5,11	11,02
2022	7,47	8,10	4,38	10,33
2023	7,44	8,02	4,64	9,86
2024	7,99	8,42	4,38	11,15

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id/AplikasiSimfoni-PPA 2024.

Sementara itu, upaya pemenuhan hak anak secara umum telah mencapai tahap yang cukup menggembirakan jika dilihat dari capaian program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), meskipun berbagai persoalan pemenuhan hak dan perlindungan anak masih menjadi tantangan untuk dipecahkan. Jawa Tengah secara berturut turut sejak tahun 2021 memperoleh penghargaan kategori tertinggi KLA sebagai pelopor Provinsi Layak Anak. Tentu dengan raihan ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan sebanding dengan makin meningkatnya upaya pemenuhan hak anak dan semakin membaiknya berbagai persoalan yang melingkupi anak seperti kekerasan terhadap anak, putus sekolah, stunting dan lain sebagainya. Pada tataran kabupaten/kota sampai dengan tahun 2023 secara bervariasi sesuai tingkatan penghargaan tercatat sudah 100 persen kabupaten/kota memperoleh penghargaan KLA (kategori pratama, madya, nindya dan utama). Tercatat di tahun 2023 ada peningkatan jumlah Kab/Kota yang memperoleh penghargaan kategori Utama yaitu yang sebelumnya hanya Kota Surakarta menjadi bertambah Kota Semarang dan Kabupaten Sragen. Demikian juga dengan jumlah kab/kota yang memperoleh penghargaan madya dan nindya yang mengalami peningkatan. Rincian capaian KLA Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.101.
Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Di Jawa Tengah Tahun 2023

Pratama	Madya	Nindya	Utama
Kab. Purworejo, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Kendal, Kab. Semarang, Kabupaten Banyumas	Kab. Grobogan, Kab. Wonosobo, Kab. Temanggung, Kab. Pekalongan, Kab. Kebumen, Kota Salatiga, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Batang, Kab. Demak, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Pati, Kab. Blora	Kabupaten Magelang, Kab. Rembang, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kab. Tegal, Kota Magelang, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Pemalang	Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten Sragen

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Dari sisi jenis kekerasan yang dialami, kekerasan fisik masih dominan yang dialami oleh perempuan yaitu 443 kasus di tahun 2024, menurun dibanding tahun 2023, kemudian disusul kekerasan psikis yang sebesar 334 kasus dan kekerasan seksual 171 kasus. Sementara itu pada anak dan ini sangat memprihatinkan, jenis kekerasan paling banyak yang dialami oleh anak adalah kekerasan seksual sebesar 793 kasus bahkan angkanya naik dibanding tahun 2023 yang sebesar 755 kasus. Kemudian disusul psikis sebesar 378 di tahun 2024 yang juga naik dibanding tahun 2023 (303 kasus) dan fisik sebesar 266 kasus di tahun 2024, naik dibanding tahun 2023 (217 kasus).

Tabel 2.102.

Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jenis kekerasan yang dialami korban perempuan dewasa:					
Fisik	484	539	495	481	508
psikis	297	372	405	373	383
seksual	126	145	186	212	195
penelantaran	119	135	117	117	84
<i>trafficking</i>	5	10	2	8	7
eksploitasi	0	7	9	8	1
lainnya	26	47	60	49	39
Total	1.057	1.255	1.274	1.248	1.178
Jenis kekerasan yang dialami korban anak:					
Fisik	205	204	193	217	263
psikis	296	327	361	303	363
seksual	789	807	748	755	723
penelantaran	58	66	84	107	95
<i>trafficking</i>	8	16	7	4	1
eksploitasi	15	9	30	18	14
lainnya	56	72	72	133	80
Total	1.427	1.501	1.495	1.537	1.539

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id/ AplikasiSimfoni-PPA 2023.

Isu lain terkait anak adalah mengenai perkawinan anak, data tahun 2024 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Jawa Tengah sebanyak 7.903 kasus, tertinggi berada di Kabupaten Grobogan (574 kasus) dan terendah di Kota Salatiga (15 kasus). Data tersebut menurun dibanding tahun 2023 yang sebesar 10.531 kasus.

Tabel 2.103.
Data Perkawinan Usia Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kabupaten Cilacap	94	438	532
2	Kabupaten Banyumas	100	299	399
3	Kabupaten Purbalingga	62	264	326
4	Kabupaten Banjarnegara	42	370	412
5	Kabupaten Kebumen	31	149	180
6	Kabupaten Purworejo	27	131	158
7	Kabupaten Wonosobo	35	297	332
8	Kabupaten Magelang	40	228	268
9	Kabupaten Boyolali	22	93	115
10	Kabupaten Klaten	33	91	124
11	Kabupaten Sukoharjo	32	43	75
12	Kabupaten Wonogiri	15	76	91
13	Kabupaten Karanganyar	40	102	142
14	Kabupaten Sragen	41	157	198
15	Kabupaten Grobogan	66	508	574
16	Kabupaten Blora	32	274	306
17	Kabupaten Rembang	21	177	198
18	Kabupaten Pati	72	323	395
19	Kabupaten Kudus	43	148	191
20	Kabupaten Jepara	61	335	396
21	Kabupaten Demak	42	230	272
22	Kabupaten Semarang	56	156	212
23	Kabupaten Temanggung	31	252	283
24	Kabupaten Kendal	17	81	98
25	Kabupaten Batang	22	173	195
26	Kabupaten Pekalongan	14	135	149
27	Kabupaten Pemalang	74	469	543
28	Kabupaten Tegal	16	117	133
29	Kabupaten Brebes	29	269	298
30	Kota Magelang	6	15	21
31	Kota Surakarta	20	59	79
32	Kota Salatiga	2	13	15
33	Kota Semarang	35	107	142
34	Kota Pekalongan	2	22	24
35	Kota Tegal	6	21	27
Total		1.281	6.622	7.903

Sumber: DP3AP2KB dan Kemenag, 2024.

Perkawinan anak dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, khususnya pada anak perempuan. Selain melahirkan, norma yang masih banyak berlaku di masyarakat memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada istri untuk mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Di sisi lain, norma sosial mengenai peran laki-laki dalam keluarga dapat menyebabkan suami yang masih berusia muda rentan mengalami tekanan mental jika tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya. Tekanan ini dapat memicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga dan perceraian. Data perkawinan anak menunjukkan bahwa tahun 2024 sebesar 7.903 kasus telah mengalami penurunan dibanding tahun 2023 (10.531 kasus), namun angka ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan data tahun 2019 yang hanya 5.239 kasus. Perlu upaya lebih keras dimasa depan untuk bagaimana melakukan pencegahan kekerasan perkawinan usia dini khususnya memberikan pemahaman dan penyadaran bagi orang tua maupun anak muda mengenai arti penting kehidupan masa depan, kesiapan secara matang untuk menikah, pergaulan positif dan nilai-nilai tradisional yang masih melekat yang memicu/mendorong meningkatnya perkawinan usia dini.

Tabel 2.104.

**Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024**

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2020	1.671	11.301	12.972
2021	1.909	11.686	13.595
2022	1.850	9.516	11.366
2023	1.659	8.872	10.531
2024	1.281	6.622	7.903

Sumber: DP3AP2KB dan Kemenag, 2024.

2.4.12. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pembangunan kependudukan ke depan dihadapkan pada tantangan mengimplementasikan sinergitas pembangunan kependudukan lima pilar yaitu pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, serta penataan data dan informasi kependudukan termasuk administrasi kependudukan. Implementasi ini kian sulit terwujud manakala capaian kab/kota yang seharusnya telah menyusun *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan (GDPK) masih belum 100 persen di Jawa Tengah dan pengintegrasian dengan dokumen perencanaan masih belum optimal. Rekapitulasi data Kab/Kota di Jawa Tengah yang telah menyusun GDPK sampai dengan tahun 2024 baru tercatat 26 Kab/kota yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pati, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sragen.

Sementara itu, upaya menggalakkan kembali program keluarga berencana perlu untuk terus dilakukan mengingat angka CPR sejak tahun 2019 mengalami tren menurun dari 73,48 menjadi 65,70 di tahun 2023. Namun disisi lain angka TFR justru mengalami penurunan menjadi 2,04 di tahun 2023 dari 2,23 di tahun 2019. Demikian halnya dengan *unmetneed* juga mengalami tren penurunan dari 13,03 pada tahun 2019 menjadi 8,6 di tahun 2023. Untuk TFR yang makin menurun perlu untuk diwaspadai jangan sampai hal itu terus berlanjut mengingat TFR yang ideal sangat diperlukan untuk menghasilkan kondisi pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Tribina memiliki peranan penting dalam pembangunan keluarga. Melalui tribina (Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR dan Bina Keluarga Lansia/BKL) diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang tua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita, remaja dan mempersiapkan kelak di masa lansia agar tetap memiliki produktivitas. Data perkembangan BKB, BKR dan BKL menunjukkan bahwa BKB dari sisi jumlah kelembagaan mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 9.837 dari 8.984 di tahun 2023, demikian juga dengan keaktifannya yang secara jumlah juga mengalami peningkatan yaitu dari 8.816 menjadi 9.218 atau 93,70 persen, persentase keaktifan BKB tersebut masih lebih rendah dibanding tahun 2020 yang sebesar 95,14 persen. BKR secara kelembagaan menurun dari 5.909 di tahun 2023 menjadi 5.429 di tahun 2024, namun dari sisi keaktifan mengalami peningkatan yaitu dari 94,77 persen di tahun 2023 menjadi sebesar 96,26 persen ditahun 2024, namun keaktifan ini masih lebih rendah dibanding tahun 2020 yang sebesar 99,56 persen. Sementara itu BKL tahun 2024 baik jumlah dan keaktifan mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, namun persentase keaktifan mengalami tren yang terus menurun sejak tahun 2020 yaitu dari 99,14 persen menjadi 95,51 persen. Gambaran perkembangan Tribina ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah kelembagaan dan keaktifan secara terus menerus akan semakin mengancam pada cakupan layanan pemberian wawasan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pembinaan keluarga yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga. Tentu dampak rantainya adalah terhambatnya terwujudnya keluarga berkualitas dan berkarakter .

Tabel 2.105.
Perkembangan Tribina 2020-2024

Tahun	BKB			BKR			BKL Jateng		
	Jumlah	Aktif	%	Jumlah	Aktif	%	Jumlah	Aktif	%
2020	11.071	10.533	95,14	5.947	5.921	99,56	7.763	7.696	99,14
2021	10.473	10.338	98,71	5.860	5.794	98,87	7.804	7.724	98,97
2022	9.184	9.049	98,53	5.490	5.311	96,74	7.180	7.010	97,63
2023	8.984	8.816	98,13	5.909	5.600	94,77	6.647	6.382	96,01
2024	9.837	9.218	93,70	5.429	5.226	96,26	6.969	6.656	95,51

Sumber: BKKBN dan DP3AP2KB Prov.Jateng, 2023.

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena data penduduk wajib KTP yang sangat dinamis, setiap harinya terdapat penambahan

penduduk wajib KTP. Peningkatan layanan kependudukan melalui perekaman, penerbitan KTP dan mendekatkan layanan terus didorong dalam rangka mewujudkan target semua penduduk wajib KTP memiliki identitas resmi penduduk.

Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akta kelahiran Kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2019 meningkat dari 87,42 persen menjadi 96,09 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83,16 persen. Tingkat kepemilikan akta kelahiran kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 99,01 persen. Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan karena pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (*three in one*), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, sms *gateway*, dan layanan *online*.

Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tahun 2021, sebanyak 24 antara lain: Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.4.13. Kepemudaan dan olahraga

Pembangunan kepemudaan bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Pemuda dan segala pergulatannya akan selalu berhadapan dengan tantangan yang terjadi di masa mereka bertumbuh. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai kekuatan utama berupa daya pikir revolusioner, kreatif, agresif, inovatif, dan produktif sehingga mampu memunculkan ide-ide konstruktif dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa, merupakan kekuatan moral, *control social*, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil Susenas 2023, jumlah pemuda di Jawa Tengah sebanyak 7,73 juta jiwa atau sebanyak 21,95 persen dari total penduduk di Jawa Tengah. Tingginya persentase pemuda dapat memberikan gambaran tingginya potensi sumber daya manusia penggerak pembangunan.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu alat ukur penting untuk menilai perkembangan dan kualitas hidup pemuda dalam berbagai aspek pembangunan. IPP memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sejumlah aspek, seperti pendidikan formal dan informal, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi sosial dan inklusivitas beserta

kesetaraan mempengaruhi kondisi pemuda. Dalam upaya mendukung perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, IPP telah melalui proses peninjauan ulang. Proses peninjauan ulang yang dilakukan berimplikasi pada perubahan nilai IPP yang diperoleh, baik di tingkat nasional maupun provinsi.

Terdapat 5 (lima) domain IPP yaitu Pendidikan; Kesehatan dan Kesejahteraan; Lapangan dan Kesempatan Kerja; Partisipasi dan Kepemimpinan; Gender dan Diskriminasi sebagaimana telah dilakukan peninjauan ulang sehingga terdapat perubahan domain menjadi Pendidikan dan Pelatihan; Kesehatan; Ketenagakerjaan Layak; Partisipasi dan Kepemimpinan; Inklusifitas dan Kesenjangan Gender sehingga realisasi IPP pun juga mengalami penyesuaian paska peninjauan ulang.

Tabel 2.106.
Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 –2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemuda di Jawa Tengah (Juta Jiwa)	7,75	7,77	7,97	7,73	n/a
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda	14,83	13,23	11,87	11,87	n/a
Persentase pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/ pegawai	54,18	58,21	60,78	60,12	n/a
Persentase pemuda yang berusaha sendiri	11,83	12,05	12,44	13,30	n/a
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	49,52	50,70	53,80	55,50	58,33*
- Domain Pendidikan	60,36	58,29	62,59	65,43	70*
- Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	51,61	55,37	59,26	61,02	60*
- Ketenagakerjaan Layak	59,67	63,73	69,35	64,97	55*
- Partisipasi dan Kepemimpinan	7,58	47,26	49,73	26,07	50*
- Inklusivitas dan Gender	68,83	68,81	61,51	64,63	56,67*

Sumber: 1. BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun, 2025.
2. KEMENPORA Tahun 2025.
3. Naskah Indeks Pembangunan Pemuda Jawa Tengah Tahun 2024 oleh DISPORAPAR.

Olahraga merupakan jati diri bangsa dan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Peran olahraga diantaranya bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Perkembangan prestasi olahraga di Jawa Tengah salah satunya dapat diukur dari peringkat pada kejuaraan tingkat nasional melalui Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) bagi atlet penyandang disabilitas. Gelaran kejuaraan tingkat nasional tersebut terakhir dilaksanakan pada Tahun 2024 di Provinsi ACEH-SUMUT dan di Jawa Tengah

untuk penyelenggaraan PEPARNAS. Perkembangan prestasi atlet Jawa Tengah pada perhelatan PON mengalami fluktuatif dari Tahun 2012-2024 yaitu menduduki peringkat 4 pada Tahun 2012, meningkat ke peringkat 2 pada Tahun 2016, tetapi mengalami penurunan cukup signifikan pada Tahun 2021 pada peringkat 6 dan pada Tahun 2024 masih berada pada peringkat 5 dalam PON XXI Tahun 2024 di Aceh-Sumut dengan meraih 71 medali emas 74 perak dan 115 perunggu. Sedangkan prestasi olahraga Jawa Tengah pada kejuaraan PEPARNAS XVII menduduki peringkat 1 pada PEPARNAS Tahun 2024 dengan perolehan 161 emas, 212 perak, dan 124 perunggu. Perkembangan prestasi olahraga Provinsi Jawa Tengah pada kejuaraan tingkat Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.107.
Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah
pada Kejuaraan Tingkat Nasional

Kejuaraan	Peringkat dan jumlah medali		
	Tahun 2016	Tahun 2021	Tahun 2024
Pekan Olahraga Nasional (PON)	4	6	5
- emas	32	27	71
- perak	56	47	74
- perunggu	85	64	115
Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS)	2	3	1
- emas	17	89	161
- perak	5	60	212
- perunggu	8	76	124

Sumber: DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pada UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, disebutkan bahwa tujuan olahraga bersifat majemuk yang mencakup kesehatan fisik dan psikis, karakter etos dan moral, ekonomi, sosial, budaya, dan martabat bangsa. Tujuan tersebut perlu diukur untuk memastikan sudah sampai di mana upaya kita mewujudkan tujuan tersebut. Sport Development Index (SDI) merupakan instrumen untuk mengukur sekaligus instrumen kebijakan untuk mendinamisasi dan mengoptimalisasi pembangunan olahraga. SDI terdiri dari dimensi SDM, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa.

Capaian SDI Jawa Tengah pada Tahun 2024 dari 9 dimensi IPO, terdapat 6 dimensi yang indeksnya berada di atas indeks rata-rata nasional (SDM OR, ruang terbuka OR, PARTISIPASI, perkembangan personal, ekonomi, performa), 1 dimensi yang indeksnya sama dengan indeks nasional, yakni kesehatan dan dimensi IPO yang mendapatkan “rapor merah”, yakni literasi fisik dan kebugaran sebagai berikut:

Tabel 2.108.
Capaian Indeks Pembangunan Olahraga Jawa Tengah Tahun 2024

Dimensi IPO	Indeks 2024	Keterangan/Posisional
SDM Olahraga	0,122	Di atas rata-rata nasional
Ruang Terbuka Olahraga	0,402	Di atas rata-rata nasional
Literasi Fisik	0,513	Di bawah rata-rata nasional
Partisipasi	0,330	Di atas rata-rata nasional
Kebugaran	0,148	Di bawah rata-rata nasional
Perkembangan Personal	0,670	Jauh di atas rata-rata nasional
Kesehatan	0,424	Sama dengan rata-rata nasional
Ekonomi	0,574	Di atas rata-rata nasional
Performa ^{*)}	0,420	Jauh di atas rata-rata nasional

^{*)}Diperoleh dari data IPO Nasional 2024

Sumber: DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

2.4.14. Perpustakaan

Pada awalnya konsep literasi dimaknai hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun konsep ini semakin berkembang dengan cakupan yang lebih luas. Konsep literasi yang lebih luas dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini salah satunya adalah literasi informasi yaitu sebuah keterampilan untuk mengenali kebutuhan informasi dalam setiap permasalahan atau persoalan yang dihadapi, mampu menemukan informasi yang dibutuhkan, mampu mengevaluasi sumber informasi dan mampu memanfaatkan informasi secara etis dan mampu mengkomunikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam sebuah informasi (Anjali & Istiqomah, 2021).

Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang peradaban manusia tidak dapat lepas dari perpustakaan. Oleh karenanya, perpustakaan memegang peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perpustakaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan di daerah terdapat 36 Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan data pengunjung dan jumlah koleksi Perpustakaan Umum Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.109.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024 (Orang)

NO	Tahun	Pengunjung
1	2019	5.871.814
2	2020	3.160.335
3	2021	3.131.755

NO	Tahun	Pengunjung
4	2022	4.891.435
5	2023	6.588.139
6	2024	9.109.185

Sumber: Data 35 kabupaten/kota dan Provinsi.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pengunjung perpustakaan daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah tiap tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan jumlah pengunjung yang tertinggi terjadi di tahun 2023. Hal ini salah satunya didorong oleh kebijakan penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pasca pandemi Covid-19 yang membuat layanan kunjungan perpustakaan umum daerah kembali dibuka untuk masyarakat umum. Pengunjung yang datang ke perpustakaan umum kembali memanfaatkan koleksi bahan Pustaka yang ada disana. Jumlah koleksi bahan Pustaka berdasarkan jenisnya mengalami peningkatan di tahun 2023.

Tabel 2.110.
Koleksi Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Koleksi	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks	Judul	Eks
1	Koleksi Perpustakaan Provinsi dan Keliling	1.053.825	1.906.840	1.061.697	1.920.846	1.111.585	1.914.474	1.190.688	2.092.799	1.342.661	2.293.506	1.427.265	2.376.196
2	Koleksi e-book	50.085	235.236	75.998	452.112	68.802	516.436	79.949	527.485	96.322	633.197	135.516	571.667
3	Koleksi Khusus untuk pemustaka berkebutuhan khusus	8.462	16.096	9.165	17.618	10.756	19.665	4.480	6.525	6.337	8.926	8.461	19.290
	TOTAL	1.112.372	2.158.172	1.146.860	2.390.576	1.184.867	2.437.435	1.275.117	2.626.809	1.445.320	2.935.629	1.571.242	2.967.153

Sumber: Data 35 kabupaten/kota dan Provinsi.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan jumlah koleksi perpustakaan daerah diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan literasi Masyarakat di Jawa Tengah. Pengunjung perpustakaan tumbuh 27,67 persen dari tahun 2023 ke 2024. Sedangkan koleksi bahan pustaka tumbuh bervariasi berdasarkan jenis koleksinya. Judul koleksi berkebutuhan khusus mengalami pertumbuhan terbesar diantara jenis koleksi lainnya yaitu 13,66%. meskipun demikian pertumbuhan jenis koleksi secara keseluruhan masih rendah karena pertumbuhannya masih dibawah 100 persen. Hal ini menunjukkan beberapa variabel pembangunan literasi masyarakat yang ada belum optimal dalam meningkatkan literasi masyarakat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Peningkatan literasi masyarakat merupakan hasil kerja bersama, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder yang

terlibat dalam ekosistem literasi. Aktifitas seperti pengembangan konten literasi berbasis kearifan lokal seperti pelatihan kepenulisan berbasis budaya lokal, bedah buku, lomba konten video literasi dan penulisan resensi buku, serta lokakarya literasi digital dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan literasi masyarakat, hingga triwulan ketiga 2025 sebanyak 1.135 orang telah mengikuti kegiatan tersebut diatas. Selain itu peningkatan kapasitas SDM literasi seperti bimtek pustakawan, pegiat literasi dan guru juga tak kalah penting untuk membentuk budaya gemar membaca, hingga triwulan ketiga 2025 sebanyak 300 peserta terlibat dalam kegiatan tersebut.



Sumber: Perpunas, 2024 (diolah).

Gambar 2.67.
Nilai IPLM Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2024

2.4.15. Transmigrasi

Upaya sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui kerjasama dengan daerah transmigrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi lahan transmigrasi yang ideal yaitu 2C (*clean and clear*) dan 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak usaha, dan Layak lingkungan) bagi calon transmigran. Upaya kerjasama yang telah dilakukan adalah kerjasama dengan 22 provinsi lokasi transmigrasi di luar Jawa yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Utara, Aceh, dan Bangka Belitung. Kerjasama tersebut direalisasikan dengan penyusunan *MoU* antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 22 Provinsi tersebut.

Selama tahun 2019-2024, persentase penempatan transmigran Jawa Tengah cenderung berfluktuatif. Capaian tahun 2019 cukup tinggi yaitu sebesar 10,23 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2020 karena pandemi Covid-19 sehingga tidak terdapat penempatan. Kemudian di tahun 2021 hingga

2024 capaian penempatan berfluktuatif karena sangat tergantung dengan kuota pemerintah pusat, yang mana kuota dari pusat selalu menurun di setiap tahunnya.

Tabel 2.111.
Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Animo (KK)	Kuota Pusat (KK)	Jumlah Penempatan (KK)	Persentase
1	2019	2.160	257	221	10,23
2	2020	1.263	0	0	0
3	2021	1.263	10	10	0,79
4	2022	1007	10	10	0,79
5	2023	403	20	20	4,96
6	2024	360	16	16	4,44

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan transmigran sebagai bekal di daerah tujuan telah dilaksanakan pelatihan dan pembekalan pengetahuan mengenai kondisi tempat tujuan, budaya dan tradisi masyarakat setempat kepada calon transmigran yang dilakukan oleh Balai Latihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat (Balatrans Penca) Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 pelatihan dasar umum calon transmigran dialihkan ke Balai Latihan Pertanian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Klampok, Banjarnegara. Di tahun 2021, Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Banjarnegara tidak lagi melatih calon transmigran. Namun demikian para calon transmigran dari Provinsi Jawa Tengah tetap mengikuti pelatihan di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPLM) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.5. Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan

Kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kebencanaan di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dari gambaran daya dukung dan daya tampung lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan perubahan iklim. Gambaran lainnya yang dapat menunjukkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup antara lain terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, kualitas lahan, rehabilitasi pesisir, pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan, kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB, pengelolaan sumberdaya energi dan mineral, dan penanggulangan bencana. gambaran kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kebencanaan diuraikan sebagai berikut.

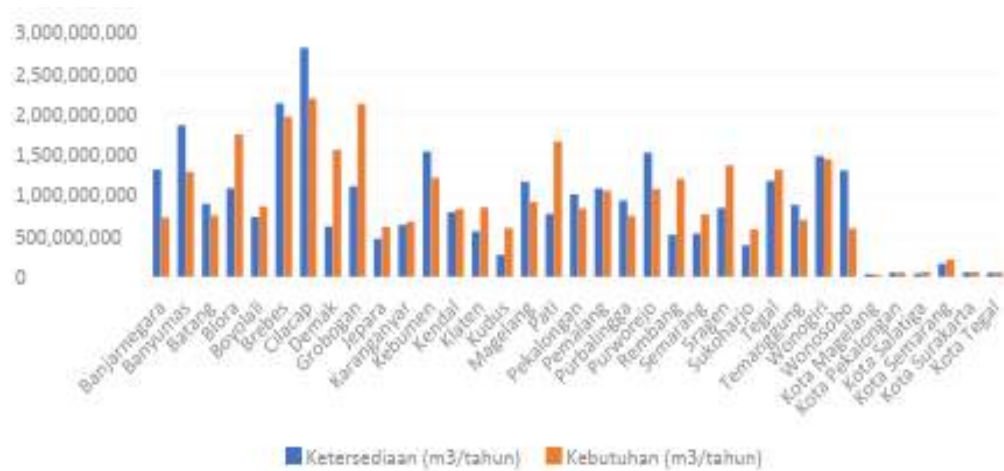
2.5.1. Daya Dukung dan Daya Tampung

Keberadaan sumberdaya alam di bumi tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dijaga agar terus berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus memperhatikan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan

keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Indeks Jasa Penyedia Air, Jasa Penyedia Pangan, Jasa Pengaturan Air, Jasa Pengaturan Iklim, Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Perlindungan Bencana masih dalam rentang sedang, status D3T air terlampaui, dan D3T pangan belum terlampaui.

Pada Keputusan Menteri LHK No. SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional ditetapkan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Jawa Tengah telah terlampaui yang mana ketersediaan air sebesar 31.032.527.608,75 m³/tahun dan kebutuhan atau pemanfaatan air sebesar 32.719.164.930,76 m³/tahun. Jika dilihat dari distribusi wilayah dengan status D3T air sudah terlampaui mencapai 47,55 persen dan yang belum terlampaui sebesar 52,45 persen dari total wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian dari hasil perhitungan secara nasional maka kondisi ketersediaan di Jawa Tengah mengalami defisit sebesar 1.686.637.322,01 m³/tahun. Berdasarkan pemetaan D3T air Jawa Tengah, maka terdapat 20 Kabupaten/Kota dengan status agregat daya dukung dan daya tampung air terlampaui. Berikut distribusi daya dukung dan daya tampung air setiap kabupaten/ kota di Jawa Tengah.



Gambar 2.68.
Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Air Provinsi Jawa Tengah

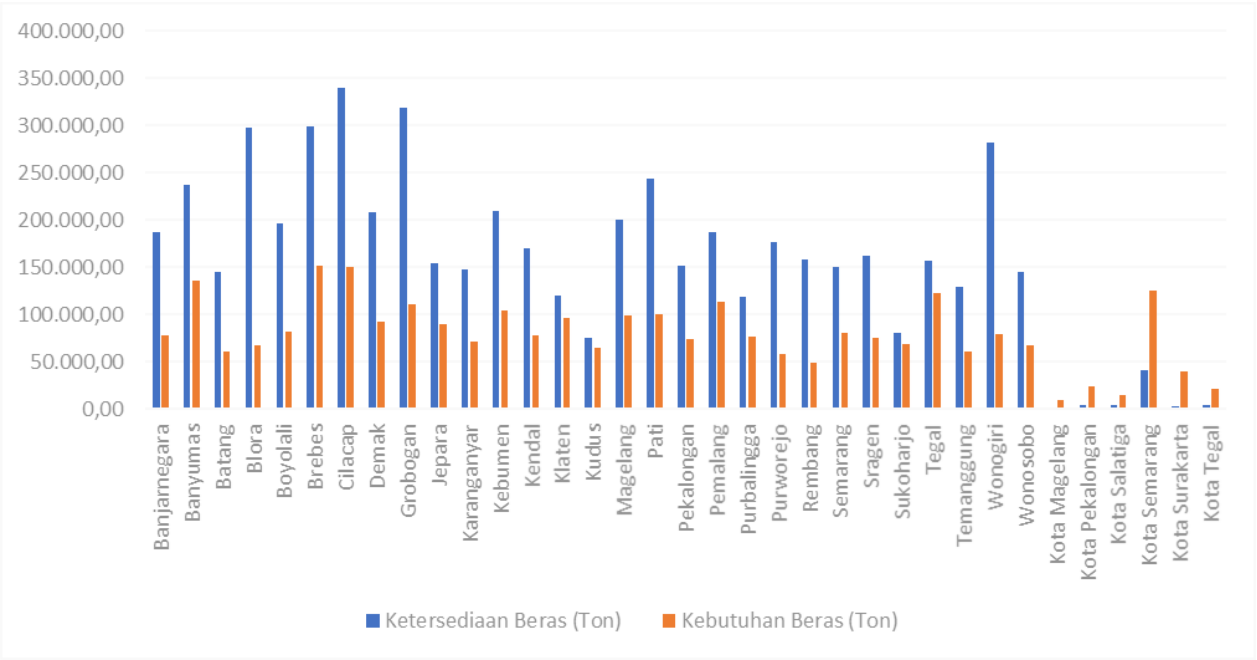


Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

Gambar 2.69.
Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan grafik diatas wilayah Kota di Jawa Tengah cenderung melampaui ambang batas penduduk yang dapat didukung, hal ini disebabkan kondisi wilayah terkait jasa lingkungan hidup penyedia air tidak terlalu baik, tetapi disisi lain wilayah tersebut memiliki jumlah populasi yang banyak. Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan ketersediaan dan kebutuhan air. Hal ini disebabkan perubahan penutupan lahan di Jawa Tengah diikuti dengan peningkatan jumlah populasi.

Selanjutnya Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah memiliki total ketersediaan 5.508.531,0 ton beras dan kebutuhan mencapai 2.792.243,71 ton beras sehingga kondisinya masih surplus sebesar 2.716.287,29 ton beras. Jika dilihat berdasarkan wilayahnya maka masih terdapat sekitar 11,38 persen yang daya dukung pangannya sudah terlampaui dan 88,62 persen wilayah yang belum terlampaui daya dukung pangannya. Kondisi daya dukung pangan di setiap kabupaten/kota berbeda sesuai kondisi wilayah tersebut terutama penggunaan lahan dan jumlah penduduk. Jika dilihat di masing-masing kabupaten/kota maka seluruh kota daya dukung pangannya terlampaui. Berikut ditampilkan status daya dukung dan daya tampung pangan untuk setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.



Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

Gambar 2.70.
Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Pangan Provinsi Jawa Tengah



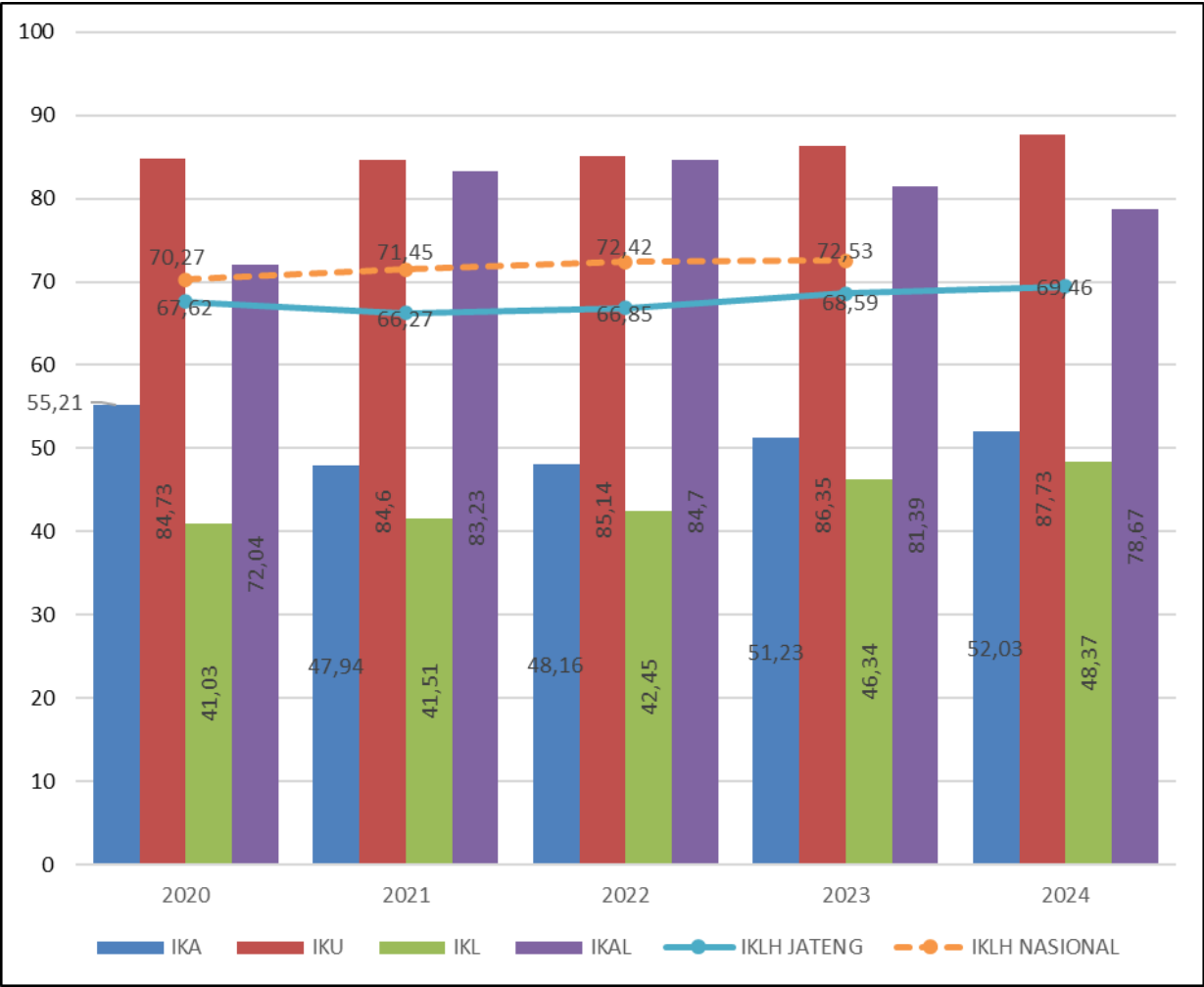
Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

Gambar 2.71.
Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah

2.5.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Terjadi kecenderungan peningkatan IKLH Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2020-2024 sebesar 1,84 poin dan pada tahun 2024 IKLH Provinsi Jawa Tengah mencapai 69,46 dengan rincian:

- IKA: 52,03
- IKU: 87,73
- IKL: 48,37
- IKAL: 78,67



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Gambar 2.72.

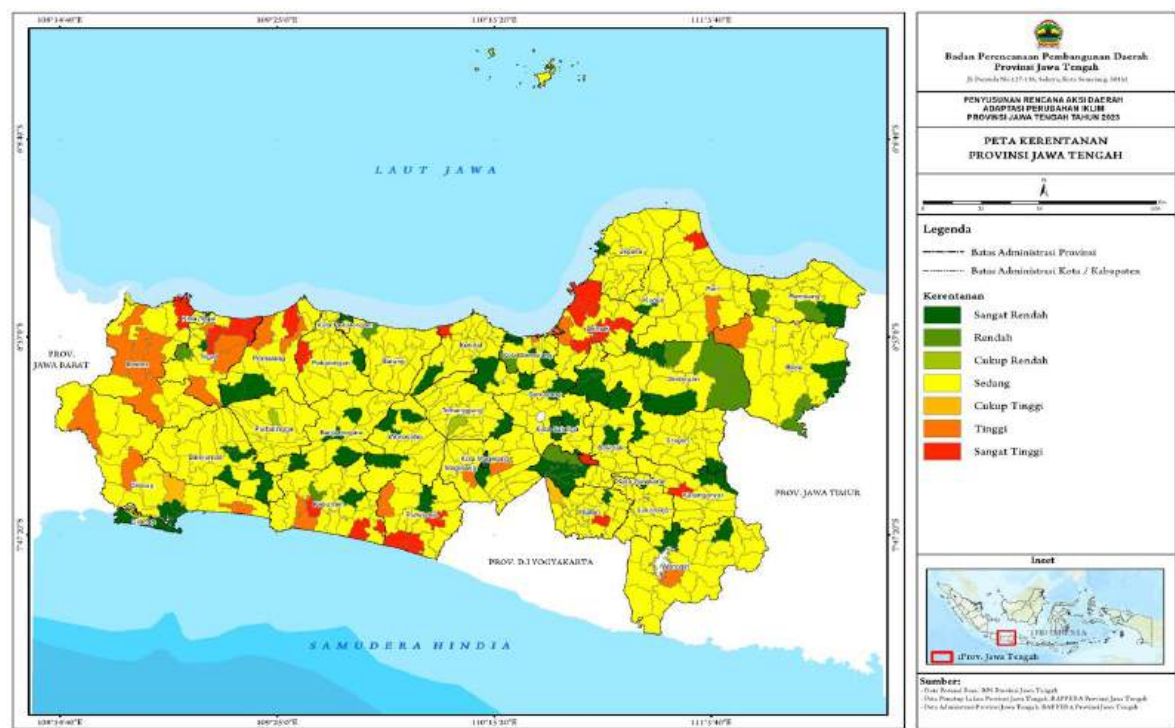
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024**

2.5.3. Perubahan Iklim

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perubahan iklim secara global. Perubahan iklim berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, seperti adanya bencana hidrometeorologi, perubahan musim dan kenaikan muka air laut. Penanganan dampak dari perubahan iklim dapat dilakukan melalui aksi mitigasi maupun aksi adaptasi guna meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah (dalam skala kecamatan) menunjukkan hasil bahwa mayoritas kecamatan di Provinsi Jawa Tengah berada di kelas kerentanan sedang yaitu sebanyak 442 kecamatan atau 77 persen. Kecamatan dengan kerentanan kelas sangat rendah sebanyak 68 kecamatan atau 12%, sedangkan kecamatan dengan kelas kerentanan tinggi sebanyak 24 kecamatan atau 4 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah saat ini cukup rentan terhadap perubahan iklim yang dikategorikan dari banyaknya kecamatan yang berada di kerentanan kelas sedang. Apabila dilihat dari kondisi geografis maka ancaman wilayah pesisir utara berupa kenaikan muka air laut dan peningkatan banjir dan rob. Kawasan dataran rendah berpotensi terjadi peningkatan banjir, dan dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor rentan terhadap bencana longsor.

Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan ancaman terjangan gelombang laut terhadap aktivitas nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir.



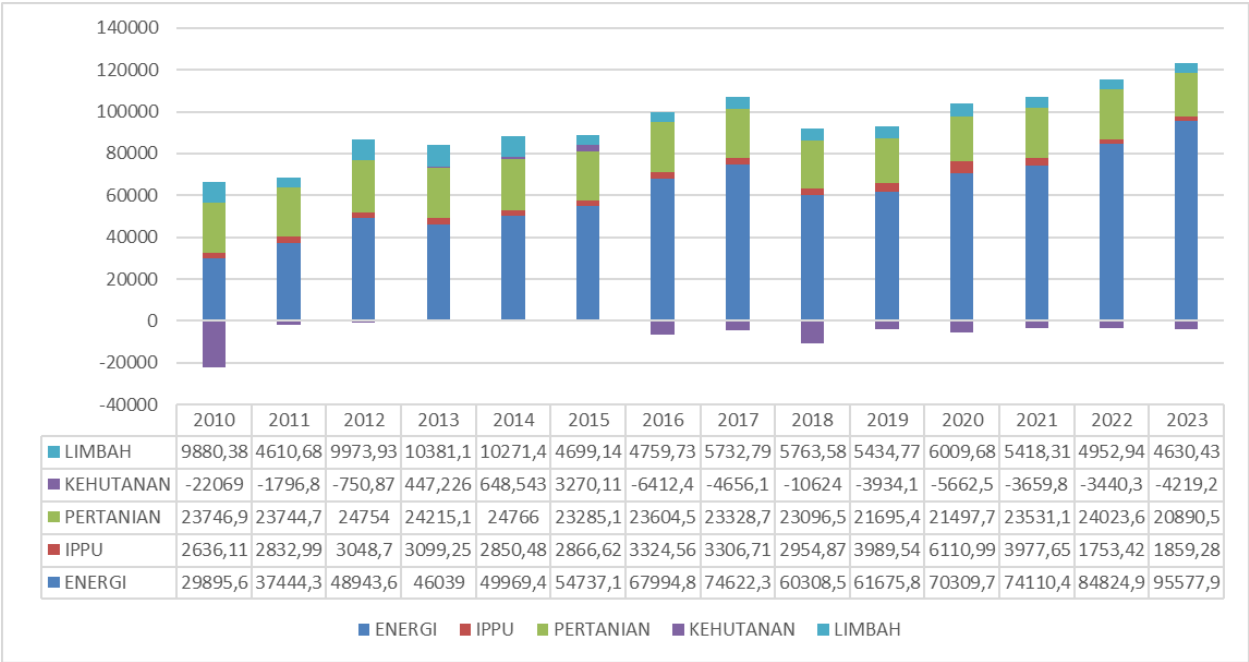
Sumber: Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.73.

Peta Kerentanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Terjadinya perubahan iklim berkaitan dengan emisi gas rumah kaca (GRK). Emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 118.738,93 GgCO₂eq. Pada tahun 2023, sektor energi menjadi penyumbang terbesar emisi GRK di Jawa Tengah dengan total emisi sebesar 95.577,87 GgCO₂e (80,49 persen), dan disusul sektor pertanian sebesar 20.890,54 GgCO₂e (17,59 persen). Peningkatan emisi dari sektor energi salah satunya disebabkan oleh beroperasionalnya PLTU Batang pada tahun 2022.

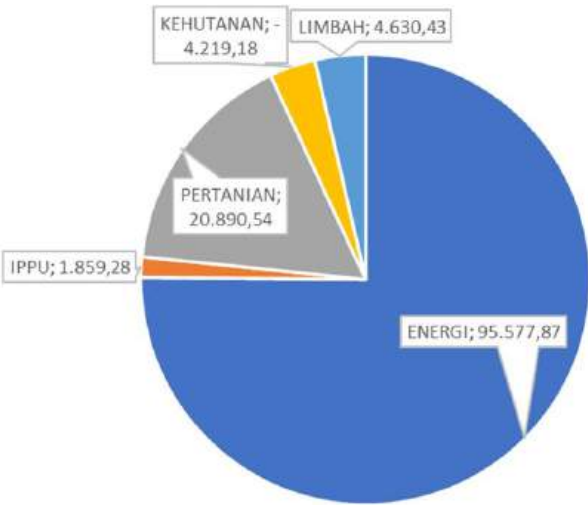
Peningkatan emisi GRK pada periode 2010-2023 tersebut didominasi oleh peningkatan emisi pada sektor energi. Selama periode tersebut, sektor energi meningkat 219,71 persen dari 29.895,59 GgCO₂e pada tahun 2010 menjadi 95.577,87 GgCO₂e pada tahun 2023. Emisi GRK sektor energi ini didominasi oleh pembakaran bahan bakar di pembangkit listrik dan transportasi yang terus meningkat.



Sumber: Laporan IGRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.74.

Tren Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2023



Sumber: Laporan IGRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar.2.75.

Kontribusi Sektor Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (%)

Secara akumulasi, total capaian penurunan emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2010 hingga tahun 2024 mencapai 14,13 juta ton CO₂e (*cut off* 26 Juni 2025, status data final dan disetujui). Angka ini merupakan kinerja penurunan emisi GRK yang dilaporkan oleh provinsi, kabupaten/kota dan pihak non pemerintah di Jawa Tengah. Capaian penurunan tersebut berasal dari 4.481 kegiatan. Dari sisi intensitas emisi, saat ini intensitas emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,74 ton CO₂e/miliar.

Beberapa sektor berperan dalam penurunan emisi GRK di Jawa Tengah selama periode 2021-2024 di antaranya air limbah, *blue carbon*, energi, kehutanan dan lahan gambut, persampahan, pertanian, dan transportasi. Penurunan emisi paling tinggi berasal dari sektor kehutanan dan lahan gambut

sebesar 7.345.492,75 ton CO₂e atau 53,77 persen, sektor pertanian sebesar 3.576.340,10 ton CO₂e atau 26,18 persen, dan sektor transportasi sebesar 1.223.837,84 ton CO₂e atau 8,96 persen. Sedangkan kontribusi paling rendah adalah *blue carbon* sebesar 51.179,073 ton CO₂e atau 0,37 persen.

2.5.4. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Kondisi kualitas lingkungan hidup juga digambarkan dari tingkat pencemaran, baik pencemaran air, udara, maupun akibat sampah. Kualitas air di Jawa Tengah dominan berada pada kategori tercemar ringan dengan nilai IP 3,35. Dari 25 sungai di Jawa Tengah yang dilakukan pemantauan sebanyak 20 sungai berada dalam kondisi cemar ringan dan 5 sungai berada pada status cemar sedang. Sementara itu tingkat pencemaran air laut dalam kondisi baik dengan nilai indeks kualitas air laut tahun 2024 sebesar 78,67. Demikian juga tingkat pencemaran udara di Jawa Tengah dinilai masih dalam kategori rendah, yang ditunjukkan dengan indeks kualitas udara tahun 2024 sebesar 87,73.

Tabel 2.112.
Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Nama Sungai	2020		2021		2022		2023		2024	
		Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu
1	Baki	5,2	Cemar Sedang	4.72	Cemar Ringan	4,09	Cemar Ringan	4,00	Cemar ringan	3,55	Cemar ringan
2	Premulung	3,5	Cemar Ringan	4.57	Cemar Ringan	3,41	Cemar Ringan	4,96	Cemar ringan	3,83	Cemar ringan
3	Mungkung	2,85	Cemar Ringan	3.55	Cemar Ringan	3,39	Cemar Ringan	3,43	Cemar ringan	5,74	Cemar sedang
4	Grompol	5,33	Cemar Sedang	3.84	Cemar Ringan	3,33	Cemar Ringan	4,14	Cemar ringan	4,51	Cemar ringan
5	Samin	5,18	Cemar Sedang	4.35	Cemar Ringan	3,69	Cemar Ringan	3,35	Cemar ringan	5,8	Cemar sedang
6	Jlntah	3,02	Cemar Ringan	3.16	Cemar Ringan	4,32	Cemar Ringan	3,98	Cemar ringan	5,35	Cemar sedang
7	Palur	6,12	Cemar Sedang	5.08	Cemar Sedang	4,92	Cemar Ringan	5,15	Cemar sedang	5,54	Cemar sedang
8	Pepe	3,42	Cemar Ringan	3.12	Cemar Ringan	3,69	Cemar Ringan	3,5	Cemar ringan	4,17	Cemar ringan
9	Babon	6,62	Cemar Sedang	4.03	Cemar Ringan	5,04	Cemar Sedan g	3,96	Cemar ringan	5,03	Cemar sedang
10	Bogowonto	4,02	Cemar Ringan	3.22	Cemar Ringan	2,91	Cemar Ringan	1,95	Cemar ringan	1,78	Cemar ringan
11	Garang	3,4	Cemar Ringan	2.88	Cemar Ringan	3,40	Cemar Ringan	3,27	Cemar ringan	2,89	Cemar ringan
12	Gung	2,9	Cemar Ringan	3.78	Cemar Ringan	3,33	Cemar Ringan	3,48	Cemar ringan	3,77	Cemar ringan
13	Kupang	3,86	Cemar Ringan	3.30	Cemar Ringan	3,53	Cemar Ringan	3,37	Cemar ringan	4,22	Cemar ringan

No	Nama Sungai	2020		2021		2022		2023		2024	
		Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu
14	Luk Ulo	0,91	Kondisi baik	3.30	Cemar Ringan	2,74	Cemar Ringan	2,85	Cemar ringan	2,39	Cemar ringan
15	Lusi	3,75	Cemar Ringan	2.95	Cemar Ringan	1,56	Cemar Ringan	2,45	Cemar ringan	2,64	Cemar ringan
16	Pemali	0,77	Kondisi baik	3.89	Cemar Ringan	3,90	Cemar Ringan	3,72	Cemar ringan	3,68	Cemar ringan
17	Sambong	3,41	Cemar Ringan	3.04	Cemar Ringan	2,73	Cemar Ringan	2,84	Cemar ringan	3,06	Cemar ringan
18	Serang	2,29	Cemar Ringan	2.32	Cemar Ringan	2,14	Cemar Ringan	3,15	Cemar ringan	2,49	Cemar ringan
19	Serayu	2,24	Cemar Ringan	2.89	Cemar Ringan	2,78	Cemar Ringan	3,92	Cemar ringan	3,07	Cemar ringan
20	Tuntang	3,59	Cemar Ringan	3.09	Cemar Ringan	2,84	Cemar Ringan	3,86	Cemar ringan	2,51	Cemar ringan
21	Wulan	4	Cemar Ringan	4.89	Cemar Ringan	3,94	Cemar Ringan	2,15	Cemar ringan	2,58	Cemar ringan
22	Bengawan Solo	2,68	Cemar Ringan	1.98	Cemar Ringan	2,46	Cemar Ringan	2,27	Cemar ringan	2,15	Cemar ringan
23	Progo	2,03	Cemar Ringan	1.94	Cemar Ringan	1,95	Cemar Ringan	1,40	Cemar ringan	1,58	Cemar ringan
24	Citanduy	1,97	Cemar Ringan	2.14	Cemar Ringan	2,62	Cemar Ringan	1,94	Cemar ringan	1,64	Cemar ringan
25	Cisanggarung	1,94	Cemar Ringan	2.75	Cemar Ringan	0,61	Baik	1,78	Cemar ringan	1,15	Cemar ringan
26	Danau Rawapening	2	Cemar Ringan	2,27	Cemar Ringan	3,02	Cemar Ringan	1,88	Cemar ringan	1,94	Cemar ringan
Nilai IP Jawa Tengah		3,4	Cemar Ringan	3.39	Cemar Ringan	3,17	Cemar Ringan	3,18	Cemar ringan	3,35	Cemar ringan

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Kondisi persampahan di Jawa Tengah digambarkan dengan data timbunan sampah di Jawa Tengah, pada tahun 2024 telah mencapai 6.339.820,22 ton/tahun. Pengelolaan sampah di Jawa Tengah baik pengurangan maupun penanganan pada tahun 2024 baru mencapai 2.606.065,76 ton/tahun (41,11 persen), dengan rincian pengurangan sampah sebesar 1.270.292,09 (20,04 persen) dan penanganan sampah sebesar 1.335.773,67 (21,07 persen). Penurunan capaian pengelolaan sampah secara drastis pada tahun 2024 dikarenakan adanya pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada 18 TPA di Jawa Tengah sehingga capaian penanganan di 18 TPA tersebut tidak dihitung sebagai sampah terkelola. Sementara itu capaian indikator Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah pada tahun 2022 adalah sebesar 16,51% berdasarkan pada SEB Bappenas-Kemendagri.

Tabel 2.113.

Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2019-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Timbunan Sampah (Ton/tahun)	6.055.617,05	6.152.654,76	6.363.806	6.338.109,37	6.339.820,22
2	Jumlah Sampah Yang Dapat Dikurangi (ton/tahun)	1.175.675,24	1.128.400,92	1.317.993	1.321.899.86	1.270.292,09
	Persentase Sampah Dikurangi	19,41	18,34	20,71	20,86	20,04
3	Jumlah sampah Yang Tertangani (ton/tahun)	2.626.441,58	2.408.372,35	2.590.830	2.590.431,31	1.335.773,67
	Persentase Sampah Tertangani	43,37	39,14	40,71	40,87	21,07
4	Total Sampah Terkelola (ton/tahun)	3.802.116,82	3.536.773	3.908.823	3.912.331,17	2.606.065,76
	Persentase Sampah Terkelola (%)	62,79	57,48	61,42	61,73	41,11
5	Sampah Tidak Terkelola (ton/tahun)	2.253.500,23	2.615.881,49	2.454.983,00	2.425.778,20	3.733.754,46
	Persentase Sampah Tidak Terkelola (%)	37,21	42,52	38,58	38,27	58,89

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan. Pengawasan lingkungan yang diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) identik dengan kegiatan pengawasan yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Perkembangan pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114.

Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	Izin	69	83	89	236	236
2	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Usaha dan/ atau kegiatan	57	38	63	65	39
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Usaha dan/ atau kegiatan	49	19	47	50	21
4	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Orang	-	6	7	7	6

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.5.5. Rehabilitasi Lahan Kritis dan Ekosistem Pesisir

Merujuk pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018, luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah, seluas 375.733 ha (11,45 persen dari luas daratan Provinsi Jawa Tengah). Adanya lahan kritis berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan antara lain: meningkatnya potensi/ kejadian erosi, menurun/ hilangnya kesuburan tanah, penurunan kualitas air akibat sedimentasi/ polutan di badan air, meningkatnya resiko/ kejadian banjir dan atau longsor, gangguan ekosistem akibat rusak/ hilangnya habitat flora/ fauna, turunnya fungsi penyerapan karbon akibat kurangnya vegetasi, potensi terjadinya penggurunan (*desertification*) serta kerugian ekonomi dan ekologi lainnya.

Luas kawasan hutan di Jawa Tengah seluas 766.390 ha dan hutan rakyat seluas 682.425,61 ha, sehingga total luas hutan di Jawa Tengah 1.448.815,61 ha. Lahan kritis di Jawa Tengah seluas 86 persen berada di lahan milik masyarakat, sedangkan 14 persen di kawasan hutan (hutan negara). Penanganan lahan kritis di Jawa Tengah dilakukan melalui beberapa pendekatan, (1) Intervensi fisik (rehabilitasi hutan dan lahan melalui penanaman/ vegetatif dan sipil teknis/ bangunan konservasi tanah & air, (2) Intervensi kebijakan (pengelolaan DAS terpadu, Perda/Pergub/Perbup Pengelolaan DAS), (3) Intervensi kelembagaan. Rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan vegetatif dilakukan melalui pembangunan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan pada lahan-lahan yang dibebani hak/ lahan masyarakat, sedangkan pendekatan sipil teknis dengan membangun *gully plug*, dam penahan, dam pengendali, sumur resapan serta bangunan konservasi tanah dan air (KTA) lainnya.

Tabel 2.115.

Penanganan Lahan Kritis (Penanaman/ Vegetatif) di Jawa Tengah

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Hutan (dalam dan luar kawasan) (ha)	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13
Luas Lahan Kritis (ha)*	375.733	375.733	375.733	375.733	375.733	375.733,00
Luas lahan kritis yang direhabilitasi per tahun (ha)	23.431	32.389	23.477	21.371	19.052	3.043,00
Persentase rehabilitasi lahan kritis per tahun (%)	6,24	8,62	6,24	5,69	5,07	0,81
Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi (akumulatif) ha	23.431	55.820	79.297	100.668	119.720	122.763,00
Persentase rehabilitasi lahan kritis per tahun (%) (akumulatif)	6,24	14,86	21,1	26,79	31,86	32,67

Sumber:
1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.
2.*) Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional.

Tabel 2.116.
Penanganan Lahan Kritis (Sipil Teknis/ Bangunan KTA) di Jawa Tengah

JENIS BANGUNAN KTA	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dam Penahan (unit)	156	248	62	118	77	113
Dam Pengendali (unit)	0	0	0	0	0	0
Gully Plug (unit)	242	440	262	270	235	345
Sumur Resapan (unit)	450	522	1.500	840	180	504
Instalasi Pemanenan Air Hujan - IPAHA (unit)	-	-	-	-	28	23
JUMLAH	848	1.210	1.824	1.228	520	985

Sumber/ Keterangan :
1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.
2.KTA : Konservasi tanah dan air

Penanganan lahan kritis juga dilakukan melalui penguatan kelembagaan DAS, seperti forum – forum DAS di beberapa wilayah DAS. Selain itu, ada inisiatif pemberian apresiasi kepada desa – desa di Jawa Tengah yang telah melakukan pengelolaan DAS dengan baik pada tingkat wilayah administratif terkecil (Desa) dalam bentuk Gerakan Desa Peduli DAS Lestari.

Tabel 2.117.
Perkembangan Kelembagaan Desa Peduli DAS Lestari di Jawa Tengah

KATEGORI DESA PEDULI DAS LESTARI	2023	2024
Utama	2	3
Madya	5	1
Pratama	1	4
Rintisan	6	3
JUMLAH	14	11

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Selain penanganan lahan kritis di daratan, penanganan kerusakan ekosistem pesisir dilaksanakan melalui rehabilitasi dan konservasi ekosistem mangrove. Rehabilitasi lahan basah mangrove dilakukan melalui penanaman mangrove, sedangkan konservasi mangrove dilakukan dengan penetapan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) lahan basah mangrove yang dikelola secara kolaboratif multistakeholder di Pemalang (KEE Mojo), Rembang (KEE Pasarbangi-Tireman) dan Kebumen (KEE Muara Kali Ijo).

Tabel 2.118.
Rehabilitasi Mangrove Di Jawa Tengah

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KETERANGAN
Luas rehabilitasi mangrove (ha) (A)	58	19,4	174,12	27	55,7	124	DLHK*

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KETERANGAN
Luas Penanaman Mangrove (ha) (B)	19,6	6,4	9	8,89	8,15	6,52	DKP**
Luas rehabilitasi mangrove per tahun (ha) (A+B)	77,6	25,8	183,12	35,89	63,85	130,52	
Akumulatif Luas rehabilitasi mangrove (ha)	77,6	103,4	286,52	322,41	386,26	516,78	

Sumber:
 1. *) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025
 2. **) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025

2.5.6. Konservasi dan Perlindungan Hutan

Selain rehabilitasi lahan kritis/pemulihan DAS, dilakukan juga upaya mempertahankan tutupan lahan melalui inisiatif - inisiatif konservasi kawasan yang dikelola secara kolaboratif multisektor dan multipihak misalnya melalui pembentukan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) dan Cagar Biosfer, maupun kawasan konservasi/ perlindungan keanekaragaman hayati yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti Taman Hutan Raya Mangkunegoro I dan Kebun Raya Baturaden.

Cagar Biosfer merupakan kawasan/situs yang ditetapkan oleh UNESCO untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan atas upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang terpercaya. UNESCO telah menetapkan 2 (dua) Cagar Biosfer di Jawa Tengah yaitu Cagar Biosfer Karimunjawa–Jepara–Muria seluas 1.236.083,97 Ha dan Cagar Biosfer Merapi–Merbabu–Menoreh seluas 254.876,75 Ha.

Tabel 2.119.
Kerusakan Kawasan Hutan di Jawa Tengah

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas pencurian pohon (ha)*	22,88	17,41	14,6	91	105,09	423,31
Indikasi Luas Karhutla (ha)**	4.782,00	7.516,00	599,00	107,00	9.965,59	3.726,78
Emisi CO ₂ Karhutla (Ton CO ₂ e)**	491.617,00	85.750,00	90.504,00	19.537,00	1.193.013,00	446.144,88

Sumber :
 *) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.
 **) www.sipongi.menlhk.go.id (KLHK) / waktu akses 13 Januari 2025 pukul 11.16 WIB

Luasan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jawa Tengah bervariasi setiap tahun, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh pola cuaca. Pada tahun 2023 luasan karhutla mencapai 9.965,59 ha atau terluas pada periode 5 tahun terakhir karena kuatnya pengaruh *el-nino* di tahun 2023 dan menurun di 2024. Hal ini diantisipasi dengan penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan pembuatan infrastruktur pemadaman karhutla seperti misalnya sekat bakar. Karhutla menimbulkan kerugian ekonomi (hilang/ rusaknya potensi hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan) dan ekologi (kerusakan habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan).

2.5.7. Pemanfaatan hutan dan Kapasitas Pengelolaan Hutan

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Sedangkan pengolahan hasil hutan berkelanjutan ditentukan sejauh mana pengguna kawasan hutan (yang bersifat perorangan, kelompok masyarakat maupun badan hukum swasta) memenuhi kewajiban terhadap izin/kerjasama yang telah ditetapkan dan industri pengolahan hasil hutan tertib dalam penatausahaan hasil hutan. Berikut gambaran perkembangan produksi kayu di Jawa Tengah.

Tabel 2.120.
Produksi Kayu di Jawa Tengah

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Kayu Asal Hutan Rakyat (m³)	2.632.756,10	2.682.476,19	1.821.315,97	2,149,541.51	2.061.492,71	2040663,35
Produksi Kayu Asal Hutan Negara (m³)	278.118,06	361.641,11	249.517.67	328,451.67	332.316,00	287228
Total Produksi Kayu (m³)	2.910.874,16	3.044.117,30	1.821.315,97	2,477,993.17	2.393.808,71	2.327.891,35

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Salah satu instrumen untuk mencapai pengelolaan hutan lestari adalah Kepatuhan industri pengolahan hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan melalui Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Industri pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikasi SVLK akan memiliki keunggulan kompetitif terutama di pasar internasional karena memenuhi kriteria produk ramah lingkungan (*ecolabel*) sehingga akan mendorong implementasi pengelolaan hutan lestari. Berikut gambaran perkembangan pengguna kawasan, industri pengolahan hasil hutan dan di Jawa Tengah.

Tabel 2.121.
Penggunaan Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK di Jawa Tengah

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pengguna kawasan hutan (unit)	193	201	203	207	190	178
Industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m³ berizin (unit)	967	999	1.007	1.026	1061	1085
Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (unit)	736	838	894	905	955	982

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan akses kelola serta pemanfaatan hutan oleh masyarakat, memberi kesempatan masyarakat

mengelola hutan secara legal dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan yang tinggal di kawasan hutan. Berikut gambaran perkembangan perhutanan sosial di Jawa Tengah tahun 2019-2024.

Tabel 2.122.
Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Akses kelola Perhutanan Sosial (ha)	35.173,63	35.828,84	79.461,49	79.461,49	93.426,09	104.198,00
Kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi (kelompok)	79	81	90	90	119	160
Kepala Keluarga yang terlibat dalam pengelolaan Perhutanan Sosial (kk)	17.358	17.508	19.579	19.579	23.327	34.452

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Sampai dengan tahun 2024, di Jawa Tengah telah diterbitkan SK Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 160 SK untuk 34.452 KK di Jawa Tengah dengan luas total sebesar 104.198 Ha. Pengelolaan kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial maupun skema lainnya dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH). Khusus untuk pengelolaan usaha Perhutanan Sosial dibentuk kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). KTH dan KUPS dalam pengelolaan kawasan hutan dibina / didampingi oleh Penyuluh Kehutanan untuk meningkatkan kapasitas kelola kawasan, kelola usaha dan kelola lingkungan.

Pengelolaan kawasan hutan oleh KTH memberikan dampak ekonomi pada tingkat tapak yang diukur melalui Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (NTE KTH) merupakan instrumen pengukuran nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor kehutanan dalam hal terkait aktivitas ekonomi berbasis lahan hutan. Adanya data NTE KTH menjadi sarana yang strategis untuk menyusun strategi ekonomi yang efektif dalam pengelolaan kehutanan di tingkat tapak, perkembangan NTE KTH di Jawa Tengah dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.123.
Perkembangan Nilai Transaksi Ekonomi KTH di Jawa Tengah

TAHUN	KTH (UNIT)	NTE KTH (Rp)
2022	200	29.625.748.907
2023	563	90.778.196.837
2024	604	136.466.504.150

Sumber/ Keterangan :
1. www.simluh.bp2sdm.menlhk.go.id (KLHK)/ waktu akses 13 Januari 2025 pukul 14.18 WIB
2. Inisiasi penghitungan NTE KTH dimulai tahun 2022

Peningkatan nilai NTE KTH di Jawa Tengah pada periode 2022-2024 selain meningkatnya volume transaksi, salah satunya juga disebabkan peningkatan

partisipasi pencatatan yang dilakukan KTH di Jawa Tengah. Namun demikian pendalaman terhadap komponen penyusun NTE KTH seperti nilai transaksi, volume produksi, permintaan pasar, dan faktor-faktor ekonomi lainnya, akan dapat menjadi masukan dalam membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas KTH. Selain itu, NTH KTH ini juga merupakan indikasi kinerja pendampingan Penyuluh Kehutanan. Penyuluh Kehutanan juga melakukan pendampingan terhadap Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang mengelola kawasan hutan yang menjadi objek Perhutanan Sosial. Perkembangan Nilai Ekonomi KUPS yang menunjukkan proses pengelolaan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel. 2.124.
Perkembangan Nilai Ekonomi KUPS di Jawa Tengah

TAHUN	KUPS*	KOMODITAS**	JENIS KOMODITAS**	NILAI EKONOMI (Rp)***
2020	1	1	Ekowisata	4.000.000
2021	1	3	HHK Lainnya	34.325.000
2022	4	3	Kayu Putih	304.200.000
2023	29	14	Jagung	123.267.230.000
2024	44	51	Hasil Hutan Kayu (Sengon), HHBK (Jagung, tebu, empon-empon, padi, kopi, nanas, pisang, petai, ubi kayu, dll), Jasa lingkungan (wisata).	81.195.236.060

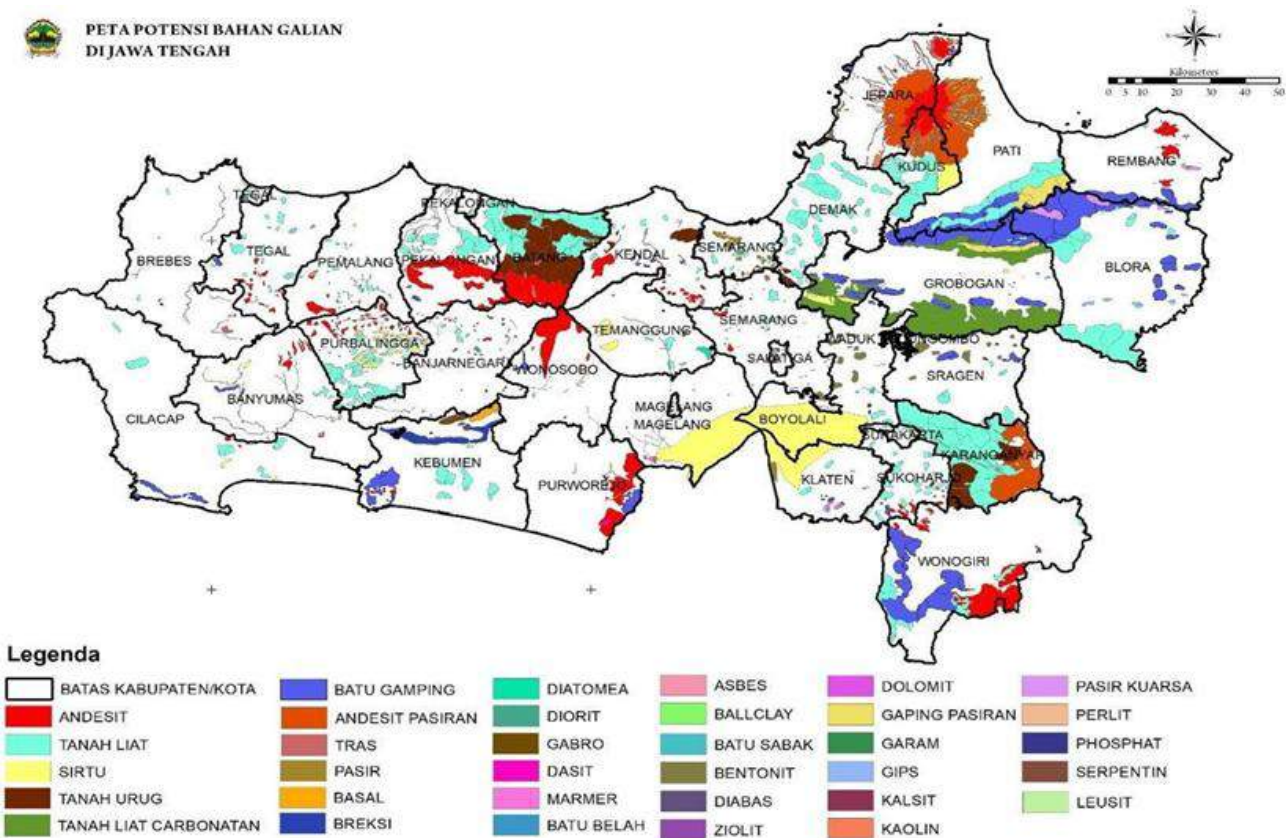
Sumber/ Keterangan :
 *) <https://gokups.menlhk.go.id> (KLHK)/ waktu akses tanggal 14 Januari 2025 pukul 08.12 WIB
 *)KUPS (dengan hasil produk) yang melakukan pmutakhiran data
 **)Jenis Komoditas terbanyak
 ***) Nilai Ekonomi Tertinggi

Nilai Ekonomi KUPS menunjukkan perkembangan aktivitas kelola usaha yang dilakukan oleh KUPS. Pada periode 2020 - 2024 nilai ekonomi KUPS selalu meningkat yang sangat terkait dengan naiknya volume transaksi produk Perhutanan Sosial dan meningkatnya kesadaran partisipasi pmutakhiran data oleh KUPS serta dorongan dari pendamping Perhutanan Sosial. Terkait pengelolaan perhutanan sosial, harus dipahami secara komprehensif meliputi pilar kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola lingkungan. Sehingga untuk menilai keberhasilan perhutanan sosial harus mencakup ketiga pilar dimaksud.

2.5.8. Pertambangan

Kondisi pertambangan di Jawa Tengah memegang peranan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, terutama sebagai penyedia bahan baku untuk berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, sektor ini menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang memerlukan perhatian serius, termasuk ketidakseimbangan antara kebutuhan material konstruksi dan kapasitas produksi dari tambang berizin, serta masih maraknya aktivitas

penambangan tanpa izin (PETI). Gambar berikut adalah Peta Sebaran Potensi Sumber Daya Mineral di Jawa Tengah.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.76.
Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah

Peta di atas menggambarkan sebaran bahan galian di wilayah provinsi Jawa Tengah, termasuk berbagai jenis mineral seperti andesit, batu gamping, pasir kuarsa, tanah liat, marmer, fosfat, dan lainnya. Peta ini menunjukkan potensi tambang yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, seperti andesit terlihat terkonsentrasi di wilayah pegunungan Kabupaten Pekalongan, Batang hingga Wonosobo. Potensi batu gamping paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Kebumen, Grobogan dan Blora. Wilayah ini terlihat memiliki sebaran yang luas, khususnya di area perbukitan karst. Dengan informasi detail ini, peta dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya mineral yang optimal, mendukung kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan data dari Asosiasi Tambang Batuan Indonesia (ATBI) Jawa Tengah, kebutuhan material untuk mendukung pelaksanaan PSN hingga tahun 2024 diproyeksikan mencapai 110 juta meter kubik. Akan tetapi, kapasitas produksi dari tambang yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) hanya mampu menyediakan sekitar 31 juta meter kubik atau 20% dari kebutuhan tersebut. Kekurangan ini menjadi salah satu pendorong utama bagi aktivitas penambangan ilegal guna memenuhi permintaan pasar. Berikut kondisi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2019-2024.

Tabel 2.125.
Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas PETI (ha)	133	128	85,98	278,97	134,83	197,1
Sidak PETI (objek)	114	107	89	160	158	180
Proses Hukum (kasus)	9	8	23	23	1	7
Lokasi di Kab/Kota	28	26	24	24	24	29

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Berdasarkan tabel "Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2019-2024", terlihat bahwa luas aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) mengalami fluktuasi, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2021 sebesar 276,97 hektar, dan meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 197,1 hektar setelah penurunan signifikan di tahun 2023. Upaya pemerintah dalam mengatasi PETI juga terlihat dari peningkatan jumlah sidak dari 114 objek pada tahun 2019 menjadi 180 objek pada tahun 2024, meskipun kasus proses hukum tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah sidak yang dilakukan.

Aktivitas PETI di berbagai wilayah Jawa Tengah tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, tetapi juga menimbulkan kerugian dari sisi penerimaan negara serta membahayakan keselamatan masyarakat sekitar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan aparat penegak hukum secara konsisten mengambil langkah tegas terhadap pelaku aktivitas ilegal melalui Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jawa Tengah yang terdiri dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangani aktivitas pertambangan tanpa izin.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berupaya mengarahkan kebijakan pengelolaan pertambangan untuk mengedepankan prinsip-prinsip *Good Mining Practice* (GMP) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertambangan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan untuk menekan aktivitas penambangan tanpa izin yang berpotensi merugikan penerimaan daerah dan mengancam keseimbangan ekologis.

Prinsip GMP dapat diukur melalui persentasi *Good Mining Practice*. Persentase *Good Mining Practice* mengalami peningkatan dari 85,00 persen tahun 2019 menjadi 96,53 persen. Provinsi Jawa Tengah telah meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan hidup sekitar yang lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.126.
Perkembangan Good Mining Practice (GMP) di Jawa Tengah
Tahun 2019 - 2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Total Pemegang IUP	360	355	355	309	317	303
Jumlah Pemegang IUP yang melaksanakan GMP	306	302	306	275	306	173
Persentase <i>Good Mining Practice</i> (%)	85,00	85,07	86,20	89,00	96,53	63,37

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Penilaian *Good Mining Practice* periode 2024 mengalami penurunan menjadi 63,37 persen karena periode 2024 dan seterusnya menggunakan penilaian baru yang lebih detail mendasari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yaitu terkait 5 aspek kewajiban diantaranya:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan (K3 Pertambangan);
2. Keselamatan Operasi Pertambangan (KO Pertambangan);
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pasca tambang;
4. Upaya konservasi sumberdaya mineral dan Batubara; dan
5. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan baik cair, padat, gas, sampai memenuhi baku mutu lingkungan.

Lima aspek kewajiban kemudian dijabarkan menjadi 15 (lima belas) poin kriteria sebagai berikut:

- Kepala Teknik Tambang;
- Tanda Batas WIUP;
- Statistik kecelakaan tambang;
- Laporan Kegiatan;
- Kelengkapan sarana pendukung;
- Tenaga teknis;
- Pembayaran pajak mineral;
- Teknik pertambangan;
- Pengolahan lanjutan;
- Konservasi bahan tambang;
- Keselamatan operasional pertambangan;
- Keselamatan dan kesehatan kerja;
- Pengelolaan lingkungan hidup;
- Program pemberdayaan masyarakat/CSR;
- Reklamasi dan pascatambang.

Sebagai upaya optimalisasi sektor pertambangan, pemerintah perlu mempercepat penerbitan izin usaha pertambangan yang memenuhi kaidah tata kelola yang baik, meningkatkan kapasitas pengawasan lapangan melalui penggunaan teknologi digital, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Secara keseluruhan, sektor pertambangan di Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Namun, pengelolaan yang berbasis prinsip tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat tetap menjadi prasyarat utama untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

2.5.9. Penataan Ruang

Menindaklanjuti terbitnya Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, provinsi Jawa Tengah melakukan revisi Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dilakukan revisi sesuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan antara matra darat dengan matra laut.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 sebagai dokumen rencana tata ruang matra laut, pada tahun 2022 dilakukan reviu untuk diintegrasikan pada revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun 2023 dokumen materi teknis yang disusun/direviu telah mendapatkan persetujuan teknis dari Kementerian Kelautan Perikanan, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dalam menyusun Rencana Tata Ruang. Kebutuhan dokumen Rencana Tata Ruang bagi Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, acuan pemanfaatan ruang dalam pembangunan sektoral. Perkembangan status penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.127.
Update Status RTRW Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Tengah
Per 3 November 2025

NO	Kabupaten/ Kota	Revisi &PK	Tahapan di Prov		Proses Persub ATR (Sdh Terbit Rekom Gub/ BAT KPRD Prov)	Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)	Perda Baru
			Rekom Gub (Sblm UUCK)	BAT KPRD Prov (Pasca UUCK)			
1	Kabupaten Cilacap	v	v		v	v	Perda No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda 9/2011 tentang RTRW Kab Cilacap 2011- 2031 (1 April 2021)
2	Kabupaten Banyumas	v		v	v		Penetapan revisi RTRW Kabupaten Banyumas menggunakan mekanisme melalui permen ATR
3	Kabupaten Purbalingga	v	v		v	v	Perda 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda 5/2011 tentang RTRW Kab Purbalingga 2011- 2031(28 Agustus 2020)
4	Kabupaten Banjarnegara	v	v		v	v	Perda No. 6 Tahun 2023 (19 Oktober 2023)

NO	Kabupaten/ Kota	Revisi &PK	Tahapan di Prov		Proses Persub ATR (Sdh Terbit Rekom Gub/ BAT KPRD Prov)	Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)	Perda Baru
			Rekom Gub (Sblm UUCK)	BAT KPRD Prov (Pasca UUCK)			
5	Kabupaten Kebumen	v		v	v	v	Perda No. 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Kebumen (1 Februari 2024)
6	Kabupaten Purworejo	v	v		v	v	Perda No.10 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Purworejo 2021- 2041(30Juli2021)
7	Kabupaten Wonosobo	v		v	v	v	Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 - 2043 (10 Juli 2023)
8	Kabupaten Magelang	v		v	v	v	Perda Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Magelang (4 Juli 2024)
9	Kabupaten Boyolali	v	v		v	v	Perda No 8 Th 2019 tentang Perubahan atas Perda 9 Th 2011 tentang RTRW Boyolali 2011–2031.(17 Juli 2019)
10	Kabupaten Klaten	v	v		v	v	Perda Kab. Klaten No. 10 tahun 2021 tentang RTRW Kab.Klaten Tahun 2021-2041 (24 November 2021)
11	Kabupaten Sukoharjo	v	v		v	v	Perda 1 Th 2018 tentang perubahan atas Perda 14 Th 2011 tentang RTRWSukoharjo 2011–2031.(9 Maret 2018)
12	Kabupaten Wonogiri	v	v		v	v	Perda No.2 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Wonogiri 2020-2040
13	Kabupaten Karanganyar	v	v		v	v	Perda 19 Th 2019 tentang perubahan atas Perda 1 Th 2013 tentang RTRW Karanganyar 2013– 2032.(27 Agust 2019)
14	Kabupaten Sragen	v	v		v	v	Perda 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Sragen tahun 2011–2031 tanggal 5 Mei 2020

NO	Kabupaten/ Kota	Revisi &PK	Tahapan di Prov		Proses Persub ATR (Sdh Terbit Rekom Gub/ BAT KPRD Prov)	Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)	Perda Baru
			Rekom Gub (Sblm UUCK)	BAT KPRD Prov (Pasca UUCK)			
15	Kabupaten Grobogan	v	v		v	v	Perda Kab. Grobogan No.12 Tahun 2021 ttg RTRW Kab Grobogan Tahun 2021-2041 Ditetapkan 17 Des 2021
16	Kabupaten Blora	v	v		v	v	Perda No. 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Blora 2021-2041 tanggal 1 April 2021
17	Kabupaten Rembang	v	v		v	v	Perda RTRW Kabupaten Rembang No. 2 tahun 2023 per tgl 10 oktober 2023
18	Kabupaten Pati	v	v		v	v	Perda 2/2021 tentang Perubahan Atas Perd a5/2011 tentang RTRW Kab Pati 2010- 2030 tgl 1 April 2021
19	Kabupaten Kudus	v		v	v	v	Perda 1/2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 tgl 30 Maret 2022
20	Kabupaten Jepara	v	v		v	v	Perda No. 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043 (7 September 2023)
21	Kabupaten Demak	v	v		v	v	Perda No.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kab 2020
22	Kabupaten Semarang	v	v		v	v	Perda No. 6 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Semarang
23	Kabupaten Temanggung	v		v	v	v	Perda Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Temanggung 2024- 2044
24	Kabupaten Kendal	v	v		v	v	Perda 1 Th 2020 tentang Perubahan atas Perda 20 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Kendal tahun 2011- 2031 tanggal 22 Mei 2020
25	Kabupaten Batang	v	v		v	v	Perda 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab Batang 2019-2039. (26Des2019)

NO	Kabupaten/ Kota	Revisi &PK	Tahapan di Prov		Proses Persub ATR (Sdh Terbit Rekom Gub/ BAT KPRD Prov)	Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)	Perda Baru
			Rekom Gub (Sblm UUCK)	BAT KPRD Prov (Pasca UUCK)			
26	Kabupaten Pekalongan	v	v		v	v	Perda 3 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Pekalongan 2020- 2040 (5 Agustus 2020)
27	Kabupaten Pemalang	v	v		v	v	Perda 1 Tahun 2018 tentang RTRW Pemalang 2018–2038 (8 Feb 2018)
28	Kabupaten Tegal	v	v		v	v	Perda No. 2 Tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tegal Tahun 2023 - 2043 (21 Juli 2023)
29	Kabupaten Brebes	v	v		v	v	Perda 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab Brebes 2019–2039. (23Des2019)
30	Kota Magelang	v	v		v	v	Perda 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang 2011- 2031 (17Juli2020)
31	Kota Surakarta	v	v		v	v	Perda No.4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021- 2041 tanggal 9 Juli 2021
32	Kota Salatiga	v		v	v	v	Perda Nomor 3 Th 2023 tentang RTRW Kota Salatiga tahun 2023-2043 tgl 12 Juni 2023
33	Kota Semarang	v	v		v	v	Perda No. 5 Th 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Semarang No.14 Th 2011 tentang RTRW Kota Semarang 2011- 2031
34	Kota Pekalongan	v	v		v	v	Perda 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekalongan No.30 Th 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan 2009-2029
35	Kota Tegal	v	v		v	v	Perda Kota Tegal No.1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Kota Tegal No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011–2031 tanggal 24 Feb 2021
	JUMLAH	35	28	7	35	34	34
	%	100	80,00	20,00	100,00	97,14	97,14

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 34 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah pada tabel diatas juga diinformasikan terdapat Rencana Tata Ruang yang masih berproses yaitu Kabupaten Banyumas yang masih dalam proses penyusunan menjadi Peraturan Daerah. Perlu adanya upaya percepatan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melegalkan dokumen Rencana Tata Ruang untuk mempermudah investasi dan juga sebagai acuan pembangunan di daerah.

Tabel 2.128.

**Progress Legislasi RDTR Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah
Per 3 November 2025 terdapat 64 RDTR yang sudah
(3)Perda/(61)Perkada**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada	Nama RDTR	Keterangan
1	Kabupaten Banyumas	3	RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto	Perda Kab Banyumas No.6 Tahun 2019 tentang RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto Th. 2019-2039
			RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas	Perbup No. 9 Tahun 2023 tentang RDTR KP Banyumas Tahun 2023-2043
			RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja	Perbup No. 4 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja
2	Kabupaten Batang	3	RDTR Kec Limpung	Perbup No. 13 Tahun 2023 tentang RDTR WP Limpung
			RDTR Kec Tulis	Perda Kab Batang No.6 Tahun 2020 tentang RDTR BWP Tulis Th. 2020 – 2040
			RDTR Gringsing	Perbup No. 12 Tahun 2023 tentang RDTR WP Gringsing
3	Kabupaten Boyolali	6	RDTR Kec Sawit	Perbup 77/2021 tentang RDTR Kec. Sawit Tahun 2021-2041 (12 November 2021)
			RDTR Wilayah Perencanaan Mojosongo	Perbup RDTR Mojosongo No. 68 Tahun 2022 (4 Juli 2022)
			RDTR Kecamatan Banyudono	Perbup RDTR Kecamatan Banyudono No. 106 Tahun 2022 tgl 1 Desember 2022
			RDTR Kecamatan Cepogo	Perbup No. 57 Tahun 2023 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Cepogo Tahun 2023 – 2043 (10 Oktober 2023)
			RDTR WP Kecamatan Ngemplak	Peraturan Bupati Boyolali No. 51 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Ngemplak Tahun 2024-2044
			RDTR WP Kecamatan Boyolali	Peraturan Bupati Boyolali No. 50 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Boyolali Tahun 2024-2044
4	Kabupaten Brebes	4	RDTR Kecamatan Losari	Perbup No. 14 Tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Losari (26 Mei 2023)
			RDTR Kecamatan Tanjung	Perbup No. 19 Tahun 2023 tentang RDTR Kec. Tanjung

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada	Nama RDTR	Keterangan
			RDTR Kecamatan Bulakamba	Perbup No. 26 Tahun 2023 Tentang RDTR Kecamatan Bulakamba
			RDTR Perkotaan Ketanggungan-Kersana	Peraturan Bupati Brebes No 51 tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana
5	Kabupaten Cilacap	3	RDTR Kaw Perkotaan Cilacap	Perbup Cilacap 75/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021 - 2041 (9 Juni 2021)
			RDTR Kawasan Perkotaan Sidareja	Perbup No. 6 Tahun 2023 tentang RDTR Sidareja (4 April 2023)
			RDTR Kawasan Perkotaan Kroya	Perbup Cilacap No. 29 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kroya
6	Kabupaten Jepara	3	RDTR Kec Jepara	Perbup Jepara No 55 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Jepara Tahun 2021 - 2041 (26 Oktober 2021)
			RDTR Mayong	Perbup Jepara Nomor 34 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mayong Tahun 2024-2044
			RDTR Kawasan Perkotaan Kalinyamatan	Perbup Jepara Nomor 7 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kalinyamatan (2 Mei 2024)
7	Kabupaten Kendal	4	RDTR Kecamatan Kaliwungu	Perbup No. 62 tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Kaliwungu
			RDTR Kecamatan Brangsong	Perbup No. 58 tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Brangsong
			RDTR Kecamatan Boja	Perbup No. 46 tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Boja
			RDTR Kecamatan Patebon	Perbup No. 47 tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Patebon
8	Kabupaten Klaten	2	RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan	Perb No. 58 tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan
			RDTR Delanggu	Perbup Klaten No. 38 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Delanggu Tahun 2024-2044 (11 Oktober 2024)
9	Kabupaten Pekalongan	1	RDTR Kec Kedungwuni	Perbup Pekalongan 21/2021 tentang RDTR BWP Kecamatan Kedungwuni 2021 - 2041 (9 Juni 2021)
10	Kabupaten Purbalingga	2	RDTR Kaw Perkotaan Purbalingga	Perbup Purbalingga 46/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2021 - 2041 (10 Juni 2021)
			RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari	Perbup Purbalingga No. 70 Tahun 2023 Tentang RDTR Kawasan perkotaan Bobotsari Tahun 2023-2043 (15 Agustus 2023)

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada	Nama RDTR	Keterangan
11	Kabupaten Purworejo	2	RDTR Perkotaan Purworejo Kutoarjo	Perbup No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo Tahun 2022-2041
			RDTR Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Yogyakarta International Airport	Perbup No. 106 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta Tahun 2023-2043 (18 Desember 2023)
12	Kabupaten Sragen	6	RDTR Perkotaan Sragen	Perbup 69 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sragen (22 Desember 2021)
			RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan	Perbup No. 15 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan Tahun 2023-2043 (31 Maret 2023)
			RDTR Gemolong	Perbup No. 34 Tahun 2023 tentang RDTR Gemolong (21 Agustus 2023)
			RDTR Miri	Perbup Sragen No. 39 Tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Miri dan Sekitarnya Tahun 2024-2044
			RDTR KSPN Sangiran dan Sekitarnya	Perbup Kabupaten Sragen No. 46 Tahun 2024 tentang RDTR KSPN Sangiran dan Sekitarnya Tahun 2024-2044 (17 Desember 2024)
			RDTR Sambirejo	Perbup Kabupaten Sragen No. 47 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo Tahun 2024-2044 (17 desember 2024)
13	Kabupaten Sukoharjo	4	RDTR Kec Sukoharjo	Perbup 91/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Sukoharjo Tahun 2020 – 2039
			RDTR Kec Kartasura	Perbup 93/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Kartasura Tahun 2020 – 2039
			RDTR Kec Grogol	Perbup 92/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Grogol Tahun 2020 - 2039
			RDTR Kecamatan Nguter dan Bendosari	Perbup Sukoharjo No. 1 Tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Tahun 2024-2044 (2 Februari 2024)
14	Kabupaten Wonogiri	3	RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Wonogiri	Peraturan Bupati Wonogiri No. 63 Tahun 2022 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Wonogiri Tahun 2022-2042
			RDTR Gunungsewu	Peraturan Bupati Wonogiri No. 1 Tahun 2024 (11 Januari 2024)
			RDTR Kecamatan Ngadirojo	Perbup Wonogiri No. 9 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Kecamatan Ngadirojo Tahun 2024-2044
15	Kabupaten Demak	4	RDTR Perkotaan Demak	Perbup Demak No. 11 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Demak (22 Maret 2024)

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada	Nama RDTR	Keterangan
			RDTR Perkotaan Mranggen	Perbup Demak No. 30 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Mranggen (22 Juli 2024)
			RDTR Kawasan Gajah	Perbup Demak No. 17 Tahun 2025 tentang RDTR Kawasan Gajah Tahun 2025- 2045) (17 April 2025)
			RDTR Kawasan Wonosalam	Perbup Demak No. 18 Tahun 2025 tentang RDTR Kawasan Wonosalam Tahun 2025-2045) (17 April 2025)
16	Kabupaten Karanganyar	1	RDTR KP Karanganyar	Perbup Karanganyar 18 Tahun 2024 tentang RDTR KP KARANGANYAR Tahun 2024-2044 (18 Oktober 2024)
17	Kabupaten Semarang	1	RDTR Kecamatan Bergas	Peraturan Bupati Kabupaten Semarang No. 5 Tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Bergas Tahun 2024-2044
18	Kabupaten Pati	2	RDTR Kecamatan Batangan	Perbup Pati No. 29 Tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Batangan
			RDTR Kecamatan Pati	Perbup Pati No. 15 Tahun 2025 tentang RDTR Kecamatan Pati Tahun 2025-2045 (5 Mei 2025)
19	Kabupaten Rembang	1	RDTR Perkotaan Lasem	Peraturan Kabupaten Rembang No. 23 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Lasem Tahun 2024-2044
20	Kota Surakarta	1	RDTR Perkotaan Surakarta	Peraturan Walikota Surakarta No. 33 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Surakarta Tahun 2023-2043 (20 Desember 2023)
21	Kota Pekalongan	1	RDTR Kota Pekalongan	Peraturan Walikota Pekalongan No. 21 Tahun 2024 tentang RDTR Kota Pekalongan Tahun 2024-2044 (3 Juli 2024)
22	Kota Salatiga	1	RDTR Kota Salatiga	Perda Kota Salatiga No.9 Tahun 2018 tentang RDTR BWP PK I, II, III, IV Kota Salatiga 2017 - 2030
23	Kota Tegal	1	RDTR Kota Tegal	Perwal No 52/2023 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Tegal 2023-2043 (31 Mei 2023)
24	Kota Semarang	1	RDTR Kecamatan Tugu	Peraturan Walikota Semarang No. 2 Tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Tugu Tahun 2023-2043 (5 Januari 2024)
25	Kabupaten Kudus	1	RDTR Kawasan Perkotaan Jekulo	Perbup Kudus No. 25 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Jekulo Tahun 2024-2044 (19 Desember 2024)
26	Kabupaten Temanggung	1	RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung	Perbup Kab. Temanggung No. 51 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung Tahun 2024-2044 (30 Desember 2024)
27	Kabupaten Grobogan	1	RDTR Kawasan Perkotaan Purwodadi	Perbup Grobogan No. 43 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purwodadi (12 Desember 2024)
28	Kabupaten Magelang	1	RDTR Kawasan Perkotaan Mungkid dan Sekitarnya	Perbup Magelang No. 17 Tahun 2025 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mungkid dan

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada	Nama RDTR	Keterangan
				Sekitarnya Tahun 2025- 2045 (27 Maret 2025)
Total	248Kabupaten/Kota	3 Perda/ 61 Perkada RDTR (64 RDTR)		

Sumber : Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, 2024.

Dalam rangka pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan sebesar 20 persen, pemerintah provinsi perlu melakukan upaya pendorongan untuk mewujudkan hal tersebut. Rata-rata luasan RTH publik di Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar 7,86 persen dari luas perkotaan di Jawa Tengah. Proporsi ini tentunya masih jauh dari angka sebagaimana yang diamanatkan.

Tabel 2.129.

Rata – Rata Luasan RTH Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2023

No	Kabupaten/Kota	2020		2021		2022		2023	
		Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%
1	Kota Semarang	2.700,68	6,99	2.700,68	6,99	2.700,68	6,99	2.700,68	6,99
2	Kab. Semarang	756,48	6,73	756,48	6,73	382,87	6,31	382,87	6,31
3	Kota Salatiga	482,16	8,33	482,16	8,33	482,16	8,33	482,16	8,33
4	Kab. Kendal	477,62	5,43	477,62	5,43	393,82	4,48	393,82	4,48
5	Kab. Demak	392,02	5,49	392,02	5,49	311,56	4,37	311,56	4,37
6	Kab. Grobogan	869,91	11,70	869,91	11,70	869,91	11,70	214,70	7,73
7	Kab. Pati	615,39	5,66	615,39	5,66	352,47	3,88	352,47	3,88
8	Kab. Kudus	1.036,77	9,92	1.036,77	9,92	1.036,77	9,92	287,25	2,76
9	Kab. Jepara	449,05	4,72	468,35	4,88	468,35	4,88	468,35	4,88
10	Kab. Blora	547,84	12,34	547,84	12,34	547,84	12,34	325,32	2,68
11	Kab. Rembang	448,48	16,33	448,48	16,33	448,48	16,33	416,94	5,32
12	Kab. Klaten	611,43	6,17	611,43	6,17	547,82	5,58	547,82	5,58
13	Kab. Boyolali	114,44	3,20	195,68	4,96	195,68	4,96	195,68	4,96
14	Kab. Wonogiri	357,85	5,80	357,85	5,80	316,59	7,24	316,59	7,24
15	Kab. Sukoharjo	998,32	6,15	998,32	6,15	177,40	2,59	177,40	2,59
16	Kab. Sragen	208,64	2,78	242	5,57	242	5,57	242,00	5,57
17	Kota Surakarta	583,78	12,35	583,78	12,35	583,78	12,35	583,78	12,35
18	Kab. Karanganyar	252,65	7,40	252,65	7,40	252,65	7,40	252,65	7,40
19	Kab. Purworejo	524,41	7,30	524,41	7,30	524,41	7,30	468,70	7,23
20	Kab. Temanggung	245,45	7,56	245,45	7,56	245,45	7,56	279,82	6,45
21	Kab. Wonosobo	504,13	14,41	504,13	14,41	504,13	14,41	468,04	5,88
22	Kab. Kebumen	1.434,68	11,00	1.434,68	11,00	1.434,68	11,00	540,26	3,63
23	Kab. Magelang	543,62	3,47	1.055,54	9,30	1.055,54	9,30	1.055,54	9,30
24	Kota Magelang	449,15	24,22	449,15	24,22	449,15	24,22	449,15	24,22
25	Kab. Banjarnegara	403,23	10,03	403,23	10,03	403,23	10,03	208,80	4,73
26	Kab. Banyumas	1.178,83	5,79	1.178,83	5,79	1.178,83	5,79	786,95	4,81
27	Kab. Batang	345,47	7,51	345,47	7,51	345,47	7,51	155,43	4,64
28	Kab. Brebes	1.185,43	9,62	1.185,43	9,62	1.185,43	9,62	941,56	4,79
29	Kab. Cilacap	1.677,33	6,48	1.677,33	6,48	1.677,33	6,48	993,02	6,06
30	Kota Pekalongan	294,91	6,35	294,91	6,35	294,91	6,35	294,91	6,35
31	Kota Tegal	592,9	15,12	592,9	15,12	592,9	15,12	592,90	15,12
32	Kab Pekalongan	196,09	3,89	120,17	4,53	120,17	4,53	120,17	4,53
33	Kab. Pemalang	1.267,67	16,72	1.267,67	16,72	1.267,67	16,72	473,62	3,71

No	Kabupaten/Kota	2020		2021		2022		2023	
		Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%	Rata2 Luasan	%
34	Kab. Purbalingga	164,49	5,89	164,49	5,89	164,49	5,89	164,49	5,89
35	Kab. Tegal	377,46	5,70	377,46	5,70	203,53	6,97	203,53	6,97
36	Jumlah Provinsi Jawa Tengah	23.288,76	7,49	23.858,66	7,91	21.958,15	7,86	16.848,93	5,76

Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng.

Selain itu upaya pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan dengan pengawasan terhadap kinerja Penataan Ruang baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui sistem pengawasan teknis (SIWASTEK). Pengawasan penataan ruang merupakan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengawasan penataan ruang dilaksanakan terhadap kinerja pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pelaksanaan penataan ruang; kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang; serta kinerja pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 216 PP No. 21/2021 diamanatkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan penataan ruang terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 telah melaksanakan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Kementerian ATR/BPN melalui sistem SIWASTEK. Selain itu juga sebagai bentuk provinsi melaksanakan tugas pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Provinsi Jawa Tengah juga telah membentuk Tim Pengawas Provinsi sebagai pelaksana kegiatan pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2024.

Tujuan dari Pengawasan Kinerja TURBINLAK Penataan Ruang dan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai indikator kemajuan Penataan Ruang suatu daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Hasil Siwastek kabupaten kota pada tahun 2024 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.130.
Tabel Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Nilai Akhir Kinerja TURBINLAK	Keterangan
1	Kota Tegal	99.35	Baik
2	Kota Pekalongan	82.64	Baik
3	Jepara	82.54	Baik
4	Sukoharjo	78.31	Sedang
5	Rembang	78.26	Sedang

6	Batang	78.25	Sedang
7	Purbalingga	77.98	Sedang
8	Temanggung	76.52	Sedang
9	kota Semarang	75.63	Sedang
10	Kota Magelang	74.40	Sedang
11	Klaten	74.23	Sedang
12	Pekalongan	74.21	Sedang
13	Grobogan	73.11	Sedang
14	Salatiga	72.00	Sedang
15	Banyumas	70.21	Sedang
16	Wonosobo	68.52	Sedang
17	Kebumen	63.80	Sedang
18	Purworejo	61.87	Sedang
19	Brebes	60.52	Sedang
20	Pati	59.07	Sedang
21	Cilacap	58.49	Sedang
22	Tegal	58.20	Sedang
23	Surakarta	57.73	Sedang
24	Blora	55.41	Sedang

Sumber: Dinas PUSDA25TARU Prov. Jateng.

2.5.10. Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketenagalistrikan merupakan faktor penting sebagai pendukung roda pembangunan perekonomian di satu wilayah. Sistem ketenagalistrikan Jawa Tengah ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi antar Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dengan daya mampu sebesar 44.918,40 MW (PT. PLN (Persero), 2023) menjadikannya sistem Ketenagalistrikan terbesar di Indonesia.

Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki daya mampu sebesar 8.013 MW dengan beban puncak mencapai 5.210 MW, sehingga memiliki cadangan daya sebesar 2.03 MW (35%). Lebih rinci mengenai kondisi kelistrikan di Jawa Tengah tergambar pada peta di bawah.

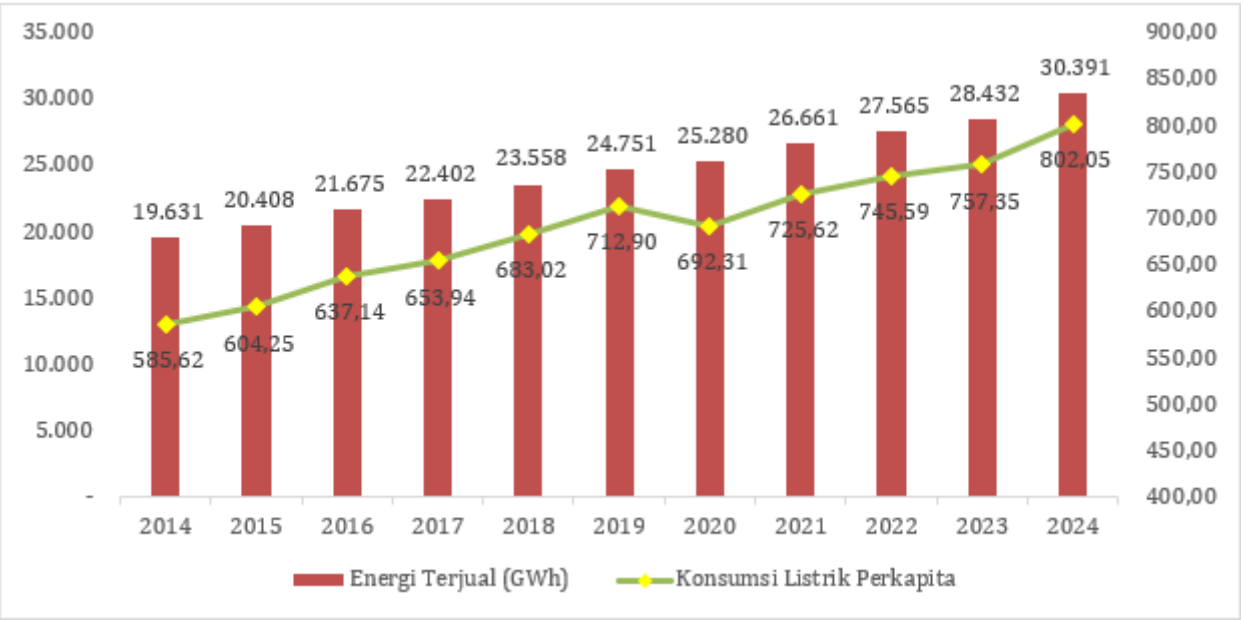


Sumber: PLN , Agustus 2024.

Gambar 2.79.
Sebaran Pembangkit Operasi 20 KV di Jawa Tengah dan DIY

Dalam hal pembangkit, baik pembangkit operasi 150-500 KV maupun 20 KV, kapasitas total mencapai 12.123,199 MW, dengan dominasi pembangkit berbasis batubara (PLTU) sebesar 80,97 persen dari total kapasitas pembangkit. Dominasi ini menunjukkan bahwa energi fosil, terutama batu bara, masih menjadi tulang punggung dalam penyediaan listrik untuk rumah tangga, industri, dan sektor lainnya di Jawa Tengah karena skalanya yang besar dan biaya operasional yang relatif rendah. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit listrik memiliki dampak emisi gas rumah kaca (GRK) yang tinggi, termasuk karbon dioksida (CO₂) dan partikel-partikel polutan lainnya. Emisi ini berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Selama kurun waktu 2014 hingga 2024 menunjukkan peningkatan konsumsi energi listrik dari 19.631 GWh pada tahun 2014 menjadi 30.391 GWh pada tahun 2024. Lebih detail terlihat pada gambar di bawah.



Sumber: Statistik PLN, BPS diolah, 2024

Gambar 2.80.
Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 – 2024 (GWh)

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, energi terjual di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang signifikan dari 19.631 GWh pada tahun 2014 menjadi 30.391 GWh pada tahun 2024, dengan total peningkatan sebesar 54,8 persen. Pertumbuhan tahunan rata-rata tercatat sekitar 4,48 persen per tahun selama periode tersebut. Tren konsumsi listrik per kapita juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 585,62 kWh/kapita pada tahun 2014 menjadi 802,05 kWh/kapita pada tahun 2024, mencerminkan kenaikan sebesar 36,96 persen. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk, yang pada tahun 2024 mencapai lebih dari 37,8 juta jiwa, serta bertambahnya aktivitas ekonomi, khususnya di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Selain itu, peningkatan konsumsi listrik per kapita mencerminkan keberhasilan program elektrifikasi di Jawa Tengah, yang memperluas akses listrik dan meningkatkan keandalan pasokan. Program pendukung seperti *electrifying lifestyle* melalui pengembangan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), *electrifying agriculture*, dan program-program lainnya juga berperan dalam peningkatan konsumsi listrik per kapita.

Peningkatan konsumsi listrik per kapita sering kali dianggap sebagai indikator positif dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan konsumsi listrik per kapita mencerminkan berbagai hal positif, seperti meningkatnya aktivitas ekonomi dengan bertumbuhnya sektor industri, perdagangan, dan jasa. Selain itu, hal ini menunjukkan semakin luasnya akses listrik ke masyarakat, termasuk di daerah terpencil, berkat keberhasilan program elektrifikasi. Perubahan pola hidup juga terlihat, di mana masyarakat kini lebih banyak menggunakan peralatan listrik untuk mendukung kenyamanan, efisiensi, dan produktivitas sehari-hari, seperti pendingin ruangan, pemanas air, dan perangkat digital.

Rasio Elektrifikasi (RE) Jawa Tengah sejak tahun 2020 telah mencapai 99,99 persen dengan Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) di Jawa Tengah telah mencapai 100 persen. Masih terdapat 0,01 persen KK belum

memiliki listrik secara mandiri dan sebagian besar merupakan rumah tangga miskin. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan akses listrik mandiri bagi rumah tangga tidak mampu melalui program listrik gratis yang telah diinisiasi sejak Tahun 2014. Jumlah kumulatif pemasangan sambungan listrik gratis hingga Tahun 2024 sejumlah 136.733 unit. Perkembangan rasio elektrifikasi dan akumulasi sambungan listrik gratis selama tahun 2019-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131.
Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Elektrifikasi (%)	99,91	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
2.	Sambungan Listrik Gratis kumulatif (Unit)	27.225	40.173	55.280	78.955	107.892	136.733

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.



Sumber: PLN, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.81.
Program Listrik Gratis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2024
Tahunan (Unit)

Kecukupan pemenuhan listrik di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Rasio Ketersediaan Daya Listrik yang merupakan perbandingan daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan. Idealnya Rasio Ketersediaan Daya Listrik menunjukkan angka 1 atau 100 persen dengan cadangan daya yang sehat berada di kisaran 20 persen hingga 30 persen dari kebutuhan listrik. Cadangan ini diperlukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik, mengantisipasi lonjakan permintaan, serta menghadapi kemungkinan gangguan pada pembangkit atau jaringan listrik.

Tabel 2.132.
Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Daya Listrik Terpasang (MW)	6.365	7.203	7.203	9.200	9.200	9.200
2	Kebutuhan Listrik (MW)	5.480	5.588	5.720	6.306	6.044	6.158
3	Rasio Ketersediaan Daya Listrik (angka)	1,16	1,29	1,26	1,46	1,52	1,49

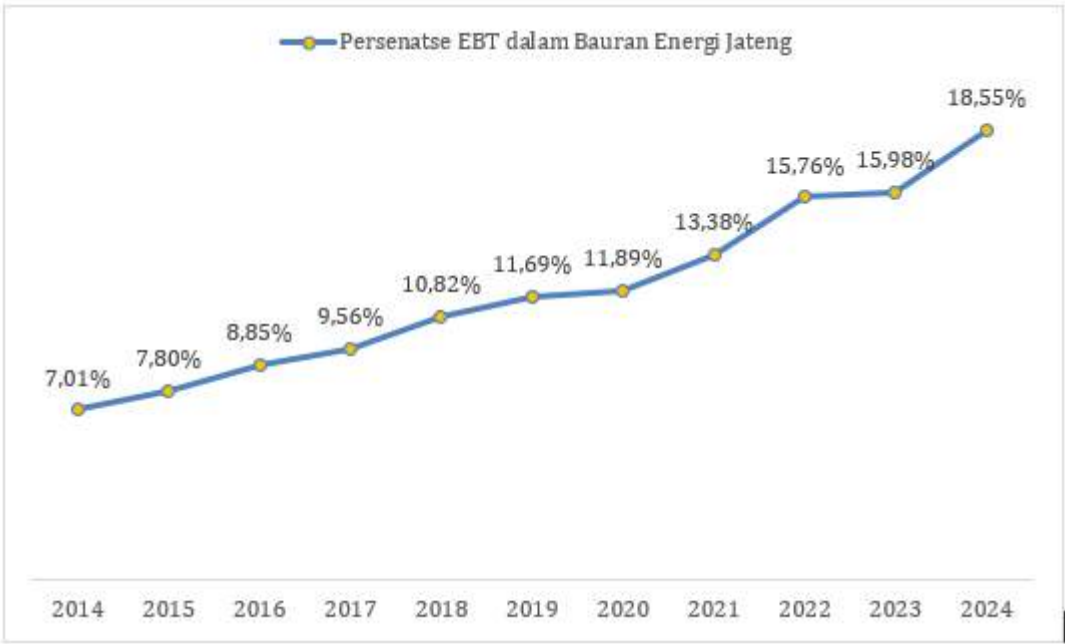
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio ketersediaan daya listrik di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan tren yang stabil meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Pada tahun 2019, daya listrik terpasang sebesar 6.365 MW dengan kebutuhan listrik sebesar 5.480 MW menghasilkan rasio ketersediaan daya sebesar 1,16. Rasio ini terus meningkat hingga 1,29 pada tahun 2020, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 1,26 pada tahun 2021. Peningkatan kembali terlihat pada tahun 2022 dengan rasio 1,46, meskipun stabil di angka 1,52 pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 1,49 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki daya yang cukup memadai sepanjang periode tersebut, dengan rasio yang selalu berada di atas 1, menunjukkan daya terpasang yang lebih besar dibandingkan kebutuhan listrik, sehingga menjamin keandalan pasokan listrik.

Dengan angka rasio ketersediaan daya listrik tersebut memberikan beberapa keuntungan strategis, seperti jaminan pasokan listrik yang sangat aman dan stabil, bahkan saat terjadi gangguan pembangkit atau lonjakan konsumsi. Tingginya rasio ketersediaan daya listrik diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam menarik tumbuhnya industri baru skala besar dan ekspansi industri eksisting agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan mengurangi tingkat pengangguran di wilayah Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah siap untuk menerima investasi baru khususnya di Kawasan Industri yang telah tersedia di Jawa Tengah diantaranya Batang Industrial Park (KI Segayung), Grand Batang City (KIT Batang), KI Kendal (KEK Kendal), KI Wijayakusuma, Tanjung Emas *Export Processing Zone* (Lamicitra Nusantara), KI Terboyo, LIK Bugangan Baru Semarang, *Jatengland Industrial Park* Sayung, KI Candi, Taman Industri BSB, dan KI Cilacap. Selain itu, cadangan daya yang besar memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan untuk mendorong elektrifikasi sektor-sektor baru seperti pertanian, transportasi listrik, sehingga mendukung pemerataan energi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan ketenagalistrikan bukan lagi tentang ketersediaan tetapi terkait keandalan mutu layanan untuk mengurangi keluhan dari sisi distribusinya dan dorongan transisi energi dari sisi produksi energi listriknya. Dominasi oleh energi fosil pada pembangkit listrik di Jawa Tengah dapat menghambat pertumbuhan energi terbarukan.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Jawa Tengah masih memiliki ketergantungan pada energi fosil. Maka diperlukan peta jalan transisi energi. Peta jalan Provinsi Jawa Tengah terkait transisi energi menuju energi baru terbarukan termuat dalam Perda RUED Provinsi Jateng No 12 Tahun 2018. Dalam perda tersebut Pemerintah Jawa Tengah telah menargetkan persentase

EBT dalam bauran energi sebesar 21,32 persen tahun 2025 dan 28,82 persen di tahun 2050. Kolaborasi multi-pihak, yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/provinsi menjadi kebutuhan bersama dan masing-masing pihak memiliki *resources* dan *capacity* yang bisa dikontribusikan untuk menyiapkan fasilitas energi terbarukan. Dalam hal ini semua pihak memberikan kontribusi sesuai kewenangan. Perkembangan persentase EBT dalam bauran energi selama tahun 2014-2024 sebagai berikut:



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.82.

Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 – 2024

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, proporsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2014 hingga 2024. Pada tahun 2014, persentase EBT tercatat sebesar 7,01 persen dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 18,55 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan sebagai bagian dari bauran energi, sejalan dengan upaya transisi energi di Indonesia.. Peningkatan yang stabil ini menunjukkan langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta mendukung target keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon di Jawa Tengah.

Selain kegiatan pembangunan infrastruktur EBT, dukungan dalam penurunan emisi gas rumah kaca, antara lain melalui pelaksanaan penghargaan Desa Mandiri Energi, Hemat Energi dan Air, dan Audit Energi. Penghargaan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pemerintah Desa dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan diversifikasi energi dan pengembangan teknologi baru berbasis energi baru terbarukan menuju kemandirian energi di Jawa Tengah. Adapun upaya konservasi energi diwujudkan salah satunya dengan pelaksanaan penghargaan Gerakan Hemat Energi dan Air serta audit energi. Gerakan Hemat Energi dan Air menjadi sebuah tindakan promotif untuk mendorong peran serta pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor Industri dalam menggerakkan perilaku budaya

hemat energi dan air di masa yang akan datang serta mendorong upaya konservasi energi untuk mendukung ketahanan energi. Sedangkan kegiatan Audit Energi dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik gedung, baik instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung pelaksanaan konservasi energi.

Masyarakat sebagai motor penggerak peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan diperlukan langkah strategis untuk mengajak peran serta seluruh masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi daerah, salah satunya melalui program penyuluh energi. Program penyuluh energi bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memilih, memakai, mengembangkan energi baru terbarukan yang tersedia dan berpotensi di sekitarnya, sehingga akan ada perubahan perilaku masyarakat dari penggunaan energi konvensional (energi fosil) sebagai sumber energi utama menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan serta memberikan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan pengelolaan energi di daerah. Adanya program penyuluh energi dapat menjadi katalis terwujudnya desa mandiri energi di Jawa Tengah.

Walaupun penggunaan energi fosil masih mendominasi tetapi penggunaan EBT menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan, mengingat potensi EBT di Jawa Tengah cukup banyak, antara lain energi surya, air, biogas, *waste to energy* (biomassa), gas rawa, dan panas bumi. Berikut potensi EBT di Jawa Tengah berdasarkan data kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah:



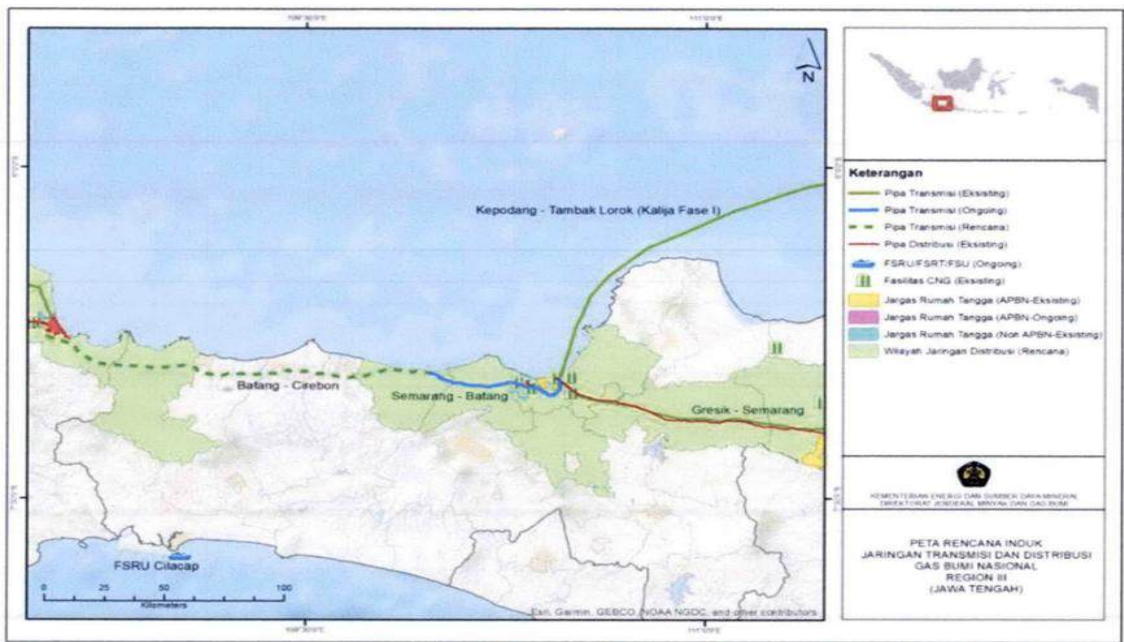
Sumber: Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.83.
Potensi Teknis EBT Jawa Tengah

Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi baru terbarukan, khususnya dari tenaga surya, *Pumped Hydro Energy Storage*, *Micro- to small-hydropower*, Tenaga angin, Biomassa, Geothermal, dan Gas Rawa dengan total potensi teknis sebesar 207,8 GW. Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi teknis tenaga surya di Jawa Tengah mencapai sekitar 177,28 GW (+/- 85%) dengan cakupan lahan yang memungkinkan untuk pemasangan panel surya secara luas. Selain itu, terdapat potensi mikro-hidro dengan kapasitas

teknis sekitar 86 MW yang dapat dimanfaatkan pada aliran-aliran sungai kecil yang tidak berpotensi mengganggu ekosistem sungai. Sumber energi biomassa juga menjanjikan, terutama dari limbah sampah, pertanian seperti sekam padi, kayu yang dapat diolah menjadi energi melalui pembangkit listrik berbasis biomassa. Kemudian potensi teknis tenaga angin *onshore* di Jawa Tengah mencapai 5.213 MW dan 3347 MW pada *offshore*. Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi panas bumi mencapai 1342 MW. Potensi ini tersebar di beberapa wilayah dengan karakteristik geothermal yang mendukung, seperti Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dieng, WKP Gunung Ungaran, WKP Umbul Telomoyo, WKP Baturaden, WKP Guci, dan WKP Gunung Lawu. Saat ini, PLTP Dieng telah beroperasi dengan kapasitas sekitar $\pm$ 60 MW dan masih memiliki potensi pengembangan lebih lanjut hingga lebih dari 400 Mwe. Dengan pemanfaatan potensi panas bumi yang optimal, Jawa Tengah dapat menjadi salah satu pusat pembangkit listrik panas bumi terbesar di Indonesia, mendukung keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan sumber daya ini, Jawa Tengah memiliki peluang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan kontribusi energi terbarukan berbasis pada potensi lokal yang dimiliki.

Infrastruktur gas bumi juga memiliki peran penting dalam ketahanan sektor energi Jawa Tengah. Upaya penyediaan Gas Bumi di Jawa Tengah bervariasi, dari *Compressed Natural Gas* (CNG) *Truck*, *Liquefied Natural Gas* (LNG), sampai dengan Pipa Gas. Jaringan gas rumah tangga sudah berkembang di Jawa Tengah, utamanya di Kota Semarang dan Kabupaten Blora. Total pemanfaatan jaringan gas rumah tangga di Jawa Tengah saat ini mencapai $\pm$ 17.500 SR (Sambungan Rumah). Jaringan Pipa Gas transmisi yang baru diresmikan pada November 2023 yaitu Cisem Tahap I (Semarang-Batang) dengan panjang 62 km telah mendukung industri di Pantura Jawa Tengah. Selanjutnya, direncanakan pembangunan jaringan Pipa Transmisi Gas Cisem Tahap II (Batang-Cirebon), dengan total panjang ruas pipa Batang sampai dengan Kandang Haur Timur sekitar 245 km yang akan dibangun mulai tahun 2024 hingga 2025.



Sumber: Keputusan Menteri ESDM nomor 10.K/MG.OI/MEM.M/2023

Gambar 2.84.

Peta Infrastruktur dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Region III

Meskipun jaringan pipa gas telah dibangun, truk CNG dan terminal LNG tetap diperlukan dalam jangka panjang untuk melayani masyarakat yang berada di daerah terpencil atau di tempat yang belum atau tidak memiliki pipa transmisi dan distribusi. LNG menawarkan fleksibilitas dan jaminan pasokan gas. Jaringan Pipa Gas juga telah mendukung pembangkit listrik. PLTGU Tambak Lorok Blok 3 (779 MW) di Semarang menjadi contoh penggunaan gas bumi yang efisien untuk pembangkitan listrik. Dengan integrasi infrastruktur Pipa Gresik (Gresik-Semarang), Pipa Cisem I (Semarang-Batang), dan Pipa Cisem II (Batang-Cirebon), dapat memberikan layanan gas bumi yang semakin baik dan telah dipersiapkan secara desain untuk menunjang kebutuhan permintaan gas yang besar di Jawa Tengah. Dengan adanya jaringan gas bumi yang juga dapat dikembangkan untuk rumah tangga akan mengurangi ketergantungan pada gas LPG yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari impor karena sumber jaringan gas bumi di Jawa Tengah berasal dari sumber gas domestik (Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru-WK Blora, Lapangan Cendana Alas Tua-WK Cepu, dan Lapangan Sumber 2-WK Tuban). Kombinasi ini memperkuat fondasi ketahanan energi provinsi dalam menghadapi tantangan energi di masa depan.

Pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan peningkatan kebutuhan sektor ekonomi. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi air tanah sebesar 8.147.547.333 m³ yang tersebar di 31 cekungan air tanah (CAT) dengan empat CAT yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu CAT Kendal, CAT Subah, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Bumiayu. Disamping potensinya yang besar, namun tekanan terhadap sumber daya ini kian meningkat, terlihat dari penurunan muka air tanah di sejumlah wilayah, terutama di kawasan industri seperti Semarang, Demak, dan Pekalongan.

Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Indeks Ketersediaan Air Tanah Jawa Tengah cenderung meningkat secara fluktuatif selama kurun waktu 2019 hingga 2024, dari 3,08 menjadi 3,65.

Tabel 2.133.
Indeks Ketersediaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah potensi aman pengambilan air tanah	820.185.750	820.185.750	820.185.750	820.185.750	820.185.750	8.147.597.463
Jumlah pengambilan air tanah	263.724.945	269.109.632	228.463.997	223.483.855	218.134.508	1.339.291.425
Indeks Ketersediaan Air Tanah	3,08	3,05	3,59	3,67	3,76	3,65

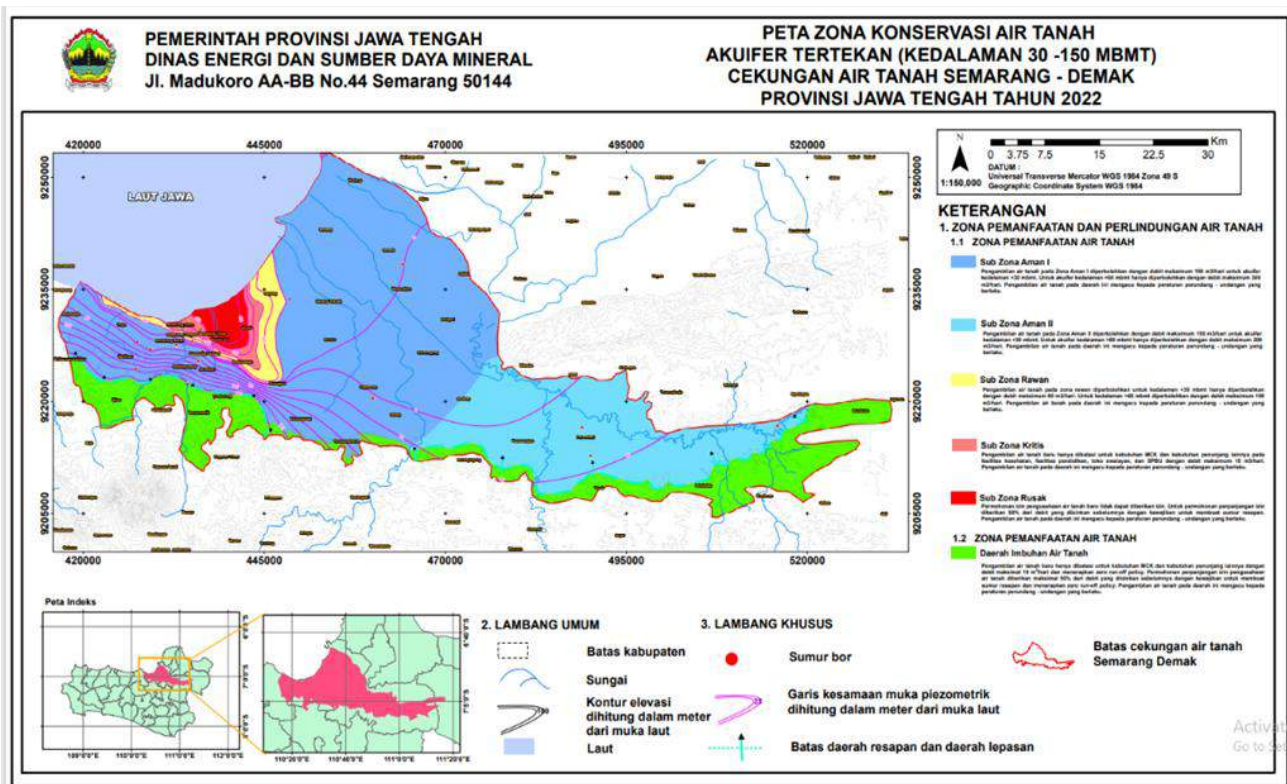
Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Terdapat perbedaan dalam formulasi perhitungan indeks ketersediaan air tanah. Penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah periode 2024 dan seterusnya menggunakan penilaian baru yang lebih rinci, yaitu terkait dengan faktor

pengambilan air tanah. Pada periode 2019 sampai dengan 2024, penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah untuk faktor pengambilan hanya menggunakan parameter jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin saja. Sedangkan periode 2024 dan seterusnya, faktor pengambilan akan menggunakan parameter jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin dan jumlah pengambilan air tanah dari Rumah Tangga non PDAM. Rumus Indeks Ketersediaan Air Tanah Tahun 2024 dan seterusnya yaitu “Potensi aman (60 persen) dibanding dengan pengambilan air tanah”.

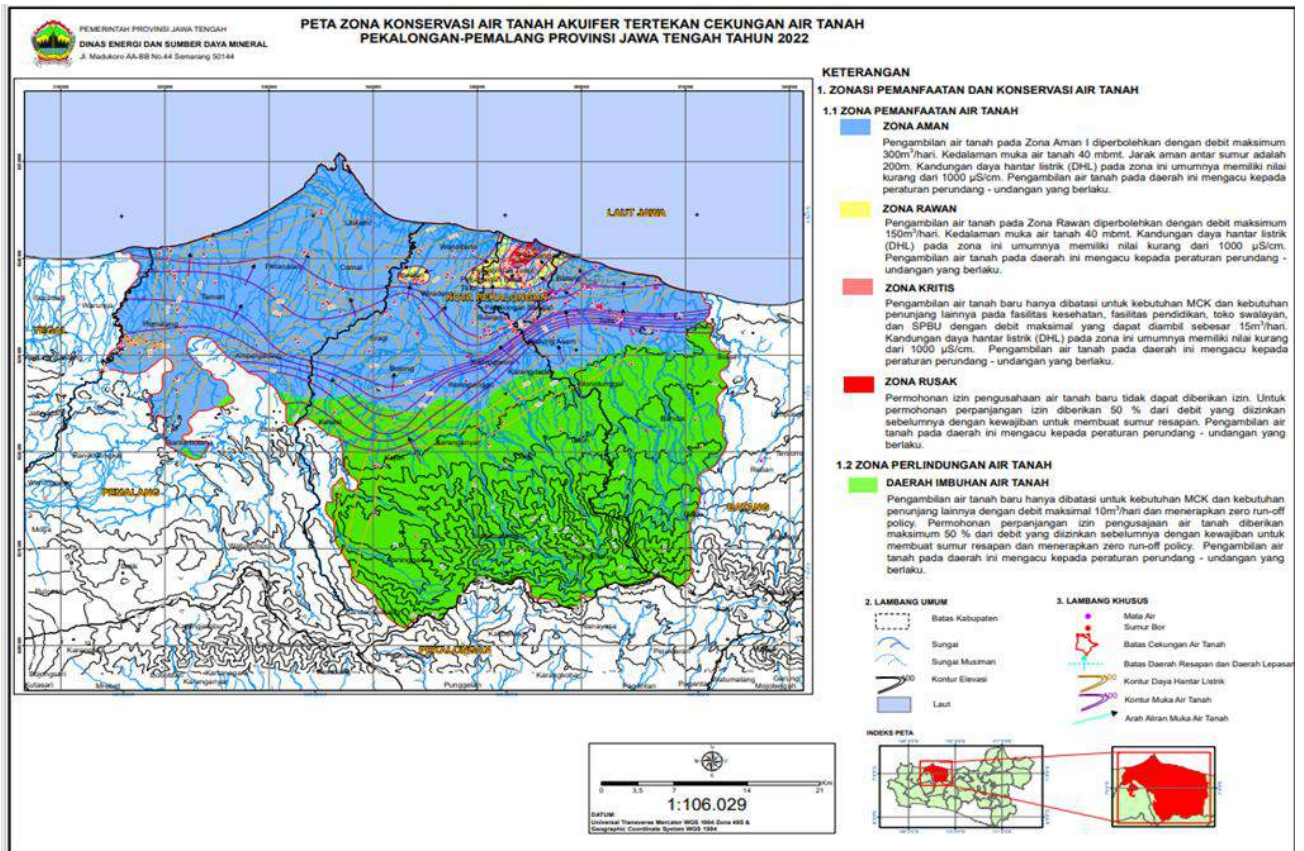
Mengacu pada hasil evaluasi zona pemanfaatan dan konservasi tahun 2022 yang dilakukan oleh Dinas ESDM, terdapat 3 CAT yang masuk kategori zona kritis serta 2 CAT yang masuk zona rusak. Tiga CAT yang terdapat Zona Kritis adalah CAT Semarang-Demak, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Karanganyar-Boyolali. Sedangkan dua CAT yang terdapat zona rusak adalah CAT Semarang-Demak dan CAT Pekalongan-Pemalang. Kondisi CAT yang terdapat zona kritis dan rusak disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- 1. Kondisi kualitas air tanah yang memiliki nilai daya hantar listrik (DHL) tinggi, >1000 $\mu\text{s}/\text{cm}$, serta nilai zat terlarut (TDS) >1500 ppm;
- 2. Kondisi muka air tanah mengalami penurunan kedudukan >40% dari kedudukan awal.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2022

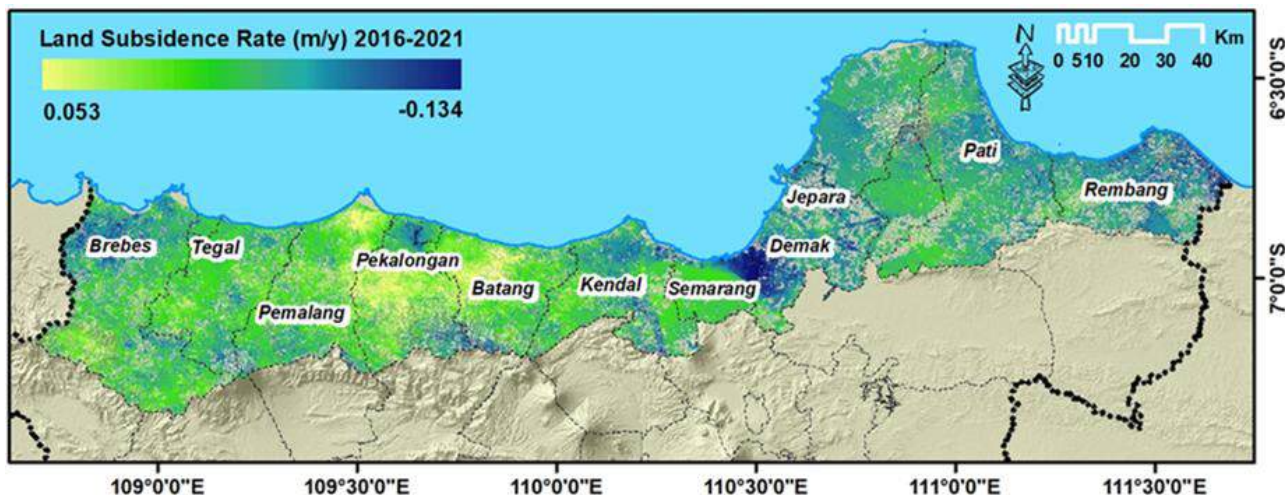
Gambar 2.85.
Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Semarang-Demak



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2022.

Gambar 2.86.
Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT
Pekalongan-Pemalang

Air tanah menjadi andalan utama bagi kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Di perkotaan, sebagian besar masyarakat yang belum terjangkau layanan PDAM bergantung pada sumur bor seperti di Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Sementara itu, sektor pertanian sering menggunakan air tanah untuk irigasi, terutama saat musim kemarau. Namun, eksploitasi yang tidak terkendali membawa dampak serius seperti intrusi air laut di kawasan pesisir, kerusakan ekosistem akibat penurunan muka air tanah, hingga amblesan tanah/*land subsidence* di area padat penduduk. Dampak serius tersebut perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingat di sepanjang wilayah Pantai Utara Jawa Tengah, yang meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, dan Rembang telah mengalami amblesan tanah/*land subsidence*, seperti yang terlihat pada gambar dibawah.



Sumber : (Yananto, et al., 2024)

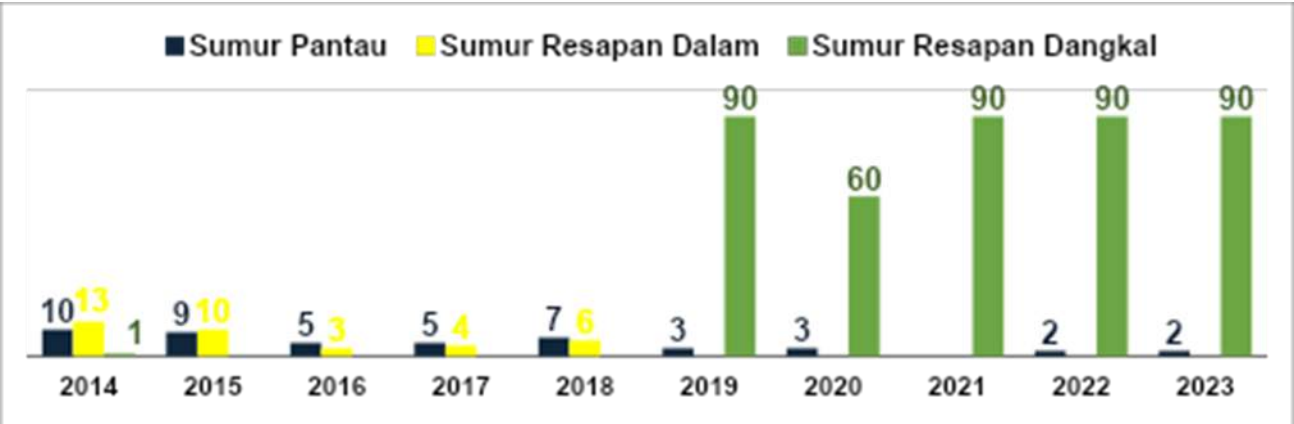
Gambar 2.87.
***Land subsidence rate in the North Coast of Central Java Indonesia
based on Sentinel-1 SAR data in 2016–2021***

Warna **biru tua** menunjukkan laju penurunan tertinggi, sementara **hijau muda** menunjukkan wilayah dengan laju penurunan yang lebih rendah atau stabil. Peta tersebut menunjukkan variasi spasial dalam laju amblesan tanah di sepanjang Pantai Utara Jawa Tengah. Secara khusus, daerah seperti Semarang, Pekalongan, dan Demak menunjukkan tingkat penurunan tanah yang mengkhawatirkan, dengan kisaran antara **- 13 hingga 5 cm per tahun**. Di bagian barat seperti **Brebes dan Tegal** serta bagian timur seperti **Pati dan Rembang**, laju penurunan cenderung lebih rendah, ditunjukkan oleh warna hijau muda dan sebagian biru muda (sekitar **-5 cm hingga -8 cm/tahun**). Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan aktivitas antropogenik seperti eksploitasi air tanah yang lebih sedikit atau kondisi geologi yang lebih stabil. Penurunan tanah paling parah cenderung terjadi di **wilayah perkotaan padat penduduk dan industri** seperti Semarang, Pekalongan, dan Demak, yang kemungkinan besar terkait dengan: **Eksplorasi air tanah secara berlebihan** sebagai sumber air baku; **Beban infrastruktur** dari urbanisasi yang pesat; **Kondisi geologi dan sedimentasi** di wilayah pesisir, di mana tanah berjenis aluvial lebih rentan mengalami pemadatan alami.

Kota-kota di sepanjang garis pantai utara Jawa, termasuk Jakarta, Pekalongan, Semarang, dan Demak, mengalami tingkat penurunan tanah yang mengkhawatirkan. Tingkat penurunan sedikitnya ~9 kali lebih cepat daripada kenaikan permukaan laut global saat ini, yang menimbulkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup perkotaan di daerah-daerah ini. (Susilo, et al., 2023.)

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi berbagai kebijakan, termasuk memperkuat regulasi penggunaan air tanah dan melarang pengambilan berlebihan di zona kritis. Program seperti pembangunan sumur resapan juga telah dilakukan untuk mengisi kembali cadangan air tanah. Kegiatan pendukung konservasi air tanah melalui penghargaan Hemat Energi dan Air di sekolah-sekolah, sebagai upaya membudayakan hemat pemakaian air juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sejalan dengan upaya tersebut, penyediaan air baku yang bersumber dari air permukaan menjadi penting untuk terus diupayakan dalam rangka solusi jangka panjang mengatasi *land subsidence*.

Selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2023, Dinas ESDM Provinsi telah membangun sebanyak 503 infrastruktur Air Tanah di tersebar di 35 kabupaten/kota, sehingga meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah. Pelaksanaan pembangunan sumur resapan dangkal sejak Tahun 2019 dilaksanakan secara padat karya melibatkan masyarakat setempat. Data pembangunan infrastruktur konservasi air tanah sebagai berikut:



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2024

Gambar 2.88.
Pembangunan Infrastruktur Konservasi Air Tanah

2.5.11. Penanggulangan Bencana

1) Wilayah Rawan Bencana

- a) Kawasan Potensi Bahaya Banjir
- Banjir didefinisikan sebagai kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya, dengan kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air (Smith & Ward 1998). Apabila suatu peristiwa terendahnya suatu wilayah oleh air yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis maka banjir tersebut dapat disebut Bencana Banjir. Berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, ukuran bahaya (*hazard*) dari banjir adalah ketinggian genangan. Total luas bahaya banjir di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 935.504 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu kelas bahaya dengan kelas rendah seluas 19.340 Ha, kelas sedang seluas 469.909 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi seluas 446.255 Ha. Kawasan berpotensi bahaya banjir dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.89.
Peta Bahaya Banjir Provinsi Jawa Tengah

Dalam peta bahaya banjir dapat kita peroleh potensi bahaya banjir dengan cakupan wilayah terluas dalam satuan Hektar. Dari tingkatan bahaya rendah terdapat Kabupaten Cilacap dengan potensi bahaya banjir mencapai luasan 2.384 Ha, tingkatan bahaya sedang adalah Kabupaten grobogan dengan luasan bahaya banjir mencapai 47.626 Ha. Sedangkan pada kelas tinggi adalah Kabupaten Demak dengan luas 53.960 Ha. Kabupaten/kota dengan potensi bahaya banjir tinggi meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal. Hanya terdapat 3 Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat bahaya banjir sedang yaitu Kabupaten Purbalingga, Karanganyar dan Kota Surakarta.

b) Kawasan Potensi Bahaya Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai. Ukuran bahaya banjir bandang mengacu pada Pedoman Pembuatan Peta Rawan Longsor dan Banjir Bandang akibat runtuhnya bendungan alam yang dibuat oleh Kementerian PU (2012) yaitu asumsi ketinggian genangan banjir bandang setinggi 5 meter. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bahaya banjir bandang.

Kawasan berpotensi bahaya banjir bandang dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.90.
Peta Bahaya Banjir Bandang Provinsi Jawa Tengah

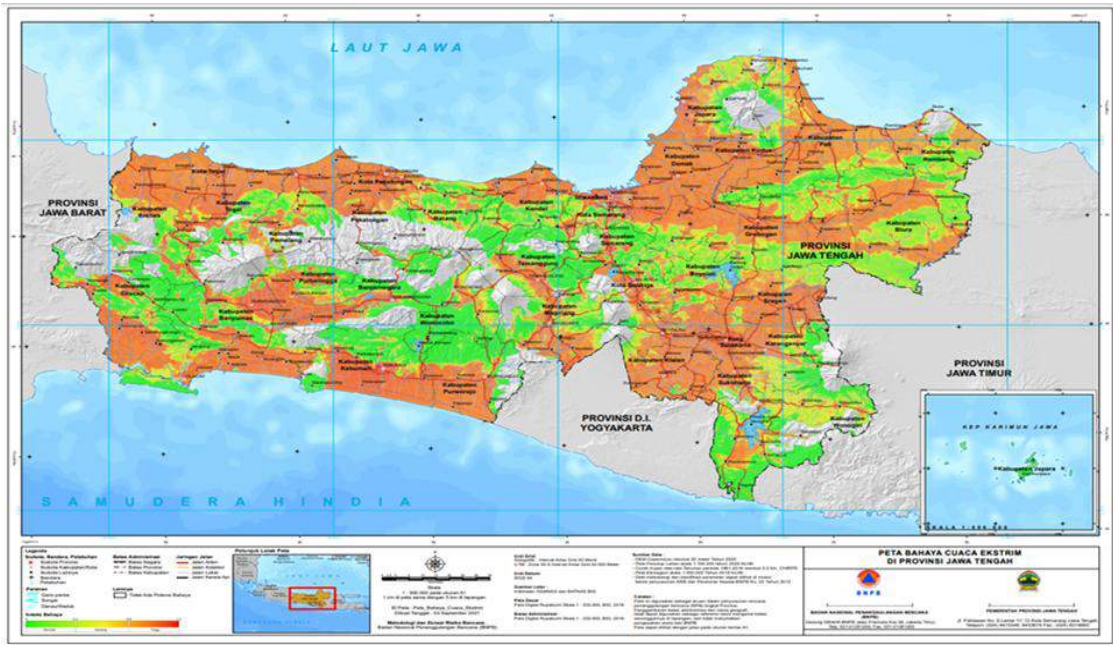
Pada peta tersebut dapat kita peroleh informasi potensi luas bahaya banjir bandang berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah seluas 104.332 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.678 Ha, kelas sedang seluas 32.757 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 58.897 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas rendah, sedang dan tinggi adalah Kabupaten Brebes dengan luas 1.465 Ha, 4.746 Ha dan 9.574 Ha.

c) Kawasan Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contoh cuaca ekstrem antara lain hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan badai taifun. Pada kajian ini pembahasan cuaca ekstrem lebih dititikberatkan kepada angin kencang. Angin kencang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (BNPB). Terjadinya angin kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertekanan udara tinggi. Pada umumnya kasus angin kencang di Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat. Kejadian tersebut dapat memicu terjadinya angin kencang.

Potensi bahaya cuaca ekstrem pada peta di bawah menunjukkan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrem di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya

cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum wilayah Provinsi Jawa Tengah terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah seluas 2.832.304 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas 997.704 Ha, pada kelas sedang seluas 324.567 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 1.510.033 Ha. Kawasan berpotensi bahaya cuaca ekstrim dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

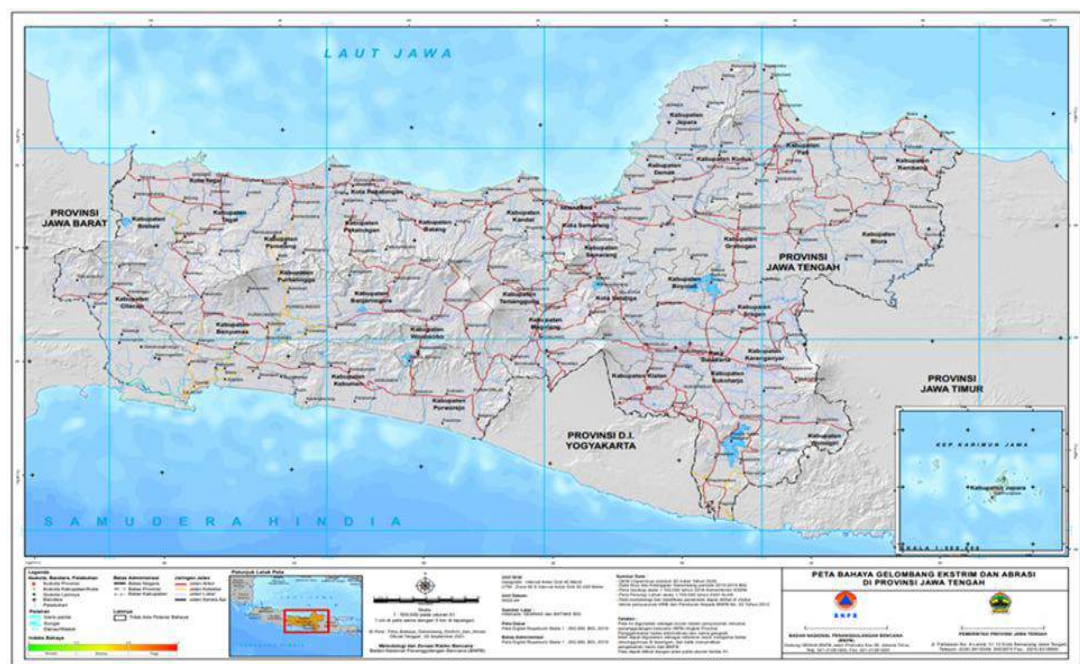
Gambar 2.91.
Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Provinsi Jawa Tengah

Pada peta tersebut dapat kita peroleh informasi Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah dengan luas 84.966 Ha adalah Kabupaten Blora. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas sedang dengan luas 37.207 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 104.032 Ha adalah Kabupaten Grobogan.

d) Kawasan Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya gelombang ekstrim dan abrasi terdiri dari

parameter tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Kawasan berpotensi bahaya bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.92.

Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Provinsi Jawa Tengah

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari gambar di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Jawa Tengah adalah 15.705 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 8.891 Ha, pada kelas sedang seluas 2.282 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 4.532 Ha. Sebaran luas bahaya di Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi, dimana Kabupaten Cilacap memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah, yaitu seluas 1.632 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas sedang adalah Kabupaten Jepara dengan luas 1.684 Ha, Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi adalah Kabupaten Cilacap, yaitu 1.027 Ha.

e) Kawasan Potensi Bahaya Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhnya batuan. Gempa dengan magnitudo yang tinggi di lokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang

lebih besar dibandingkan gempa dengan magnitudo yang lebih rendah di lokasi yang lebih dangkal. Potensi luas bahaya gempa bumi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terpapar bencana gempa bumi. Potensi bahaya gempa bumi tersebut merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Sedangkan kelas bahaya gempa bumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdampak bahaya gempa bumi. Kawasan berpotensi bahaya gempa bumi dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

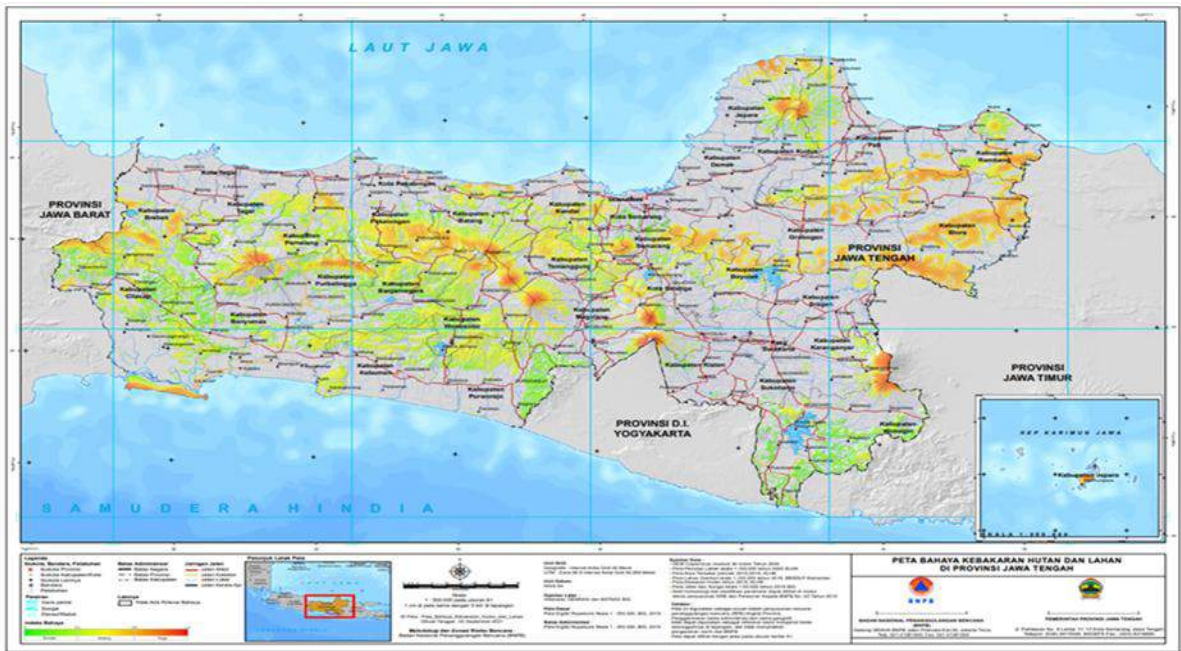
Gambar 2.93.
Peta Bahaya Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah

Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya gempa bumi tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 2.793.772 Ha, kelas sedang seluas 451.437 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya gempa bumi pada kelas tinggi seluas 31.898 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.103 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas sedang dengan luas 68.662 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas tinggi seluas 17.341 Ha adalah Kabupaten Klaten.

f) Kawasan Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Peraturan Menteri Kehutanan No P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk terbakar

misalnya pada wilayah gambut. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan lahan oleh manusia. Analisis bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkembang adalah analisis multi-kriteria yang menggabungkan beberapa parameter yang memiliki hubungan sebagai faktor penyebab terjadinya ancaman karhutla. Kawasan berpotensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnbp.go.id/>

Gambar 2.94.
Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah adalah Kabupaten Blora, Batang, Boyolali, Karanganyar, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Temanggung, Wonosobo. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 963.331 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 304.437 Ha, kelas sedang seluas 548.759 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas tinggi seluas 110.135 Ha.

g) Kawasan Potensi Bahaya Kekeringan,

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan

yang dikaji dalam dokumen ini adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun metode analisis indeks kekeringan yang dilakukan adalah *Standardized Precipitation Evapotranspiration Index* (SPEI) yang dikembangkan oleh Vicente-Serrano, dkk pada tahun 2010. Penentuan kekeringan dengan SPEI membutuhkan data curah hujan dan suhu udara bulanan dengan periode waktu yang cukup panjang. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode *Thornthwaite*, maka data suhu yang digunakan adalah hanya suhu bulanan rata-rata. Potensi bahaya kekeringan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan. Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kekeringan. Kawasan berpotensi bahaya kekeringan dapat dilihat pada peta berikut ini.



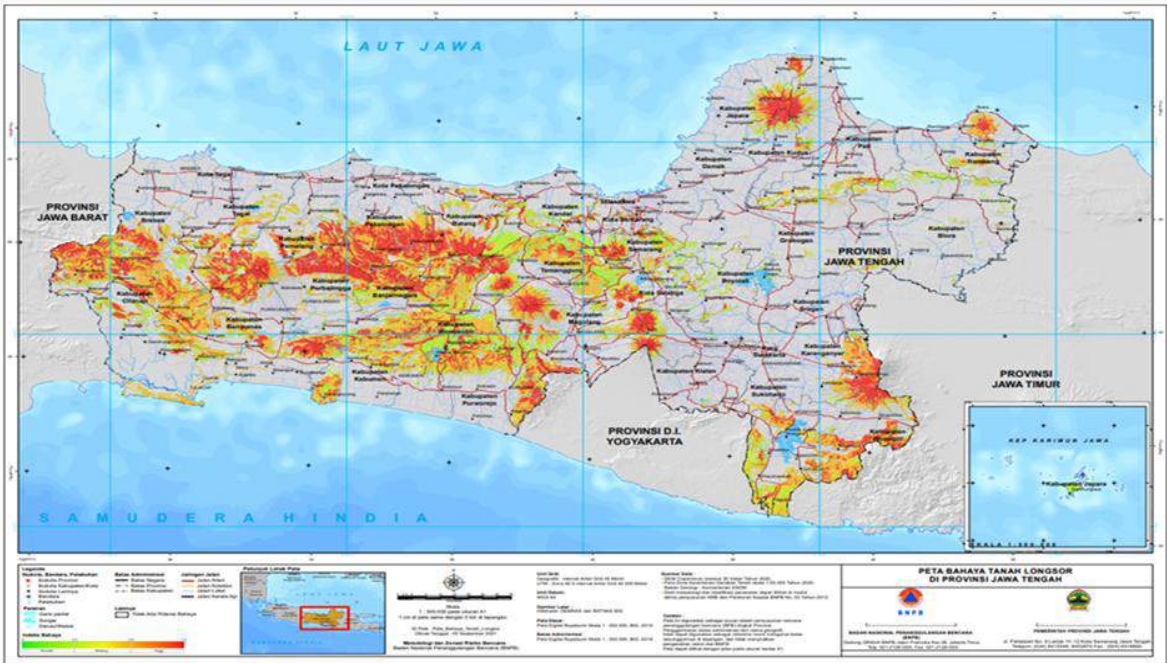
Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.95.
Peta Bahaya Kekeringan Provinsi Jawa Tengah

Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi kelas sedang seluas 2.336.056 Ha dan kelas tinggi seluas 941.051 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang dengan luas 196.387 Ha adalah Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kendal adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas tinggi seluas 107.775 Ha.

h) Kawasan Potensi Bahaya Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Peta zona gerakan tanah dari PVMBG disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah potensi longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai. Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor. Kawasan berpotensi bahaya tanah longsor dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.96.
Peta Bahaya Tanah Longsor Provinsi Jawa Tengah

Potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 1.020.772 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 78.622 Ha, kelas sedang seluas 207.456 Ha dan kelas tinggi seluas 734.693 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas rendah adalah Kabupaten Semarang dengan luas 5.959 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas sedang adalah Kabupaten Wonosobo dengan luas 24.364 Ha. Pada kelas tinggi, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor adalah Kabupaten Wonogiri dengan luas 62.658 Ha.

i) Kawasan Potensi Bahaya Tsunami

Tsunami adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ukuran bahaya tsunami yang dikaji adalah pada seberapa besar potensi *inundasi* (genangan) di daratan berdasarkan potensi ketinggian gelombang maksimum yang tiba di garis pantai. Penentuan tingkat bahaya tsunami diperoleh dari hasil perhitungan matematis yang dikembangkan oleh Berryman (2006) berdasarkan perhitungan kehilangan ketinggian tsunami per 1 meter jarak inundasi (ketinggian genangan), nilai jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan. Kejadian tsunami di Jawa Tengah pada umumnya tidak terjadi secara langsung, namun Jawa Tengah merupakan daerah yang terpengaruh dan terimbas tsunami. Kejadian tsunami di Pantai Selatan Jawa relatif tidak terlalu banyak dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kejadian tsunami pada tanggal 17 Juli 2006 yang terjadi di daerah Pangandaran dan sekitarnya hingga pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kawasan berpotensi bahaya tsunami di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



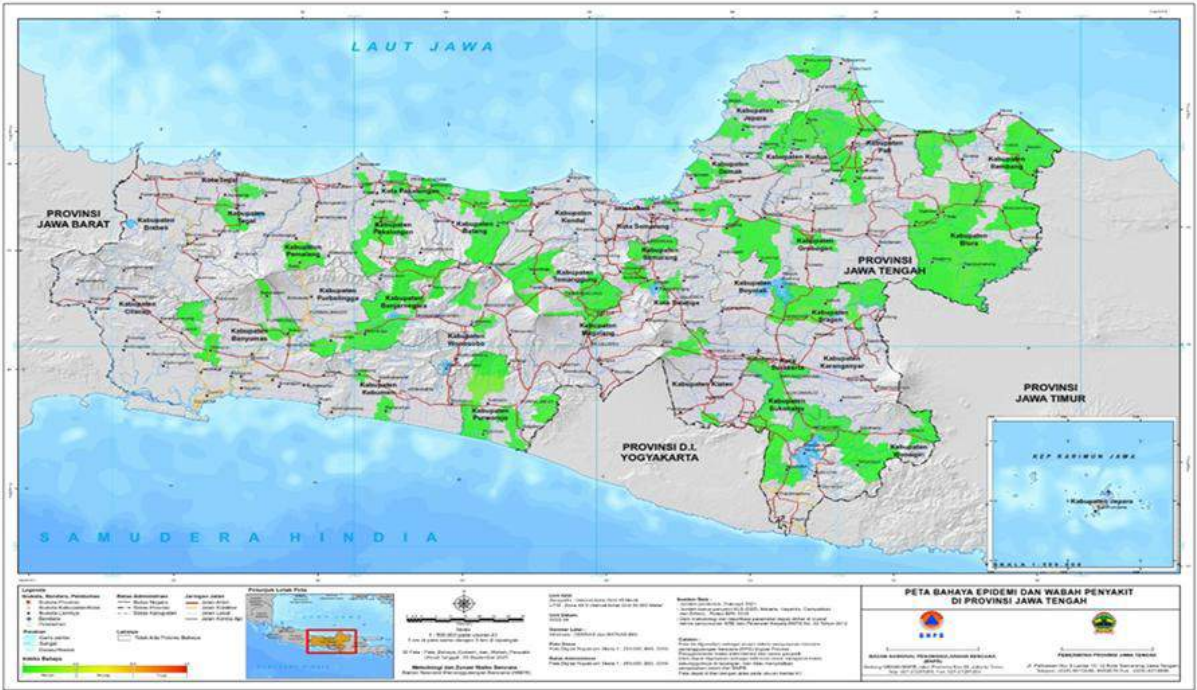
Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.97.
Peta Bahaya Tsunami Provinsi Jawa Tengah

Pantai Selatan Jawa merupakan kawasan yang rawan tsunami. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa di daerah tersebut bersinggungan langsung dengan jalur lempeng yang sering terjadi gempa bumi. Berdasarkan letak wilayah Jawa Tengah yang berbatasan dengan laut, terutama di wilayah selatan Jawa Tengah (berbatasan dengan Samudera Indonesia) daerah yang rawan terjadi tsunami, meliputi: Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tsunami pada kelas rendah seluas 3.447 Ha, pada kelas sedang seluas 2.827 Ha, dan pada kelas tinggi dengan luas 19.372 Ha.

j) Kawasan Potensi Bahaya Epidemi

Epidemi adalah suatu keadaan yang menunjukkan kejadian penyakit meningkat dalam waktu singkat dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luas. Wabah adalah kejadian suatu penyakit menular yang meningkat secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Jadi secara harfiah dalam konteks potensi bencana, Epidemi dan Wabah Penyakit (EWP) merupakan potensi ancaman bencana non-alam yang diakibatkan oleh kejadian suatu penyakit menular pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat menimbulkan dampak (risiko) kematian dan gangguan aktivitas masyarakat. Metode yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya EWP adalah metode skoring dan pembobotan terhadap parameter berbasis wilayah administrasi kecamatan. Parameter yang digunakan untuk penyusunan peta bahaya EWP adalah terjadinya kepadatan atau prevalensi dari bahaya EWP (berdasarkan data yang tersedia secara nasional), yaitu: Malaria, Demam Berdarah, Campak, Difteri, dan Hepatitis.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.98.
Peta Bahaya Epidemi Provinsi Jawa Tengah

Sebaran luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten/kota terdampak bencana epidemi dan wabah penyakit. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya epidemi dan wabah penyakit pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.386 Ha.

k) Kawasan Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-

parameter sebagai tolok ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri. Berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kegagalan teknologi yang meliputi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi. Kawasan berpotensi bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.99.
Peta Bahaya Kegagalan Teknologi Provinsi Jawa Tengah

Pada peta tersebut kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah adalah Kabupaten Boyolali seluas 3.607 Ha dan Kabupaten Cilacap adalah wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas sedang dengan luas 375 Ha.

1) Kawasan Potensi Bahaya Covid-19

Penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan pandemi global dan telah dinyatakan oleh WHO, sehingga merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala fokus kebijakan dan rekomendasi pencegahan harus diprioritaskan. Apalagi wabah penyakit Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara berdasarkan bukti ilmiah (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020). Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan penilaian risiko meliputi analisis bahaya, paparan/kerentanan dan kapasitas untuk melakukan karakteristik risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Hasil dari penilaian risiko ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan rekomendasi penanggulangan kasus Covid-19.



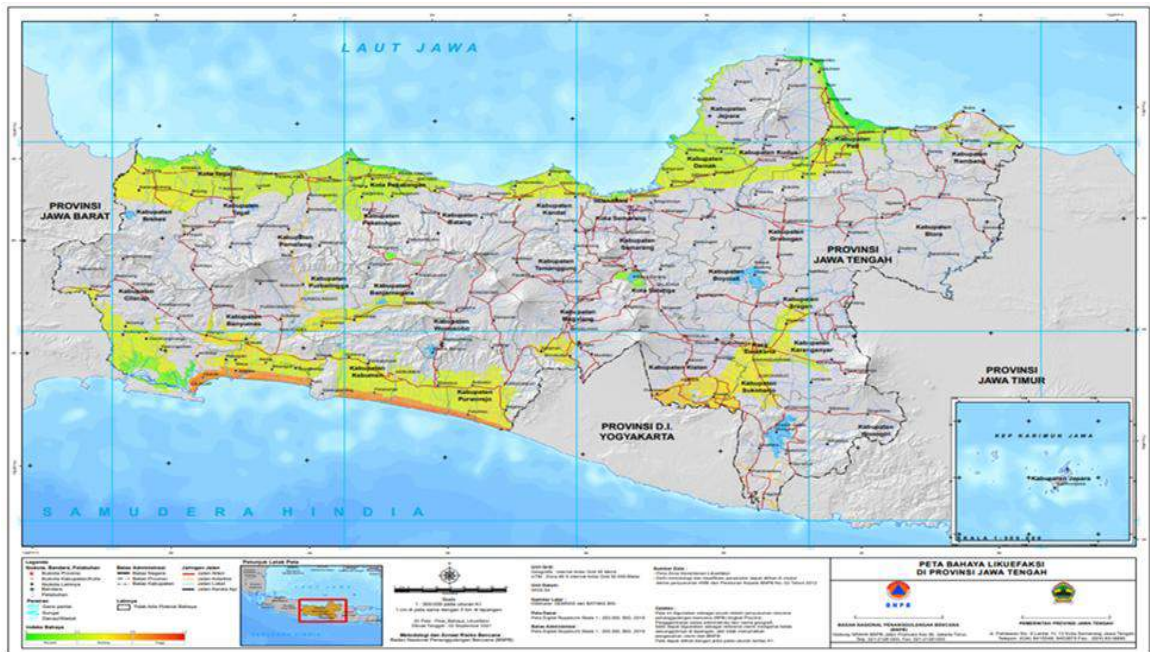
Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

Gambar 2.100.
Peta Bahaya Covid-19 Provinsi Jawa Tengah

Potensi luas bahaya Covid-19 adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Covid-19 tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 2.346.083 Ha, kelas sedang seluas 605.417 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya Covid-19 pada kelas tinggi seluas 325.608 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas rendah adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 190.358 Ha. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas sedang seluas 50.337 Ha dan pada kelas tinggi seluas 33.967 Ha adalah Kabupaten Wonogiri.

m) Kawasan Potensi Bahaya Likuifaksi

Likuifaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Akibat dari hilangnya kekuatan tanah ini dapat berupa longsor, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur, atau penurunan atau pergerakan tanah secara tiba-tiba menyebabkan daya dukung pondasi menurun dan terjadi kerusakan bangunan/infrastruktur yang lebih besar.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

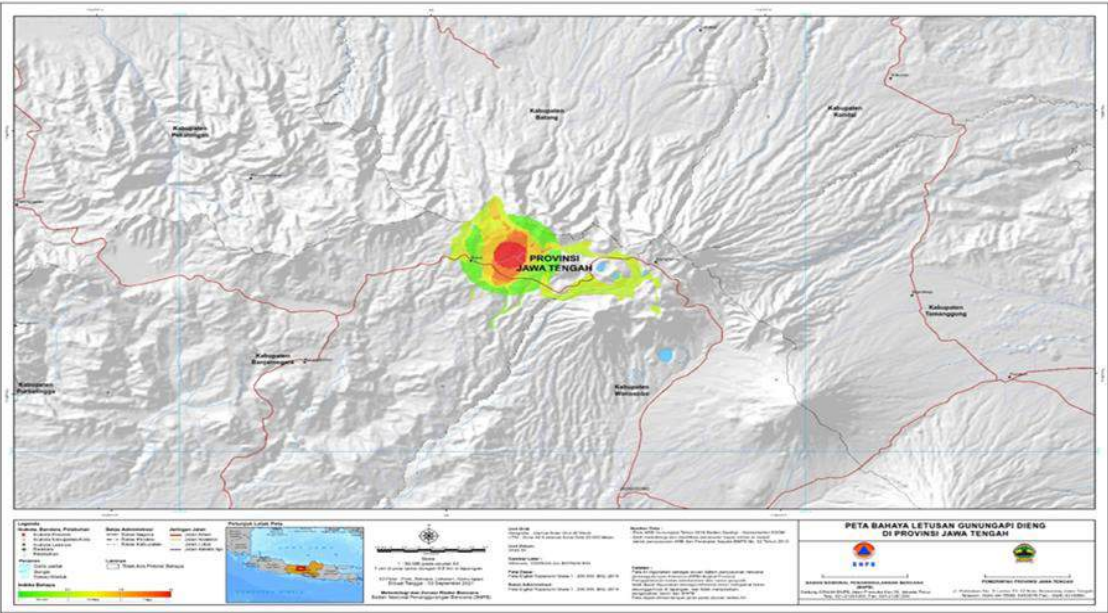
Gambar 2.101.
Peta Bahaya Likuifaksi Provinsi Jawa Tengah

Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak likuifaksi, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah kabupaten/kota terdampak. Total luas bahaya likuifaksi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 729.062 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya likuifaksi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 49.145 Ha, kelas sedang seluas 641.289 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya likuifaksi pada kelas tinggi adalah seluas 38.627 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya likuifaksi pada kelas rendah dengan luas 15.054 Ha dan pada kelas tinggi dengan luas 16.881 Ha adalah Kabupaten Cilacap. Sedangkan pada kelas sedang, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya likuifaksi adalah Kabupaten Brebes dengan luas 65.705 Ha.

n) Kawasan Potensi Bahaya Gunungapi

Gunung Api dibedakan menjadi bahaya primer (langsung) dan bahaya sekunder (tidak langsung). Bahaya primer merupakan bahaya yang diakibatkan secara langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: aliran lava, awan panas, jatuhnya piroklastik (lontaran batu pijar dan hujan abu), gas beracun, dan lahar erupsi. Sedangkan, bahaya sekunder merupakan bahaya yang diakibatkan secara tidak langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: lahar dan longsoran gunungapi.

- (1) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.816 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

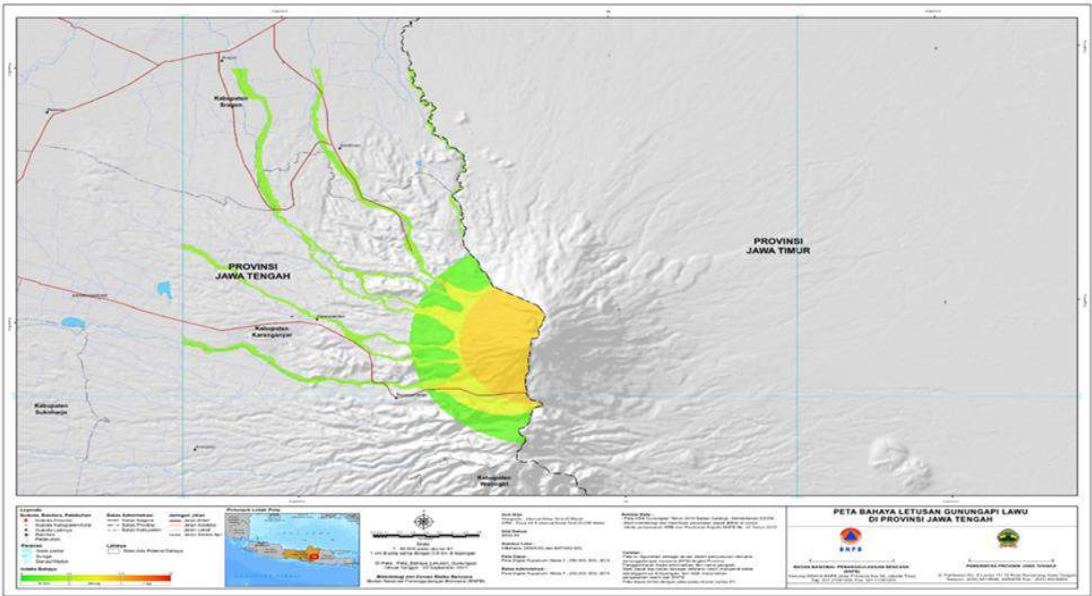


Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.102.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Dieng

Luas bahaya Letusan Gunungapi Dieng tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 1.168 Ha, kelas sedang seluas 2.054 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Dieng pada kelas tinggi seluas 594 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya letusan gunungapi pada kelas rendah seluas 1.059 Ha, kelas sedang seluas 1.304 Ha dan kelas tinggi seluas 568 Ha adalah Kabupaten Banjarnegara.

- (2) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 10.116 Ha dan berada pada kelas Sedang. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

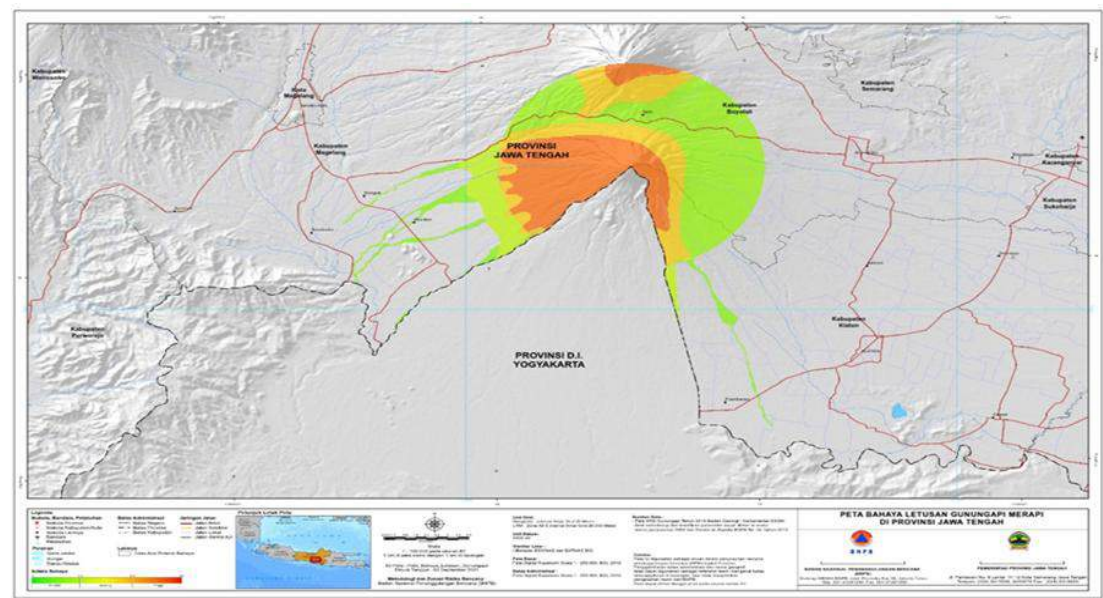


Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.103.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Lawu

Luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu tersebut dirinci menjadi 2 (dua) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 5.546 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Lawu pada kelas sedang seluas 4.570 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Lawu pada kelas rendah seluas 4.652 Ha, dan kelas sedang seluas 4.570 Ha adalah Kabupaten Karanganyar.

- (3) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah Secara keseluruhan adalah 28.239 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

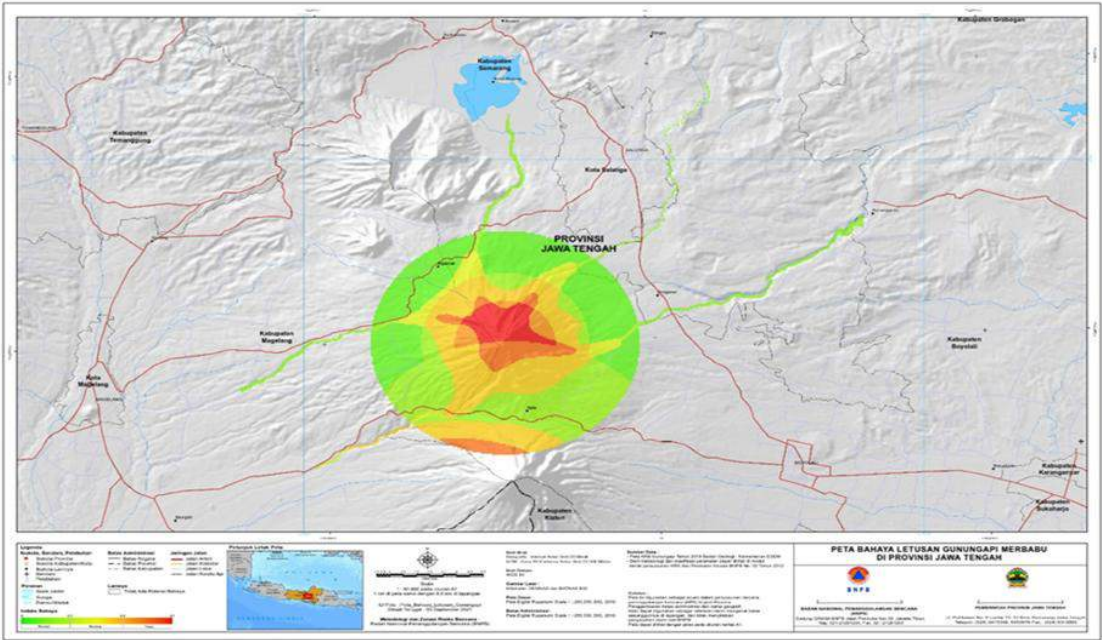


Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.104.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merapi

Berdasarkan peta diatas luas bahaya Letusan Gunungapi Merapi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.441 Ha, kelas sedang seluas 8.182 Ha, dan kelas tinggi seluas 7.616 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merapi pada kelas rendah seluas 7.957 Ha adalah Kabupaten Boyolali. Sedangkan Kabupaten Magelang adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merapi pada kelas sedang dengan luas 3.930 Ha dan kelas tinggi seluas 5.275 Ha.

- (4) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 19.819Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

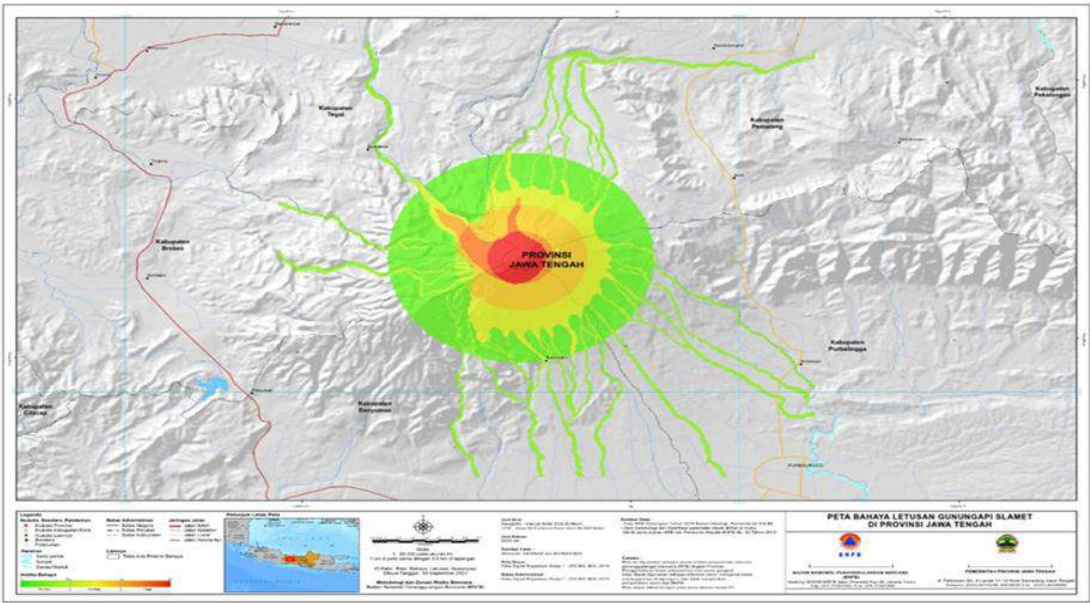


Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.105.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merbabu

Luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabu tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 11.474Ha, kelas sedang seluas 5.820 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas tinggi seluas 2.526 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas rendah seluas 4.790 Ha, kelas sedang seluas 3.163 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 1.358 Ha adalah Kabupaten Boyolali.

- (5) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 22.740 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

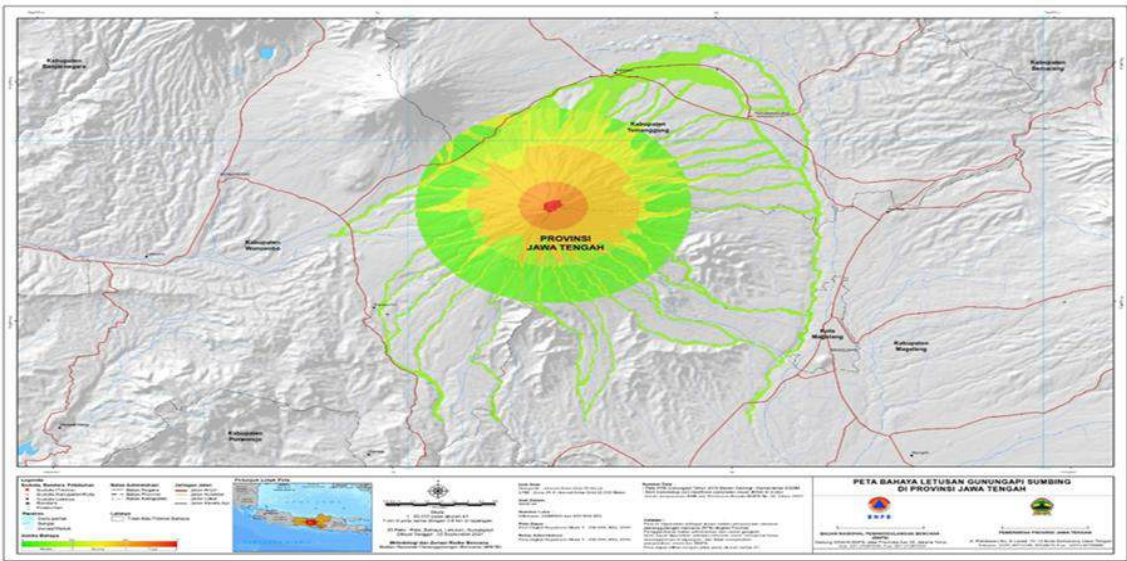


Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.106.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Slamet

Berdasarkan peta tersebut luas bahaya Letusan Gunungapi Slamet tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 14.631 Ha, kelas sedang seluas 6.288 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 1.820 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas rendah seluas 3.905 Ha dan kelas sedang seluas 2.533 Ha adalah Kabupaten Banyumas. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 723 Ha adalah Kabupaten Pematang.

- (6) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 25.650 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



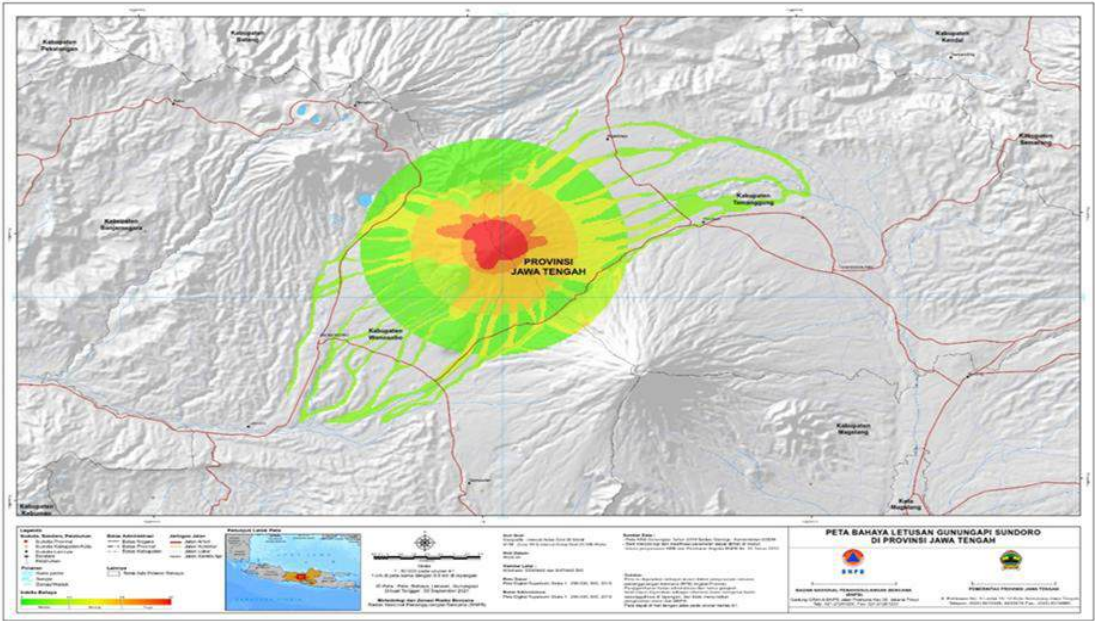
Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.107.

Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sumbing

Luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbing tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 16.553 Ha, kelas sedang seluas 7.876 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas tinggi seluas 1.221 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas rendah seluas 6.681 Ha, pada kelas sedang seluas 4.443 Ha dan kelas tinggi seluas 563 Ha adalah Kabupaten Temanggung.

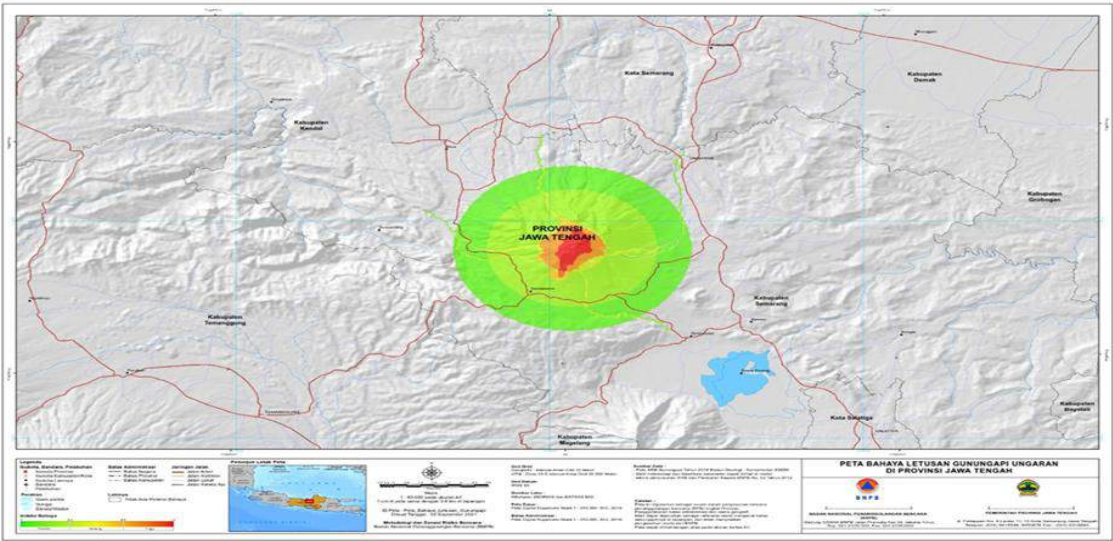
- (7) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Sundorodi Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 23.580 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Sindoro di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.108.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sindoro

- (8) Luas bahaya Letusan Gunungapi Sindoro tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.468 Ha, kelas sedang seluas 8.372 Ha, dan kelas tinggi seluas 1.739 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sindoro pada kelas rendah dengan luas 8.236 Ha dan kelas tinggi seluas 981 Ha adalah Kabupaten Wonosobo. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sundoro pada kelas sedang adalah Kabupaten Temanggung dengan luas 4.474 Ha.
- (9) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan seluas 15.404 Ha dan berada pada kelas tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Sindoro di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.109.
Peta Bahaya Letusan Gunung Api Ungaran

Luas bahaya Letusan Gunungapi Ungaran tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.787 Ha, kelas sedang seluas 526 Ha dan kelas tinggi seluas 1.091 Ha. Kabupaten Semarang merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Ungaran pada kelas rendah seluas 9.254 Ha, sedang seluas 312 Ha dan pada kelas tinggi seluas 617 Ha.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 (sepuluh) kawasan rawan bencana. Adapun data rumah korban terdampak bencana di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.134.
Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Jumlah
1	Banjarnegara	11	22	12	131	176
2	Banyumas	16	3	3	77	99
3	Batang	2	13	30	230	275
4	Blora	9	17	24	51	101
5	Boyolali	11	4	39	47	101
6	Brebes	10	35	26	50	121
7	Cilacap	25	19	13	228	285
8	Demak	11	25	0	66	102
9	Grobogan	17	22	9	348	396
10	Jepara	10	0	15	275	300
11	Karanganyar	19	13	37	123	192
12	Kebumen	17	32	4	1.718	1771
13	Kendal	11	1	1	40	53
14	Klaten	26	4	48	280	358
15	Kota Magelang	4	0	0	30	34
16	Kota Pekalongan	2	0	0	0	2
17	Kota Salatiga	12	7	8	80	107
18	Kota Semarang	6	24	9	41	80
19	Kota Surakarta	11	0	0	8	19
20	Kota Tegal	12	1	2	30	45
21	Kudus	7	1	0	34	42
22	Magelang	12	16	4	210	242
23	Pati	5	3	17	111	136
24	Pekalongan	5	7	6	7	25
25	Pemalang	3	0	2	28	33
26	Purbalingga	7	1	0	0	8
27	Purworejo	5	0	0	0	5
28	Rembang	13	2	2	6	23
29	Semarang	15	1	0	64	80
30	Sragen	7	0	5	52	64
31	Sukoharjo	13	1	17	183	214
32	Tegal	5	2	9	47	63
33	Temanggung	6	0	0	42	48
34	Wonogiri	9	24	40	107	180
35	Wonosobo	0	0	0	0	0
	TOTAL	354	300	382	4.744	5780

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024

Kejadian bencana di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2020-2024 terjadi fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan di tahun 2023 dan 2024, penurunan kejadian bencana dari 2.396 kejadian di 2022 menjadi 354 kejadian di tahun 2024. Selama periode tersebut, kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang meliputi kebakaran, banjir, tanah longsor, dan angin topan. Dari total desa/kelurahan di Jawa Tengah teridentifikasi sejumlah 1.674 desa/kelurahan (19,6 persen) dari total 8.563 desa/kelurahan di Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir dan 2.136 desa/kelurahan (25 persen) rawan tanah longsor.

Tabel 2.135.
Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020– 2024

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angin topan	629	439	671	115	125
2	Banjir	459	242	374	131	87
3	Gas beracun	2	0	0	0	0
4	Gempa bumi	2	5	4	12	1
5	Kebakaran	356	229	312	491	80
6	Kekeringan	0	0	0	34	33
7	Letusan gn.Api	12	5	1	8	0
8	Tanah longsor	387	0	1.010	126	28
9	Tsunami	0	0	0	0	0
10	Gelombang pasang	3	6	24	29	0
Jumlah		2.870	1.753	2.396	946	354

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pada tahun 2024 jumlah korban jiwa yang meninggal dunia maupun hilang dan luka - luka meningkat dibanding tahun sebelumnya, dengan 34 korban meninggal dunia, 3 hilang dan 49 luka ringan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Tabel 2.136.
Jumlah Korban Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana	Jumlah Korban (Orang)			
		Meninggal Dunia	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan
2020	2.870	32	3	15	91
2021	1.753	34	5	14	73
2022	2.440	22	2	27	100
2023	946	8	1	20	54
2024	354	34	3	-	49
Jumlah		130	14	76	367

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Taksiran kerugian akibat bencana pada tahun 2020-2024 didominasi oleh bencana yang diakibatkan oleh kebakaran baik lahan maupun pemukiman warga, sedangkan taksiran kerugian akibat kebakaran di tahun 2024 sebesar

51,218 miliar rupiah dan kerugian keseluruhan akibat bencana sebesar 78,303 miliar rupiah. Data tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.137.
Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah
Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Bencana	2020		2021		2022		2023		2024	
		Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)
1	Angin Topan	629	5.469.095	437	4.288.779	671	6.267.966	115	1.585.200	125	9.136.177
2	Banjir	459	32.798.305	242	44.106.000	374	2.367.000	132	412.500	87	14.713.384
3	Tanah Longsor	1.387	16.806.207	740	7.098.159	1.010	7.052.281	126	2.473.680	28	1.694.753
4	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kebakaran	356	18.779.138	229	52.965.785	312	217.955.599	491	690.600	80	51.218.500
6	Gempa Bumi	2	0	5	0	4	0	0	1.115.000	1	1.540.775
7	Letusan Gunung Api	12	0	5	0	1	0	0	0	0	0
8	Ombak Besar	23	0	6	45.000	24	25.000	0	0	0	0
9	Lainnya	2	0	46	131.687,50	44	581.000	0	0	0	0
	Jumlah	2.870	73.582.747	1.753	108.823.410	2.440	234.248.846	946	6.276.980	354	78.303.589

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.



Sumber: BNPB, IRBI 2024

Gambar 2.110.
Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah mendasarkan indeks rawan dan risiko bencana yang diterbitkan BNPB termasuk provinsi dengan indeks bencana sedang. Indeks risiko bencana 2024 Provinsi Jawa Tengah dengan nilai skor 99,61 dengan kategori sedang.

Tabel 2.138.
Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Skor	Kategori
1	2020	132,99	Sedang
2	2021	125,73	Sedang

No.	Tahun	Skor	Kategori
3	2022	115,38	Sedang
4	2023	109,01	Sedang
5	2024	99,61	Sedang

Sumber: BNPB, IRBI 2024.

Pada Tahun 2023, 3 Kabupaten yang memiliki kelas risiko tinggi yaitu Kabupaten Brebes, Pati dan Pekalongan berhasil menurunkan risiko di wilayahnya menjadi kelas sedang, sehingga di Tahun 2024 seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki risiko bencana dengan kategori sedang. Adapun Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Kabupaten Brebes mendapat urutan tertinggi untuk indeks risiko bencana dengan urutan 1 Provinsi Jawa Tengah dengan nilai skor 143,69.

Tabel 2.139.

Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KELAS RISIKO 2024
1	BREBES	211.20	211.20	211.20	211.20	211.20	189.94	189.94	171.01	155.35	143.69	SEDANG
2	PATI	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	171.10	171.10	165.53	150.21	138.20	SEDANG
3	PEKALONGAN	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	172.56	160.19	168.52	149.83	131.25	SEDANG
4	BATANG	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	161.93	154.49	143.13	128.70	SEDANG
5	KEBUMEN	203.20	165.76	151.08	140.31	131.45	114.67	114.67	102.05	110.78	121.38	SEDANG
6	PURBALINGGA	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	148.12	139.78	130.82	120.19	SEDANG
7	JEPARA	163.20	163.20	163.20	163.20	163.20	148.77	135.11	122.27	129.86	119.49	SEDANG
8	REMBANG	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	151.12	131.73	117.89	126.95	114.24	SEDANG
9	PURWOREJO	215.20	215.20	215.20	215.20	215.20	190.01	163.63	144.57	127.62	114.09	SEDANG
10	TEGAL	212.80	212.80	212.80	212.80	212.80	181.08	158.93	141.32	126.26	113.79	SEDANG
11	BLORA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	135.33	123.19	113.90	119.58	112.03	SEDANG
12	KOTA PEKALONGAN	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	138.13	138.13	138.13	122.75	110.42	SEDANG
13	BANYUMAS	207.20	207.20	207.20	207.20	207.20	193.71	164.25	140.18	122.82	109.01	SEDANG
14	TEMANGGUNG	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	134.51	121.33	110.38	116.84	105.76	SEDANG
15	PEMALANG	206.00	206.00	206.00	185.70	185.70	165.97	146.38	128.55	115.11	105.46	SEDANG
16	BANJARNEGARA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	127.36	127.36	107.61	121.40	103.28	SEDANG
17	Sragen	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	133.75	126.18	114.91	102.93	SEDANG
18	CILACAP	215.20	172.90	157.92	138.61	124.20	112.75	112.75	103.72	96.93	97.79	SEDANG
19	MAGELANG	143.20	96.86	90.82	90.82	81.07	71.16	71.16	77.90	86.49	97.42	SEDANG
20	BOYOLALI	159.20	159.20	159.20	159.20	159.20	130.32	130.32	130.32	110.06	94.67	SEDANG
21	KOTA SEMARANG	183.60	124.72	124.72	120.75	113.83	115.52	108.63	103.49	99.41	94.31	SEDANG
22	KOTA MAGELANG	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	102.08	93.35	SEDANG
23	DEMAK	183.60	138.20	127.42	118.21	118.21	105.77	105.21	103.88	97.71	91.76	SEDANG
24	KARANGANYAR	130.40	130.40	130.40	130.40	130.40	108.03	108.03	91.51	102.77	87.71	SEDANG
25	WONOGIRI	145.60	145.60	145.60	145.60	145.60	124.77	124.77	108.91	97.24	86.79	SEDANG
26	KENDAL	167.20	156.80	142.49	124.57	111.20	98.97	100.40	97.90	91.74	86.54	SEDANG
27	GROBOGAN	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	154.66	131.66	111.59	97.03	85.91	SEDANG
28	KOTA TEGAL	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	116.80	105.36	94.56	84.44	SEDANG
29	SEMARANG	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	118.89	118.89	101.79	89.67	80.78	SEDANG
30	KUDUS	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	130.59	119.71	102.40	90.23	79.75	SEDANG
31	KLATEN	123.20	123.20	123.20	123.20	123.20	99.24	99.24	82.18	94.09	78.56	SEDANG
32	KOTA SALATIGA	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	90.89	83.98	76.52	SEDANG
33	WONOSOBO	135.20	135.20	135.20	122.94	122.94	122.94	102.83	87.55	76.24	67.98	SEDANG
34	SUKOHARJO	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	81.29	71.27	64.18	SEDANG
35	KOTA SURAKARTA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	67.96	67.96	57.17	49.50	43.99	SEDANG

Sumber: BNPB, IRBI 2024.

Untuk menurunkan nilai indeks risiko bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya mitigasi struktural maupun non-struktural. Upaya mitigasi struktural dilakukan antara lain melalui pemasangan

sistem peringatan dini (*early warning system/EWS*) berbasis masyarakat dan penempatan rambu-rambu jalur evakuasi di lokasi rawan bencana. Sampai dengan tahun 2024, telah terpasang sebanyak 107 unit peralatan EWS dan 522 unit rambu jalur evakuasi.

Tabel 2.140.
Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2024

Tahun	EWS			Rambu Jalur Evakuasi
	BPBD	ESDM	Total EWS Terpasang (Akumulatif)	
2020	1	-	76	-
2021	10	-	86	347
2022	3	-	89	377
2023	4	-	93	417
2024	14	-	107	522

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Implementasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) yang dilakukan oleh Jawa Tengah antara lain melalui pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana. Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Dengan adanya Desa/kelurahan tangguh bencana, warga desa akan mampu mengenali karakter wilayah, potensi kebencanaan, dan cara penanganannya. Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 247 desa, dari total seluruh desa/kelurahan sebanyak 8.563 desa/kelurahan di Jawa Tengah.

Tabel 2.141.
Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2020 - 2024

Tahun	Desa Tangguh Bencana yang dibentuk per Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Terbentuk
2020	3	95 desa
2021	30	125 Desa
2022	7	132 Desa
2023	57	189 Desa
2024	58	247 Desa

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Tabel 2.142.
Data Bantuan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Jumlah Kejadian	Roboh	Rusak Berat	Nominal
1	2020	7	60	18	1.080.000.000
2	2021	7	206	122	4.310.000.000

No	Tahun	Jumlah Kejadian	Roboh	Rusak Berat	Nominal
3	2022	4	9	120	1.335.000.000
4	2023	5	22	31	480,000,000
5	2024	12	125	36	2.735.000.000
	Total	44	699	361	14.435.000.000

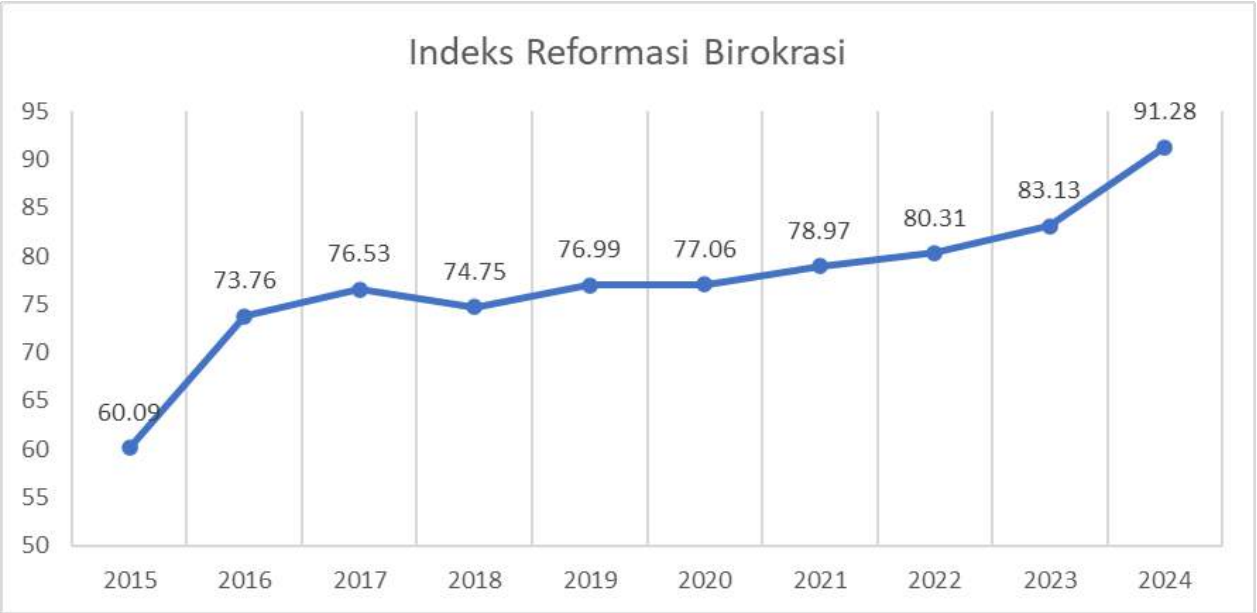
Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

2.6. Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan meliputi berbagai unsur pendukung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan. Secara umum kinerja tata kelola pemerintahan ditangkap melalui pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Implementasi tata kelola pemerintahan daerah diwujudkan dengan pelayanan publik yang baik didukung dengan manajemen organisasi dan sumberdaya aparatur, serta dukungan fungsi-fungsi pendukung pemerintahan lainnya. Gambaran kondisi tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut.

2.6.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menunjukkan tren positif. Capaian pada tahun 2024 mencapai angka 91,28 meningkat 8,15 dari nilai tahun 2023 yang sebesar 83,13. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan sesuai dengan *roadmap* nasional.



Sumber: Kemenpan RB, 2023

Gambar 2.111.
Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

Konsep reformasi birokrasi sejak tahun 2023 berubah menjadi reformasi birokrasi tematik, yaitu reformasi birokrasi yang lebih berdampak dengan memfokuskan perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas. Konsep baru tersebut mengelompokkan pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi dua jenis yaitu reformasi birokrasi general yang meliputi aktivitas reformasi birokrasi pada

konsep sebelumnya dan reformasi birokrasi tematik yang meliputi aktivitas perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas. Adapun tema-tema yang diprioritaskan terdiri atas 5 tema yaitu;

- a. Pengentasan kemiskinan;
- b. Digitalisasi pemerintahan (fokus stunting);
- c. Peningkatan investasi;
- d. Pengendalian inflasi;
- e. Penggunaan produk dalam negeri.

Hasil evaluasi Kemenpan-RB pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah mencapai nilai 81,07 dari skala 100 untuk reformasi birokrasi general dan 10,21 dari skala 20 untuk reformasi birokrasi tematik. Terdapat beberapa catatan dalam evaluasi reformasi birokrasi yang perlu mendapat perhatian, pada aspek general, meliputi: tingkat keberhasilan pembangunan ZI, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan pembangunan statistik; sedangkan pada aspek tematik, meliputi: capaian dampak pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, digitalisasi pemerintahan fokus stunting, pengendalian inflasi, dan capaian pelaksanaan implementasi SPBE.

Salah satu upaya perwujudan reformasi birokrasi adalah penataan regulasi dengan pelaksanaan reformasi hukum. Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada pemerintah daerah. Walaupun capaian IRH sudah masuk dalam kategori AA (Istimewa), kondisi regulasi di Jawa Tengah masih perlu dilakukan penataan khususnya dengan beberapa permasalahan antara lain kondisi hiperegulasi. Kondisi hiperegulasi merujuk pada keadaan di mana terdapat terlalu banyak produk hukum atau regulasi yang tumpang tindih, tidak sinkron, atau bahkan bertentangan satu sama lain. Dari data produk hukum Jawa Tengah yang diakses pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah, jumlah peraturan perundang undangan dari tahun 2014-2025 sebanyak 137 peraturan daerah dan 774 peraturan gubernur

Kondisi regulasi di Jawa Tengah banyak pula yang berpotensi mengalami permasalahan ketidafektifan dalam pelaksanaannya sehingga berdampak pada regulasi ditinggal oleh masyarakat, regulasi tidak dapat berjalan dengan baik, daya guna dan hasil guna regulasi masih rendah dan regulasi tidak memberi kepastian hukum. Dalam rangka menghadapi permasalahan tersebut, telah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum yang telah berlaku untuk menilai pelaksanaan suatu produk hukum. Namun demikian, belum diikuti dengan adanya analisis dan evaluasi kebutuhan penyusunan regulasi, sehingga dalam merencanakan penyusunan regulasi masih tidak terarah bahkan regulasi yang dibentuk tidak jarang belum selaras dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

2.6.2. Pelayanan Publik

Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, berkualitas, terjangkau, dan teratur sesuai dengan harapan masyarakat.

Kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat melalui Indeks Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB melalui proses yang disebut Pemantauan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPP). PEKPP dilakukan secara tahunan oleh KemenPAN-RB dengan metode sampling unit pelayanan publik (UPP) yang mewakili sektor pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Selain itu PEKPP juga dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sampling yang lebih luas dimaksudkan sebagai sarana pembinaan disamping sarana evaluasi. Indeks ini mengukur kualitas pelayanan publik melalui 6 aspek yaitu 1) aspek kebijakan pelayanan, 2) aspek profesionalisme SDM, 3) aspek sarpras, 4) aspek system informasi pelayanan publik, 5) aspek konsultasi dan pengaduan, dan 6) aspek inovasi.

Capaian kinerja pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Jika dilihat perkembangan nilai awal tahun 2018 yang sebesar 4,22 dan nilai akhir 2024 sebesar 4,53. Pelayanan publik di Jawa Tengah diketahui memiliki kelemahan yang masih perlu diperbaiki di tengah tren kenaikan indeks pelayanan publik. Hasil penilaian ini menunjukkan perlunya bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan strategi dalam mengembangkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Tabel 2.143.
Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

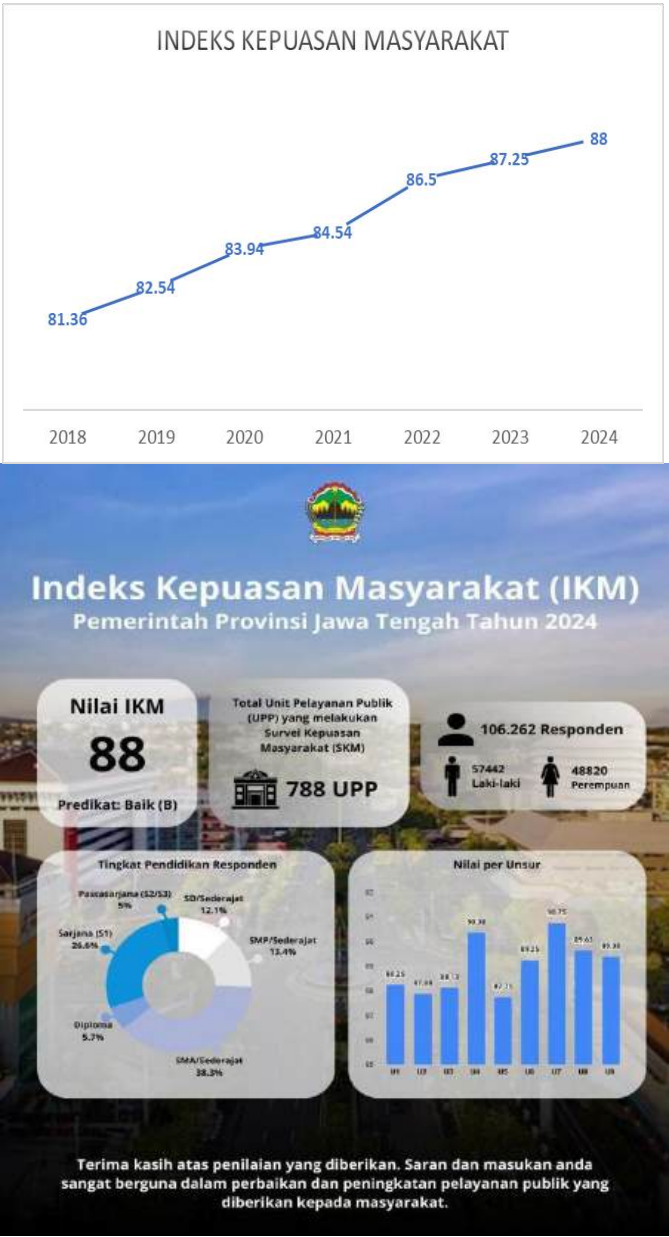
IPP	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Jawa Tengah	4,22	4,46	4,45	4,48	4,54	4,11	4,53
OPD sample							
RSUD Provinsi	4,72	4,74	n/a	n/a	n/a	4,66	4,62
PTSP Provinsi	4,11	4,3	4,41	4,46	4,56	n/a	n/a
Bapenda/Samsat	3,84	4,33	4,49	4,5	4,51	4,01	4,52
Dinas Sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,65	4,46



Sumber : Kemenpan RB, 2024

Gambar 2.112.
Hasil Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023

Selain IPP yang mengukur dari segi *supply* atau penyedia layanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan untuk melengkapi informasi dari sisi *demand* atau penerima layanan publik. Indeks ini diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diisi oleh penerima layanan publik. Selama kurun waktu tahun 2018 – 2023 IKM terus mengalami peningkatan secara konsisten. Hal ini menunjukkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan publik yang terekam melalui SKM menunjukkan peningkatan penerimaan yang positif.



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.113.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

2.6.3. Demokrasi

Keberadaan pemilihan umum atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun hal tersebut merupakan satu bagian yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dapat mengubah arah politik maupun arah kebijakan publik. Tahun 2024 menjadi pelaksanaan pemilu serentak kedua setelah pertama kali diterapkan di tahun 2019, kembali dipilih

DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden, yang menandai keberhasilan Indonesia melaksanakan penyederhanaan pemilu, karena pilkada pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dilaksanakan juga pada tahun yang sama. Upaya ini sejalan dengan semangat penyederhanaan pemilu yang digagas sejak beberapa tahun sebelumnya. Sinkronisasi jadwal pelaksanaan pemilu ini dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan dari sisi waktu, tenaga, dan biaya, serta konsentrasi masyarakat pada pemilu dapat difokuskan pada tahun yang sama.

Aspek lain untuk melihat kualitas demokrasi selain Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah partisipasi politik. Partisipasi Politik paling mudah diukur melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilih. Hal ini sesuai dengan konsep partai politik karena partisipasi politik merupakan segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam menentukan keputusan atau kebijakan. Secara umum partisipasi politik digolongkan menjadi dua, yaitu; (1) konvensional seperti memilih dalam pemilu atau diskusi-diskusi politik, dan; (2) nonkonvensional seperti demonstrasi dan mogok. Tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa di negaranegara demokrasi, rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan bersedia melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa pemerintahan terpilih memiliki legitimasi tinggi. Pada umumnya, partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi pemerintahan yang rendah pula.

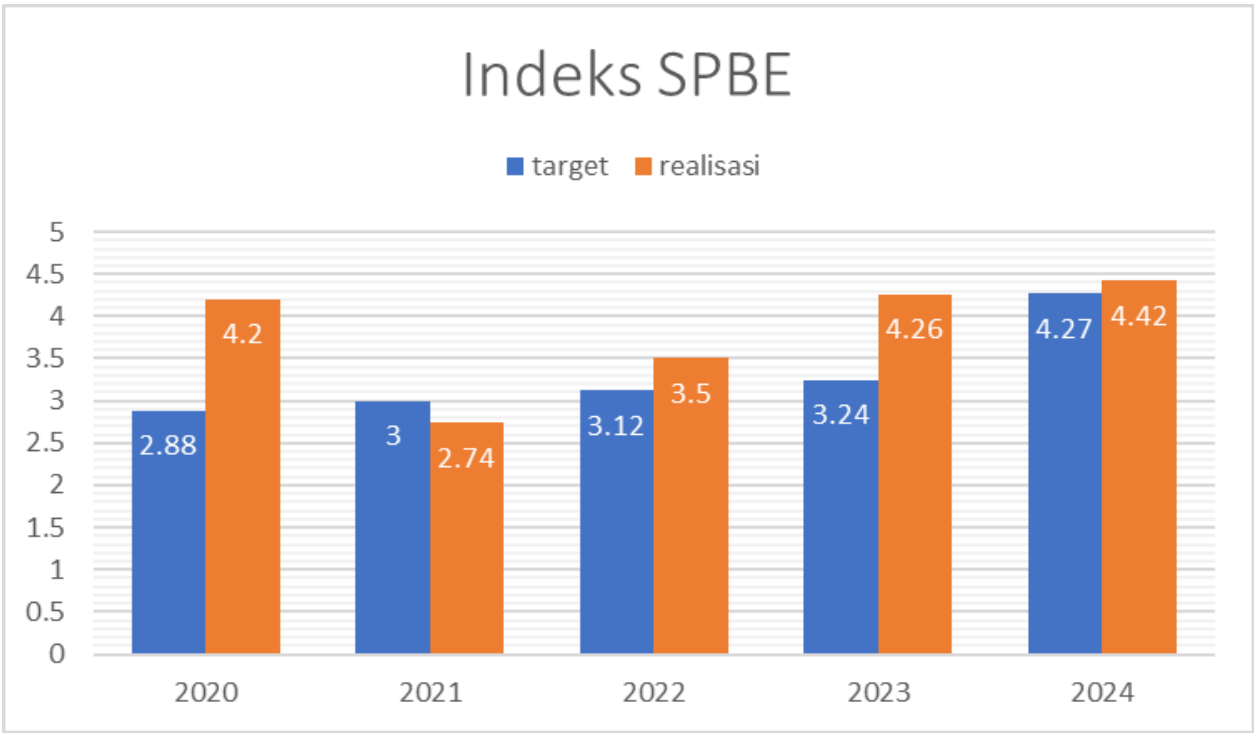
Provinsi Jawa Tengah terkait partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa (selain Provinsi DIY yang tidak melaksanakan Pilkada 2024), dimana Provinsi Jawa Tengah memiliki persentase 73,04% terkait partisipasi pemilih.

Secara garis besar, Kualitas Demokrasi di Indonesia menggunakan perhitungan yang dilakukan sejak tahun 2019 oleh BPS yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 mengalami kenaikan dimana Pada Tahun 2025 nilainya 85.84, naik 4,97 point dari tahun 2024 dengan keseluruhan aspek mengalami kenaikan positif. Hal yang paling krusial adalah pada partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan yang naik signifikan sebesar 41.67 point dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan terus menerus oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Jawa Tengah.

2.6.4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan *e-Government* memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan *e-Government*/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Terkait digitalisasi pemerintahan telah dilakukan pembangunan infrastruktur TIK seperti pembangunan jaringan *Fiber Optic*, pengadaan *server* dan *storage*; pengadaan sarana dan prasarana studio visual - ruang Multi Media Center (MMC), pembangunan pusat data, sewa internet dan

sewa aplikasi analisis media serta, sarpras layanan keamanan informasi. Pembangunan infrastruktur diatas antara lain untuk kegiatan operasional komunikasi dan koordinasi pemecahan masalah-masalah pembangunan (*video conference*, iklan layanan dan, layanan aduan) dan penyediaan portal data. Keseriusan pembangunan TIK dan aplikasi pemanfaatannya telah membuahkan hasil lonjakan capaian Indeks SPBE sepanjang 2020-2024.



Sumber : Kemenpan RB, 2024.

Gambar 2.114.
Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Provinsi Jawa Tengah menunjukkan prestasi capaian SPBE. Bahkan, indeks SPBE Pemprov Jateng menunjukkan peningkatan, meskipun sempat mengalami capaian diatas target pada Tahun 2020 dan mengalami penurunan Tahun 2021 (akibat bertambahnya indikator penilaian yaitu Sub Domain Manajemen SPBE). Secara berturut indeks SPBE Jateng tahun 2020 sebesar 4,20; 2021 sebesar 2,74, kemudian 2022 sebesar 3,34 dan; 2023 sebesar 4,26. Hasilnya, berdasarkan Kepmen PanRB Nomor 663 tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE tahun 2024 menunjukkan, capaian indeks SPBE untuk Provinsi Jawa Tengah semakin mantap dari capaian predikat memuaskan (4,26) terbaik nasional pada Tahun 2023 menjadi 4,42.



Sumber: Diskominfo, 2024.

Gambar 2.115.
Penghargaan tertinggi Nasional SPBE Summit 2024
dan Peluncuran GovTech Indonesia

Capaian ini telah mendapatkan penghargaan tertinggi Nasional SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. akan optimis bisa mencapai target tahun baseline 2025 dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 sebesar 4,50 dan target akhir SPBE 2045 sebesar 5,00. Rincian Sub Domain yang telah diatas 4,00 (memuaskan) capaiannya yaitu: untuk domain kebijakan mencapai 4,90, domain tata Kelola mencapai 4,20, domain manajemen mencapai 3,45, dan domain layanan mencapai 4,75 semakin menguatkan optimisme tersebut.

Capaian SPBE yang telah melampaui target tersebut tidak lepas dari seriusnya pemerintah daerah melakukan perbaikan SPBE melalui berbagai kegiatan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian sbb.

1) Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika telah dilaksanakan 2 program dan 4 kegiatan. Keempat Kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan targetnya. Kedua program meliputi: Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik didukung alokasi anggaran 26,367 miliar rupiah dengan realisasi fisik 100 persen dan keuangan 98,43 persen dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika didukung anggaran 13,502 miliar rupiah dengan realisasi fisik 100 persen dan keuangan 99,39 persen.

Adapun pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik didukung kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan keluaran 170 konten informasi publik yang disebarluaskan, beberapa diantaranya yaitu konten informasi untuk hoaks, konten tema stunting, hingga konten mengenai Pilkada Bersih. Permasalahan yang dihadapi yaitu semakin banyak beredarnya informasi dengan sentimen negatif di masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring di media online, cetak, tv, sosial, dan radio serta penyusunan laporan analisis dan rekomendasi publikasi, serta melaksanakan Dialog Opini Publik dengan tema Monitoring dan Analisis Media ke 35 Kab/Kota di Jawa Tengah. Capaiannya sbb:

Tabel 2.144.
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

No	Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik						
1	Nilai survey kepuasan komunikasi publik	Angka	n/a	n/a	81	87,54	90,14
2	Nilai keterbukaan informasi publik	Angka	n/a	n/a	99,95	94,74	31
II	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika						
1	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	n/a	n/a	75	82	72
2	Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	%	n/a	n/a	-	80	15

Sumber : Diskominfo, 2024.

Capaian diatas menunjukkan bahwa prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini mewujudkan birokrasi yang adaptif yang berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mengimplementasikan transformasi digital yang terdapat pada infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Salah satu inovasi yang terus dikembangkan untuk mendukung layanan publik berbasis SPBE tersebut adalah Layanan Data Center Jawa tengah yang meliputi layanan *colocation*, *hosting*, *Virtual Private Server (VPS)*, dan *Disaster Recovery Center (DRC)*.

Layanan *colocation* adalah layanan penyediaan ruang server yang dapat digunakan oleh OPD Pemprov Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk menaruh perangkat server. Layanan ini telah dinikmati oleh satu Kementerian, 15 OPD, dan 20 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kapasitas layanan telah berkembang dari tahun ke tahun (data 2020 – 2024). Layanan *hosting* adalah penyediaan tempat penyimpanan data atau file sehingga suatu situs dapat diakses melalui internet. Layanan *Virtual Private Server* adalah layanan server virtual yang bisa dimanfaatkan oleh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota selayaknya server fisik.

Selain layanan Data Center, pembangunan TIK juga diwujudkan dalam penyediaan internet gratis di area publik, instansi pendidikan, dan desa (meliputi desa *blankspot*, desa wisata, dan desa dengan status kemiskinan ekstrem). Sampai dengan tahun 2025, tidak kurang dari 30 area publik, 37 satuan pendidikan, dan 685 desa telah terfasilitasi internet Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada urusan komunikasi dan informatika tahun 2024 yaitu:

1. Provinsi dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi tingkat nasional pada SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Peringkat pertama Kategori Provinsi/Kabupaten/Kota Kontribusi Konten Teragregasi tingkat nasional Anugerah Media Center (AMC) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

2) Statistik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral didukung anggaran Rp1.257.329.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,65%. Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian sangat tinggi. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral didukung kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan keluaran terkumpulnya 50 data Statistik Sektoral dan Geospasial melalui Portal Data Jawa Tengah. Permasalahan yang dihadapi masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM baik sektoral (*Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist*) maupun spasial (surveyor pemetaan) dalam rangka mendukung *Big Data* Jawa Tengah. Khusus untuk spasial, upaya yang dilakukan yaitu melakukan pengajuan permohonan bantuan SDM (*Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist*) dari lintas bidang, melakukan rekrutmen dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM yang telah tersedia.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah atas LKPJ Gubernur Jawa Tengah akhir TA 2023 terkait perlunya Peningkatan SDM penyelenggaraan otorisasi urusan statistik di daerah dalam rangka mewujudkan *Big Data* Jawa Tengah (melalui rekrutmen *Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist*, dan bimbingan teknis), termasuk di dalamnya menyediakan sarana prasarana penunjang data sektoral dan spasial. Adapun capaiannya sbb:

Tabel 2.145.
Program/ Indikator Kinerja Tingkat Capaian Kinerja 2020-2024

No	Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Kinerja				
I			2020	2021	2022	2023	2024
	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral						
1	Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah		n/a	n/a	-	-	24

Sumber : Diskominfo, 2024.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan serta pemanfaatan infrastruktur teknologi saat ini berkembang begitu pesat. Pengembangan infrastruktur teknologi tersebut tentunya harus didasari dengan basis data yang akurat, relevan, *up-to-date*, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemanfaatan teknologi tersebut dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengelolaan data yang terpadu melalui penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah. Hal

tersebut merupakan suatu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pengelolaan *Big Data* yang bervariasi dan *realtime* tersebut, maka kedepannya kualitas layanan publik pada masyarakat akan lebih optimal dan maksimal.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada urusan statistik tahun 2024 antara lain:

1. Provinsi dengan kategori Bhumandala Rajata (keberhasilan Informasi Geospasial Rupa Bumi) dan kategori Bhumandala Ariti (keberhasilan Informasi Geospasial Simpul Jaringan) pada Bhumandala Award 2024 oleh Badan Informasi Geospasial (BIG);
2. Provinsi dengan kategori Provinsi Informatif pada penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2024 oleh Komisi Informasi Pusat RI.

3) **Persandian**

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi didukung anggaran 2,1 miliar rupiah dengan realisasi fisik 100 persen dan keuangan 99,66 persen. Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian sangat tinggi. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program ini adalah tidak tepatnya pengalokasian anggaran oleh untuk penerapan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkup OPD Provinsi Jawa Tengah sebagai tugas pokok fungsi utama pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan lebih memprioritaskan anggaran pada kegiatan publikasi dan liputan (live streaming) yang bukan merupakan tugas pokok fungsi Persandian dan Keamanan Informasi.

Oleh karena itu dilakukan upaya untuk memastikan sistem manajemen keamanan informasi dengan melakukan Asessment tingkat kematangan Indeks Keamanan Informasi yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Manfaat pelaksanaan program ini yaitu ketersediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah yang terjamin dengan penggunaan persandian dalam penetapan kebijakan tata kelola dan operasi kepatuhan penerapan sistem manajemen keamanan informasi sebagai pendukung SPBE. Capaian tersebut menunjukkan sebagai berikut.

Tabel 2.146.
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

No	Program/ Indikator Kinerja	Satuan					
I	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi						
		Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Sumber : Diskominfo, 2024.

Program/kegiatan diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Jawa Tengah telah membentuk ekosistem Jawa Tengah *Smart Province*, dengan inisiatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, transparansi, dan layanan publik di wilayah Jawa Tengah dengan dukungan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Program ini merupakan bagian dari visi mewujudkan provinsi yang lebih cerdas, terintegrasi,

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dimana aspek penerapan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting.

Penerapan dan Kepatuhan melaksanakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi melalui Kesadaran Keamanan Informasi menjadi landasan utama dan seiring dengan Pemanfaatan teknologi tersebut tentunya harus dilengkapi dengan sistem keamanan informasi yang baik. Dengan adanya serangan siber berjenis *ransomware* yang terjadi pada pertengahan tahun ini, tentunya mempengaruhi ekosistem *Smart Province* tersebut. Pemerintah Jawa Tengah terus berusaha meningkatkan kapasitas SDM pengelola keamanan informasi dalam penanganan insiden dan memonitoring serangan siber, yang meliputi *Application Security, Cloud Security, Cryptography, Infrastructure Security, Incident Response, dan Vulnerability Management*.

Adapun trend Serangan Siber di Jawa Tengah terdata mempunyai target utama serangan. Target tersebut adalah: 1. Pemerintah daerah (situs web dan aplikasi layanan publik); 2. Institusi pendidikan (data akademik dan administrasi) dan; 3. UMKM dan bisnis lokal (*ransomware* dan *phishing*). Adapun Motivasi Serangan adalah :1. Mencuri data pribadi dan informasi sensitif; 2. Mengganggu operasi layanan publik; 3. Mencari keuntungan finansial melalui *ransomware*.

Beberapa contoh kasus serangan sibernya adalah: 1. Deface Situs Pemerintah. Banyak situs pemerintah daerah di Jawa Tengah pernah menjadi korban deface oleh peretas. Hal ini menunjukkan celah keamanan di sistem manajemen situs; 2, Phishing pada ASN: Beberapa ASN (Aparatur Sipil Negara) menerima email phishing yang mengarah pada pencurian informasi login dan; 3. Serangan pada Data Pendidikan: Institusi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi menghadapi serangan malware yang mencoba mencuri data siswa dan penelitian dan; 4. Ransomware pada UMKM: Beberapa UMKM di Jawa Tengah melaporkan kehilangan data akibat serangan ransomware. Persentase jenis serangan yang dominan di Jawa Tengah: 1. *Phishing* (40%); 2. *Malware* (30%); 3. *DDoS* (20%) dan; 4. *Defacement* (10%). Terjadinya serangan siber merupakan implikasi dari tidak diterapkannya Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

2.6.5. Penelitian dan Pengembangan

Sesuai dengan Perpres 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka dalam rangka optimalisasi urusan penelitian dan pengembangan serta terciptanya integrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Provinsi Jawa Tengah maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dalam rangka memperkuat infrastruktur riset dan inovasi di daerah, melalui amanat pasal 67 Perpres No. 78 Tahun 2021, BRIDA menyusun rencana induk dan peta jalan kemajuan IPTEK daerah, yang berfungsi sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD sekaligus menjabarkan RPJMD untuk pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah.

Salah satu keluaran yang dihasilkan oleh fungsi penelitian dan pengembangan adalah dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi penelitian yang dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan kebijakan

dan perencanaan pembangunan daerah. Selama kurun waktu tahun 2019-2023 dokumen dan rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.147.

**Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian
Tahun 2019-2024**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dokumen Penelitian	9	4	2	23	18	4
2.	Rekomendasi/Implementasi Penelitian	9	4	2	n/a	n/a	n/a

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selama kurun waktu 2017 – 2021 dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi hasil penelitian fluktuatif dan cenderung menurun. Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan litbang daerah sejak 2017, kegiatan penelitian dalam bentuk Riset Unggulan Daerah (RUD) dan penelitian mandiri sudah tidak difasilitasi lagi. Pada tahun 2021 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya volume kegiatan penelitian karena pemerintah memfokuskan pada kegiatan dalam upaya penanggulangan dampak pandemi. Upaya untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan hasil litbang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM Peneliti melalui pendidikan dan pelatihan, membangun komunikasi melalui Jaringan Penelitian dan Inovasi, kerjasama dengan pemerintah pusat (Ristek dan LIPI), serta koordinasi dan membangun jejaring antara penelitian dan perencanaan.

Guna mendukung fungsi kelitbangan maka dibentuk beberapa lembaga pendukung kelitbangan di Jawa Tengah antara lain berbentuk *technopark*, *agro technopark*, *marine science technopark*, digitalisasi *technopark* dan taman teknologi pertanian. Bentuk kelembagaan *technopark* di Jawa Tengah di Kabupaten/Kota dikelola oleh PD teknis dan mendapatkan pendanaan dari anggaran daerah. *Technopark* dengan bidang fokus dibidang pertanian dan pangan terdapat di Ganesha Sragen dikelola oleh UPT Dinas Tenaga Kerja, *technopark* Lebaksiu yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tegal, *Agrotechnopark* Klaten yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, *Technopark* Pangan Kabupaten Grobogan yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan dan *technopark* perikanan di Kota Pekalongan dikelola oleh UPT Dinas kelautan Perikanan, serta *technopark* dengan bidang fokus otomotif di Kota Surakarta (Solo *Technopark*).

Kelembagaan lain yang memiliki peran untuk menghilirkan inovasi agar dapat menjadi produk yang bisa dijual dan mampu menghasilkan *start up* inovasi adalah Inkubator Bisnis dan Teknologi yang melakukan kegiatan proses pra inkubasi dan inkubasi. Pada proses Pra inkubasi dilakukan dengan meningkatkan sumberdaya manusia untuk mengubah pola pikir dan membentuk calon *start up* menjadi *start up*. Sedangkan proses inkubasi dilakukan dengan melakukan pendampingan, mentoring, pelayanan, fasilitasi, promosi untuk meningkatkan kapasitas produk. Di Jawa Tengah setidaknya terdapat 22 inkubator yang berfungsi aktif dalam memberikan layanan inkubasi.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki Inkubator Wirausaha Inovasi Jawa Tengah (Inwinov Jateng) yang berada di bawah naungan

Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Alokasi sumber pendanaan berasal dari APBD dan APBN (melalui Kementerian Ristekdikti, BRIN dan Kemenkop UKM). Selama lima tahun terakhir, Inwinov Jateng telah melakukan pembinaan terhadap tenant yang dikelola masyarakat melalui fasilitasi program penguatan inkubator/tenant yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.148.

Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng yang difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant Tahun 2019-2023

No	Tahun	Total Tenant	Program	Sumber Pendanaan
1	2019	6 Tenant	Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Kemenristekdikti
2	2020	1 Tenant	Startup Inovasi Indonesia (SSI)	BRIN
3	2021	40 Tenant	Fasilitasi Lembaga Inkubator	Kemenkop UKM
4	2022	17 tenant	Inwinov Jateng	APBD
5	2023	17 tenant	Inwinov Jateng	APBD
6	2024	15 tenant	Inwinov Jateng	APBD

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Jawa Tengah yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (SIDa) Provinsi Jawa Tengah adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Pengembangan SIDa di Jawa Tengah ada 4 pilar tematik yaitu 1) Provinsi Inovatif; 2) Kabupaten Kota Inovatif; 3) Desa Inovatif; dan 4) UMKM Inovatif. Semenjak digulirkan tahun 2013, telah difasilitasi pengembangan system inovasi di 35 Kabupaten/Kota, pengembangan inovasi di 90 desa, serta pada 43 UMKM di Jawa Tengah.

Kegiatan lainnya adalah memfasilitasi inovasi masyarakat melalui Krenova atau Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk lomba krenova dan penjangkaran inovasi. Kegiatan krenova dilakukan dengan 2 jalur dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki inovasi untuk bisa terlibat dalam kegiatan lomba krenova dan seleksi inovasi dengan jalur penjangkaran inovasi. Kegiatan ini diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah menghasilkan karya inovasi sehingga mampu untuk mengatasi kebutuhan teknologi di sekitarnya atau dapat direplikasi di daerah lain, sehingga memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Jawa Tengah.

Partisipasi masyarakat Jawa Tengah mengikuti kegiatan KRENOVA Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai tahun 2022 terjadi fluktuasi, pada tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan sedangkan tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan dikarenakan ada 2 kabupaten yang tidak mengikuti lomba krenova dan pembatasan jumlah peserta dari masing-masing Kabupaten/Kota maksimal 5 inovasi. Tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan disebabkan karena dilakukannya 2 mekanisme proses krenova melalui lomba krenova dan penjangkaran inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki inovasi, perlu diberikan kesempatan dan wadah agar inovasi tersebut tersalurkan.

Tabel 2.149.

Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Tahun	Jumlah Inovasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi	Keterangan
1	2018	201	35 Kabupaten/Kota	• Mulai tahun 2019 Lomba Krenova dibatasi maksimal 5 inovasi per kabupaten/kota; • Lomba krenova belum semua Kabupaten/Kota mengirimkan; • Penjangkaran Inovasi Masyarakat baru dimulai tahun 2021.
2	2019	169	35 Kabupaten/Kota	
3	2020	167	34 Kabupaten/Kota	
4	2021	230	35 Kabupaten/Kota	
5	2022	276	34 Kabupaten/Kota	
6	2023	309	35 Kabupaten/Kota	
7	2024	n/a	n/a	n/a

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi daerah serta untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perhitungan Indeks Inovasi Daerah didasarkan pada 16 indikator satuan pemda dan 20 indikator satuan inovasi. Predikat penilaian IID terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut: 0 (tidak dapat dinilai); 0,01-29,99 (Kurang Inovatif); 30,00-59,99 (Inovatif) dan 60,00-100,00 (Sangat Inovatif).

Tabel 2.150.

Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID)	Predikat	Keterangan
1	2019	22.560	Sangat Inovatif	Perubahan Penilaian IID mulai tahun 2021 dengan menggunakan skala perhitungan 0 - 100
2	2020	36.357	Sangat Inovatif	
3	2021	62.57	Sangat Inovatif	
4	2022	71.32	Sangat Inovatif	
5	2023	65.40	Sangat Inovatif	
6	2024	n/a	n/a	n/a

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023

2.6.6. Kebudayaan

Dengan segala karakteristik penduduknya, keanekaragaman budaya di Jawa Tengah merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, rancangan kebijakan yang berfokus kepada pengembangan dan pelestarian budaya, sekaligus sebagai *booster* untuk mendorong laju pembangunan perlu dilakukan. Isu-isu sosial budaya yang terintegrasi dalam perencanaan

pembangunan mutlak diperlukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017). Adapun 10 objek pemajuan kebudayaan (OPK) atau yang juga disebut Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Hingga tahun terakhir, WBTB Jawa Tengah yang telah ditetapkan UNESCO antara lain: Keris Indonesia (2008), Pertunjukan Wayang (2008), Batik Indonesia (2009), Gamelan Jawa Tengah (2021), Jamu Jawa Tengah (2023), dan Kebaya (2024).

Tabel. 2.151
Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Jawa Tengah

	DOMAIN					Jenis OPK										JUMLAH
	Tradisi dan ekspresi lisan	Seni pertunjukan	Adat istiadat masyarakat, ritus	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta	Kemahiran kerajinan tradisional	TRAD LISAN	MANUSKRIP	ADAT ISTIADAT	PERMAINAN RAKYAT	OR TRADISIONAL	PENGETAHUAN TRAD	TEKNOLOGI TRAD	SENI	BAHASA	RITUS	
UNESCO		2		1	4						2	3	2			7
WBTB	5	60	47	3	43	5		48	1		29	16	58		1	158
OPK						100	60	378	20	16	204	91	293	12	22	1196
Jumlah																1361

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Selain itu, keberhasilan pemajuan kebudayaan didukung pula oleh SDM kebudayaan. Dari 10 jenis OPK, salah satu yang memiliki banyak cabang yaitu seni/kesenian. Pada tahun 2024, Jawa Tengah memiliki 16.730 kelompok seni dan 322.471 pelaku seni yang tersebar di 104 jenis kesenian.

Tabel 2.152.
Lembaga/SDM Kesenian Berdasarkan Wilayah Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2024

Wilayah Karesidenan	Kelompok Seni (Sanggar/Kelompok)	Pelaku Seni (Orang)
Karesidenan Semarang	6.722	116.196
Karesidenan Pati	2.461	32.435
Karesidenan Surakarta	1.108	28.132
Karesidenan Kedu	3.853	99.827
Karesidenan Banyumas	558	4.051
Karesidenan Pekalongan	2.028	41.830
Total	16.730	322.471

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Selain 10 jenis OPK, terdapat juga warisan budaya benda seperti cagar budaya, yang tidak menjadi bagian dari WBTB/OPK. Data CB yang tercatat di 35 Kabupaten/Kota mencapai 228 CB dan 18 CB telah berperingkat level provinsi

Tabel 2.153.
Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Jawa Tengah Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Cagar Budaya		Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)			
	CB Tercatat	CB Peringkat Prov	ODCB Teregistrasi	ODCB Ditetapkan	ODCB Dimanfaatkan	ODCB Dikembangkan
Kabupaten Banjarnegara	1	0	4	1	-	-
Kabupaten Banyumas	12	2	3	14	1	-
Kabupaten Batang	5	1	11	5	-	-
Kabupaten Blora	6	0	7	6	-	-
Kabupaten Boyolali	8	0	6	8	1	-
Kabupaten Brebes	0	0	12	0	-	-
Kabupaten Cilacap	10	0	2	10	-	-
Kabupaten Demak	6	0	7	6	-	-
Kabupaten Grobogan	0	0	5	0	-	-
Kabupaten Jepara	13	0	7	13	-	1
Kabupaten Karanganyar	4	0	4	5	1	-
Kabupaten Kebumen	4	0	12	4	-	-
Kabupaten Kendal	0	0	8	0	-	-
Kabupaten Klaten	9	0	11	9	-	-
Kabupaten Kudus	5	1	10	5	1	-
Kabupaten Magelang	12	0	5	12	1	2
Kota Magelang	7	1	3	7	-	1
Kabupaten Pati	9	1	10	10	-	-
Kabupaten Pekalongan	1	0	6	1	1	-
Kota Pekalongan	13	4	14	13	2	-
Kabupaten Pemalang	5	0	12	6	1	-
Kabupaten Purbalingga	11	1	5	11	-	-
Kabupaten Purworejo	7	1	12	7	2	1
Kabupaten Rembang	4	0	12	4	-	-
Kota Salatiga	6	0	10	6	1	-
Kabupaten Semarang	6	0	10	6	-	-
Kota Semarang	15	0	11	15	2	-
Kabupaten Sragen	5	0	5	7	1	-
Kabupaten Sukoharjo	4	2	3	6	-	-
Kota Surakarta	18	1	7	20	2	1
Kabupaten Tegal	5	0	5	5	-	-
Kota Tegal	6	0	13	6	2	-
Kabupaten Temanggung	5	1	11	8	2	3
Kabupaten Wonogiri	0	0	5	0	-	-
Kabupaten Wonosobo	6	2	3	6	-	-
Jumlah	228	18	271	242	21	9

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2025

2.6.7. Kearsipan

Peran kearsipan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah Jawa tengah melalui dukungan pada tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif dan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan,

keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain masih perlunya pengolahan kearsipan sesuai ketentuan, serta belum optimalnya digitalisasi arsip.

Tabel 2.154.
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019-2023

NO	Tahun	Nilai	Kategori
1	2019	79,33	Sangat Baik
2	2020	92,08	Sangat Memuaskan
3	2021	91,314	Sangat Memuaskan
4	2022	93,45	Sangat Memuaskan
5	2023	93,99	Sangat Memuaskan
6	2024	n/a	n/a

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023.

Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Penyediaan dan pengelolaan arsip untuk akses dan informasi masyarakat masih perlu dioptimalkan. Berikut data jumlah kunjungan pengguna arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.155.
Jumlah Pengunjung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Jenis Layanan	Tahun (orang)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penelitian atau Mencari Arsip	757	780	209	346	496	1.182	n/a
2	Kunjungan atau Wisata Arsip	1.890	2.036	15.001	112	3.206	2.465	n/a
3	Magang atau PKL	219	151	103	67	97	260	n/a
4	Konsultasi Kearsipan atau Perpustakaan	669	485	206	127	288	494	n/a
5	Umum atau lain-lain	3535	594	33	81	338	242	n/a
6	Layanan SIKS, Website				11.289	41.718	91	n/a
	Jumlah	7.070	4.046	15.552	12.022	46.413	4.734	n/a

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023.

2.6.8. Akuntabilitas Kinerja

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berturut-turut pada tahun 2018-

2023 mendapatkan predikat A. Nilai dan predikat ini meningkat dari tahun 2016-2017 sebelumnya yang hanya mendapatkan predikat BB.

Komponen SAKIP terdiri atas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Semua komponen mengalami kenaikan sehingga nilai SAKIP total juga mengalami kenaikan secara signifikan dari 81,13 di tahun 2022 menjadi 81,92 di tahun 2023 atau naik sebesar 0,79 poin. Hal ini menunjukkan ada perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Meski begitu masih terdapat beberapa catatan dari masing-masing komponen yang perlu ditindaklanjuti antara lain, menyempurnakan penjenjangan kinerja, review identifikasi *crosscutting* pada pohon kinerja, memastikan penetapan target kinerja OPD yang lebih baik, memastikan penerapan kinerja mempertimbangkan kinerja tahun terakhir yang telah tertuang pada perencanaan jangka menengah, mendorong komitmen seluruh pimpinan OPD untuk memanfaatkan e-kinerja, memastikan kembali perumusan kinerja individu melalui SKP, membangun budaya dialog kinerja, dan melakukan inovasi.

Tabel 2.156.
Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,77	26,64	26,66	25,53	25,71	n/a
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,50	20,23	20,23	23,63	23,78	n/a
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,99	12,08	12,27	12,84	12,93	n/a
4.	Evaluasi Internal	10	8,26	7,02	7,21	19,13	19,5	n/a
5.	Capaian Kinerja	20	14,04	14,28	14,35	n/a	n/a	n/a
	Hasil Nilai SAKIP	100	81,56	80,25	80,72	81,13	81,92	n/a
	Predikat		A	A	A	A	A	n/a

Sumber: Kemenpan RB, Maret, 2023.

2.6.9. Manajemen ASN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN, Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Penilaian dengan sistem merit ini meliputi 8 aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Pengembangan Karier; Promosi dan Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan; serta Sistem Informasi.

Penerapan Sistem Merit di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan dari tahun 2019 hingga 2024. Peningkatan ini tercermin dari Indeks Sistem Merit yang terus naik dari 0,70 dengan nilai 280 pada tahun 2019 menjadi 0,83 dengan nilai 340,5 pada tahun 2023 yang menempatkan Provinsi Jawa Tengah dalam kategori "Sangat Baik". Dengan kategori sangat baik, sesuai dengan penilaian mandiri untuk tahun 2024 sebesar 0,86 dengan nilai 355,5.

Meskipun secara keseluruhan menunjukkan tren positif, namun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian untuk perbaikan. Aspek

Promosi dan Mutasi menunjukkan skor yang stagnan, mengindikasikan perlunya evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa proses tersebut benar-benar didasarkan pada kualifikasi dan kinerja. Selain itu, aspek Perlindungan dan Pelayanan justru mengalami penurunan 2 skor yang semula di tahun 2023 sebesar 14 menjadi 12 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan hak-hak perlindungan ASN belum berjalan dengan baik.

Tabel 2.157.
Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2024

NO	Aspek	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Perencanaan Kebutuhan	10	37,5	40	40	40	45
2	Pengadaan	30	38	40	40	40	42
3	Pengembangan Karier	72,5	55	75	76	75	82,5
4	Promosi dan Mutasi	30	20	35	35	35	35
5	Manajemen Kinerja	50	67,5	70	70	75	75
6	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	30	35	37,5	37,5	37,5	40
7	Perlindungan dan Pelayanan	10	16	14	16	14	12
8	Sistem Informasi	20	20	24	24	24	24
Skor Nilai		280	289	335,5	337,5	340,5	355,5
Indeks Sistem Merit		0,70	0,70	0,81	0,82	0,83	0,86

Sumber: KASN, 2023

Tabel 2.158.
Jumlah ASN Berdasarkan Usia Tahun 2024

Usia	PNS	PPPK	Jumlah	Prosentase
18-40	6.374	10.292	16.666	34,93%
41-55	18.591	5.504	24.095	50,50%
>55	6599	352	6.951	14,57
Total	31.564	16.148	47.712	100,00%

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun (diolah), 2024.

Meskipun begitu, Kesenjangan generasi ASN di Jawa Tengah saat ini menjadi catatan penting. Jumlah ASN Provinsi Jawa Tengah saat ini berjumlah 47.712. di rentang usia 18-40 tahun berjumlah 16.666 (34,93 persen) menunjukkan potensi besar untuk inovasi dan adopsi teknologi, mengingat generasi muda cenderung lebih adaptif terhadap perubahan. Di rentang usia 41-55 tahun berjumlah 24.095 (50,50 persen) memiliki pengalaman dan mengalami banyak perubahan era dan mayoritas telah berada di jabatan administrasi. Di usia lebih dari 55 tahun berjumlah 6.951 (14,57 persen) menjadi jumlah yang paling kecil diantara kategori yang lain dan pada rentang usia ini menjelang usia pensiun.

Sehingga perlu perubahan pola kerja yang mendorong kolaborasi antar generasi, mendorong pemanfaatan teknologi serta dilengkapi dengan perencanaan kepegawaian yang berdasarkan pemetaan kebutuhan pegawai untuk mengetahui posisi esensial serta pelaksanaan manajemen talenta untuk menyiapkan kader suksesi yang lebih siap, produktif dan berkinerja untuk mengisi jabatan PNS dan mendukung kinerja organisasi.

Tabel 2.159.
Jumlah Fasilitasi Tugas Belajar PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2024

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN						JUMLAH
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	S1/DIV/PROFESI	13	0	0	10	2	4	29
2	S2	15	22	16	28	20	23	124
3	PPDS	5	5	2	7	10	6	35
4	S3	3	1	3	9	2	2	20
5	SUB SPESIALIS	2	2	1	4	3	4	16
	JUMLAH	38	30	22	58	37	16	224

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Salah satu upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi ASN yaitu melalui jalur pendidikan lanjutan dalam bentuk Tugas Belajar. Kurun waktu tahun 2019-2029 Provinsi Jawa Tengah sudah memfasilitasi tugas belajar sebanyak 2024 orang. 29 orang untuk jenjang S1/DIV/Profesi, 124 orang untuk jenjang S2, 35 orang untuk PPDS, 20 orang untuk jenjang S3, dan 16 orang untuk Sub Spesialis. Pemberian fasilitasi tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

Selain melalui jalur pendidikan lanjutan, peningkatan kompetensi ASN juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Selama tahun 2018-2022 kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terus meningkat secara kuantitas. Hal ini menunjukkan kemampuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat mencakup kalangan ASN secara luas yang tidak terbatas pada ASN Provinsi Jawa Tengah tetapi juga seluruh ASN di Jawa Tengah. Selain pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh BPSDMD, pengembangan kompetensi ASN juga dilakukan melalui sertifikasi. Pada tahun 2022 dari jumlah 50.115 peserta terdapat 46.012 sertifikat terkirim atau sebesar 91,8% peserta tersertifikasi. Hal ini menunjukkan potensi kompetensi SDM ASN yang cukup mumpuni tetapi juga menjadi pekerjaan rumah untuk menuntaskan 9,2 persen potensi yang tidak tersertifikasi. Hal itu bisa jadi disebabkan karena peserta tidak lulus sertifikasi atau tidak melaporkan kepada BPSDMD selaku *leading sector* pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.160.
Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendidikan
Dan Pelatihan Tahun 2019-2024

Tahun	Target Peserta (orang)	Realisasi Peserta (orang)
2019	10.110	9.820
2020	2.789	2.763
2021	6.935	6.956
2022	18.932	19.838
2023	31.268	40.910
2024	6.360	136.989

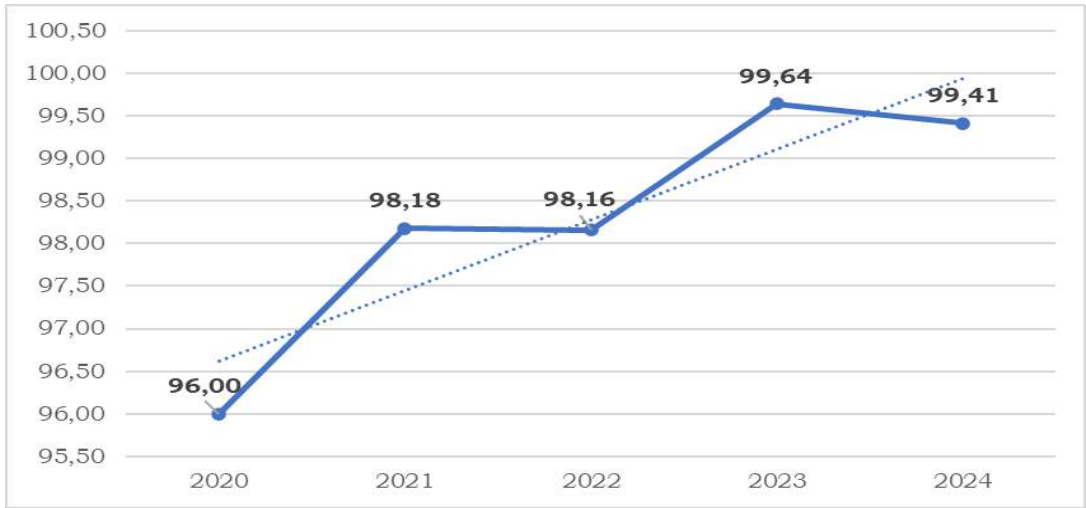
Sumber : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Meski telah mengalami peningkatan kuantitas pendidikan dan pelatihan yang signifikan, pendidikan dan pelatihan ASN di Jawa Tengah belum terstruktur untuk perbaikan kompetensi dan kinerja ASN. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya Road Map pengembangan kompetensi berbasis analisi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN yang menjadi acuan untuk

pengembangan kompetensi dan karir ASN. Kondisi tersebut menyebabkan *gap* kompetensi dan kinerja ASN belum terpetakan dengan baik, pengembangan kompetensi belum sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan kinerja, serta penilaian kinerja ASN belum akurat dalam suatu sistem yang terintegrasi.

2.6.10. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja urusan administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Tengah salah satunya direpresentasikan melalui capaian kepemilikan KTP-el. Pada Tahun 2020-2024, kepemilikan KTP-el di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data target indikator kinerja dalam RPD, pada tahun 2025 ditetapkan target kepemilikan KTP-el Provinsi Jawa Tengah adalah 99 persen. Meskipun capaian pada tahun 2023 sudah melampaui target tersebut, namun banyak faktor yang dapat mempengaruhi capaian kepemilikan KTP-el melalui perekaman KTP-el, salah satunya adalah dinamika perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada peningkatan dan penurunan jumlah penduduk. Dengan adanya dinamika tersebut, maka Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pelaksanaan perekaman KTP-el perlu meningkatkan kinerja seiring dengan perubahan jumlah penduduk. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja kepemilikan KTP-el diantaranya adalah mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan, sosialisasi perekaman KTP-el, fasilitasi blangko perekaman KTP-el, percepatan penerbitan KTP-el, dan upaya lainnya. Untuk mengetahui kinerja kepemilikan KTP, maka berikut merupakan grafik persentase penduduk yang terfasilitasi pengurusan dokumen KTP-el mengacu pada data jumlah penduduk dengan usia wajib KTP.



Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024

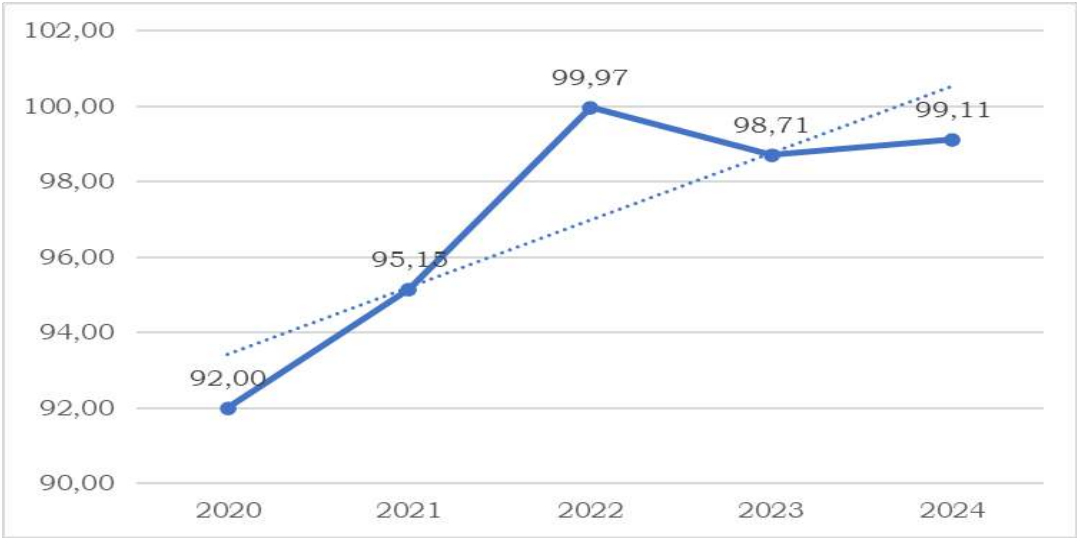
Gambar 2.116.

**Presentase Penduduk yang Terfasilitasi Pengurusan Dokumen KTP-el (%)
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024**

a. Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran

Aspek pendukung dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lainnya adalah terkait kepemilikan akta kelahiran. Pentingnya kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum yang sah anak sebagai warga negara. Selain itu, akta kelahiran menjadi instrumen kependudukan yang sah bagi seorang anak untuk

mendapatkan perlindungan atas hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas tempat tinggal yang layak, dan hak atas perlindungan sosial. Upaya peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Jawa Tengah terus diupayakan di 35 Kabupaten/Kota. Sampai dengan Tahun 2024, persentase kepemilikan akta kelahiran adalah 99,11 persen. Angka tersebut sudah mencapai target kepemilikan akta kelahiran pada RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, yaitu 99 persen di Tahun 2025 dan 100 persen di Tahun 2026 sehingga upaya keras untuk dapat mewujudkan target tersebut pada Tahun 2026. Berikut merupakan grafik capaian kinerja pada kepemilikan akta kelahiran di Jawa Tengah Tahun 2020-2024.



Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.117.

Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (%)

Berdasarkan grafik pada gambar di atas, terjadi penurunan capaian pada rentang Tahun 2022-2023 meski begitu tren dari Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan meski tidak signifikan. Tren peningkatan tersebut disebabkan oleh pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (*three in one*), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, *sms gateway*, dan layanan *online*. Penyebarluasan informasi mengenai pentingnya kepemilikan data kependudukan yang diantaranya meliputi KTP, akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) juga menjadi salah satu faktor dalam upaya peningkatan data kependudukan masyarakat di Jawa Tengah. Penyebarluasan informasi tersebut disampaikan dalam beberapa media baik *online* maupun *offline*.

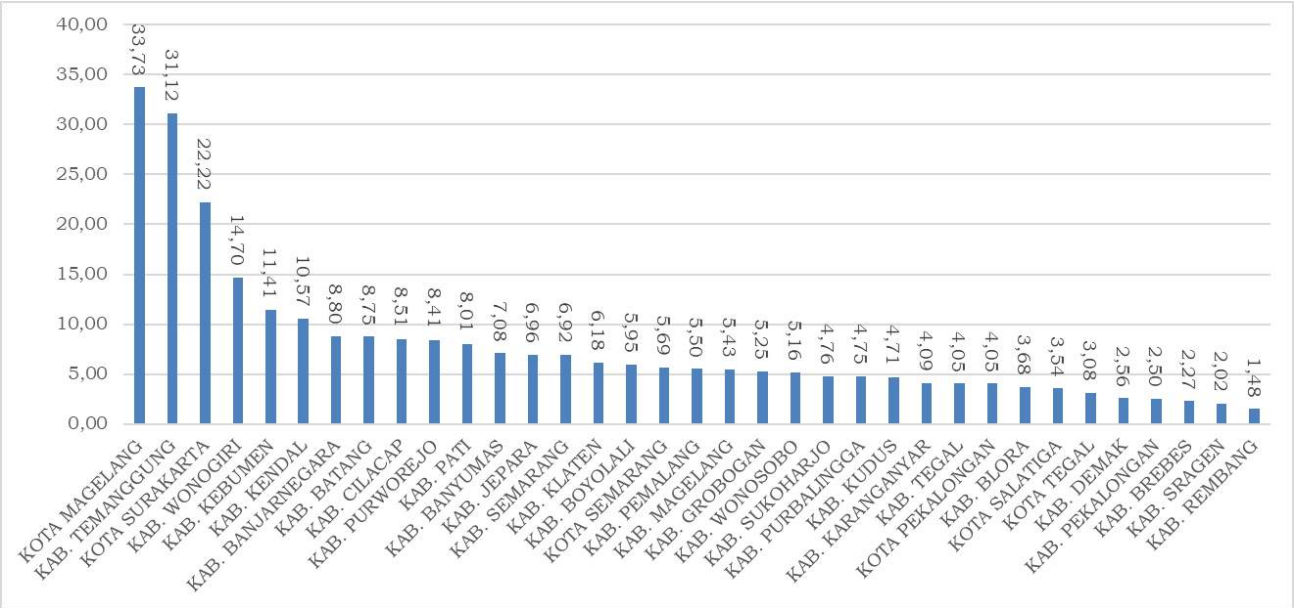
b. Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan publik terhadap anak, pemenuhan hak kewarganegaraan anak, peningkatan pendataan anak, dan dasar intervensi perlindungan sosial terhadap anal. Pelaksanaan penerbitan kartu identitas anak diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Sementara itu, kinerja pelayanan terhadap penerbitan KIA di Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2024

adalah 69,39 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada aspek pelayanan penerbitan KIA, Provinsi Jawa Tengah perlu upaya yang cukup keras agar seluruh anak (usia 0-17) terpenuhi atas hak kepemilikan KIA.

c. Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meluasnya penggunaan informasi digital, telah diterbitkan salah satu inovasi dalam rangka mengintegrasikan data kependudukan secara digital. IKD merupakan program dari pemerintah Pusat dalam rangka memberikan layanan kependudukan secara praktis dengan basis data terpusat yang dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah langkah strategis, diantaranya adalah: (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung keamanan data, privasi, dan inklusivitas, (2) Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri proaktif dalam mengembangkan dan memelihara infrastruktur yang mendukung implementasi IKD, (3) Edukasi dan kesadaran masyarakat merupakan komponen penting dalam menerapkan IKD yang inklusif, dan (4) Berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait, Kemendagri terus pro aktif dalam menjaga keamanan data dan privasi pengguna. Dengan adanya IKD diharapkan akses terhadap dokumen kependudukan dalam berbagai aspek kepentingan dapat terlaksana secara efisien dengan sistem yang terintegrasi. Meski begitu masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam implementasi IKD, diantaranya adalah keterbatasan informasi masyarakat, keterbatasan akses internet dan perangkat digital, dan pengoperasian sistem. Pada Tahun 2024, capaian perekaman data kependudukan yang terintegrasi dalam IKD di provinsi Jawa Tengah baru mencapai 6,98 persen, tentunya perlu upaya keras dalam rangka meningkatkan penggunaan IKD untuk integrasi data kependudukan digital. Berikut merupakan capaian IKD di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.118.

Presentase Jumlah Data Kependudukan yang Terintegrasi dalam Sistem IKD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

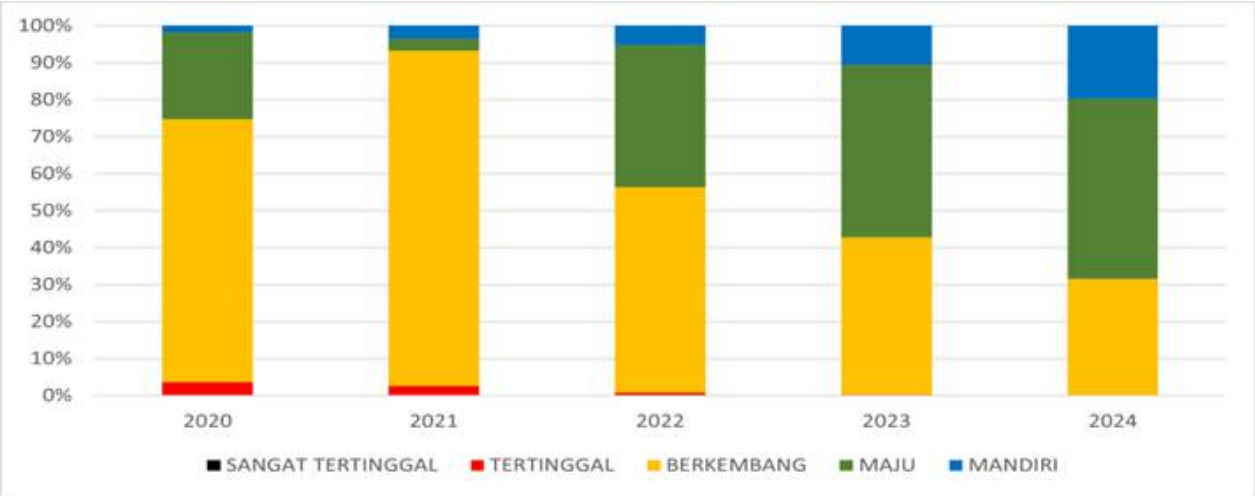
d. Cakupan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan

Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS). Sampai dengan tahun 2024, terdapat 574 PKS yang ada di seluruh Jawa Tengah. Beberapa pihak yang bekerjasama antara lain, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pandapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.6.11. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga perlu difokuskan pada pembangunan di wilayah perdesaan. Pembangunan desa dilakukan untuk dapat meningkatkan kemandirian desa. Desa Mandiri merupakan desa yang memiliki kapasitas dalam mengelola aset dan sumber daya lokal yang sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sampai dengan tahun 2024, capaian tingkat kemandirian desa di Jawa Tengah diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengklasifikasikan tingkat kemandirian desa menjadi 5 (lima) tingkatan, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Tahun 2020-2024, capaian kemandirian desa di Jawa tengah terus mengalami peningkatan yang diukur melalui peningkatan rata-rata nilai IDM Jawa Tengah dan peningkatan persentase jumlah desa mandiri. Sampai dengan tahun 2024, terdapat total 1,530 Desa Mandiri (19,59 persen), 3.816 Desa Maju (48,86 persen), 2.456 Desa Berkembang (31,45 persen), dan 8 Desa Tertinggal (0,10 persen). Berdasarkan capaian tersebut kenaikan jumlah Desa Mandiri cukup signifikan apabila dibandingkan tahun sebelumnya pada 2023, yaitu 825 Desa Mandiri (10,56 persen). Beberapa aspek menjadi faktor yang mendorong meningkatnya capaian kemandirian desa di Jawa Tengah, diantaranya adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, peningkatan perekonomian lokal melalui optimalisasi potensi lokal dan penguatan peran lembaga keuangan, peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, peningkatan penyediaan kebutuhan layanan dasar di desa, dan beberapa faktor lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan desa. Meski begitu, capaian tersebut belum bisa dikatakan optimal mengingat masih adanya Desa Tertinggal di Jawa tengah pada tahun 2024, yaitu 8 (delapan) Desa Tertinggal yang tersebar di Kabupaten Demak dan Kabupaten Tegal. Beberapa kendala yang dihadapi pada desa-desa tertinggal di

Jawa Tengah adalah permasalahan pada kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur pendukung aksesibilitas yang belum optimal.



Sumber: Kemendes PDTT, 2024.

Gambar 2.119.
Klasifikasi Tingkat Kemandirian Desa
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (Persen)

Perekonomian desa merupakan salah satu Upaya yang dilakukan untuk mendorong kemandirian desa. Ekonomi desa melibatkan berbagai pihak, baik Masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah daerah, pihak ketiga (swasta), maupun lembaga ekonomi yang dibentuk oleh desa. Lembaga ekonomi desa yang berperan penting dalam Upaya peningkatan pendapatan desa melalui optimalisasi potensi local desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, sampai dengan Tahun 2024, masih terdapat beberapa desa belum memiliki BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli desa. Berikut merupakan data terkait desa di Jawa Tengah.

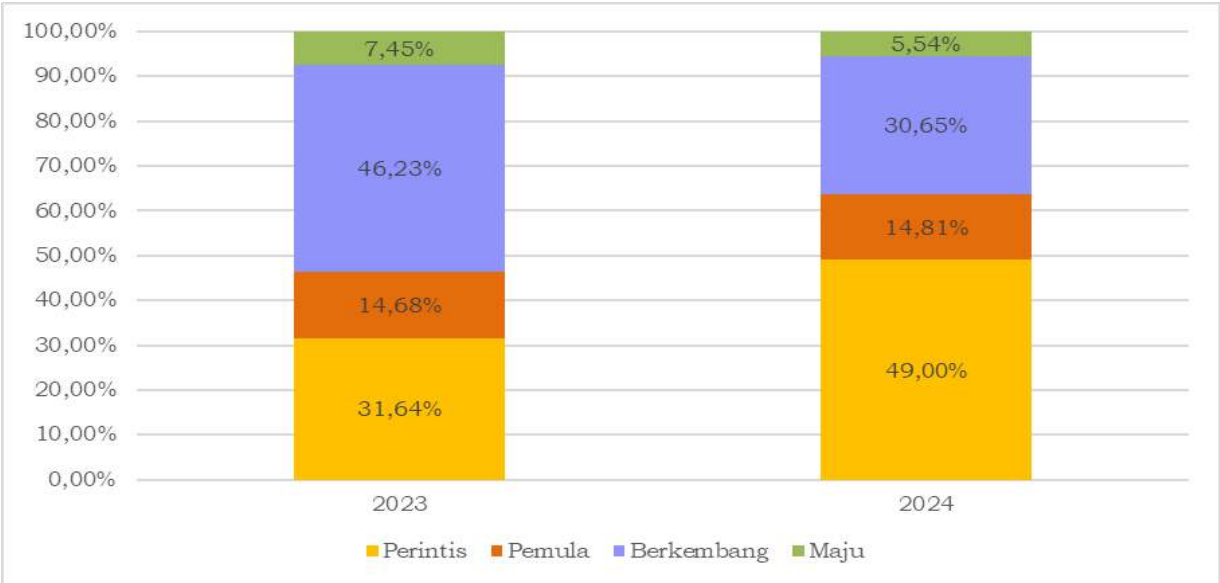
Tabel 2.161.
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten	Desa	Jumlah Desa Sudah Membentuk BUM Desa		Jumlah Desa Belum Membentuk BUM Desa	
			Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
1	Banjarnegara	266	262	98,50%	4	1,50%
2	Banyumas	301	300	99,67%	1	0,33%
3	Batang	239	228	95,40%	11	4,60%
4	Blora	271	270	99,63%	1	0,37%
5	Boyolali	261	222	85,06%	39	14,94%
6	Brebes	292	292	100,00%	0	0,00%
7	Cilacap	269	269	100,00%	0	0,00%
8	Demak	243	214	88,07%	29	11,93%
9	Grobogan	273	273	100,00%	0	0,00%
10	Jepara	184	184	100,00%	0	0,00%
11	Karanganyar	162	160	98,77%	2	1,23%
12	Kebumen	449	449	100,00%	0	0,00%
13	Kendal	266	260	97,74%	6	2,26%
14	Klaten	391	391	100,00%	0	0,00%

No	Kabupaten	Desa	Jumlah Desa Sudah Membentuk BUM Desa		Jumlah Desa Belum Membentuk BUM Desa	
			Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
15	Kudus	123	112	91,06%	11	8,94%
16	Magelang	367	356	97,00%	11	3,00%
17	Pati	401	401	100,00%	0	0,00%
18	Pekalongan	272	253	93,01%	19	6,99%
19	Pemalang	212	211	99,53%	1	0,47%
20	Purbalingga	224	224	100,00%	0	0,00%
21	Purworejo	469	468	99,79%	1	0,21%
22	Rembang	287	263	91,64%	24	8,36%
23	Semarang	208	202	97,12%	6	2,88%
24	Sragen	196	196	100,00%	0	0,00%
25	Sukoharjo	150	147	98,00%	3	2,00%
26	Tegal	281	268	95,37%	13	4,63%
27	Temanggung	266	258	96,99%	8	3,01%
28	Wonogiri	251	251	100,00%	0	0,00%
29	Wonosobo	236	211	89,41%	25	10,59%
	JUMLAH	7810	7595	97,25%	215	2,75%

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat 2,75 persen atau 215 Desa di Jawa Tengah yang belum membentuk BUMDes. Desa-desa tersebut perlu didorong agar dapat membentuk BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian desa. Semenetera itu, apabila dilihat dari klasifikasi perkembangannya, BUMDes dapat dikategorikan dalam kelas perintis, pemula, berkembang, dan maju. Klasifikasi BUMDes saat ini mengacu pada Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Berikut merupakan grafik klasifikasi perkembangan BUMDes Jawa Tengah Tahun 2023 dan Tahun 2024.

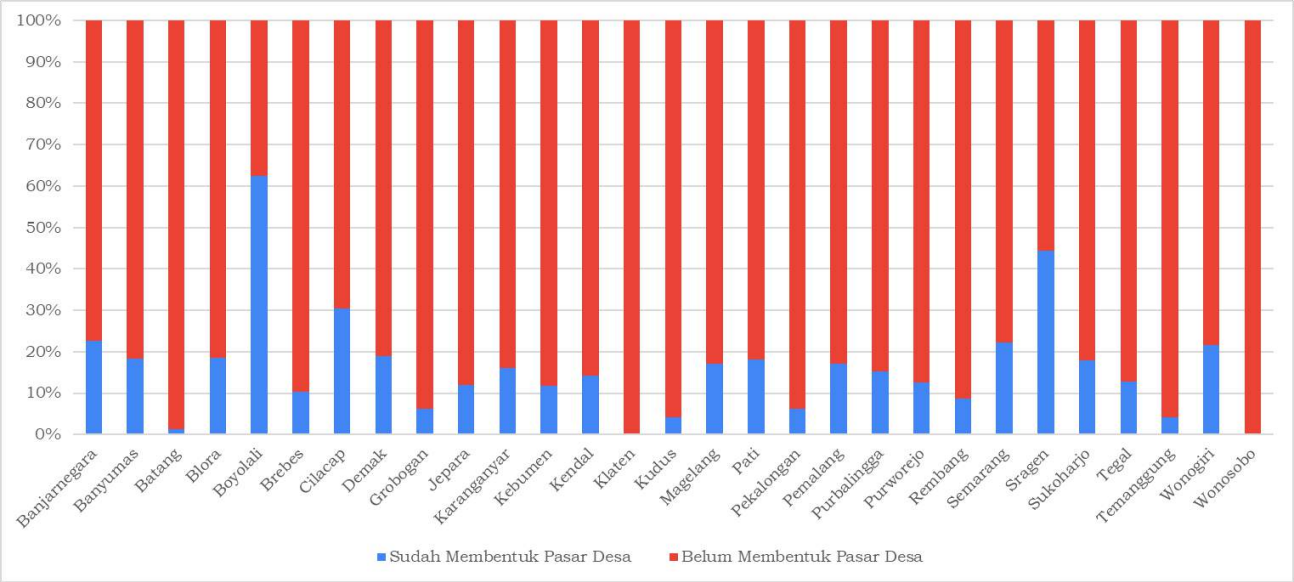


Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.120.
Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan grafik tersebut, sebagian besar BUMDes di Jawa Tengah masih ada di klasifikasi perintis dan berkembang. Sementara itu, BUMDes dengan klasifikasi maju masih sedikit, hanya 5,54 persen. Perlu komitmen dan upaya bersama yang kuat dari berbagai pihak, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar kedepannya BUMDes di Jawa Tengah dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya, terutama dalam mendukung perekonomian desa. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala perkembangan BUMDes di Jawa Tengah diantaranya adalah keterbatasan akses permodalan, kapasitas SDM yang kurang memadai, manajemen/pengelolaan yang belum optimal, minimnya kerjasama, kurangnya sarana prasarana pendukung, belum optimalnya inovasi dalam diversifikasi produk, dan belum adanya dukungan kebijakan/regulasi yang mendukung.

Selain BUMDES, lembaga perekonomian desa yang juga berkontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa adalah Pasar Desa. Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terdapat 1.218 unit pasar yang tersebar di 29 Kabupaten. Kondisi saat ini belum seluruh desa di Jawa Tengah memiliki pasar desa, berikut merupakan presentase keberadaan pasar desa di Jawa Tengah.

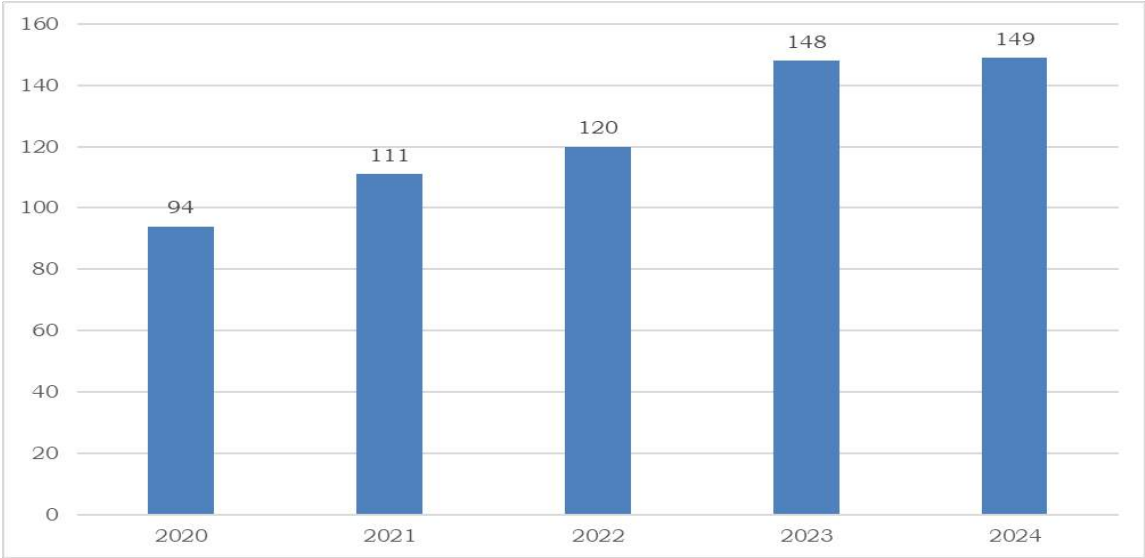


Sumber: Dispermasdesdukcapi Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.121.
Presentase Desa yang Memiliki Pasar Desa di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan perdesaan, yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk 149 kawasan perdesaan. 149 kawasan perdesaan tersebut dikembangkan melalui potensi tematik masing-masing kawasan yang berbeda-

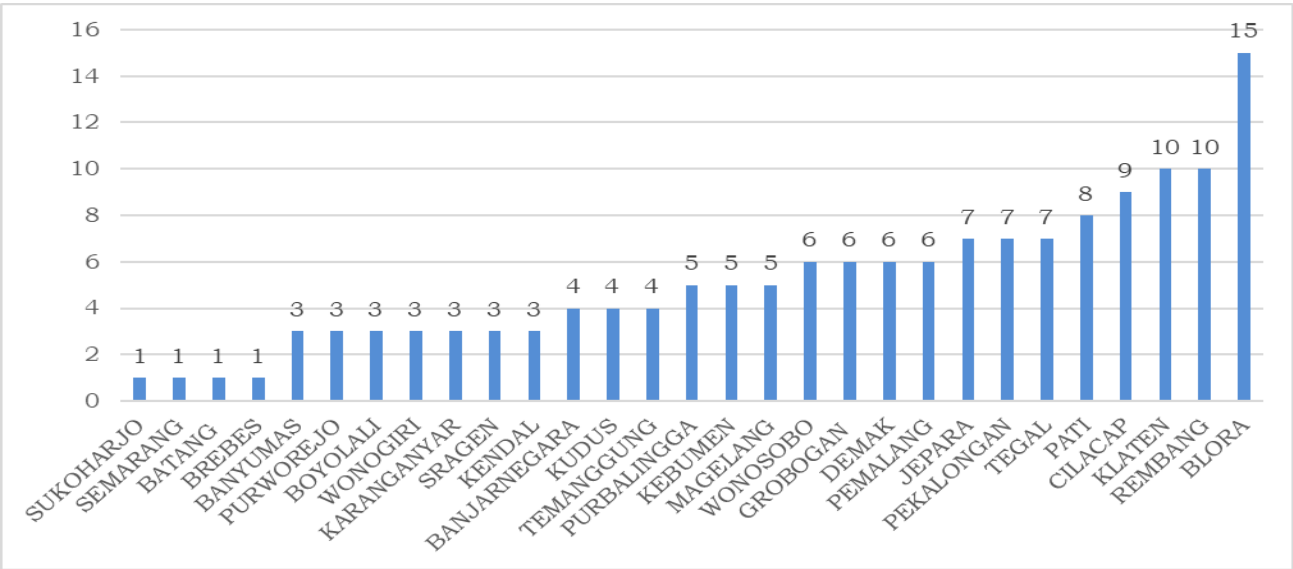
beda. Tema pengembangannya diantaranya adalah pertanian, wisata, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri kecil.



Sumber: Dispermasdesdukcakil Provinsi Jawa Tengah 2024

Gambar 2.122.
Jumlah Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) Di Jawa Tengah Tahun 2020-2024

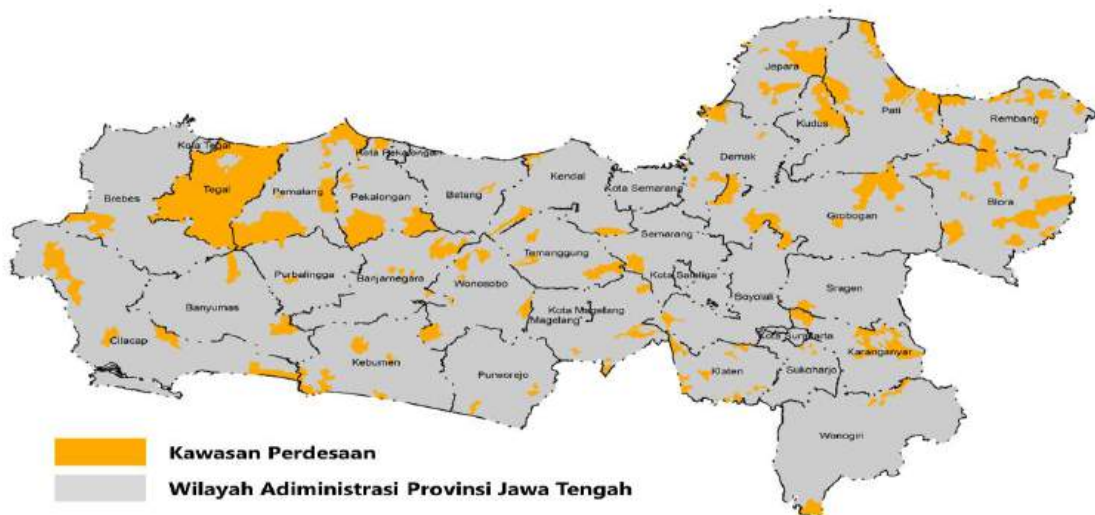
Sebanyak 149 kawasan perdesaan tersebut tersebar di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Meski begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk kawasan perdesaan yang menjadi priotitas provinsi agar selanjutnya dapat menjadi fokus lokasi intervensi pengembangan desa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan dengan adanya prioritas tersebut, maka dapat meningkatkan kualitas kawasan perdesaan melalui intervensi yang diberikan dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan berdampak pada pengurangan kemiskinan di perdesaan. Berikut merupakan sebaran jumlah kawasan perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.



Sumber: Dispermasdesdukcakil Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.123.
Sebaran Jumlah Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut, secara spasial persebaran Kawasan perdesaan di Jawa Tengah dapat dipetakan dalam gambar berikut.



Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.124.

Sebaran Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan gambar peta persebaran Kawasan perdesaan di atas, Jawa Tengah memiliki potensi 149 Kawasan Perdesaan yang tersebar merata di seluruh wilayah desa. Beberapa di antaranya bahkan berada di perbatasan wilayah kabupaten dan wilayah Provinsi. Hal tersebut dapat diarahkan untuk menstimulasi Kerjasama pembangunan antar wilayah perbatasan.

Apabila dilihat dari capaian kinerjanya, walaupun dari sisi kuantitas jumlah Kawasan perdesaan di Jawa Tengah terus meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 1) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi pembangunan kawasan perdesaan; 2) Belum sinerginya pembangunan kawasan perdesaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten; serta 3) Masih lemahnya komitmen pelaku dalam pembangunan.

2.6.12. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 program dan 8 indikator kinerja. Pada Tahun 2024 realisasi capaian kinerja perencanaan persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) pada lingkup bidang perekonomian, bidang pemerintahan dan sosial budaya, infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada masing – masing bidang mencapai target 100 persen dan untuk Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan pada Tahun 2024 juga sebesar 100 persen. Sehingga indikator urusan Perencanaan sebanyak 8 indikator dengan keseluruhan indikator berstatus telah tercapai.

Selain kinerja program Sejak Tahun 2024 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Provinsi telah dicanangkan oleh Kementerian Bappenas yang hasil penilaian untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,89 yang penilaiannya mendasarkan pada komponen sinergi, kualitas perencanaan dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja, adapun sub komponennya berupa keselarasan;

kesesuaian; target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.

2.6.13. Keuangan

Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai menggunakan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif , efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD setiap tahun dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi dasar pengukuran yang dilakukan untuk pertama kali pada tahun 2021 untuk Tahun Anggaran 2018-2020. Namun demikian, Kemendagri baru merilis hasil pengukurannya melalui Kepmendagri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023. IPKD diukur melalui enam dimensi, yaitu:

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. Kualitas anggaran belanja dalam APBD;
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyerapan anggaran;
- e. Kondisi keuangan daerah;
- f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Gambaran kemampuan keuangan daerah juga dapat dilihat menggunakan Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang menunjukkan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Pengelompokan kategori kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Formulasi perhitungan kapasitas fiskal daerah selama beberapa tahun terakhir mengalami beberapa kali penyesuaian yang mengakibatkan perubahan pada pengelompokan kategori tiap daerah berdasarkan nilai rasionya, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.162.
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kapasitas Fiskal Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Indikator		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
IPKD	Indeks Total	-	-	-	79,293	*
	Kategori	-	-	-	B	*
Kapasitas Fiskal Daerah	Rasio KFD	2,0943	2,046	1,947	1,821	1,708
	Kategori KFD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber : Kepmendagri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

*Hasil pengukuran IPKD Tahun 2024 belum rilis

Hasil Pengukuran IPKD Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2023 menunjukkan perlunya upaya perbaikan. Nilai maksimal didapatkan pada dimensi kualitas anggaran belanja dalam APBD yang disebabkan pengalokasian belanja mandatori sudah sesuai regulasi dan dimensi opini pemeriksaan BPK atas pemeriksaan LKPD dimana sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD Tahun 2023. Sedangkan dimensi yang membutuhkan perbaikan adalah Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran khususnya terkait kesesuaian nomenklatur program dan pagu program dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga APBD; Transparansi pengelolaan keuangan daerah; Penyerapan anggaran dan Kondisi keuangan daerah.

Kapasitas fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 masuk dalam kategori sangat tinggi. Pada periode tersebut formulasi perhitungan dibandingkan dengan nilai rata-rata kapasitas fiskal seluruh provinsi yang ada, artinya pertumbuhan kemampuan keuangan Provinsi Jawa Tengah lebih baik dari sebagian besar provinsi lain dan hanya Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur yang berada diatas Jawa Tengah. Sedangkan pada periode tahun 2022 sampai dengan 2024 formulasi perhitungan kapasitas fiskal dibandingkan dengan belanja pegawai pada masing-masing provinsi. Pendapatan Provinsi Jawa Tengah terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi peningkatan pendapatan tersebut juga disertai dengan peningkatan belanja pegawai karena penambahan formasi PPPK tenaga teknis pada sektor pendidikan dan kesehatan sehingga nilai rasio kapasitas fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah menurun.

2.6.14. Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada tercapainya terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan terwujudnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (*quick response*). Kinerja bidang pengawasan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2019-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.163.
Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2024

No.	Kinerja Pengawasan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Maturitas SPIP	2,85	n/a	3,115	3,267	3,464	3,471
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

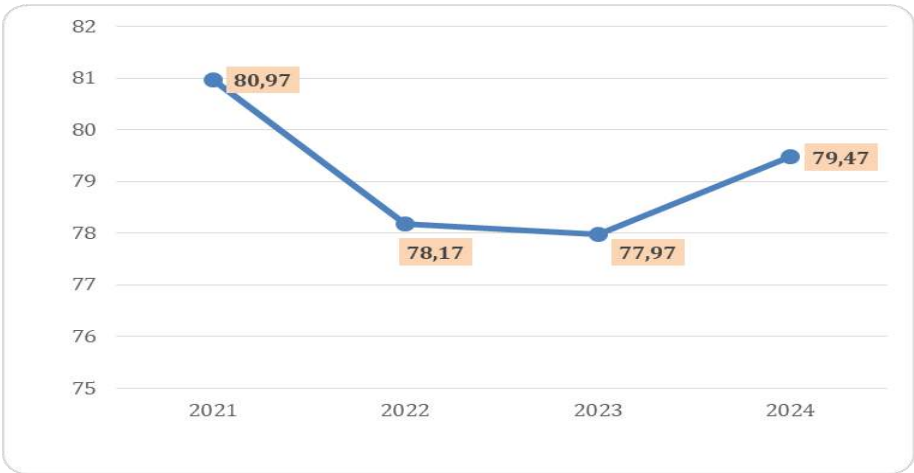
Sumber: Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang disebabkan

perubahan metodologi penilaian. Sedangkan tahun 2020, tidak dilakukan quality assurance oleh BPKP serta terdapat perubahan pedoman aplikasi SPIP online, sehingga berakibat tidak ada penilaian maturitas SPIP tahun 2020 yang telah berjalan dan akan dilanjutkan pada tahun 2021. Sedangkan nilai maturitas SPIP pada tahun 2021 sebesar 3,115 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,043. Hal ini disebabkan karena belum menerapkan manajemen resiko sebagai indikator unit kerja. Namun pada Tahun 2023 nilai maturitas SPIP kembali mengalami peningkatan dari 2022 sebesar 3,267 menjadi 3,464. Trend kenaikan berlanjut pada tahun 2024 yang meningkat 0,007 menjadi 3,471. Namun apabila dilihat trend lima tahun, kinerja pengawasan cenderung meningkat yang artinya kebijakan pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik.

Sesuai dengan hasil reuiu atas *quality assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai dengan 2023 Kapabilitas APIP sudah mencapai Level 3 penuh. Ini artinya telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu terwujudnya peran APIP yang efektif baik dari sisi *quality assurance*, *consulting partner* dan *anti corruption activities*.

Kinerja pengawasan juga mendukung pencapaian reformasi birokrasi melalui upaya manghapus seluruh praktik-praktik korupsi seperti penyuapan, pemerasan gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang melalui penguatan integritas. Capaian nilai Indeks Integritas Nasional (IIN) yang diambil dari Survey Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2021–2023 menunjukkan tren penurunan dari 80,97 pada tahun 2021 menjadi 77,91 pada tahun 2023, namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 79,47, sekaligus menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan nilai SPI tertinggi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan capaian nasional pada periode yang sama, yakni dari 72,4 pada tahun 2021 menjadi 71,53 pada tahun 2024, kinerja Jawa Tengah masih berada di atas rata-rata nasional. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap mengindikasikan bahwa upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas aparatur serta organisasi pemerintah perlu terus ditingkatkan melalui penguatan sistem pengawasan, manajemen risiko, dan pembudayaan etika birokrasi yang berintegritas



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024.

Gambar 2.125.
Indeks Integritas Nasional Jawa Tengah dibandingkan Nasional Tahun 2021-2024

2.6.15. **Pertanahan**

Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), lingkup bidang pertanahan merupakan pendukung kegiatan pembangunan fisik dalam hal mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan keluaran yaitu ijin penetapan lokasi (penlok) yang bertujuan agar tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat dipermainkan makelar tanah dan mendapat ganti untung yang layak dari pemerintah. Pada Tahun 2024 terdapat penyelenggaraan 7 (tujuh) penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebanyak 3.490 bidang tanah seluas 924,48 Ha yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.164.

Penetapan lokasi aktif Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah Tahun 2024

NO	PENETAPAN LOKASI	JUMLAH BIDANG	LUAS TANAH	NO / TANGGAL TERBIT SK	KETERANGAN
1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora	± 908 bidang	± 392,37 Ha	590/2 31 Januari 2024 (BENDUNGAN KARANGNONGKO DI KAB. BLORA)	Habis Pada Tanggal 31 Januari 2027
2	Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran-Pedan <i>Sirkuit 2</i> Section 2 (Ampel-Pedan) di Provinsi Jawa Tengah	± 189 bidang	± 5,6177 Ha	590/22 Tahun 2024 5 September 2024 (SUTET 500kV Ungaran-Pedan <i>Sirkuit 2</i> Section 2 (Ampel-Pedan) di Provinsi Jawa Tengah)	Habis Pada Tanggal 5 September 2025
3	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bodri di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung	± 1.083 bidang	± 277 Ha	590/24 Tahun 2024 19 September 2024 (BENDUNGAN BODRI DI KABUPATEN KENDAL DAN KABUPATEN TEMANGGUNG)	Habis Pada Tanggal 19 September 2027
4	Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak	± 153 bidang	± 6,86 Ha	590/32 Tahun 2024 5 November 2024 (SISA TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK)	Habis Pada Tanggal 5 November 2025

NO	PENETAPAN LOKASI	JUMLAH BIDANG	LUAS TANAH	NO / TANGGAL TERBIT SK	KETERANGAN
5	Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Slinga Lanjutan di Kabupaten Purbalingga	± 136 bidang	± 56.294 m ²	590/33 Tahun 2024 12 November 2024 (JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI SLINGA LANJUTAN DI KABUPATEN PURBALINGGA)	Habis Pada Tanggal 12 November 2025
6	Pengadaan Tanah Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV Pedan-Solo Baru di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo	± 101 bidang	± 19.195 m ²	590/34.1 Tahun 2024 21 November 2024 (SUTT 150Kv PEDAN-SOLO BARU DI KAB. KLATEN DAN KAB. SUKOHARJO)	Habis Pada Tanggal 21 November 2027
7	Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Kedunglanggar di Kabupaten Batang	± 1.062 bidang	± 230,62 Ha	590/47 Tahun 2024 20 Desember 2024 (BENDUNGAN KEDUNGLANGGAR DI KAB. BATANG)	Habis Pada Tanggal 20 Desember 2027
JUMLAH		3.490 Bidang	924,48 Ha		

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024.

Tabel 2.165.
Capaian Penerbitan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024

No	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemantauan Penetapan Lokasi	-	400	526	2.217	898	224	6.917
2	Penetapan Lokasi	7.414	2.237	5928	2.811	12.433	1.616	3.940

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.166.
Capaian Kinerja urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI					TOTAL (S.D AKHIR TAHUN 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Penetapan Lokasi	5.928 Bidang (493,44 37 Ha)	2.811 Bidang	+ 12.433 Bidang (1.223,60 Ha)	1.616 Bidang (411,68 Ha)	3.940 Bidang (924,48 Ha)	28.965 Bidang (1.247,99 5 Ha)

NO	URAIAN	REALISASI					TOTAL (S.D AKHIR TAHUN 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024	
			(± 858,891 6 Ha)				
2.	Reforma Agraria						
	a). Sertifikasi LP2B	200 Bidang	350 Bidang	150 Bidang	650 Bidang		1.450 Bidang
	b). Sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD)	15 Bidang	0	63 Bidang	37 Bidang		130 Bidang
	c). Inventarisasi Tanah HP dan HGU	20 Bidang	10 Bidang	30 Bidang	27 Bidang		107 Bidang
	d). Pelatihan untuk Akses Reforma Agraria	100 Orang	260 Orang	350 Orang	350 Orang	400 Orang	1.567 Orang

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pelaksanaan sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B juga bertujuan untuk mempertahankan lahan pangan di Provinsi Jawa Tengah yang sampai dengansaat ini sudah banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan industry/non-pertanian. Kegiatan ini sekaligus sebagai stimulasi kepada Pemerintah Kab/Kotadengan harapan agar ke depannya Pemerintah Kab/Kota dapat mereplikasi kegiatanserupa sebagai bentuk dukungan pelaksanaan.

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat provinsi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah menginventarisasi potensi penataan aset dan mengkoordinasi serta melakukan fasilitasi penataan akses bagi penerima program Reforma Agraria. Penataan akses yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kebutuhan subyek program reforma agraria antara lain seperti pelatihan kepada kelompok tani dikawasan LP2B dan pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik. Capaian pelaksanaan program Reforma Agraria yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Disperakim berkedudukan sebagai sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Tengah berperan dalam optimalisasi penyelenggaraan Reforma Agraria di Jawa Tengah, melalui kolaborasi dan optimalisasi Tim GTRA. Penyelenggaraan Reforma Agraria berupa Penataan Akses telah dilaksanakan melalui 8 kegiatan pada lokasi miskin ekstrim dengan jumlah intervensi 400 KK yaitu:

1. Penataan Akses melalui pemberdayaan masyarakat secara reguler dilaksanakan di 6 (enam) lokasi yaitu :
 - a). Pelatihan pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi produk organik di Desa Sudungdewo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 - b). Pelatihan pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi produk organik di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
 - c). Pelatihan pembuatan pupuk organik di Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;
 - d). Pelatihan penanggulangan hama pada tanaman padi di Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar;
 - e). Pelatihan pengolahan sampah organik menjadi produk rumah tangga di Desa Glempang Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;
 - f). Pelatihan Pelatihan Pengolahan Sampah Organik menjadi Bioaktivator di Desa Slukatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.
2. Penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat secara kontinyu di 2 (dua) desa rintisan Reforma Agraria (pilot project) yaitu:
 - a). Pelatihan pemanfaatan limbah sabut kelapa di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga;
 - b). Pelatihan pemanfaatan limbah organik menjadi bahan bioremediasi di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Adapun rincian pelatihan yang Pelatihan Yang Telah Dilakukan dalam Rangka Mendukung Akses Reforma Agraria pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.167.
Pelatihan Yang Telah Dilakukan dalam Rangka Mendukung Akses Reforma Agraria

No	Kabupaten/ Kota	Desa	KK yang Terintervensi	Bentuk Pelatihan/ Sosialisasi/Workshop	Instansi yang terlibat	Keterangan
1	Kabupaten Wonosobo	Desa Sudungdwo	50 KK	Pelatihan "Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Menjadi Produk Organik"	Disperakim Prov. Jateng; Disperkimhub Kab. Wonosobo & Praktisi	Penerima Sertifikasi LP2B 2023
2	Kabupaten Banyumas	Desa Pliken	50 KK	Pelatihan "Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Menjadi Produk Organik"	Disperakim Prov. Jateng; Disperkim Kab Banyumas & Praktisi	Penerima Sertifikasi LP2B 2018
3	Kabupaten Blora	Desa Bakah	50 KK	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Disperakim Prov. Jateng; Bagian Pemerintahan SETDA Kab Blora & Praktisi	Penerima Sertifikasi LP2B 2018
4	Kabupaten Karanganyar	Desa Karangsari	50 KK	Pelatihan Penanggulangan Hama Pada Tanman Padi	Disperkim Prov.Jateng; DPUTR Kab. Karanganyar (Bidang Pertanahan) & Praktisi	Penerima Sertifikasi LP2B 2018
5	Kabupaten Cilacap	Desa Glempang	50 KK	Pelatihan Pemanfaatan Sampah Sebagai Produk Sehari-hari.	Disperakim Prov. Jateng, DPUTR Kab. Cilacap (Bidang Pertanahan) dan Praktisi	Penerima Sertifikasi LP2B 2023

No	Kabupaten/ Kota	Desa	KK yang Terintervensi	Bentuk Pelatihan/ Sosialisasi/Workshop	Instansi yang terlibat	Keterangan
6	Kabupaten Wonosobo	Desa Slukatan	50 KK	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik menjadi Bioaktivator	Disperakim Prov. Jateng; Disperkimhub Kab. Wonosobo & Praktisi	-
7	Kabupaten Purbalingga	Desa Panusupan	50 KK	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sabut Kelapa	Disperakim Prov Jateng; Disperkim Kab Purbalingga; DinkopUMKM Prov Jateng; DinkopUMKM Kab Purbalingga & Praktisi	Penerima Sertifikasi Redistribusi Tanah 2022
8	Kabupaten Pemalang	Desa Tambakrejo	50 KK	Pelatihan Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga Menjadi Produk Organik	Disperakim Prov Jateng; Dishanpan Prov Jateng; Disperkim Kab Pemalang & Praktisi	Penerima Sertifikasi PTSL 2021

Sumber: Disperakim Prov. Jawa Tengah, 2024.

2.7. **Kondusivitas Daerah**

Salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari apakah daerah tersebut kondusif, sehingga peran pemerintah untuk dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat menjadi mutlak. Mewujudkan kemandirian perlu juga menciptakan kondisi yang teratur, tertib sesuai norma yang berlaku dan juga yang ada di masyarakat. Dengan perwujudan tersebut, maka potensi konflik akan secara simultan dapat ditekan dan stabilitas daerah terjaga.

Upaya yang telah dilakukan yaitu terkait dengan terselesaikannya seluruh pelanggaran Produk hukum daerah yang terinventarisasi melalui cara persuasif dan represif. Namun apabila terindikasi adanya sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana, maka dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Hingga saat ini tercatat 147 Perda yang masih aktif, dengan Perda yang memiliki sanksi hukum (sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana) sebanyak 65 Perda. Beberapa Perda tidak dapat ditegakkan karena Instansi Teknis sebagai pengampu Perda tidak dapat menjalankan fungsinya.

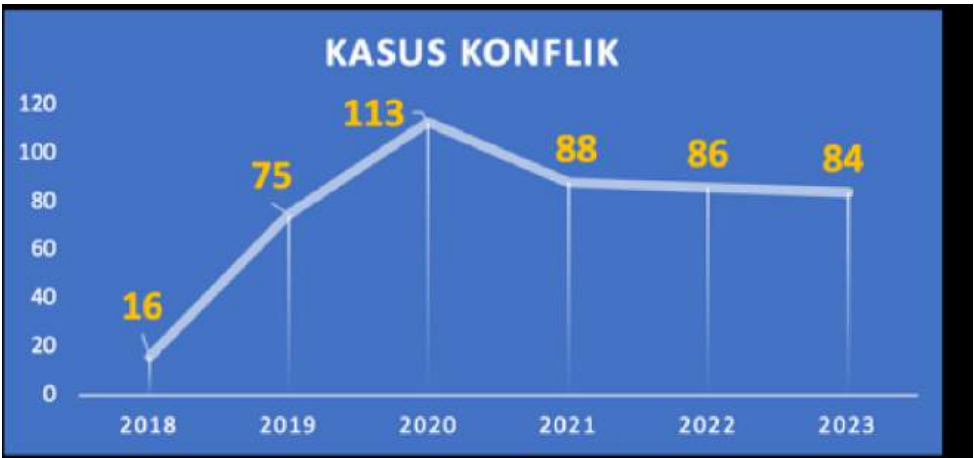
Berbeda dengan penegakan hukum yang ada, secara intensitas atas patroli yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkup Provinsi Jawa Tengah tiap tahun masih cukup rendah, sehingga kurang dapat menciptakan kondisi yang tentram disebagian daerah. Rasio jumlah linmas terhadap jumlah penduduk Jawa Tengah semakin menurun karena rendahnya minat masyarakat menjadi anggota linmas, banyak anggota linmas yang meninggal dunia, dan adanya perpindahan anggota linmas keluar provinsi. Selain itu jumlah Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya masih cukup rendah. Hingga tahun 2024 masih sebanyak 17.138 Linmas yang sudah ditingkatkan kapasitasnya atau sebesar 6,79 persen dari jumlah linmas tahun 2024.

Tabel 2.168.
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2019-2024

No	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Linmas	Peningkatan Kapasitas Linmas
1	2019	230.782	34.490.835	66,91	5.420
2	2020	239.430	36.516.035	66,57	560
3	2021	240.958	36.516.035	65,98	840
4	2022	241.349	37.032.410	65,17	2.488
5	2023	227.415	37.540.962	60,58	6.830
6	2024	255.835	37.892.283	67,52	1000

Sumber : Sat. Polisi Pamong Praja Prov. Jateng dan BPS Jateng, 2024

Mendasarkan atas upaya yang telah dilakukan, masih ada beberapa hal yang perlu adanya peningkatan kinerja dan langkah kongkrit dalam cipta kondisi. Dilihat dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2023, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir konflik masih memerlukan upaya yang cukup keras, karena di tahun 2018 dapat diminimalisir hingga hanya terjadi 16 kasus saja.



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah,2024.

Gambar 2.126.
Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023

Potensi radikalisme di Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menunjukkan nilai 6,8% atau masih diatas rata-rata nasional. Potensi radikalisme lebih tinggi pada perempuan, generasi muda, dan mereka yang aktif diinternet. Masih menjadi satu kesatuan riset yang dilakukan oleh BNPT, Indeks kebhinekaan masyarkat di Jawa Tengah adalah 89,6% dengan dimensi sikap masih tergolong rendah jika dibanding dengan dimensi pemahaman, hal ini dikarenakan kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses internet dan sosial media, termasuk pada kalangan rural. Melihat pentingnya akses internet dalam meningkatkan internalisasi kebhinekaan, perlu juga disiapkan tentang literasi digital yang ada di masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut karena pada mereka yang aktif diinternet memiliki potensi radikalisme yang lebih tinggi.

Hal lain yang dapat merepresentasikan kondisi umum dalam menjaga kondusivitas wilayah adalah dengan melihat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Berdasarkan rilis oleh Kementerian Agama, IKUB Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dimana skors tahun 2022 sebesar 74,28, sedangkan di tahun 2023 sebesar 76,02.

Selain itu pada penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dengan pengukuran terbaru memperoleh nilai 84,79. Hal yang perlu upaya keras terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja, kinerja lembaga legislatif, Aspek kesetaraan pada penilaian IDI Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sedang, dimana pada aspek tersebut memperlihatkan kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, serta anti monopoli sumber daya ekonomi dalam sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian karena keterbatasan sumber daya.

Informan yang ada tidak dapat mencakup keseluruhan luas wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu adanya alternatif lain untuk memiliki informan di beberapa titik yang terindikasi rawan terjadinya pelanggaran yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu alternatif yang ada adalah melakukan mobilisasi linmas yang ada di daerah. Persoalan yang perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan alternatif tersebut adalah menurunnya rasio linmas yang ada.

2.8. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Realisasi RPD Sampai Dengan Tahun 2024

Kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Wajib sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja RPD di tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2024 - 2026 dapat digambarkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKPPD) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.169.

**Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPKD Tahun 2024
Terhadap Target Akhir RPD Tahun 2024 - 2026**

Indika tor	Jumlah Indika- tor	Sangat Tinggi: 91≤100%		Tinggi : 76 ≤ 90%		Sedang : 66 ≤ 75 %		Rendah : 51 ≤ 65 %		Sangat Rendah : ≤ 50 %		NA	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
I K U	14	13	92,85	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,14
I K D	126	118	93,65	5	3,96	0	0	0	0	1	0,79	8	6,34

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024 (hasil analisis).

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, Sampai dengan tahun 2024, dari 14 (empat belas) IKU Daerah dari 14 indikator tersebut yang berskala sangat tinggi sebanyak 13 indikator dan 1 indikator berskala NA dikarenakan data belum rilis.

Sedangkan capaian indikator kinerja daerah ditunjukan dengan indikator yang berjumlah 126 indikator yang terbagi dalam 3 aspek yaitu Aspek

Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Tingkat ketercapaian pada 3 Aspek diatas sebanyak 126 indikator dengan skala capaian Sangat Tinggi sebanyak 121 indikator, Tinggi sebanyak 2 indikator, dan Sangat Rendah 1 indikator dan 2 indikator berstatus n.a dikarenakan data belum rilis. 1 Indikator yang berskala sangat rendah yaitu : Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan dikarenakan Turunnya jumlah pemotongan (di dalam RPH dan luar RPH) dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2023, dari sebagian besar ternak besar seperti komoditas sapi, kerbau, kambing dan domba.

2.9. Permasalahan Pembangunan

2.9.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan merupakan hasil analisis gambaran umum daerah Jawa Tengah yang mencakup aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah selama lima tahun. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan yang sifatnya lintas sektor atau *crosscutting*, makro, dan menjadi kewenangan tingkat daerah. Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah yang masih relevan dalam lima tahun ke depan dan akan diselesaikan pada Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut.

Aspek Geografi

Dari hasil gambaran umum kondisi daerah pada aspek geografi yang telah disajikan pada bab sebelumnya, diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagai berikut.

1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

Kebutuhan akan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas semakin meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas penduduk sejalan dengan jumlah penduduk yang juga semakin meningkat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah semakin menurun.

Di sisi lain, beberapa tekanan lingkungan di Jawa Tengah antara lain seperti perubahan tata guna lahan yang menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati, peningkatan produksi limbah domestik padat (sampah) dan cair dengan masih terbatasnya kapasitas pengelolaannya, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan antara lain masih rendahnya pengawasan dan pemantauan terhadap industri penghasil limbah, masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup. Dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Jawa Tengah, terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi.

Permasalahan lain terkait kualitas lingkungan hidup adalah penurunan vegetasi tutupan hutan dan peningkatan luasan lahan kritis. Kondisi tersebut yang menyebabkan penurunan daya dukung DAS, ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang disebabkan terganggunya habitat, peningkatan alih fungsi kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan, pemanfaatan hutan

yang belum optimal (kayu, non kayu, jasa lingkungan), ancaman kerusakan kawasan hutan (kebakaran hutan dan lahan, pencurian sumber daya hutan dan perambahan kawasan hutan), dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia kehutanan. Wilayah pesisir dan laut di Jawa Tengah juga saat ini mengalami degradasi yang ditunjukkan antara lain kerusakan ekosistem mangrove, terjadinya abrasi, dan rob terutama pada wilayah pesisir dan laut pantai utara Jawa Tengah.

Permasalahan sumber daya air tidak hanya terkait ketersediaan air, namun lebih luas permasalahannya adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Selain permasalahan sumber daya air permukaan sebagaimana digambarkan sebelumnya, di Jawa Tengah juga terjadi peningkatan pemanfaatan air tanah yang berpotensi mempercepat terjadinya amblesan tanah atau *land subsidence*. Amblesan tanah merupakan salah satu ancaman bencana yang terjadi dalam waktu yang relatif lama (*silent killer*) namun berdampak cukup luas yang umumnya terjadi di wilayah-wilayah perkotaan, industri, dan pemukiman padat seperti yang telah terjadi di Wilayah Pantura Jawa Tengah. Penurunan kualitas lahan juga terjadi di Jawa Tengah sebagai akibat belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

2. Belum optimalnya ketahanan pangan

Permasalahan dari aspek geografi lainnya adalah terkait dengan ketahanan pangan. Hasil identifikasi permasalahan ketahanan pangan antara lain yaitu belum optimalnya penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi; pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan; pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman; diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal; sistem rantai pasok pangan; jaminan keamanan dan mutu pangan; riset, inovasi, dan teknologi pangan; pengendalian harga bahan pangan; serta peran serta masyarakat untuk penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; dan pencegahan pemborosan pangan (*food waste*). Selain itu, terdapat kecenderungan penurunan daya dukung pangan yang akan mempengaruhi kecukupan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masa yang akan datang.

3. Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana

Selain lingkungan hidup, kondisi geografi juga mempengaruhi kondisi kebencanaan. Gambaran kebencanaan ditunjukkan dari indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) yang dari tahun ke tahun IRB Jawa Tengah terus membaik menjadi sebesar 99,61 pada tahun 2024. Kondisi geografi Jawa Tengah dengan kemiringan yang bervariasi, kondisi sesar dan patahan, kondisi kegunungapian, serta alur-alur sungai memberikan tantangan dalam penanggulangan bencana khususnya bencana yang terjadi sewaktu-waktu atau bencana yang memiliki waktu evakuasi singkat, seperti gempa, tsunami, gerakan tanah dan banjir bandang. Jumlah dan kepadatan penduduk menyebabkan wilayah konservasi (termasuk wilayah rawan bencana) digunakan sebagai wilayah budidaya sehingga potensi keterpaparan penduduk terhadap ancaman bencana semakin tinggi. Tata kelola kebencanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana juga masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Perencanaan penanggulangan bencana, sistem peringatan dini

(*early warning system/EWS*), literasi masyarakat tentang kebencanaan, serta kapasitas lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah masih perlu ditingkatkan.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah meliputi sebagai berikut.

1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dilihat dari kemiskinan. Cukup tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2024 sebesar 9,58 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 8,57 persen.

Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah, tetapi juga ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin. Karakteristik rumah tangga miskin di Jawa Tengah sebagian besar jumlah anggota rumah tangganya rata-rata 4-5 orang, usia kepala rumah tangga rata-rata 53,90 tahun, berpendidikan sampai dengan SD atau tidak tamat SD dan penghasilan utama bersumber dari sektor pertanian.

Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk miskin yang disebabkan belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan pemenuhan infrastruktur dasar seperti penyediaan rumah yang layak huni, layanan air minum dan sanitasi aman.

Di sisi lain, permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Program bantuan sosial masih dihadapkan pada permasalahan cakupan dan kualitas pendataan yang antara lain disebabkan oleh kepemilikan identitas kependudukan, keterbatasan petugas pendataan dibandingkan sasaran, serta tata kelola data yang belum terintegrasi antar sektor.

Sementara itu, rendahnya konsumsi listrik per kapita di Jawa Tengah juga masih menjadi salah satu permasalahan. Konsumsi listrik per kapita Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 baru mencapai 802,05 kWh/kapita yang lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Tingkat konsumsi listrik ini erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat

2. Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat

Membangun Jawa Tengah berbudaya dengan membentuk karakter dan menjaga kearifan lokal Jawa Tengah sebagai warisan leluhur yang adiluhung

memiliki tantangan tersendiri. Dalam upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, diperlukan komitmen bersama seluruh *stakeholder* untuk memahami budaya tidak hanya sebagai seni namun juga secara menyeluruh diartikan sebagai entitas nilai, laku maupun karya yang dapat ditransmisikan sebagai pedoman dalam berkehidupan, Pergeseran karakter dan budaya akibat pengaruh budaya dari luar juga memberikan pengaruh pada perubahan kondisi lingkungan masyarakat salah satunya adalah potensi terjadinya intoleransi, radikalisme dan ekstremisme yang mengarah pada aksi terorisme. Permasalahan tersebut terjadi juga tidak terlepas dari peran keluarga dan perempuan yang memegang peranan penting sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang memiliki karakter dan identitas budaya Jawa sejak usia dini.

Aspek Daya Saing

Permasalahan berdasarkan aspek daya saing di Jawa Tengah meliputi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat perannya sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia Jawa Tengah selain memastikan tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi, juga memperhatikan kualitas layanan dasar sehingga tercapai manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Namun demikian kualitas hidup sumber daya manusia Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan mengingat penyediaan layanan kebutuhan dasar masyarakat belum merata dan inklusif, terutama kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 73,88 yang masih di bawah angka IPM nasional yang sebesar 75,02. Meskipun demikian, jika dilihat dari indikator Indeks Modal Manusia (IMM) Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 0,55 lebih baik dibandingkan dengan nasional yang sebesar 0,54.

Kualitas pendidikan masyarakat ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah yang capaiannya masih di bawah nasional. Rata-rata lama bersekolah di Jawa Tengah yang masih rendah diperkuat dengan masih dijumpainya anak tidak sekolah (ATS) yang mencapai 500.000 jiwa, tertinggi ketiga secara nasional. Sementara harapan lama sekolah yang masih di bawah nasional disebabkan masih belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan di Jawa Tengah, ditandai dengan masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, adanya kesenjangan layanan pendidikan, dan kurangnya mutu pendidikan.

Permasalahan kesehatan mengalami perubahan pola ke arah semakin kompleks sebagai akibat adanya pengaruh perubahan lingkungan dan perilaku. Usia harapan hidup penduduk Jawa Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum diimbangi dengan peningkatan usia harapan sehat. Transisi demografi, perubahan gaya hidup dan serta mobilitas antar wilayah memicu transisi epidemiologi yang mengarah pada peningkatan kasus tidak menular pada usia produktif (termasuk tren meningkatnya masalah kesehatan jiwa), serta masih adanya beban penyakit menular terabaikan dan

penyakit menular baru serta *zoonosis*. Masih rendahnya literasi kesehatan yang berdampak pada pemahaman terkait pentingnya kegiatan promotif dan preventif. Pada aspek gizi, beban ganda masalah kelebihan dan kekurangan gizi (*underweight, wasting, stunting, overweight*), pengetahuan dan perilaku pemenuhan kebutuhan gizi, serta ketahanan pangan pada level keluarga masih menjadi faktor determinan yang mempengaruhi status gizi masyarakat. Dari sudut pandang akses dan kualitas masih kurang optimalnya mutu pelayanan kesehatan primer dan lanjutan belum efisiennya pengelolaan fiskal dan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif serta distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata. Selain itu, pembangunan kesehatan juga dipengaruhi minimnya inovasi dan teknologi kesehatan.

2. Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal

Perekonomian Jawa Tengah masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Perekonomian Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, pertumbuhan sektor-sektor unggulan (pertanian dalam arti luas termasuk pangan, industri pengolahan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata), hilirisasi yang mendukung kebijakan pusat dan berbasis potensi lokal, kemudahan investasi, infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa, serta wilayah yang kondusif. Tantangan ke depan adalah mewujudkan perekonomian daerah dengan produktivitas tinggi dengan tetap menerapkan ekonomi hijau. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antarmasyarakat dan antarwilayah.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah masih dijumpai berbagai permasalahan yang perlu ditangani, terutama terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan

Permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan di Jawa Tengah sebagai berikut:

1) Sektor pertanian (dalam arti luas)

Pertanian adalah salah satu sektor unggulan Jawa Tengah yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB. Namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan diantaranya **belum optimalnya** produksi dan produktivitas sektor pertanian, modernisasi pertanian, integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian, pengelolaan pertanian secara mandiri dan keterjangkauan biaya produksi pertanian, pengembangan pertanian berbasis korporasi, implementasi hilirisasi di sektor pertanian serta kapasitas dan kompetensi pelaku usaha sektor pertanian. Selain itu permasalahan lain adalah masih tingginya alih fungsi lahan dan rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian. Semua permasalahan tersebut perlu diselesaikan sebagai upaya menjadikan Jawa Tengah salah satu penunjang pangan nasional yang berkelanjutan dan memberikan dampak yang nyata pada kesejahteraan petani.

2) Sektor industri pengolahan

Sektor lain yang menjadi sektor unggulan Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi kinerja sektor industri pengolahan antara lain:

- a) Belum optimalnya produktivitas industri, terutama industri kecil dan menengah:
 - industri pengolahan berbahan baku lokal (terutama industri subsektor makanan dan minuman)
 - integrasi rantai pasok antarindustri;
 - digitalisasi industri pengolahan;
 - ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri pengolahan;
 - infrastruktur pendukung industri pengolahan;
 - keterjangkauan teknologi ramah lingkungan, iklim usaha yang kondusif dan iklim kemitraan, serta;
 - penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru).
- b) Rendahnya nilai tambah produk industri:
 - kapasitas industri kecil dan menengah untuk mampu menghasilkan produk nilai tambah tinggi.
- c) Rendahnya kapasitas pelaku industri:
 - kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan;
 - rendahnya kepedulian akan prinsip keberlanjutan dalam industri).

3) Sektor perdagangan

Sektor perdagangan juga menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar pada perekonomian daerah Jawa Tengah. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor perdagangan ini, antara lain **belum optimalnya** ekspor unggulan daerah, pengurangan ketergantungan impor, standarisasi produk-produk unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan, iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah, serta sistem distribusi produk perdagangan.

4) Sektor koperasi dan UMKM

Sektor lain yang menjadi unggulan perekonomian Jawa Tengah adalah usaha kecil dan menengah, serta koperasi. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap PDRB Jawa Tengah. Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah di Jawa Tengah, antara lain **belum optimalnya** kualitas produk unggulan UMKM, akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha, digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM, kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM, wirausaha baru, pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam, serta kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi.

5) Sektor pariwisata

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan Jawa Tengah dalam menyokong perekonomian daerah. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, penyediaan

lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata. Namun, kontribusi sektor pariwisata pada pendapatan asli daerah dan pada PDRB belum optimal. Kondisi belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah maupun PDRB disebabkan beberapa permasalahan, antara lain, kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara masih belum optimal, rata-rata lama menginap wisatawan relatif rendah dan masih rendahnya pengeluaran wisatawan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain **belum optimalnya** promosi pariwisata, kondisi destinasi wisata termasuk kondisi sarana prasarana destinasi wisata, diversifikasi daya tarik pariwisata, infrastruktur konektivitas antardestinas wisata, integrasi antardestinas wisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata serta belum beroperasi secara penuh Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo sebagai Bandara Internasional yang menjadi Pintu masuk Wisatawan Mancanegara.

6) Sektor ekonomi kreatif

Ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu menjadi kekuatan baru untuk peningkatan perekonomian daerah Jawa Tengah. Namun demikian saat ini perkembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah belum memperlihatkan hasil yang optimal terutama dalam Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap Perekonomian daerah. Beberapa faktor penyebabnya hal ini antara lain **belum optimalnya** kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa, pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif, sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif, infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif, sistem regulasi ekonomi kreatif, apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual, jejaring kabupaten/kota kreatif, desa kreatif terutama pada produk kreatif unggulan, serta standarisasi produk dan praktek usaha ekonomi kreatif.

b. Rendahnya daya saing tenaga kerja dan pengangguran

Pembangunan ketenagakerjaan yang berdaya saing mencakup kualitas tenaga kerja yang unggul, tingkat produktivitas tenaga kerja yang tinggi, kesempatan kerja yang terbuka luas, hingga adanya perlindungan tenaga kerja. Beberapa faktor penyebab rendahnya daya saing tenaga kerja antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan, belum optimalnya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, yang disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi, keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi, sistem perlindungan tenaga kerja, industri masih bersifat padat karya (belum padat modal/teknologi tinggi), iklim ketenagakerjaan termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan, serta informasi pasar kerja. Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja yang menyebabkan rendahnya serapan tenaga kerja Jawa Tengah di lapangan kerja yang tersedia. Rendahnya serapan tenaga kerja inilah yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah masih cukup tinggi meskipun lebih baik jika dibandingkan dengan nasional.

c. Belum optimalnya riset dan inovasi

Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Namun demikian, kondisi saat ini riset dan inovasi belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Beberapa penyebabnya antara lain **belum optimalnya** peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor, tata kelola kelembagaan riset dan inovasi, pemanfaatan hasil riset dan inovasi di semua sektor, kerja sama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah, inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

d. Ketimpangan ekonomi antarwilayah

Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Jawa Tengah masih terjadi. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh faktor geografis dan demografis, belum meratanya penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, belum meratanya penyediaan prasarana dan sarana pendukung ekonomi, belum optimalnya konektivitas antarwilayah, dan belum optimalnya tingkat kemandirian desa. Permasalahan lainnya antara lain adalah tingkat produktivitas ekonomi antarwilayah perkotaan dan perdesaan yang masih belum merata yang disebabkan beberapa faktor antara lain terkait potensi daerah sebagai sektor unggulan daerah yang belum dioptimalkan, serta ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perdesaan khususnya, keterbatasan ketersediaan sarpras pendukung ekonomi, minimnya riset dan inovasi pengembangan produk, keterbatasan akses terhadap permodalan, serta belum optimalnya peran lembaga ekonomi Desa menjadi faktor-faktor yang menghambat perkembangan desa dalam upaya pemerataan pembangunan perekonomian perdesaan dan perkotaan.

3. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah

Ketersediaan prasarana sarana menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan prasarana sarana adalah masih belum meratanya jaringan jalan di Jawa Tengah, belum optimalnya kualitas jalan utamanya jalan provinsi yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak. Selain itu masih terdapat titik rawan longsor di ruas-ruas jalan provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana.

Kualitas pelayanan transportasi juga masih perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan keselamatan dan kelancaran perjalanan transportasi (utamanya pada ruas jalan strategis pendukung jaringan distribusi logistik), peningkatan kualitas layanan angkutan umum (jangkauan wilayah dan kapasitas layanan), dan peningkatan pelayanan di simpul transportasi (utamanya kualitas kondisi fisik, pemenuhan utilitas dan persebaran terminal) serta integrasi antarmoda dalam rangka meningkatkan

minat Masyarakat menggunakan angkutan umum. Hal lain yang masih perlu dikembangkan terkait peningkatan kelembagaan pengelolaan transportasi yang berbasis kewilayahan dan penataan sistem logistik yang lebih efisien.

Permasalahan lainnya dalam penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air yang disebabkan masih kurangnya sarana tampungan air baku. Air baku selain dimanfaatkan untuk penyediaan air minum dan pertanian juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata). Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat juga masih perlu didorong untuk ditingkatkan seperti pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, serta penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat.

4. Terdapat simpul-simpul kerawanan yang mempengaruhi stabilitas

Kondusivitas wilayah menjadi salah satu tantangan yang harus dijaga dalam mendukung perwujudan daya saing daerah. Menjaga kondusivitas wilayah memiliki tantangan yang rumit karena berbagai persoalan baik ekonomi, sosial maupun budaya dapat dan/atau memiliki masalahnya sendiri-sendiri dan dapat juga menjadi simpul permasalahan yang kompleks. Sejauh ini kerawanan terjadi pada beberapa gatra mencakup:

- a. Gatra Sumber Kekayaan Alam, berkaitan dengan ketahanan pangan baik kedelai, gula, dan daging sapi terhadap kebutuhan, kemudian kebutuhan air untuk rumah tangga yang terpenuhi dari sumber air bersih, luas kawasan hutan terhadap daratan, potensi lokal kopi terhadap potensi nasional.
- b. Gatra Ideologi, berkaitan dengan toleransi antarmasyarakat perlu diperhatikan untuk meminimalisasi terjadinya konflik, terkait dengan keadilan dimana pemerintah perlu hadir untuk memenuhi hak dengan warga negara berkaitan dengan jumlah panti asuhan, dan jumlah panti jompo masih tergolong rawan dan kurang tangguh, kemudian pada persentase alokasi dana APBD untuk bantuan sosial masih dinilai kurang, termasuk kapasitas fiskal daerah dinilai rawan.
- c. Gatra Ekonomi, berkaitan dengan kemakmuran dengan melihat pengeluaran sandang terhadap pengeluaran total perkapita dan pertumbuhan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan masih dinilai rawan pada indikator tersebut.
- d. Gatra Sosial Budaya, berkaitan dengan variabel eksklusi sosial ditemukan bahwa wanita masih dikategorikan rawan ekonomi, variabel pendidikan berkaitan dengan tingkat kelulusan SLTA di Jawa Tengah termasuk rawan, termasuk akreditasi baik SD, SLTP maupun SLTA masih dinilai rawan. Kejadian konflik baik konflik fisik masal dan konflik antar aparat pemerintah dengan masyarakat tergolong tinggi.

Khusus pada stabilitas politik, permasalahan yang kompleks terjadi pada agenda-agenda khusus berkaitan dengan pelaksanaan pesta demokrasi di daerah, namun beberapa permasalahan dapat juga menjadi simpul kerawanan akibat terabaikannya permasalahan tersebut. Persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah berkaitan dengan pemenuhan HAM, seperti pemenuhan hak-hak pekerja, kemudian berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan pers yang

bebas dalam menjalankan tugas maupun fungsinya. Kesetaraan masyarakat dalam partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik, khususnya melalui lembaga perwakilan. Terakhir berkaitan dengan kapasitas kelembagaan untuk memperhatikan proses penyusunan kebijakan dan pendidikan politik, khususnya bagi kader partai politik.

Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan berdasarkan aspek pelayanan umum di Jawa Tengah adalah **belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas**. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja Reformasi Birokrasi, SPBE, Pengawasan dan Pengendalian serta manajemen ASN berbasis Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah yang membaik dari tahun-tahun sebelumnya namun dampak terhadap kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah belum meningkat signifikan. Selain itu, perbaikan integritas ASN dan organisasi masih sangat perlu ditingkatkan mengingat hasil Survey Penilaian Integritas dalam kurun waktu empat tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan bebas korupsi.

Permasalahan dan tantangan lain yang dihadapi mencakup kelembagaan yang kurang efisien dan tidak adaptif disebabkan lemahnya peran evaluasi kelembagaan, proses bisnis organisasi yang tidak efektif, perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menunjukkan keterpaduan dan keselarasan antar level pemerintahan serta antar dokumen perencanaan. Selain itu, pendekatan berbasis kinerja, manajemen risiko, dan riset kebijakan belum terintegrasi secara optimal dalam proses perencanaan, penjenjangan kinerja organisasi belum berjalan secara fungsional, dan indikator kinerja yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART sehingga efektivitas pemantauan dan evaluasi program belum berjalan optimal. Selain itu, kualitas kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya pemanfaatan hasil riset dan data yang valid dalam proses perumusan kebijakan, serta adanya regulasi yang saling tumpang tindih dan kurang sinkron antar sektor maupun level pemerintahan. Di samping itu, peran pemerintah sebagai kolaborator belum dioptimalkan dalam membangun ekosistem kerja sama multipihak, baik dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dunia usaha, maupun akademisi, untuk memperkuat sinergi dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Terkait kemampuan keuangan daerah, kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih sangat terbatas. Terlebih dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menyebabkan ruang fiskal Pemerintah Provinsi semakin sempit khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Di sisi lain pembiayaan alternatif daerah belum berkembang secara optimal sehingga kapasitas fiskal akan stagnan atau tumbuh lambat yang berdampak pada tingginya ketergantungan pemerintah provinsi terhadap transfer pemerintah pusat.

Hal lain yang masih perlu didorong adalah mewujudkan demokrasi substansial semakin baik ke depan. Demokrasi yang berkembang saat ini masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Yang perlu didorong ke depan antara lain bagaimana memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat, mengarusutamakan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan; serta memperkuat integritas partai politik.

2.9.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan dari hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk Tahun 2026 sebagai berikut.

A. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan pembangunan pendidikan meliputi:

- a. Akses dan keterjangkauan layanan pendidikan belum merata, dilihat dari adanya wilayah blankspot layanan pendidikan menengah, di 22 kecamatan, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai 300 ribu jiwa dan partisipasi pendidikan menengah masih 70 persen.
- b. Mutu pendidikan masih kurang, mengingat pendidik yang bersertifikasi di jenjang pendidikan menengah dan khusus masih di bawah 60 persen, sarpras kondisi baik di bawah 75 persen, skor literasi, numerasi dan nilai karakter masih di bawah 75 serta belum seluruh kab/kota mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi.
- c. Relevansi pendidikan masih kurang, ditandai dengan tingkat penyerapan SMK masih di bawah 90 persen.

2. Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan berkaitan dengan masih perlunya mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan permasalahan antara lain:

- a. Masih tingginya penemuan penyakit menular dan tidak menular serta Kesehatan jiwa;
- b. Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan Balita;
- c. Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan Kesehatan lansia;
- d. Masih ditemukannya permasalahan gizi kurang dan gizi lebih;
- e. Masih belum semua kesehatan primer memprioritaskan pelayanan promotive dan preventif;
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana di rumah sakit.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih perlu ditangani kedepan terutama terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah serta pelayanan dasar bagi masyarakat meliputi:

- a. Masih adanya Jalan Provinsi di Jawa Tengah yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak ringan maupun berat. Selain itu terdapat titik rawan kerusakan akibat bencana longsor/tanah gerak pada ruas-ruas Jalan Provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana;
 - b. Masih rendahnya akses air minum jaringan perpipaan dan sanitasi yang dikelola secara aman yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
 - c. Pendataan teknis belum dilakukan menyeluruh terhadap semua bangunan gedung milik daerah dan belum semua bangunan gedung milik daerah dalam kondisi baik.
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air yang meliputi permasalahan:
 - 1) pemanfaatan sumber daya air antara lain kurangnya ketersediaan air, kurangnya sarana prasarana tampungan air baku, dan banyak sarana prasarana irigasi yang rusak;
 - 2) pengendalian daya rusak air terutama ditunjukkan dengan adanya kerusakan sarpras sungai dan pengendali banjir;
 - e. Belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang, implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Permasalahan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terutama terkait dengan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat, yang meliputi:
- a. Masih tingginya angka kebutuhan rumah layak huni;
 - b. Keterbatasan ketersediaan lahan yang aman dari bencana dan sesuai dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/ Kota untuk penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi program pemerintah
 - c. Belum Optimalnya Penanganan perumahan pasca bencana dan relokasi korban program Pemerintah;
 - d. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh;
 - e. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Permasalahan pada urusan ini terkait dengan masih belum optimalnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum terutama terkait dengan permasalahan:
- a. Peraturan daerah yang ada tidak dapat ditegakkan karena Instansi Teknis sebagai pengampu Perda tidak dapat menjalankan fungsinya dalam sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
 - b. Minimnya pemberdayaan satlinmas yang ada di daerah;
 - c. Masih belum semua kabupaten/kota memiliki dokumen perencanaan kebencanaan;

- d. Masih banyak wilayah rawan bencana yang belum ditingkatkan kapasitasnya baik melalui pembentukan desa tangguh bencana (destana) maupun difasilitasi pemasangan Early Warning System (EWS) maupun rambu jalur evakuasi;
 - e. Masih kurangnya edukasi pada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
 - f. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pada fase pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.
6. Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial berkaitan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus ditangani, yang hingga saat ini penanganannya belum optimal, ditunjukkan dari masih cukup tingginya PPKS. Permasalahan ini didukung dengan permasalahan antara lain:

- a. Rendahnya penanganan PPKS;
- b. Masih adanya KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang belum mendapatkan bantuan modal dan pendampingan;
- c. Masih adanya panti yang kondisinya rusak.

B. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan utama penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Jawa Tengah berkaitan dengan masih cukup tingginya pengangguran, dan belum optimalnya daya saing tenaga kerja, dengan beberapa permasalahan lainnya meliputi:

- a. Masih tingginya penduduk usia kerja yang tidak dalam kondisi bekerja, belajar atau mengikuti pelatihan (*Not in Employment, Education or Training*). Tingginya NEET menjadi hal yang perlu diwaspadai karena berpotensi untuk menaikkan angka pengangguran. NEET yang tinggi menandakan bahwa banyak penduduk usia produktif yang tidak bekerja;
- b. Masih rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah merupakan yang terendah;
- c. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja terutama untuk sektor non formal, hal ini ditandai dengan cakupan kepesertaan bagi pekerja non formal mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2024;
- d. Hubungan industrial yang masih belum harmonis antara pemberi kerja dengan pekerja, hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus hubungan industrial yang terjadi, meskipun telah terselesaikan 100 persen.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkaitan dengan belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga yang ditunjukkan dari permasalahan:

- a. Masih adanya ketimpangan gender dalam pembangunan;
- b. Masih tingginya perkawinan usia anak;
- c. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Pangan

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pada aspek ketersediaan, masih terdapat beberapa komoditas pangan utama yang belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun pada aspek keterjangkauan, beberapa komoditas bahan pangan masih mengalami fluktuasi harga. Selain itu masih terdapat kecamatan dan desa di Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori rentan pangan. Selanjutnya pada aspek pemanfaatan pangan, konsumsi pangan masyarakat belum seimbang antar kelompok pangan. Lebih lanjut kondisi dan permasalahan ketahanan pangan sebagai berikut:

a. Ketersediaan Pangan

Secara umum komoditas pangan utama yaitu beras, jagung, dan kedelai telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun masih terdapat beberapa komoditas pangan yang perlu didorong.

b. Keterjangkauan

Kondisi keterjangkauan pangan dicerminkan berdasarkan peta kerawanan pangan, secara umum masih terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan pangan.

c. Pemanfaatan

Berdasarkan tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat, masih diperlukan dorongan pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan.

4. Pertanahan

Permasalahan utama urusan pertanahan adalah belum optimalnya tata kelola administrasi dan pemanfaatan pertanahan, yang diindikasikan dari beberapa permasalahan antara lain:

- a. Masih terdapat konflik atau sengketa permasalahan pertanahan di Jawa Tengah;
- b. Masih terdapatnya keterbatasan data yuridis dan data fisik dalam penyelesaian sengketa tanah garapan;
- c. *Database* Objek Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai objek sertifikasi hak atas tanah yang merupakan salah satu *tools* dalam menentukan sasaran program sertifikasi bersifat dinamis;
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan asset dan akses reforma agraria;
- e. Masih tingginya intensitas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Tengah melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum .
- f. Belum adanya standar persebaran nilai tanah sebagai dasar perencanaan pengadaan tanah sebagai akibat belum optimalnya pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT).
- g. Belum terdapatnya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir mekanisme penyelesaian permasalahan pertanahan di lapangan.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan utama urusan lingkungan hidup adalah degradasi kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh permasalahan antara lain:

- a. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, disebabkan oleh:
 - 1) Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya;
 - 2) Ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan dan aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (*brown economy*);
 - 3) Beberapa tekanan lingkungan hidup antara lain perubahan tata guna lahan, peningkatan produksi sampah, keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan (air, lahan, udara), dan masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 4) Meningkatnya Degradasi lahan dan keanekaragaman hayati
- b. Meningkatnya risiko bencana alam dan perubahan iklim
- c. Meningkatnya emisi GRK akibat aktivitas ekonomi dan penduduk belum diimbangi dengan capaian penurunan emisi GRK
- d. Meningkatnya tekanan terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pokok urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ditunjukkan dengan belum optimalnya fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi kabupaten/kota;
- b. Rendahnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah maupun instansi swasta;
- c. Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara digital.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pokok urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan kemandirian desa ditunjukkan dengan presentase desa mandiri yang masih rendah dan masih adanya desa tertinggal di Jawa Tengah;
- b. Pengembangan dan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya belum optimal;
- c. Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- d. Kerjasama kawasan perdesaan skala provinsi masih rendah.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tantangan utama dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah bagaimana meningkatkan keluarga yang berkualitas karena hingga saat ini kondisinya belum optimal. Permasalahan yang mempengaruhi kualitas keluarga antara lain meliputi:

- a. Belum optimalnya pengendalian penduduk;
- b. Masih rendahnya kepesertaan KB.

9. Perhubungan

Permasalahan utama pada urusan perhubungan adalah masih diperlukannya upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi untuk

meningkatkan kepuasan masyarakat. Permasalahan tersebut dipengaruhi beberapa hal antara lain:

- a. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, yang ditandai dengan belum optimalnya kinerja terminal (menurunnya jumlah kunjungan kendaraan) yang disebabkan adanya kerusakan fisik terminal, belum lengkapnya fasilitas terminal dan tidak adanya daya tarik terminal, belum meratanya persebaran / pemenuhan kebutuhan terminal serta belum optimalnya dukungan terminal sebagai simpul perekonomian; Masih kurangnya pemenuhan koridor pelayanan dan halte Trans Jateng; Masih belum selesainya rencana reaktivasi rel kereta api oleh Pemerintah Pusat; Belum juga selesainya pelimpahan aset pelabuhan pengumpan regional dari Pusat.
- b. Masih diperlukannya peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, yang ditandai dengan : Tingginya jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas, jumlah korban meninggal dunia serta tingkat fatalitas yang disebabkan masih rendahnya pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan adanya Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang belum tertangani; Banyaknya LPJU yang mati sehingga banyak aduan dari masyarakat (tingkat respon yang kurang akibat minimnya cadangan suku cadang dan keterbatasan jumlah kendaraan pemeliharaan LPJU berupa *sky lift/crane*); Belum optimalnya penanganan perlintasan dengan rel kereta api dan pemenuhan fasilitas penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota.
- c. Masih diperlukannya peningkatan kualitas layanan angkutan umum yang ditandai dengan : Belum optimalnya integrasi antara Trans Jateng dengan angkutan perkotaan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota serta integrasi antar moda yang secara bertahap harus dipenuhi.
- d. Belum optimalnya simpul transportasi strategis kewenangan pusat yang berpotensi menghambat kelancaran aksesibilitas dan konektivitas diantaranya penurunan status internasional menjadi domestik pada Bandara A. Yani Kota Semarang dan Adi Soemarmo Boyolali dan rendahnya daya saing Pelabuhan Tanjung Emas serta adanya pendangkalan pada kolam Pelabuhan Kendal yang menyebabkan Kapal Motor Bodri yang melayani penyeberangan Kendal - Kumai tidak bisa sandar.

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pokok untuk urusan komunikasi dan informatika yang perlu perhatian penanganan ke depan adalah belum optimalnya digitalisasi tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, yang meliputi permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Belum optimalnya implementasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan (lonjakan permintaan terkait layanan data center belum tercukupi; Layanan internet tersedia tetapi belum termanfaatkan secara optimal).

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tantangan dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah berkaitan dengan upaya meningkatnya perekonomian daerah. Permasalahan utamanya adalah belum optimalnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap PDRB, yang didukung dengan permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya omset koperasi dan UMKM;
- b. Belum optimalnya tingkat kesehatan koperasi.

12. Penanaman Modal

Permasalahan utama urusan penanaman modal adalah perlunya mendorong peningkatan realisasi dan persebaran penanaman modal di Jawa Tengah. Permasalahan yang masih berpengaruh terhadap permasalahan utama tersebut antara lain:

- a. Belum ada upaya yang cukup signifikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap iklim investasi global, sehingga jumlah investor yang berinvestasi di Jawa Tengah masih sangat dipengaruhi oleh kondisi global;
- b. Kurangnya konsistensi dalam kebijakan pemerintah pusat yang menyebabkan daerah kesulitan untuk merealisasikan kebijakan tersebut karena selalu dihadapkan pada perubahan yang memerlukan kajian dan implementasi ulang;
- c. Belum berhasil meningkatkan keunggulan komparatif dan infrastruktur investasi di Jawa Tengah secara signifikan, sehingga investor lebih tertarik berinvestasi ke daerah lain;
- d. Terbatasnya dukungan sumber daya baik ketersediaan lahan usaha yang sesuai tata ruang maupun dampak negatif investasi pada lingkungan;
- e. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama urusan kepemudaan dan olahraga berkaitan dengan belum optimalnya pembangunan pemuda, kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga antara lain meliputi:

- a. Daya saing pemuda masih rendah;
- b. Prestasi olahraga belum memadai;
- c. Tingkat partisipasi olahraga masih rendah.

14. Statistik

Permasalahan utama urusan statistik adalah belum optimalnya pengelolaan data baik data sektoral maupun geospasial dan perwujudan Satu Data Pemerintahan (pemanfaatan data statistik sektoral dalam portal data belum optimal).

15. Persandian

Permasalahan yang masih dijumpai pada urusan persandian di Jawa Tengah adalah belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintahan (kurangnya kesadaran keamanan informasi pada penerapan SMKI di OPD).

16. Kebudayaan

Permasalahan pembangunan kebudayaan masih kurang, dikarenakan upaya pemajuan kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan belum optimal, antara lain:

- a. Ketersediaan dan kualitas SDM Kebudayaan masih rendah;
- b. Inventarisasi, validitas dan integrasi data kebudayaan masih lemah;
- c. Identifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)/Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) belum optimal;
- d. Kurangnya kerjasama lintas sektor dalam upaya pelestarian hingga pemanfaatan Cagar Budaya (CB);

- e. Pengetahuan dan pemahaman stakeholder tentang kebudayaan masih kurang;
- f. Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dalam bidang kebudayaan masih kurang.

17. Perpustakaan

Permasalahan utama urusan perpustakaan adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat yang ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.

18. Kearsipan

Permasalahan utama urusan kearsipan adalah masih belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kearsipan di Jawa Tengah yang ditandai dengan belum optimalnya digitalisasi dalam peningkatan pengolahan, dan pelayanan kearsipan.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama urusan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah adalah belum optimalnya produksi perikanan secara berkelanjutan, kesejahteraan pelaku usaha perikanan, dan tingginya kerusakan ekosistem perikanan. Lebih lanjut permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya produksi perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap, budidaya, dan garam. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dikarenakan sarana prasarana penangkapan yang belum memadai dan kondisi pelabuhan perikanan yang perlu pengembangan baik dari sisi fasilitas maupun tata kelolanya, sedangkan dari sisi perikanan budidaya, selain dikarenakan kondisi sarana dan prasarana, juga disebabkan oleh penurunan kualitas dan kuantitas induk. Sementara pada produksi garam, juga masih terdapat luasan tambak garam yang belum menerapkan teknologi, sehingga proses produksi garam masih tergantung cuaca. Selain itu, pada ketiganya, baik perikanan tangkap, budidaya, dan garam, masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM untuk mendukung produksi perikanan.

b. Rendahnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan berkaitan erat dengan produk perikanan yang mudah busuk (*perishable*) sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai standar dari hulu ke hilir, sementara saat ini usaha yang ada masih didominasi usaha skala kecil dan belum sepenuhnya sesuai standar, ditambah jangkauan pemasaran yang masih terbatas. Hal yang lain adalah rendahnya tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah sehingga membutuhkan dorongan lebih kuat untuk meningkatkan preferensi masyarakat terhadap ikan sebagai sumber protein hewani. Secara simultan dibutuhkan juga upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM para pelaku usaha perikanan, serta secara khusus pada perikanan tangkap, risiko terjadinya kecelakaan kerja masih cukup tinggi sehingga membutuhkan perlindungan.

c. Tingginya kerusakan ekosistem perikanan

Kerusakan ekosistem perikanan khususnya di wilayah pesisir disebabkan abrasi dan akresi yang cukup tinggi yang imbasnya dapat menyebabkan terjadinya banjir rob. Di sisi lain, masih dibutuhkan edukasi terhadap semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan khususnya lingkungan perairan. Sedangkan pada perikanan budidaya diperlukan upaya untuk mempertahankan ikan jenis endemik lokal yang mulai menurun populasinya.

2. Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pariwisata di Jawa Tengah masih menjumpai permasalahan pokok terkait seberapa besar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berkontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh:

- a. Kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara belum optimal;
- b. Masih rendahnya pengeluaran wisatawan;
- c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Kondisi pertanian ditopang oleh sektor pertanian dan peternakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh produksi serta tingkat kesejahteraan petani dan peternak. Lebih lanjut kondisi dan permasalahan sektor pertanian dan peternakan sebagai berikut:

a. Produksi sektor pertanian

Secara umum produksi pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan mencapai target. Namun produksi kedelai masih perlu didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Kesejahteraan petani dan peternak

Berdasarkan tingkat kesejahteraan pelaku usaha, masih diperlukan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.

4. Kehutanan

Permasalahan utama penyelenggaraan urusan kehutanan adalah masih rendahnya luasan tutupan lahan di Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh:

- a. Adanya penurunan vegetasi tutupan hutan dan peningkatan luasan lahan kritis menyebabkan penurunan daya dukung DAS, rusaknya habitat keanekaragaman hayati
- b. Adanya degradasi ekosistem pesisir
- c. Adanya peningkatan alih fungsi kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan;
- d. Masih belum optimalnya pemanfaatan hutan (kayu, non kayu, dan jasa lingkungan)
- e. Masih terjadinya ancaman terhadap perlindungan kawasan hutan (kebakaran hutan, pencurian, dan perambahan)

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tantangan dalam penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral mencakup aspek ketahanan energi, pengelolaan air tanah, serta pemanfaatan sumber daya mineral yang ramah lingkungan. Permasalahan utama yang dihadapi sektor ini meliputi:

- a. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang masih rendah dalam bauran energi primer;
- b. Konsumsi listrik per kapita yang masih berada pada tingkat rendah;
- c. Produktivitas pertambangan yang belum optimal dan pengelolaan tambang yang belum sepenuhnya berwawasan lingkungan;
- d. Peningkatan aktivitas eksploitasi air tanah yang terus terjadi.

6. Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan di Jawa Tengah sebagai salah satu sektor unggulan perekonomian Jawa Tengah masih ditemukan permasalahan utama yaitu masih belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum optimalnya ekspor dan impor Jawa Tengah, belum optimalnya nilai tambah produksi perdagangan, dan fluktuatifnya harga kelompok kebutuhan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

7. Perindustrian

Permasalahan utama di urusan perindustrian yang juga menjadi salah satu sektor unggulan perekonomian Jawa Tengah yaitu masih belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhinya antara lain belum optimalnya produksi industri terutama industri kecil menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri terutama industri kecil dan menengah.

8. Transmigrasi

Permasalahan yang dijumpai pada urusan transmigrasi adalah terbatasnya kuota transmigrasi yang tidak sebanding dengan minat transmigrasi masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah terkait dengan transmigrasi.

D. Unsur Pendukung Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Permasalahan utama unsur sekretariat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyedia kebijakan pembangunan daerah adalah belum optimalnya kualitas kebijakan daerah yang dihasilkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam melakukan proses analisis kebijakan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan unsur sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan untuk anggota DPRD. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya kapasitas aparatur dalam pelayanan, serta belum optimalnya sarana prasarana pelayanan bagi anggota DPRD.

E. Unsur Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

Permasalahan utama yang masih dijumpai pada unsur perencanaan adalah belum optimalnya keselarasan, kesesuaian dan keterhubungan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada capaian pembangunan daerah. Hal tersebut dipengaruhi oleh :

- a. belum optimalnya pemanfaatan kapasitas sumber daya;
- b. belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dalam menterjemahkan arah kebijakan pembangunan daerah;
- c. dinamika kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi kebijakan perencanaan pemerintah daerah.

2. Keuangan

Permasalahan utama unsur keuangan adalah belum optimalnya pendapatan daerah dan tata kelola keuangan daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa permasalahan antara lain;

- a. Belum optimalnya penanganan piutang pajak kendaraan bermotor;
- b. Belum optimalnya layanan pembayaran pajak dan retribusi secara digital;
- c. Masih rendahnya kontribusi pemanfaatan aset daerah terhadap penerimaan PAD;
- d. Masih terbatasnya skema pendanaan di luar APBD;
- e. Belum sesuai dokumen perencanaan dengan penganggaran khususnya terkait pagu program dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga APBD;
- f. Keterlambatan waktu pengungkapan dokumen keuangan daerah;
- g. Belum optimalnya penyerapan anggaran.

3. Kepegawaian

Permasalahan utama yang masih dijumpai dalam unsur kepegawaian adalah belum optimalnya meritokrasi dalam manajemen ASN. Hal ini dipengaruhi beberapa permasalahan, antara lain:

- a. belum optimalnya integrasi data kepegawaian lintas perangkat daerah yang komprehensif;
- b. Belum optimalnya pemetaan kebutuhan jabatan yang berbasis kompetensi dan kinerja
- c. Belum optimalnya penerapan manajemen talenta ASN dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pembangunan daerah;
- d. Belum optimalnya layanan kepegawaian yang terintegrasi, adil dan responsif.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama dalam unsur pendidikan dan pelatihan adalah belum optimalnya kompetensi ASN Jawa Tengah ditandai dengan belum terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN dan belum terpenuhinya ASN yang berpredikat kompeten.

5. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan utama dari unsur penelitian dan pengembangan adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk inovasi daerah yang belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum optimalnya kompetensi SDM riset dan inovasi, masih terbatasnya sarana prasarana riset dan inovasi serta masih terbatasnya jejaring riset dan inovasi.

F. Unsur Pengawasan Pemerintahan

Permasalahan utama dari penyelenggaraan unsur pengawasan pemerintahan antara lain:

- a. belum optimalnya pengawasan, pendampingan dan asistensi bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. belum optimalnya pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan pengawasan internal;
- c. masih tingginya risiko korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah

G. Unsur Pemerintahan Umum

Permasalahan utama dari unsur pemerintahan umum di Jawa Tengah antara lain :

1. Potensi radikalisme yang mengarah pada ekstrimisme dan teorisme masih tergolong tinggi di beberapa daerah;
2. Internalisasi kebhinekaan yang belum optimal;
3. Terjadinya degradasi rasa toleran dimasyarakat;
4. Masih perlunya pendidikan politik bagi Masyarakat, terkhusus pada pemilih pemula;
5. Partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan masih perlu untuk didorong.

2.9.3 Isu Strategis Daerah

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka **isu strategis daerah Jawa Tengah** yang akan diselesaikan pada Tahun 2026 dan tahun selanjutnya sebagai berikut.

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Di samping itu, belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah salah satunya juga disebabkan oleh belum optimalnya pembangunan desa dan perdesaan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat miskin, pengembangan ekonomi desa, kualitas lingkungan dan pelayanan dasar, serta penguatan peran supra desa.

2. Penurunan tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang masih di atas nasional menjadi salah satu isu dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, dari permasalahan aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia hingga ketidakberdayaan ekonomi. Isu ke depan bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara utuh mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi meliputi: 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. 3) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program dan kegiatan utama harus di desain secara sinergi dan terintegrasi dengan satu *database* yang akurat, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Prinsip utama dan strategi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, sehingga sangat dipengaruhi kualitas perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program di dalamnya.

3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan *up-skilling* SDM pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga. Selain itu perlu upaya yang lebih konkret bahwa pangan yang tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap penduduk memiliki manfaat bagi tubuhnya. Hal ini dapat didukung dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu diperlukan pengembangan pertanian dalam arti luas sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing daerah dalam provinsi yang terintegrasi dalam pengembangan kewilayahan di Jawa Tengah.

4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa (logistik daerah), serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Penyelenggaraan Jalan Provinsi dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan menjaga kondisi jalan agar aman dan nyaman. Penyediaan prasarana transportasi dan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat khususnya kelompok rentan (utamanya anak, pelajar, perempuan dan lansia) dan kelompok berkebutuhan khusus (aksesibilitas disabilitas di simpul dan jaringan transportasi) perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Pembangunan prasarana dan sarana tetap berprinsip lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, kerugian akibat bencana, serta berpedoman pada rencana tata ruang. Selain dari sisi penyediaan prasarana dan sarana, penggunaan kendaraan pribadi juga menjadi isu yang cukup penting untuk dikendalikan diantara melalui peralihan menggunakan angkutan umum. Selain itu penyediaan prasarana dan sarana bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satunya yaitu akses terhadap infrastruktur dasar yang memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi aman, energi listrik, dan transportasi.

5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah lima tahun ke depan. Isu ini menjadi strategi yang menitikberatkan pada: 1) penanganan dan pengelolaan terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kerusakan pesisir, DAS kritis, kawasan lindung/karst, pertambangan, 2) penanggulangan bencana terkait meningkat-nya jumlah kejadian banjir, tanah longsor dan kekeringan akibat perubahan iklim, serta 3) isu sampah/limbah yang terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Jawa Tengah.

Keberlangsungan proses pembangunan dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung untuk peningkatan kualitas fungsi lingkungan sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya bencana alam.

6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan

dengan mendorong akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin.

7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat

Isu strategis daerah Jawa Tengah yang juga penting adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat. Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting.

Pembangunan kualitas keluarga sebagai komunitas terkecil dalam masyarakat juga masih menjadi isu yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Perubahan tren gaya hidup dan arus informasi yang semakin luas berpotensi mempengaruhi pola hubungan dan struktur keluarga. Perilaku salah seperti kekerasan, perundungan, dan eksploitasi kelompok perempuan dan anak, ketidaksetaraan gender, serta pergeseran norma dan nilai dalam lingkungan keluarga masih menjadi isu yang dapat mengancam karakter dan jatidiri masyarakat.

Untuk itu budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa. Selain itu, budaya yang kuat diharapkan akan mampu menangkal segala bentuk ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik prima. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan daerah sebagai pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah, sehingga dituntut semakin adaptif dan kolaboratif dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip integritas. Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi, peningkatan kapabilitas dan integritas sumber daya aparatur, adanya langkah transformatif dalam mewujudkan penerapan *collaborative governance*. Di samping itu, penerapan demokrasi yang lebih substantif perlu terus dikembangkan agar kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik menjadi semakin responsif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dinamika perekonomian global, nasional, dan regional menjadi dasar penentu arah kebijakan ekonomi daerah. Selain itu kebijakan ekonomi nasional di daerah juga mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Jawa Tengah.

3.1.1. Dinamika Perekonomian Global

Perekonomian global berubah dengan cepat dan penuh dinamika ketidakpastian yang tinggi. Pada awal tahun 2024, tingginya ketegangan politik dunia berlanjut-dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina. Setelah sedikit mereda, ketegangan dunia kembali meningkat tinggi dipicu serangan Israel ke Palestina. Di penghujung tahun 2024, terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) dengan kebijakan *America First* dapat menyebabkan perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia ke depan. Hal tersebut ke depan diperkirakan dapat menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dengan resiko fragmentasi perdagangan dan investasi yang semakin meningkat.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 melambat, dari 3,3 persen pada tahun 2023 menjadi 3,2 persen pada tahun 2024 dan diperkirakan tetap 3,3 persen pada tahun 2025 dan tahun 2026.

Tabel 3.1.

Kinerja dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global (%)

	2022	2023	2024	2025	2026
Dunia	3,5	3,3	3,2	3,3	3,3
Negara Maju	2,6	1,7	1,7	1,9	1,8
Amerika Serikat	1,9	2,9	2,8	2,4	2,3
Kawasan Eropa	3,4	0,4	0,8	1,1	1,3
Jepang	1,0	1,9	-0,1	1,2	0,5
Negara Berkembang	4,1	4,4	4,1	4,0	3,9
Tiongkok	3,0	5,2	4,8	4,4	3,8
India	6,8	7,7	6,6	6,6	6,7
ASEAN-5	5,5	4,0	4,8	4,7	4,6
Amerika Latin	4,2	2,2	2,1	2,4	2,6

Sumber: WEO-IMF, Bank Indonesia, 2025.

Divergensi pola pertumbuhan ekonomi berlanjut dengan fragmentasi ekonomi dan perdagangan dunia yang meningkat. Ekonomi AS diperkirakan tetap kuat pada tahun 2024 dan 2025 disertai dengan resiko membengkaknya defisit fiskal dan utang Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Kawasan Eropa akan cenderung melambat dengan masih lemahnya permintaan domestik dan kemungkinan dampak pengenaan tarif dagang yang tinggi oleh Pemerintah AS. Pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, dan sejumlah negara *Emerging Market Economies* (EMEs) masih cukup baik, didukung oleh permintaan domestik di tengah kendala ekspor karena perlambatan ekonomi dan fragmentasi perdagangan

global. Inflasi dunia menurun dari 6,7 persen pada tahun 2023 ke 5,7 persen pada tahun 2024, namun diperkirakan masih tetap tinggi pada Tahun 2025 dan 2026, masing-masing sebesar 4,2 persen dan 3,5 persen, dengan kemungkinan terjadinya perang dagang antara AS dengan sejumlah mitra dagang utamanya, serta terganggunya mata rantai pasok perdagangan dunia.

Bank Indonesia dalam dokumen Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024 menyebutkan bahwa perekonomian dunia diperkirakan masih akan diwarnai dengan dinamika yang tinggi dan penuh tantangan. Setidaknya terdapat 5 (lima) kecenderungan yang perlu diamati yaitu

1. Tingginya risiko geopolitik dan berlanjutnya fragmentasi pola perdagangan dunia. Pemilihan Umum di lebih dari 50 negara dunia pada tahun 2024 berimplikasi pada preferensi politik dan kebijakan ekonomi pemerintahannya.
2. Terjadinya pergeseran spasial pola pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi AS dapat kembali meningkat meskipun dengan risiko pemanasan ekonomi karena tingginya suku bunga dan beban utang Pemerintah. Sementara ekonomi Tiongkok dan Kawasan Eropa berisiko akan melambat. Pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, dan sejumlah negara EMEs yang mempunyai dukungan permintaan domestik diperkirakan masih akan cukup baik. Selain karena memburuknya fragmentasi perdagangan dan berlanjutnya ketegangan geopolitik global, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga tidak dapat dilepaskan dari permasalahan populasi yang menua (*aging population*) dan kuatnya tekanan untuk segera beralih ke ekonomi hijau (*green economy*) di negara maju.
3. Tingginya suku bunga dan risiko utang Pemerintah. Penanganan pandemi Covid-19 selama ini telah memberikan beban fiskal dan kenaikan utang Pemerintah yang besar di banyak negara. Dinamika terkini menunjukkan hasil Pemilihan Umum di AS dan di banyak negara lain, dengan kecenderungan lebih mengutamakan kepentingan domestiknya dengan preferensi politik yang populis, akan makin meningkatkan defisit fiskal dan utang Pemerintah ke depan. Kecenderungan ini mendorong makin ketatnya persaingan antarnegara dalam pembiayaan defisit fiskal dan utang Pemerintah di pasar keuangan global, dan karenanya akan berdampak pada makin tingginya suku bunga dunia.
4. Berlanjutnya ketidakpastian dan perubahan pola investasi keuangan dunia. Berbaliknya preferensi investor global pada investasi portofolionya ke AS karena tingginya *yield US Treasury* akan makin mempersulit negara EMEs dalam menarik aliran masuk investasi portofolio dan karenanya dalam mempertahankan stabilitas ekonominya. Kemampuan untuk menarik investasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga tidak akan mudah. Tingginya premi risiko global akan mendorong para investor untuk makin selektif dalam strategi investasinya.
5. Cepatnya digitalisasi antarnegara dan peningkatan risiko operasional, khususnya yang terkait dengan keamanan siber. Cepatnya kemajuan teknologi digital telah dan akan makin mempercepat inovasi, preferensi, dan efisiensi berbagai transaksi ekonomi dan keuangan secara digital. Digitalisasi juga telah dan akan makin cepat meluas secara global karena kemajuan teknologi dan inovasi digital yang terus berkembang cepat. Berbagai kerja sama internasional dan antarnegara, khususnya antar bank sentral, juga mempercepat transaksi

sistem pembayaran digital antarnegara. Karenanya, transaksi jasa baik jasa keuangan, jasa perkantoran, dan jasa perantara lain yang berbasis digital, baik secara nasional maupun ekspor ke negara lain, akan meningkat pesat. Prospek positif digitalisasi ini membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi negara yang mampu mengakselerasi program digitalisasi ekonomi dan keuangannya.

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Kinerja ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan ketahanan yang kuat dalam mengatasi dampak rambatan global. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 5,03 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 yang sebesar 5,05 persen (c-to-c). Permintaan domestik menjadi pendorong utama pertumbuhan Indonesia sejalan investasi yang tetap membaik, terutama di sektor bangunan seiring dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Konsumsi Lembaga *Non Profit* yang melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 12,48 persen. Diikuti oleh impor yang tumbuh 7,95 persen, dan konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 6,61 persen. Konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi tertinggi, tumbuh sebesar 4,94 persen.

Sedangkan menurut lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB menunjukkan tren pertumbuhan positif yaitu industri pengolahan tumbuh 4,43 persen, pertanian tumbuh 0,67 persen, perdagangan 4,86 persen, konstruksi 7,02 persen, dan pertambangan 4,90 persen. Sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,69 persen, kemudian diikuti sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi kedua setelah yaitu sebesar 8,56 persen karena adanya *event* berskala nasional dan internasional baik event pertemuan (MICE), musik dan olahraga.

Inflasi selama tahun 2024 menurun dan berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1$ persen. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,57% (yoy) lebih baik dari capaian Tahun 2023 sebesar 2,61 persen. Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26% (yoy) sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga Bank Indonesia untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Sementara itu, kelompok *volatile food* (VF) mencatat inflasi rendah 0,12% (yoy), didukung oleh terjaganya pasokan pangan, sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), serta pengaruh efek dasar harga pangan.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024 dari 5,32 persen pada tahun 2023. Sementara, angka kemiskinan nasional pada September 2024 sebesar 8,57 persen, turun dibandingkan Maret 2023 sebesar 9,36 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,388 pada Maret 2023 menjadi 0,381 pada September 2024. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Kinerja ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga ditengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga Tahun 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 4,95 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,97 persen (c-to-c). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 4,92 persen (c-to-c), namun lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 5,03 persen (c-to-c).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2024 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Kawasan Jawa setelah DIY (5,03%; c-to-c), Banten (4,79%; c-to-c) serta diatas dengan pertumbuhan Jawa Timur (4,93%; c-to-c) dan DKI Jakarta sebesar (4,90%; c-to-c). Dari sisi pangsa, Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 3,05 persen (c-to-c), ekspor tumbuh 4,25 persen (c-to-c), investasi tumbuh 1,88 persen (c-to-c), ditopang oleh proses pengerjaan Proyek Strategis Nasional dan proyek swasta di Jawa Tengah yang masih berlangsung.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kenaikan sektor industri pengolahan serta konstruksi. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 1,15 persen (c-to-c) sejalan dengan peningkatan impor bahan baku industri. Impor bahan baku meningkat sebesar 4,22 persen (yoy), terutama bersumber dari impor bahan baku alas kaki akibat kenaikan demand di AS dan Eropa menjelang musim dingin. Sementara itu, peningkatan kinerja di sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 0,83 persen (c-to-c) sejalan dengan kenaikan penjualan semen yang tumbuh sebesar 9,73 persen.

Inflasi Jawa Tengah selama tahun 2024 menurun dan berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1$ persen. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,67 persen (yoy) lebih baik dari capaian Tahun 2023 sebesar 2,89 persen. Andil inflasi Tahun 2024 adalah (1) Emas sebesar 0,25 persen; (2) Beras sebesar 0,18 persen; (3) Minyak Goreng sebesar 0,17 persen; (4) Kopi Bubuk sebesar 0,11 persen; dan (5) Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,11 persen. Berdasarkan sebaran wilayah, capaian inflasi tertinggi terdapat di Kota Tegal sebesar 2,19 persen (yoy) dan terendah di Kota Surakarta sebesar 1,50 persen (yoy).

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat PDRB per Kapita naik dari 45,17 juta rupiah Tahun 2023 menjadi sebesar 47,97 juta rupiah Tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 4,78 persen pada Agustus 2024 setelah sebelumnya sebesar 5,13 persen pada Agustus 2023. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,77 persen pada Maret 2023, turun menjadi 9,58 persen pada September 2024. Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,369 (Maret 2023) turun menjadi 0,364 (September 2024).

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran angka 5,00-6,00 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5 – 3,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2026, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 8,70-8,53 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,71 – 4,27 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 52,00-55,70 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,351-0,361 di tahun 2026.

Tabel 3.2.

Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 - 6,00
2	PDRB per kapita	Juta Rp	52,00 - 55,70
3	Inflasi	%	1,5 – 3,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,71 – 4,27
5	Angka Kemiskinan	%	8,70-8,53
6	Rasio Gini	Angka	0,351 - 0,361

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Sehubungan dengan telah ditetapkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, tahun 2026 merupakan tahap “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah”. Sebagai penjabaran tahun pertama RPJMD 2025-2029, tahun 2026 difokuskan pada tema pembangunan “**Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional**” dengan strategi antara lain:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
8. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
11. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;

12. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan sasaran pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya, salah satunya dukungan keuangan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dalam aspek pengelolaan keuangan daerah diperlukan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan realisasi penjualan industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2022-2024 cenderung meningkat. Tahun 2025 mengalami penurunan pendapatan daerah dengan diberlakukannya Undang-undang HKPD, yaitu dengan penurunan pajak daerah sebesar 18,23 persen yang disebabkan oleh menurunnya dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 33,08 persen dan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 22,50 persen. Penurunan tersebut sebagai konsekuensi adanya opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah karena sesuai Undang-undang HKPD opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk memperluas ruang fiskal pemerintah kabupaten/kota.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pajak Daerah merupakan penopang utama sektor pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun anggaran 2024 mencapai 5,474 triliun rupiah, mengalami penurunan sebesar 35,347 miliar rupiah (0,64 persen) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar 5,509 triliun rupiah. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2024 sebesar 3,068 triliun rupiah meningkat 104,39 miliar rupiah (3,52 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2023 yang sebesar 2,963 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 2,693 triliun rupiah juga mengalami peningkatan 26,283 miliar rupiah (0,99 persen) dibanding penerimaan tahun 2023 sebesar 2,667 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) pada tahun 2024 sebesar 18,993 miliar rupiah meningkat sebesar 1,938 miliar rupiah (11,37 persen) dibanding penerimaan tahun 2023 sebesar 17,054 miliar rupiah. Penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2024 meningkat sebesar 135,899 miliar rupiah (4,82 persen) dari realisasi tahun 2023 sebesar 2,818 triliun rupiah menjadi 2,954 triliun rupiah.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2024 sebesar 2,318 triliun rupiah mengalami peningkatan sebesar 2,179 triliun rupiah (1.563 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2023 sebesar 139,377 miliar rupiah. Hal ini sebagai konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada PP Nomor 35 Tahun 2023 khususnya pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) menjadi pendapatan dari sektor objek Retribusi Jasa Umum, maka jasa pelayanan kesehatan yang semula tercatat sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah dari BLUD menjadi pendapatan dari sektor Retribusi Daerah.

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh positif pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 687,813 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 49,330 miliar rupiah atau 7,73 persen dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar 638,482 miliar rupiah.

Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2024 sebesar 434,060 miliar rupiah, mengalami penurunan sebesar 1,823 triliun rupiah (80,78 persen) dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 2,258 triliun rupiah.

2. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan sebesar 422,510 miliar rupiah (5,10 persen) dari 8,278 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 8,701 triliun rupiah pada tahun 2024.

3. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2022-2024 terutama bersumber pada pendapatan hibah dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 26,343 miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 35,208 miliar rupiah (66,35 persen) dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 78,296 miliar rupiah.

Tabel 3.3.
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH	24.167.935.634.127	25.369.733.556.675	26.378.719.626.419
PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.264.618.853.852	17.012.509.421.006	17.650.936.913.504
Pajak Daerah	13.484.851.151.740	13.976.642.716.351	14.210.241.533.541
Retribusi Daerah	115.158.014.199	139.377.038.536	2.318.821.514.818
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	546.717.104.899	638.482.406.528	687.813.166.201
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.117.892.583.014	2.258.007.259.591	434.060.698.944
PENDAPATAN TRANSFER	7.810.882.578.787	8.278.928.086.424	8.701.438.866.795
Dana Bagi Hasil Pajak	909.711.090.450	923.168.698.355	889.020.058.000
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	18.989.623.430	9.942.824.636	7.212.510.000
Dana Alokasi Umum	3.435.718.090.405	3.558.428.755.500	3.819.010.791.028
Dana Alokasi Khusus (fisik)	371.734.785.185	425.034.850.842	473.940.472.839
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	3.013.376.489.317	3.275.155.012.091	3.474.257.466.928

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Dana Insentif Daerah	61.352.500.000	87.197.945.000	37.997.568.000
Dana Penyesuaian	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	92.434.201.488	78.296.049.245	26.343.846.120
Pendapatan Hibah	92.161.740.403	77.972.123.308	25.600.169.638
Lain lain pendapatan	272.461.085	323.925.937	743.676.482

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024 (audited).

Selama kurun waktu tahun 2022-2024, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2024 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 66,91 persen, pendapatan transfer sebesar 32,99 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,10 persen. Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen pajak daerah dengan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2024 mencapai 53,87 persen.

Tabel 3.4.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022 – 2024 (%)

Uraian	2022	2023	2024	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN DAERAH	100%	100%	100%	100%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	67,30%	67,06%	66,91%	67,09%
Pajak Daerah	55,80%	55,09%	53,87%	54,84%
Retribusi Daerah	0,48%	0,55%	8,79%	4,64%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,26%	2,52%	2,61%	2,44%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,76%	8,90%	1,65%	5,20%
PENDAPATAN TRANSFER	32,32%	32,63%	32,99%	32,64%
Dana Bagi Hasil Pajak	3,76%	3,64%	3,37%	3,59%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,08%	0,04%	0,03%	0,05%
Dana Alokasi Umum	14,22%	14,03%	14,48%	14,26%
Dana Alokasi Khusus (fisik)	1,54%	1,68%	1,80%	1,67%
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	12,47%	12,91%	13,17%	12,87%
Dana Insentif Daerah	0,25%	0,34%	0,14%	0,14%
Dana Penyesuaian	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,38%	0,31%	0,10%	0,26%
Pendapatan Hibah	0,38%	0,31%	0,10%	0,24%
Lain-Lain Pendapatan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: LKPD APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024 (audited)-

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah sebesar 24,574 triliun rupiah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar 15,619 triliun rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 8,792 triliun rupiah, dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 163,185 miliar rupiah. Pajak Daerah masih menjadi kontribusi terbesar penyumbang PAD ditargetkan sebesar 12,459 triliun rupiah, sedangkan Retribusi Daerah sebesar 2,092 triliun rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan naik sebesar 2,402 miliar menjadi sebesar 690,155 miliar rupiah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi sebesar 377,228 miliar rupiah.

Tabel 3.5.
Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2025
1.	PAD	15.619.284.656.000
1.1.	Pajak Daerah	12.459.303.870.000
1.2.	Retribusi Daerah	2.092.596.928.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	690.155.713.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	377.228.145.000
2.	Pendapatan Transfer	8.792.464.010.000
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.792.464.010.000
2.2	Transfer antar daerah	-
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	163.185.839.000
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	24.574.934.505.000

Sumber: Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025.

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan sebesar 23,741 triliun rupiah. Proyeksi tersebut mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,0-6,0 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2022-2024, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 16,318 triliun rupiah meningkat sebesar 699,61 milyar rupiah atau 4,28 persen dari tahun sebelumnya, pendapatan transfer sebesar 7,397 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 25,600 miliar rupiah. Pendapatan transfer tahun 2026 diproyeksikan menurun 1,395 triliun rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang sebesar 8,792 triliun rupiah.

Perhitungan pendapatan transfer dianggarkan pada komponen Dana Bagi Hasil non cukai hasil tembakau, Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya, Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Dinas Pendidikan. Hal tersebut dengan mempertimbangkan kebijakan bahwa pendapatan transfer akan dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Tabel 3.6.
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

NO	URAIAN	TAHUN 2026
	PENDAPATAN DAERAH	
1.	PAD	16.318.898.370.000
1.1.	Pajak Daerah	12.899.838.185.000
1.2.	Retribusi Daerah	2.405.199.623.000

NO	URAIAN	TAHUN 2026
	PENDAPATAN DAERAH	
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	701.832.870.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	312.027.692.000
2.	Pendapatan Transfer	7.397.415.721.000
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	7.397.415.721.000
2.2	Transfer antar daerah	0
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	25.600.170.000
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	23.741.914.261.000

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Upaya peningkatan kinerja untuk mencapai target pendapatan di tahun 2026 yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Beberapa upaya yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Teknologi Informasi dan digitalisasi/elektronifikasi pendukung pelayanan pembayaran Pendapatan Daerah;
- b. Penambahan titik layanan dengan mengoptimalkan pemberdayaan BUMDes, BPR BKK, dan Badan Usaha lainnya (Samsat Budiman);
- c. Optimalisasi peran Kabupaten/Kota, desa, pemerintah pusat, dan dunia usaha lainnya (*Samsat Corporate*, Mitra Putra Bangsa);
- d. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak (*Gerakan Disiplin Pajak*, CHIPS, *Lets Activate New Sakpole and Signal* (LANS), *influencer* Jawa Tengah) dan pelaksanaan *door to door*;
- e. Penerapan kebijakan penanganan piutang dan mempertahankan kepatuhan wajib pajak;
- f. Menyelenggarakan Auto Show serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan *Gaikindo Indonesia International Auto Show* (GIAS) 2026;
- g. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI (optimalisasi tim pembina samsat, razia kepatuhan);
- h. Pemutakhiran data objek retribusi, review tarif retribusi serta perbaikan tata kelola retribusi melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi (SIPENARI);
- i. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
- j. Optimalisasi penerimaan Pajak Alat Berat;
- k. Sosialisasi dan/atau penyuluhan terkait regulasi Pajak dan Retribusi;
- l. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- m. Optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah melalui revitalisasi dan kerjasama dengan investor sebagai sumber pendapatan daerah;
- n. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada tahun anggaran 2024 terserap secara optimal dengan realisasi serapan sebesar 95,17 persen. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 577,013 miliar rupiah berada pada Kas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar 130,694 miliar rupiah dan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar 435,442 miliar rupiah, sedangkan sisanya berada pada Kas di Bendahara Penerimaan SKPD dan Kas di Bendahara Sekolah. Kas pada RKUD digunakan sebagai manajemen kas untuk pembayaran Belanja Gaji bulan Januari Tahun 2025 dimana Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer belum sepenuhnya terealisasi. Sehubungan dengan SILPA sesuai rencana manajemen kas Januari, maka penyerapan APBD Tahun 2024 sudah cukup optimal. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan APBD sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan.

Secara umum realisasi belanja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Pegawai meningkat seiring penambahan pegawai ASN baik pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) maupun pada dinas teknis melalui PPPK dan dibayarnya tambahan penghasilan PPPK yang telah memenuhi syarat, peningkatan belanja barang dan jasa dari realisasi belanja BOS, peningkatan belanja Hibah serta realisasi BTT yang meningkat untuk dana kebencanaan serta penyelenggaraan kegiatan Peparnas. Realisasi belanja yang belum optimal dapat berasal dari efisiensi negosiasi kontrak seperti Pembangunan Gedung BLK Cilacap dan beberapa pekerjaan yang tidak selesai dan/atau putus kontrak.

Tabel 3.7.
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2024

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH	23.950.240.497.405	25.800.341.207.782	27.187.126.497.803
BELANJA OPERASI	13.456.887.671.949	14.887.780.012.763	16.083.865.301.964
Belanja Pegawai	5.902.903.886.767	6.362.326.855.074	7.023.084.524.845
Belanja Barang dan Jasa	5.377.369.153.895	5.791.112.760.975	6.234.228.358.506
Belanja Subsidi	4.958.884.836	5.350.753.069	1.399.999.100
Belanja Hibah	2.092.761.564.803	2.610.303.175.760	2.780.143.423.054
Belanja Bantuan Sosial	78.894.181.648	118.686.467.885	45.008.996.459
BELANJA MODAL	1.713.641.630.081	1.794.862.778.298	1.733.084.096.994
BELANJA TAK TERDUGA	16.545.479.100	740.000.000	10.225.800.500
BELANJA TRANSFER	8.763.165.716.275	9.116.958.416.721	9.359.951.298.345
Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kab/Kota	6.085.808.822.482	6.264.046.226.668	6.334.544.870.221
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	804.934.393.793	653.134.590.053	1.045.686.246.124
Bantuan Keuangan kepada Desa	1.872.422.500.000	2.199.777.600.000	1.979.720.182.000

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024 (audited).

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, anggaran Belanja Daerah turun sebesar 2,035 triliun rupiah menjadi sebesar 25,151 triliun rupiah, yang meliputi Belanja Operasi sebesar 16,051 triliun rupiah, Belanja Modal sebesar 1,998 triliun rupiah, Belanja Tidak Terduga sebesar 25 miliar rupiah, dan Belanja Transfer yaitu berupa Belanja Bagi Hasil sebesar 4,494 triliun rupiah dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar 2,582 triliun rupiah. Belanja Operasi merupakan komponen belanja terbesar dengan rincian Belanja Pegawai sebesar 7,436 triliun rupiah, Belanja Barang dan Jasa sebesar 6,477 triliun rupiah, Belanja Subsidi sebesar 12,413 miliar rupiah, Belanja Hibah sebesar 2,093 triliun rupiah dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 32,6 miliar rupiah.

Tabel 3.8.

Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		16.051.924.007.000
1	Belanja Pegawai	7.436.406.324.000
2	Belanja Barang dan Jasa	6.477.455.733.000
3	Belanja Subsidi	12.413.000.000
4	Belanja Hibah	2.093.048.950.000
5	Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000
BELANJA MODAL		1.998.205.719.000
BELANJA TAK TERDUGA		25.000.000.000
BELANJA TRANSFER		7.076.818.456.000
1	Belanja Bagi Hasil	4.494.697.452.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	2.582.121.004.000
JUMLAH BELANJA		25.151.948.182.000

Sumber: Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025.

Komposisi belanja daerah tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan menurun 4,12 persen dari tahun 2025 menjadi sebesar 24,156 triliun rupiah yang diarahkan pada tema **“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”** dengan fokus utama pada:

1. Prioritas daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran diarahkan untuk Penguatan Landasan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 meliputi:
 - a. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
 - b. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan; dan
 - c. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
2. Dukungan prioritas nasional tahun 2026 meliputi:
 - a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;

- c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Algomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
 - d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
 - e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
 - f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
 - g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Penyeludupan;
 - h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.
3. Upaya pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi Pendidikan; secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan; serta *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan kebutuhan;
 4. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's);
 5. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
 6. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; serta
 7. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2026 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2026 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2026 diproyeksikan dengan asumsi untuk penambahan belanja pegawai PPPK dan CPNS, termasuk penyesuaian tambahan penghasilan pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan; Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan Pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Peruntukan belanja modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2026 terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Tabel 3.9.

Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		15.630.119.890.500
1	Belanja Pegawai	7.550.906.690.000
2	Belanja Barang dan Jasa	5.990.576.205.500
3	Belanja Subsidi	7.647.280.000
4	Belanja Hibah	2.070.582.715.000
5	Belanja Bantuan Sosial	10.407.000.000
BELANJA MODAL		1.679.982.022.500
BELANJA TAK TERDUGA		20.000.000.000
BELANJA TRANSFER		6.826.312.348.000
1	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	4.400.368.228.000
2	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota & Pem Desa	2.425.944.120.000
JUMLAH BELANJA		24.156.414.261.000

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2025.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu tahun 2022-2024 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 di prioritaskan pada penggunaan SILPA tahun 2023 serta pencairan Dana Cadangan untuk Pilkada, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk Penyertaan Modal sebagai bentuk penyehatan BUMD.

Tabel 3.10.
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
PEMBIAYAAN	1.018.773.865.813	1.330.794.071.071	1.385.420.547.664
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.909.773.865.813	1.330.794.071.071	1.406.120.547.664
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.435.692.146.361	1.236.470.622.932	900.186.419.964
Pencairan Dana Cadangan	-	94.130.600.000	505.869.400.000
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	474.081.719.452	192.848.139	64.727.700
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	891.000.000.000	-	20.700.000.000
Pembentukan dana cadangan	400.000.000.000	-	-
Penyertaan modal	491.000.000.000	-	20.700.000.000

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah 2022-2024 (audited).

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel 3.11.
Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	577.013.677.000
	SiLPA	577.013.677.000
	Pencairan Dana Cadangan	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	-
	Penyertaan Modal	-
3	Pembiayaan Netto Daerah	577.013.677.000

Sumber: Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2026 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.12.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	PEMBIAYAAN	
1	Penerimaan Pembiayaan	484.500.000.000
	SiLPA	484.500.000.000
	Pencairan Dana Cadangan	0

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	PEMBIAYAAN	
2	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	-
	Penyertaan Modal	70.000.000.000
3	Pembiayaan Netto Daerah	414.500.000.000

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Dari uraian tersebut diatas maka kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13.
Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		16.318.898.370.000
1	Pajak Daerah	12.899.838.185.000
2	Retribusi Daerah	2.405.199.623.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	701.832.870.000
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	312.027.692.000
PENDAPATAN TRANSFER		7.397.415.721.000
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.397.415.721.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		25.600.170.000
JUMLAH PENDAPATAN		23.741.914.261.000
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		15.630.119.890.500
1	Belanja Pegawai	7.550.906.690.000
2	Belanja Barang dan Jasa	5.990.576.205.500
3	Belanja Subsidi	7.647.280.000
4	Belanja Hibah	2.070.582.715.000
5	Belanja Bantuan Sosial	10.407.000.000
BELANJA MODAL		1.679.982.022.500
BELANJA TAK TERDUGA		20.000.000.000
BELANJA TRANSFER		6.826.312.348.000
1	Belanja Bagi Hasil	4.400.368.228.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	2.425.944.120.000
JUMLAH BELANJA		24.156.414.261.000
SURPLUS/DEFISIT		(414.500.000.000)
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		484.500.000.000
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	484.500.000.000
2	Pencairan dana cadangan	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		70.000.000.000
1	Pembentukan dana cadangan	-
2	Penyertaan modal	70.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO		414.500.000.000

URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2025.

3.2.4. Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel 3.14.
Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	OPD	PAGU OPD (Rp)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
DEKONSENTRASI				
ATRIBUTIF				
1	BAPPEDA	224.308.000	189.950.500	100
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	140.235.000	140.198.390	100
3	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	201.868.000	200.608.490	100
4	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	1.273.638.000	1.234.335.307	100
DELEGATIF				
1	BAPPEDA	1.170.444.000	1.155.447.127	100
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	435.287.000	409.270.500	100
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	108.000.000	107.989.950	100
4	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	4.450.600.000	4.197.374.554	100
5	DINAS KESEHATAN	13.331.297.000	12.060.255.363	100
6	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	45.590.253.000	41.997.193.604	99,94
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	611.657.000	611.103.800	100
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	180.581.000	170.817.878	100
9	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	21.726.773.000	21.426.862.101	100
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.596.884.000	1.505.609.234	100
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	9.135.965.000	9.061.613.297	100
TUGAS PEMBANTUAN				
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.837.965.000	3.359.188.924	100
2	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	2.070.000.000	1.987.123.973	100
3	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	84.778.880.000	83.542.225.550	100
4	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	367.867.504.000	276.471.396.607	79,09

NO	OPD	PAGU OPD (Rp)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)
5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	21.174.757.000	19.785.774.800	100
6	DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	18.779.803.000	18.746.527.515	100
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.645.006.000	3.590.372.707	100
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH	1.405.171.000	1.056.567.060	100

Sumber: Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Tabel 3.15.
Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

NO	NAMA SKPD	PAGU DIPA	BLOKIR
DEKONSENTRASI		19.090.589.000	11.943.625.000
ATRIBUTIF		3.740.069.000	3.708.069.000
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	452.663.000	452.663.000
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	470.000.000	470.000.000
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	218.617.000	218.617.000
4	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	193.541.000	193.541.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	392.845.000	392.845.000
6	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	2.012.403.000	1.980.403.000
DELEGATIF		15.350.520.000	8.235.556.000
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.105.856.000	1.105.856.000
2	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	11.984.000	11.984.000
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	85.000.000	85.000.000
4	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	5.278.746.000	-
5	DINAS KESEHATAN	-	-
6	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	-	-
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	411.657.000	411.657.000
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH	-	-
9	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	1.714.355.000	430.870.000

10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.203.775.000	4.203.775.000
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.539.147.000	1.986.414.000
TUGAS PEMBANTUAN		186.237.661.000	45.581.603.000
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.680.512.000	1.680.512.000
2	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	58.989.297.000	400.000.000
4	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	99.057.234.000	38.644.948.000
5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.331.475.000	70.868.000
6	DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	20.527.718.000	3.235.838.000
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.138.562.000	38.574.000
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH	1.512.863.000	1.512.863.000

Sumber: Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi sumber pembiayaan diluar APBD, hal ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017.

Adapun realisasi kegiatan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II tertinggi pada Bidang Kesejahteraan Sosial sebesar 5,087 miliar rupiah dan terendah pada Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan sebesar 11,996 juta rupiah. Perusahaan dengan alokasi anggaran terbanyak adalah PT Telkom Indonesia sebesar 5,262 miliar rupiah. Sedangkan perusahaan dengan alokasi program terbanyak adalah PT Bhimasena Power Indonesia sebanyak 137 program.

Tabel 3.16.
Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2025

No	Perusahaan	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	PT Telkom Indonesia	82	5.262.755.296
2	Bank Jateng	21	3.731.300.000
3	PT Semen Gresik Tbk	77	2.618.091.812
4	PT Bhimasena Power Indonesia	137	784.350.000
5	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	17	453.279.000

No	Perusahaan	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
6	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelabuhan Tanjung Intan	27	441.130.000
7	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	24	440.000.000
8	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	23	304.940.113
9	PT Tirta Investama -Pabrik Klaten	3	288.120.000
10	PT Pertamina Patra Niaga	11	271.567.985
11	PT BPR Surya Yudhakencana	14	267.575.000
12	PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	12	223.820.000
13	PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda)	43	213.025.000
14	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	19	195.627.650
15	PT BPR BKK Kendal (Perseroda)	42	180.719.900
16	PT Pos Indonesia (Persero) Regional VI Semarang	4	163.924.000
17	PT Dua Kelinci	86	134.860.000
18	PT Dan Liris	18	114.984.506
19	BPR BKK Karangmalang	3	111.100.000
20	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	7	93.000.000
21	PT Nojorono Tobacco International	6	92.191.140
22	PT BPR BKK Ungaran	20	82.396.500
23	PT Kayu Lapis Indonesia	20	74.559.043
24	PT PLN Indonesia Power Semarang PGU	1	13.600.000
25	Grand Dian Hotel Slawi	5	9.310.000
26	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	3	5.405.000
27	PT Kenlee Indonesia	4	2.750.000
28	PT BPR BKK Kota Semarang	2	2.665.000
29	PT Sri Rejeki Isman Tbk	1	2.270.000
30	PT Siba Surya	1	2.000.000
31	PT BPR BKK Grogol (Perseroda)	1	1.000.000
TOTAL		734	16.582.316.945

Sumber: Sistem Pelaporan Online CSR Provinsi Jawa Tengah, Per 11 Juli 2025.

Tabel 3.17.
Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja
Triwulan II Tahun 2025

No	Bidang Pokja	Jumlah Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Bidang Kesejahteraan Sosial	163	5.087.517.744
2	Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	40	2.782.094.000
3	Bidang Infrastruktur	96	2.381.460.650
4	Bidang Pendidikan	106	1.954.086.661
5	Bidang Keagamaan	85	1.690.764.273
6	Bidang Usaha Ekonomi Rakyat	49	1.121.519.552
7	Bidang Pendampingan Umum	34	500.691.000
8	Bidang Kedaruratan	36	480.557.820
9	Bidang Olahraga, Seni, Budaya dan Pariwisata	80	337.950.625
10	Bidang Kesehatan	40	233.678.300
11	Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	5	11.996.320
TOTAL		734	16.582.316.945

Sumber: Sistem Pelaporan Online CSR Provinsi Jawa Tengah, per 11 Juli 2025.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2026

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 dituangkan dalam RKPD Tahun 2026 sebagai implementasi tahun pertama dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Dalam RPJMD Tahun 2025-2029, pembangunan Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan untuk **“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”**.

Jawa Tengah sebagai lumbung pangan berarti menetapkan dan memperkuat peran daerah sebagai pusat produksi dan penyedia utama pangan, baik dalam skala regional maupun nasional. Dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional, dibutuhkan dorongan untuk peningkatan hasil pertanian melalui penggunaan teknologi, bibit unggul, irigasi, dan alat mesin pertanian (alsintan), potensi lahan, iklim, dan sumber daya alam yang mendukung sektor pertanian. Selain itu, peningkatan sarana seperti pembangunan jalan tani, gudang, irigasi, dan pasar agar hasil pertanian dapat tersimpan dan terdistribusikan. Program-program pendukung lainnya seperti pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan akan ditingkatkan agar petani mampu menjadi pelaku utama dalam sistem. Posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional mengandung harapan bahwa daerah tidak hanya mencukupi kebutuhan pangannya sendiri, namun juga mampu menyuplai daerah lain bahkan berkontribusi pada cadangan pangan nasional.

Keberhasilan pencapaian tujuan daerah selama tahun 2025-2029 ditunjukkan dengan capaian indikator dengan **sasaran pembangunan**, meliputi:

- 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
- 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
- 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter;

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026 **berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029**, dengan target yang telah memperhatikan capaian tahun 2024 tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
Tujuan: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan					
	Tingkat Kemiskinan	%	9,58	9,66 - 9,00	8,70 - 8,53
	PDRB Per Kapita	Juta Rp	47,97	49,3 - 51,1	52,0 - 55,7
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	91,28	91,50	92,00

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah					
	Indeks Integritas Nasional	Angka	79,47	80,97	80,97
	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	85,84	85,81 – 89,07	86,46 - 89,50
	Otonomi Fiskal Daerah	%	66,91	63,56	65,72
Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan					
	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	4,80 - 5,60	5,00 - 6,00
	Tingkat Inflasi	%	1,67	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69,46	75,68	75,73
Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter					
	Indeks Modal Manusia	Angka	0,59	0,62	0,62
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,78	4,81 - 4,42	4,71 - 4,27

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026, DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2026. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan pada saat Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi yg inklusif dan berkualitas;
2. Penguatan struktur ekonomi dengan mendorong produk unggulan daerah;
3. Pembangunan Infrastruktur berbasis daerah;
4. Menjaga ekosistem lingkungan;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan berbasis lokal;
6. Memperkuat fasilitas dan pelayanan Kesehatan;

- 7. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta Kematian Ibu melahirkan dan kematian bayi.

Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan pada saat Musrenbang terdiri atas:

- Fokus Pengentasan Kemiskinan dan Stunting**
 Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting menjadi fokus utama yang memerlukan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi. Program ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
- Reformasi Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Mutu**
 Reformasi sistem pendidikan yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran dan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja melalui peningkatan kompetensi guru, modernisasi kurikulum, dan perbaikan infrastruktur sekolah.
 Untuk transformasi layanan kesehatan yang mengutamakan kualitas pelayanan dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan fasilitas kesehatan, penguatan tenaga medis, program preventif dan promotif.
- Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi**
 Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi ditempuh melalui Pengembangan sistem pangan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, Integrasi sistem pangan dan energi yang saling mendukung, Pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya, serta Pengembangan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan.
- Transformasi Ekonomi Kerakyatan Menuju Digitalisasi UMKM**
 Transformasi yang dilakukan melalui Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah ada, Transformasi digital dalam operasional dan pemasaran UMKM, Perluasan jangkauan pasar melalui platform digital, dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi yang inklusif.
- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia,**
 Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia ditempuh melalui Pelatihan Vokasi, Pendidikan Karakter, dan Peningkatan kemampuan bersaing di tingkat nasional untuk mendukung daya saing global.

Tabel 4.2
Telaah Terhadap Pokok – Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2026

No	Pokok – Pokok Pikiran	Telaah
1.	Fokus Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting menjadi fokus utama yang memerlukan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi. Program ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.	Upaya pengentasan kemiskinan dan stunting menjadi prioritas daerah pada Tahun 2026. Melalui Prioritas Daerah 3, Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter diharapkan dapat terwujud sinergi antara pemerintah

No	Pokok – Pokok Pikiran	Telaah
	Upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.	daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
2.	Reformasi Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Mutu Reformasi sistem pendidikan yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran dan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja melalui: peningkatan kompetensi guru, modernisasi kurikulum, dan perbaikan infrastruktur sekolah. Untuk transformasi layanan kesehatan yang mengutamakan kualitas pelayanan dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui: peningkatan fasilitas kesehatan, penguatan tenaga medis, program preventif dan promotif.	Prioritas Daerah 3 yaitu Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter merupakan upaya untuk mewujudkan reformasi sistem pendidikan yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran dan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja.
3.	Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi ditempuh melalui: Pengembangan sistem pangan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, Integrasi sistem pangan dan energi yang saling mendukung, Pemanfaatan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya, serta Pengembangan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan.	Melalui Prioritas Daerah 2 Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan diharapkan dapat terwujud penguatan ketahanan pangan dan energi.
4.	Transformasi Ekonomi Kerakyatan Menuju Digitalisasi UMKM Transformasi yang dilakukan melalui: Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah ada, Transformasi digital dalam operasional dan pemasaran UMKM, Perluasan jangkauan pasar melalui platform digital, dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi yang inklusif.	Transformasi Ekonomi Kerakyatan Menuju Digitalisasi UMKM berupaya diwujudkan melalui Prioritas Daerah 2 yaitu Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
5.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia ditempuh melalui: Pelatihan Vokasi, Pendidikan Karakter, dan Peningkatan kemampuan bersaing di tingkat nasional untuk mendukung daya saing global.	Upaya peningkatan daya saing SDM melalui Pelatihan Vokasi, Pendidikan Karakter, dan Peningkatan kemampuan bersaing di tingkat nasional untuk mendukung daya saing global diwujudkan melalui Prioritas Daerah 3 yaitu Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada **tema Pembangunan Daerah Tahun 2026** yaitu **Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan**

Nasional. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. mendorong implementasi hilirisasi sektor pertanian (terutama komoditas perkebunan unggulan dan pangan strategis);
3. peningkatan industri pengolahan berbahan baku lokal (terutama industri subsektor makanan dan minuman);
4. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
5. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
6. penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
7. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
8. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
9. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
10. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
11. penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
12. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
13. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
14. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
15. penguatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
16. penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
17. peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
18. reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
19. penguatan kerja sama DUDI bidang agritech, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
20. peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
21. mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
22. mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;

23. peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
24. mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, tahun 2026 sebagai tahap pertama RPJMD Tahun 2025-2029 **“Penguatan Landasan Pembangunan Daerah”** diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi meliputi:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, dengan fokus pada:
 - a. pelayanan publik yang merata dan inklusif;
 - b. peningkatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital;
 - c. penguatan landasan kebijakan perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja;
 - d. penguatan landasan kebijakan data terintegrasi berbasis teknologi informasi;
 - e. penguatan landasan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, hilirisasi hasil riset, serta kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;
 - f. penguatan manajemen ASN melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
 - g. penguatan pengembangan kompetensi melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;
 - h. penguatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan;
 - i. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi didukung dengan peningkatan kapabilitas APIP;
 - j. pelaksanaan analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, penguatan dokumentasi hukum, serta dasar peningkatan kualitas penyusunan produk hukum;
 - k. pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
 - l. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
 - m. penguatan kelembagaan agar lebih efektif;
 - n. penguatan sinergi pelaksanaan reforma agraria;
 - o. penguatan koordinasi dan pengawasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta mendorong inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digitalisasi sebagai data yang valid dan termutakhir dalam pembangunan daerah;

- p. pelaksanaan pemetaan daerah rawan secara sinergis, serta penguatan penegakan produk hukum daerah, pembinaan PPNS dan perlindungan masyarakat;
 - q. pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil;
 - r. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
 - s. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
 - t. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
 - u. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
 - v. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
 - w. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan, dengan fokus pada:
- a. penguatan pondasi sektor industri pengolahan dengan pemetaan potensi maupun kelembagaan, dan peningkatan kapasitas dasar pelaku industri;
 - b. penguatan pondasi sektor perdagangan;
 - c. penguatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
 - d. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
 - e. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan berbasis riset dan inovasi;
 - f. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
 - g. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
 - h. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
 - i. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
 - j. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna mendukung peningkatan produksi pangan;
 - k. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - l. penguatan pembinaan pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*;
 - m. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
 - n. pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah;
 - o. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya pada jalur logistik sentra kawasan pertanian) dan kewilayahan;

- p. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa;
- q. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
- r. penguatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
- s. penguatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM, serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa;
- t. penguatan landasan tata kelola pemerintahan desa;
- u. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
- v. pemetaan dan pemutakhiran status sumber daya alam strategis-kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- w. penguatan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan;
- x. penguatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut;
- y. identifikasi potensi pendanaan hijau-wilayah strategis/aktivitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup;
- z. penguatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- aa. penguatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung produktivitas pertanian);
- bb. peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim;
- cc. harmonisasi kebijakan dan tata kelola lintas sektor penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
- dd. penguatan upaya reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;
- ee. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM;
- ff. penguatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik yang dikelola secara aman;
- gg. penguatan infrastruktur akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
- hh. penguatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
- ii. penguatan perwujudan ruang Jawa Tengah dengan mengintegrasikan rencana pembangunan dengan rencana tata ruang melalui SPPR;
- jj. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
- kk. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
- ll. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;
- mm. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan;
- nn. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana;
- oo. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;

pp. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.

3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter, dengan fokus pada:

- a. pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerjasama DUDI serta rintisan SMK Unggulan;
- b. pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), evaluasi dan pelaksanaan SMK *Boarding* dan Semi *Boarding* serta pemberian bantuan biaya pendidikan (beasiswa);
- c. pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi prasarana sarana pendidikan;
- d. penguatan pendidikan karakter dan inklusi dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan *bullying*;
- e. penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perizinan penyelenggaraan pendidikan;
- f. pemetaan kebutuhan prasarana dan sarana di pelayanan kesehatan primer dan lanjutan;
- g. pengembangan program pemerataan SDM kesehatan;
- h. pengembangan keterampilan kader kesehatan;
- i. peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- j. pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi;
- k. pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
- l. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan;
- m. peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional;
- n. penyediaan data dan informasi Objek Pemajuan Kebudayaan, cagar budaya yang akurat, serta SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya;
- o. peningkatan perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- p. peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan;
- q. pemetaan kerja sama lintas sektor dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan;
- r. penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan, mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan prasarana sarana olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan;
- s. penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar *stakeholder*, pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan, peningkatan prasarana sarana perpustakaan;
- t. pemetaan potensi sumber arsip untuk melengkapi khazanah arsip;
- u. peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian;

- v. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- w. peningkatan pembangunan berbasis gender;
- x. penguatan perlindungan sosial adaptif yang mencakup peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, mendorong penyandang disabilitas bekerja disektor formal dan peningkatan kualitas bantuan sosial.
- y. peningkatan ketahanan keluarga;
- z. pemetaan kompetensi tenaga kerja pada sektor unggulan yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan penguatan kapasitas lembaga pelatihan dan kualitas instruktur.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama Tahun 2026 yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,70 - 8,53 persen;
2. PDRB Per Kapita sebesar 52,0 - 55,7 juta rupiah;
3. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 92,00;
4. Indeks Integritas Nasional sebesar 80,97;
5. Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 86,46 - 89,50;
6. Otonomi Fiskal Daerah sebesar 65,72 persen;
7. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 - 6,00 persen;
8. Inflasi sebesar 1,50 - 3,50 persen;
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,73;
10. Indeks Modal Manusia sebesar 0,62; dan
11. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71 - 4,27 persen.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam rangka menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Prioritas Nasional 1
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas Nasional 4
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

- pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5. Prioritas Nasional 5
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
 - 6. Prioritas Nasional 6
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
 - 7. Prioritas Nasional 7
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
 - 8. Prioritas Nasional 8
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Target indikator sasaran pembangunan Nasional Tahun 2026 dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,40 persen;
- 2. GNI Perkapita sebesar 5.870 US\$;
- 3. Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 37,14 persen;
- 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 76,67;
- 5. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5 persen;
- 6. Rasio Gini sebesar 0,377 – 0,380;
- 7. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,44 – 4,96 persen;
- 8. Kemiskinan Ekstrem sebesar 0,0 – 0,5 persen; dan
- 9. Indeks Modal Manusia sebesar 0,57.

4.2.4 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional Tahun 2026

RKPD Tahun 2026 disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026, sekaligus juga dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional. Keterkaitan Permasalahan pembangunan daerah dengan Prioritas daerah pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Daerah Tahun 2026

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
1.	Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
2.	Belum optimalnya ketahanan pangan	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
3.	Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
4.	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Penurunan tingkat kemiskinan	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
5.	Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
6.	Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
7.	Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
8.	Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
9.	Terdapat simpul-simpul kerawanan yang mempengaruhi stabilitas	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	PD1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah
10.	belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas	Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas	PD1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah.

Tabel 4.4
Keselarasan Kebijakan RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

No	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
1.	Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
2.	Meningkatkan kemandirian desa	PD1.Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah.
3.	Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
4.	Meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.

No	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
5.	Pengurangan risiko bencana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
6.	Peningkatan pertumbuhan penanaman modal dengan menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
7.	Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan dengan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan selaras dengan perencanaan tata ruang yang responsif	PD2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan.
8.	Meningkatkan akses layanan pendidikan berkualitas	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
9.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
10.	Meningkatkan kebugaran masyarakat dan daya saing olahraga	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
11.	Meningkatkan budaya literasi	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
12.	Meningkatkan daya saing pemuda	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
13.	Meningkatkan pembangunan berbasis gender	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
14.	Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
15.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
16.	Memperkuat jati diri dan meningkatkan pemajuan kebudayaan	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
17.	Meningkatkan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	PD3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.
18.	Meningkatkan birokrasi yang berintegritas dan kolaboratif	PD1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah.

No	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026
19.	Meningkatkan kondusivitas wilayah dan demokrasi substansial	PD1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah.

Keselarasan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 dengan Nasional ditunjukkan dengan **keselarasan tema pembangunan, dan prioritas** yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Dukungan Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026 Terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2026

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
1	PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PD.1 Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah		313.683.429.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.432.690.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.472.866.000	Biro Hukum
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.608.336.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	61.299.273.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	36.626.664.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	207.243.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,	PD.1 Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah		548.807.623.000	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
	ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	48.621.302.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	23.013.309.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11.770.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.793.451.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	997.688.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	13.614.995.000	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.975.924.000	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.592.206.000	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	965.614.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	158.986.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	245.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.783.800.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.381.911.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.248.576.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12.612.050.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.663.227.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.000.072.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	159.281.528.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	178.234.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.637.563.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.850.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	52.959.252.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.676.375.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	191.362.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	115.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	923.631.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.077.356.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2.135.551.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.131.994.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PD 2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan		528.283.241.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.470.116.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	349.789.477.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.146.224.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	270.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	430.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	136.438.696.000	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	716.983.000	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.600.000.000	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	938.680.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	195.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	577.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	855.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.278.390.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.525.625.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	8.652.050.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	850.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.050.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	PN 4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PD.1 Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah		6.403.239.484.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.688.943.996.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.028.289.802.000	Dinas Pendidikan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	330.000.000	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	400.000.000	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	300.000.000	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	547.251.577.000	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.928.215.000	Dinas Kesehatan
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	75.000.000	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.160.222.000	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	121.635.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.572.217.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.510.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	950.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.748.312.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.698.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	770.432.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	328.408.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	373.720.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	296.720.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	70.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	60.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	160.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	389.667.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	177.353.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	11.965.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	100.444.700.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.469.708.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	3.379.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PD 2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan		58.615.900.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	667.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.514.954.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	790.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	350.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	210.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	200.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	33.550.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	999.054.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	6.791.546.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.761.146.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	502.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	60.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	PD 1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah		2.650.065.258.000	
		PD 2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	12.845.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PD 3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.266.323.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.663.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	370.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10.286.000.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	200.000.000	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	74.090.123.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	110.594.572.000	Dinas Sosial

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.397.580.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200.000.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PENATAAN DESA	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	155.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.033.540.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.870.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.425.944.120.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PD 1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah		13.072.095.107.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.141.844.309.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	15.345.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	42.741.829.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	740.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.410.458.000	Biro Organisasi

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.919.557.000	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.250.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.383.134.000	Biro Hukum
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.640.000.000	Biro Perekonomian
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.781.081.000	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.755.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	336.517.695.000	Sekretariat DPRD
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.850.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.235.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.431.868.228.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.815.905.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	31.008.687.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.871.840.000	Badan Kepegawaian Daerah
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	26.892.349.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	4.732.269.000	Badan Penghubung
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.568.089.000	Inspektorat
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.924.677.000	Inspektorat
8	PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	PD 1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah		447.497.630.000	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
	mencapai masyarakat yang adil dan makmur				
		PD 2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.975.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PD 3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	360.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	22.675.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.750.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	150.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.205.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.900.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	102.581.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	597.827.000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	20.065.000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	410.388.757.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.373.400.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			TOTAL	24.022.287.672.000	

4.3. Program Prioritas Gubernur Dan Wakil Gubernur

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur diwujudkan melalui kebijakan 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis. Seluruh program tersebut berjumlah 136 yang kemudian secara teknokratis menjadi **“136 Program Daerah”**. Program-program tersebut kemudian dijabarkan secara lebih implementatif dalam bentuk strategi, kegiatan, dan aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta didukung oleh banyak pihak atau *stakeholder* termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pada Tahun 2026, 136 Program Daerah tersebut dilakukan baik dapat bersifat pentahapan maupun realisasi perwujudan program. Program – program tersebut terdiri atas:

4.3.1 Program Prioritas

Program Prioritas merupakan program unggulan yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Program prioritas sebagai berikut:

1. Melahirkan pemerintahan yang *Good Clear Government dan Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa;
2. Pesantren Obah melalui penambahan dana pengembangan pesantren;
3. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
4. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go international*, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;
5. Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional;
6. Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui Mageri Segoro untuk mengamankan garis pantai;
7. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di kawasan industri;
8. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;
9. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin;
10. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja;
11. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal Qur'an, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi.

Penjabaran atas Program Prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Penjabaran Program Prioritas

No	Nama Program Prioritas	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
1.	Melahirkan pemerintahan yang <i>Good Clear Government</i> dan <i>Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa	Biro Organisasi	Program Penataan Organisasi
		Badan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Administrasi Pemerinatahan Desa
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	Pesantren Obah melalui penambahan dana pengembangan pesantren	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyuluhan Pertanian
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program pengelolaan persampahan
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
3.	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Biro Perekonomian	Program Perekonomian Dan Pembangunan
4.	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan <i>go international</i> , Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Kerjasama Desa; Program Administrasi Pemerintahan Desa

No	Nama Program Prioritas	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor
		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
5.	Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman; Program Pengembangan Perumahan;
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
6.	Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui Mageri Segoro untuk mengamankan garis pantai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
7.	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di kawasan industri	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Hubungan Industrial
8.	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
9.	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10.	Taruna karya mandiri melalui program kartu	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

No	Nama Program Prioritas	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
	zilenial untuk membuka lapangan kerja		
11.	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat
		Badan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah

4.3.2 Program Intervensi

Program Intervensi merupakan program yang melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah (memungkinkan kolaborasi bersama pemerintah pusat) yang memiliki ruang lingkup dan dampak multidimensional sehingga mampu menjadi penopang keberhasilan pembangunan daerah. Program Intervensi meliputi:

1. Integrasi aplikasi pelayanan ke dalam “Jateng Ngopeni”;
2. *Smart response* diwujudkan dengan *Call Center* 24 jam “Jateng Nglakoni”;
3. Kantor Gubernur Rumah Rakyat;
4. Digitalisasi manajemen arsip;
5. Penetapan Zona Integritas/Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD;
6. Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa;
7. Riset potensi daerah secara berkala berbasis potensi wilayah;
8. Pembentukan Kecamatan Berdaya (perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif, dan *sport center*);
9. Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru;
10. Pengembangan destinasi wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah;
11. Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening;
12. Mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa;
13. Pengembangan kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap kesejahteraan budayawan lokal;
14. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);

15. Percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil;
16. Menyediakan paket pendidikan gratis (seragam, buku pembelajaran, akses internet);
17. Peningkatan bantuan keuangan desa;
18. Jambanisasi 100%;
19. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
20. Program asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
21. Mendorong pembangunan sistem desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi suplai air bersih dan mengatasi dampak eksploitasi air tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang);
22. Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru.

Penjabaran atas Program Intervensi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Penjabaran Program Intervensi

No	Nama Program Intervensi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
1.	Integrasi aplikasi pelayanan ke dalam “Jateng Ngopeni”	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2.	<i>Smart response</i> diwujudkan dengan <i>Call Center</i> 24 jam “Jateng Nglakoni”	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Program Penunjang Pemerintah Daerah
3.	Kantor Gubernur Rumah Rakyat	Biro Umum	Program Penunjang Pemerintah Daerah
4.	Digitalisasi manajemen arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pengelolaan Arsip; Program Penunjang Pemerintah Daerah
5.	Penetapan Zona Integritas/Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	Biro Organisasi	Program Penataan Organisasi
		Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
		Biro Perekonomian	Program Perekonomian dan pembangunan
6.	Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Nama Program Intervensi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
		Biro Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Badan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
7.	Riset potensi daerah secara berkala berbasis potensi wilayah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Kerjasama Desa; Program Administrasi Pemerintahan Desa.
8.	Pembentukan Kecamatan Berdaya (perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif, dan <i>sport center</i>)	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan UMKM
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
9.	Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata
10.	Pengembangan destinasi wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pemasaran Pariwisata
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
11.	Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pemasaran Pariwisata; Program Peningkatan Daya Tarik Wisata

No	Nama Program Intervensi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
12.	Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa	Dinas Perhubungan	Program Pengelolaan Pelayaran
13.	Pengembangan kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap kesejahteraan budayawan lokal	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kebudayaan; Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; Program Pengelolaan Permuseuman; Program Pembinaan Sejarah; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
14.	Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelatihan dan Produktivitas; Program Penempatan Tenaga Kerja; Program Pelatihan dan Produktivitas
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
15.	Percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil	Dinas Kesehatan	Rogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
16.	Menyediakan paket pendidikan gratis (seragam, buku pembelajaran, akses internet)	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
17.	Peningkatan Bantuan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Administrasi Pemerintahan Desa
18.	Jambanisasi 100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
19.	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Nama Program Intervensi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
20.	Program asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap
21.	Mendorong pembangunan sistem desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi suplai air bersih dan mengatasi dampak eksploitasi air tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
22.	Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

4.3.3 Program Aksi

Program Aksi merupakan program strategis untuk menopang keberhasilan program prioritas yang dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, meliputi:

1. Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai pusat pelayanan publik berbasis wilayah;
2. Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK;
3. Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan;
4. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak;
5. Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan penyetaraan ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta;
6. Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis;
7. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
8. Pelatihan 1.000 konten kreator desa wisata;
9. Pemenuhan dan peningkatan akses internet di desa (102 desa *blankspot*);
10. Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM;
11. Mendorong pembangunan rumah apung kawasan pesisir;
12. Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter;
13. Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte);

14. Memastikan integrasi jaringan untuk menjamin konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi;
15. Optimalisasi pelabuhan dan bandara perintis di Jawa Tengah sebagai generator aktivitas perekonomian global;
16. Mendorong pembangunan Giant Sea Wall (tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah);
17. Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional;
18. Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan mendorong revitalisasi jalur kereta api;
19. Menyiapkan sistem irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak, Pati);
20. Penegakan regulasi daerah terkait air tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali;
21. Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan;
22. Mendorong pengembangan kawasan industri berorientasi lingkungan (industri hijau);
23. Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung potensi ekonomi sungai lainnya;
24. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
25. Penghapusan hutang petani, nelayan, UMKM;
26. Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp1.000 untuk buruh, lansia, veteran, dan pelajar;
27. Melakukan tata kelola pertanian modern berbasis integrated farming dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian;
28. Pendirian Koperasi Buruh;
29. Promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya internasional melalui kerja sama dengan diaspora;
30. Mengusulkan lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO;
31. Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
32. Penguatan dan promosi moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri;
33. Mendorong penguatan forum kerukunan antarumat beragama dan forum pembauran kebangsaan;
34. Spesialis keliling (Spelling), cek kesehatan gratis (CKG), puskesmas pembantu, dan pelayanan kesehatan di setiap desa;
35. Mendorong penyediaan 1 dokter 1 bidan setiap puskesmas pembantu;
36. Pelayanan tanpa antri lansia dan klinik geriatri, ibu hamil, dan disabilitas, pensiunan di rumah sakit;
37. Event olahraga memancing terbesar Asia;
38. Petani milenial gajian;
39. Mendukung dan menjadikan kegiatan tarkam (pertandingan antar kampung) masuk ke dalam kalender olahraga provinsi;
40. BOSDa Madrasah Aliyah;
41. Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerja sama dengan pihak sekolah swasta;

42. Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan pra kerja;
43. Transformasi tata kelola tambang galian C;
44. Pengembangan investasi berbasis pada modal infrastruktur padat karya;
45. Penguatan tata kelola CSR untuk pembangunan daerah;
46. Pengembangan peternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa;
47. Pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk PAD yang optimal;
48. Restrukturisasi proses bisnis dan tata kelola BUMD;
49. Peningkatan status Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional;
50. Pengembangan *Sister Province*;
51. Membentuk satuan tugas pengamanan data digital “*Cyber Security Jawa Tengah*’ dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK;
52. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;
53. Mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan Kebumen) dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa;
54. Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah;
55. Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga;
56. Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan;
57. Menyusun peraturan daerah dan rencana aksi daerah tentang ekonomi hijau;
58. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana;
59. Program kerja sama Forkopimda;
60. Pengembangan pertanian yang terintegrasi;
61. Pemberdayaan masyarakat hutan sosial.

Penjabaran atas Program Aksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Penjabaran Program Aksi

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
1.	Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai pusat pelayanan publik berbasis wilayah	Biro Organisasi	Program Penataan Organisasi
2.	Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3.	Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak,	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Program Perlindungan Perempuan; Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
	perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
		Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
4.	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak	Biro Hukum	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
5.	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan penyetaraan ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat
		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
6.	Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan UMKM/ Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan/ Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
7.	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
8.	Pelatihan 1.000 konten kreator desa wisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9.	Pemenuhan dan peningkatan akses internet di desa (102 desa <i>blankspot</i>)	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
10.	Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
11.	Mendorong pembangunan rumah apung kawasan pesisir	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
12.	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan
13.	Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
14.	Memastikan integrasi jaringan untuk menjamin konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/ Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
15.	Optimalisasi pelabuhan dan bandara perintis di Jawa Tengah sebagai generator aktivitas perekonomian global	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Untuk Bandara, Tidak Ada Program Khusus Angkutan Udara Sesuai Kewenangan); Program Pengelolaan Pelayaran
16.	Mendorong pembangunan <i>Giant Sea Wall</i> (tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
17.	Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
18.	Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan mendorong revitalisasi jalur kereta api	Dinas Perhubungan	Program Pengelolaan Perkeretaapian
19.	Menyiapkan sistem irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak, Pati)	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
20.	Penegakan regulasi daerah terkait air tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
		Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
21.	Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
22.	Mendorong pengembangan kawasan industri berorientasi lingkungan (industri hijau)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
23.	Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung potensi ekonomi sungai lainnya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan
24.	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati); Program pengelolaan hutan
25.	Penghapusan hutang petani, nelayan, UMKM	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyuluhan Pertanian
26.	Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp1.000 untuk buruh, lansia, veteran, dan pelajar	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
27.	Melakukan tata kelola pertanian modern berbasis integrated farming dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Sarana Pertanian
28.	Pendirian Koperasi Buruh	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Hubungan Industrial
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi/ Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi/ Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
29.	Promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya internasional melalui kerja sama dengan diaspora	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kebudayaan
		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama	Program Fasilitasi Kerja Sama Daerah

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
30.	Mengusulkan lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kebudayaan
31.	Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Biro Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
32.	Penguatan dan promosi moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama	Program Kerjasama Daerah
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
33.	Mendorong penguatan forum kerukunan antarumat beragama dan forum pembauran kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
34.	Spesialis keliling (Spelling), cek kesehatan gratis (CKG), puskesmas pembantu, dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
35.	Mendorong penyediaan 1 dokter 1 bidan setiap puskesmas pembantu	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
36.	Pelayanan tanpa antri lansia dan klinik geriatri, ibu hamil, dan disabilitas, pensiunan di rumah sakit	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
37.	Event olahraga memancing terbesar Asia	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pemasaran Pariwisata
38.	Petani milenial gajian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
39.	Mendukung dan menjadikan kegiatan tarkam (pertandingan antar kampung) masuk ke dalam kalender olahraga provinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
40.	BOSDa Madrasah Aliyah	Biro Kesejahteraan	Program Kesejahteraan Rakyat

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
		Rakyat	
		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
41.	Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerja sama dengan pihak sekolah swasta	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pengembangan Kurikulum
42.	Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan pra kerja	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pengembangan Kurikulum
43.	Transformasi tata kelola tambang galian C	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
44.	Pengembangan investasi berbasis pada modal infrastruktur padat karya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal
45.	Penguatan tata kelola CSR untuk pembangunan daerah	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama	Program Fasilitasi Kerja Sama Daerah
46.	Pengembangan peternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
47.	Pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk PAD yang optimal	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
48.	Restrukturisasi proses bisnis dan tata kelola BUMD	Biro Perekonomian	Program Perekonomian dan pembangunan
49.	Peningkatan status Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional	Dinas Perhubungan	Telah terealisasi
50.	Pengembangan <i>Sister Province</i>	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor
51.	Membentuk satuan tugas pengamanan data digital	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
	“Cyber Security Jawa Tengah’ dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK		
		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
52.	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
53.	Mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan Kebumen) dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
54.	Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
55.	Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
56.	Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
57.	Menyusun peraturan daerah dan rencana aksi daerah tentang ekonomi hijau	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
58.	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
59.	Program kerja sama Forkopimda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas
60.	Pengembangan pertanian yang terintegrasi	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyuluhan Pertanian

No	Nama Program Aksi	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
61.	Pemberdayaan masyarakat hutan sosial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan

4.3.4 Program Taktis

Program taktis merupakan bagian dari perencanaan strategis yang lebih rinci, cepat dan jangka pendek, meliputi:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung pelayanan publik prima;
2. Mendorong terciptanya pengarusutamaan gender berkeadilan;
3. Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah;
4. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;
5. Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi;
6. Mendorong Program *Santri Preneur* (Santri Pengusaha);
7. Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya;
8. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;
9. BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah);
10. Mendorong pembangunan SPAM Regional dan SPAM industri untuk penyediaan air bersih;
11. Revitalisasi embung;
12. Pendidikan perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren;
13. Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat;
14. Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau;
15. Menghadirkan infrastruktur yang carbon neutral;
16. Pengembangan urban farming untuk pertanian kawasan perkotaan;
17. Penataan drainase dan pengendalian banjir terutama di Kota Semarang, Pekalongan, dan Kabupaten Demak;
18. Revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
19. Subsidi pangan murah;
20. Penguatan dan pembinaan *e-sport* Jawa Tengah;
21. Perlindungan hak buruh melalui fasilitasi peraturan gubernur tentang payung hukum ketenagakerjaan;
22. Penyediaan benih yang berkualitas;
23. Penyediaan alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian;
24. Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3 persen dapat menerima penyandang disabilitas;
25. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya;
26. Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok;
27. *Pap smear* gratis (skrining Ca Serviks);

28. Peningkatan operasional kader posyandu;
29. Peningkatan kualitas hidup lansia;
30. Mendukung Jawa Tengah bebas peredaran narkoba;
31. Perlindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah;
32. Penanganan bullying yang tuntas menuju Jawa Tengah Zero Bullying melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) satuan pendidikan dan satuan tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
33. Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa;
34. Pembangunan kolaboratif mendorong terjalannya partisipasi berbasis hexahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan Lembaga keuangan);
35. Regulasi pengembangan kawasan industri;
36. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta dunia usaha;
37. Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah;
38. Fasilitas rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan swasta;
39. Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket-*market place*) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (*e-commerce*);
40. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pembinaan olahraga seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program “PERUSAHAAN ASUH”;
41. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional;
42. Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan.

Penjabaran atas Program Taktis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Penjabaran Program Taktis

No	Nama Program Taktis	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
1.	Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung pelayanan publik prima	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2.	Mendorong terciptanya pengarusutamaan gender berkeadilan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3.	Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

No	Nama Program Taktis	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
	penegakan peraturan daerah		
4.	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Nasional
5.	Program <i>ECO-PESANTREN</i> yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Persampahan
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
6.	Mendorong Program <i>Santri Preneur</i> (Santri Pengusaha)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
7.	Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
8.	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Dinas Koperasi UMKM	
9.	BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah)	Dinas Permasdesdukcap	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
10.	Mendorong pembangunan SPAM Regional dan SPAM industri untuk penyediaan air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11.	Revitalisasi embung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
12.	Pendidikan perubahan iklim dan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk

No	Nama Program Taktis	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
	penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren		Masyarakat;
		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
13.	Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
		Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan
14.	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3); Program Pengelolaan Hutan
15.	Menghadirkan infrastruktur yang carbon neutral	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
16.	Pengembangan urban farming untuk pertanian kawasan perkotaan	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
17.	Penataan drainase dan pengendalian banjir	belum	

No	Nama Program Taktis	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
	terutama di Kota Semarang, Pekalongan, dan Kabupaten Demak		
18.	Revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
19.	Subsidi pangan murah	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
20.	Penguatan dan pembinaan <i>e-sport</i> Jawa Tengah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
21.	Perlindungan hak buruh melalui fasilitasi peraturan gubernur tentang payung hukum ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Hubungan Industrial
22.	Penyediaan benih yang berkualitas	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan
23.	Penyediaan alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
24.	Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3 persen dapat menerima penyandang disabilitas	Biro Perekonomian	Program Perekonomian dan pembangunan
25.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kebudayaan; Program Pembinaan Sejarah; Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Biro Organisasi	Program penataan organisasi
26.	Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Pent
27.	<i>Pap smear</i> gratis (skrining Ca Serviks)	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
28.	Peningkatan operasional kader posyandu	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

No	Nama Program Taktis	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
29.	Peningkatan kualitas hidup lansia	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
30.	Mendukung Jawa Tengah bebas peredaran narkoba	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
31.	Perlindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah	RSJD dr.Soejarwadi Klaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		RSJD Amino Gondohutomo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		RSJD dr Arif Zainudin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
32.	Penanganan <i>bullying</i> yang tuntas menuju Jawa Tengah <i>Zero Bullying</i> melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) satuan pendidikan dan satuan tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
33.	Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
34.	Pembangunan kolaboratif mendorong terjalinnya partisipasi berbasis hexahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan Lembaga keuangan)	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Riset Dan Inovasi Daerah
		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Promosi Penanaman Modal
		Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan	Program Administrasi Pemerintahan Desa

No	Nama Program Taktis	Perangkat Daerah	Nomenklatur Program
		Pencatatan Sipil	
35.	Regulasi pengembangan kawasan industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional "
36.	Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/ Kota serta dunia usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; Program Pengendalian Izin Usaha Industri
37.	Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Riset Dan Inovasi Daerah
38.	Fasilitas rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
39.	Membangun jaringan pasar (ekspor- <i>supermarket-market place</i>) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (<i>e-commerce</i>)	Biro Perekonomian	Program Perekonomian dan pembangunan
40.	Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pembinaan olahraga seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program “PERUSAHAAN ASUH”	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
41.	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Persampahan
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
42.	Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Dalam pelaksanaan Program Daerah tersebut maka dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dari total 136 Program Daerah sebanyak 35 Program Daerah didelegasikan kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk diselaraskan dengan program daerah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai “Program Delegasi” Provinsi ke Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, meliputi:

1. PP. Melahirkan pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa;
2. PP. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
3. PP. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go international*, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;
4. PP. Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional;
5. PP. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;
6. PP. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja;
7. PI. Pembentukan Kecamatan Berdaya (perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*);
8. PI. Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru;
9. PI. Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru;
10. PA. Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK;
11. PA. Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa;
12. PA. Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerjasama dengan pihak sekolah swasta;
13. PA. Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan;
14. PA. Mendorong penyediaan 1 dokter, 1 bidan setiap puskesmas pembantu;
15. PA. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak;
16. PA. Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis;
17. PA. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
18. PA. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata;
19. PA. Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM;
20. PA. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
21. PA. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;

22. PA. Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga;
23. PA. Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan;
24. PA. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana;
25. PT. Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila;
26. PT. BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah);
27. PT. Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat;
28. PT. Cek kesehatan gratis;
29. PT. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;
30. PT. Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya;
31. PT. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;
32. PT. Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau;
33. PA. Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan;
34. PT. Peningkatan operasional kader posyandu;
35. PT. Peningkatan kualitas hidup lansia.

Selanjutnya dalam rangka perwujudan tema dan prioritas daerah tahun 2026 selengkapnya tertuang dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.10
Penjabaran Prioritas Daerah Tahun 2026

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan									
		Tingkat Kemiskinan					8,70-8,53	%		
		PDRB Per Kapita					52,0 - 55,7	Juta Rupiah		
		Indeks Reformasi Birokrasi					92	Angka		
Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah									19.053.901.090.000	
			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah						19.053.901.090.000	
				Indeks Integritas Nasional			80,97	Angka	11.510.802.492.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.964.914.894.000	
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	100	%	631.018.000	BIRO HUKUM
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	100	%	346.500.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah	100	%	170.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	100	%	217.884.000	BIRO PEREKONOMIAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	100	%	1.630.155.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat				
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	100	%	511.956.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	100	%	380.500.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	100	%	204.272.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	100	%	45.135.928.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	100	%	228.284.149.000	BIRO UMUM
						Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100	%	10.535.000.000	BIRO UMUM
						Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100	%	32.173.932.000	BIRO UMUM
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	100	%	306.000.000	Badan Kepegawaian Daerah

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	100	%	30.026.842.000	Badan Kepegawaian Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100	%	590.064.000	BIRO ORGANISASI
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	100	%	220.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	100	%	13.574.842.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100	%	385.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100	%	124.812.897.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	100	%	669.432.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	%	260.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	%	14.161.444.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK I	100	%	616.060.000	CDK WILAYAH I
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK II	100	%	536.831.000	CDK WILAYAH II
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK III	100	%	654.926.000	CDK WILAYAH III
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	100	%	599.975.000	CDK WILAYAH IV

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						perangkat daerah CDK IV				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK V	100	%	481.788.000	CDK WILAYAH V
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VI	100	%	488.200.000	CDK WILAYAH VI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VIII	100	%	434.000.000	CDK WILAYAH VIII
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IX	100	%	340.180.000	CDK WILAYAH IX

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK X	100	%	605.070.000	CDK WILAYAH X
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	100	%	1.123.312.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden	100	%	1.383.251.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	100	%	1.222.891.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK XI	100	%	379.500.000	CDK WILAYAH XI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VII	100	%	425.000.000	CDK WILAYAH VII
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100	%	786.693.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100	%	41.923.196.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	95	%	1.874.332.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						perangkat daerah UPPD Purwokerto				
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100	%	178.316.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100	%	30.131.669.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	%	2.372.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan	100	%	14.173.275.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Bangsa dan Politik				
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	100	%	152.365.000	Satuan Polisi Pamong Praja
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	100	%	17.590.503.000	Satuan Polisi Pamong Praja
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	95	%	173.322.892.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	95	%	1.236.220.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						perangkat daerah UPPD Wonosobo				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung	95	%	1.371.567.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid	95	%	1.624.624.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang	95	%	1.015.425.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	%	62.544.937.000	Bagian Umum

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Sekretariat DPRD				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati	95	%	1.513.868.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus	95	%	1.438.657.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi	95	%	1.400.360.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara	95	%	1.515.708.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat DPRD	100	%	168.519.617.000	Sekretariat DPRD
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. ADHYATMA, MPH	49,19	%	190.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	100	%	100.250.879.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	100	%	628.552.000	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	55	%	207.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	100	%	15.506.272.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan	100	%	1.626.178.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Kemasan Kelas A (BIKDK)				
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	90	%	374.757.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta	95	%	1.467.999.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten	95	%	2.313.640.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen	95	%	1.215.494.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo	95	%	1.521.260.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri	95	%	2.062.516.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II	95	%	1.493.589.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar	95	%	1.474.579.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	95	%	1.493.881.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						perangkat daerah UPPD Boyolali				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III	95	%	1.766.041.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan	95	%	1.363.328.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen	95	%	1.344.862.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen	95	%	1.350.567.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	40,88	%	62.740.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%	53.891.305.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo	95	%	1.581.937.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang	95	%	1.369.277.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang	95	%	1.492.296.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal	95	%	1.554.592.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi	95	%	1.519.843.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang	95	%	1.064.914.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes	95	%	2.086.024.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	95	%	1.664.910.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						perangkat daerah UPPD Blora				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap	95	%	1.974.787.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga	95	%	1.369.057.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara	95	%	1.349.213.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas	100	%	2.204.177.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Kaki Kelas A (BIPTAK)				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Pati	100	%	2.554.100.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	100	%	3.848.955.000	Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Ambarawa	100	%	3.162.657.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	%	1.999.958.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Balkesmas Wilayah Magelang				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I	95	%	2.038.741.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Klaten	100	%	1.973.434.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100	%	850.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	86	%	32.143.745.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah INSPEKTORAT	100	%	189.983.000	INSPEKTORAT
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT	100	%	29.426.411.000	INSPEKTORAT
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Kesehatan	100	%	3.043.561.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	37	%	68.383.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100	%	74.154.779.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	100	%	2.040.364.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	100	%	1.357.782.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	%	378.365.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja	100	%	71.324.564.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						dan Transmigrasi				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	100	%	1.300.000.000	Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	100	%	1.111.155.000	Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	100	%	1.350.000.000	Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	100	%	851.688.000	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	100	%	1.300.000.000	Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran	95	%	2.213.840.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	100	%	1.073.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	95	%	1.228.838.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						daerah UPPD Salatiga				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal	95	%	1.332.485.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak	95	%	1.349.132.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	100	%	610.880.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan	87	%	811.014.000	Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Sertifikasi Pangan				
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan	100	%	92.259.167.000	Dinas Pendidikan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan	100	%	5.282.138.236.000	Dinas Pendidikan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan RSUD Dr. Moewardi	100	%	93.200.228.000	RSUD Dr. Moewardi
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	33,01	%	56.393.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	100	%	69.950.716.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	100	%	6.249.000.000	Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran	100	%	2.423.100.000	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	100	%	2.246.890.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang	100	%	1.601.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Dinas Wilayah Pendidikan III				
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	%	685.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	100	%	1.093.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	100	%	4.030.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	%	69.671.780.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	100	%	1.120.800.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	100	%	1.514.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	100	%	1.321.250.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	100	%	1.409.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	100	%	1.013.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	100	%	1.657.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabdin XIICabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	100	%	1.318.300.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	81,5	%	8.394.248.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	495.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	30.494.576.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100	%	453.691.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	100	%	49.277.557.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	100	%	1.220.856.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	100	%	491.265.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	100	%	463.378.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	100	%	756.170.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	100	%	457.676.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	100	%	381.904.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	100	%	644.022.000	Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						daerah Pelabuhan Perikanan Juwana				
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kesehatan	94	%	324.774.000	Dinas Kesehatan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	100	%	1.444.788.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan	90,5	%	84.712.334.000	Dinas Kesehatan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan	100	%	667.879.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Pantai Logending				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	100	%	742.039.000	Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	100	%	5.937.483.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	100	%	4.390.153.000	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	100	%	442.160.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	100	%	596.473.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	100	%	513.636.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	100	%	406.687.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	100	%	507.428.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	%	120.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	87	%	22.775.156.000	Dinas Ketahanan Pangan
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	90	%	400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Penghubung	96	%	54.735.000	Badan Penghubung
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung	100	%	21.457.471.000	Badan Penghubung
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	%	285.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	%	18.360.901.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. REHATTA	52	%	76.028.000.000	RSUD dr. REHATTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD dr. REHATTA	100	%	46.556.704.000	RSUD dr. REHATTA
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	100	%	557.500.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	100	%	41.448.297.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	100	%	266.660.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Terpadu Satu Pintu				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	%	19.254.517.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	100	%	357.140.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Penilaian Kompetensi ASN	100	%	40.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	%	839.389.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan	100	%	245.683.000	Dinas Perhubungan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan	100	%	67.243.976.000	Dinas Perhubungan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	100	%	157.840.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	100	%	123.612.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	100	%	247.100.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	100	%	164.700.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	100	%	141.500.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	100	%	171.400.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	100	%	297.000.000	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	%	24.463.628.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	100	%	3.506.000.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	100	%	1.004.321.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang	100	%	619.465.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	100	%	523.562.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	100	%	538.526.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	100	%	506.976.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	100	%	538.173.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	100	%	518.303.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	100	%	433.699.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang	100	%	930.780.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	100	%	562.349.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	100	%	471.644.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	100	%	529.050.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	100	%	548.866.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial	100	%	124.332.974.000	Dinas Sosial
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	91	%	1.074.999.996.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	100	%	58.338.358.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah	100	%	29.980.691.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Sakit Mata Soepardjo Rustam				
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	100	%	19.309.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Turusgede	100	%	287.320.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	100	%	493.700.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	100	%	412.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						daerah Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	100	%	482.627.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	100	%	337.600.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	100	%	373.050.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	100	%	444.025.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	100	%	458.458.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dewanata	100	%	694.955.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pendowo	100	%	276.750.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	100	%	503.209.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Raharjo	100	%	528.581.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	100	%	308.040.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan	100	%	542.250.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Sosial Bojong Bata				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Penganthi	100	%	437.000.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Sosial	100	%	850.000.000	Dinas Sosial
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Dr. Moewardi	82,2	%	1.160.400.000.000	RSUD Dr. Moewardi
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	100	%	335.887.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	79,5	%	36.250.807.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data	100	%	176.009.000	UPT Pusat Data
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah	100	%	1.906.924.000	Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah	100	%	5.183.485.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah	100	%	3.993.060.000	Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	100	%	421.074.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	100	%	133.430.179.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	100	%	952.000.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	100	%	4.182.590.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	100	%	863.000.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelidungan Tanaman	100	%	900.000.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Pertanian	100	%	1.128.000.000	Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian	100	%	12.518.445.000	Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	100	%	1.759.003.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	100	%	317.914.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita	100	%	3.468.000.000	Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Taman Budaya Jawa Tengah	100	%	4.775.000.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	100	%	1.741.911.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	%	1.121.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	%	162.170.725.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	100	%	1.974.164.000	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Jasa Konstruksi	100	%	953.479.000	BALAI JASA KONSTRUKSI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	100	%	1.513.461.000	BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	100	%	1.658.213.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	100	%	2.576.618.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	100	%	1.344.439.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	100	%	1.855.914.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	100	%	1.356.377.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan	100	%	2.265.017.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Jalan Wilayah Cilacap				
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	100	%	2.882.801.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Pemali Comal	100	%	990.873.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Jratun Seluna	100	%	1.776.259.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Bengawan Solo	100	%	715.406.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Serayu Bogowonto	100	%	1.576.684.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	%	550.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	86	%	34.469.477.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	%	18.627.159.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				70.000.000	
						Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	99,07	%	70.000.000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL				60.000.000	
						Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	99,12	%	60.000.000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				75.000.000	
						Persentase Institusi/Lembaga/ Badan Hukum yang difasilitasi pemanfaatan data kependudukan	100	%	75.000.000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				15.345.000.000	
						Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	85	Angka	15.345.000.000	Bidang Komunikasi Publik dan Media
					PROGRAM PENGELOLAAN				42.741.829.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					APLIKASI INFORMATIKA					
						Tingkat Pemenuhan Layanan Digital	25	%	2.540.725.000	Bidang Infrastruktur Teknologi Digital
						Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	65	%	20.173.604.000	UPT Pusat Data
						Tingkat Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi	12	%	20.027.500.000	Bidang Aplikasi Pemerintah Digital
					PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL				740.000.000	
						Indeks Satu Data Indonesia	86	Indeks	740.000.000	Bidang Pengelolaan Data dan Statistik
					PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				1.783.800.000	
						Tingkat Kematangan Keamanan Siber	3,59	Angka	1.783.800.000	Bidang Persandian dan Keamanan Siber
					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				597.827.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraa n kearsipannya	44,74	%	261.125.000	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
						Persentase pengelolaan arsip statis provinsi	79,15	%	177.927.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85,7	Angka	158.775.000	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				20.065.000	
						Persentase peningkatan perangkat daerah yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	66,67	%	6.053.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
						Persentase pemulihan arsip akibat bencana	20,34	%	9.012.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
						Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan	11,4	%	5.000.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						melalui alih media				
					PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				1.410.458.000	
						Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi	71	%	199.101.000	BIRO ORGANISASI
						Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	91,43	%	144.920.000	BIRO ORGANISASI
						Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif	92	%	164.094.000	BIRO ORGANISASI
						Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	59,52	%	145.202.000	BIRO ORGANISASI
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	71,42	%	120.398.000	BIRO ORGANISASI
						Persentase Perangkat Daerah dengan	70	%	214.847.000	BIRO ORGANISASI

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						nilai SAKIP meningkat				
						Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	93	%	217.896.000	BIRO ORGANISASI
						Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas	39,21	%	204.000.000	BIRO ORGANISASI
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				2.919.557.000	
						Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	100	%	1.686.294.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	100	%	675.000.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	100	%	558.263.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
					PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				411.638.757.000	
						Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	85	%	600.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	85	%	650.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	63	%	410.388.757.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
					PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				2.856.000.000	
						Indeks Reformasi Hukum	92	Angka	866.821.000	BIRO HUKUM
						Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	96	%	516.313.000	BIRO HUKUM
						Capaian Pemberian Bantuan Hukum	100	%	1.321.326.000	BIRO HUKUM

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	86	Angka	151.540.000	BIRO HUKUM
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				4.640.000.000	
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	80	%	215.000.000	BIRO PEREKONOMIAN
						Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	85	%	600.000.000	BIRO PEREKONOMIAN
						Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	1,95	%	875.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
						Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	2,3	%	750.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
						Persentase nilai kemandirian BLUD	55	%	355.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup	85	%	175.870.000	BIRO PEREKONOMIAN
						Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral	85	%	206.218.000	BIRO PEREKONOMIAN
						Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	87	%	1.462.912.000	BIRO PEREKONOMIAN
					PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				1.781.081.000	
						Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	92	%	839.176.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
						Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	85	%	475.139.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
						Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	83	%	466.766.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				1.755.000.000	
						Persentase realisasi bantuan keuangan	86	%	740.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	86,5	%	195.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan	100	%	195.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	90	%	625.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
					PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN , DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				4.850.000.000	
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	80,31	%	1.100.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	87,29	%	830.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
						Persentase Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah Dengan Kinerja Daerah	98,74	%	2.920.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				5.235.000.000	
						Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	89,08	%	220.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	99,07	%	380.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80,49	%	1.315.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	76,59	%	1.130.000.000	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
						Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	85,76	%	450.000.000	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
						Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	97,84	%	100.000.000	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
						Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	99,29	%	100.000.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	87,03	%	385.000.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	83,84	%	1.155.000.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5.871.840.000	
						Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN	85	%	2.695.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi
						Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta	92	%	675.000.000	Bidang Mutasi dan Promosi
						Persentase pemetaan kompetensi ASN	100	%	620.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
						Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	10	%	531.840.000	Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja
						Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi	100	%	790.000.000	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase peningkatan kinerja ASN	85	%	150.000.000	Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja
						Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	70	%	410.000.000	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				26.892.349.000	
						Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis	95,5	%	2.100.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	95,5	%	3.200.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
						Persentase tingkat kelulusan pengembangan kompetensi manajerial, sosiokultural dan pemerintahan dalam negeri	95,5	%	20.000.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri
						Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggara	3,5	Angka	532.104.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						n dan Pasca Pelatihan)				
						Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	100	%	307.896.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
						Persentase ASN lulus dan tersertifikasi kompetensi	50	%	752.349.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
					PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				3.379.000.000	
						Persentase Pengkajian Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi sesuai prioritas Daerah	100	%	950.000.000	Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi
						Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi sesuai target	100	%	800.000.000	Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi
						Persentase Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sesuai target	100	%	949.000.000	Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi
						Persentase Peningkatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sesuai kebutuhan	100	%	680.000.000	Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				4.732.269.000	
						Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan penghubung	100	%	4.732.269.000	Badan Penghubung
					PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN				4.568.089.000	
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Penyelenggara n Pemerintahan Daerah	100	%	1.278.120.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGA RAN PEMERINTAHAN DAERAH
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	100	%	982.440.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	100	%	1.246.920.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Khusus	100	%	864.840.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS
						Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	96,23	%	195.769.000	INSPEKTORAT
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.924.677.000	
						Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	100	%	127.180.000	INSPEKTORAT
						Persentase perangkat daerah yang mendapatkan IEPK level 3	35,71	%	1.572.219.000	INSPEKTORAT
						Persentase perangkat daerah yang memperoleh predikat Zona Integritas	42,85	%	110.758.000	INSPEKTORAT

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB lebih dari (>) 80	61,9	%	114.520.000	INSPEKTORAT
				Indeks Demokrasi Indonesia			86,46 - 89,50	Angka	651.461.658.000	
					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.432.690.000	
						Persentase Pengendalian Tibumtranmas	80,71	%	1.572.690.000	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
						Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	85,71	%	2.250.000.000	Bidang Penegakan Hukum Daerah
						Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Penyelenggaraa n Manajemen Satlinmas berkategori baik	8,57	%	610.000.000	Bidang Pelindungan Masyarakat
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				360.000.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	29	%	360.000.000	Bidang Penanganan Kebakaran
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				336.517.695.000	
						Nilai survei kepuasan layanan persidangan	75	Angka	102.018.607.000	Bagian Persidangan
						Nilai survei kepuasan layanan kehumasan	75	Angka	234.499.088.000	Bagian Hubungan Masyarakat
					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.608.336.000	
						Indeks Aktualisasi Pancasila	76,31	Angka	2.608.336.000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA				61.299.273.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					BUDAYA POLITIK					
						Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan	88,11	Angka	3.228.955.000	Bidang Politik Dalam Negeri
						Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi	80,47	Angka	58.070.318.000	Bidang Politik Dalam Negeri
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				36.626.664.000	
						Indeks Kinerja Ormas	78,26	Angka	36.626.664.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				2.373.400.000	
						Indeks Toleransi	75,4	Angka	1.203.966.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Indeks ketahanan Ekonomi	2,89	Angka	1.169.434.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				207.243.600.000	
						Indeks Kewaspadaan Nasional	74	Angka	207.243.600.000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
				Otonomi Fiskal Daerah			65,72	%	6.891.636.940.000	
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				6.857.812.348.000	
						Persentase pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	100	%	1.000.000.000	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
						Persentase Penetapan APBD Provinsi Tepat Waktu	100	%	6.518.200.000	Bidang Anggaran
						Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100	%	3.500.000.000	Bidang Akuntansi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	100	%	6.846.312.348.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	100	%	481.800.000	Bidang Anggaran
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.815.905.000	
						Persentase Kenaikan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	50,5	%	593.261.000	Bidang Aset Daerah
						Tingkat Administrasi BMD yang Andal	70,5	%	584.864.000	Bidang Aset Daerah
						Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	100	%	780.000.000	Bidang Aset Daerah
						Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	9	%	541.875.000	Bidang Aset Daerah

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	100	%	315.905.000	Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				31.008.687.000	
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen	100	%	291.540.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	100	%	238.700.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	100	%	209.340.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	100	%	340.565.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	100	%	357.837.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	100	%	409.659.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	100	%	325.920.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	100	%	399.033.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	100	%	347.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	100	%	485.745.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	100	%	237.610.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	100	%	205.477.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	100	%	267.115.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	100	%	232.435.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	100	%	325.170.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	100	%	301.091.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	100	%	251.718.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	100	%	343.481.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	100	%	395.160.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang	100	%	406.635.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	100	%	215.970.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	100	%	409.412.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	100	%	383.013.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	100	%	327.900.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	100	%	271.915.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	100	%	257.625.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	100	%	251.100.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	100	%	267.850.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	100	%	364.300.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	100	%	296.425.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	100	%	279.650.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	100	%	294.850.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	100	%	369.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	100	%	312.900.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	100	%	157.690.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	100	%	324.300.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	100	%	416.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	100	%	1.370.700.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	100	%	2.714.000.000	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	100	%	718.095.000	Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
						Persentase Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	100	%	600.000.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi
						Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	100	%	11.248.986.000	Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	100	%	32.200.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	100	%	215.750.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	100	%	109.650.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	100	%	85.350.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	100	%	81.400.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	100	%	73.100.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal	100	%	63.000.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	100	%	69.400.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	100	%	85.400.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	100	%	176.520.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	100	%	61.750.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	100	%	58.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	100	%	78.156.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	100	%	59.650.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	100	%	44.858.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	100	%	68.700.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	100	%	165.070.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	100	%	89.870.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	100	%	68.420.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	100	%	80.600.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	100	%	69.020.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	100	%	59.330.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	100	%	69.000.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	100	%	28.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	100	%	46.800.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	100	%	75.500.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	100	%	29.550.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	100	%	37.363.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	100	%	56.250.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	100	%	51.140.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	100	%	26.675.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD KAJEN	100	%	69.925.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah KAJEN
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	100	%	99.878.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD PEmalang	100	%	92.250.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah PEmalang
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	100	%	54.000.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	100	%	56.711.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	100	%	96.789.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan									1.162.360.827.000	
			Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan						1.162.360.827.000	
				Pertumbuhan Ekonomi			5,00 - 6,00	%	999.071.013.000	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				349.789.477.000	
						Persentase pengawasan teknis yang mendukung penyelenggaraan jalan	100	%	2.000.000.000	BIDANG BINA MARGA
						Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	100	%	5.880.000.000	BIDANG BINA TEKNIK

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Panjang Jalan yang Dileger	59,69	%	380.000.000	BIDANG BINA TEKNIK
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan	99,81	%	5.241.888.000	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
						Persentase Pengendalian Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi	19,67	%	2.782.757.000	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	94,62	%	3.625.753.000	BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	64,59	%	19.188.976.000	BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai	92,03	%	7.795.376.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Pengelolaan Jalan Wilayah Pati				
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	69,81	%	15.892.729.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	91,36	%	5.710.253.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	50,21	%	26.493.201.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	92,25	%	5.384.555.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	65,54	%	26.315.888.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	94,17	%	4.367.320.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	73,4	%	16.035.366.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	95,37	%	6.324.866.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	75,41	%	13.066.759.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	94,9	%	6.608.209.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	59,5	%	24.856.265.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	94,11	%	3.934.170.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	59,12	%	15.245.050.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
						Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	1189,63	Km	132.660.096.000	BIDANG BINA MARGA
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				5.975.000.000	
						Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	6,3	%	2.825.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase data kejadian bencana yang terverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam	90	%	350.000.000	Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi
						Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam pemulihan pasca bencana	100	%	300.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
						Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam penanganan bencana	100	%	2.500.000.000	Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				13.614.995.000	
						Rata-rata Ketersediaan Pangan	1,21	Angka	70.860.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
						Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD)	0,47	Angka	5.025.529.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
						Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	62,5	%	6.654.106.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	87,3	kg/kapita/tahun	1.864.500.000	Bidang Panganekaragaman dan Konsumsi Pangan
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				4.975.924.000	
						Persentase Daerah Rawan Pangan	14,6	%	4.975.924.000	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				2.592.206.000	
						Persentase Capaian Tertimbang Regristasi dan Sertifikasi Pangan Segar	40	%	1.657.085.000	Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
						Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	90,1	%	935.121.000	Bidang Keamanan Pangan
					PROGRAM PENATAAN DESA				-	
						Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	100	%	-	Bidang Penataan dan Regulasi Desa
					PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				155.000.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	57,05	%	155.000.000	Bidang Fasilitas Kerjasama dan Ekonomi Desa
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				1.033.540.000	
						Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa	100	%	385.000.000	Bidang Penataan dan Regulasi Desa
						Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa	100	%	648.540.000	Bidang Bina Pemerintahan Desa
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				3.870.000.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan nya	100	%	3.000.000.000	Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat
						Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa	100	%	705.000.000	Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat
						Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	45,96	%	165.000.000	Bidang Fasilitas Kerjasama dan Ekonomi Desa
					PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				136.438.696.000	
						Rasio Trayek Angkutan Jalan	46,74	Angka	783.757.000	Bidang Angkutan Jalan
						Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	69,85	%	696.815.000	Bidang Angkutan Jalan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B	70,14	%	5.457.000.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
						Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	52,95	%	101.800.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	22,04	%	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	3,99	%	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	45,11	%	80.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	8,04	%	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	43,53	%	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	28,16	%	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
						Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)	4,42	%	118.885.631.000	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
						Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	6,94	%	5.564.416.000	Bidang Lalu Lintas Jalan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						pada jalan provinsi				
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	3	%	580.800.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	3	%	474.210.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	3	%	645.080.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Perhubungan Wilayah III Kelas A				
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	3	%	470.344.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	3	%	559.310.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan	3	%	506.037.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A				
						Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	98,03	%	192.113.000	Bidang Lalu Lintas Jalan
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	57,12	%	181.700.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	86,2	%	94.520.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	81,84	%	358.208.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	92,83	%	166.530.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	87,09	%	166.570.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	88,66	%	198.855.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				716.983.000	
						Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	0,472	Angka	716.983.000	Bidang Pelayaran

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				1.600.000.000	
						Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	28	%	1.600.000.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				938.680.000	
						Persentase Koperasi Berkualitas	27,1	%	938.680.000	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				195.000.000	
						Persentase SDM Koperasi yang berkualitas	91	%	195.000.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				577.000.000	
						Persentase Koperasi Produktif	53,3	%	577.000.000	Bidang Bina Usaha Koperasi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				3.278.390.000	
						Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha	30	%	3.278.390.000	Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM
					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				667.200.000	
						Persentase peningkatan pengakses bahan promosi investasi yang telah dipublikasikan	10	%	667.200.000	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				1.514.954.000	
						Persentase kepedulian yang terealisasi	62	%	1.514.954.000	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				790.000.000	
						Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	91,5	%	480.000.000	Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase standar pelayanan yang ditetapkan	100	%	310.000.000	Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				350.000.000	
						Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	25	%	350.000.000	Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				210.000.000	
						Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	10	%	210.000.000	Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				765.378.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	50,17	%	491.310.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
						Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	25	%	274.068.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				9.248.576.000	
						Produksi Perikanan Tangkap	354029	Ton	4.585.278.000	Bidang Perikanan Tangkap
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	100	%	119.301.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	100	%	633.497.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	100	%	88.778.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	100	%	92.096.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	100	%	127.772.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	100	%	91.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	100	%	577.223.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	91	%	1.116.347.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	100	%	1.381.613.000	Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	100	%	230.988.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	100	%	204.283.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				12.612.050.000	
						Produksi Perikanan Budidaya	600000	Ton	5.812.544.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
						Persentase penanganan	100	%	268.890.000	Balai Kesehatan Ikan dan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						kasus hama penyakit ikan				Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
						Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	5	%	6.530.616.000	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
					PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.663.227.000	
						Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	70	%	952.991.000	Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
						Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	50	%	56.960.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
						Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	50	%	103.390.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	61	%	244.953.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
						Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	17	%	64.710.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
						Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	17	%	58.212.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
						Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	72	%	182.011.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				1.000.072.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Angka Konsumsi Ikan	17,71	kg/kapita/tahun	637.000.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
						Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4	%	363.072.000	Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				6.525.625.000	
						Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	2	%	6.525.625.000	Bidang Destinasi Pariwisata
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				8.652.050.000	
						Jumlah Kunjungan Wisatawan	75348282	Orang	8.652.050.000	Bidang Pemasaran Pariwisata
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				850.000.000	
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	1	Kabupaten/Kota	850.000.000	Bidang Ekonomi Kreatif

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				1.050.000.000	
						Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi Kompetensi	20	%	600.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata
						Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Kompetensi	4,3	%	450.000.000	Bidang Ekonomi Kreatif
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				159.281.528.000	
						Jumlah Populasi ternak	6135083	(ST)/ (AU)	29.692.000.000	Bidang Peternakan
						Persentase peredaran obat Hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	81	%	860.000.000	Bidang Veteriner
						Persentase produksi dan distribusi semen beku	1	%	4.436.071.000	Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	1	%	6.878.612.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia penghasil susu	1	%	960.818.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
						Persentase peningkatan produksi ternak non ruminansia penghasil telur	1	%	2.213.100.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
						Produksi Padi	9380811	Ton	22.101.200.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Produksi Jagung	3301024	Ton	3.208.005.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Produksi Kedelai	52790	Ton	8.700.000.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Produksi Bawang Merah	617015	Ton	1.786.616.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Produksi Cabai	456621	Ton	4.244.735.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Produksi Kopi	26875	Ton	5.550.000.000	Bidang Perkebunan
						Produksi Tebu	3674236	Ton	45.860.427.000	Bidang Perkebunan
						Produksi Kelapa	166955	Ton	4.630.000.000	Bidang Perkebunan
						Persentase capaian alsintan dan pengelola alsintan yang diawasi	3	%	377.562.000	Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
						Persentase alsintan yang direkayasa dan dikembangkan	100	%	228.993.000	Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	100	%	3.828.717.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	100	%	4.657.200.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
						Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman pangan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	100	%	2.947.988.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
						Persentase layanan sertifikasi benih tanaman pangan	100	%	1.156.787.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
						Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman hortikultura di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	100	%	1.066.012.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman perkebunan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	100	%	950.000.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
						Produksi Tanaman Buah dan Tanaman Obat	392201	Ton	1.612.475.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Persentase layanan sertifikasi benih tanaman perkebunan	100	%	486.719.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
						Persentase layanan sertifikasi benih tanaman hortikultura	100	%	847.491.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				178.234.000.000	
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana sarana pertanian	1	%	175.834.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana peternakan	5	%	2.400.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				4.637.563.000	
						Persentase penurunan jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	1	%	1.230.000.000	Bidang Veteriner
						Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV	30	%	910.000.000	Bidang Veteriner
						Persentase Layanan Veteriner	100	%	2.497.563.000	Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN				5.850.000.000	
						Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	20	%	1.500.000.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
						Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Perkebunan	10	%	3.750.000.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan	5	%	210.360.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
						Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Perkebunan	5	%	44.820.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
						Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura	10	%	300.000.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
						Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura	5	%	44.820.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				52.959.252.000	
						Persentase kelembagaan petani yang terfasilitasi	0,2	%	30.032.978.000	Bidang Kelembagaan
						Persentase SDM pertanian yang dilatih	100	%	4.972.000.000	Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
						Persentase peningkatan fasilitasi kelembagaan dan kemitraan peternak	1,25	%	17.954.274.000	Bidang Kelembagaan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				165.000.000	
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	21,96	%	165.000.000	Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				300.000.000	
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 1	0,3	%	25.000.000	CDK WILAYAH I
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 2	0,2	%	15.000.000	CDK WILAYAH II
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 3	0,2	%	15.000.000	CDK WILAYAH III
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 4	0,2	%	15.000.000	CDK WILAYAH IV

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 5	0,3	%	15.000.000	CDK WILAYAH V
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 6	0,2	%	15.000.000	CDK WILAYAH VI
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 8	0,2	%	20.000.000	CDK WILAYAH VIII
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 9	0,2	%	15.000.000	CDK WILAYAH IX
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 10	0,2	%	15.000.000	CDK WILAYAH X
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 11	0,2	%	15.000.000	CDK WILAYAH XI
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 7	0,3	%	15.000.000	CDK WILAYAH VII
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	2,5	%	120.000.000	Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan
					PROGRAM PENGELOLAAN				1.077.356.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					MINERAL DAN BATUBARA					
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	72,9	%	418.787.000	Bidang Mineral dan Batubara
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	72,9	%	85.288.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	72,9	%	43.366.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	72,9	%	40.018.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	72,9	%	39.878.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	72,9	%	54.450.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	72,9	%	56.484.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	72,9	%	58.019.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
						Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	100	%	95.000.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	72,9	%	76.135.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	72,9	%	74.163.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	72,9	%	35.768.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
					PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				2.135.551.000	
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	972,99	SBM	500.631.000	Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	179,64	SBM	285.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	26,08	SBM	47.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	144,05	SBM	261.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	57,95	SBM	131.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun	45,11	SBM	120.760.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						di Wilayah Slamet Utara				
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	98,93	SBM	140.760.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	165,42	SBM	182.760.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang - Demak	127,91	SBM	232.280.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	28,97	SBM	91.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	98,93	SBM	140.760.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
					PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				2.131.994.000	
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	43,02	%	600.000.000	Bidang Ketenagalistrikan
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo	43,11	%	232.626.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Muria	43,13	%	89.682.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Utara	43,11	%	147.578.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Selatan	43,13	%	147.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Utara	43,07	%	147.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan	43,1	%	141.280.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan	43,11	%	158.376.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak	42,31	%	184.307.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi	43,03	%	148.168.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah	43,07	%	135.977.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				70.000.000	
						Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah	9	%	70.000.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				200.000.000	
						Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan	3	%	200.000.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				2.150.000.000	
						Ekspor Barang dan Jasa	11,12	% PDRB	2.150.000.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				999.054.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	10	%	173.342.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	2	%	400.712.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A
						Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen	1,05	%	425.000.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				6.791.546.000	
						Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	10	%	6.791.546.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
					PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				9.876.146.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	0	%	140.000.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	6,98	%	110.000.000	Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A
						Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	0	%	2.428.000.000	Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri
						Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	10	%	1.830.000.000	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
						Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	0	%	5.368.146.000	Bidang Pemberdayaan Industri
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				502.000.000	
						Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan	0	%	502.000.000	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						dilakukan pengawasan				Pengendalian Industri
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				60.000.000	
						Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	10	%	60.000.000	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
				Tingkat Inflasi			1,50 - 3,50	%	33.550.000.000	
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				33.550.000.000	
						Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau	0,52	%	33.550.000.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			75,73	Angka	129.739.814.000	
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				48.621.302.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	61,66	%	100.000.000	BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
						Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	70,44	%	915.000.000	BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
						Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	52,38	%	13.750.000.000	BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	65,71	Angka	4.872.963.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	35,08	%	747.931.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
						Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	53	%	1.229.106.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal	100	%	979.975.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	68,4	Angka	7.570.000.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	56,98	%	900.000.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
						Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	50,14	%	530.000.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna	100	%	1.480.000.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	73,45	Angka	6.762.463.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	76,5	%	466.527.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto	100	%	1.213.575.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	67,36	Angka	3.908.392.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	67,35	%	491.608.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo	100	%	978.762.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya Kewenangan Provinsi	2688058,55	m3	250.000.000	BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Teknis dan Pengembangan Sumber Daya Air	100	%	1.475.000.000	BIDANG BINA TEKNIK
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				23.013.309.000	
						Persentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	100	%	14.954.847.000	BIDANG CIPTA KARYA
						Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum	31,02	%	7.808.462.000	BIDANG CIPTA KARYA

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Jaringan Perpipaan				
						Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	42,6	%	250.000.000	BIDANG CIPTA KARYA
					PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				11.770.900.000	
						Persentase Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang terbangun	100	%	11.770.900.000	BIDANG CIPTA KARYA
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				2.793.451.000	
						Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terhadap kebutuhan	100	%	2.793.451.000	BIDANG CIPTA KARYA

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						pembinaan dan pemberdayaan				
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				13.470.116.000	
						Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	11,17	%	13.470.116.000	BIDANG CIPTA KARYA
					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				2.146.224.000	
						Persentase Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	100	%	146.224.000	BIDANG CIPTA KARYA
						Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Tersertifikasi	51,45	%	2.000.000.000	BALAI JASA KONSTRUKSI
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				997.688.000	
						Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	65	%	-	BIDANG PENATAAN RUANG
						Persentase Rekomendasi	100	%	147.389.000	BIDANG PENATAAN RUANG

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Pemanfaatan Ruang				
						Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Program	58,86	%	152.611.000	BIDANG PENATAAN RUANG
						Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	63	%	107.143.000	BIDANG PENATAAN RUANG
						Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	41	%	192.857.000	BIDANG PENATAAN RUANG
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Jratun Seluna	100	%	20.000.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Bengawan Solo	100	%	21.238.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Serayu Bogowonto	100	%	36.425.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
						Persentase Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota	39,87	%	300.000.000	BIDANG PENATAAN RUANG

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Pemali Comal	100	%	20.025.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				12.845.000.000	
						Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	16,9	%	7.405.000.000	Bidang Perumahan
						Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan	0,47	%	5.440.000.000	Bidang Perumahan
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				3.266.323.000	
						Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	14,9	%	2.011.523.000	Bidang Kawasan Permukiman
						Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	%	1.254.800.000	Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				2.663.000.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang disediakan	7,69	%	2.663.000.000	Bidang Kawasan Permukiman
					PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				370.000.000	
						Persentase Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan	6,84	%	370.000.000	Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
					PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				270.000.000	
						Persentase Fasilitasi Penetapan Lokasi	100	%	270.000.000	Bidang Pertanahan
					PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				500.000.000	
						Persentase Penyelesaian	100	%	500.000.000	Bidang Pertanahan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Permasalahan Pertanahan				
					PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				430.000.000	
						Persentase Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	100	%	430.000.000	Bidang Pertanahan
					PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP				200.000.000	
						Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan	100	%	200.000.000	Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				965.614.000	
						Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	4,76	%	150.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
										Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
						Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	3,26	%	215.614.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
						Persentase pemantauan kualitas lingkungan hidup	100	%	600.000.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				158.986.000	
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	0,4	%	64.386.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
						Persentase peningkatan pelestarian kehati di Kebun Raya Baturraden	3	%	94.600.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				25.000.000	
						Persentase Limbah B3 Yang Terkelola	80	%	25.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				400.000.000	
						Persentase rekomendasi lingkungan hidup yang diterbitkan	100	%	200.000.000	Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
						Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	50	%	200.000.000	Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
										Perlindungan Hutan
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				200.000.000	
						Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	100	%	200.000.000	Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				30.000.000	
						Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	%	30.000.000	Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				245.000.000	
						Persentase Timbulan sampah yang terkelola	63	%	245.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				616.533.000	
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	0,16	%	184.824.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	0,19	%	230.977.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	0,07	%	200.732.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				2.511.375.000	
						Persentase lahan kritis tertangani	0,78	%	60.000.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	100	%	50.000.000	Bidang Penataan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK I	0,01	%	200.000.000	CDK WILAYAH I
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 2	0,02	%	357.500.000	CDK WILAYAH II
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 3	0,01	%	173.500.000	CDK WILAYAH III
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 4	0,02	%	337.484.000	CDK WILAYAH IV
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 5	0,08	%	377.396.000	CDK WILAYAH V
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 6	0,01	%	269.720.000	CDK WILAYAH VI
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 8	0,01	%	201.000.000	CDK WILAYAH VIII
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 9	0,01	%	58.000.000	CDK WILAYAH IX
						Persentase lahan kritis	0,01	%	63.800.000	CDK WILAYAH X

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						tertangani CDK 10				
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 11	0,01	%	85.600.000	CDK WILAYAH XI
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 7	0,01	%	149.000.000	CDK WILAYAH VII
						Persentase bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	100	%	73.375.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 2	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH II
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 3	100	%	15.000.000	CDK WILAYAH III
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 4	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH IV

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 5	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH V
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 6	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH VI
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 9	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH IX
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 10	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH X
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 11	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH XI

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 7	100	%	5.000.000	CDK WILAYAH VII
					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				191.362.000	
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	5	%	30.000.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	100	%	50.000.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
						Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura dinilai oleh Kementerian Kehutanan	73	Angka	90.000.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 1	5	%	-	CDK WILAYAH I

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani Balai Kebun Raya Baturraden	100	%	21.362.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
					PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				115.000.000	
						Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	10	%	115.000.000	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
					PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				923.631.000	
						Persentase Pengambilan Air Tanah di Jawa Tengah	27,58	%	358.631.000	Bidang Geologi dan Air Tanah
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	2,98	%	31.785.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	3,3	%	17.001.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	1,58	%	41.127.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
						Persentase pengambilan air	1,98	%	14.408.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						tanah Wilayah Serayu Selatan				
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	3,95	%	39.991.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	2,27	%	15.127.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	2,6	%	19.031.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
						Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	100	%	300.000.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	6,99	%	52.574.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	2,65	%	18.746.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	1,49	%	15.210.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter									3.940.152.344.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
			Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter						3.940.152.344.000	
				Indeks Modal Manusia			0,62	Angka	3.926.360.180.000	
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				3.028.289.802.000	
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	76,67	%	1.822.300.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	65,71	%	12.258.152.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	65,21	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	83,1	%	43.336.908.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
						APK SMA	30,32	%	37.750.000.000	Bidang Pembinaan SMA
						Angka Putus Sekolah SMA	0,011	Angka	15.200.000.000	Bidang Pembinaan SMA
						Persentase Prestasi Lomba SMA Tingkat Nasional	35,89	%	3.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA
						Nilai Kualitas Pembelajaran SMA	64,45	Angka	728.206.810.000	Bidang Pembinaan SMA
						APK SMK	53,75	%	13.865.731.000	Bidang Pembinaan SMK
						Angka Putus Sekolah SMK	0,026	Angka	27.097.200.000	Bidang Pembinaan SMK
						Persentase Prestasi Lomba SMK Tingkat Nasional	57	%	3.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	73,3	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	83,8	%	62.180.786.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	77,9	%	12.000.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	70,89	%	4.793.848.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	74,41	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
						Nilai Kualitas Pembelajaran SMK	60,86	Angka	1.394.715.710.000	Bidang Pembinaan SMK
						Nilai Kualitas Pembelajaran selaras dunia kerja	67,77	Angka	57.100.000.000	Bidang Pembinaan SMK

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	70,5	%	44.339.967.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	76,39	%	8.000.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	50,5	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	70,56	%	36.484.049.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	73,33	%	5.466.900.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	60,1	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	79	%	39.167.242.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	73,33	%	1.822.300.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	89,9	%	430.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di	68,2	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI				
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	83,05	%	46.333.314.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	68,49	%	3.644.600.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
						APK SLB	91,74	%	7.000.000.000	Bidang Pembinaan Diksus
						Angka Putus Sekolah SLB	0,043	Angka	2.530.000.000	Bidang Pembinaan Diksus
						Persentase Prestasi Lomba SLB Tingkat Nasional	54,05	%	1.250.000.000	Bidang Pembinaan Diksus
						Nilai Kualitas Pembelajaran SLB	65,61	Angka	85.631.830.000	Bidang Pembinaan Diksus
						Persentase Guru SMA Bersertifikat Kompetensi	76,84	%	1.036.188.000	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
						Persentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi	62,13	%	318.661.000	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Guru SLB Bersertifikat Kompetensi	57,72	%	223.666.000	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
						Persentase Guru SMK yang Memiliki Sertifikat keahlian	1,74	%	2.357.673.000	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
						Persentase Guru SMA, SMK, dan SLB Bersertifikasi Pelatihan Platform Pendidikan	25	%	1.600.000.000	Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	70,34	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	86,2	%	29.285.248.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas	68,28	%	150.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Wilayah Pendidikan VIII				
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	81,8	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	76,3	%	32.553.230.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	79,3	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	88,15	%	67.446.722.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	69,17	%	7.289.200.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	67,59	%	4.445.278.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	79,13	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	77,52	%	74.210.994.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas	71,15	%	12.644.600.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Wilayah Pendidikan X				
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	65,78	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	79,25	%	42.629.503.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	43,33	%	1.822.300.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	83,72	%	2.465.962.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	80,41	%	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	80,15	%	47.110.630.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
						Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	70	%	1.822.300.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				330.000.000	
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Wilayah Pendidikan V				
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	75	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	75	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	75	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	55	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas	100	%	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Wilayah Pendidikan XII				
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				400.000.000	
						Indeks Distribusi Guru SMA dan SMK	0,43	Angka	400.000.000	Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
					PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				300.000.000	
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	94	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	74,2	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	70,36	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	2,57	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	75,2	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	75,2	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	35	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	35	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	12,4	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	17,4	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	68,7	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	70,8	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	25	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	60	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	25	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	60	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	25	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	60	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	100	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	100	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	50	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	50	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	100	%	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	85	%	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				547.251.577.000	
						Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan, prasarana dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	100	%	70.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%	20.900.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
						Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Layanan RS di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100	%	315.394.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
						Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	28,57	%	15.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
						Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang yang melaksanakan skrining Kesehatan Jiwa dan Penyakit Tidak Menular	71,42	%	100.048.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						(PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%				
						Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 10 % institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	54,28	%	200.000.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Persentase Kabupaten Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	28,57	%	49.952.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
						Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat	100	%	30.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Wilayah Magelang				
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit mencapai Case Fatality Rate Direct Obstetric (eklamsi dan perdarahan) < 1%	68,57	%	100.000.000	Bidang Kesehatan Lanjutan
						Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	95	%	100.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	91	%	50.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Insidensi Human Immunodeficiency Virus (HIV)	8	%	63.570.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi malaria	35	Kabupaten/Kota	73.520.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Neglected Tropical Diseases (Pengendalian Kasus Filariasis dan Kusta)	20	Kabupaten/Kota	51.150.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Angka kematian Dengue	0,5	%	37.130.000	Bidang Penanggulangan Penyakit

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Insidensi Hepatitis B	1,1	%	30.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang sesuai standar	100	%	1.380.474.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai standar	41,27	%	3.369.000.000	Bidang Kesehatan Lanjutan
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	28,57	%	20.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
						Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan	57,14	%	135.830.000	Bidang Kesehatan Lanjutan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						terakreditasi paripurna				
						Presentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	28,57	%	15.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
						Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	85	%	45.083.482.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	54	%	537.994.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
						Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan skrining Kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas	57,14	%	60.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						dengan cakupan minimal 50%				
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	28,57	%	45.868.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
						Persentase mutu layanan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan sesuai standar	72	%	3.500.000.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
						Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	100	%	27.680.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	63,05	%	225.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan
						Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten sesuai standar	60	%	1.513.856.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	71,42	%	20.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
						Persentase penurunan kasus kematian ibu	2	%	384.950.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Angka Kematian Bayi (AKB)	7,5	1.000/K H	105.050.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan	28,57	%	14.570.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Masyarakat Wilayah Ambarawa				
						Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	28,57	%	65.076.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	28,57	%	55.510.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
						Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa dengan Posyandu yang melakukan	28,57	%	15.360.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran				
						Persentase mutu layanan Balkesmas Wilayah Ambarawa sesuai standar	100	%	1.768.813.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
						Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	100	%	27.300.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
						Persentase lanjut usia yang mandiri	77	%	32.000.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Prevalensi wasting balita	6,7	%	427.726.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Persentase Hipertensi dalam pengendalian	35	%	344.755.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Persentase Diabetes Melitus terkontrol (DM Terkendali)	35	%	35.315.000	Bidang Penanggulangan Penyakit

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun	14,4	%	22.688.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan skrining 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)	25,71	%	351.635.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kekebalan Kelompok	100	%	150.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/ wabah dan bencana	50	%	330.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	74,28	%	372.662.615.000	Bidang Kesehatan Lanjutan
						Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	25	%	34.195.000	Bidang Penanggulangan Penyakit

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	60	%	1.500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
						Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/alat penunjang medik untuk mendukung layanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	60	%	9.300.215.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
						Persentase pemenuhan layanan dan penunjang layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam sesuai standar	100	%	6.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam
						Persentase capaian indikator mutu layanan Rumah Sakit Mata	100	%	2.648.584.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Seopardjo Rustam				
						Persentase kabupaten/kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	20	%	25.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
						Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	28,57	%	60.210.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
						Persentase kabupaten/kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	28,57	%	46.790.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan kejadian luar biasa/wabah serta penanganan bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	100	%	23.674.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
						Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati sesuai standar	100	%	1.495.142.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati dengan posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	28,57	%	20.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
						Persentase Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	8,57	%	170.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Fasilitas pelayanan kesehatan Primer dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai Standar	51,19	%	30.000.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas pelayanan kesehatan Primer terakreditasi paripurna	85,71	%	60.000.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan Surveilans Kesehatan	50	%	559.990.000	Bidang Penanggulangan Penyakit
						Persentase Kabupaten/Kota dengan penyedia dan atau pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar mutu	37,14	%	21.000.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Kabupaten/Kota yang terlayani pelayanan laboratorium dan kalibrasi di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan	25	%	102.166.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
						Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	40	%	311.300.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1.928.215.000	
						Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang teregistrasi dan berkualitas	99	%	700.000.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
						Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	2,85	%	578.215.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkatkan Kompetensinya di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	30	%	650.000.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				75.000.000	
						Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	91	%	75.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				1.160.222.000	
						Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. ADHYATMA, MPH	5,24	%	55.500.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo	10	%	55.500.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
						Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Rumah Tangga Sehat	34,28	%	449.222.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
						Persentase kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dari Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	100	%	600.000.000	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				10.286.000.000	
						Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya dalam penyelenggaraa n kesejahteraan Sosial	8,88	%	10.286.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial
					PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				200.000.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	%	200.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				74.090.123.000	
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	100	%	4.623.520.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	100	%	5.725.910.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
						Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti	100	%	5.852.906.000	Bidang Rehabilitasi Sosial
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti	100	%	3.157.773.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Pelayanan Sosial Kasih Mesra				
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	100	%	3.963.440.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	100	%	2.240.215.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	100	%	2.593.013.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan	100	%	2.336.180.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Sosial Adi Yuswo				
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	100	%	2.465.760.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	100	%	3.165.280.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	100	%	3.441.200.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	100	%	4.350.654.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	100	%	3.795.580.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	100	%	4.577.556.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	100	%	1.585.750.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	100	%	3.797.341.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	100	%	4.563.239.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	100	%	2.676.195.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	100	%	3.817.310.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosia di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	100	%	3.312.095.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	100	%	2.049.206.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				110.594.572.000	
						Persentase rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan atas Pengajuan Pengangkatan Anak	100	%	350.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial
						Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima pelayanan jaminan sosial	100	%	84.044.572.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						Persentase PPKS Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	0,27	%	26.200.000.000	Bidang Penanganan Fakir Miskin

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA				4.397.580.000	
						Persentase Perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai SPM Bidang Sosial	100	%	4.397.580.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				200.000.000	
						Persentase Taman makam pahlawan terkelola	100	%	200.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial
					PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				2.698.800.000	
						Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi	12	%	121.730.000	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
						Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	80	%	2.577.070.000	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				770.432.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan	85	%	634.392.000	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
						Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100	%	136.040.000	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				328.408.000	
						Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	20	%	312.808.000	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
						Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih	24	%	15.600.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				373.720.000	
						Indeks Pemenuhan Hak Anak	61,5	Angka	373.720.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				296.720.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	79	Angka	160.680.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
						Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	100	%	136.040.000	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				160.000.000	
						Persentase kabupaten/kota yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	75	%	160.000.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				389.667.000	
						Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	69,48	%	389.667.000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				177.353.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	34	%	177.353.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				11.965.000.000	
						Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	8,6	%	9.345.000.000	Bidang Pelayanan Kepemudaan
						Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	80,6	%	720.000.000	Bidang Pelayanan Kepemudaan
						Persentase pemuda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan	20,85	%	1.900.000.000	Bidang Pengembangan Kepemudaan
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAN				100.444.700.000	
						Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	10	%	58.930.000.000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	79	%	15.900.000.000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
						Persentase Atlet pelajar dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	79	%	14.050.000.000	Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
						Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	0,34	%	11.564.700.000	Bidang Pembudayaan Olahraga
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				22.675.000.000	
						Persentase Warisan Budaya Tak Benda berperingkat Nasional	26,1	%	4.225.000.000	Bidang Pelindungan Kebudayaan
						Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang berdayaguna	27,11	%	17.300.000.000	Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase kesenian/tradisi budaya yang dilestarikan	72	%	1.150.000.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
					PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional				1.750.000.000	
						Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	1,12	%	1.750.000.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				150.000.000	
						Persentase literasi kesejarahan dan tradisi	53,55	%	150.000.000	Bidang Pelindungan Kebudayaan
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				1.205.000.000	
						Persentase Cagar Budaya berperingkat Nasional	13,6	%	625.000.000	Bidang Pelindungan Kebudayaan
						Persentase Cagar Budaya berdayaguna	16,12	%	580.000.000	Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
					PROGRAM PENGELOLAAN				1.900.000.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PERMUSEUMAN					
						Indeks Kepuasan Masyarakat	90,1	%	1.900.000.000	Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A
					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.469.708.000	
						Persentase penyelenggaraa n perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	45,27	%	680.912.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85,2	Angka	788.796.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan
					PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				102.581.000	
						Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	9,43	%	102.581.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan
				Tingkat Penganggura n Terbuka			4,71 - 4,27	%	13.792.164.000	
					PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				121.635.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	85,71	%	121.635.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				7.572.217.000	
						Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	9,28	%	331.323.000	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
						Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	14,29	%	93.677.000	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
						Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri	83,68	%	1.550.000.000	Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
						Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai	23,38	%	2.263.303.000	Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata				
						Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian	10	%	2.065.542.000	Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
						Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas	73	%	893.372.000	Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
						Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	68	%	375.000.000	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				1.510.000.000	
						Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	44,05	%	1.007.325.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Persentase penyerapan tenaga kerja	68,5	%	450.915.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
						baru di sektor informal				
						Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	21,75	%	14.290.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Pesentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	67,71	%	37.470.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				950.000.000	
						Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	51,03	%	141.605.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
						Persentase LKS Bipartit yang terbentuk	49,8	%	295.084.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
						Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	43,26	%	297.039.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,75	%	216.272.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
					PROGRAM PENGAWASAN				1.748.312.000	

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					KETENAGAKERJAAN					
						Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan	80,8	%	1.300.000.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
						Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	27,06	%	448.312.000	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
					PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				855.000.000	
						Persentase SDM UMKM yang berkualitas	91	%	151.578.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
						Persentase Wirausaha yang berkualitas	85	%	178.422.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
						Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	17,15	%	525.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM

Prioritas Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
					PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				885.000.000	
						Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	86	%	885.000.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)
					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				150.000.000	
						Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian	1,2	%	60.000.000	Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
						Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	2,06	%	90.000.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
									24.156.414.261.000	

Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 telah ditetapkan Program Strategis Nasional (ProSN) yang terdiri atas:

Tabel 4.11
Penjabaran Program Strategis Nasional (ProSN)

No	Program Strategis Nasional	No	Proyek/Kegiatan
1	Pengentasan Kemiskinan	1.	Penanggulangan Kemiskinan
		2.	Penghapusan Kemiskinan Ekestrem
		3.	Sekolah Rakyat
		4.	Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1.	Swasembada Pangan (Irigasi untuk mendukung Swasembada Pangan)
		2.	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		3.	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		4.	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (sawah/lumbung pangan/ <i>food estate</i>)
3.	Kesehatan untuk semua	1.	Stunting
		2.	Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		3.	Jaminan Kesehatan Nasional
		4.	Penuntasan TBC
		5.	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1.	Pembangunan dan dan Revitalisasi PAUD
		2	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		3.	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitilisasi Pembelajaran
		4.	Makan Bergizi Gratis
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1.	Pengendalian Inflasi
		2.	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3.	Optimalisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah
		4.	Industrialisasi dan hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)
		5.	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Sumber: Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Pada tahun 2026, pelaksanaan ProSN tersebut akan didukung oleh Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.4 Inovasi Pembangunan Daerah

Inovasi pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka percepatan pencapaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2026. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan sejalan dengan tujuan Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan. Salah satu program inovasi adalah **Program Spesialis Keliling (Layanan Spesialis Keliling) “SPELING”**.

Program “SPELING” bertujuan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan spesialis kepada masyarakat. Program ini dijalankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Rumah Sakit – Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah. Program ini menyediakan dokter spesialis dari berbagai bidang (penyakit dalam, paru, kandungan, anak, jiwa) yang mendatangi desa-desa dan wilayah sulit dijangkau di Jawa Tengah. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2025 Program Speling telah melayani sebanyak 37 ribu warga Jawa Tengah.



Sumber: Humas Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 4.1
Kegiatan Dokter Spesialis Keliling

Manfaat “SPELING” antara lain:

1. Mempermudah akses
Speling memudahkan masyarakat, terutama di daerah terpencil untuk memudahkan dalam mendapatkan layanan kesehatan spesialis tanpa perlu melakukan perjalanan jauh ke kota.
2. Menyediakan berbagai layanan
Speling dalam pelaksanaannya menyediakan beragam kebutuhan kesehatan, mulai dari penyakit dalam, paru, kandungan, anak hingga kesehatan jiwa.
3. Merangkul partisipasi Rumah Sakit
Pelaksanaan Speling melibatkan beragam dokter spesialis dari berbagai rumah sakit untuk bekerja sama dalam program ini.

Informasi mengenai jadwal Speling dapat diperoleh melalui:

1. Pengumuman melalui media sosial Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengumuman melalui web/situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Melalui kegiatan Speling diharapkan identifikasi dan diagnosa terhadap penyakit yang terjadi masyarakat dapat dengan mudah dilakukan sehingga upaya pengobatan dapat segera dilakukan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota merupakan pedoman bagi kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026. Arah kebijakan pembangunan ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044 dengan memperhatikan karakteristik masing-masing kabupaten/kota. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah juga memperhatikan capaian indikator makro yang mendukung capaian indikator makro provinsi.

5.1. Kondisi Kabupaten/Kota

Kondisi kabupaten/kota digambarkan dalam empat indikator makro yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang akan mendukung capaian indikator pada tingkat provinsi. Persandingan antar indikator makro di setiap kabupaten/kota dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas dalam melakukan dalam perencanaan pembangunan. Gambaran secara umum untuk keempat indikator makro di setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

5.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM diukur berdasarkan 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indikator ini menunjukkan pengembangan terutama dalam pembangunan sumber daya manusia yang merupakan hakikat pembangunan. Capaian IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan 2023 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 1
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
1.	Kabupaten Cilacap	72,04	72,55
2.	Kabupaten Banyumas	73,96	74,52
3.	Kabupaten Purbalingga	70,51	70,97
4.	Kabupaten Banjarnegara	69,16	69,62
5.	Kabupaten Kebumen	71,88	72,48
6.	Kabupaten Purworejo	74,35	75,16
7.	Kabupaten Wonosobo	70,18	70,63
8.	Kabupaten Magelang	71,56	72,10
9.	Kabupaten Boyolali	75,41	75,96
10.	Kabupaten Klaten	77,59	78,16

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
11.	Kabupaten Sukoharjo	78,65	79,30
12.	Kabupaten Wonogiri	71,97	72,54
13.	Kabupaten Karanganyar	77,31	78,11
14.	Kabupaten Sragen	75,10	75,53
15.	Kabupaten Grobogan	71,49	72,02
16.	Kabupaten Blora	70,63	71,42
17.	Kabupaten Rembang	71,89	72,53
18.	Kabupaten Pati	73,59	74,10
19.	Kabupaten Kudus	76,71	77,21
20.	Kabupaten Jepara	73,85	74,32
21.	Kabupaten Demak	74,07	74,57
22.	Kabupaten Semarang	75,13	75,67
23.	Kabupaten Temanggung	71,33	71,86
24.	Kabupaten Kendal	73,86	74,34
25.	Kabupaten Batang	70,20	70,73
26.	Kabupaten Pekalongan	71,45	71,95
27.	Kabupaten Pemalang	68,08	68,65
28.	Kabupaten Tegal	71,12	71,70
29.	Kabupaten Brebes	69,71	70,18
30.	Kota Magelang	81,17	82,15
31.	Kota Surakarta	83,54	84,41
32.	Kota Salatiga	84,99	85,72
33.	Kota Semarang	84,43	85,24
34.	Kota Pekalongan	76,71	77,21
35.	Kota Tegal	77,06	77,50
Jawa Tengah		73,39	73,88
Nasional		74,39	75,02

Sumber : BPS, 2024

5.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan perkembangan perekonomian suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan persentase dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan suatu wilayah. Capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2023 dan Tahun 2024 disajikan pada tabel 5.2.

Tabel 5. 2
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
1.	Kabupaten Cilacap	5.34	2.65
2.	Kabupaten Banyumas	5.40	5.29
3.	Kabupaten Purbalingga	4.51	4.55
4.	Kabupaten Banjarnegara	4.98	5.11
5.	Kabupaten Kebumen	5.66	5.30
6.	Kabupaten Purworejo	5.07	4.79
7.	Kabupaten Wonosobo	4.30	4.57
8.	Kabupaten Magelang	5.04	5.06
9.	Kabupaten Boyolali	5.63	4.64
10.	Kabupaten Klaten	5.70	5.11
11.	Kabupaten Sukoharjo	5.06	4.97
12.	Kabupaten Wonogiri	4.98	4.93
13.	Kabupaten Karanganyar	5.53	5.54
14.	Kabupaten Sragen	5.23	5.39
15.	Kabupaten Grobogan	4.98	5.41
16.	Kabupaten Blora	3.10	3.06
17.	Kabupaten Rembang	5.20	5.08
18.	Kabupaten Pati	5.02	5.13
19.	Kabupaten Kudus	2.19	2.78
20.	Kabupaten Jepara	5.17	4.22
21.	Kabupaten Demak	5.01	5.06
22.	Kabupaten Semarang	4.74	4.73
23.	Kabupaten Temanggung	5.00	5.04
24.	Kabupaten Kendal	5.56	5.42
25.	Kabupaten Batang	5.53	6.03
26.	Kabupaten Pekalongan	5.14	5.02
27.	Kabupaten Pemalang	4.14	5.11
28.	Kabupaten Tegal	4.93	5.07
29.	Kabupaten Brebes	3.74	5.02
30.	Kota Magelang	5.45	5.56

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
31.	Kota Surakarta	5.57	5.61
32.	Kota Salatiga	5.34	5.37
33.	Kota Semarang	5.79	5.62
34.	Kota Pekalongan	5.44	5.34
35.	Kota Tegal	5.01	5.22
Jawa Tengah		4.98	4.95
Nasional		5,05	5.03

Sumber: BPS. 2024

5.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dapat diketahui melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka pada umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada dan mampu menyerapnya. Capaian TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2023 dan 2024 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 5. 3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
1.	Kabupaten Cilacap	8,74	7,83
2.	Kabupaten Banyumas	6,35	6,18
3.	Kabupaten Purbalingga	5,61	4,96
4.	Kabupaten Banjarnegara	6,26	5,57
5.	Kabupaten Kebumen	5,11	5,07
6.	Kabupaten Purworejo	4,02	3,89
7.	Kabupaten Wonosobo	4,95	4,02
8.	Kabupaten Magelang	4,42	3,55
9.	Kabupaten Boyolali	4,05	3,16
10.	Kabupaten Klaten	4,2	3,97
11.	Kabupaten Sukoharjo	3,4	3,65
12.	Kabupaten Wonogiri	1,92	2,4
13.	Kabupaten Karanganyar	4,35	3,47
14.	Kabupaten Sragen	3,87	3,53
15.	Kabupaten Grobogan	4,02	3,23
16.	Kabupaten Blora	3,1	3,67
17.	Kabupaten Rembang	2,6	2,84

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
18.	Kabupaten Pati	4,29	3,87
19.	Kabupaten Kudus	3,25	3,19
20.	Kabupaten Jepara	3,35	3,34
21.	Kabupaten Demak	5,38	4,75
22.	Kabupaten Semarang	4,05	3,73
23.	Kabupaten Temanggung	2,32	2,35
24.	Kabupaten Kendal	5,76	5,01
25.	Kabupaten Batang	6,06	5,67
26.	Kabupaten Pekalongan	3,25	3,3
27.	Kabupaten Pemalang	6,55	6,63
28.	Kabupaten Tegal	8,6	7,53
29.	Kabupaten Brebes	8,98	8,35
30.	Kota Magelang	5,25	4,4
31.	Kota Surakarta	4,58	4,61
32.	Kota Salatiga	4,57	3,86
33.	Kota Semarang	5,99	5,82
34.	Kota Pekalongan	5,02	4,91
35.	Kota Tegal	6,05	5,88
Jawa Tengah		5,13	4,78
Nasional		5,32	4,91

Sumber : BPS, 2024

5.1.4. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan minimum dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang diperoleh dari hasil survey (sampel). Sedangkan persentase angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Capaian persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2023 dan 2024 dapat diketahui melalui tabel berikut ini.

Tabel 5. 4
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2024

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
1.	Kabupaten Cilacap	10,99	10,68
2.	Kabupaten Banyumas	12,53	11,95

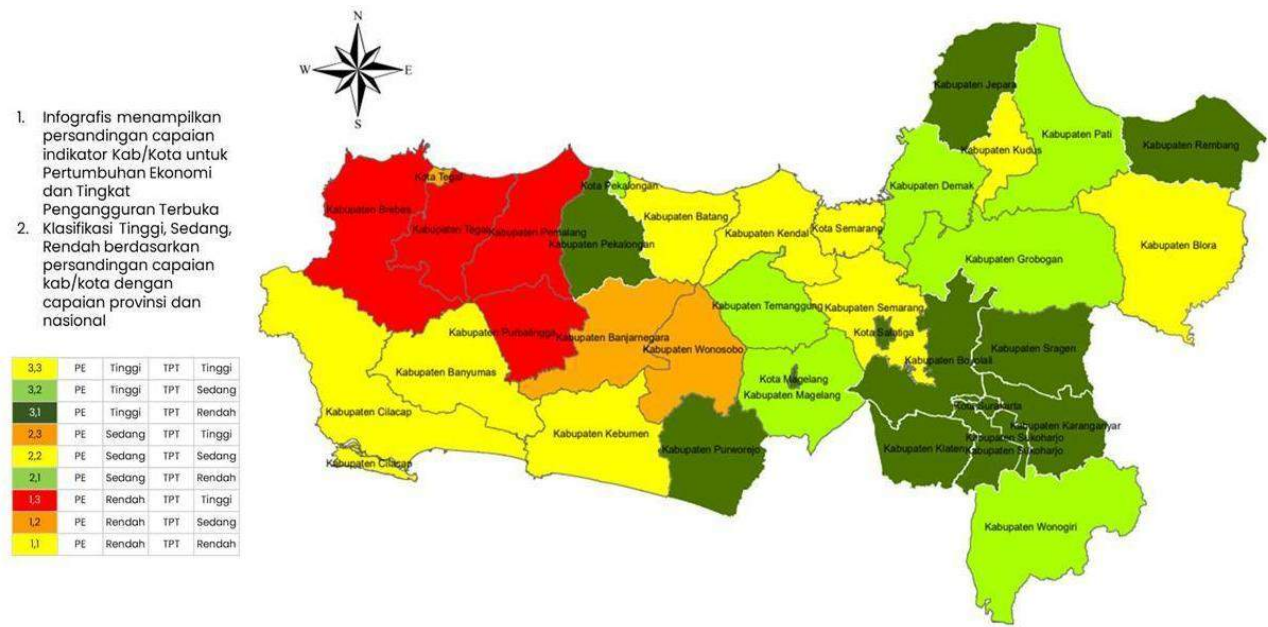
No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
3.	Kabupaten Purbalingga	14,99	14,18
4.	Kabupaten Banjarnegara	14,9	14,71
5.	Kabupaten Kebumen	16,34	15,71
6.	Kabupaten Purworejo	11,33	10,87
7.	Kabupaten Wonosobo	15,58	15,28
8.	Kabupaten Magelang	10,96	10,83
9.	Kabupaten Boyolali	9,81	9,63
10.	Kabupaten Klaten	12,28	12,04
11.	Kabupaten Sukoharjo	7,58	7,47
12.	Kabupaten Wonogiri	10,94	10,71
13.	Kabupaten Karanganyar	9,79	9,59
14.	Kabupaten Sragen	12,87	12,41
15.	Kabupaten Grobogan	11,72	11,43
16.	Kabupaten Blora	11,49	11,42
17.	Kabupaten Rembang	14,17	14,02
18.	Kabupaten Pati	9,31	9,17
19.	Kabupaten Kudus	7,24	7,23
20.	Kabupaten Jepara	6,61	6,09
21.	Kabupaten Demak	12,01	11,89
22.	Kabupaten Semarang	7,17	6,96
23.	Kabupaten Temanggung	9,26	8,67
24.	Kabupaten Kendal	9,39	9,35
25.	Kabupaten Batang	8,92	8,73
26.	Kabupaten Pekalongan	9,67	8,95
27.	Kabupaten Pemalang	15,03	14,92
28.	Kabupaten Tegal	7,3	6,81
29.	Kabupaten Brebes	15,78	15,6
30.	Kota Magelang	6,11	5,94
31.	Kota Surakarta	8,44	8,31
32.	Kota Salatiga	4,66	4,57
33.	Kota Semarang	4,23	4,03
34.	Kota Pekalongan	6,81	6,71

No	Kabupaten/Kota	Realisasi	
		2023	2024
35.	Kota Tegal	7,68	7,64
Jawa Tengah		10,77	10,47
Nasional		9,36	8,57

Sumber : BPS, 2024

5.1.5 Persandingan Capaian Indikator Makro

Persandingan capaian indikator makro dapat digunakan untuk menentukan kabupaten/kota yang dapat diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dan menurunkan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah.



Sumber: Bappeda (diolah), 2025.

Gambar 5. 1
Infografis tentang Sebaran Kondisi Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi yang disandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah

Gambar 5.1 menjelaskan mengenai perbandingan capaian Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di setiap kabupaten/kota yang berada di Jawa Tengah. Kabupaten/kota yang memiliki notasi warna merah merupakan kabupaten/kota yang memiliki nilai capaian indikator PE dan TPT di bawah capaian provinsi dan nasional. Kabupaten dengan capaian ini antara lain adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purbalingga. Penyebab lebih rendahnya capaian indikator PE dan TPT di suatu wilayah apabila dibandingkan dengan provinsi dan nasional antara lain dapat dipicu karena peluang kerja yang lebih terbatas, struktur ekonomi berbeda dengan provinsi/nasional, dan rendahnya partisipasi angkatan kerja. Kabupaten/kota yang memiliki notasi warna hijau tua merupakan kabupaten/kota yang memiliki nilai capaian indikator PE dan TPT di atas capaian provinsi dan nasional. Kabupaten/kota dengan capaian ini antara lain adalah Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta. Kabupaten/kota yang memiliki

1. Infografis menampilkan persandingan capaian indikator Kab/Kota untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin

2. Klasifikasi Tinggi, Sedang, Rendah berdasarkan persandingan capaian kab/kota dengan capaian provinsi dan nasional!

3,3	PE	Tinggi	Kin	Tinggi
3,2	PE	Tinggi	Kin	Sedang
3,1	PE	Tinggi	Kin	Rendah
2,3	PE	Sedang	Kin	Tinggi
2,2	PE	Sedang	Kin	Sedang
2,1	PE	Sedang	Kin	Rendah
1,3	PE	Rendah	Kin	Tinggi
1,2	PE	Rendah	Kin	Sedang
1,1	PE	Rendah	Kin	Rendah

Gambar 5. 2
Infografis tentang Sebaran Kondisi Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi
yang dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah

[illegible]

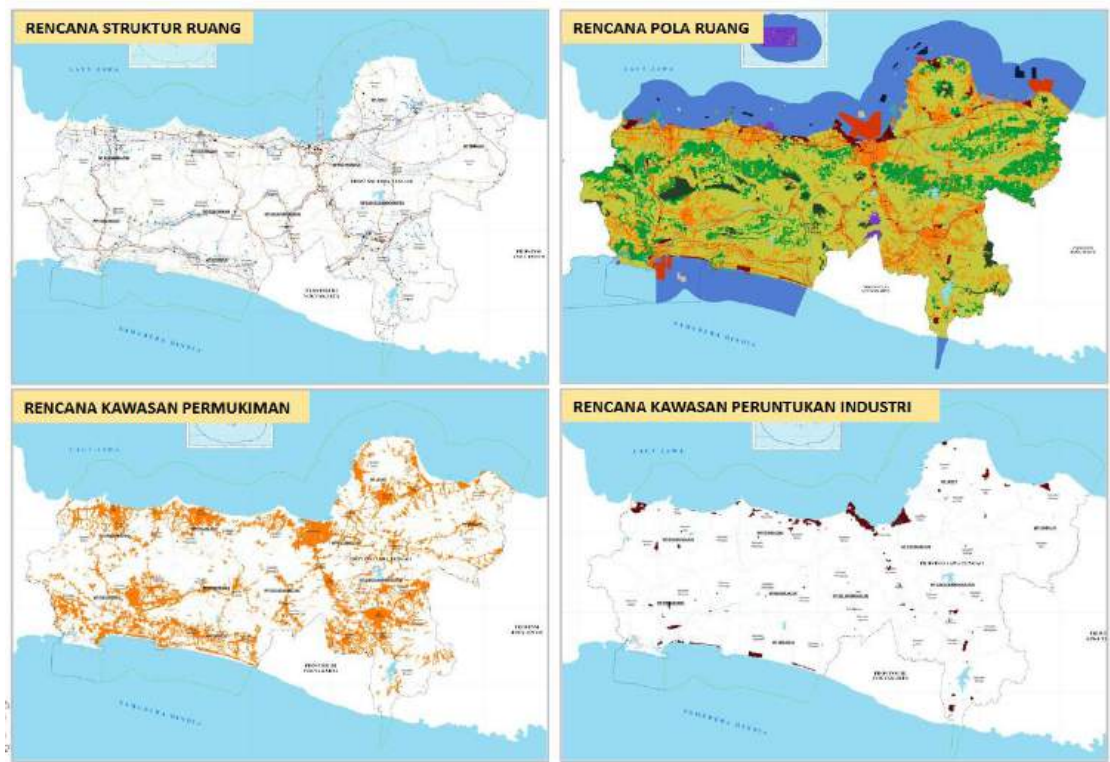
5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 6 (enam) kota. Kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditujukan untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi serta rencana program dan kegiatan pembangunan pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan menyelaraskan kebijakan perencanaan pembangunan pada tingkat pusat dan daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044, bahwa tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah, sebagai berikut:

- 1. Peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan pedesaan;
- 2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah;
- 3. Peningkatan pelestarian kawasan lindung untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim;
- 4. Pemanfaatan kawasan budi daya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 5. Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 6. Pengembangan KSP (Kawasan Strategis Provinsi); dan
- 7. Peningkatan kawasan pertahanan dan keamanan.

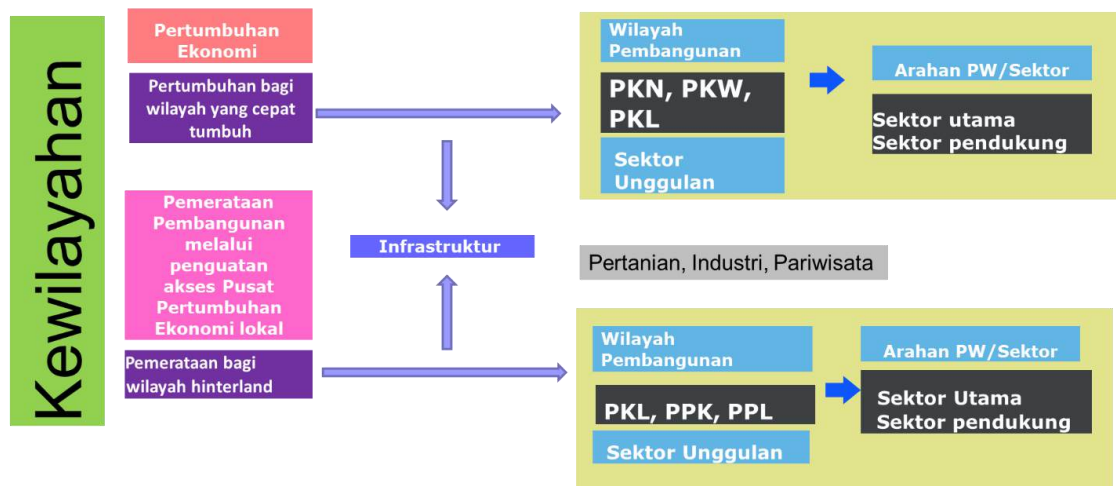
Kebijakan-kebijakan tersebut di atas secara spasial tergambar dalam Gambar 5.3.



Sumber: RTRW Jawa Tengah.

Gambar 5. 3
Infografis Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan tersebut di atas, maka konsep pengembangan wilayah terkonsep sebagaimana gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

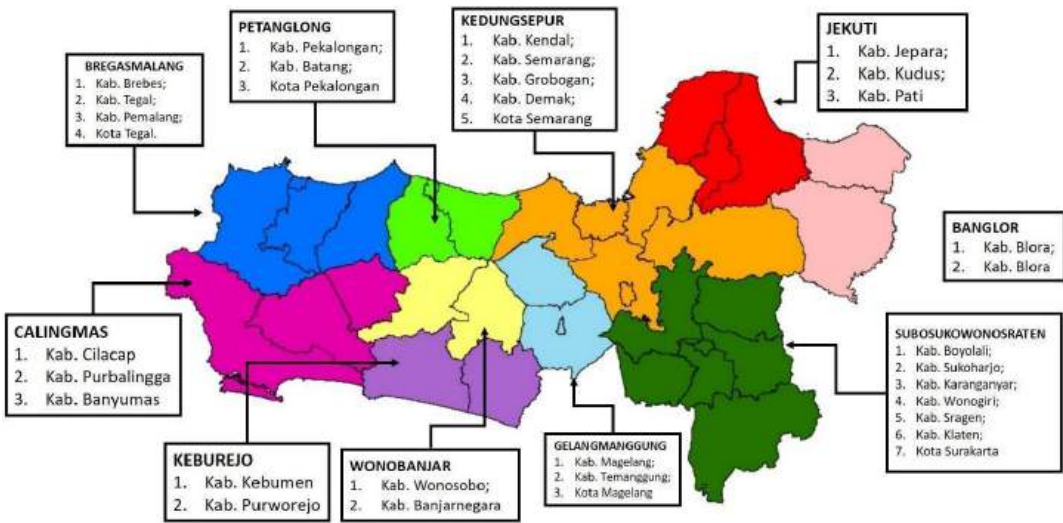
Gambar 5. 4
Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

5.3. Kebijakan Pembangunan Berbasis Wilayah Pengembangan

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi sepuluh (10) Wilayah Pengembangan (WP) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044, berikut 10 (sepuluh) Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. WP Kedungsepur yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kota Salatiga;
2. WP Jekuti yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati;
3. WP Banglor yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
4. WP Gelangmanggung yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang;
5. WP Wonobanjar yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
6. WP Keburejo yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
7. WP Cibalingmas yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas;
8. WP Subosukawonosraten yang terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, dan Kota Surakarta;

9. WP Bregasmalang yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal;
10. WP Petanglong yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 5. 5
Pembagian Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

5.3.1. Arahkan Per Wilayah Pengembangan

Pengembangan 10 (sepuluh) WP bertujuan untuk lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk, serta menciptakan pemerataan pembangunan berciri kuat terciptanya produk unggulan. Arah pembangunan dan intervensi kebijakan, tertuang lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5. 5
Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
1.	WP. Cibalingmas - Kab. Cilacap - Kab. Purbalingga - Kab. Banyumas	- Pusat Kegiatan Nasional Cilacap - Pusat Kegiatan Wilayah Purwokerto - Pusat Kegiatan Lokal Majenang - Pusat Kegiatan Lokal Ajibarang - Pusat Kegiatan Lokal Wangon - Pusat Kegiatan Lokal Kroya - Pusat Kegiatan Lokal Sumpiuh - Pusat Kegiatan Lokal Banyumas - Pusat Kegiatan Lokal Sokaraja - Pusat Kegiatan Lokal Purbalingga - Pusat Kegiatan Lokal Bobotsari	- menterpadukan pengembangan koridor Kawasan Perkotaan Cilacap - Purwokerto – Purbalingga; - menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas; - pengembangan potensi wisata unggulan Kabupaten, dengan mengintegrasikan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan dan Kawasan Pariwisata Baturraden; - mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Majenang; - pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; - mengendalikan alih fungsi sawah; - mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan Pelabuhan darat (<i>dryport</i>) secara	- Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) koridor Purwokerto - Purbalingga yang terkoneksi dengan Trans Banyumas dan moda transportasi kereta api termasuk dengan kawasan pariwisata (pengembangan program integrasi edutrip dengan Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata) serta perindustrian; - Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Purbalingga; - Fasilitasi optimalisasi Bandara JB. Soedirman Purbalingga dan Tunggulwulung Cilacap sebagai generator aktivitas perekonomian nasional; - Pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api (palang pintu, LPJU, rambu dan marka) di Kabupaten Cilacap; - Pengadaan dan pemasangan LPJU dan perlengkapan jalan lainnya pada

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
			terpadu sebagai pintu ekspor dan impor; 8. pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya; 9. peningkatan akses menuju Bandar Udara Jenderal Soedirman; dan 10. peningkatan pengelolaan KSN Pacangsanak.	ruas aksesibilitas kawasan sentra produksi pertanian (Cilacap); 6. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); 7. Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan Samudera Cilacap (Tanjung Intan) sebagai pintu masuk ekspor dan impor; 8. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 9. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 10. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Horti (Karet, Kapulaga, Lada, Kelapa, Cengkeh, Pala, Kakao, Cabai, Padi); 11. Mendorong Konservasi dan pemanfaatan ekowisata Gunung Slamet; 12. Pelatihan dan Pengembangan UMKM dan SDM; 13. Pelaksanaan Kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten yang berbatasan (pendidikan,

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
				kesehatan, ekonomi) dengan lokus pengembangan Perkotaan Majenang; 14. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut, Perkebunan dan Pertanian; 15. Peningkatan Produktivitas dan Pengolahan Ikan Budidaya (Udang Vaname, Kerapu); 16. Pembangunan <i>Cold Storage</i>; 17. Pengembangan Industri Pertambangan dan energi; 18. Pembangunan IPLT Regional Purbalingga-Banjarnegara; 19. Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Cilacap, Purwokerto, dan Banyumas.
2.	WP. Wonobanjar 1. Kab. Wonosobo 2. Kab. Banjarnegara	1. Pusat Kegiatan Wilayah Wonosobo 2. Pusat Kegiatan Lokal Kertek 3. Pusat Kegiatan Lokal Banjarnegara 4. Pusat Kegiatan Lokal Klampok	1. pengembangan koridor Kawasan Perkotaan Kertek - Wonosobo - Banjarnegara – Klampok sebagai pusat ekonomi; 2. peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng dalam rangka pengendalian risiko kerusakan Daerah Aliran Sungai Serayu; 3. pengembangan wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana	1. Fasilitasi pendorongan rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif lintas Wonosobo - Banjarnegara; 2. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di ruas Batur – Dieng; 3. Peningkatan Kualitas Akses Menuju Kawasan Dieng; 4. Pengembangan Wisata Alam ,Budaya dan Geopark Dieng;

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
			alam meliputi erupsi gunung api dan gerakan tanah; 4. meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; 5. pengembangan industri hasil pertanian, kehutanan dan pengembangan potensi energi terbarukan dalam rangka mendorong pengembangan bagian selatan Wilayah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara; 6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; 7. peningkatan akses dan kualitas Destinasi Wisata KSPN Dieng dan Geopark Dieng.	5. Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Dieng; 6. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 7. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 8. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Horti(Teh, Aren, Kakao, Kelapa, Kopi, Lada, Vanili, Tembakau, Padi, Cabai, Iakan Budidaya); 9. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian; 10. Pemulihan Daya Dukung DAS Serayu; 11. Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara.
3.	WP. Keburejo 1. Kab. Kebumen 2. Kab. Purworejo	1. Pusat Kegiatan Wilayah Kebumen 2. Pusat Kegiatan Lokal Gombong Karanganyar 3. Pusat Kegiatan Lokal Prembun	1. menyelaraskan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dengan Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo;	1. Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) koridor Purworejo - Borobudur yang terkoneksi dengan moda transportasi kereta api termasuk dengan kawasan pariwisata;

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
		4. Pusat Kegiatan Lokal Kutoarjo 5. Pusat Kegiatan Lokal Purworejo	2. pengembangan koridor wisata Kebumen – Purworejo – Borobudur – Magelang; 3. pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai; 4. meningkatkan keterwujudan Perkotaan Kebumen sebagai PKW; 5. meningkatkan akses wisata pantai – Geopark Kebumen; 6. mengembangkan Kawasan Industri Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otorita Borobudur; 7. pengembangan wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah; 8. pengembangan industri manufaktur dan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; 9. mengembangkan Pelabuhan Perikanan; dan 10. mengendalikan alih fungsi lahan sawah	2. Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo (Tahap VI) yang terintegrasi dengan Stasiun Kutoarjo; 3. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) salah satunya pada ruas Bener-Salaman (Ds. Kaliboto lanjutan penanganan lokasi Kalijambe); 4. Fasilitasi rencana perpanjangan layanan kereta api komuter KA Prameks (perpanjangan sampai Kebumen); 5. Pengembangan serta Promosi Destinasi Wisata Alam; 6. Pengembangan UMKM dan SDM pendukung industri pariwisata; 7. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 8. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 9. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Horti (Tembakau, Cengkeh, Jenitri, Kakao, Kelapa, Kemiri, Lada, Pala, Vanili);

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
				10. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian; 11. Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Kebumen dan Purworejo.
4.	WP. Gelangmanggung 1. Kab. Magelang 2. Kab. Temanggung 3. Kota Magelang	1. Pusat Kegiatan Wilayah Magelang 2. Pusat Kegiatan Lokal Parakan 3. Pusat Kegiatan Lokal Temanggung 4. Pusat Kegiatan Lokal Secang 5. Pusat Kegiatan Lokal Mertoyudan 6. Pusat Kegiatan Lokal Borobudur	7. mengembangkan koridor Kawasan Perkotaan Muntilan – Kawasan Perkotaan Mungkid – Kota Magelang – Kawasan Perkotaan Secang – Kawasan Perkotaan Temanggung; 8. pengembangan wilayah berbasis wisata yang memperhatikan kesesuaian KSPN Borobudur dan sekitarnya serta risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi; 9. melestarikan Kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia dan mengembangkan sebagai Destinasi Pariwisata berkelas dunia dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi Merbabu – Telomoyo dan Gunung Sindoro – Sumbing; 10. menyelaraskan pembangunan perbatasan Kabupaten Magelang dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo;	1. Pembangunan TPST Regional Magelang dalam rangka mendukung KSPN Borobudur; 2. Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) koridor Purworejo - Borobudur yang terkoneksi dengan moda transportasi kereta api termasuk dengan kawasan pariwisata; 3. Inisiasi proses rencana pengembangan koridor baru Trans Jateng Koridor Temanggung - Borobudur dengan peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota di WP Gelangmanggung; 4. Fasilitasi pendorongan rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif lintas Semarang - Borobudur - Yogyakarta; 5. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK);

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
			11.meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; 12.pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan 13.mengendalikan alih fungsi lahan sawah	6. Pengembangan Wisata berbasis <i>Global & Cultural Heritage</i> kawasan Borobudur; 7. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 8. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Horti (Tembakau, Kopi, Aren, Vanili, Cabai); 9. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian; 10.Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 11.Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang.
5.	WP. Sukosukawonosraten 1. Kab. Boyolali 2. Kab. Sukoharjo 3. Kab. Karanganyar 4. Kab. Wonogiri 5. Kab. Sragen 6. Kab. Klaten	1. Pusat Kegiatan Nasional Surakarta 2. Pusat Kegiatan Wilayah Klaten 3. Pusat Kegiatan Wilayah Boyolali 4. Pusat Kegiatan Lokal Ampel	1. menyelaraskan pengembangan Kota Surakarta dan kabupaten di sekitarnya; dan 2. Mendorong koordinasi dan kerja sama antardaerah dalam hal: a. pengembangan sektor ekonomi Daerah yang saling menguntungkan;	1. Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) koridor Surakarta - Sangiran via Sumberlawang dan Surakarta - Sukoharjo - Wonogiri yang terkoneksi dengan moda transportasi kereta api termasuk dengan kawasan pariwisata; 2. Evaluasi dan rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
	7. Kota Surakarta	5. Pusat Kegiatan Lokal Banyudono 6. Pusat Kegiatan Lokal Karanggede 7. Pusat Kegiatan Lokal Simo 8. Pusat Kegiatan Lokal Colomadu 9. Pusat Kegiatan Lokal Gemolong 10. Pusat Kegiatan Lokal Sragen 11. Pusat Kegiatan Lokal Karanganyar 12. Pusat Kegiatan Lokal Katosura 13. Pusat Kegiatan Lokal Delanggu 14. Pusat Kegiatan Lokal Prambanan 15. Pusat Kegiatan Lokal Grogol 16. Pusat Kegiatan Lokal Sukoharjo 17. Pusat Kegiatan Lokal Wonogiri	b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota; c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah; d. penyediaan ruang terbuka hijau Kota Surakarta dengan Kabupaten lain yang berbatasan; e. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan f. penanganan bencana. 3. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri; 4. menterpadukan pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Timur; 5. pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan 6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah	perlintasan kereta api di Kabupaten Sukoharjo; 3. Pengadaan dan pemasangan LPJU dan perlengkapan jalan lainnya pada ruas aksesibilitas kawasan sentra produksi pertanian (Sragen); 4. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); 5. Mendorong optimalisasi Bandara A. Soemarmo Kabupaten Boyolali; 6. Penanganan Jalan Provinsi di Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kab. Klaten, dan Kota Surakarta; 7. Perluasan SPAM Regional Wosusokas.

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
		18. Pusat Kegiatan Lokal Pracimantoro		
6.	WP. Banglor 1. Kab. Rembang 2. Kab. Blora	1. Pusat Kegiatan Wilayah Cepu 2. Pusat Kegiatan Lokal Blora 3. Pusat Kegiatan Lokal Rembang Randublantung 4. Pusat Kegiatan Lokal Lasem	1. meningkatkan aksesibilitas pusat ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora; 2. mendorong Kawasan Perkotaan Cepu dan sekitarnya sebagai Pusat Bisnis Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Skala Internasional; 3. mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan Rembang menjadi PKW; 4. mendorong keterpaduan pengembangan industri di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora; 5. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Rembang; 6. mengembangkan potensi wisata keunikan bentang alam dan pantai; 7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; 8. meningkatkan prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian tanaman; dan	1. Pengembangan wisata tematik berbasis Cultural Heritage Tourism; 2. Fasilitasi optimalisasi Bandara Ngloram sebagai generator aktivitas perekonomian nasional; 3. Fasilitasi pendorongan rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif lintas Semarang - Kudus - Rembang - Bojonegoro; 4. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (Pelabuhan Sluke); 5. Pengembanagan Kawasan Perkotaan Cepu sebagai Bisnis Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; 6. Pengembangan Kawasan Lasem sebagai Destinasi Wisata berbasis Global; 7. Pengembangan Pelabuhan Perikanan; 8. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 9. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
			9. menterpadukan pembangunan Wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.	bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 10. Kerjasama antar daerah perbatasan dan Provinsi Jawa Timur; 11. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Horti (Padi, Jagung, Udang Vaname, Ikan Budidaya, Tebu, Tembakau, Kapok, Kelapa, Siwalan); 12. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian; 13. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Pembangunan <i>Cold Storage</i>; 14. Peningkatan Produktivitas dan Pengolahan Ikan Budidaya; 15. Pengembangan Industri Pertambangan dan energi; 16. Inisiasi Pembangunan SPAM Regional Randugunting; 17. Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora.
7.	WP. Jekuti 1. Kab. Kudus 2. Kab. Pati 3. Kab. Jepara	1. Pusat Kegiatan Wilayah Kudus 2. Pusat Kegiatan Lokal Pati	1. menterpadukan pembangunan Kawasan Perkotaan Kudus – Jepara – Pati - Juwana;	1. Konservasi Gunung Muria dan pemanfaatan ekowisata Gunung Muria;

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
		3. Pusat Kegiatan Lokal Juwana 4. Pusat Kegiatan Lokal Tayu 5. Pusat Kegiatan Lokal Bangsri 6. Pusat Kegiatan Lokal Jepara 7. Pusat Kegiatan Lokal Kalinyamatan	2. meningkatkan pengelolaan industri kerajinan di Kabupaten Jepara; 3. meningkatkan pengelolaan industri pengolahan tembakau di Kabupaten Kudus; 4. meningkatkan pengelolaan industri pengolahan tapioka di Kabupaten Pati; 5. mengembangkan potensi wisata keunikan geologi dan pantai; 6. mengembangkan Cagar Biosfer Karimunjawa; 7. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan; 8. pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; 9. meningkatkan kerja sama penanganan bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan; dan 10. mengendalikan alih fungsi lahan sawah.	2. Pengembangan dan Konservasi Wisata berbasis Tematik <i>Marine Tourism</i> ; 3. Mengembangkan pengelolaan Cagar Biosfer Karimunjawa; 4. Lanjutan inisiasi proses pengembangan koridor baru Trans Jateng di WP Jekuti dengan peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten (menunggu kesiapan daerah dan kebijakan lanjut serta hasil pra kajian kelayakan di 2025); 5. Fasilitasi optimalisasi Bandara Dewadaru sebagai generator aktivitas perekonomian nasional; 6. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); 7. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (Pelabuhan Juana); 8. Fasilitasi pendorongan rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif lintas Semarang - Kudus - Rembang - Bojonegoro; 9. Pelatihan dan Pengembangan UMKM dan SDM industri kerajinan serta pendukung industri pariwisata

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
				10. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 11. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 12. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti dan Perikanan Budidaya (Tebu, Kopi, Kelapa, Kapok, Padi, Bandeng , Rumput Laut); 13. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan, Pertanian, Horti, Perikanan serta Kerajinan Kayu; 14. Pengembangan Pelabuhan umum dan Pelabuhan Perikanan serta Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Pembangunan <i>Cold Storage</i>; 15. Peningkatan Produktivitas dan Pengolahan Ikan Budidaya; 16. Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara.
8.	WP. Kedungsepur 1. Kab. Kendal	1. Pusat Kegiatan Nasional Semarang	meningkatkan peran Kota Semarang sebagai	1. Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) penghubung Kota Semarang -

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
	2. Kab. Demak 3. Kab. Semarang 4. Kab. Grobogan 5. Kota Semarang 6. Kota Salatiga	2. Pusat Kegiatan Lokal Kendal 3. Pusat Kegiatan Lokal Weleri 4. Pusat Kegiatan Lokal Kaliwungu 5. Pusat Kegiatan Lokal Boja 6. Pusat Kegiatan Lokal Sukorejo 7. Pusat Kegiatan Lokal Ungaran 8. Pusat Kegiatan Lokal Ambarawa 9. Pusat Kegiatan Lokal Demak 10. Pusat Kegiatan Lokal Mranggen 11. Pusat Kegiatan Lokal Gedong 12. Pusat Kegiatan Lokal Gubug 13. Pusat Kegiatan Lokal Purwodadi	1. ibukota Provinsi dan pusat ekonomi dalam mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya; 2. menterpadukan pengembangan Industri di WP Kedungsepur; 3. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Darat (<i>dryport</i>) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor; 4. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan; 5. mendorong Kerja Sama Antar Daerah dalam hal: a. pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan; b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota; c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah; d. pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan	Kabupaten Semarang; Kota Semarang - Weleri Kabupaten Kendal dan Kota Semarang - Kabupaten Grobogan yang terkoneksi Trans Semarang dan moda transportasi kereta api termasuk dengan kawasan perindustrian dan pariwisata; 2. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan di pesisir utara (Tanjung Emas dan Pelabuhan Kendal) dalam mendukung Kawasan Industri; 3. Fasilitasi pemantapan status Bandara A. Yani Kota Semarang sebagai bandara internasional; 4. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); 5. Pengadaan dan pemasangan LPJU dan perlengkapan jalan lainnya pada ruas aksesibilitas kawasan sentra produksi pertanian (Grobogan); 6. Fasilitasi pendorongan rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif lintas Semarang - Kudus - Rembang - Bojonegoro; 7. Fasilitasi rencana perpanjangan layanan kereta api komuter KA Kedungsepur (perpanjangan sampai Weleri);

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
			e. penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob. 6. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri; 7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; 8. pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob; 9. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan 10.peningkatan pengelolaan KSN Kedungsepur.	8. Optimalisasi Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan Kedungsepur; 9. Rehabilitasi DAS Jragung Tuntang; 10.Pengembangan Wisata khususnya Kawasan Kota Lama, Kopeng dan Rawa Pening sebagai Wisata Berbasis <i>Global</i> dan <i>Cultural Heritage</i>; 11.Pengembangan UMKM dan SDM industri Kreatif; 12.Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 13.Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 14. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti, dan Perikanan (Tebu, Tembakau, Aren, Kakao, Karet, Kopi, Jagung, Bandeng, Lele); 15. Penanganan Kawasan Terdampak Rob; 16. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian dan Perikanan; 17. Penanganan Jalan Provinsi di Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang,

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
				Kab. Grobogan, Kota Semarang, dan Kota Salatiga; 18. Inisiasi pembangunan SPAM Regional Jragung; 19. Peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana utamanya penyediaan rumah apung/adaptif banjir di pesisir utara Kabupaten Demak.
9.	WP. Petanglong 1. Kab. Batang 2. Kab. Pekalongan 3. Kota Pekalongan	1. Pusat Kegiatan Wilayah Pekalongan 2. Pusat Kegiatan Lokal Batang 3. Pusat Kegiatan Lokal Gringsing 4. Pusat Kegiatan Lokal Limpung 5. Pusat Kegiatan Lokal Wiradesa 6. Pusat Kegiatan Lokal Krajen 7. Pusat Kegiatan Lokal Kedungwuni-Buaran	1. menterpadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Pekalongan dan Kabupaten di sekitarnya; 2. mendorong Kerja Sama Antar Daerah dalam hal: a. pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan; b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota; c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;	1. Rehabilitasi Mangrove; 2. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); 3. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (Pelabuhan Batang) dalam mendukung KITB; 4. Rehabilitasi Daerah hulu petungkriyono; 5. Pengembangan Ekowisata alam dan Wisata Belanja; 6. Pengembangan Fasiitas Pendukung Kawasan Industri Terpadu Batang; 7. Pengembangan SDM pendukung sektor industri KIT Batang; 8. Pengembangan UMKM dan SDM pendukung industri pariwisata dan industri kreatif;

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
			d. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekalongan dengan Kabupaten lain yang berbatasan; e. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan f. penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob. 3. mendorong pengembangan wilayah dan prasarana Kawasan Industri Terpadu Batang dengan daerah sekitarnya; 4. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri; 5. pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob; 6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; pengelolaan limbah industri/ kerajinan batik; mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan; dan 7. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam	9. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 10. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 11. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti, dan Perikanan (Teh, Vanili, Kopi, Karet, Kakao, Cengkeh, Tebu); 12. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan; 13. Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan; 14. Inisiasi Pembangunan TPST Regional Petanglong.

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
10.	WP. Bregasmalang 1. Kab. Brebes 2. Kab. Tegal 3. Kab. Pemalang 4. Kota Tegal	Pusat Kegiatan Wilayah Tegal Pusat Kegiatan Lokal Brebes Pusat Kegiatan Lokal Losari Pusat Kegiatan Lokal Ketanggungan-Kersana Pusat Kegiatan Lokal Slawi-Adiwerna Pusat Kegiatan Lokal Pemalang Pusat Kegiatan Lokal Comal Pusat Kegiatan Lokal Randudongkel Pusat Kegiatan Lokal Moga Pusat Kegiatan Lokal Belik	1. menterpadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Tegal dan kabupaten di sekitarnya; 2. mendorong Kerja Sama Antar Daerah dalam hal: a. pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan; b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota; c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah; d. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Tegal dengan Kabupaten lain yang b. berbatasan; a. pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan b. penanganan bencana dan Kawasan c. terdampak rob.	1. Pembangunan dermaga sungai (plengsengan) lintas penyeberangan sungai antar kabupaten di Sungai Kaligangsa (Perbatasan Kabupaten Brebes dan Kota Tegal); 2. Peningkatan Kerjasama Regional pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 3. Pengembangan Eko Wisata pada kawasan wisata Guci dan pantai utara Brebes-Tegal-Pemalang; 4. Rehabilitasi Mangrove; 5. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani; 6. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses; 7. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti, dan Perikanan Budidaya (Tebu, Aren, Bawang Merah, Cengkeh, Karet, Kopi, Teh, Padi, Rumput Laut, Bandeng, Cabai); 8. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan, Pertanian, serta Perikanan Budidaya dan Tangkap;

No.	Nama WP	Sistem Perkotaan	Arah Pengembangan	Prioritas Pengembangan Provinsi
			3. menterpadukan pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Brebes dengan Provinsi Jawa Barat; 4. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; 5. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan; dan 6. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam.	9. Pengembangan Pelabuhan Perikanan serta Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Pembangunan <i>Cold Storage</i> ; 10. Pengembangan SPAM Regional Bergas; 11. Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal.

Sumber : Bappeda, 2025.

5.4. Target Indikator Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Capaian Provinsi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk melakukan intervensi terhadap pengembangan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mencapai target perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu, diharapkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat mendukung kinerja 4 (empat) capaian makro Provinsi Jawa Tengah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Persentase Penduduk Miskin, dengan target sebagai berikut.

Tabel 5. 6
Target Capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota
Tahun 2026

No	Kabupaten/Kota	Indikator			
		IPM	PE	TPT	Kin
1.	Kabupaten Cilacap	73,32	2,80-3,00	7,73-7,43	10,34-10,08
2.	Kabupaten Banyumas	76,00	5,88-6,50	5,94-5,75	10,84-9,5
3.	Kabupaten Purbalingga	71,96	5,30-5,70	4,79-4,50	12,86-11,86
4.	Kabupaten Banjarnegara	70,98	5,25-6,00	5,50-5,00	13,92-13,77
5.	Kabupaten Kebumen	73,80	5,80-6,30	4,60	14,3-13,4
6.	Kabupaten Purworejo	76,00	5,00-5,80	3,10-2,83	9,67-8,67
7.	Kabupaten Wonosobo	71,58	5,20-5,50	3,90-3,50	14,15-13,38
8.	Kabupaten Magelang	73,01	5,20-5,65	3,55-3,20	9,93-9,07
9.	Kabupaten Boyolali	77,00	5,80-6,00	3,08-2,80	9,27-9,09
10.	Kabupaten Klaten	79,47	5,71-6,51	3,70-3,00	11,32-11,21
11.	Kabupaten Sukoharjo	79,75	5,30-6,00	3,60-3,30	7,20-7,15
12.	Kabupaten Wonogiri	73,99	5,36-6,00	2,20-1,98	9,25-9,18
13.	Kabupaten Karanganyar	79,26	6,20	3,35	8,84
14.	Kabupaten Sragen	76,71	5,50-6,00	3,41-3,11	11,50-11,18
15.	Kabupaten Grobogan	73,19	5,40-6,20	3,20-2,90	10,70-10,30
16.	Kabupaten Blora	72,61	3,25-4,05	3,40-2,85	10,89-10,28
17.	Kabupaten Rembang	73,20	5,20-6,00	2,50-2,20	13,39-12,94
18.	Kabupaten Pati	75,62	5,50-6,50	3,74-3,44	8,51-8,40
19.	Kabupaten Kudus	78,31	3,00-3,70	2,87-2,57	6,56-5,47
20.	Kabupaten Jepara	75,33	4,82-5,62	3,15-2,97	5,59-5,34
21.	Kabupaten Demak	75,61	5,10-6,00	4,64-4,34	11,38-10,04
22.	Kabupaten Semarang	76,37	4,90-5,90	3,71-3,41	6,68-6,55
23.	Kabupaten Temanggung	73,30	5,10-5,50	2,20-2,00	7,90-7,85

No	Kabupaten/Kota	Indikator			
		IPM	PE	TPT	Kin
24.	Kabupaten Kendal	76,15	5,70-6,50	4,99-4,69	8,82-8,73
25.	Kabupaten Batang	71,20	6,35-6,50	5,54-5,10	8,30-8,21
26.	Kabupaten Pekalongan	73,00	5,30-6,00	3,05-2,75	8,09-7,98
27.	Kabupaten Pemalang	70,13	5,21-6,00	6,33-6,04	13,90-13,22
28.	Kabupaten Tegal	72,37	5,62-6,42	7,41-7,11	6,62-6,05
29.	Kabupaten Brebes	71,13	5,60-6,40	8,16-7,97	14,41-13,78
30.	Kota Magelang	83,40	5,50-5,70	4,40-4,04	5,28-5,11
31.	Kota Surakarta	85,50	6,06-6,70	4,20-4,00	7,58-7,37
32.	Kota Salatiga	86,43	5,56-6,56	3,84-3,54	4,34-4,30
33.	Kota Semarang	86,25	5,90-6,30	5,40-5,10	3,86-3,74
34.	Kota Pekalongan	78,21	5,70-6,20	4,91-4,40	6,50-6,14
35.	Kota Tegal	78,25	5,53-6,50	5,73-5,43	7,32-6,91
Jawa Tengah		74,55	5,00 -6,00	4,47-4,37	8,70-8,53

Sumber : Bappeda, 2025.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2026

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan implementasi tahun pertama kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029. Tahun 2026 merupakan tahap **“Penguatan Landasan Pembangunan Daerah”** difokuskan pada tema pembangunan yaitu **“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”**. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut ini diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi meliputi: 1) Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah; 2) Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan; dan 3) Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2026 didukung dengan rencana pendanaan untuk memenuhi kebutuhan belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar 23,741 triliun rupiah, belanja daerah sebesar 24,156 triliun rupiah, dan pembiayaan daerah sebesar 414,5 miliar rupiah. Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026.

Tabel 6.1.

Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		16.318.898.370.000
1	Pajak Daerah	12.899.838.185.000
2	Retribusi Daerah	2.405.199.623.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	701.832.870.000
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	312.027.692.000
PENDAPATAN TRANSFER		7.397.415.721.000
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.397.415.721.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		25.600.170.000
JUMLAH PENDAPATAN		23.741.914.261.000
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI		15.630.119.890.500
1	Belanja Pegawai	7.550.906.690.000
2	Belanja Barang dan Jasa	5.990.576.205.500
3	Belanja Subsidi	7.647.280.000
4	Belanja Hibah	2.070.582.715.000
5	Belanja Bantuan Sosial	10.407.000.000
BELANJA MODAL		1.679.982.022.500
BELANJA TAK TERDUGA		20.000.000.000
BELANJA TRANSFER		6.826.312.348.000
1	Belanja Bagi Hasil	4.400.368.228.000

URAIAN		JUMLAH (Rp)
1		2
2	Belanja Bantuan Keuangan	2.425.944.120.000
JUMLAH BELANJA		24.156.414.261.000
SURPLUS/DEFISIT		(414.500.000.000)
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		484.500.000.000
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	484.500.000.000
2	Pencairan dana cadangan	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		70.000.000.000
1	Pembentukan dana cadangan	0
2	Penyertaan modal	70.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO		414.500.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2025.

6.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

6.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemerataan kualitas layanan pendidikan meliputi: Seleksi dan fasilitasi lulusan SMA, SMK dan MA miskin yang berprestasi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Luar Negeri dan Beasiswa Perguruan Tinggi Dalam Negeri; Sekolah Unggulan SMA dan/atau SMK berbasis kompetitif serta potensi dan kearifan lokal fokus pada SMK agribisnis; Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) maupun lanjutan untuk SMA, SMK, SLB di Kabupaten Wonosobo, Banyumas, Pemalang, Klaten, Purbalingga, Batang, Tegal dan Kota Tegal; Pemantauan, pengendalian dan evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS); Beasiswa bagi Siswa Miskin; Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan; Pengelolaan SMK *Boarding* dan SMK *Semi Boarding*; Penyediaan paket pendidikan gratis (Seragam, Perlengkapan Sekolah dan Kuota Internet) bagi siswa miskin; Revitalisasi prasarana dan sarana pendidikan fokus pada SMK agribisnis; Sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik dan siswa SMK fokus pada SMK agribisnis; Digitalisasi pendidikan dan Penguatan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art* dan *Mathematics*) melalui peningkatan keterampilan dan pengembangan media belajar berbasis TIK bagi tenaga pendidik; Pemenuhan Guru Pendamping Khusus (GPK) di Sekolah Inklusi; Penguatan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas

PAUD dan pendidikan non formal terutama PKBM; Peningkatan tata kelola pendidikan dengan penguatan kerjasama multipihak khususnya dalam rangka *link and match* dengan DUDI agroindustri; Peningkatan pembinaan potensi siswa diarahkan pada pengembangan *softskill*, penguatan karakter dan edukasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat termasuk didalamnya konsumsi makanan sehat dan bergizi; serta Penguatan layanan pendampingan pencegahan dan penanganan kekerasan, perundungan dan intoleransi termasuk optimalisasi Satgas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada Satuan Pendidikan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada Percepatan implementasi kurikulum adaptif berbasis digitalisasi; Internalisasi muatan lokal berbasis potensi dan kearifan lokal; Penyelarasan kurikulum dengan DUDI; Penguatan pengarusutamaan nilai agama, budaya dan karakter serta integrasi tema pembangunan dalam kurikulum.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan, termasuk dalam perijinan pendirian Sekolah Rakyat.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan AMPSR dan penguatan layanan deteksi dini ibu hamil dengan ANC; penguatan pencegahan *stunting* melalui Calon Pengantin (CATIN) dan Pasangan Usia Subur (PUS) layak hamil; pelaksanaan koordinasi dan advokasi pelaksanaan K6; peningkatan pelayanan KB pasca salin; penguatan pelaksanaan KN lengkap yang berkualitas; penguatan edukasi kehamilan remaja; pemberian PMT bagi baduta dan ibu hamil KEK serta anemia disertai evaluasi KAP; pendampingan upaya peningkatan capaian program surveilans dan imunisasi; penguatan posbindu di institusi; deteksi dini kanker payudara, kanker serviks serta 3 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara); pelaksanaan koordinasi dan advokasi KTR; Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) ulang tahun, sekolah dan khusus; peningkatan penemuan *Surveillance* malaria; peningkatan penemuan serta peningkatan kesembuhan TB dan HIV; peningkatan penemuan NTD; peningkatan tata laksana *dengue*; pengendalian obesitas pada usia dewasa yang berdampak pada faktor PTM; penguatan dan evaluasi pelaksanaan STBM; Fasilitasi pelaksanaan program spesialis keliling (Spelling) yang dilaksanakan Balkesmas, RS Provinsi dan RS di Kab/Kota;fasilitasi penguatan Institusi Layanan Primer (ILP); peningkatan sistem informasi kesehatan di fasyankes; pendampingan pelaksanaan satu

sehat; penyusunan kebijakan terkait standarisasi SPA di faskes primer, lanjutan dan labkesmas; pendampingan kualitas akreditasi paripurna; koordinasi dan advokasi standar pelayanan di faskes yang ramah disabilitas; pendampingan pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat; pemeriksaan kualitas air dan udara; peningkatan kepesertaan aktif jaminan kesehatan; pengadaan dan distribusi obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan; Peningkatan standarisasi Labkesmas menjadi Labkesmas Tier III; serta pemenuhan sarana dan prasarana di UPT Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD milik Pemerintah Provinsi.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada penguatan implementasi data berkualitas; peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (SDMK) melalui pelatihan/seminar/*workshop*/magang/lainnya yang mendukung pelayanan berbasis kompetensi; pelaksanaan kerjasama dengan perguruan Tinggi dalam penyelesaian permasalahan kesehatan prioritas; sosialisasi kebijakan perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan SDMK tingkat provinsi; peningkatan mutu pelatihan SDMK; serta peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui sosialisasi dan bimtek.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan melalui evaluasi peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin sesuai standar; penyusunan standar obat-obatan di faskes primer dan lanjutan; pendampingan perizinan berusaha berbasis risiko distribusi pedagang besar farmasi, pedagang obat tradisional, serta pedagang besar kosmetika.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kampanye perubahan perilaku; pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan dan peningkatan peran serta masyarakat (ormas, kader, dunia usaha, PT, mitra, dan lainnya), peningkatan koordinasi, bimbingan teknis; implementasi peningkatan aktivitas fisik di UPT; pelaksanaan pemeriksaan spesialis keliling (*Spelling*) untuk mendukung pelayanan diluar gedung RSUD/RSJD; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, *daycare*, *home visit/home care*, edukasi pasien dan keluarga pasien serta masyarakat yang dilakukan oleh tujuh RSUD/RSJD, dan *follow up* pasien kusta.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA) meliputi antara lain jaringan irigasi, pengaman tanggul dan alur sungai, bangunan pengendali banjir, bangunan penampung air, serta bangunan pelindung pantai;

normalisasi/restorasi sungai; operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan provinsi; peningkatan *flood forecasting and warning system (FFWS)*; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi dan penyediaan peralatan pendukung. Kegiatan-kegiatan di atas sekaligus untuk mendukung peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim sektor air.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan akses air minum jaringan perpipaan yang dikelola secara aman dan berkelanjutan meliputi pengembangan dan inisiasi pembangunan baru SPAM Regional, pembangunan prasarana sarana SPAM perdesaan dan SPAM desalinasi, serta pembinaan pengelolaan SPAM perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota.

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana pengelolaan sampah meliputi fasilitasi pembangunan TPST regional, inisiasi pembangunan baru TPST regional, dan pembangunan prasarana sarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan akses sanitasi air limbah domestik yang dikelola secara aman dan berkelanjutan meliputi fasilitasi pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) regional, serta pembangunan prasarana-sarana dan pembinaan pengelolaan air limbah domestik perkotaan dan berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

f. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar tujuh meter dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton, rekonstruksi jalan, dan rehabilitasi jalan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antarwilayah sertaantisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana di antaranya di ruas-ruas Wanayasa-Kalibening/ Bts. Kab Pekalongan, Buntu-Kroya-Slarang, Sirampog-Bumiayu, Kajen - Kalibening/ Bts. Kab Banjarnegara, Demak-Godong, Juwana-Todanan/ Bts. Kab Blora. Selain itu tetap dilaksanakan pemeliharaan rutin di semua ruas, kegiatan pendukung berupa penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem

pengembangan jalan; serta pengawasan pelaksanaan peningkatan menuju lebar standar, dan rehabilitasi jalan.

g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) dalam rangka pencapaian 1 KK 1 rumah layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB) dan peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana utamanya penyediaan rumah adaptif banjir di pesisir utara, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni (PB *backlog*), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi, serta fasilitasi penyediaan rumah susun.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan, pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh, serta penataan permukiman di kawasan pesisir.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi, serta upaya pembinaan dan pengendalian program.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi daerah rawan bencana, pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana (destana), penyelenggaraan gladi bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) dan rambu jalur evakuasi di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas (Unit LIDi), penyusunan rencana kontijensi (renkon); peningkatan kapasitas dalam respon cepat penanganan darurat bencana, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi kebencanaan, pemenuhan logistik dan peralatan penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penyusunan dokumen kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna) dan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P), serta pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran serta pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur permadam kebakaran kabupaten/kota;.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS) termasuk kegiatan BinteK peningkatan kapasitas dan bantuan Hibah serta bantuan hibah bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) guna meningkatkan jumlah LKS yang terakreditasi, koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, warga lanjut usia (lansia) terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, peningkatan kualitas data kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota yang melakukan pemutakhiran data, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta bansos non tunai Kartu Jateng Ngopeni.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan, pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.

6.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja daerah, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja baik makro maupun mikro.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan, mesin dan menjahit), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan bidang jasa seperti *commercial cookery*, *housekeeping*, *tour guide*, *waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, pelatihan bidang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), peningkatan produktivitas (perusahaan dan desa), pengukuran produktivitas, uji kompetensi, konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online e-makaryo*, *job fair*, pelayanan antarkerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, pemberdayaan penyandang disabilitas, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, pemberdayaan keluarga PMI dan PMI yang purna, penguatan jejaring desa migran produktif, dan pengesahan

rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah provinsi.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penarikan pekerja anak, pemeriksaan perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI), pemeriksaan perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA), pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak (PPA), penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek keamanan dan keselamatan (K3) di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha, serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah, pengembangan pangan lokal, serta promosi panganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penanganan kerawanan pangan pada lokasi prioritas kemiskinan dan risiko *stunting*, dan implementasi pengelolaan serta pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa penetapan lokasi oleh gubernur.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*

Program ini diarahkan pada fasilitasi pelaksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), fasilitasi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui fasilitasi pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, peningkatan pemantauan terhadap badan air permukaan dan kualitas udara ambien, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan sinergi peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui fasilitasi taman kehati, penanganan ruang terbuka hijau/RTH, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan/UKL-UPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan hidup/DELH, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat dan generasi muda tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain persiapan pembangunan TPST Regional Magelang dan fasilitasi sarpras pengelolaan sampah kepada kelompok masyarakat.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi

kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blangko KTP-*el* di kabupaten/kota.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten/kota.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerjasama antar desa melalui fasilitasi kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerjasama antar kawasan perdesaan di Jawa Tengah.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi penyusunan produk hukum daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang desa, melaksanakan evaluasi perkembangan desa serta melaksanakan penilaian melalui penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan, melaksanakan pembinaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten, melaksanakan fasilitasi terhadap penetapan dan penegasan batas desa, pembinaan manajemen pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan desa, pembinaan terhadap pencatatan data dan informasi pemerintah desa, serta pembinaan terhadap penyediaan data profil desa dan kelurahan.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des), penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa, penguatan transformasi Posyandu yang terintegrasi dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung pembangunan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah provinsi berupa keberlanjutan penyediaan layanan Trans Jateng (7 koridor eksisting), modernisasi dan pengembangan Trans Jateng peremajaan alat *e-ticketing*; persiapan operasional awal “*Central Java Transport Operations Center*”; kegiatan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi berupa inisiasi kajian kelayakan Trans Jateng “Eksekutif”; inisiasi proses rencana pengembangan koridor baru di WP Jekuti (lanjutan proses) dan Gelangmangung dengan peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota); kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan Terminal Kutoarjo tahap VI dan peningkatan Terminal Sukoharjo, Penggaron, Purbalingga, dan Bumiayu; kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi utamanya berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan LPJU dan perlengkapan jalan lainnya (APILL, RPPJ, *warning light*, dan rambu) diantaranya pada ruas aksesibilitas kawasan sentra produksi pertanian (Cilacap, Grobogan, Klaten dan Sragen, pembangunan halte dan modernisasi/peningkatan ruang tunggu penumpang Trans Jateng yang dilengkapi *Public Transport Information System*/PTIS, kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi berupa rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) prioritas pada ruas dengan tingkat kejadian kecelakaan sangat tinggi salah satunya pada ruas Bener-Salaman (Kalijambe) dan pemasangan ZOSS SMA/SMK termasuk peningkatan pemahaman anak sekolah, serta kegiatan penetapan rencana induk LLAJ provinsi berupa fasilitasi optimalisasi bandara sebagai generator aktivitas perekonomian nasional dan/atau global.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi utamanya berupa pembangunan dermaga sungai (plengsengan) lintas penyeberangan Sungai Kaligangsa (di Kabupaten Brebes); kegiatan pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (antisipasi pelimpahan aset) dan fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai sentra ekonomi Jawa; kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis izin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api (palang pintu, *Warning Light*, LPJU, rambu dan marka) di Kabupaten Cilacap dan evaluasi dan rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di perlintasan kereta api di Kabupaten Sukoharjo serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif dan rencana perpanjangan layanan kereta api komuter KA Kedungsepur (perpanjangan sampai Weleri) dan KA Prameks (perpanjangan sampai Kebumen).

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antarperangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, layanan *data center*, pengembangan kehumasan, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM), pengelolaan konten, *website*, dan media sosial terkait informasi pembangunan Jawa Tengah, menyaring/*filter* terhadap berita *hoax* dan berita *fake*, serta peningkatan pelayanan informasi publik, pengembangan kapasitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan movev keterbukaan informasi badan publik.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan pendampingan pengelolaan ekosistem terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province*, mengembangkan dan mengelola integrasi layanan SPBE melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), penerbitan dokumen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK), koordinasi pengembangan layanan Jawa Tengah Cerdas, serta fasilitasi internet desa di 17 kabupaten dalam rangka mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem (PKE), pemenuhan *data center facilities rated*

III, layanan *bandwidth* internet untuk perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, serta pengembangan kapasitas SDM pengelola infrastruktur TIK.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola koperasi melalui peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, implementasi penerapan standar akuntansi keuangan entitas privat bagi koperasi, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Jawa Tengah.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola koperasi melalui peningkatan kualitas kelembagaan, baik bagi koperasi maupun kelompok masyarakat dan pra-koperasi, gerakan edu koperasi, perluasan diversifikasi produk koperasi, penguatan kapasitas permodalan serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antarkoperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada penumbuhan jiwa wirausaha, peningkatan kualitas SDM, serta literasi keuangan melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi serta diversifikasi produk melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang penanaman modal yang berkualitas, serta dukungan insentif dan kemudahan penanaman modal dan peningkatan investasi di Jawa Tengah.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi investasi di Jawa Tengah dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan terhadap kepeminatan investasi, dan memfasilitasi kemitraan antara Usaha Besar (UB) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian, mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan, antara lain melalui program kartu zilenial, program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan, mendorong gaya hidup sehat dan konsumsi pangan bergizi, mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan prasarana sarana olahraga, pemetaan cabang olahraga unggulan, mendorong sport tourism sebagai penggerak ekonomi pangan lokal antara lain melalui peningkatan kualitas dan tata kelola manajemen olahraga, pengembangan sport centre di setiap kecamatan, mendukung kegiatan tarkam dalam kalender olahraga tahunan, penguatan pembinaan e-sport, penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pembinaan olahraga, promosi dan integrasi sport tourism terhadap pangan lokal, sehat, bergizi.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** yang diarahkan pada perwujudan *big data* klaster pertanian, pariwisata dan pendidikan, integrasi portal data menuju layanan data terbuka dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Jawa

Tengah, serta pengembangan geospasial dalam rangka mendukung Satu Peta Jawa Tengah, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola peta geospasial.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada optimalisasi kinerja tim *computer security incident response team* (CSIRT), baik di perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah maupun pendampingan bagi tim CSIRT Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, peningkatan layanan *pentest* dalam rangka meningkatkan keamanan siber, peningkatan literasi keamanan informasi (*security awareness*), peningkatan capaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) melalui penerapan standar ISO 27001 tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan informasi (siber) dan persandian.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada upaya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) melalui perekaman OPK hingga penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB); pemanfaatan OPK dalam event/pameran budaya; peningkatan kapasitas SDM Kebudayaan melalui sertifikasi SDM kebudayaan; pemberian penghargaan kepada maestro/budayawan lokal; serta sinkronisasi Pokok Pikir Kebudayaan Daerah (PPKD) dalam perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada upaya pelestarian kesenian tradisional melalui inventarisasi hingga revitalisasi/restorasi karya budaya; pembibitan hingga pengembangan talenta seni budaya, yang diawali pendataan talenta seni budaya, pelatihan/workshop talenta seni budaya serta fasilitasi tampilan/*showcase*/pameran/pergelaran/pementasan karya talenta seni budaya, termasuk kesenian tradisional lainnya.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada pembinaan sejarah lokal provinsi melalui penyediaan data/informasi sejarah dan pemanfaatan hasil penulisan/literasi sejarah.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada upaya pelestarian cagar budaya berbasis lintas sektor melalui penetapan cagar budaya; pemanfaatan cagar budaya dengan pelaksanaan event budaya/pariwisata di kawasan cagar budaya; serta peningkatan kapasitas tenaga pelestari cagar budaya.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas museum melalui peningkatan pengelolaan permuseuman dan revitalisasi sarana prasarana kebudayaan.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui koordinasi antar *stakeholder*; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan; peningkatan sarpras perpustakaan.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui penyadaran masyarakat dalam pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno; alih media naskah kuno.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi, Perangkat Daerah, LKD Kabupaten/Kota; pelestarian arsip sebagai memori kolektif bangsa dan peningkatan kualitas layanan kearsipan melalui penguatan pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip antara lain melalui peningkatan penyadaran pemusnahan arsip masa retensi habis bagi perangkat daerah; pemetaan kerjasama dengan *stakeholder* yang aktif dalam penanggulangan bencana guna proses penyelamatan dan pemulihan arsip; penyelamatan arsip melalui alih media arsip.

6.2.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir melalui pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan; penanaman bibit mangrove; penenggelaman terumbu karang buatan; penanaman lamun; pemberdayaan masyarakat pesisir melalui fasilitasi prasarana dan sarana usaha sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional di Jawa Tengah.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; fasilitasi alat penangkapan ikan dengan sasaran masyarakat miskin; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha

perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dukungan penyaluran BBM bersubsidi; gerai perizinan kapal perikanan; serta kerjasama dengan sekolah kejuruan perikanan untuk regenerasi nelayan.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budidaya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; revitalisasi prasarana dan sarana loka budidaya; pengembangan kawasan budidaya; fasilitasi prasarana budidaya ikan yang fokus pada sasaran penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan *ekstrem*); inisiasi produksi perikanan mandiri bagi pelaku usaha perikanan; dan penanganan hama penyakit ikan.

d. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Jawa Tengah melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) yang fokus pada sasaran penurunan *stunting*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate of analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; serta penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan daya tarik wisata unggulan; penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi; perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerbitan tanda usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata serta pengembangan desa wisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar

negeri bagi industri pariwisata provinsi; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI), pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini oleh Dinas Pertanian dan Peternakan diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas melalui fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, intervensi benih, pembentukan korporasi, subsidi suku bunga, asuransi petani, pembentukan *food estate*, revitalisasi kebun benih, pengembangan *urban farming*, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian; serta pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan aset balai dan program padat karya. Program ini juga diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan mutu genetik, pengembangan kawasan sumber bibit (SDGH), review masterplan kawasan peternakan, penguatan korporasi, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), fasilitasi *good farming practices* (GFP), pengendalian pemotongan hewan betina produktif dan revitalisasi balai budidaya dan pembibitan ternak.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan yang diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, optimasi lahan, fasilitasi pupuk dan dukungan penyaluran pupuk bersubsidi-Program ini juga diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan dan P3KE melalui program Banter Melaju, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, serta fasilitasi inovasi peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV), pengawasan jumlah ternak yang diberikan rekomendasi keluar masuk Jawa Tengah, serta perbaikan pola konsumsi dan gizi keluarga rawan *stunting*.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan yang diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani termasuk petani milenial, pelatihan/pendampingan petani tembakau, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh. Program ini juga diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (*supra*).

4. Kehutanan

Rencana program prioritas urusan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung melalui penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerja sama pemanfaatan di kawasan hutan produksi; penataan/registrasi hutan rakyat, rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan negara yang terdiri dari penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL), pembangunan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, pembinaan dan/atau pengawasan rehabilitasi hutan dan lahan; pelaksanaan perlindungan hutan; pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu; perencanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun, pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; perbenihan tanaman hutan.

b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) provinsi; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) untuk kewenangan provinsi melalui pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES; pengelolaan kawasan bernilai

ekosistem penting melalui penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan provinsi.

c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan, penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan usaha perhutanan sosial.

d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS, serta gerakan rehabilitasi/pemulihan kapasitas daya dukung DAS.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan konservasi air tanah melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian implementasi nilai perolehan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah; sinergi dengan *stakeholder* lainnya dalam Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah, dan monitoring terjadinya *Land Subsidence*/amblesan tanah; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah dengan mendorong pembangunan infrastruktur geologi dan konservasi air tanah; penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi; serta melakukan evaluasi terhadap zona konservasi air tanah pada CAT yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya program ini juga ditujukan untuk mendukung pengembangan potensi warisan geologi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2026 akan dilaksanakan pendampingan dalam penetapan *Geoheritage*, Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko akibat bencana geologi (*geological hazard*).

b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program ini diarahkan pada peningkatan transformasi tata kelola kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan menerapkan *good mining practice* melalui sosialisasi regulasi terkait petunjuk teknis pengelolaan pertambangan di Jawa Tengah dengan muatan lokal kebijakan Jawa Tengah; pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; penyusunan persetujuan teknis izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; *updating* sistem SILUP (Sistem Informasi Laporan Usaha Pertambangan); pemberian penghargaan *good mining practice* sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori *good mining practice*; penertiban kegiatan PETI

(Pertambangan Tanpa Izin) dengan pelaksanaan Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB di Jawa Tengah; Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral; peningkatan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penetapan harga patokan mineral serta pengendalian; pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah, serta pelaksanaan rekonsiliasi data produksi di Jawa Tengah.

c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan konservasi energi dan transisi energi daerah dengan meningkatkan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi berbasis potensi lokal melalui kegiatan pembangunan maupun pengembangan prasarana sarana EBT utamanya pengembangan biogas, Pompa Air Tenaga Surya (PATS), dan PLTS Atap; meningkatkan akses energi terutama EBT bagi masyarakat antara lain pada kelompok tani, dan pondok pesantren, monitoring tingkat pemanfaatan energi di Jawa Tengah melalui kegiatan evaluasi bauran energi Jawa Tengah, penyusunan dokumen pemetaan kondisi energi di Jawa Tengah dan pemodelan untuk persiapan evaluasi regulasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED); pengembangan desa mandiri energi melalui penghargaan DME (Desa Mandiri Energi) sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang telah memenuhi kategori DME inisiatif, DME berkembang, dan DME mapan.

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi daerah dengan meningkatkan keandalan pasokan listrik dan meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita. Perwujudan ketahanan energi tersebut melalui pemerataan dan keterjangkauan akses energi listrik untuk masyarakat miskin yang belum berlistrik; evaluasi regulasi dan/atau kebijakan ketenagalistrikan daerah; ~~serta~~. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) melalui kegiatan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan; koordinasi K2 bersama *stakeholder* terkait di Jawa Tengah; pendampingan pemantauan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, serta fasilitasi peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan dalam rangka mendukung K2 dan evaluasinya di Jawa Tengah.

6. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA melalui *post audit* dan verifikasi ekspor/impor di kabupaten/kota.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, pemetaan dan pengembangan potensi desa ekspor melalui pelatihan, perluasan jejaring promosi dan kerja sama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/ *Indonesian trade promotion center* (ITPC).

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui asiliasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan fasilitasi sarana prasarana perdagangan bagi pelaku usaha perdagangan di Jawa Tengah.

7. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM), serta fasilitasi standarisasi industri seperti SNI, HKI, Halal, GMP, TKDN, green industry dan teknologi industri.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan non agro.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, Izin Usaha Kawasan Industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, jemput bola pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

8. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal.

6.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penataan dan penguatan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja berbasis kebutuhan kompetensi; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyempurnaan SOTK dan sistem kerja; pemutakhiran standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan implementasi pelayanan publik berbasis teknologi dan kewilayahan; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik berdampak; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerjasama daerah; fasilitasi kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan swasta untuk mendukung alternatif pembiayaan pembangunan; pemetaan potensi kerja sama daerah; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

c. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan kualitas sumber daya pendidikan keagamaan; fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat terkait pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non-pelayanan dasar.

d. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui

kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah non litigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

e. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).

f. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan permasalahan pengadaan barang dan jasa.

g. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi dan substansi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

6.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan keselarasan perencanaan daerah dengan nasional; perencanaan daerah berbasis data, hasil evaluasi dan risiko; serta keterhubungan kinerja perangkat daerah dengan kinerja pembangunan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kesesuaian, keselarasan, dan keterhubungan perencanaan lingkup perekonomian dan Sumber Daya Alam; kesesuaian, keselarasan, dan keterhubungan perencanaan lingkup pemerintahan dan Pembangunan Manusia; serta kesesuaian,

keselarasan, dan keterhubungan perencanaan lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD, pengamanan aset, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**. Program ini diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen ASN dengan meningkatkan kualitas manajemen ASN melalui upaya pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan formasi, pemetaan dan peningkatan kompetensi ASN, pengisian jabatan ASN sesuai dengan manajemen talenta, peningkatan akurasi data dan kelengkapan dokumen ASN, peningkatan kedisiplinan dan kesejahteraan ASN serta peningkatan kinerja ASN dalam mendukung tujuan pembangunan daerah.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis, fungsional, dan manajerial yang komprehensif bagi ASN didukung dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan

inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

6. Penghubung

Rencana program prioritas unsur penghubung yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung**, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.

6.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan meningkatkan kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan, penguatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah, penguatan kapabilitas pengelolaan risiko korupsi dan penerapan strategi pencegahan korupsi, dan penguatan implementasi zona integritas.

6.2.7 Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan dan penguatan peran politik bagi masyarakat, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ideologi negara, penguatan proses demokrasi menuju demokrasi substansial, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakat baik individu maupun kelompok, utamanya mendorong Jawa tengah bebas peredaran Narkoba, serta untuk memperkuat toleransi masyarakat Jawa Tengah.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat, serta peningkatan hubungan kerja antarinstansi Pemerintahan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**. Rekapitulasi rencana kerja program prioritas pada masing-masing urusan dan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2.
Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		10.964.914.894.000
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.964.914.894.000
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		3.029.319.802.000
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.028.289.802.000
1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	330.000.000
1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	400.000.000
1.01.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	300.000.000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		550.415.014.000
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	547.251.577.000
1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.928.215.000
1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	75.000.000
1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.160.222.000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		452.602.467.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	48.621.302.000
1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	23.013.309.000
1.03.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11.770.900.000
1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.793.451.000
1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.470.116.000
1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	349.789.477.000
1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.146.224.000
1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	997.688.000
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		19.144.323.000
1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	12.845.000.000
1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.266.323.000
1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.663.000.000
1.04.06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	370.000.000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		10.767.690.000
1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.432.690.000
1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.975.000.000
1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	360.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		199.768.275.000
1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10.286.000.000
1.06.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	200.000.000
1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	74.090.123.000
1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	110.594.572.000
1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.397.580.000
1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200.000.000
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		11.902.164.000
2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	121.635.000
2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.572.217.000
2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.510.000.000
2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	950.000.000
2.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.748.312.000
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		4.468.080.000
2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.698.800.000
2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	770.432.000
2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	328.408.000
2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	373.720.000
2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	296.720.000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		21.183.125.000
2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	13.614.995.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.975.924.000
2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.592.206.000
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		1.200.000.000
2.10.03		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	270.000.000
2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	500.000.000
2.10.06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	430.000.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		2.224.600.000
2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000
2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	965.614.000
2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	158.986.000
2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.000.000
2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	400.000.000
2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	200.000.000
2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000
2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	245.000.000
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		205.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	70.000.000
2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	60.000.000
2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	75.000.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		5.058.540.000
2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	155.000.000
2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.033.540.000
2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.870.000.000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		727.020.000
2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	160.000.000
2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	389.667.000
2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	177.353.000
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		138.755.679.000
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	136.438.696.000
2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	716.983.000
2.15.05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.600.000.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		58.086.829.000
2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	15.345.000.000
2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	42.741.829.000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		5.844.070.000
2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	938.680.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	195.000.000
2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	577.000.000
2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	855.000.000
2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.278.390.000
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		3.532.154.000
2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	667.200.000
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.514.954.000
2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	790.000.000
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	350.000.000
2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	210.000.000
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		112.409.700.000
2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	11.965.000.000
2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	100.444.700.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		740.000.000
2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	740.000.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		1.783.800.000
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.783.800.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		27.680.000.000
2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	22.675.000.000
2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	1.750.000.000
2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	150.000.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.205.000.000
2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.900.000.000
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		1.572.289.000
2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.469.708.000
2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	102.581.000
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		617.892.000
2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	597.827.000
2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	20.065.000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		25.905.836.000
3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.381.911.000
3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.248.576.000
3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12.612.050.000
3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.663.227.000
3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.000.072.000
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		17.077.675.000
3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.525.625.000
3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	8.652.050.000
3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	850.000.000
3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.050.000.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		400.962.343.000
3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	159.281.528.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	178.234.000.000
3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.637.563.000
3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.850.000.000
3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	52.959.252.000
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		3.282.737.000
3.28.03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.676.375.000
3.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	191.362.000
3.28.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	300.000.000
3.28.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	115.000.000
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		6.268.532.000
3.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	923.631.000
3.29.03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.077.356.000
3.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2.135.551.000
3.29.06		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.131.994.000
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		43.760.600.000
3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	70.000.000
3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	200.000.000
3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	33.550.000.000
3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.150.000.000
3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	999.054.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	6.791.546.000
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		11.323.146.000
3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.761.146.000
3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	502.000.000
3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	60.000.000
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		150.000.000
3.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	150.000.000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		427.000.853.000
4.01.02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.410.458.000
4.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.919.557.000
4.01.04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	411.638.757.000
4.01.05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.856.000.000
4.01.06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.640.000.000
4.01.07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.781.081.000
4.01.08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.755.000.000
4.02	SEKRETARIAT DPRD		336.517.695.000
4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	336.517.695.000
5.01	PERENCANAAN		10.085.000.000
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.850.000.000
5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.235.000.000
5.02	KEUANGAN		6.891.636.940.000
5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.857.812.348.000
5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.815.905.000

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	31.008.687.000
5.03	KEPEGAWAIAN		5.871.840.000
5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.871.840.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		26.892.349.000
5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	26.892.349.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		3.379.000.000
5.05.03		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	3.379.000.000
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG		4.732.269.000
5.07.02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	4.732.269.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		6.492.766.000
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.568.089.000
6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.924.677.000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		310.151.273.000
8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.608.336.000
8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	61.299.273.000
8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	36.626.664.000
8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.373.400.000
8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	207.243.600.000
		TOTAL	24.156.414.261.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja	Perangkat Daerah Koordinator
			2024 (R)	2025 (T)	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat Kemiskinan	%	9,58	9,66-9,00	8,70-8,53	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	91,28	91,50	92,00	Sekretariat Daerah
3	Indeks Integritas Nasional	Angka	79,47	80,97	80,97	Sekretariat Daerah
4	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	85,84	85,81 – 89,07	86,46 - 89,50	Sekretariat Daerah
5	Otonomi Fiskal Daerah	%	66,91	63,56	65,72	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	4,80 - 5,60	5,00 - 6,00	Sekretariat Daerah
7	Indeks Modal Manusia	Angka	0,59	0,62	0,62	Sekretariat Daerah
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,78	4,81 - 4,42	4,71 - 4,27	Sekretariat Daerah

7.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah, serta IKU perangkat daerah. Indikator kinerja daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
A	Aspek Geografi dan Demografi				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ¹⁾⁴⁾	Angka	69,46	75,68	75,73
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK ¹⁾	%	n/a	0,32	5,32
3	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah ¹⁾³⁾	Angka	n/a	0,482	0,487
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ¹⁾³⁾	%	9,72	12,5	17,83
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ¹⁾³⁾	%	n/a	22,00	23,00
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ¹⁾	% RT	n/a	25,00	29,00
7	Konsumsi Listrik per Kapita ¹⁾³⁾	kWh/Kapita	802,05	826,11	883,94
8	Intensitas Energi Primer ¹⁾³⁾	SBM/Rp miliar	n/a	212,71	203,21
9	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) ¹⁾³⁾	%	8,63	8,23	7,83
10	Indeks Ketahanan Pangan ¹⁾³⁾	Angka	85,34	85,47	85,60
11	Kapasitas Air Baku ¹⁾	m ³ /detik	5,20	5,20	5,82
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ¹⁾³⁾	%	n/a	39,46	42,60
13	Persentase Kondisi Baik Infrastruktur Tampung Air Kewenangan Provinsi ¹⁾	%	64,31	64,31	58,97
14	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi ¹⁾³⁾	Angka	67,50	68,45	70,14
15	Persentase Sungai Kondisi Baik Kewenangan Provinsi ¹⁾³⁾	%	52,37	52,38	52,38
16	Indeks Risiko Bencana ¹⁾³⁾	Angka	99,61	96,18	94,75
17	Persentase Penurunan Emisi GRK ¹⁾				
	- Kumulatif	%	n/a	5,65	6,57
	- Tahunan	%	n/a	12,35	15,84
B	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	Tingkat Kemiskinan ¹⁾	%	9,58	9,66 - 9,00	8,70 - 8,53
2	PDRB per Kapita ¹⁾	Juta Rp	47,97	49,3 - 51,1	52,0 - 55,7
3	Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾	%	4,95	4,80 - 5,60	5,00 - 6,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka ¹⁾	%	4,78	4,81 - 4,42	4,71 - 4,27
5	Rasio Gini ¹⁾	Angka	0,364	0,362 - 0,367	0,351 - 0,361
6	Indeks Modal Manusia ¹⁾	Angka	0,59	0,62	0,62
7	Usia Harapan Hidup (UHH) ¹⁾³⁾	Tahun	74,93	75,24	75,46
8	Angka Kematian Ibu ¹⁾³⁾⁴⁾	per 100.000 KH	74,70	79,31	78,27
9	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada Balita ¹⁾³⁾⁴⁾	%	17,10	17,00	17,00
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) ¹⁾	%	90,00	95,00	95,00
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) ¹⁾	%	86,00	90,00	91,00

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional ¹⁾³⁾	%	98,83	99,03	99,23
13	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca ¹⁾	%	85,71	85,71 - 88,57	87,86 - 90,71
14	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi ¹⁾	%	20,00	28,57 - 34,29	34,29 - 39,29
15	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca ¹⁾	%	68,50	71,28 - 73,78	72,49 - 74,99
16	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi ¹⁾	%	62,69	64,75 - 67,25	65,65 - 68,15
17	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun ¹⁾	Tahun	8,47	8,58 - 8,60	8,69 - 8,71
18	Harapan Lama Sekolah ¹⁾³⁾	Tahun	12,86	12,97 - 13,00	13,03 - 13,06
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ¹⁾	%	7,82	8,18	8,43
20	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ¹⁾³⁾	%	61,60	66,89	67,71
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi ¹⁾³⁾	%	38,59	47,56	51,03
22	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ¹⁾³⁾	%	14,24	20,00	21,75
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ¹⁾³⁾	Angka	60,89 (2023)	62,31	62,86
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga ¹⁾³⁾	Angka	74,80	76,10	77,06
25	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ¹⁾³⁾⁴⁾	Angka	0,308	0,306	0,304
26	Indeks Kesejahteraan Sosial ²⁾	Angka	57,23	57,23	58,81
C	Aspek Daya Saing Daerah				
1	Tingkat Inflasi ¹⁾	%	1,67	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia ¹⁾	Angka	n/a	57,59	61,40
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ¹⁾	%	33,84	33,88 - 34,06	34,65 - 34,83
4	Kontribusi PDRB Provinsi ¹⁾	%	8,20	8,20	8,20
5	Rasio PDRB Industri Pengolahan ¹⁾	%	33,84	33,88 - 34,06	34,65-34,83
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ¹⁾³⁾	%	3,56	3,50	3,60
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara ¹⁾³⁾	Ribu Orang	99,58	66,81	70,79
8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional ¹⁾³⁾	%	n/a	12,61	13,08
9	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi ¹⁾³⁾	%	n/a	6,01	6,23
10	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi ¹⁾³⁾	%	n/a	6,01	6,23
11	Rasio Kewirausahaan Daerah ¹⁾³⁾	%	n/a	3,21	3,53
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ¹⁾³⁾	%	n/a	2,00	2,16

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
13	Return on Aset (RoA) BUMD ¹⁾	%	n/a	1,44	1,62
14	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal ¹⁾³⁾	%	40,36	42,00	44,05
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ¹⁾³⁾	%	61,82	62,49	63,15
16	Kapabilitas Inovasi ¹⁾³⁾	Angka	4,64	4,65	4,66
17	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal ²⁾	Produk	413.797	557.897	557.267
18	Aset Perbankan Syariah/PDRB ²⁾	%	2,85	2,97	3,14
19	Indeks Zakat Nasional (Provinsi) ²⁾	Angka	0,59	0,62	0,65
20	Indeks Ekonomi Hijau ¹⁾	Angka	n/a	43,10	45,57
21	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer ¹⁾³⁾	%	18,55	21,32	21,60
22	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi ¹⁾	Angka	n/a	6,00	6,12
23	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi ¹⁾³⁾	Angka	n/a	6,70	6,60
24	Pembentukan Modal Tetap Bruto ¹⁾³⁾	% PDRB	30,53	30,55	30,63
25	Ekspor Barang dan Jasa ¹⁾³⁾	% PDRB	10,74	10,97	11,12
26	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional ¹⁾	%	n/a	2,41	2,45
27	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan ¹⁾³⁾	%	71,76	72,99	74,54
28	Persentase Desa Mandiri ¹⁾³⁾	%	19,59	25,86	27,27
29	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap ¹⁾³⁾	%	91,46	93,08	93,12
30	Indeks Pelayanan Transportasi ¹⁾³⁾	Angka	6,614	6,660	6,788
31	Persentase Keterwujudan Penataan Ruang ¹⁾³⁾	%	62,29	56,90	63,65
32	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ¹⁾	%	1,23	1,38	1,38
33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ¹⁾	%	40,89	23,66	24,11
34	Aset Dana Pensiun/PDRB ¹⁾	%	0,39	0,39	0,39
35	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi ¹⁾	Nilai	3.287.253	3.700.540	3.846.660
36	Total Kredit/PDRB ¹⁾	%	25,58	23,20	25,14
37	Inklusi Keuangan ¹⁾	%	75,02	92,06	92,74
D	Aspek Pelayanan Umum				
1	Indeks Reformasi Birokrasi ²⁾	Angka	91,28	91,50	92,00
2	Indeks Integritas Nasional ¹⁾	Angka	79,47	80,97	80,97
3	Indeks Demokrasi Indonesia ¹⁾	Angka	85,84	85,81 – 89,07	86,46 - 89,50
4	Otonomi Fiskal Daerah ²⁾	%	66,91	63,56	65,72
5	Kapasitas Institusi ¹⁾	Angka	4,71	4,72	4,73
6	Indeks Reformasi Hukum ¹⁾³⁾	Angka	91,40	91,50	92,00
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ¹⁾	Angka	4,42	4,50	4,55
8	Indeks Pelayanan Publik ¹⁾	Angka	n/a	4,55	4,56
9	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM ¹⁾³⁾	Angka	99,80	85,00	86,00
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ¹⁾	%	n/a	79,50	79,50

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
11	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah ¹⁾	Kategori	n/a	n/a	Sedang
12	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah ¹⁾	Kategori	n/a	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ¹⁾	Angka	78,98	79,28 - 79,30	79,65 - 79,69
14	Manajemen Risiko Indeks ²⁾	Angka	3,378	3,379	3,380
E	Indikator Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar				
I	Pendidikan				
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun ³⁾⁴⁾	%	71,60	72,24	72,88
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas ³⁾⁴⁾	%	56,70	65,36	74,02
3	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assesment Nasional Untuk Literasi Dan Numerasi ³⁾⁶⁾	%	61,09	62,95	64,95
4	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK ³⁾⁶⁾	%	89,88	90,38	90,88
II	Kesehatan				
1	Angka Kematian Balita (AKABA) ²⁾³⁾	per 1.000 KH	8,57	8,75	8,66
2	Persentase Penurunan Kasus <i>Stunting</i> ²⁾³⁾	%	0,22	0,15	0,15
3	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) ²⁾³⁾	%	n/a	50,00	52,00
4	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) ²⁾³⁾	%	22,80	28,50	34,30
5	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar ²⁾³⁾	%	n/a	22,86	28,57
6	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian KLB, Bencana dan Kesehatan Lingkungan ²⁾³⁾	%	n/a	71,00	77,00
7	<i>Net Death Rate</i> (NDR) RSUD Dr. Moewardi ³⁾⁶⁾	permil	46,17	56	55,80
8	<i>Net Death Rate</i> (NDR) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ³⁾⁶⁾	permil	30,14	30,135	30,13
9	<i>Net Death Rate</i> (NDR) RSUD dr. Adhyatma, MPH ³⁾⁶⁾	permil	33,34	33,20	33,10
10	<i>Net Death Rate</i> (NDR) RSUD dr. Rehatta ³⁾⁶⁾	permil	11,00	10,90	10,80
11	<i>Net Death Rate</i> (NDR) RSJD Dr. Amino Gondohutomo ³⁾⁶⁾	permil	4,07	4,06	4,02
12	<i>Net Death Rate</i> (NDR) RSJD dr. Arif Zainudin ³⁾⁶⁾	permil	3,09	3,05	2,98
13	<i>Net Death Rate</i> (NDR) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi ³⁾⁶⁾	permil	13,19	13,10	13,05
14	<i>Net Death Rate</i> (NDR) Rumah Sakit Mata Soepardjo Roestam ³⁾⁶⁾	permil	33,34	33,20	33,10
15	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana ⁴⁾⁵⁾	%	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
16	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi ⁴⁾⁵⁾	%	100	100	100
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Persentase Panjang Jaian Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	%	91,46	72,82	93,61
1	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap ³⁾⁶⁾	%	61,56	63,17	63,71
2	Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor ³⁾⁶⁾	%	47,09	48,18	48,75
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman ³⁾⁶⁾	%	40,86	42,93	41,20*)
4	Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar ³⁾⁶⁾	%	49,42	61,65	72,82
5	Persentase Tingkat Kualitas Pelayanan Sumber Daya Air ³⁾⁶⁾	%	66,53	67,41	67,76
6	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir ⁴⁾	%	22,96	23,81	24,65
7	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi ⁴⁾	%	100	100	100
IV	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan ³⁾⁶⁾	%	63,60	60,58	62,66
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni ⁴⁾	%	100	100	100
3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni ⁴⁾	%	100	100	100
4	Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani ⁴⁾	%	35,87	49,49	14,90
V	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
1	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ²⁾³⁾	Angka	84,07	85	84,50
2	Skor kinerja penegakan produk hukum daerah ³⁾⁶⁾	Angka	6,09	6,20	6,15
3	Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ³⁾⁶⁾	Angka	13,20	12,60	13,20
4	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah ⁴⁾	%	80,00	86,67	85,71
5	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan ⁴⁾	%	100	100	100
6	Indeks Ketahanan Daerah ²⁾³⁾	Angka	0,75	0,76	0,77
7	Persentase penanganan pra bencana ⁴⁾	%	n/a	100	100
8	Persentase penanganan tanggap darurat bencana ⁴⁾	%	n/a	100	100
VI	Sosial				

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Populasi PPKS ^{3 6}	%	10,67	10,13	10,01
2	Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Sesuai SPM Bidang Sosial ^{3 5}	%	100	100	100
3	Persentase Populasi PPKS Fakir Miskin ^{3 6}	%	9,96	9,60	9,48
4	Persentase PSKS yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ^{3 6}	%	n/a	n/a	8,88
5	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti ^{4 5}	%	100	100	100
6	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti ^{4 5}	%	100	100	100
7	Persentase Lansia Terlantar yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti ^{4 5}	%	100	100	100
8	Persentase Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti ^{4 5}	%	100	100	100
9	Persentase korban bencana daerah provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat ^{4 5}	%	100	100	100
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
I	Tenaga Kerja				
1	Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (EPR/ <i>Employment to Population Ratio</i>) ^{2 3}	%	70,21	69,06	69,54
2	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja ^{3 6}	%	73,76	74,07	74,39
3	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten ^{3 4}	%	9,03	9,54	10,00
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja ^{3 4}	Juta Rp	55,47	56,00	56,40
5	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja ^{3 4}	%	62,85	68,57	85,71
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ⁴	%	19,07	19,25	19,43
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi ⁴	%	73,76	73,80	73,85
8	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan ⁴	%	9,96	10,00	10,51
II	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) ^{2 3 4}	Angka	93,44	93,45	93,47
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA) ^{2 3}	Angka	n/a	65,00	65,35
3	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi ^{3 4}	%	10,37	11,00	12,00
4	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif ⁴	%	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
5	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif ⁴⁾	%	100	100	100
III	Pangan				
1	Persentase cadangan pangan ⁴⁾	%	65,43	30,00	31,00
2	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah ³⁾⁴⁾	Angka	93,60	94,20	94,50
3	Persentase Daerah Rawan Pangan ³⁾⁴⁾	%	n/a	15,60	14.60
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan ³⁾⁴⁾	%	n/a	90,00	90,10
IV	Pertanahan				
1	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ³⁾⁶⁾	%	100	100	100
2	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi ³⁾⁶⁾	%	100	100	55,50
3	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan ⁴⁾	%	100	100	100
4	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu ⁴⁾	%	100	100	100
V	Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Air (IKA) ²⁾³⁾	Angka	52,03	68,71	68,82
2	Indeks Kualitas Udara (IKU) ²⁾³⁾	Angka	87,73	84,91	84,93
3	Indeks SO2 dan NO2 ²⁾³⁾	Angka	0,32	0,3238	0,3234
4	Indeks Pencemaran Air ²⁾³⁾	Angka	3,35	3,35	3,34
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ⁴⁾	%	53,85	50,00	50,00
VI	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah ³⁾⁶⁾	Angka	60,85	85,00	85,50
2	Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah ³⁾⁶⁾	%	60,85	86,30	86,53
VII	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya di Jawa Tengah ³⁾⁶⁾	%	n/a	5,93	11,69
VIII	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Total Fertility Rate (TFR) ²⁾³⁾⁴⁾	Angka	2,03	2,10	2,10
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) ²⁾³⁾⁴⁾	Angka	63,90	64,25	64,50
3	Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR ²⁾³⁾⁴⁾	%	69,46	69,50	69,75
4	Unmetneed KB ²⁾³⁾⁴⁾	%	7,79	9,50	9,25
5	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) ²⁾³⁾⁴⁾	Per 1000 WUS 15-19 Tahun	17,30	17,00	16,00
IX	Perhubungan				
1	Rasio Konektivitas Provinsi ³⁾⁶⁾	Angka	0,264	0,274	0,302
2	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi ³⁾⁶⁾	%	99,9830	99,9836	99,9838

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
3	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi ³⁾⁴⁾	%	5.78	6.36	6.94
4	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah ³⁾⁴⁾	%	97,981	98,01	98,03
X	Komunikasi dan Informatika				
1	Indeks Pemerintahan Digital ²⁾³⁾	Angka	n/a	2,00	2,10
XI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB ³⁾⁶⁾	%	14,90	12,99	13,52
XII	Penanaman Modal				
1	Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal ³⁾⁴⁾	%	14,83	10,09	10,13
XIII	Kepemudaan dan Olahraga				
1	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) ²⁾³⁾	Angka	0,385	0,387	0,389
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ³⁾⁴⁾	Angka	56,43 (2023)	59,00	60,25
XIV	Statistik				
1	Indeks Pembangunan Statistik ²⁾	Angka	2,61	2,61	2,81
XV	Persandian				
1	Indeks Keamanan Sandi dan Siber ²⁾	Angka	n/a	3,58	3,59
XVI	Kebudayaan				
1	Angka Melek Budaya ³⁾	%	52,61	53,82	55,32
XVII	Perpustakaan				
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) ³⁾⁴⁾	Angka	15,14	15,45	42
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM) ³⁾⁴⁾	Angka	73,91	75,10	68,50
XVIII	Kearsipan				
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah ³⁾⁴⁾	Angka	96,07	96,17	96,27
2	Persentase Arsip Bersejarah yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) ³⁾⁶⁾	%	30,00	40,00	50,00
3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (LKD Provinsi) ³⁾⁶⁾	Angka	97,09	97,19	97,29
	Urusan Pilihan				
I	Kelautan dan Perikanan				
1	Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan ³⁾⁶⁾	%	1,00	1,00	2,00
2	Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi ³⁾⁶⁾	%	0,75	0,79	0,84
3	Produksi Perikanan ³⁾⁴⁾	Ton	968.353,80	952.717,50	954.029
4	Produksi Garam ³⁾⁴⁾	Ton	629.952,95	539.293,69	541.775,75
II	Pariwisata				
1	Pengeluaran Wisatawan ³⁾⁶⁾	Rp	7.510.765	7.642.320	8.243.954
2	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif ³⁾⁶⁾	Juta Rp	66.344.465	84.344.465	102.344.465
	Indikator Hasil Rakortek				
1	Rasio PDRB Akomodasi makan minum	%	3,56	3,50	3,60
2	Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	146.257.575	n/a	152.820.000
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	99,58	66,81	70,79

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
4	Tenaga Kerja Pariwisata	orang	n/a	n/a	43.795
III	Pertanian				
1	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Pertanian ³⁾⁶⁾	%	1,17	1,04	1,05
2	Produksi Tanaman Pangan ³⁾⁴⁾	Ton	12.248.637	12.628.175	12.734.625
3	Produksi Tanaman Hortikultura ³⁾⁴⁾	Ton	1.057.770	873.990	1.073.636***
4	Produksi Tanaman Perkebunan ³⁾⁶⁾	Ton	3.860.443	3.850.670	3.868.006
5	Produksi Ternak ³⁾⁴⁾	Ton	1.908.389	1.922.605	1.936.930
IV	Kehutanan				
1	Indeks Kualitas Lahan (IKL) ²⁾³⁾	Angka	48,37	59,46	59,47
2	Luas Tutupan Lahan ²⁾³⁾	Ha	1.022.457	1.022.457	1.022.457
3	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kehutanan ²⁾³⁾	%	0,43	0,43	0,43
4	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi ³⁾⁴⁾	%	1,04	0,21	0,78
V	Energi dan Sumber Daya Mineral				
1	Indeks Pengelolaan Air Tanah ³⁾⁶⁾	Angka	516	351	360
2	Indeks Ketersediaan Air Tanah ³⁾⁶⁾	Angka	3,65	3,66	3,67
3	Kontribusi PDRB Sektor Pertambangan ³⁾⁶⁾	%	2,19	2,00	2,01
4	Persentase Penerapan <i>Good Mining Practice</i> (GMP) ³⁾⁶⁾	%	63,37	63,40	63,50
5	Rasio Ketersediaan Daya Listrik ³⁾⁶⁾	Angka	1,494	1,00	1,00
6	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda ⁴⁾	%	100	100	100
7	Rasio Elektrifikasi ²⁾	%	99,99	99,99	~100
VI	Perdagangan				
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan ³⁾⁶⁾	%	4,16	4,20	4,30
2	PDRB Sektor Perdagangan ³⁾⁶⁾	Milyar Rupiah	230.872,97	261.315,00	272.562,00
3	Ekspor barang dan jasa	%	10,74	10,97	11,12
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen ⁴⁾	%	100	100	100
VII	Perindustrian				
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian ³⁾⁶⁾	%	3,52	3,80	4
2	PDRB Sektor Perindustrian ³⁾⁶⁾	Milyar Rupiah	615.195,96	649.000,00	664.756.150.8
4	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja industri tekstil dan alas kaki ³⁾⁶⁾	%	n/a	0,32	0,32
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini ⁴⁾	%	100	100	100
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
I	Sekretariat Daerah				
1	Indeks Kualitas Kebijakan ³⁾⁶⁾	Angka	66,32	66,35	66,40
II	Sekretariat DPRD				
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah ³⁾⁶⁾	Angka	90,00	91,00	92,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
I	Perencanaan				

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) ²⁾³⁾	Angka	93,89	93,91	94,19
2	Skor Aspek Sinergi dalam IPPN ³⁾⁶⁾	Angka	27,53	27,55	27,75
3	Skor Aspek Kualitas Perencanaan dalam IPPN ³⁾⁶⁾	Angka	56,36	56,36	56,44
4	Skor Aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja ³⁾⁶⁾	Angka	10,00	10,00	10,00
II	Keuangan				
1	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ³⁾⁴⁾	%	11,64	1,64	5,41
2	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah ³⁾⁶⁾	%	97,75	97,80	97,85
3	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) ²⁾³⁾	Angka	3,24	3,08	3,12
III	Kepegawaian				
1	Indeks Sistem Merit ²⁾³⁾	Angka	0,86	0,865	0,87
2	Indeks NSPK Manajemen ASN ³⁾⁴⁾	Angka	92,00	92,50	93,00
IV	Pendidikan dan Pelatihan				
1	Indeks Kompetensi ASN ³⁾⁶⁾	Angka	3,07	3,08	3,10
V	Penelitian dan Pengembangan				
1	Indeks Inovasi Daerah ²⁾³⁾	Angka	72,85	73,00	73,50
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti ³⁾⁶⁾	%	100	100	100
VI	Pengelolaan Penghubung				
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung ³⁾⁶⁾	Angka	86,00	85,00	86,00
	Unsur Pengawasan				
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi ³⁾⁴⁾	Angka	3,471	3,50	3,52
2	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ³⁾⁴⁾	Angka	3,02	3,20	3,40
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) ²⁾³⁾	Angka	3,096	3,146	3,196
	Unsur Pemerintahan Umum				
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD ³⁾⁶⁾	Angka	3,01	3,01	3,02
2	Indeks Harmonisasi Indonesia ²⁾³⁾	Angka	n/a	6,40	6,50
3	Indeks Ketahanan Politik ³⁾⁶⁾	Angka	3,11	3,11	3,12

Keterangan:

1) IUP RPJPD/Indikator Sasaran Visi RPJPD

2) Indikator Mandatori Lainnya (Indikator mandatori Blue Print Gubernur/Wakil Gubernur, hasil evaluasi Raperda Kemendagri, dan/ atau mandatori Pusat lainnya)

3) Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Perangkat Daerah

4) Indikator Kinerja Kunci (IKK)

5) Indikator SPM

6) Indikator Mandiri/Lokal Daerah

*) Target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman Tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan target capaian tahun 2025 dikarenakan adanya penyesuaian berdasarkan Surat Direktur Air Minum DJCK Kementerian PU Nomor CK 0501-Ca/ 131 Tanggal 12 Juni 2025 Perihal Penyampaian Angka Baseline Target Indikator RPJMN Air Minum untuk Provinsi Jawa Tengah: bahwa Jawa Tengah ditargetkan hanya 36,5% pada tahun 2025 berdasarkan perhitungan capaian tahun-tahun sebelumnya oleh Dit. Air Minum DJCK Kementerian PU. Oleh karena itu, dalam rangka sinkronisasi data pusat dan daerah, pendataan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mulai Tahun 2026 perlu mempertimbangkan perhitungan capaian yang dilakukan Dit. Air Minum DJCK Kementerian PU.

*

7.3. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Indikator kinerja program adalah sebagai berikut.

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG XX						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pendidikan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan	%	100	Dinas Pendidikan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pendidikan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan	%	100	Dinas Pendidikan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran	%	100	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Dinas Wilayah Pendidikan IV	Wilayah Pendidikan IV			
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabdin XII Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kesehatan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kesehatan	%	94	Dinas Kesehatan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	%	90,5	Dinas Kesehatan - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		daerah di Dinas Kesehatan	perangkat daerah Dinas Kesehatan			
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Ambarawa	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Ambarawa	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Magelang	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Klaten	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Klaten	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Pati	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pelatihan Kesehatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Kesehatan	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD Dr.Moewardi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan RSUD Dr. Moewardi	%	100	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD Dr.MOEWARDI	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Dr. Moewardi	%	82,2	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	91	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - Sekretariat
		Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit di	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD	%	49,27	RSUD dr. ADHYATMA,

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		RSUD dr. ADHYATMA, MPH	dr. ADHYATMA, MPH			MPH - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
		Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. REHATTA	%	52	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD dr. REHATTA	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD dr. REHATTA	%	100	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	37	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	33,01	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	40,88	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	100	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	100	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAA N ALAT BERAT
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Jasa Konstruksi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Jasa Konstruksi	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI JASA KONSTRUKSI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAA N JALAN WILAYAH PATI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAA N JALAN WILAYAH PURWODADI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAA N JALAN WILAYAH SURAKARTA
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAA N JALAN WILAYAH MAGELANG

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Pemali Comal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Pemali Comal	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Jratun Seluna	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Jratun Seluna	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Bengawan Solo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Bengawan Solo	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum,kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	Sekretariat Badan Penanggulanga n Bencana Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	Sekretariat Badan Penanggulanga n Bencana Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Sosial	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial	%	100	Dinas Sosial - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Sosial	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Sosial	%	100	Dinas Sosial - Sekretariat
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	87	Dinas Ketahanan Pangan - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		daerah di Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan			
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	%	90	Dinas Ketahanan Pangan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	%	87	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK I	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK II	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK II	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK III	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK III	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK IV	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IV	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK V	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK V	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK VI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VI	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK VIII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VIII	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK IX	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IX	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK X	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK X	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Kebun Raya Baturraden	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK XI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK XI	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK VII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VII	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	Dinas Perhubungan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	Dinas Perhubungan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	100	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	%	100	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	%	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	%	79,5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di UPT Pusat Data	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data	%	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - UPT Pusat Data
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	%	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	%	86	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	%	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Perikanan Pantai Asemdayong	Perikanan Pantai Asemdayong			Asemdayong Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Juwana	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	86	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Taman Budaya Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Taman Budaya Jawa Tengah	%	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita	%	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Perlindungan Tanaman Tanaman	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Perlindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pelatihan Pertanian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembibitan	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Pembibitan Ternak Jawa Tengah	Ternak Jawa Tengah			Tengah Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Wilayah Slamet Utara				
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Industri Logam Dan Kayu (BILK)	Logam Dan Kayu (BILK)			Kayu (BILK) Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Hukum	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNA N
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNA N
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Perekonomian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMI AN
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Kesejahteraan Rakyat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTER AAN RAKYAT

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, dan kepegawaian Perangkat Daerah di Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO UMUM
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO UMUM
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO UMUM
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAH AN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, dan keuangan perangkat daerah di Sekretariat DPRD	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat DPRD	%	100	Sekretariat DPRD - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah di Sekretariat DPRD	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat DPRD	%	100	Sekretariat DPRD - Bagian Umum
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	%	90	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Semarang I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Semarang II	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Semarang III	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Ungaran	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Salatiga	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kendal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Demak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		keuangan perangkat daerah di UPPD Purwodadi	perangkat daerah UPPD Purwodadi			Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Klaten	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Sragen	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Sukoharjo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Wonogiri	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Karanganyar	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Boyolali	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Blora	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		daerah di UPPD Rembang	perangkat daerah UPPD Rembang			Pendapatan Daerah Rembang
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kudus	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Jepara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Pekalongan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kajan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajan	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajan
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Batang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Pemalang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Tegal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Slawi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Brebes	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Purwokerto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Cilacap	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Purbalingga	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Banjarnegara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Mungkid	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kebumen	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Purworejo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Temanggung	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Wonosobo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonosobo	%	95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan dan Aset Daerah			
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	%	81,5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	%	100	Badan Kepegawaian Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	%	100	Badan Kepegawaian Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Unit Penilaian Kompetensi ASN	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Penilaian Kompetensi ASN	%	100	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	%	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	%	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat	%	96	Badan Penghubung - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		daerah di Badan Penghubung	daerah Badan Penghubung			
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Penghubung	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung	%	100	Badan Penghubung - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di INSPEKTORAT	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah INSPEKTORAT	%	100	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di INSPEKTORAT	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT	%	100	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Sekretariat
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
		Meningkatnya pemerataan pendidikan menengah tingkat SMA	APK SMA	%	30,32	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan tingkat SMA	Angka Putus Sekolah SMA	Angka	0,011	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA
		Meningkatnya karakter siswa tingkat SMA	Persentase Prestasi Lomba SMA Tingkat Nasional	%	35,89	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan tingkat SMA	Nilai Kualitas Pembelajaran SMA	Angka	64,45	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA
		Meningkatnya pemerataan pendidikan menengah tingkat SMK	APK SMK	%	53,75	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan tingkat SMK	Angka Putus Sekolah SMK	Angka	0,026	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya karakter siswa tingkat SMK	Persentase Prestasi Lomba SMK Tingkat Nasional	%	57	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan tingkat SMK	Nilai Kualitas Pembelajaran SMK	Angka	60,86	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK
		Meningkatnya relevansi pendidikan menengah kejuruan	Nilai Kualitas Pembelajaran selaras dunia kerja	Angka	67,77	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK
		Meningkatnya pemerataan pendidikan khusus	APK SLB	%	91,74	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan khusus	Angka Putus Sekolah SLB	Angka	0,043	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus
		Meningkatnya karakter siswa pendidikan khusus	Persentase Prestasi Lomba SLB Tingkat Nasional	%	54,05	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan khusus	Nilai Kualitas Pembelajaran SLB	Angka	65,61	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus
		Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SMA Bersertifikat Kompetensi	%	76,84	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi	%	62,13	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SLB Bersertifikat Kompetensi	%	57,72	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya kompetensi guru berlisensi	Persentase Guru SMK yang Memiliki Sertifikat keahlian	%	1,74	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
		Meningkatnya digitalisasi pendidikan	Persentase Guru SMA, SMK, dan SLB Bersertifikasi Pelatihan Platform Pendidikan	%	25	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi	%	76,67	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Wilayah Pendidikan I	Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I			WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	65,71	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	65,21	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	83,1	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	73,3	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	83,8	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	77,9	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	70,89	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	74,41	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	70,5	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi	%	76,39	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Wilayah Pendidikan III	Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III			WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	50,5	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	70,56	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	73,33	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	60,1	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	79	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	73,33	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	89,9	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	68,2	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	83,05	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi	%	68,49	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Wilayah Pendidikan VI	Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI			WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	70,34	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	86,2	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	68,28	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	81,8	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	76,3	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	79,3	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	88,15	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	69,17	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya kualitas sarpras Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	67,59	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	79,13	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	77,52	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya keterjangkauan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	71,15	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	65,78	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	79,25	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	43,33	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	83,72	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
		Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	80,41	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
		Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	80,15	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
		Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	70	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	75	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	75	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	75	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	55	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
		Meningkatnya distribusi pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru SMA dan SMK	Angka	0,43	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	94	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	74,2	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	70,36	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	2,57	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	75,2	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	75,2	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	35	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	35	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	12,4	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	17,4	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	68,7	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	70,8	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	25	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	60	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	25	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	60	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	25	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	60	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	50	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	50	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
		Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	85	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 10 % institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%	54,28	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Angka Kematian Bayi (AKB)	1.000/K H	7,5	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	77	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Prevalensi wasting balita	%	6,7	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Fasilitas pelayanan kesehatan Primer dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai Standar	%	51,19	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas pelayanan kesehatan Primer terakreditasi paripurna	%	85,71	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota dengan penyedia dan atau pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar mutu	%	37,14	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	%	40	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	%	95	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	%	91	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulanga n Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Insidensi Human Immunodeficiency Virus (HIV)	%	8	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulanga n Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi malaria	Kabupate n/Kota	35	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulanga n Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Neglected Tropical Diseases (Pengendalian Kasus Filariasis dan Kusta)	Kabupate n/Kota	20	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulanga n Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Angka kematian Dengue	%	0,5	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulanga n Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Insidensi Hepatitis B	%	1,1	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulanga n Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	35	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulanga n Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan	Persentase Diabetes Melitus terkendali (DM Terkendali)	%	35	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulanga n Penyakit

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		surveilans kesehatan				
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun	%	14,4	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulanga n Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan skrining 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)	%	25,71	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulanga n Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kekebalan Kelompok	%	100	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulanga n Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/ wabah dan bencana	%	50	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulanga n Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	25	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulanga n Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	%	8,57	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulanga n Penyakit
		Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan Surveilans Kesehatan	%	50	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulanga n Penyakit

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit mencapai Case Fatality Rate Direct Obstetric (eklampsia dan perdarahan) < 1%	%	68,57	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai standar	%	41,27	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan terakreditasi paripurna	%	57,14	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan
		Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	%	74,28	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	85	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	63,05	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Masyarakat Wilayah Ambarawa	(PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%			
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase mutu layanan Balkesmas Wilayah Ambarawa sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja	Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang yang melaksanakan skrining Kesehatan Jiwa dan Penyakit Tidak	%	71,42	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Balkesmas Magelang	Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%			
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase Kabupaten Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Presentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan skrining Kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan	%	57,14	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			cakupan minimal 50%			
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten sesuai standar	%	60	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	71,42	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase kabupaten/kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	20	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase kabupaten/kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan kejadian luar biasa/wabah serta penanganan bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati dengan posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	28,57	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Meningkatnya mutu layanan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	Persentase Kabupaten/Kota dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	%	54	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
		Meningkatnya mutu layanan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	Persentase mutu layanan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan sesuai standar	%	72	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
		Meningkatnya mutu layanan kalibrasi di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang terlayani pelayanan laboratorium dan kalibrasi di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan	%	25	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan, prasarana dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
		Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
		Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Layanan RS di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	60	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam - Sekretariat
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/alat penunjang medik untuk mendukung layanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	60	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam - Sekretariat
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase pemenuhan layanan dan penunjang layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam sesuai standar	%	100	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam - Sekretariat
		Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase capaian indikator mutu layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	100	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam - Sekretariat
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
		Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	2,85	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan pelatihan sesuai Program Prioritas Nasional di Bapelkes Provinsi	Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang teregistrasi dan berkualitas	%	99	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
		Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkat Kompetensinya di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	30	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
		Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dalam rangka peningkatan standarisasi pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	91	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
		Meningkatnya kabupaten/kota yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Rumah Tangga Sehat	%	34,28	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	5,24	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	10	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
		Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dari Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	100	Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam - Sekretariat
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Tercapainya Penyusunan Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDA terhadap kebutuhan Konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Teknis dan Pengembangan Sumber Daya Air	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA TEKNIK
		Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	58,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
		Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	%	68,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
		Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya Kewenangan Provinsi	m3	2688058,55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
		Meningkatnya kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	%	52,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Angka	65,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	35,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
		Terjaganya kondisi sungai kewenangan Provinsi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
		Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						PEMALI COMAL
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Angka	69,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	56,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Terjaganya kondisi sungai kewenangan Provinsi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	50,1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Angka	69,3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	%	67,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
		Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Angka	75,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto				N SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
		Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	%	76,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
		Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
		Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
		Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	31,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
		Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	42,6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
		Terselenggaranya Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Persentase Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang terbangun	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kapasitas akses air limbah domestik	Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terhadap kebutuhan pembinaan dan pemberdayaan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
		Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	11,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
		Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase pengawasan teknis yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA MARGA
		Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	Km	1189,63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA MARGA
		Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA TEKNIK
		Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan yang Dileger	%	59,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA TEKNIK
		Terpenuhinya ketersediaan peralatan alat berat pendukung kegiatan perangkat daerah yang disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan	%	99,81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
		Terpenuhinya jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi dalam satu tahun terhadap jumlah kumulatif sertifikat hasil uji tahun rencana	Persentase Pengendalian Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi	%	19,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	94,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SEMARANG
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	64,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SEMARANG
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	92,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	70,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	91,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	50,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	92,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	65,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	94,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						WILAYAH MAGELANG
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	73,4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	94,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	59,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	95,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	75,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
		Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	95,7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
		Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	59,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
		Terselenggaranya Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	Persentase Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Tersertifikasi	%	49,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI JASA KONSTRUKSI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
		Meningkatnya Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Pelaksanaan Sinkronisasi Program	Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Program	%	58,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	%	42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Fasilitas RTR Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas RTR Kabupaten/Kota	%	39,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
		Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
		Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Jratun Seluna	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
		Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						DAYA AIR BENGAWAN SOLO
		Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
		Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	16,9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
		Tersedianya Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan	%	0,47	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
		Tertangannya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%	14,9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
		Terlaksananya Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang disediakan	%	7,69	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
		Terlaksananya Pembinaan kepada Orang/ Badan Hukum dalam rangka Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan	%	6,84	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KETENTERAM AN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNG AN MASYARAKAT						
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
		Meningkatnya pengendalian Tibumtranmas di 35 Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah	Persentase Pengendalian Tibumtranmas	%	80,71	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		Meningkatnya penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	%	85,71	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Penegakan Hukum Daerah
		Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas berkategori baik	%	8,57	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Pelindungan Masyarakat
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
		Meningkatnya kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	%	6,8	Sekretariat Badan Penanggulanga n Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Meningkatnya kapasitas sistem informasi dan data kebencanaaan	Persentase data kejadian bencana yang terverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam	%	90	Sekretariat Badan Penanggulanga n Bencana Daerah - Bidang Pengendalian Operasi dan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Pengelolaan Data Informasi
		Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dalam pemulihan pasca bencana	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam pemulihan pasca bencana	%	100	Sekretariat Badan Penanggulan n Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		Meningkatkan kapasitas kabupaten/kota dalam penanganan bencana	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam penanganan bencana	%	100	Sekretariat Badan Penanggulan n Bencana Daerah - Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
		Meningkatnya Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	%	29	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Penanganan Kebakaran
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG SOSIAL						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
		Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas bagi PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	%	8,88	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
		Terfasilitasinya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti	%	100	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosia di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra			
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	%	100	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
		Terfasilitasinya penerbitan rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	Persentase rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan atas Pengajuan Pengangkatan Anak	%	100	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
		Terselenggaranya jaminan sosial bagi PPKS yang layak dan tepat sasaran	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima pelayanan jaminan sosial	%	100	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Meningkatnya kemampuan PPKS Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhannya	Persentase PPKS Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	%	0,27	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
		Terselenggaranya perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai standar SPM bidang sosial	Persentase Perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
		Taman makam pahlawan terkelola dengan baik	Persentase Taman makam pahlawan terkelola	%	100	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TENAGA KERJA						
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
		Meningkatnya Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	85,71	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
		Meningkatnya pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	9,28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatnya lembaga pelatihan yang terakreditasi	Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	14,29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatnya perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri	%	83,68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
		Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian	%	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
		Meningkatnya tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas	%	73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
		Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	%	23,38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
		Meningkatnya penciptaan lapangan kerja di sektor formal	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	44,05	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya tenaga kerja baru di sektor informal	Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	%	68,5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	21,75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Pesentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	67,71	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
		Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	51,03	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		Meningkatnya LKS Bipartit yang terbentuk	Persentase LKS Bipartit yang terbentuk	%	49,8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		Meningkatnya perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	43,26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96,75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
		Menurunnya pelanggaran norma ketenagakerjaan	Persentase kejadian pelanggaran	%	80,8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			norma ketenagakerjaan			Pengawasan Ketenagakerjaan
		Meningkatnya perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	27,06	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
		Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi	%	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
		Meningkatnya Kapasitas Perempuan di Bidang Ekonomi	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	%	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
		Meningkatnya jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai standar	Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan	%	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
		Meningkatnya pelayanan korban kekerasan perempuan secara komprehensif	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
		Meningkatnya komitmen Kabupaten/Kota dalam pembangunan ketahanan keluarga	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	%	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
		Meningkatnya kualitas lembaga Layanan Keluarga yang responsif gender dan hak anak di Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih	%	24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
		Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Angka	61,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
		Meningkatnya kualitas perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	79	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya pelayanan korban kekerasan anak secara komprehensif	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PANGAN						
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
		Tercapaiannya rata-rata angka ketersediaan pangan	Rata-rata Ketersediaan Pangan	Angka	1,21	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
		Terjaganya cadangan pangan pemerintah daerah sesuai regulasi	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD)	Angka	0,47	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
		Terwujudnya Harga Efektif komoditas pangan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	62,5	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
		Menurunnya Angka Konsumsi Beras di Provinsi Jawa Tengah	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita /tahun	87,3	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Panganekaragaman dan Konsumsi Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
		Menurunnya daerah rawan pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	14,6	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
		Meningkatnya pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90,1	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan
		Terjaminnya pangan segar asal tumbuhan melalui sertifikasi dan registrasi	Persentase Capaian Tertimbang Regristasi dan Sertifikasi Pangan Segar	%	40	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANAHAN						

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					
		Terfasilitasinya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Fasilitasi Penetapan Lokasi	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
		Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
		Terfasilitasinya Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	Persentase Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
		Meningkatnya integrasi dokumen perencanaan lingkungan hidup ke dalam dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	4,76	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Menurunnya emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	%	3,26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan hidup	Persentase pemantauan kualitas lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	0,4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Terkelolanya keanekaragaman hayati di Kebun Raya Baturraden	Persentase peningkatan pelestarian kehati di Kebun Raya Baturraden	%	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
		Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola	%	80	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
		Meningkatnya pembinaan terhadap persetujuan lingkungan	Persentase rekomendasi lingkungan hidup yang diterbitkan	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	57	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
		Meningkatnya penyelesaian aduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Timbulan sampah yang terkelola	%	63	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIL						
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
		Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	99,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
		Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	%	99,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
		Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan data kependudukan di Jawa Tengah	Persentase Institusi/Lembaga / Badan Hukum yang difasilitasi pemanfaatan data kependudukan	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA						
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
		Meningkatnya Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi	%	57,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	dalam Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)			dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitas Kerjasama dan Ekonomi Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
		Meningkatnya fasilitas evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Penataan dan Regulasi Desa
		Meningkatnya fasilitas peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Bina Pemerintahan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
		Meningkatnya BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	45,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitas Kerjasama dan Ekonomi Desa
		Meningkatnya fasilitas peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyaratannya di Jawa Tengah	Persentase Daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyaratannya	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Lembaga Kemasyarat an dan Partisipasi Masyarakat
		Meningkatnya fasilitas peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Lembaga Kemasyarat an dan Partisipasi Masyarakat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
		Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan	Persentase kabupaten/kota yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	%	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
		Meningkatnya kesertaan KB	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	%	69,48	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
		Meningkatnya kampung keluarga berkualitas mandiri dan berkelanjutan	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERHUBUNGA N						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	%	6,94	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan
		Meningkatnya kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	%	98,03	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan
		Meningkatnya jaringan trayek angkutan jalan	Rasio Trayek Angkutan Jalan	Angka	46,74	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan
		Meningkatnya penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru yang menggunakan angkutan umum	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	69,85	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan
		Meningkatnya jumlah kunjungan bus di terminal tipe B	Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B	%	70,14	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
		Meningkatnya total implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	%	52,95	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	22,04	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	57,12	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3,99	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	86,2	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	45,11	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	81,84	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	8,04	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	%	92,83	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			Perhubungan Wilayah IV Kelas A			
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	43,53	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	87,09	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
		Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	28,16	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	3	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	88,66	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		Meningkatnya Jumlah Penduduk Terlayani (Trans Jateng)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)	%	4,42	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Angka	0,472	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
		Meningkatnya perlntasan sebidang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar	Persentase perlntasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	%	28	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
		Meningkatnya Kualitas Informasi Publik	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	Angka	85	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Komunikasi Publik dan Media
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
		Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	Tingkat Pemenuhan Layanan Digital	%	25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Infrastruktur Teknologi Digital
		Meningkatnya Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Pemerintahan Digital	Tingkat Pembangunan/Pen gembangan Aplikasi	%	12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Aplikasi Pemerintah Digital
		Meningkatnya Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	%	65	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - UPT Pusat Data
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
		Meningkatnya koperasi berkualitas tingkat provinsi	Persentase Koperasi Berkualitas	%	27,1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
		Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas	%	91	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaa n Kelas A
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
		Meningkatnya jumlah koperasi provinsi produktif	Persentase Koperasi Produktif	%	53,3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Bina Usaha Koperasi
	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
		Meningkatnya Pelaku Usaha yang dibantu buruh tetap	Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	%	17,15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM
		Meningkatnya kualitas SDM UMKM	Persentase SDM UMKM yang berkualitas	%	91	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaa n Kelas A
		Meningkatnya kualitas SDM Wirausaha	Persentase Wirausaha yang berkualitas	%	85	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaa n Kelas A
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
		Meningkatnya jumlah UMKM Non Pertanian yang mengalami Peningkatan Usaha	Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha	%	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENANAMAN MODAL						
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
		Meningkatnya kualitas bahan promosi penanaman modal yang dipublikasikan	Persentase peningkatan pengakses bahan promosi investasi yang telah dipublikasikan	%	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
		Meningkatnya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang berkualitas	Persentase kepeminatan yang terrealisasi	%	62	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
		Meningkatnya penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	91,5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
		Meningkatnya kualitas standar layanan dan penyelesaian pengaduan	Persentase standar pelayanan yang ditetapkan	%	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
		Meningkatnya pengawasan penanaman modal	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
		Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
		Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	%	8,6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan
		Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	%	80,6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan
		Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan	%	20,85	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Kepemudaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
		Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional/ internasional	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasi onal	%	10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional/ internasional	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasi onal	%	79	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
		Meningkatnya Tingkat Kebugaran Masyarakat	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	%	0,34	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya prestasi olahraga pelajar tingkat nasional/ internasional	Persentase Atlet pelajar dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasi onal	%	79	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG STATISTIK						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
		Meningkatnya kematangan SDI tingkat provinsi	Indeks Satu Data Indonesia	Indeks	86	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Pengelolaan Data dan Statistik
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERSANDIAN						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Angka	3,59	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital - Bidang Persandian dan Keamanan Siber
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEBUDAYAAN						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
		Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persentase Warisan Budaya Tak Benda berperingkat Nasional	%	26,1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan
		Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan & pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang berdayaguna	%	27,11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan , Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
		Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek	Persentase kesenian/tradisi budaya yang dilestarikan	%	72	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif -

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Pemajuan Kebudayaan di Taman Budaya Jawa Tengah				Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
		Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga Kesenian	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadak an pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	1,12	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
		Meningkatnya pelindungan dan pengembangan tradisi dan kesejarahan	Persentase literasi kesejarahan dan tradisi	%	53,55	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
		Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya berperingkat Nasional	%	13,6	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan
		Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya berdayaguna	%	16,12	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan , Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
		Meningkatnya Tata Kelola Layanan Museum	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsit a Kelas A
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERPUSTAKAA N						
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar	Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional	%	45,27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Nasional Perpustakaan	Perpustakaan (SNP)			
		Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
		Meningkatnya koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	%	9,43	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEARSIPAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi, Perangkat Daerah dan LKD Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupate n/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	44,74	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
		Meningkatnya Kelestarian Arsip Statis sebagai Memori Kolektif Bangsa	Persentase pengelolaan arsip statis provinsi	%	79,15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
		Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase peningkatan perangkat daerah yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	%	66,67	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
		Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase pemulihan arsip akibat bencana	%	20,34	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
		Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase peningkatan arsip	%	11,4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			yang diselamatkan melalui alih media			Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
		Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat dan Lahan Kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang Difasilitasi Teknologi	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	%	50,17	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Meningkatnya Dokumen IKRL (Informasi Kesesuaian Ruang Laut) yang Diterbitkan	Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	%	25	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	0,07	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	0,16	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	0,19	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	354029	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPN Tegalsari Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Asemdayong Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			Perikanan Pantai Asemdayong			Pantai Asemdayong Kelas B
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Wonokerto Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan PPP Klidanglor Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Tawang Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Morodemak Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	91	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPN Tasikagung Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Nusantara Tasikagung	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Karimunjawa Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Lohgending Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A
		Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Larangan Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Penanganan Hama, Penyakit Ikan dan lingkungan	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
		Meningkatnya Produksi Ikan Konsumsi	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	%	5	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	600000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	%	70	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	17	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	72	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di	Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja	%	61	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur			Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	17	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
		Meningkatnya dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
		Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita /tahun	17,71	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA						
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
		Meningkatnya daya tarik pada destinasi pariwisata pada setiap wilayah pengembangan (WP)	Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	10	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	75348282	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pemasaran Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
		Meningkatnya Kabupaten/Kota yang Ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	Kabupate n/Kota	1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Ekonomi Kreatif
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
		Meningkatnya SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi Kompetensi	%	3,3	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata
		Meningkatnya SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Kompetensi	%	4,3	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Padi	Ton	9380811	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Jagung	Ton	3301024	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Kedelai	Ton	52790	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Bawang Merah	Ton	617015	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Cabai	Ton	456621	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Tanaman Buah dan Tanaman Obat	Ton	392201	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Kopi	Ton	26875	Dinas Pertanian dan Pernakan - Bidang Perkebunan
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Tebu	Ton	3674236	Dinas Pertanian dan Pernakan - Bidang Perkebunan
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Kelapa	Ton	166955	Dinas Pertanian dan Pernakan - Bidang Perkebunan
		Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi ternak	(ST)/(AU)	6135083	Dinas Pertanian dan Pernakan - Bidang Pernakan
		Meningkatnya peredaran obat hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	Persentase peredaran obat hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	%	81	Dinas Pertanian dan Pernakan - Bidang Veteriner
		Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman pangan	%	100	Dinas Pertanian dan Pernakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman perkebunan	%	100	Dinas Pertanian dan Pernakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman hortikultura	%	100	Dinas Pertanian dan Pernakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman pangan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	Dinas Pertanian dan Pernakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman hortikultura di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	Dinas Pertanian dan Pernakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman perkebunan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	Dinas Pertanian dan Pernakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
		Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai	%	100	Dinas Pertanian dan Pernakan - Balai Benih Pertanian Wilayah

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			Benih Pertanian Wilayah Surakarta			Surakarta Kelas A
		Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	%	100	Dinas Pertanian dan Pternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
		Meningkatnya Produksi dan Distribusi Semen Beku	Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	1	Dinas Pertanian dan Pternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	%	1	Dinas Pertanian dan Pternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya produksi ternak ruminansia penghasil susu	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia penghasil susu	%	1	Dinas Pertanian dan Pternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya produksi ternak non ruminansia penghasil telur	Persentase peningkatan produksi ternak non ruminansia penghasil telur	%	1	Dinas Pertanian dan Pternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
		Meningkatnya Pengembangan Mekanisasi dan modernisasi Pertanian	Persentase capaian alsintan dan pengelola alsintan yang diawasi	%	3	Dinas Pertanian dan Pternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
		Meningkatnya Pengembangan Mekanisasi dan modernisasi Pertanian	Persentase alsintan yang direkayasa dan dikembangkan	%	100	Dinas Pertanian dan Pternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
		Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana sarana pertanian	%	1	Dinas Pertanian dan Pternakan - Bidang Prasarana dan Sarana
		Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana peternakan	%	5	Dinas Pertanian dan Pternakan - Bidang Prasarana dan Sarana

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
		Menurunnya jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	Persentase penurunan jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	%	1	Dinas Pertanian dan Pernakan - Bidang Veteriner
		Meningkatnya Unit Usaha Yang Bersertifikat NKV	Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV	%	30	Dinas Pertanian dan Pernakan - Bidang Veteriner
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Layanan Veteriner	%	100	Dinas Pertanian dan Pernakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	%	20	Dinas Pertanian dan Pernakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Perkebunan	%	10	Dinas Pertanian dan Pernakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan	%	5	Dinas Pertanian dan Pernakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Perkebunan	%	5	Dinas Pertanian dan Pernakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura	%	10	Dinas Pertanian dan Pernakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
		Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura	%	5	Dinas Pertanian dan Pernakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Menguatnya kelembagaan petani	Persentase kelembagaan petani yang terfasilitasi	%	0,2	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan
		Menguatnya Kelembagaan Peternak	Persentase peningkatan fasilitas kelembagaan dan kemitraan peternak	%	1,25	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan
		Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Pertanian	Persentase SDM pertanian yang dilatih	%	100	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
		Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	21,96	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan
		Meningkatnya penanganan lahan kritis	Persentase lahan kritis tertangani	%	0,11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Meningkatnya perlindungan hutan	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK I	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK I	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK II	Persentase lahan kritis tertangani CDK 2	%	0,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK II	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 2	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK III	Persentase lahan kritis tertangani CDK 3	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK III	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 3	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK IV	Persentase lahan kritis tertangani CDK 4	%	0,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK IV	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 4	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK V	Persentase lahan kritis tertangani CDK 5	%	0,08	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK V	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 5	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK VI	Persentase lahan kritis tertangani CDK 6	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK VI	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 6	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK VIII	Persentase lahan kritis tertangani CDK 8	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK IX	Persentase lahan kritis tertangani CDK 9	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK IX	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 9	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK X	Persentase lahan kritis tertangani CDK 10	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK X	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan -

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			(gukamhut) yang ditangani CDK 10			CDK WILAYAH X
		Meningkatnya bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	Persentase bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK XI	Persentase lahan kritis tertangani CDK 11	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK XI	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 11	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK VII	Persentase lahan kritis tertangani CDK 7	%	0,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
		Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK VII	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 7	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
		Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%	5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Terkelolanya Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura dinilai oleh Kementerian Kehutanan	Angka	73	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Terselenggaranya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2,5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK I	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 1	%	0,3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK II	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 2	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK III	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 3	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK IV	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 4	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK V	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 5	%	0,3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK VI	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 6	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK VIII	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 8	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK IX	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 9	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK X	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 10	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK XI	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 11	%	0,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK VII	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 7	%	0,3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
		Terkelolanya Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
		Menurunnya pengambilan air tanah di Jawa Tengah	Persentase Pengambilan Air Tanah di Jawa Tengah	%	27,58	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Geologi dan Air Tanah
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Solo	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	2,98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Kendeng Muria	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	3,3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Serayu Utara	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1,58	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Serayu Selatan	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1,98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Menurunnya pengambilan air	Persentase pengambilan air	%	3,95	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral -

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		tanah di Wilayah Slamet Utara	tanah Wilayah Slamet Utara			Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Kendeng Selatan	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2,27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Slamet Selatan	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2,6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Terpenuhinya pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Semarang - Demak	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	6,99	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Merapi	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2,65	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Serayu Tengah	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1,49	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Mineral dan Batubara
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral -

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan			Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Slamet Selatan	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Terpenuhinya pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang - Demak	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	%	72,9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM	972,99	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM	179,64	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	SBM	26,08	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	144,05	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	SBM	57,95	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	SBM	45,11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	SBM	98,93	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	SBM	165,42	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang - Demak	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang - Demak	SBM	127,91	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	SBM	28,97	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	SBM	98,93	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	43,02	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Ketenagalistrikan
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo	%	43,11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Kendeng Muria	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Muria	%	43,13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Serayu Utara	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Utara	%	43,11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Serayu Selatan	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Selatan	%	43,13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Slamet Utara	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Utara	%	43,07	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan	%	43,1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan	%	43,11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak	%	42,31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi	%	43,03	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah	%	43,07	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERDAGANGA N						
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
		Meningkatnya jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA Jawa Tengah	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah	%	9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan	%	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
		Terjaganya stabilisasi harga dan stok barang di pasar	Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau	%	0,52	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
		Meningkatnya Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB ADHB	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	11,12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
		Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen	Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen	%	1,05	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
		Meningkatnya layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	%	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
		Meningkatnya nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERINDUSTRI AN						
	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
		Meningkatnya pertumbuhan jumlah pelaku usaha indutri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	%	6,23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pemberdayaan Industri
		Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi indutri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%	2,41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri
		Meningkatnya pelayanan sektor industri	Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	%	10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
		Meningkatnya pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A
		Meningkatnya peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	86	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4,4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
		Meningkatnya Industri yang diterbitkan rekomendasi Perijinan dan Dilakukan Pengawasan	Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
		Meningkatnya industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
		Meningkatnya penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	%	2,06	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya pelatihan transmigrasi terhadap penempatan transmigrasi	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian	%	1,2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					
		Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya	%	71	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			dalam kategori tinggi			
		Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	91,43	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif	%	92	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	%	59,52	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	71,42	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat	%	71,43	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	93	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas	%	39,21	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah				DAERAH DAN KERJA SAMA
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	%	85	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTER AAN RAKYAT
		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan Non dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	%	85	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTER AAN RAKYAT
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan Fasilitas Keagamaan dalam kondisi baik	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	63	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTER AAN RAKYAT
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Indeks Reformasi Hukum	Angka	92	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	%	96	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
		Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum	Capaian Pemberian Bantuan Hukum	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
		Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Angka	86	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
		Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian makro	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	80	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMI AN
		Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian mikro	Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	85	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMI AN
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup	%	85	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMI AN

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral	Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral	%	85	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMI AN
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	%	87	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMI AN
		Meningkatnya Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	%	1,95	Sekretariat Daerah - BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATA N ASET DAERAH
		Meningkatnya Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	%	2,3	Sekretariat Daerah - BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATA N ASET DAERAH
		Meningkatnya capaian kinerja BLUD	Persentase nilai kemandirian BLUD	%	55	Sekretariat Daerah - BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATA N ASET DAERAH
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	92	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	85	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Meningkatnya Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM	Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	%	83	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan Kewilayahan	Persentase realisasi bantuan keuangan	%	86	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNA N
		Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	%	86,5	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNA N
		Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan	%	100	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNA N

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Pembangunan Daerah	Daerah yang di usulkan			
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan daerah	Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	%	90	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNA N
SEKRETARIAT DPRD						
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
		Meningkatnya Fasilitas Layanan Kehumasan	Nilai survei kepuasan layanan kehumasan	Angka	75	Sekretariat DPRD - Bagian Hubungan Masyarakat
		Meningkatnya Fasilitas Layanan Persidangan	Nilai survei kepuasan layanan persidangan	Angka	75	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan
PERENCANAA N						
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah dengan Nasional	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	80,31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
		Meningkatnya Perencanaan daerah yang berbasis data, hasil evaluasi dan risiko	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	%	87,29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
		Meningkatnya Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah dengan Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah Dengan Kinerja Daerah	%	98,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
		Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian perencanaan sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	89,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	99,07	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	80,49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	76,59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	85,76	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	97,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	99,29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	87,03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	83,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
KEUANGAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
		Tersusunnya dokumen belanja transfer APBD Provinsi tepat waktu	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Tersusunnya dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah	Persentase Penetapan APBD Provinsi Tepat Waktu	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran
		Tersusunnya dokumen APBD Kabupaten/Kota tepat waktu	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran
		Tersusunnya LKPD tepat waktu	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi
		Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	Persentase pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
		Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
		Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Kenaikan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	%	50,5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
		Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat Administrasi BMD yang Andal	%	70,5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
		Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
		Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	%	9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Perencanaan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			Pendapatan Daerah			dan Pengembangan Pendapatan
		Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
		Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
		Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	Persentase Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengendalian dan Evaluasi
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Daerah Semarang III
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Daerah Purwodadi
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Daerah Wonogiri
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Daerah Rembang
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
		Tercapainya Pendapatan Pajak	Persentase Capaian	%	100	Badan Pengelola

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah UPPD Pemalang	Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang			Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						Pendapatan Daerah Cilacap
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
		Tercapainya Pendapatan Pajak	Persentase Capaian	%	100	Badan Pengelola

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah UPPD Kebumen	Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen			Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
		Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
		Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
		Terlaksananya pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	%	100	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
KEPEGAWAIAN						
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN	%	85	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi
		Terpenuhinya Jabatan ASN sesuai dengan Manajemen Talenta	Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta	%	92	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi
		Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	10	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja
		Meningkatnya kinerja ASN	Persentase peningkatan kinerja ASN	%	85	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja
		Terpenuhinya kebutuhan ASN sesuai formasi	Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi	%	100	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
		Meningkatnya akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	%	70	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
		Terpetakannya kompetensi ASN	Persentase pemetaan kompetensi ASN	%	100	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
		Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi teknis	Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	95,5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
		Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	95,5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase tingkat kelulusan pengembangan kompetensi manajerial, sosiokultural dan pemerintahan dalam negeri	%	95,5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri
		Terjaganya kualitas mutu pelaksanaan pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)	Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)	Angka	3,5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
		Terjaganya kualitas perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
		Terpenuhinya persentase ASN yang lulus Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN lulus dan tersertifikasi kompetensi	%	50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					
		Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase Pengkajian Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi sesuai prioritas Daerah	%	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan riset dan inovasi sesuai target	Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi sesuai target	Persentase Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kapasitas SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi sesuai kebutuhan	Persentase Peningkatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sesuai kebutuhan	%	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi
PENGELOLAA N PENGHUBUN G						
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
		Tercapainya pelaksanaan pelayanan penghubung	Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan penghubung	%	100	Badan Penghubung - Sekretariat
INSPEKTORAT DAERAH						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
		Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	96,23	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan khusus	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Khusus	%	100	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS
		Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
		Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang akuntabilitas keuangan daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	100	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
		Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan kinerja perangkat daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	%	100	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya kapabilitas pengelolaan pengendalian korupsi di perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan IEPK level 3	%	35,71	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya penguatan integritas di perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang memperoleh predikat Zona Integritas	%	42,85	INSPEKTORAT - Sekretariat
		Meningkatnya penguatan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB lebih dari (>) 80	%	61,9	INSPEKTORAT - Sekretariat
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
		Meningkatnya pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Indeks Aktualisasi Pancasila	Angka	76,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
		Terjaminnya hak-hak sipil dan hak-hak politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan	Angka	88,11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri
		Meningkatnya kinerja dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Angka	80,47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
		Meningkatnya peran strategis ormas dan kemandirian ormas dalam mendukung pembangunan	Indeks Kinerja Ormas	Angka	78,26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya

URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
						dan Organisasi Kemasyarakatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
		Meningkatnya moderasi beragama di masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	75,4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
		Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perekonomian	Indeks ketahanan Ekonomi	Angka	2,89	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
		Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam rangka penanganan konflik sosial serta menjaga kondusifitas wilayah	Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Sumber: Bappeda, 2025.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 yang memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029. RKPD Tahun 2026 ini juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025 – 2045, RPJMN Tahun 2025 - 2029 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045. Serangkaian program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2026 disusun secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result*, berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2026 mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

RKPD Tahun 2026 akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026. Kebijakan dalam RKPD Tahun 2026 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2026 untuk mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD Tahun 2026 juga menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026, serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk di dalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah Jawa Tengah. Sinergi dari berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut diharapkan akan mendukung tercapainya cita-cita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD
TAHUN 2024

DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026



RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

[EVALUASI PELAKSANAAN
RKPD TAHUN 2024]



buku II

www.bappeda.jatengprov.go.id
COPYRIGHT 2025

**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL.....	3
BUKU II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024	1
2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama.....	1
2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah.....	2
2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program	14
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	14
1. Urusan Pendidikan	14
2. Kesehatan.....	29
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50
5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat..	52
6. Sosial.....	54
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	61
1. Tenaga Kerja.....	61
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	64
3. Pangan.....	68
4. Pertanahan	70
5. Lingkungan Hidup	71
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	76
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	77
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	79
9. Perhubungan	81
10. Komunikasi dan Informatika	87
11. Koperasi dan UKM	88
12. Penanaman Modal	90
13. Kepemudaan dan Olahraga	92
14. Statistik	93
15. Persandian.....	94
16. Kebudayaan.....	95
17. Perpustakaan.....	97
18. Kearsipan	98
C. Urusan Pilihan	99

1. Perikanan dan Kelautan.....	99
2. Pariwisata	105
3. Pertanian	107
4. Kehutanan.....	115
5. Energi dan Sumber Daya Mineral.....	125
6. Perdagangan	133
7. Perindustrian.....	137
8. Transmigrasi.....	139
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	140
1. Sekretariat Daerah.....	140
2. Sekretariat DPRD.....	145
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	146
1. Perencanaan	146
2. Keuangan	148
3. Kepegawaian.....	174
4. Pendidikan dan Pelatihan.....	175
5. Penelitian dan Pengembangan.....	177
6. Penghubung.....	178
F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	178
G. Unsur Pemerintahan Umum.....	180
H. Non Urusan	182

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	1
Tabel 2. 2	Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	2
Tabel 2. 3	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	14
Tabel 2. 4	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan.....	29
Tabel 2. 5	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37
Tabel 2. 6	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50
Tabel 2. 7	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	52
Tabel 2. 8	Capaian Kinerja Urusan Sosial	54
Tabel 2. 9	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja.....	61
Tabel 2. 10	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	64
Tabel 2. 11	Capaian Kinerja Urusan Pangan	68
Tabel 2. 12	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan.....	70
Tabel 2. 13	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup.....	71
Tabel 2. 14	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	76
Tabel 2. 15	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..	77
Tabel 2. 16	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	79
Tabel 2. 17	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	81
Tabel 2. 18	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.....	87
Tabel 2. 19	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM	88
Tabel 2. 20	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal	90
Tabel 2. 21	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	92
Tabel 2. 22	Capaian Kinerja Urusan Statistik	93
Tabel 2. 23	Capaian Kinerja Urusan Persandian.....	94
Tabel 2. 24	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan.....	95
Tabel 2. 25	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan.....	97
Tabel 2. 26	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan	98
Tabel 2. 27	Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan	99
Tabel 2. 28	Capaian Kinerja Pariwisata	105
Tabel 2. 29	Capaian Kinerja Urusan Pertanian	107
Tabel 2. 30	Capaian Kinerja Kehutanan	115
Tabel 2. 31	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	125

Tabel 2. 32	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan	133
Tabel 2. 33	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	137
Tabel 2. 34	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi.....	139
Tabel 2. 35	Capaian Kinerja Sekrateriat Daerah	140
Tabel 2. 36	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	145
Tabel 2. 37	Capaian Kinerja Perencanaan	146
Tabel 2. 38	Capaian Kinerja Keuangan	148
Tabel 2. 39	Capaian Kinerja Kepegawaian	174
Tabel 2. 40	Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan	175
Tabel 2. 41	Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan	177
Tabel 2. 42	Capaian Kinerja Penghubung	178
Tabel 2. 43	Capaian Kinerja Pengawasan	178
Tabel 2. 44	Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum.....	180
Tabel 2. 45	Capaian Kinerja Non Urusan.....	182

BUKU II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024

2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Capaian Indikator Kinerja			Skala	Perangkat Daerah Koordinator
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	45,82	45,2	98,65	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Angka Kemiskinan	%	9,76-8,96	9,58	101,88	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3	Rasio Gini	Angka	0,364	0,364	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70 - 5,50	4,94	105,74	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
5	Inflasi	%	2,5 ± 1	1,64	164,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,00 - 4,30	4,78	123,92	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,45	112,98	105,15	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,43	73,87	100,60	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	61,13	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,03	93,00	99,97	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	58,2	63,9	109,79	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,55	69,46	102,83	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
13	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4	8,62	215,50	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,5	85,36	104,74	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90%

Sedang : 66 % ≤ 75 %

Rendah : 51 % ≤ 65 %

Sangat Rendah : ≤ 50 %

Sampai dengan tahun 2024, dari 14 (empat belas) IKU Daerah dari 14 indikator tersebut yang berskala sangat tinggi sebanyak 13 indikator dan 1 indikator berskala NA dikarenakan data belum rilis.

2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah

Capaian indikator kinerja daerah merupakan capaian indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

Tabel 2. 2
Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P- RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	45,82	45,2	98,65	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Angka Kemiskinan	%	9,76-8,96	9,58	101,88	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3	Rasio Gini	Angka	0,364	0,364	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70 - 5,50	4,95	105,32	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
5	Inflasi	%	2,5 ± 1	1,64	152,44	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,00 - 4,30	4,78	104,60	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,45	112,98	105,15	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,43	73,87	100,60	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	61,13	n.a	n.a	n.a	Sekretariat Daerah
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,03	93	99,97	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	58,2	63,9	109,79	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
B	Aspek Pelayanan Umum						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P- RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar						
	Pendidikan						
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,94	12,86	99,38	Sangat Tinggi	DISDIKBUD
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,08	8,02	99,26	Sangat Tinggi	DISDIKBUD
	Kesehatan						
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,74	74,91	100,23	Sangat Tinggi	DINKES
2	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2	2	100,00	Sangat Tinggi	DINKES
3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	%	60	71,42	119,03	Sangat Tinggi	DINKES
4	Persentase ketercapaian intervensi spesifik dalam penurunan stunting	%	80	80	100,00	Sangat Tinggi	DINKES
5	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa	%	78	78,17	100,22	Sangat Tinggi	DINKES
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	DINKES
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar	%	49,89	49,89	100,00	Sangat Tinggi	DINKES
8	Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	87	88,24	101,43	Sangat Tinggi	RSUD Moewardi
9	Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	90	91,64	101,82	Sangat Tinggi	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P- RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
10	Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	91,11	91,11	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Tugurejo
11	Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo	%	88	92,03	104,58	Sangat Tinggi	RSUD Kelet Donorejo
12	Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo	%	98	98,75	100,77	Sangat Tinggi	RSJD Amino Gondohutomo
13	Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	98,17	96,92	98,72	Sangat Tinggi	RSJD Surakarta
14	Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi	%	98	98,88	100,90	Sangat Tinggi	RSJD Dr Soedjarwadi
15	Persentase capaian SPM di RS Mata	%	0	n.a	n.a	n.a	RS Mata
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap	%	91,29	91,46	100,19	Sangat Tinggi	PU BMCK
2	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	44,48	47,09	105,87	Sangat Tinggi	PU BMCK
3	Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%	83,83	84,53	101,38	Sangat Tinggi	PU BMCK
4	Persentase akses air minum aman	%	40,43	40,86	101,06	Sangat Tinggi	PU BMCK
5	Persentase akses air limbah domestik aman	%	10,97	9,72	88,61	Tinggi	PU BMCK
6	Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	49,42	49,42	100,00	Sangat Tinggi	PU BMCK
7	Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	61,78	61,78	100,00	Sangat Tinggi	PUSDATARU
8	Persentase keterwujudan penataan ruang	%	61,57	61,57	100,00	Sangat Tinggi	PUSDATARU

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P- RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	%	29,69	31,76	106,97	Sangat Tinggi	DISPERAKIM
2	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	20,14	20,33	100,94	Sangat Tinggi	DISPERAKIM
3	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	41,68	36,4	87,33	Tinggi	DISPERAKIM
	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	82	84,07	102,52	Sangat Tinggi	SATPOLPP
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,74	0,75	101,35	Sangat Tinggi	BPBD
	Sosial						
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	2,46	2,46	100,00	Sangat Tinggi	DINSOS
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
	Tenaga Kerja						
1	Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28,6	29,86	104,41	Sangat Tinggi	DISNAKERT RANS
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	62,85	68,57	109,10	Sangat Tinggi	DISNAKERT RANS
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Juta Rp	56	55,47	99,05	Sangat Tinggi	DISNAKERT RANS
4	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	9,24	13,65	147,73	Sangat Tinggi	DISNAKERT RANS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P- RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	71,04	73,66	103,69	Sangat Tinggi	DISNAKERT RANS
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	91,07	91,07	100,00	Sangat Tinggi	DISNAKERT RANS
7	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	81,53	81,51	99,98	Sangat Tinggi	DISNAKERT RANS
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	40	40	100,00	Sangat Tinggi	PPPADUKKB
2	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4,25	4,25	100,00	Sangat Tinggi	PPPADUKKB
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	66	64,34	97,48	Sangat Tinggi	PPPADUKKB
	Pangan						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83	85,34	102,82	Sangat Tinggi	DISHANPAN
	Pertanahan						
1	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	DISPERAKIM
2	Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	DISPERAKIM
	Lingkungan Hidup						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P- RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
1	Indeks Kualitas Air	Angka	50,66	52,03	102,70	Sangat Tinggi	DLHK
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	85,01	87,73	103,20	Sangat Tinggi	DLHK
3	Indeks Pencemaran Air	Angka	3,37	3,35	100,59	Sangat Tinggi	DLHK
4	Indeks SO2 dan NO2	Angka	0,37	0,32	115,56	Sangat Tinggi	DLHK
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	4	4	100,00	Sangat Tinggi	DISPERMASD ESDUKCAPIL
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah	%	0,7318	0,75	102,49	Sangat Tinggi	DISPERMASD ESDUKCAPIL
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,13	2,03	104,93	Sangat Tinggi	PPPADUKKB
	Perhubungan						
1	Indeks pelayanan transportasi	Angka	6,05	6,12	101,16	Sangat Tinggi	DISHUB
2	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,38	0,4	105,26	Sangat Tinggi	DISHUB
3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	16,098	16,1	100,01	Sangat Tinggi	DISHUB
4	<i>On time performance</i> layanan transportasi	%	83,22	84,6	101,66	Sangat Tinggi	DISHUB
	Komunikasi dan Informatika						
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,07	4,42	143,97	Sangat Tinggi	DISKOMINFO

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P- RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	12,53	14,90	118,91	Sangat Tinggi	DINKOP UKM
2	Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah	%	0,29	0,94	324,14	Sangat Tinggi	DINKOP UKM
3	Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	7,16	7,21	100,70	Sangat Tinggi	DINKOP UKM
	Penanaman Modal						
1	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4	14,83	370,75	Sangat Tinggi	DPMPPTSP
2	Persentase realisasi PMA dan PMDN	%	100	110,41	110,41	Sangat Tinggi	DPMPPTSP
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	97,13	107,92	Sangat Tinggi	DPMPPTSP
	Kepemudaan dan Olahraga						
1	Sport Development Index (SDI)	%	0,42	0,40	95,56	Sangat Tinggi	DISPORAPAR
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	56,85	58,33	102,60	Sangat Tinggi	DISPORAPAR
	Statistik						
1	Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	%	32	32	100,00	Sangat Tinggi	DISKOMINFO
	Persandian						
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	636	637	100,16	Sangat Tinggi	DISKOMINFO
	Kebudayaan						
1	Angka Melek Budaya	%	52,32	52,61	100,55	Sangat Tinggi	DISDIKBUD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P- RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Perpustakaan						
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	14,08	15,14	107,53	Sangat Tinggi	ARPUS
	Kearsipan						
1	Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	94	96,07	102,20	Sangat Tinggi	ARPUS
	Urusan Pilihan						
	Kelautan dan Perikanan						
1	Produksi perikanan	Ton	927.350	968.353,8	104,42	Sangat Tinggi	DKP
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	105	101,4	96,57	Sangat Tinggi	DKP
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	Angka	110	107,35	97,59	Sangat Tinggi	DKP
	Pariwisata						
1	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	8,01	9,56	119,35	Sangat Tinggi	DISPORAPAR
2	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	1.686.000 .000.000	3.630.000. 000.000	215,30	Sangat Tinggi	DISPORAPAR
	Pertanian						
1	Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	%	3	1,06	35,33	Sangat Rendah	DISNAKESWAN
2	Nilai Tukar Petani Peternakan	Angka	100,5	98,93	98,44	Sangat Tinggi	DISNAKESWAN
3	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0,58	0,96	165,52	Sangat Tinggi	DISTANBUN
4	NTP Tanaman Pangan	Angka	105,19	115,29	109,60	Sangat Tinggi	DISTANBUN
5	NTP Hortikultura	Angka	108,11	117,28	108,48	Sangat Tinggi	DISTANBUN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P- RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
6	NTP Perkebunan Rakyat	Angka	100,59	118,07	117,38	Sangat Tinggi	DISTANBUN
	Kehutanan						
1	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	42,45	48,37	113,95	Sangat Tinggi	DLHK
2	Luas tutupan lahan	Ha	1.022.457	1.022.457	100,00	Sangat Tinggi	DLHK
	Energi dan Sumber Daya Mineral						
1	Presentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	18,41	18,55	100,76	Sangat Tinggi	ESDM
2	Tingkat konsumsi tenaga listrik	kWh/kapita	768,1	802,05	104,42	Sangat Tinggi	ESDM
3	Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3,6	3,65	101,39	Sangat Tinggi	ESDM
4	Persentase penerapan <i>Good Mining Practice</i>	%	53	63,37	119,57	Sangat Tinggi	ESDM
	Perdagangan						
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4,51	4,16	92,24	Sangat Tinggi	DISPERINDAG
	Perindustrian						
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3,25	3,52	108,31	Sangat Tinggi	DISPERINDAG
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
	Sekretariat Daerah						
1	Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36,1	39,93	110,61	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
2	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	80	86,3	107,88	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P- RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
3	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	96,83	107,59	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
4	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	93,72	104,13	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
	Sekretariat DPRD						
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	90	91,68	101,87	Sangat Tinggi	SETWAN
2	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	%	75	76,87	102,49	Sangat Tinggi	SETWAN
3	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	%	75	75	100,00	Sangat Tinggi	SETWAN
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
	Perencanaan						
1	Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BAPPEDA
2	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BAPPEDA
3	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BAPPEDA
	Kuangan						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P- RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
1	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%	13,09	13,53	103,36	Sangat Tinggi	BAPPENDA
2	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%	-7,67	23,72	309,26	Sangat Tinggi	BAPPENDA
3	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	97,75	97,75	100,00	Sangat Tinggi	BPKAD
4	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	84,02	84,02	100,00	Sangat Tinggi	BPKAD
	Kepegawaian						
1	Indeks Sistem Merit	Angka	0,86	0,86	100,00	Sangat Tinggi	BKD
	Pendidikan dan Pelatihan						
1	Indeks Kompetensi ASN	Angka	3,07	3,29	107,17	Sangat Tinggi	BPSDM
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	8,67	65,09	750,75	Sangat Tinggi	BPSDM
3	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	BPSDM
	Penelitian dan Pengembangan						
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	72,5	72,85	100,48	Sangat Tinggi	BRIDA
	Pengelolaan Penghubung						
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	85	86	101,18	Sangat Tinggi	BANHUB
	Unsur Pengawasan Pemerintahan						
1	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
2	Level kapabilitas APIP	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
	Unsur Pemerintahan Umum						
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,745	3,025	110,20	Sangat Tinggi	BAKESBANG POL
C	Aspek Daya Saing						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,55	69,46	102,83	Sangat Tinggi	DLHK
2	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4	8,64	216,00	Sangat Tinggi	BPBD
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	81,5	85,36	104,74	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Capaian indikator kinerja daerah ditunjukkan dengan indikator yang berjumlah 126 indikator yang terbagi dalam 3 aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Tingkat ketercapaian pada 3 Aspek diatas sebanyak 126 indikator dengan skala capaian Sangat Tinggi sebanyak 121 indikator, Tinggi sebanyak 2 indikator, dan Sangat Rendah 1 indikator dan 2 indikator berstatus n.a dikarenakan data belum rilis. 1 Indikator yang berskala sangat rendah yaitu : Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan dikarenakan Turunnya jumlah pemotongan (di dalam RPH dan luar RPH) dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2023, dari sebagian besar ternak besar seperti komoditas sapi, kerbau, kambing dan domba.

2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	%	65,00	86,71	133,40	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	Angka	1,00	1,14	114,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
	Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	67,78	74,40	109,77	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	%	50,00	11,50	23,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
	Persentase angka putus sekolah SMA	%	2,30	1,10	209,09	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase angka putus sekolah SMK	%	0,026	2,69	0,97	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	%	60,00	76,63	127,72	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	Angka	0,55	1,05	190,91	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	%	57,35	20,18	35,19	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
	Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	50,35	49,64	98,59	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
	Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	%	10,53	18,09	171,79	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
	Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	Angka	1,00	0,81	81,00	Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	10,00	24,82	248,20	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	%	68,18	76,92	112,82	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase angka putus sekolah SLB	%	3,53	4,49	78,62	Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	%	80,30	80,30	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Ketenagaan Dikbud
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	%	10,00	10,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
	Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	%	10,00	10,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Dan Kebudayaan Kelas A
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	1,67	13,22	791,62	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi minimal akreditasi B CABDIN I	%	83,74	86,34	103,10	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	%	90,54	84,90	93,77	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	%	76,59	70,73	92,35	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	1,00	3,74	374,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	%	40,11	63,25	157,69	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							PENDIDIKAN II
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	2,87	13,21	460,28	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	%	69,80	70,41	100,87	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	%	75,57	78,52	103,90	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	%	73,28	75,07	102,44	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	1,25	1,44	115,20	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	%	76,60	68,32	89,19	Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	1,92	14,94	778,13	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	%	78,70	100,99	128,32	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	%	93,71	82,73	88,28	Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	%	79,86	80,79	101,16	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	90,00	6,32	7,02	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	%	90,00	79,82	88,69	Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Persentase capaian prestasi peserta	%	2,74	6,32	230,66	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII						- CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	%	85,55	93,09	108,81	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	%	72,83	109,26	150,02	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	%	77,11	86,78	112,54	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	2,20	18,68	849,09	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	%	76,12	95,54	125,51	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	3,22	12,36	383,85	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	%	79,00	88,14	111,57	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	%	54,59	81,22	148,78	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	%	77,81	89,04	114,43	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	28,57	5,46	19,11	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	%	84,74	77,01	90,88	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	%	87,73	76,75	87,48	Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Persentase capaian prestasi peserta	%	3,63	2,30	63,36	Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI						- CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	%	44,94	75,32	167,60	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	1,96	6,03	307,65	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	%	80,00	80,54	100,68	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	%	81,00	79,25	97,84	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	%	88,25	89,51	101,43	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
	Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	2,52	6,61	262,30	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	%	79,00	84,91	107,48	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	Angka	89,06	88,51	99,38	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	Angka	81,22	80,12	98,65	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	Angka	83,27	82,80	99,44	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	Angka	81,77	80,96	99,01	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	Angka	88,34	88,19	99,83	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	Angka	86,49	85,93	99,35	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	Angka	88,83	83,83	94,37	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	Angka	89,03	88,10	98,96	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	Angka	85,85	86,04	100,22	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	Angka	82,21	70,49	85,74	Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	Angka	83,27	82,47	99,04	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	Angka	85,30	84,58	99,16	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							- CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
	Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	Angka	86,06	84,92	98,68	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
	Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	%	76,20	76,20	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Ketenagaan Dikbud
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	%	15,00	95,65	637,67	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	%	93,93	89,74	95,54	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
	Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	%	100,00	50,00	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P- RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	3,00	10,00	333,33	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	100,00	10,71	10,71	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	100,00	25,81	25,81	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	10,00	14,81	148,10	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	7,00	83,33	1.190,43	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	100,00	50,00	50,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	100,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	25,00	11,00	44,00	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	1,96	5,41	276,02	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	4,76	11,76	247,06	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	100,00	57,44	57,44	Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	100,00	22,58	22,58	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 87 indikator kinerja dengan 66 indikator berskala sangat tinggi, 7 indikator berskala tinggi, 2 indikator berskala rendah dan 12 indikator berskala sangat rendah. 12 indikator yang berskala sangat rendah yaitu :

1. Persentase capaian prestasi peserta didik SMA dan SMK dikarenakan ketimpangan capaian prestasi peserta didik antar cabang dinas;
2. Persentase angka putus sekolah SMK dikarenakan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan masih rendah, karena masih berorientasi untuk memperoleh pekerjaan;
3. Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI dan SLB CABDIN X dikarenakan keikutsertaan lomba peserta didik dan raihan prestasi rendah;
4. Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus dikarenakan menyesuaikan usulan dari perizinan;
5. Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dari SLB CABDIN II, III, VI, VIII, IX dan XIII dikarenakan Usulan Perizinan berasal dari Kecamatan yang sudah berdiri SMA, SMK dan SLB sehingga tidak terhitung dalam indikator kinerja.

2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	%	34,28	37,14	108,34	Sangat Tinggi	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	%	51,42	71,42	138,9	Sangat Tinggi	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia	%	60	71,42	119,03	Sangat Tinggi	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	%	63,9	65,71	102,83	Sangat Tinggi	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian	%	63,9	65,71	102,83	Sangat Tinggi	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	penyakit tidak menular kesehatan jiwa						
	Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	66,6	66,60	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pelayanan Kesehatan
	Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	%	80	81,60	102,00	Sangat Tinggi	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	80	80,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42,85	42,85	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	%	57,14	57,14	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	%	71,42	71,42	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42,85	42,85	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	%	57,14	57,14	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	%	28,57	28,57	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan	%	28,57	28,57	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	skrining kesehatan remaja						
	Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	%	28,57	28,57	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	%	80	80,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
	Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	%	83	83,00	100,00	Sangat Tinggi	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Dr. Moewardi
	Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD dr. ADHYATMA, MPH

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD dr. ADHYATMA, MPH
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo	%	100	97,65	97,65	Sangat Tinggi	RSUD dr. REHATTA
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	%	95	100,00	105,26	Sangat Tinggi	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
	Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
	Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
	Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RS Khusus Mata	%	40	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Rumah Sakit Khusus Mata
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
	Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	80	85,70	107,13	Sangat Tinggi	Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	%	98	99,93	101,97	Sangat Tinggi	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	30	98	101,97	Sangat Tinggi	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih	%	20	98,00	326,67	Sangat Tinggi	Rumah Sakit Khusus Mata
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							
	Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	%	75	75,00	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sumber Daya Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
	Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	%	82,85	100,00	120,70	Sangat Tinggi	Bidang Kesehatan Masyarakat
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42,85	42,85	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam	%	28,57	28,57	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	peningkatan perilaku hidup sehat						
	Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42,85	42,85	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	57,14	57,14	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	28,57	28,57	100,00	Sangat Tinggi	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD dr. REHATTA
	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Surakarta	%	95	100,00	105,26	Sangat Tinggi	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
	Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RS Khusus Mata	%	50	100,00	200,00	Sangat Tinggi	Rumah Sakit Khusus Mata

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 53 indikator kinerja dengan skala sangat tinggi.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
	Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	%	61,31	61,31	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Irigasi dan Air Baku
	Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	64,31	64,31	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Irigasi dan Air Baku

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Indeks kinerja sistem irigasi	Angka	69,11	69,11	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Irigasi dan Air Baku
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	%	52,37	52,37	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Angka	62,68	62,68	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	34,78	34,78	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	53,26	53,26	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Pemali Comal
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Angka	71,8	71,8	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	54,6	54,6	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	%	50,04	50,04	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bodri Kuto
	Persentase ketersediaan dokumen	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bodri Kuto

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto						
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Angka	62,85	62,85	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	50	50	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Angka	67,34	67,35	100,01	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	77,78	77,78	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Bengawan Solo
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Angka	77,36	77,36	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	92,21	92,21	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Angka	72,65	72,65	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Serayu Citanduy
	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	76,5	76,5	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Serayu Citanduy
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Balai PSDA Serayu Citanduy
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
	Persentase akses air minum layak	%	91,92	92,29	100,40	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase akses air minum jaringan perpipaan	%	54,32	52,48	96,61	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya -

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase akses air limbah domestik layak	%	93,58	92,42	98,76	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	5,83	5,83	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	11,94	11,94	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
	Persentase panjang jalan yang dileger	%	75,79	75,79	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
	Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	47,5	48,31	101,71	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	%	41,68	45,76	109,79	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	%	93,57	93,65	100,09	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	%	77,37	77,53	100,21	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	%	91,44	91,93	100,54	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	%	86,19	87,05	101,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	%	91,86	91,91	100,05	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	%	87,57	88,38	100,92	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	%	99,95	93,31	93,36	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	%	85,51	91,56	107,08	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	%	94,17	92,2	97,91	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	%	93,65	75,17	80,27	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	%	91,61	92,55	101,03	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	%	94,9	92,88	97,87	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	%	88,12	88,11	99,99	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	%	93,82	87,68	93,46	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	%	86,78	89,6	103,25	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	%	91,18	68,19	74,79	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	%	93,17	91,57	98,28	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	%	94,78	91,56	96,60	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%	12,85	35,55	276,65	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengujian dan Peralatan
	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	31,88	31,88	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Pengujian dan Peralatan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	45,38	45,38	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	43,49	43,49	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Balai Jasa Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase implementasi pemanfaatan ruang	%	68	68	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Bidang Penataan Ruang
	Persentase tertib ruang	%	56	56	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Bidang Penataan Ruang
	Persentase ketersediaan rencana tata ruang	%	60,71	62,86	103,54	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Bidang Penataan Ruang
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Bodri Kuto

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Serang Lusi Juana
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Bengawan Solo
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang - Balai PSDA Serayu Citanduy.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 66 indikator kinerja. Sebanyak 64 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, dan 1 indikator berskala sedang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian indikator program sebagai berikut.

Tabel 2. 6
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
	Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	0,48	0,48	100	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	4,2	4,2	100	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	%	3,18	35,87	1.128,28	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman
	Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
	Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	%	40	40	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja dengan seluruh indikator berskala sangat tinggi.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 7
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
	Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum	%	29,57	29,57	100,00	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Pembinaan Masyarakat
	Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	%	67,15	102,19	152,18	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Persentase penegakan produk hukum daerah	%	80	80	100,00	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
	Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	%	40,03	40,03	100,00	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							
	Persentase kabupaten/kota yang melakukan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Pembinaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	pemetaan daerah rawan kebakaran						Satuan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
	Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0,12	0,17	141,67	Sangat Tinggi	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Persentase penanganan darurat bencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Penanganan Darurat
	Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	%	2	2	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Persentase kabupaten/kota yang mengaktifasi klaster logistik	%	2,86	2,86	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Logistik dan Peralatan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinerja dengan skala capaian Sangat Tinggi.

6. Sosial

Kinerja penyelenggaraan urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 8
Capaian Kinerja Urusan Sosial

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	7,7	7,7	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	%	1,92	1,92	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	0,07	0,07	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	0,07	0,07	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mandiri
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	0,08	0,08	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	0,1	0,1	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	0,06	0,06	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Cepiring

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0,06	0,06	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0,09	0,09	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0,05	0,05	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0,07	0,07	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0,09	0,09	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan	%	0,11	0,11	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Sosial Taruna Yodha						
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	0,08	0,08	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0,06	0,06	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0,12	0,12	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0,04	0,04	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Sudagaran
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	0,12	0,12	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	0,03	0,03	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0,11	0,11	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0,06	0,06	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0,11	0,11	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0,06	0,06	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0,11	0,11	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Sosial Margo Widodo						
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0,03	0,03	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	0,03	0,03	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0,04	0,04	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0,06	0,06	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	0,05	0,05	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	1,98	1,98	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	%	0,22	0,22	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin
PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
	Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 35 indikator kinerja dengan seluruh indikator berskala sangat tinggi.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan urusan Tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 9
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	62,85	68,57	109,10	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	38,14	38,14	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	4,4	4,53	102,95	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2,3	5,1	221,74	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	2,88	12,21	423,96	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	9,45	21,22	224,55	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	46,9	78,54	167,46	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A
	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	%	13,13	20	152,32	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							
	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	%	45,05	73,76	163,73	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	68,1	68,11	100,01	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	98	98,72	100,73	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49,75	49,75	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	44,27	44,33	100,14	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96,15	98,78	102,74	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN							
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan	%	89,58	89,91	100,37	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	perundangan bidang ketenagakerjaan						Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26,4	26,4	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan Kerja Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 16 indikator kinerja dengan dengan seluruh indikator berskala sangat tinggi. Indikator Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi, Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri, dan persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian memiliki capaian yang sangat tinggi (>200%) dikarenakan mendukung program penanggulangan kemiskinan ekstrem (P3KE).

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 10
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	%	60	80	133,33	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	%	11	28,57	259,73	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan	%	14,29	22,86	159,97	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	layanan kualitas keluarga terstandar						Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	14,29	22,86	159,97	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	25	25,71	102,84	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Sekretariat
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	%	82,85	100	120,7	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
	Rasio korban kekerasan terhadap anak	per 100.000 penduduk	11,5	11,15	103,14	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	Persentase korban kekerasan anak terlayani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinerja dengan seluruh indikator berskala sangat tinggi.

3. Pangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 11
Capaian Kinerja Urusan Pangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
	Rata-rata ketercukupan pangan	Angka	1,25	2	160,00	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Angka	0,064	0,65	1015,63	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Rasio cadangan pangan masyarakat	Angka	0,62	0,8	129,03	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	60	84	140,00	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	Angka	0,62	0,8	129,03	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun	87,8	87,8	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Panganekaragaman Konsumsi Pangan
	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/kapita/tahun	87,8	87,8	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Panganekaragaman

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							man Konsumsi Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
	Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	%	0,01	0,12	1200,00	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	80	94,59	118,24	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan
	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	%	80	91	113,75	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja dengan seluruh indikator berskala sangat tinggi.

4. Pertanahan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 12
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM							
	Persentase fasilitasi penetapan lokasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							
	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							
	Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 %

Tinggi : 76 % ≤ 90%

Sedang : 66 % ≤ 75 %

Rendah : 51 % ≤ 65 %

Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja, dengan seluruh dengan indikator berskala sangat tinggi.

5. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 13
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya	%	2,85	2,85	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase pengujian kualitas air	%	100	110,91	110,91	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	Persentase pemantauan kualitas udara	%	100	102,22	102,22	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	4,76	4,76	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)							
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	2,02	2,12	104,95	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden	%	2,6	2,6	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Baturraden Kelas B
PROGRAM PENGENDALIA N BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	80	80	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGA N DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
	Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	50	53,85	107,70	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penyuluhan, Penegakan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
	Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	%	10,5	10,5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	%	31,43	31,43	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
	Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	%	25	25	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
	Persentase sampah yang tertangani	%	42	40,87	97,31	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 16 indikator kinerja dan seluruh indikator berskala sangat tinggi.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 14
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	98	99,04	101,06	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
	Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%	%	80	94,29	117,86	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
	Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	16,67	16,67	100	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90%

Sedang : 66 % ≤ 75 %

Rendah : 51 % ≤ 65 %

Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja seluruh indikator berskala sangat tinggi.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 15
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA							
	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	%	27,4	27,4	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Penataan Desa
	Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	12,27	36,19	294,95	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja, seluruh indikator berskala sangat tinggi.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 16
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	%	61,11	75	122,73	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	%	65,58	65,50	99,88	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
	Unmetneed	%	10	9,3	107,52	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana,

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Advokasi, dan KIE
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	32	36,45	113,91	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja. seluruh indikator berskala sangat tinggi.

9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 17
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,38	0,38	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas
	Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Angka	0,981	0,99	100,92	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas
	Rasio trayek angkutan jalan	Angka	0,51	0,51	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan
	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	65,38	65,45	100,11	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan
	Rasio pemanfaatan terminal	Angka	0,218	0,22	100,92	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
	Rasio implementasi penetapan simpul dan	Angka	0,5	0,5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	jaringan transportasi strategis						dan Perkeretaapian
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,24	0,24	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,97	0,97	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,81	0,82	101,23	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,01	0,01	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang	Angka	0,97	0,97	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B						Wilayah II Kelas B
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,81	0,83	102,47	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,2	0,22	110,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,98	0,98	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,81	0,83	102,47	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Wilayah III Kelas A						
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,23	0,25	108,7	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,97	0,97	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,81	0,83	102,47	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,17	0,17	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada	Angka	0,98	0,98	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B						Wilayah V Kelas B
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,81	0,82	101,23	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,21	0,21	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,97	0,97	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,81	0,82	101,23	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Rasio konektivitas perkotaan	Angka	0,481	0,51	106,03	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah
	Persentase perpindahan moda angkutan umum	%	51,72	52,22	100,97	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							
	Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	Angka	0,31	0,33	106,45	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran
	Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Angka	0,2	0,2	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN							
	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,04	0,04	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 29 indikator kinerja, seluruh indikator kinerja berskala sangat tinggi.

10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 18
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
	Nilai survey kepuasan komunikasi publik	Angka	78	90,14	115,56	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Nilai keterbukaan informasi publik	Angka	31	31	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika - Bidang Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	72	72	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika - Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	%	15	15	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika - Bidang E-Government

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90 % Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja, seluruh indikator berskala sangat tinggi.

11. Koperasi dan UKM

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 19
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
	Persentase koperasi berkualitas	%	25,02	30,36	121,34	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Bidang Pengawasan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							
	Persentase SDM koperasi yang berkualitas	%	10	11,67	116,67	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
	Persentase koperasi provinsi produktif	%	48,09	53,12	110,46	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Bidang Kelembagaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
	Persentase usaha mikro mandiri	%	81,2	81,22	100,02	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan
	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	23	80,43	349,70	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							
	Persentase UMKM siap bermitra	%	21,06	21,37	101,47	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Bidang Bina Usaha

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja, seluruh indikator berskala sangat tinggi. Indikator Persentase SDM koperasi yang berkualitas dan Persentase pertumbuhan wirausaha baru memiliki capaian lebih dari 200 persen dikarenakan terdapat dukungan anggaran dari DAK Non Fisik dan optimalisasi kegiatan menggunakan aplikasi zoom, sehingga terdapat peningkatan peserta yang cukup banyak.

12. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 20
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
	Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	%	50	50	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan dan Pengembangan
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							
	Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	%	46	46,38	100,83	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Promosi PM
	Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	%	50	50	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Promosi PM
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	90	99,80	110,89	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
	Persentase pemenuhan standar pelayanan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	20	42,38	211,90	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							
	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10	11,70	117	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja, seluruh indikator berskala sangat tinggi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 21
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
	Jumlah wirausaha muda mandiri	Orang	8	8	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Kepemudaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
	Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	Orang	50	50	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Kepemudaan
	Persentase peningkatan perolehan medali	%	28,18	30	106,46	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Keolahragaan
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAA N							
	Jumlah masyarakat yang bugar	Orang	750	750	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Keolahragaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	Orang	50	70	140,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja, seluruh indikator berskala sangat tinggi

14. Statistik

Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 22

Capaian Kinerja Urusan Statistik

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL							
	Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	%	24	24	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika - Bidang Statistik

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator yang berskala sangat tinggi.

15. Persandian

Kinerja penyelenggaraan urusan persandian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 23
Capaian Kinerja Urusan Persandian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	%	25	40	160,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika - Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator yang berskala sangat tinggi.

16. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 24
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
	Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	%	19,17	22,08	115,18	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
	Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	%	23,76	23,76	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
	Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	%	47,61	47,61	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
	Persentase cakupan pelestarian seni	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							
	Tingkat partisipasi seni tradisi	%	8,89	8,89	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							
	Persentase akses literasi sejarah	%	52,9	52,9	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							
	Persentase cagar budaya berperingkat nasional	%	12,71	13,16	103,54	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
	Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	%	25,13	25,67	102,15	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							
	Nilai survey kepuasan pengunjung museum	%	89,85	90,08	100,26	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator, seluruh indikator berskala sangat tinggi.

17. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 25
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	%	80,56	83,33	103,44	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan
	Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam kebudayaan gemar membaca	%	23,08	23,08	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan
	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	80	85	106,25	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							
	Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	84,67	86	101,57	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator, kinerja seluruh indikator program urusan perpustakaan sangat tinggi

18. Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 26
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							
	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	25,97	38,15	146,90	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
	Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	%	100	178,26	178,26	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
	Persentase peningkatan pengunjung arsip	%	19	35,6	187,37	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							
	Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	%	12,19	12,5	102,54	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
	Persentase arsip yang diselamatkan	%	19,47	25,97	133,38	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							- Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator yang seluruhnya berskala sangat tinggi.

C. Urusan Pilihan

1. Perikanan dan Kelautan

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
	Persentase produksi garam	%	1	1	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	3,7	3,7	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	1,39	2,56	184,17	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	3,7	3,7	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
	Persentase produksi perikanan tangkap	%	5	3,7	74,00	Sedang	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap
	Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Angka	108,27	101,41	93,66	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap
	Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	%	44,44	44,44	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	72	72	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Tegalsari Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	%	72,72	72,72	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	81,82	90,91	111,11	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	%	70	70	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	62,62	72,72	116,13	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	81	81	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Pantai Tasikagung Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	63,63	90,9	142,86	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	%	63	63	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	72	72	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
	Persentase produksi ikan konsumsi air laut	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Produksi perikanan budidaya	Ton	600000	554.810,13	92,47	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Angka	111,27	131,6	118,27	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	%	70	73	104,29	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	2	2	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	61	61	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja	%	2	0,8	250,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Cabdin Wilayah Selatan						Wilayah Selatan Kelas A
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	61	64,5	105,74	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	2	2	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	61	61	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
	Jumlah produksi olahan ikan	Ton	160000	299.838,5	187,40	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	4	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 32 target indikator kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan. Terdapat 31 indikator berskala sangat tinggi, dan 1 indikator berskala sedang.

2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 28
Capaian Kinerja Pariwisata

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
	Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	13,33	13,33	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	49.985.228	69.480.726	139,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Pemasaran Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	Kabupaten/Kota	6	6	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	48,98	51,79	105,74	Sangat Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata - Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 4 target indikator kinerja Urusan Pariwisata, dengan keseluruhan indikator skala sangat tinggi.

3. Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 29
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
	Jumlah populasi ternak potong	(ST)/(AU)	3.726.434	5.212.352	139,88	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Budidaya
	Jumlah populasi ternak perah	(ST)/(AU)	112.876	70.986	62,89	Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Budidaya
	Jumlah populasi ternak petelur	(ST)/(AU)	246.615	582.425	236,17	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Budidaya
	Persentase fasilitasi obat hewan	%	1	1,05	105,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Veteriner
	Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	Dokumen	4	4	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Veteriner
	Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	1	0,53	53,00	Rendah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Balai Inseminasi Buatan Kelas A
	Persentase peningkatan	%	1	1,44	144,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Balai

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	produksi ternak penghasil daging						Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	%	1	0,73	73,00	Sedang	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
	Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	%	1	1,96	196,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
	Persentase luas lahan yang dioptimasi	%	2,5	2,71	108,40	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	%	90	90	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	%	2,5	2,5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	%	3	3	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Prasarana dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Sarana Pertanian
	Produksi kedelai	Ton	52657	74684	141,83	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Tanaman Pangan
	Produksi jagung	Ton	3576577	3597975	100,60	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Tanaman Pangan
	Produksi padi	Ton	9594280	8850290	92,25	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Tanaman Pangan
	Produksi bawang merah	Ton	515000	521638	101,29	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Hortikultura
	Produksi cabai	Ton	341000	353.618	103,70	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Hortikultura
	Produksi durian	Ton	149668	197.511	131,97	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Hortikultura
	Produksi jahe	Ton	34862	33302	95,33	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Hortikultura
	Produksi melati	Ton	24627	19160	77,80	Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Hortikultura
	Produksi kopi	Ton	25927	26868	103,63	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Perkebunan
	Produksi tebu	Ton	2554553	3339233	130,72	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan -

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Bidang Perkebunan
	Produksi kelapa	Ton	166687	166788	100,06	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Perkebunan
	Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya	%	2	2	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Persentase layanan sertifikasi benih	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	%	85	107,97	127,02	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta	%	85	89,6	105,41	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta
	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	%	85	85,09	100,11	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
	Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	%	3	3	100	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Benih Tanaman

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Perkebunan Kelas A
	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	1	1	100	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	%	10	10	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	%	10	10	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	%	10	10	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	%	10	10	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	m	7.420.274,00	7.420.274	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah strategis	Dokumen	4	4	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Veteriner
	Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	%	3	7,94	264,67	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Veteriner
	Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	%	2,8	43,5	1553,57	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Veteriner
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	Dokumen	4	4	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Balai veteriner semarang
	Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	Dokumen	4	4	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Balai veteriner boyolali
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							
	Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	%	5	1,98	39,60	Sangat Rendah	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	%	15	24,89	165,93	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	%	1,02	1,02	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	%	3,11	3,11	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	%	2,27	2,27	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
	Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2,5	2,5	100	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
	Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Perkebunan - BALAI PELATIHAN PERTANIAN

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 %

Tinggi : 76 % ≤ 90%

Sedang : 66 % ≤ 75 %

Rendah : 51 % ≤ 65 %

Sangat Rendah : ≤ 50 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 49 target indikator kinerja Urusan Pertanian Terdapat 44 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala sedang, 2 indikator berskala rendah dan 1 indikator berskala sangat rendah. Indikator dengan skala rendah dan sangat rendah yaitu:

1. Jumlah populasi ternak perah dikarenakan Penurunan populasi sapi perah disebabkan karena masih terdampak PMK dan adanya penjualan ternak.
2. Persentase produksi dan distribusi semen beku mengalami penurunan di karenakan :
 - a. Bull yang ada di BIB Jateng , untuk yang muda masih belum sepenuhnya produksi, sedangkan untuk bull yang lama ada penurunan produksi di karenakan umur yang sudah mulai tua.
 - b. Distribusi mengalami penurunan di karenakan adanya program si komandan yng di adakan lagi di tahun ini dari pusat mnyebabkan kebutuhan semen beku kabupaten kota di jawa tengah sebagian besar tersedia dari program si komandan sehingga mengurangi pembelian semen beku di BIB Jateng . Kurangnya promosi produk BIB Jateng, sehingga kepercayaan terhadap produk BIB jateng masih kalah bila di bandingkan dengan produk BIB lain yang lebih terpercaya seperti BIB Lembng atau BIB Singosari, banyak bull yang produksi tapi belum SNI.
3. Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam dikarenakan adanya bencana banjir dan kekeringan sebagai akibat dari dampak perubahan iklim menyebabkan beberapa lahan pertanian mengalami puso atau gagal panen.

4. Kehutanan

Kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 30
Capaian Kinerja Kehutanan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	35,4	35,4	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan
	Persentase lahan kritis tertangani	%	0,47	0,86	182,98	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	%	0,02	0,02	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 1
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 1	%	1,38	1,38	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 1

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 1	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 1
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	%	0,04	0,08	200,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 2
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 2	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 2
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 2	%	1,72	1,72	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 2
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	%	0,03	0,12	400,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 3
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 3	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 3
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 3	%	1,64	1,64	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 3
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	%	0,03	0,06	200,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 4

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 4	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 4
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 4	%	1,46	1,46	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 4
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	%	0,04	0,04	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 5
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 5	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 5
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 5	%	1,29	1,29	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 5
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	%	0,09	0,15	166,67	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 6
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 6	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 6
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang	%	2,15	2,15	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 6

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	berkelanjutan di wilayah CDK 6						
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	%	0,04	0,05	125,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 8
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 8	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 8
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 8	%	1,03	1,03	100	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 8
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	%	0,04	0,14	350,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 9
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 9	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 9
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9	%	1,46	1,46	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 9
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	%	0,03	0,07	233,33	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 10
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 10

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	ditangani di wilayah CDK 10						
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 10	%	1,03	1,03	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 10
	Persentase peningkatan produksi bibit	%	-40	-31,63	126,46	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	%	0,03	0,06	200,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 11
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 11	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 11
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 11	%	1,29	1,29	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 11
	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	%	0,09	0,16	177,78	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 7
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 7	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 7

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 7	%	1,55	1,55	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 7
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMN YA							
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%	10	10	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%	40	40	100	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 1	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 1
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 1	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 1
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 2

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	ditangani di wilayah CDK 2						
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 2	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 2
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 3	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 3
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 3	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 3
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 4	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 4
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 4	%	100	150	150,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 4
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 5	%	5	5	100	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 5
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 5	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 5
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 6

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	ditangani di wilayah CDK 6						
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 6	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 6
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 8	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 8
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 8	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 8
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 9	%	5	5	100	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 9
	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 9	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 9
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 10	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 10
	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	Angka	70	73	104,29	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 11	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 11
	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 7	%	5	5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 7
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2,5	2,5	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1	%	0,3	0,3	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 1
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2	%	0,2	1,2	600,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 2

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3	%	0,2	0,2	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 3
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4	%	0,2	0,2	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 4
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5	%	0,3	1	333,33	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 5
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6	%	0,2	0,2	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 6
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8	%	0,2	0,2	100	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 8
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9	%	0,2	0,38	190,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 9
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10	%	0,2	0,2	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 10
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11	%	0,2	0,2	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 11
	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7	%	0,3	0,3	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK 7

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)							
	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%	10	10	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 73 target indikator kinerja Urusan Kehutanan seluruhnya berskala sangat tinggi.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 31
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN							
	Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah		27,5	27,4	100,36	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Geologi dan Air Tanah
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	1,6	1,5	106,67	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral -

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	3,4	3,16	107,59	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1,7	1,56	108,97	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	2,2	1,95	112,82	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	4,1	3,91	104,86	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1,8	1,53	117,65	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2,4	2,25	106,67	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	1,6	1,45	110,34	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2,7	2,57	105,06	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	2,9	2,84	102,11	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2,8	2,6	107,69	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1,6	1,48	108,11	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		%					
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah		60	76,47	127,45	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Mineral dan Batubara
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	%	60	60	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	%	60	68,34	113,90	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan	%	60	62,35	103,92	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Wilayah Serayu Utara						ESDM Wilayah Serayu Utara
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	%	60	62,8	104,67	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	%	60	60,46	100,77	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	%	60	60,38	100,63	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	%	60	79,52	132,53	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	%	60	61,34	102,23	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	%	60	73,39	122,32	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	%	60	63,29	105,48	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							Semarang - Demak
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	%	60	62,18	103,63	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	%	60	71,29	118,82	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		%					
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah		1.013.545,58	1.014.117,39	100,06	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Energi Baru Terbarukan
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM	41.915,22	41.915,22	100	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	SBM	90.393,28	90.948,94	100,61	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	132.503,59	132.503,59	100	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	SBM	289,74	289,74	100	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	SBM	91.068,05	91.068,05	100	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	SBM	108.392,42	108.392,42	100	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	SBM	182.071,71	182.071,71	100	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu	SBM	41.499,93	41.516,02	100,04	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	SBM	151.285,79	151.285,79	100	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak	SBM	41.516,02	41.516,02	100	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	SBM	91.206,48	91.206,48	100	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	SBM	41.403,35	41.403,35	100	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN							
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	63,81	65,51	102,66	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Ketenagalistrikan
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	%	49,7	49,81	100,22	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	%	51,09	51,43	100,67	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	%	49,97	50,1	100,26	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	%	49,36	49,44	100,16	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	%	49,96	50,1	100,28	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	%	49,95	50,17	100,44	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	%	49,66	49,73	100,14	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	%	49,57	49,66	100,18	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	%	49,59	49,73	100,28	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	%	51,86	52,24	100,73	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	%	49,64	49,88	100,48	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	%	49,08	49,14	100,12	Sangat Tinggi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 54 indikator dengan keseluruhan indikator berskala sangat tinggi.

6. Perdagangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 32
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							
	Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	%	10	10	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	%	8	19,57	244,63	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							
	Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi	%	10	23,5	235,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
	Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan	%	10	8,32	83,20	Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	barang penting di 35 kabupaten/kota						Perdagangan Dalam Negeri
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90	91,18	101,31	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	%	30	103,94	346,47	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
	Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	%	1	3,23	323,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	%	5	7,5	150,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	%	10	39,74	397,40	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	10	45	450,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
	Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	%	2	9,09	454,50	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 11 indikator kinerja, dengan rincian 10 indikator berskala sangat tinggi dan 1 indikator berskala tinggi. Indikator-indikator urusan perdagangan dengan capaian sangat tinggi dengan faktor sebagai berikut:

1. Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah hingga 244,63% karena lokasi IPSKA yang berada dekat dengan pelabuhan Tanjung Emas menjadikan IPSKA Prov Jawa Tengah di Semarang menjadi pilihan banyak eksportir dalam menerbitkan SKA serta meningkatkan kualitas pelayanan diantaranya dengan proses penerbitan *one day service*.
2. Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang Difasilitasi dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu 235% karena adanya peningkatan jumlah pelaksanaan pasar lelang komoditas yaitu sebanyak 8 kali di Jawa Tengah, lebih banyak dari tahun 2023 yang hanya diadakan sebanyak 6 kali, sehingga komoditas yang diperdagangkan lebih banyak dan lebih diminati oleh buyers. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan nilai transaksi Barang / Komoditi yang ditawarkan saat dilaksanakannya pasar lelang lebih banyak diminati oleh pelaku usaha (pembeli).

3. Persentase Peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi (346,47%) karena dukungan pemerintah melalui peraturan yang memperketat pengawasan terhadap pupuk subsidi sehingga mendorong adanya peningkatan jumlah kegiatan pengawasan dan bertambahnya pelaku usaha baru sehingga perlu dilakukan pengecekan legalitas usahanya.
4. Nilai Ekspor Non Migas dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu 454,5% karena adanya peningkatan jumlah eksportir baru dan peningkatan kapasitas ekspor bagi pelaku ekspor yang sudah ada. Hal tersebut didorong karena adanya pendampingan pelaku usaha sehingga lahirlah eksportir baru, fasilitasi dari pemerintah terkait perluasan pasar melalui pelaksanaan Business Matching dan partisipasi pameran internasional maupun pameran skala internasional.
5. Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen 323% karena sasaran edukasi perlindungan konsumen merupakan generasi muda yang melek informasi dan teknologi sehingga informasi dapat diserap dan diteruskan dengan baik serta channel pengaduan konsumen di Jawa Tengah mudah untuk diakses hal ini menjadi faktor meningkatnya indeks keberdayaan konsumen.
6. Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang 397,4% karena Pertumbuhan industri di daerah provinsi Jawa Tengah turut berkontribusi positif / memberikan peluang dalam pertambahan jumlah pelanggan pengguna layanan serta Adanya pengembangan ruang lingkup pada layanan pengujian (makanan dan minuman) dan kalibrasi (alat ukur bejana dan depth stick).
7. Persentase Peningkatan Nilai Omzet Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pameran Dalam Negeri dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu 450% karena jumlah pameran yang diikuti dan jumlah IKM yang difasilitasi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya serta penyelenggara pameran tepat sasaran dalam mendatangkan calon buyers sehingga potensi transaksi meningkat.

7. Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 33
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
	Persentase pertumbuhan produksi industri agro	%	2,25	4,62	205,33	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Industri Agro
	Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	%	2,25	1,66	73,78	Sedang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Industri Non Agro
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	3,45	3,61	104,64	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A
	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	85	99	116,47	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4,38	4,55	103,88	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
USAHA INDUSTRI							
	Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	7	22,22	317,43	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Industri Agro
	Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	10	28	280,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Industri Non Agro
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
	Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1,62	3,12	192,59	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Industri Agro
	Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	2	4	200,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Industri Non Agro

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinerja. Terdapat 8 indikator berskala sangat tinggi dan 1 indikator berskala sedang.

8. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaraan urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3,61	4,4	121,88	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan skala sangat tinggi.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaraan Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Sekrateriat Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI							
	Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%	66	66	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%	85,71	85,71	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi kan hasil analisis jabatan secara efektif	%	88,1	92	104,43	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%	60	61,22	102,03	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	14,29	54,29	379,92	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%	64,28	64,28	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
	Persentase perangkat daerah yang mematuhi	%	50	57,7	115,40	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	kebijakan ketatalaksanaan						
	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	88,73	88,73	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ORGANISASI
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							
	Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95	100	105,26	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95	100	105,26	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	100	105,26	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT							
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	%	81	81	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	%	82	82	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	54	54	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM							
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	96	100	104,17	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%	96	100	104,17	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	%	96	100	104,17	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	100	104,17	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO HUKUM
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							
	Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	89,01	102,31	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85	99,30	116,82	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85	97,33	114,51	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	83	83	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	78	78	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	85	89,88	105,74	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	81	100,68	124,30	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase nilai kemandirian BLUD	%	55	71,78	130,51	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PEREKONOMIAN
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							
	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%	90	94,78	105,31	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%	80	88,67	110,84	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							BARANG DAN JASA
	Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	81	81,25	100,31	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							
	Persentase capaian pelaksanaan APBD	%	98,7	99,76	101,07	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase capaian pelaksanaan APBN	%	95,5	96,72	101,28	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	99,21	116,72	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	%	85	100	117,65	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah - BIRO ADMINISTRASI

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	daerah yang direalisasi						SI PEMBANGUNAN

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 34 indikator kinerja dengan skala kinerja sangat tinggi.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja unsur Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
	Persentase layanan bagian humas	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD - Bagian Humas
	Persentase fasilitasi penyusunan raperda	%	95	95	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja dengan sangat tinggi.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaraan unsur Perencanaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 37
Capaian Kinerja Perencanaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian
	Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	pengembangan wilayah						Pengembangan Wilayah
	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
	Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
	Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja seluruh indikator berkala sangat tinggi.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaraan unsur Keuangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Keuangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat
	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat
	Persentase penetapan APBD tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Anggaran
	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Akuntansi
	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	%	84,02	84,02	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Aset Daerah
	Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Aset Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	%	100	79	79,00	Tinggi	Bidang Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
	Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan
	Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	%	72	75,55	104,93	Sangat Tinggi	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	%	-1,19	23,72	100	Sangat Tinggi	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Bidang Evaluasi dan Pembinaan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1	%	27,35	22,87	83,62	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	%	31,3	27,88	89,07	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	%	10,07	13,3	132,08	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi	%	18,26	18,26	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang I						
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	%	7,11	6,08	85,51	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	%	13,06	11,75	89,97	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	%	13,4	12,39	92,46	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	16,23	15,94	98,21	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	17,39	17,39	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	%	23,97	20,53	85,65	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	%	4,45	4,7	105,62	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	%	36,13	36,48	100,97	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	16,04	17,53	109,29	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	17,27	12,97	75,1	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	8,9	7,5	84,27	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	10,26	9,63	93,86	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	%	19,61	14,86	75,78	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	14,05	21,07	149,96	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset	%	16,83	16,83	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	daerah UPPD Kabupaten Semarang						
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	%	4,16	3,56	85,58	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	%	17,05	15,36	90,09	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	%	4,64	4,5	96,98	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	5,18	5,45	105,21	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	17,44	17,44	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	34,49	28,71	83,24	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	19,82	19,41	97,93	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan	%	30,85	47,41	153,68	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	(PAP) UPPD Kabupaten Kendal						Kabupaten Kendal
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	4,75	6,92	145,68	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	17,61	17,61	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	%	22,16	18,09	81,63	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	%	13,29	12,73	95,79	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	%	21,31	19,78	92,82	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	8,17	9,35	114,44	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	17,32	17,32	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	23,9	20,24	84,69	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	17,2	16,37	95,17	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	%	27,45	21,19	77,19	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	12,93	14,96	115,7	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	17,66	17,66	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	%	4,89	4,16	85,07	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	%	14,49	12,83	88,54	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak	%	10,6	10,6	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta						Daerah Kota Surakarta
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	11,07	11,18	100,99	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	18,23	18,23	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	27,08	22,88	84,49	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	8,66	7,65	88,34	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	%	11,44	8,3	72,55	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	7,6	7,78	102,37	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	17,13	12,02	70,17	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	21,95	18,98	86,47	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	0,7	0,7	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen	%	-36,4	13,83	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	6,99	8,38	119,89	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	18,06	18,93	104,82	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	25,83	22,95	88,85	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	8,73	8,16	93,47	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD	%	-7,17	-8,14	88,08	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Kabupaten Sukoharjo						
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	5,72	5,92	103,5	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	17,53	17,53	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	15,71	13,28	84,53	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	18,7	15,2	81,28	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	45,71	20,75	45,39	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	13,22	15,62	118,15	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD	%	17	17	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Kabupaten Wonogiri						
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	35,56	31,16	87,63	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	1,22	1,2	98,36	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	17,17	15,07	87,77	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	18,84	21,65	114,92	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	17,39	17,39	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	24,03	20,3	84,48	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	11,73	10,87	92,67	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	%	34,16	28,98	84,84	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	6,13	6,39	104,24	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	17,13	17,13	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	%	20,83	17,77	85,31	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati	%	11,81	10,19	86,28	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	%	13,58	11,76	86,6	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	16,04	16,54	103,12	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	16,49	16,49	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	%	14,75	12,56	85,15	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	%	12,22	11,77	96,32	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	%	31,9	26,5	83,07	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	16,43	19,95	121,42	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	17,11	16,33	95,44	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	%	13,13	11,03	84,01	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	%	16,86	14,1	83,63	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD	%	23,69	19,53	82,44	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Kabupaten Rembang						
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	21,22	22,54	106,22	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	17	17	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	18,05	15,7	86,98	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	7,6	7,72	101,58	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	%	-36,92	24,41	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	12,52	14,14	112,94	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	17,32	13,18	76,1	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	23,11	19,99	82,17	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	7,6	8,04	105,79	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	%	10,98	6,53	59,47	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	-38,28	-48,51	78,91	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	16,61	16,61	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	%	-25,87	-30,21	85,63	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	%	1,1	1,06	96,36	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset	%	18,98	19,95	105,11	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	daerah UPPD Kota Pekalongan						
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	18,02	18,02	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	41,39	34,06	82,29	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	9,99	10,07	100,8	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	14,1	13,89	98,51	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	13,78	15,16	110,01	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	18,04	18,04	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	%	38,05	30,5	80,16	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	%	7,86	8,01	101,91	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	%	23,25	20,83	89,59	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	9,37	11,87	126,68	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	16,97	16,97	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	29,39	24,16	82,2	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	18,9	18,24	96,51	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	%	15,18	17,13	112,85	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD	%	9,48	12,13	127,95	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Kabupaten Pemalang						
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	17,18	17,18	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	%	-25,1	-20,79	84,26	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	%	32,33	27,92	86,36	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	73,21	26,6	36,33	Sangat Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	18,07	18,07	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	65,74	53,64	81,59	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	29,02	26,75	92,18	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	6,13	9,36	152,69	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	17,65	17,65	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	%	27,22	27,4	100,66	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	45,7	36,92	80,79	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	34,4	30,86	89,71	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	%	32,04	27,59	86,11	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	8,61	14,47	168,06	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	17,56	12,65	72,04	Sedang	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	24,04	19,7	81,95	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	14,17	12,7	89,63	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	%	12,29	9,85	80,15	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	4,69	6,14	130,92	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	17,5	17,5	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	23,1	19,09	82,64	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	16,63	14,65	88,09	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak	%	3,69	4	108,4	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap						Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	23,45	25,35	108,1	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	17,17	17,17	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	12,93	10,52	81,36	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	4,03	3,65	90,57	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	23,21	24,24	104,44	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	%	6,97	7,36	105,6	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	%	16,79	16,79	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	42,89	35,2	82,07	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	9,96	9,08	91,16	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	6,85	5,48	80	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	6,97	9,35	134,15	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	16,5	16,5	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	%	-50,13	-58,34	85,93	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	%	0,85	0,93	109,41	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak	%	9,11	8,29	91	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang						Daerah Kota Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	21,75	25,96	119,36	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	17,98	17,98	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	41,84	37,26	89,05	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	15,28	13,72	89,79	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	%	30,31	27,86	91,92	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	6,19	8,31	134,25	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	16,93	16,93	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	28,97	24,56	84,78	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	17,84	15,93	89,29	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	%	25,16	16,5	65,58	Rendah	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	16,23	20,76	127,91	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	17,45	17,45	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	10,1	8,73	86,44	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	17,3	14,41	83,29	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak	%	10,44	10,14	97,13	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo						Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	24,54	41,4	168,7	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	17,86	17,86	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	37	31,55	85,27	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	12,14	11,32	93,25	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	%	30,52	25,84	84,67	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	13,03	18,85	144,67	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD	%	17,6	17,6	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Kabupaten Temanggung						
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	26,59	22,58	84,92	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
	Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	0,38	0,39	102,63	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	21,41	17,27	80,66	Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	0,74	0,78	105,41	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
	Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	17,7	17,7	100	Sangat Tinggi	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 %

Kinerja penyelenggaraan urusan keuangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 186 indikator kinerja, terdapat 108 indikator berskala sangat tinggi, 69 indikator berskala tinggi, 5 indikator berskala sedang, 2 indikator berskala rendah dan 2 indikator berskala sangat rendah yaitu :

1. Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonogiri dengan capaian 45,39% dikarenakan kondisi Elevasi Muka air waduk Wonogiri pada elevasi 126.35 m SHVP yang mengakibatkan PLTA tidak bisa beroperasi karena elevasi belum bisa untuk mengoperasikan turbin hal ini sebagai dampak dari dampak El Nino di 2023 sehingga berkurangnya penerimaan PAP dan produksi PLTA Wonogiri tahun 2024.
2. Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal dengan capaian 36,33% dikarenakan tarif sewa gedung Hanggawana tidak tercantum tarifnya dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga realisasi penerimaannya dimasukkan sebagai Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran unsur Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 39
Capaian Kinerja Kepegawaian

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Mutasi
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Mutasi
	Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Mutasi
	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Mutasi

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	melalui pengadaan CASN						
	Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Informasi Kepegawaian
	Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja dengan skala sangat tinggi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaraan unsur pendidikan dan pelatihan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	85	85	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	Angka	3,5	3,55	101,43	Sangat Tinggi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
	Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja dengan skala sangat tinggi.

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran urusan penelitian dan pegembangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 41
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
	Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi
	Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi
	Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi
	Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja, seluruh indikator berskala sangat tinggi.

6. Penghubung

Kinerja penyelenggaraan unsur penghubung ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 42
Capaian Kinerja Penghubung

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG							
	Persentase ketercapaian pelayanan penghubung	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Penghubung ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan skala sangat tinggi.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaraan unsur pengawasan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 43
Capaian Kinerja Pengawasan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	%	83	95,95	115,60	Sangat Tinggi	INSPEKTOR AT - Sekretariat
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	%	85	83,05	97,71	Sangat Tinggi	INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
							PENGAWAS AN KHUSUS
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	85	43,67	51,38	Rendah	INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWAS AN PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAERAH
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	%	85	59,31	69,78	Sedang	INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWAS AN AKUNTABILI TAS KEUANGAN DAERAH
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	%	85	68,14	80,16	Tinggi	INSPEKTOR AT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWAS AN KINERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
	Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	%	10,2	40,82	400,20	Sangat Tinggi	INSPEKTOR AT - Sekretariat
	Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3	%	10,2	18,37	180,10	Sangat Tinggi	INSPEKTOR AT - Sekretariat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja. Terdapat 4 indikator berskala sangat tinggi, 1 indikator berskala tinggi, 1 indikator berskala sedang dan 1 indikator berskala rendah yaitu Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tidak mencapai target dikarenakan Perangkat Daerah ketika menerima LHP/LHE dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, wajib menindaklanjuti Rekomendasi yang telah diberikan sebagai salah satu perbaikan tatakelola pemerintahan sebelum 60 hari kalender. Sedangkan, LHP/LHE pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diantaranya perbaikan pada dokumen perencanaan, penerapan SPM, dan dokumen evaluasi. Sehingga tindak lanjut LHP/LHE tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

G. Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaraan unsur pemerintahan umum ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 44
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							
	Indeks Ideologi Pancasila	Nilai	3	3,6	120,00	Sangat Tinggi	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
	Indeks kewaspadaan Nasional	Angka	73	80,60	110,41	Sangat Tinggi	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI							

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
KEMASYARAKATAN							
	Indeks kinerja ormas	Nilai	75,34	80	106,19	Sangat Tinggi	Bidang Ketahanan Bangsa
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							
	Indeks toleransi	%	74,1	76,76	103,59	Sangat Tinggi	Bidang Ketahanan Bangsa
	Indeks penguatan dampak ekonomi	%	3	3,21	107,00	Sangat Tinggi	Bidang Ketahanan Bangsa
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
	IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	Nilai	75	90	120	Sangat Tinggi	Bidang Politik Dalam Negri

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja dengan seluruh indikator berskala sangat tinggi.

H. Non Urusan

Kinerja penyelenggaraan Non Urusan ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 45
Capaian Kinerja Non Urusan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program			Skala	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target RKPD - P Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d Tahun 2024 (%)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	98,92	98,92	Sangat Tinggi	Biro Adm. Bangda
	Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	99,76	99,76	Sangat Tinggi	Biro Adm. Bangda
	Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi	%	82	95,14	116,02	Sangat Tinggi	RSUD Dr. Moewardi
	Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	82	92,69	113,04	Sangat Tinggi	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo	%	47,09	52,91	112,36	Sangat Tinggi	RSUD dr. ADHYATMA, MPH
	Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo	%	35	60	171,43	Sangat Tinggi	RSUD dr. REHATTA
	Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	43	37	86,05	Tinggi	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta	%	33	31,55	95,61	Sangat Tinggi	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
	Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	46,5	47,71	102,6	Sangat Tinggi	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinerja. Dengan rincian 8 indikator berskala sangat tinggi dan 1 indikator berskala tinggi.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026



RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Renca Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026



buku III

www.bappeda.jatengprov.go.id
COPYRIGHT 2025

**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng



Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua									3.029.319.802.000	Dinas Pendidikan	
						Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.03		Dinas Pendidikan	
	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus								160.477.431.000		
						Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun	%	72.88	150.887.431.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						150.247.431.000		
						Angka Putus Sekolah SMA	Angka	0.011	15.200.000.000	Dinas Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.200.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah	Angka	38980	15.200.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0038			Pengadaan Perlengkapan Sekolah				11.200.000.000		
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	28000	11.200.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0045			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				4.000.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	4000	4.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Angka Putus Sekolah SMK	Angka	0.026	27.097.200.000	Dinas Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					27.097.200.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah	Angka	57253	27.097.200.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0030			Pengadaan Perlengkapan Sekolah				16.797.200.000		
						Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	41993	16.797.200.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				10.300.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	5075	10.300.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA	%	30.32	37.750.000.000	Dinas Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					37.750.000.000		
						Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMA	Angka	0.48	37.750.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0001			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				22.000.000.000		
		1.01.02.1.01.003			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	2	22.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	3	750.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0041			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				15.000.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1000	15.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK	%	53.75	13.865.731.000	Dinas Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					13.865.731.000		
						Angka Melanjutkan (AM) SMP/Sederajat ke Jenjang SMK	Angka	0.5	13.865.731.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0001			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				13.115.731.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	13.115.731.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.002			Pengadaan Mebel Sekolah				750.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	750.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Tingkat Keberjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	76.67	1.822.300.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.822.300.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin I	Angka	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				1.822.300.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Tingkat Keberjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	77.9	12.000.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					12.000.000.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin II	Angka	360	12.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				12.000.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	360	12.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Tingkat Keberjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	76.39	8.000.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					8.000.000.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin III	Angka	167	8.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				8.000.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	216	8.000.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Tingkat Keberjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	73.33	5.466.900.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					5.466.900.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IV	Angka	270	5.466.900.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				5.466.900.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	270	5.466.900.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Tingkat Keberjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	69.17	7.289.200.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					7.289.200.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin IX	Angka	360	7.289.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				7.289.200.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	360	7.289.200.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Tingkat Keberjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	73.33	1.822.300.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.822.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin V	Angka	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				1.822.300.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Tingkat Keberjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	68.49	3.644.600.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					3.644.600.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin VI	Angka	180	3.644.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				3.644.600.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	180	3.644.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Tingkat Keberjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	71.15	12.644.600.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					12.644.600.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin X	Angka	348	12.644.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				12.644.600.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	468	12.644.600.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Tingkat Keberjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	43.33	1.822.300.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.822.300.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XI	Angka	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				1.822.300.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Tingkat Keberjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	70	1.822.300.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.822.300.000		
						Jumlah siswa SMK Boarding dan Semi Boarding Cabdin XII	Angka	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				1.822.300.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	90	1.822.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						400.000.000		
						Indeks Distribusi Guru SMA dan SMK	Angka	0.43	400.000.000		
				Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi					400.000.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah yang didistribusikan	Orang	2265	400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.04.1.01.0002			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				400.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	691	400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						240.000.000		
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	60	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin VIII	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	94	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin I	Dokumen	4	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	70.36	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin II	Angka	3	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	75.2	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin III	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wllayah Pendidikan IV	%	35	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin 4	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	60	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin IX	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	17.4	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin V	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wllayah Pendidikan VI	%	70.8	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin VI	Dokumen	12	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wllayah Pendidikan VII	%	60	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin VII	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin X	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	50	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah Cabdin XI	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wllayah Pendidikan XII	%	85	20.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII	
				Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin XII	Dokumen	6	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.01.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas	%	74.02	9.590.000.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						9.530.000.000		
						Angka Putus Sekolah SLB	Angka	0.043	2.530.000.000	Dinas Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.530.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Khusus yang Menerima BSM dan Perlengkapan Sekolah	Angka	4710	2.080.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0037			Pengadaan Perlengkapan Sekolah				1.080.000.000		
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	2700	1.080.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0044			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus				1.000.000.000		
						Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1000	1.000.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	1	450.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0039			Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah				450.000.000		
						Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	1	450.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB	%	91.74	7.000.000.000	Dinas Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.000.000.000		
						Angka Melanjutkan (AM) SMPLB ke Jenjang SMALB	Angka	0.94	7.000.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0001			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				3.500.000.000		
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	3.500.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0035			Pengadaan Mebel Sekolah				500.000.000		
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1	500.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi
		1.01.02.1.03.0040			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				3.000.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	200	3.000.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						60.000.000		
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	25	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin VIII	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	74.2	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin I	Angka	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	2.57	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin II	Angka	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	75.2	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin III	Angka	0	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	35	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin 4	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	25	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin IX	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	12.4	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan khusus Cabdin V	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	68.7	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin VI	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	25	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin VII	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin X	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	50	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin	Dokumen	6	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wlayah Pendidikan XII	%	100	5.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII	
				Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					5.000.000		
						Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan khusus Cabdin XII	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.05.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
	Meningkatnya Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus								2.809.384.698.000		
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment nasional untuk literasi dan numerasi	%	64.95	2.809.384.698.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						2.809.054.698.000		
						Nilai Kualitas Pembelajaran SLB	Angka	65.61	85.631.830.000	Dinas Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					85.631.830.000		
						Nilai Kepemimpinan Instruksional SLB	Angka	52.78	85.631.830.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0052			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				82.731.830.000		
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	189	82.731.830.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0059			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2.900.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	8	2.900.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai Kualitas Pembelajaran SMA	Angka	64.45	728.206.810.000	Dinas Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					728.206.810.000		
						Nilai Kepemimpinan Instruksional SMA	Angka	60.31	728.206.810.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0053			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				719.471.810.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	867	719.471.810.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0060			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				8.735.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	4	8.735.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Nilai Kualitas Pembelajaran SMK	Angka	60.86	1.394.715.710.000	Dinas Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.394.715.710.000		
						Nilai Kepemimpinan Instruksional SMK	Angka	54.75	1.394.715.710.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0046			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				1.369.240.710.000		
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1540	1.369.240.710.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0053			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				25.475.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	5	25.475.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Guru SLB Bersertifikat Kompetensi	%	57.72	223.666.000		
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					223.666.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang Bersertifikat Kompetensi	Orang	1623	223.666.000		
		1.01.02.1.03.0073			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				223.666.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	327	223.666.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Guru SMA Bersertifikat Kompetensi	%	76.84	1.036.188.000		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					1.036.188.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang Bersertifikat Kompetensi	Orang	20750	1.036.188.000		
		1.01.02.1.01.0075			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				1.036.188.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	784	1.036.188.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Guru SMA, SMK, dan SLB Bersertifikasi Pelatihan Platform Pendidikan	%	25	1.600.000.000		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					450.000.000		
						Jumlah guru SMA yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan	Orang	6741	450.000.000		
		1.01.02.1.01.0057			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				150.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	6741	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.01.0058			Pengembangan konten digital untuk pendidikan				300.000.000		
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	19	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					850.000.000		
						Jumlah guru SMK yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan	Orang	11901	850.000.000		
		1.01.02.1.02.0050			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				550.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	11901	550.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.02.0051			Pengembangan konten digital untuk pendidikan				300.000.000		
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	23	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah guru SLB yang memiliki sertifikat pelatihan platform pendidikan	Orang	712	300.000.000		
		1.01.02.1.03.0056			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	712	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.01.02.1.03.0057			Pengembangan konten digital untuk pendidikan				200.000.000		
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	15	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi	%	62.13	318.661.000		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					318.661.000		
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang Bersertifikat Kompetensi	Orang	29060	318.661.000		
		1.01.02.1.02.0073			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				318.661.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	657	318.661.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Prestasi Lomba SLB Tingkat Nasional	%	54.05	1.250.000.000	Dinas Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.250.000.000		
						Jumlah medali perolehan lomba SLB tingkat nasional	Angka	15	1.250.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
		1.01.02.1.03.0048			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.250.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	26	1.250.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Prestasi Lomba SMA Tingkat Nasional	%	35.89	3.000.000.000	Dinas Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					3.000.000.000		
						Jumlah medali perolehan lomba SMA tingkat nasional	Angka	38	3.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
		1.01.02.1.01.0049			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				3.000.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	120	3.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Prestasi Lomba SMK Tingkat Nasional	%	57	3.000.000.000	Dinas Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					3.000.000.000		
						Jumlah medali perolehan lomba SMK tingkat nasional	Angka	31	3.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0041			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				3.000.000.000		
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	50	3.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	65.71	12.258.152.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					12.258.152.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin I	Angka	1593	12.258.152.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				12.258.152.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5	12.258.152.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	70.89	4.793.848.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					4.793.848.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin III	Angka	1747	4.793.848.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				4.793.848.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	20	4.793.848.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	89.9	430.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					430.000.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin VI	Angka	3113	430.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0010			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				430.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	430.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	68.28	150.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					150.000.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SLB kondisi baik Cabdin VIII	Angka	73	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0080			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				150.000.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	1	150.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	67.59	4.445.278.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					220.000.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin X	Angka	2083	220.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0020			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				220.000.000		
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	220.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					4.225.278.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMK kondisi baik Cabdin X	Angka	1381	4.225.278.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0069			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah				4.225.278.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	16	4.225.278.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	83.72	2.465.962.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					2.465.962.000		
						Jumlah Sarpras Pendidikan SMA kondisi baik Cabdin XII	Angka	1248	2.465.962.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0019			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				2.465.962.000		
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	2.465.962.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	65.21	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I	Angka	67	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I	Angka	119	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin I	Angka	17	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	73.3	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II	Angka	105	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II	Angka	128	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin II	Angka	21	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	74.41	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III	Angka	71	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III	Angka	124	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin III	Angka	10	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	50.5	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV	Angka	72	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV	Angka	139	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IV	Angka	13	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		

						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	79.3	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX	Angka	75	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX	Angka	161	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin IX	Angka	15	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	60.1	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V	Angka	54	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V	Angka	90	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin V	Angka	25	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	68.2	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI	Angka	62	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI	Angka	129	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VI	Angka	29	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	70.34	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII	Angka	60	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII	Angka	81	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VII	Angka	24	7.500.000		
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	81.8	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII	Angkatan	67	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII	Angka	84	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin VIII	Angka	8	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	65.78	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI	Angka	70	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin	Angka	177	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XI	Angka	6	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	80.41	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII	Angka	66	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII	Angka	127	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin XII	Angka	6	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	3	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	79.13	37.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMA yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X	Angka	96	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0065			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X	Angka	181	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0059			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				15.000.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	146	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan SLB yang melaksanakan pemberian layanan pencegahan dan penanganan kekerasan Cabdin X	Angka	13	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0066			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7.500.000		
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	10	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	83.1	43.336.908.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					22.611.032.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I	Angka	67	22.611.032.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				22.611.032.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiyai BOP	Orang	278	11.142.368.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	67	10.985.664.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	478	483.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					18.218.260.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I	Angka	119	18.218.260.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				18.218.260.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiyai BOP	Orang	180	7.411.408.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	119	9.132.852.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	1643	1.674.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.507.616.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin I	Angka	17	2.507.616.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.507.616.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP	Orang	27	996.968.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	17	1.455.648.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	55	55.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	83.8	62.180.786.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					31.847.194.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II	Angka	105	31.847.194.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				31.847.194.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP	Orang	410	17.534.752.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	105	13.957.442.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	325	355.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					26.648.866.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II	Angka	128	26.648.866.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				26.648.866.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiayai BOP	Orang	294	12.027.796.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	128	13.307.070.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	1284	1.314.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					3.684.726.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin II	Angka	21	3.684.726.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				3.684.726.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiayai BOP	Orang	24	1.068.124.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	21	2.557.602.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	59	59.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	70.5	44.339.967.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					22.014.014.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III	Angka	71	22.014.014.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				22.014.014.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiayai BOP	Orang	218	8.555.192.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	71	13.181.822.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	249	277.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					19.378.861.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III	Angka	124	19.378.861.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				19.378.861.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiyai BOP	Orang	165	6.385.033.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	124	11.932.828.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	1033	1.061.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.947.092.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin III	Angka	10	2.947.092.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.947.092.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiyai BOP	Orang	27	996.092.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	10	1.942.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	9	9.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	70.56	36.484.049.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					19.386.178.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV	Angka	72	19.386.178.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				19.386.178.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiyai BOP	Orang	223	7.739.884.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	72	10.839.294.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	773	807.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.089.297.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV	Angka	139	15.089.297.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				15.089.297.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiyai BOP	Orang	112	4.108.240.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	139	7.553.057.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	3319	3.428.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.008.574.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IV	Angka	13	2.008.574.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.008.574.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiyai BOP	Orang	23	661.508.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	13	1.299.066.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	48	48.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	88.15	67.446.722.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					30.808.783.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX	Angka	75	30.808.783.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				30.808.783.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiyai BOP	Orang	533	16.174.676.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	75	13.935.107.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	629	699.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					34.207.262.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX	Angka	161	34.207.262.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				34.207.262.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiyai BOP	Orang	275	9.510.420.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	161	15.984.842.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	54468	8.712.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.430.677.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin IX	Angka	15	2.430.677.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.430.677.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiyai BOP	Orang	29	845.848.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	15	1.471.829.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	113	113.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	79	39.167.242.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					18.990.847.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V	Angka	54	18.990.847.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				18.990.847.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiyai BOP	Orang	180	7.102.616.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	54	11.603.231.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	260	285.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					19.582.483.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V	Angka	90	19.582.483.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				19.582.483.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiyai BOP	Orang	140	5.905.867.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	90	11.280.616.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	2189	2.396.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					593.912.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin V	Angka	25	593.912.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				593.912.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiyai BOP	Orang	6	181.324.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	25	220.588.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	192	192.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	83.05	46.333.314.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					19.716.490.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI	Angka	62	19.716.490.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				19.716.490.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiyai BOP	Orang	255	8.922.596.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	62	10.633.894.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	146	160.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					24.005.568.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI	Angka	129	24.005.568.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				24.005.568.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiyai BOP	Orang	195	7.444.260.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	129	13.957.308.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	2528	2.604.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.611.256.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VI	Angka	29	2.611.256.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.611.256.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiyai BOP	Orang	34	986.112.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	29	1.506.144.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	119	119.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	86.2	29.285.248.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					13.353.911.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII	Angka	60	13.353.911.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				13.353.911.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiyai BOP	Orang	178	6.212.056.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	60	6.835.855.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	301	306.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					14.575.316.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII	Angka	81	14.575.316.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				14.575.316.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiyai BOP	Orang	187	6.766.672.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	81	6.824.644.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	972	984.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.356.021.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VII	Angka	24	1.356.021.000		
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.356.021.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiyai BOP	Orang	5	237.836.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	24	999.185.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	119	119.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	76.3	32.553.230.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					16.812.292.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII	Angkatan	67	16.812.292.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				16.812.292.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiyai BOP	Orang	248	7.976.672.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	67	7.894.620.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	884	941.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					14.898.532.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII	Angka	84	14.898.532.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				14.898.532.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiyai BOP	Orang	116	4.122.208.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	84	6.781.324.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	3861	3.995.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					842.406.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin VIII	Angka	8	842.406.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				842.406.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiyai BOP	Orang	9	292.608.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	8	499.798.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	50	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	77.52	74.210.994.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					35.969.383.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X	Angka	96	35.969.383.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				35.969.383.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiyai BOP	Orang	399	14.491.820.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	96	19.444.563.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	1890	2.033.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					36.029.899.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X	Angka	181	36.029.899.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				36.029.899.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiyai BOP	Orang	198	8.262.872.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	181	16.027.027.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	11224	11.740.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.211.712.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin X	Angka	13	2.211.712.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.211.712.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiyai BOP	Orang	28	988.212.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	13	1.076.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	147	147.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	79.25	42.629.503.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					22.227.638.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI	Angka	70	22.227.638.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				22.227.638.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiyai BOP	Orang	496	9.732.396.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	70	12.099.242.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	342	396.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					18.711.061.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI	Angka	177	18.711.061.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				18.711.061.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiyai BOP	Orang	376	5.240.608.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	177	9.498.453.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	3835	3.972.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					1.690.804.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XI	Angka	6	1.690.804.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.690.804.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiyai BOP	Orang	45	648.972.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	6	1.026.832.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	15	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	80.15	47.110.630.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					22.883.082.000		
						Jumlah SMA dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII	Angka	66	22.883.082.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.01.0052			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				22.883.082.000		
						Jumlah GTT-PTT SMA Terbiyai BOP	Orang	486	9.927.368.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	66	12.466.714.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMA	Siswa	428	489.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					20.987.211.000		
						Jumlah SMK dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII	Angka	127	20.987.211.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.02.1.02.0045			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				20.987.211.000		
						Jumlah GTT-PTT SMK Terbiyai BOP	Orang	373	5.645.832.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	127	9.980.379.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SMK	Siswa	5079	5.361.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					3.240.337.000		
						Jumlah SLB dengan manajemen kelembagaan baik Cabdin XII	Angka	6	3.240.337.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.02.1.03.0051			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				3.240.337.000		
						Jumlah GTT-PTT SLB Terbiyai BOP	Orang	101	1.111.176.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	6	2.127.161.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Siswa Penerima BOSDa SLB	Siswa	2	2.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						330.000.000		
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin X	Angka	181	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin X	Angka	13	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	100	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin I	Angka	186	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin I	Angka	17	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	100	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin II	Angka	233	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin II	Angka	21	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin III	Angka	195	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin III	Angka	10	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	100	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin 4	Angka	211	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin 4	Angka	13	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	75	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin IX	Angka	236	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin IX	Angka	15	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	100	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin V	Angka	144	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin V	Angka	25	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	100	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VI	Angka	192	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VI	Angka	29	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	75	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VII	Angka	141	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VII	Angka	24	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	75	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VIII	Angka	151	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	1	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin VIII	Angka	8	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	55	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin XI	Angka	247	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin XI	Angka	4	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	27.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					20.000.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin XII	Angka	193	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
		1.01.03.1.01.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah				20.000.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					7.500.000		
						Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabdin XII	Angka	6	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
		1.01.03.1.02.0007			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus				7.500.000		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
	Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan								59.457.673.000		
						Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	90.88	59.457.673.000		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						59.457.673.000		
						Nilai Kualitas Pembelajaran selaras dunia kerja	Angka	67.77	57.100.000.000	Dinas Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					57.100.000.000		
						Jumlah peserta didik yang terserap dalam DUDI	Siswa	189837	5.100.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0060			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik				5.100.000.000		
						Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	10000	5.100.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian	Unit	225190	52.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
		1.01.02.1.02.0033			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				52.000.000.000		
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	800	52.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Guru SMK yang Memiliki Sertifikat keahlian	%	1.74	2.357.673.000		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					2.357.673.000		
						Pendidik SMK yang mendapat sertifikat keahlian	Orang	815	2.357.673.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.01.02.1.02.0056			Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK				2.357.673.000		
						Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	150	2.357.673.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pendidikan									5.396.218.243.000	Dinas Pendidikan	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan	Angka	70.12		Dinas Pendidikan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan								5.303.959.076.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pendidikan	Angka	3.35	5.303.959.076.000	Dinas Pendidikan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5.303.959.076.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran	%	100	2.423.100.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					998.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	68	998.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				147.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	147.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				33.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				650.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	650.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					140.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	140.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				114.200.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	114.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				26.500.000		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	26.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					868.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	15	868.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				330.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				535.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	535.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					403.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	290	403.600.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	60.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				35.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	60	35.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				132.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	210	132.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				136.100.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	136.100.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	100	1.073.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					339.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	339.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				4.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				65.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					99.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	12	99.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				69.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	69.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	410.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				270.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	270.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					195.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	22	195.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				40.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	100	2.246.890.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					480.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	97	480.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				85.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					310.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	22	310.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				100.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				190.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					593.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	2	593.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				384.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	384.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					863.890.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	36	863.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.290.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	24.290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				18.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	9	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.600.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	26.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				180.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	1.601.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					60.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				60.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					130.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Unit	40	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					721.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	721.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				400.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					290.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	60	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	100	1.093.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					316.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	316.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				6.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					80.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	8	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	15	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					470.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	470.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				214.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	214.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					226.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	56	226.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.200.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				106.400.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	106.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	100	1.409.500.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					586.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	586.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				240.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				33.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					533.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	533.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				265.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	265.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	100	4.030.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN V	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					7.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				7.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					283.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	283.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.072.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	3.072.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				60.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					493.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	5	493.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				290.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					174.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	48	174.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				4.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				66.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	66.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				44.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	44.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	100	1.120.800.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					306.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	306.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					135.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	13	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				135.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					553.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	553.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				175.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				368.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	368.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					126.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	47	126.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				6.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	33	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	100	1.514.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					361.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	361.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				42.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	10	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					738.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	738.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				333.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	333.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					275.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	374	275.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	374	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	100	1.321.250.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					313.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%		313.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				25.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					466.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	466.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.750.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				308.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	308.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					311.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	311.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	1.013.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					385.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cabdin X	%	100	385.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					438.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	438.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				308.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	308.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	18	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	100	1.657.000.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					459.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	459.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	17.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				90.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				7.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					300.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	13	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					645.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	645.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				330.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				300.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					237.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	87	237.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.500.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	60	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	22	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabdin XII	%	100	1.318.300.000	CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Cabdin XII	Dokumen	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					418.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Cadang Dinas XII	%	100	418.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan cabdin XII	Unit	4	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				100.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					526.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cabdin XII	Laporan	12	526.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				380.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	380.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					144.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan cabdin XII	Unit	30	144.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan	%	100	5.282.138.236.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.155.662.053.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	5.155.662.053.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.153.515.173.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	32844	5.153.515.173.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				2.146.880.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	2.146.880.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					583.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0	583.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				55.000.000		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				308.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	308.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				165.000.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				55.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					537.500.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	537.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				275.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	275.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				55.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				80.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				27.493.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	80	27.493.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.007.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	440	100.007.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.626.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.626.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				176.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	176.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				220.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				250.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				175.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				555.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	555.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				900.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.450.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	24	1.450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				200.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				750.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	17	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.860.683.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	119.860.683.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				22.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	22.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.800.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				220.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				117.818.683.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	117.818.683.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.418.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	120	1.418.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				55.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	200	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				82.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	82.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				11.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	11.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				40.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	3	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				330.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	220	330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	250	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan								92.259.167.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pendidikan	Angka	3.15	92.259.167.000	Dinas Pendidikan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						92.259.167.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan	%	100	92.259.167.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					92.259.167.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	92.259.167.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				91.279.167.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	91.279.167.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				800.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	800.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				150.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	150.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									8.425.538.045.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kesehatan									437.886.735.000	Dinas Kesehatan	
						Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.46		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar								60.575.972.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	28.57	60.575.972.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						59.222.757.000		
						Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	63.05	225.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					225.000.000		
						Persentase fasilitas kesehatan yang terkoneksi ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	76.16	194.815.000	Pokja Pusat Data dan Teknologi Informasi	
		1.02.02.1.03.000 2			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				194.815.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4	194.815.000	Pokja Pusat Data dan Teknologi Informasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	17	30.185.000	Pokja Pusat Data dan Teknologi Informasi	
		1.02.02.1.03.000 2			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				30.185.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (masyarakat terpantau kesehatannya melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional)	Dokumen	4	30.185.000	Pokja Pusat Data dan Teknologi Informasi	OPD Provinsi
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai standar	%	41.27	3.369.000.000	Bidang Kesehatan Lanjutan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2.012.500.000		
						Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	%	60	2.012.500.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		1.02.02.1.01.000 4			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.012.500.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	5	1.590.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar (layanan prioritas)	Unit	5	16.300.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar (ramah disabilitas)	Unit	15	13.820.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Non Pemerintah yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	1.965.604.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar (Layanan KJSU)	Unit	3	15.186.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.356.500.000		
						Presentase fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan	%	40	1.356.500.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		1.02.02.1.02.0023			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1.356.500.000		
						Jumlah Kegiatan yang diperlukan dukungan Tim Kesehatan Provinsi	Kegiatan	30	387.290.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	7	969.210.000	Pokja Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi
						Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan terakreditasi paripurna	%	57.14	135.830.000	Bidang Kesehatan Lanjutan	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					135.830.000		
						Persentase Faskes Lanjutan dengan akreditasi minimal paripurna	%	57.72	135.830.000	Pokja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		1.02.02.1.04.0001			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				135.830.000		
						Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	20	135.830.000	Pokja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas pelayanan kesehatan Primer terakreditasi paripurna	%	85.71	60.000.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					60.000.000		
						Persentase Kabupaten/Kota menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP)	%	48.57	30.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
		1.02.02.1.02.0019			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				30.000.000		
						Jumlah dokumen pembinaan Integrasi Layanan Primer (ILP)	Dokumen	4	30.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	OPD Provinsi
						Presentase Fasyankes Primer terakreditasi minimal paripurna	%	94.87	30.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
		1.02.02.1.02.0019			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Mutu Pelayanan Puskesmas dan Labkesmas	Dokumen	40	30.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	OPD Provinsi
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	%	54	537.994.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					537.994.000		
						Persentase Peningkatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	%	54	537.994.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				537.994.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	19	537.994.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota dengan penyedia dan atau pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar mutu	%	37.14	21.000.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					21.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Kabupaten/ Kota dengan tata kelola kesehatan tradisional yang baik	Dokumen	37.14	21.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
		1.02.02.1.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				21.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	4	21.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	OPD Provinsi
						Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Fasilitas pelayanan kesehatan Primer dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai Standar	%	51.19	30.000.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					30.000.000		
						Persentase Fasyankes Primer yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	%	51.19	30.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
		1.02.02.1.02.0019			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA)Puskesmas	Dokumen	4	30.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	OPD Provinsi
						Persentase Kabupaten/Kota yang terlayani pelayanan laboratorium dan kalibrasi diBalai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan	%	25	102.166.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					102.166.000		
						Jumlah Pengadaan dan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi di Fasilitas Layanan Kesehatan	Unit	27	102.166.000	Pokja Pengujian Alat Kesehatan	
		1.02.02.1.01.0013			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				102.166.000		
						Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	10	102.166.000	Pokja Pengujian Alat Kesehatan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten sesuai standar	%	60	1.513.856.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					830.537.000		
						Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	100	677.788.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				677.788.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	677.788.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	70	152.749.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	15.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				137.749.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	2	137.749.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					683.319.000		
						Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	85	683.319.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				683.319.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1	683.319.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang sesuai standar	%	100	1.380.474.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					865.000.000		
						Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	100	750.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				750.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	5	750.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	100	115.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				115.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	2	115.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					515.474.000		
						Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	100	515.474.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				515.474.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1	515.474.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati sesuai standar	%	100	1.495.142.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					720.142.000		
						Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai (BHP), Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan makan minum pasien di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	Unit	100	700.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				700.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	700.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	100	20.142.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				20.142.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	4	20.142.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					775.000.000		
						Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	100	775.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				775.000.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1	775.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase mutu layanan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan sesuai standar	%	72	3.500.000.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					3.500.000.000		
						Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan, Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman, Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Fasilitas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	%	72	3.500.000.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				1.500.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	1.500.000.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2.000.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	17	2.000.000.000	Pokja Layanan, Mutu dan Surveilans	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase mutu layanan Balkesmas Wilayah Ambarawa sesuai standar	%	100	1.768.813.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.229.813.000		
						Persentase pemenuhan obat, Bahan Habis Pakai (BHP), Mahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan makan minum pasien	%	100	1.079.813.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				1.079.813.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	1.079.813.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pemenuhan sarana prasarana di Balkesmas Wilayah Ambarawa	%	100	150.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	6	15.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				135.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	2	135.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					539.000.000		
						Persentase Pencapaian Indikator Mutu dan Program tim mutu di Balkesmas Wilayah Ambarawa	%	100	539.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				539.000.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1	539.000.000	Pokja Pelayanan dan Penunjang Pelayana	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	85	45.083.482.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					45.083.482.000		
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan yang memiliki obat-obatan sesuai standar	%	85	300.000.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				300.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Faskes Lanjutan)	Dokumen	7	300.000.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	OPD Provinsi
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer yang memiliki obat-obatan (termasuk vaksin) sesuai standar	%	85	44.783.482.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	
		1.02.02.1.01.0025			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				270.000.000		
						Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen	2	270.000.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				44.513.482.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	9	44.513.482.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	OPD Provinsi
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1.278.215.000		
						Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang teregistrasi dan berkualitas	%	99	700.000.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					700.000.000		
						Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai program prioritas nasional yang diselenggarakan Bapelkes	%	80	600.000.000	Pokja Penyelenggaraan pelatihan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				600.000.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	660	600.000.000	Pokja Penyelenggaraan pelatihan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pengawasan ketercapaian standar mutu pelatihan	%	80	100.000.000	Pokja Pengembangan dan peningkatan mutu pelatihan	
		1.02.03.1.02.0002			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				100.000.000		
						Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan mutu pelatihan SDM Kesehatan di Bapelkes	Dokumen	100	100.000.000	Pokja Pengembangan dan peningkatan mutu pelatihan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	2.85	578.215.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					273.215.000		
						Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Mamusia Kesehatan sesuai dengan standart	%	66.17	268.025.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		1.02.03.1.01.0001			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan				268.025.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	10	268.025.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai dengan standar	%	67.16	5.190.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		1.02.03.1.01.0002			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				5.190.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang	10	5.190.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					305.000.000		
						Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten	%	90	305.000.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		1.02.03.1.02.0002			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				305.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	4	305.000.000	Pokja Sumber Daya Manusia Kesehatan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						75.000.000		
						Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	91	75.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					75.000.000		
						Persentase penerbitan pengakuan PBF Cabang & Cabang PAK	%	87	75.000.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	
		1.02.04.1.01.0001			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				75.000.000		
						Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana	35	75.000.000	Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan	OPD Provinsi
	Meningkatnya jaminan pembiayaan kesehatan								372.662.615.000		
						Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99.23	372.662.615.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						372.662.615.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	%	74.28	372.662.615.000	Bidang Kesehatan Lanjutan	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					372.662.615.000		
						Persentase kabupaten /kota dengan kenaikan cakupan kepesertaan aktif	%	77.4	372.662.615.000	Pokja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		1.02.02.1.02.0016			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				372.662.615.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	372.662.615.000	Pokja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak								659.570.000		
						Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1000 KH	8.66	105.050.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						105.050.000		
						Angka Kematian Bayi (AKB)	1.000/KH	7.5	105.050.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					105.050.000		
						Angka kematian neonatal	1.000/KH	6.01	46.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				46.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (Angka kematian Neonatal)	Dokumen	4	46.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Cakupan skrining Bayi Baru Lahir	%	40	59.050.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				59.050.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Cakupan Skrining Bayi Baru)	Dokumen	4	59.050.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Angka Kematian Ibu	per 100.000	78.27	554.520.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						554.520.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28.57	14.570.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					14.570.000		
						Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28.57	14.570.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				14.570.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4	14.570.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	28.57	15.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	28.57	15.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				15.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4	15.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	20	25.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					25.000.000		
						Persentase Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	30	25.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4	25.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit mencapai Case Fatality Rate Direct Obstetric (eklampsia dan perdarahan) < 1%	%	68.57	100.000.000	Bidang Kesehatan Lanjutan	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)sesuai standar	%	42.86	63.690.000	Pokja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				63.690.000		
						"Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan" (RS PONEK)	Unit	20	63.690.000	Pokja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMPSR) sesuai standar	%	56.25	36.310.000	Pokja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		1.02.02.1.04.0003			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				36.310.000		
						"Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan" (AMPSR)	Unit	20	36.310.000	Pokja Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2	384.950.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					384.950.000		
						Persentase ANC 6 Kali (K6)	%	82	247.950.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				247.950.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (ANC 6 Kali)	Dokumen	4	247.950.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar	%	17.14	35.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
		1.02.02.1.02.0019			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				35.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	4	35.000.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	OPD Provinsi
						prevalensi anemia pada ibu hamil	%	25	47.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				47.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4	47.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						prevalensi anemia pada remaja putri	%	23	55.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.02.1.02.0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				55.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	4	55.000.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Presentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	28.57	15.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					15.000.000		
						Persentase Puskesmas dengan pemeriksaan ibu hamil 12T yang dilakukan pemantauan di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat wilayah Klaten	%	30	15.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				15.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4	15.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
	Menurunnya penyakit menular (PM) dan penyakit tidak menular (PTM)								2.669.934.000		
						Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	%	34.3	603.490.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						603.490.000		
						Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	%	91	50.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					50.000.000		
						Persentase Kab/Kota dengan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis >= 90%	%	40	50.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Sesuai Standar	Dokumen	4	50.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Angka kematian Dengue	%	0.5	37.130.000	Bidang Penanggulangan Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					37.130.000		
						Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pencegahan dengue	%	50	37.130.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				37.130.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Dengue sesuai standar	Dokumen	4	37.130.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	%	95	100.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		
						Persentase Kab/kota dengan penemuan kasus Tuberkulosis sebesar >= 90%	%	60	100.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Penemuan Tuberkulosis Sesuai Standar	Dokumen	4	100.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Insidensi Hepatitis B	%	1.1	30.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					30.000.000		
						Persentase Kab/Kota yang melaksanakan screning Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil >80%	%	62.8	30.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Hepatitis B sesuai standar	Dokumen	4	30.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Insidensi Human Immunodeficiency Virus (HIV)	%	8	63.570.000	Bidang Penanggulangan Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					63.570.000		
						Persentase Kab/Kota dengan penemuan kasus baru Human Immunodeficiency Virus (HIV) dengan terapi ARV >=90 %	%	31.43	63.570.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				63.570.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	4	63.570.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Neglected Tropical Diseases (Pengendalian Kasus Filariasis dan Kusta)	Kabupaten/Kota	20	51.150.000	Bidang Penanggulangan Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					51.150.000		
						Jumlah Kab/kota yang melaksanakan TAS Filariasis sesuai dengan target	Kabupaten/Kota	3	20.150.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20.150.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	4	20.150.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kab/kota dengan RFT (Release From Treatment) >90%	%	71.43	31.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				31.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	4	31.000.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi malaria	Kabupaten/Kota	35	73.520.000	Bidang Penanggulangan Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					73.520.000		
						Prosentase Kabupaten/Kota mencapai Positivity Rate (PR) Malaria <5%	%	28.6	73.520.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				73.520.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	4	73.520.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28.57	55.510.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					55.510.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28.57	55.510.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				55.510.000		
						Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tuberkulosis Sesuai Standar di Balkesmas wilayah Ambarawa	Dokumen	4	55.510.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	28.57	45.868.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					45.868.000		
						Persentase Kabupaten Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40%	%	28.57	45.868.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				45.868.000		
						Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tuberkulosis Sesuai Standar di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	Dokumen	4	45.868.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Kabupaten Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	28.57	49.952.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					49.952.000		
						Persentase Kabupaten/Kota wilker Balkesmas Wilayah Magelng yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40%	%	28.57	49.952.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				49.952.000		
						Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tuberkulosis Sesuai Standar di Balkesmas wilayah Magelang	Dokumen	4	49.952.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	28.57	46.790.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					46.790.000		
						Persentase Kabupaten Kota wilayah kerja yang melaksanakan investigasi kontak dan tindak lanjutnya minimal >=40% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	28.57	46.790.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				46.790.000		
						Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Sesuai Standar di Balkesmas wilayah Pati	Dokumen	4	46.790.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	52	2.066.444.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.617.222.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	%	40	311.300.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					311.300.000		
						Persentase depresi yang mendapatkan layanan	%	1	79.500.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
		1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				79.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	4	79.500.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten/Kota dengan peningkatan aktivitas fisik	%	22	231.800.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	
		1.02.02.1.02.0019			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				231.800.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Assesment Aktifitas Fisik Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	Dokumen	4	231.800.000	Pokja Tata Kelola, Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	OPD Provinsi
						Persentase Diabetes Melitus terkendali (DM Terkendali)	%	35	35.315.000	Bidang Penanggulangan Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					35.315.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Diabetes Melitus sesuai standar	%	31.43	35.315.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				35.315.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Pengendalian Diabetes Melitus sesuai standar	Dokumen	4	35.315.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	35	344.755.000	Bidang Penanggulangan Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					344.755.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan pengendalian Hipertensi sesuai standar	%	20	310.354.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				310.354.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Pengendalian Hipertensi sesuai standar	Dokumen	4	310.354.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						persentase kabupaten/kota dengan capaian skrining stroke minimal 30%	%	48.57	11.526.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				11.526.000		
						Jumlah Dokumen Hasil persentase kabupaten/kota dengan capaian skrining stroke minimal 30%	Dokumen	4	11.526.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Skrining kolesterol pada 80% Puskesmas	%	31.43	22.875.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				22.875.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Skrining kolesterol pada 80% Puskesmas	Dokumen	4	22.875.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	28.57	65.076.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					65.076.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% Puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan Jiwa & Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28.57	65.076.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				65.076.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	65.076.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan skrining Kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	57.14	60.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					60.000.000		
						Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan jiwa dan penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50%	%	28.57	60.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				60.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	60.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang yang melaksanakan skrining Kesehatan Jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	71.42	100.048.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					100.048.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan 80% puskesmas yang menyelenggarakan skrining Kesehatan jiwa & Penyakit Tidak Menular Prioritas minimal 50%	%	57.14	100.048.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100.048.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	100.048.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	28.57	60.210.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					60.210.000		
						Persenatase Kabupaten/Kota dengan 80% Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menyelenggarakan skrining kesehatan jiwa (Keswa) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas minimal 50% di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	28.57	60.210.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				60.210.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	60.210.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan skrining 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)	%	25.71	351.635.000	Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					351.635.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan faskes yang menyelenggarakan Skrining Kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)	%	20	351.635.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				351.635.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Skrining Kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)	Dokumen	4	351.635.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 10 % institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%	54.28	200.000.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000		
						Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja di tempat kerja formal dan di tempat kerja Informal	%	51.4	150.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
		1.02.02.1.02.0007			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja	Dokumen	4	150.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	OPD Provinsi
						Persentase Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan pengukuran kebugaran	%	40	50.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
		1.02.02.1.02.0007			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kesehatan Olahraga	Dokumen	4	50.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase lanjut usia yang mandiri	%	77	32.000.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					32.000.000		
						Persentase Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	55	32.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
		1.02.02.1.02.0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				32.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	4	32.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun	%	14.4	22.688.000	Bidang Penanggulangan Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					22.688.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	%	60	22.688.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				22.688.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan skrinning merokok pada anak sekolah (usia 10-21 th)	Dokumen	4	22.688.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	25	34.195.000	Bidang Penanggulangan Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					34.195.000		
						Persentase kabupaten/kota yang memiliki proporsi obesitas <23,4%	%	59	34.195.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
		1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				34.195.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Skrinning obesitas melalui pegukuran IMT (Indeks Masa Tubuh) atau LP (Lingkar Perut)	Dokumen	4	34.195.000	Pokja Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						449.222.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Rumah Tangga Sehat	%	34.28	449.222.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					113.000.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	%	57.14	113.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				113.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	4	113.000.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					336.222.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kampanye pembudayaan hidup sehat	%	51.42	336.222.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	
		1.02.05.1.02.0001			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				336.222.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	4	336.222.000	Pokja Kesehatan Komunitas dan Kelompok Rentan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terkendalinya penyakit akibat kejadian luar biasa (KLB) dan bencana								1.318.644.000		
						Persentase Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Surveilans Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian KLB, Bencana, dan Kesehatan Lingkungan	%	77	1.318.644.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.318.644.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	100	27.680.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					27.680.000		
						Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat wilayah Klaten yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	%	100	27.680.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.000 2			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				27.680.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1500	27.680.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/ wabah dan bencana	%	50	330.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					330.000.000		
						Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB, dan krisis kesehatan akibat bencana	%	78	330.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				250.000.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2800	250.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.02.02.1.02.0026			Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				80.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	4	80.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	100	27.300.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					27.300.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	100	27.300.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				27.300.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	500	27.300.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	100	30.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					30.000.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa dan Bencana	%	100	30.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				30.000.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	750	30.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan kejadian luar biasa/wabah serta penanganan bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	100	23.674.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					23.674.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan (pra, saat dan pasca) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	100	23.674.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				23.674.000		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1500	23.674.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	%	8.57	170.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					170.000.000		
						Persentase Kab/Kota dengan fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	80	10.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10.000.000		
						Jumlah Dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan yaitu fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	Dokumen	4	10.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kab/kota dengan kualitas air minum memenuhi syarat	%	5.71	14.900.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				14.900.000		
						Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dalam pemantauan kualitas air minum memenuhi syarat	Dokumen	4	14.900.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kab kota dengan tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat	%	57.1	10.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10.000.000		
						Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan dalam pemantauan tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat	Dokumen	4	10.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kab kota dengan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat	%	20	70.100.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				70.100.000		
						Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan yaitu pengawasan tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat	Dokumen	4	70.100.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kab/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	20	25.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				25.000.000		
						Jumlah dokumen fasilitasi penerapan pilar STBM di Kabupaten/Kota	Dokumen	4	25.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kab/kota sehat	%	45.71	25.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan pelayan an kesehatan lingkungan	Dokumen	4	25.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kab/kota yang telah menyelenggarakan pengawasan kualitas udara	%	5.71	10.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10.000.000		
						Jumlah Dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dalam penyelenggaraan pengawasan kualitas udara	Dokumen	4	10.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Adaptasi perubahan Iklim Bidang Kesehatan	%	25	5.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5.000.000		
						Jumlah Dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan	Dokumen	4	5.000.000	Pokja Kejadian Luar Biasa, Bencana dan Kesehatan Lingkungan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan Surveilans Kesehatan	%	50	559.990.000		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					559.990.000		
						Kabupaten/ Kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	Kabupaten/Kota	28	209.990.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				209.990.000		
						Jumlah Dokumen respon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	Dokumen	4	209.990.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
						Persentase Jemaah Haji yang dilakukan kegiatan surveilans kesehatan	%	42	150.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				150.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan surveilans kesehatan haji	Dokumen	4	150.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
						Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kinerja Surveilans PD3I	%	100	150.000.000		
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				150.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan surveilans PD3I	Dokumen	4	150.000.000		
						Persentase Kabupaten/ Kota yang puskesmasnya melaksanakan surveilans dan intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit	%	70	50.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Surveilans dan Intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit	Dokumen	4	50.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
						Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kekebalan Kelompok	%	100	150.000.000	Bidang Penanggulangan Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					150.000.000		
						Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	97	100.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Dokumen	4	100.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen Mencapai Target	%	82	50.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
		1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen Mencapai Target	Dokumen	4	50.000.000	Pokja Surveilans dan Imunisasi	
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									103.708.301.000	Dinas Kesehatan	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kesehatan								103.383.527.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	90.5	103.383.527.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						103.383.527.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	%	100	5.937.483.000	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.765.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	2.765.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.765.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	2.765.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					252.493.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	252.493.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				108.493.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	108.493.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				42.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.335.030.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.335.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				140.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.122.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1.122.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.072.630.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.072.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					584.460.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	584.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				58.060.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	58.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				18.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				215.400.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	215.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				93.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	93.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Kesehatan	%	100	3.043.561.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	162.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.311.561.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.311.561.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.610.061.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.610.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					570.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	15	570.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				120.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Ambarawa	%	100	3.162.657.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.500.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	1.500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.500.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1.500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					178.039.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	178.039.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.058.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	75.058.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44.481.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	44.481.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.272.543.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.272.543.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				415.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	415.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				856.043.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	856.043.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					212.075.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	56	212.075.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				72.725.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	72.725.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				24.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				43.350.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	43.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Klaten	%	100	1.973.434.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					540.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	540.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				540.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	540.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					109.534.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	109.534.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.415.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.415.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.811.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	12.811.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				708.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	708.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.940.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	24.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.300.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	20.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.360.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.086.040.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.086.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				299.025.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	299.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				784.815.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	784.815.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					237.860.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	237.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				66.940.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	66.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.300.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	14.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				15.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				105.420.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	105.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.200.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	36.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Magelang	%	100	1.999.958.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					753.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	753.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				753.200.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	753.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					124.250.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	124.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.250.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	24.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	300	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				8.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					859.758.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	859.758.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				320.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	320.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				536.758.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	536.758.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					262.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	9	262.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.750.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	70.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				110.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Pati	%	100	2.554.100.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.010.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	1.010.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.010.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	1.010.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					172.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	172.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	17.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53.500.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	53.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.062.992.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.062.992.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				367.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	367.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				689.892.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	689.892.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					309.108.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	309.108.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	120	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				25.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				134.108.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	134.108.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan	%	90.5	84.712.334.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					75.322.944.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	75.322.944.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				74.027.944.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	621	74.027.944.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.250.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	1.250.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	216	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	217	15.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					358.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	358.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				250.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0004			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				108.800.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	108.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.122.114.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.122.114.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				74.637.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	74.637.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.208.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.208.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				67.931.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	67.931.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				69.980.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	69.980.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				124.979.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	124.979.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				64.228.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	64.228.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				652.531.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	652.531.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				39.620.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	39.620.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.665.406.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	6.665.406.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.220.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	2.220.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				111.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	111.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.328.906.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4.328.906.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.228.070.000		
						Jumlah unit barang mmilik daerah penunjang urusan pemerintahand aerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	50	1.228.070.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				427.350.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	44	427.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				143.720.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	143.720.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				407.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	407.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				180.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kesehatan								324.774.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	2.88	324.774.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						324.774.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kesehatan	%	94	324.774.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					324.774.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	94	324.774.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				209.526.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	209.526.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				115.248.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	115.248.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan status gizi									503.086.000	Dinas Kesehatan	
						Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	17		Dinas Kesehatan	
	Menurunnya kasus stunting								503.086.000		
						Persentase Penurunan Kasus Stunting	%	0.15	503.086.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						503.086.000		
						Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	28.57	15.360.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					15.360.000		
						Prosentase Kabupaten/Kota dengan cakupan Datang/Sasaran (D/S) minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28.57	15.360.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				15.360.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	15.360.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	71.42	20.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					20.000.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan cakupan Ditimbang/Sasaran (D/S) minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	57.14	20.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	20.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	28.57	20.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					20.000.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan cakupan D/S minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	28.57	20.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	20.000.000	Pokja Upaya Kesehatan Komunitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati dengan posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	28.57	20.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					20.000.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan cakupan D/S minimal 90% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	42.85	20.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	20.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Prevalensi wasting balita	%	6.7	427.726.000	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					427.726.000		
						Persentase Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	55	292.220.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				292.220.000		
						Jumlah Dokumen pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Pemantauan Balita Tumbuh Kembang)	Dokumen	4	292.220.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kabupaten kota dengan minimal 80% Baduta mendapatkan MPASI sesuai standar	%	92	135.506.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	
		1.02.02.1.02.0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				135.506.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	135.506.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
JUMLAH									542.098.122.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
RSUD Dr. Moewardi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									1.253.600.228.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSUD Dr. Moewardi								1.253.600.228.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Dr. Moewardi	Angka	91.02	1.253.600.228.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.253.600.228.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Dr. Moewardi	%	82.2	1.160.400.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					1.160.400.000.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Parsial RSUD Dr. MOEWARDI	%	100	1.160.400.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.160.400.000.000		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	10	1.160.400.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan RSUD Dr. Moewardi	%	100	93.200.228.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					93.200.228.000		
						persentase ketercapaian tata kelola anggaran,perbendaharaan,dan akuntansi	%	100	93.200.228.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				93.200.228.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1415	93.200.228.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH									1.253.600.228.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									1.133.338.354.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo								1.133.338.354.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Angka	86.75	1.133.338.354.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.133.338.354.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	91	1.074.999.996.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					1.074.999.996.000		
						Realisasi CRR Parsial RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	%	101	1.074.999.996.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.074.999.996.000		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	9	1.074.999.996.000	SUBBAGIAN AKUNTANSI	OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	100	58.338.358.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					58.338.358.000		
						jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	%	100	58.338.358.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				58.338.358.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	886	58.338.358.000	SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
JUMLAH									1.133.338.354.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
RSUD dr. ADHYATMA, MPH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kesehatan									70.055.500.000		
						Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.46			
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH								70.055.500.000		
						Net Death Rate (NDR) RSUD dr. ADHYATMA, MPH	Permil	33.1	70.055.500.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						70.000.000.000		
						Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan, prasarana dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	70.000.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					70.000.000.000		
						Persentase penyediaan alat kesehatan dan prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan Rumah Sakit	%	100	70.000.000.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				70.000.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	3	70.000.000.000	POKJA PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						55.500.000		
						Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	5.24	55.500.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					55.500.000		
						Jumlah penerima kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RSUD dr. Adhyatma, MPH	Orang	1105	55.500.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				55.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	3	55.500.000	POKJA KEPERAWATAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									290.250.879.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSUD dr. ADHYATMA, MPH								290.250.879.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. ADHYATMA, MPH	Angka	94.08	290.250.879.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						290.250.879.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	49.27	190.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					190.000.000.000		
						Cost recovery Rate (CRR) Parsial RSUD dr. Adhyatma, MPH	%	93.42	190.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				190.000.000.000		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	6	190.000.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	100.250.879.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100.250.879.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	100.250.879.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.250.879.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	846	100.250.879.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									360.306.379.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
RSUD dr. REHATTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									122.584.704.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSUD dr. REHATTA								122.584.704.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. REHATTA	Angka	90.01	122.584.704.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						122.584.704.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. REHATTA	%	52	76.028.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					76.028.000.000		
						CRR Parsial RSUD dr. Rehatta	%	90	76.028.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				76.028.000.000		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	4	76.028.000.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD dr. REHATTA	%	100	46.556.704.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					46.556.704.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	14	46.556.704.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				46.556.704.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	302	46.556.704.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
JUMLAH									122.584.704.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kesehatan									55.500.000		
						Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.46			
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo								55.500.000		
						Net Death Rate (NDR) RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Permil	4.02	55.500.000		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						55.500.000		
						Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	10	55.500.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					55.500.000		
						Jumlah penerima kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS	Orang	765	55.500.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				55.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	4	55.500.000	POKJA PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									142.537.779.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSJD Dr. Amino Gondohutomo								142.537.779.000		
						Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Angka	92.76	142.537.779.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						142.537.779.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	37	68.383.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					68.383.000.000		
						CRR Parsial RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	93	68.383.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				68.383.000.000		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	6	68.383.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	74.154.779.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					74.154.779.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	74.154.779.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				74.154.779.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	520	74.154.779.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									142.593.279.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									126.343.716.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN								126.343.716.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	Angka	90.85	126.343.716.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						126.343.716.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	33.01	56.393.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					56.393.000.000		
						CRR Parsial RSJD Dr. Arif Zainudin	%	95.3	56.393.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				56.393.000.000		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	6	56.393.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	69.950.716.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					69.950.716.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	69.950.716.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				69.950.716.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	431	69.950.716.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH									126.343.716.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kesehatan									21.215.394.000		
						Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.46			
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi								21.215.394.000		
						Net Death Rate (NDR) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Permil	13.05	21.215.394.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						21.215.394.000		
						Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	20.900.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					20.900.000.000		
						Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Unggulan	%	100	20.900.000.000		
		1.02.02.1.01.002			Pengembangan Rumah Sakit				20.900.000.000		
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	6	20.900.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Layanan RS di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	315.394.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					315.394.000		
						Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Pelayanan Obat - Obatn dan BMHP	%	100	315.394.000		
		1.02.02.1.01.0027			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				315.394.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	315.394.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									116.631.305.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi								116.631.305.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Angka	91.1	116.631.305.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						116.631.305.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	40.88	62.740.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					62.740.000.000		
						CRR Parsial RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	89.64	62.740.000.000		
		X.XX.01.1.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				62.740.000.000		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	62.740.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	53.891.305.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					53.891.305.000		
						Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	12	53.891.305.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				53.891.305.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	352	53.891.305.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
JUMLAH									137.846.699.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kesehatan									20.698.799.000		
						Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.46			
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam								20.698.799.000		
						Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	Permil	33.1	20.698.799.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						19.448.799.000		
						Persentase capaian indikator mutu layanan Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	100	2.648.584.000		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2.248.584.000		
						Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%		2.248.584.000		
		1.02.02.1.02.003 1			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.248.584.000		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	12	2.248.584.000	Seksi Pelayanan Medis	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					400.000.000		
						Jumlah ketersediaan Telemedicine di RSMD Soepradjo Roestam	Paket		400.000.000		
		1.02.02.1.03.000 2			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				400.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	12	400.000.000	Seksi Pelayanan Medis	
						Persentase pemenuhan layanan dan penunjang layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam sesuai standar	%	100	6.000.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					5.000.000.000		
						Presentase penyediaan layanan dan penunjang pelayanan obat - obatan	%	100	5.000.000.000		
		1.02.02.1.01.002 7			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				5.000.000.000		
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	5.000.000.000	Seksi Penunjang Medis	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					1.000.000.000		
						Persentase unit kerja pelayanan medis yang capaian indikator mutunya sesuai target	%	80	1.000.000.000		
		1.02.02.1.04.000 3			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				1.000.000.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	1	1.000.000.000	Seksi Keperawatan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/alat penunjang medik untuk mendukung layanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	60	9.300.215.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					9.300.215.000		
						Persentase capaian pemeliharaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan"	%	100	500.000.000		
		1.02.02.1.01.0017			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				500.000.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	130	500.000.000	Seksi Penunjang Non Medis	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Presentase penyediaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan RS	%	100	7.800.215.000		
		1.02.02.1.01.0010			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				7.800.215.000		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	2	7.800.215.000	Seksi Pelayanan Medis	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Presentase penyediaan barang operasional RS yang mendukungpelayanan RSMK	%	100	1.000.000.000		
		1.02.02.1.01.0016			Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit				1.000.000.000		
						Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	0	1.000.000.000	Seksi Penunjang Non Medis	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	60	1.500.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.500.000.000		
						Persentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan unggulan	%	100	1.500.000.000		
		1.02.02.1.01.0004			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.000.000.000		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	4	1.000.000.000	Seksi Penunjang Non Medis	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.0009			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				500.000.000		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	4	500.000.000	Seksi Penunjang Non Medis	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						650.000.000		
						Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkatkan Kompetensinya di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	30	650.000.000		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					650.000.000		
						Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi	Kegiatan	5	650.000.000		
		1.02.03.1.02.0001			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				650.000.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	40	650.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						600.000.000		
						Persentase kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dari Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	100	600.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					600.000.000		
						Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh RS	Kegiatan	4	600.000.000		
		1.02.05.1.01.0001			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				600.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	4	600.000.000	Seksi Keperawatan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis									30.000.000.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Angka	84.5			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam								29.980.691.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	Angka	85.5	29.980.691.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						29.980.691.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	100	29.980.691.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					22.717.120.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	22.717.120.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.000.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	160	20.000.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.707.120.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	2.707.120.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	10.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					18.000.000		
						Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	4	18.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				18.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	18.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	20.000.000		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	20.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.400.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.400.000.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	100.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	100.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	50.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	100.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				150.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	150.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				400.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	400.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	500.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.020.000.000		
						Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengadaan Mebel, Pengadaan Mebel, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	4	1.020.000.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				320.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	320.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	500.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				100.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	4	100.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	100.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.105.571.000		
						Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Laporan	4	4.105.571.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.571.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.571.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.070.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.070.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	30.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.000.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.000.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					700.000.000		
						Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangkaPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	10	700.000.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	200.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	200.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				100.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	100.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	100.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	100.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam								19.309.000		
						Indeks Manajemen Risiko Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	Angka	2.75	19.309.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19.309.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	100	19.309.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19.309.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan perundangan	%	100	19.309.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.309.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	9.309.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	10.000.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
JUMLAH									50.698.799.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									186.731.430.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Angka	80.02		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								185.610.430.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Angka	88.8	185.610.430.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						185.610.430.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Jasa Konstruksi	%	100	953.479.000	BALAI JASA KONSTRUKSI	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.674.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	145.674.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.300.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.300.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.600.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	38.600.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000 3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.300.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	9.300.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000 5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.900.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2.900.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.000 6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.500.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	500	3.500.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.000 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.938.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	55.938.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.001 0			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				26.136.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	26.136.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					625.805.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	625.805.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.000 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.600.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				94.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	94.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				530.205.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	530.205.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					182.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	51	182.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	55.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	34	27.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	100	2.265.017.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					89.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	14	89.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				89.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	14	89.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					296.001.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Laporan	100	296.001.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.500.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				63.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	63.500.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	18.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				53.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	53.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				7.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	672	7.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				118.145.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	118.145.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.856.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	20.856.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.292.016.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.292.016.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				207.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	207.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.077.016.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.077.016.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					588.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	216	588.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				198.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	198.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	300.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				90.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	180	90.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	100	1.855.914.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					34.790.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	7	34.790.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				34.790.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	7	34.790.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					383.528.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	383.528.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	50.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	702	10.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				18.528.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	18.528.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					725.626.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	725.626.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.500.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	125.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				593.126.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	593.126.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					711.970.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	62	711.970.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				230.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	230.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				421.970.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	421.970.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	48	60.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	100	1.658.213.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					125.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	25	125.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				125.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	25	125.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					300.711.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	300.711.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	24.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	22.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.500.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	720	3.500.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				148.353.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	148.353.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				18.858.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	18.858.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					792.502.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	792.502.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				155.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	155.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				633.502.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	633.502.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					440.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	73	440.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	100.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	300.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	63	40.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	100	2.576.618.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					124.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	20	124.800.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				124.800.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	20	124.800.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					327.979.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	327.979.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.950.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.950.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				67.100.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	67.100.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.800.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	19.800.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				55.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	55.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.200.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	336	2.200.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				149.575.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	149.575.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				18.354.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	18.354.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.533.479.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.533.479.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.600.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				366.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	366.200.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.160.679.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.160.679.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					590.360.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	73	590.360.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				196.613.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31	196.613.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	300.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				93.747.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	38	93.747.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	100	1.513.461.000	BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					60.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		60.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				60.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	60.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					220.348.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	220.348.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	11.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				73.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	73.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	35.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				6.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	384	6.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.212.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	49.212.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				26.136.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	26.136.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					743.113.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	743.113.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	9.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				190.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	190.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				544.113.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	544.113.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					490.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	64	490.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	180.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	250.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	57	60.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	100	1.344.439.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					75.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	5	75.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				75.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	75.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					195.294.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	195.294.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.150.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.150.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.290.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	44.290.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.240.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	8.240.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.600.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	20.600.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.500.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	672	3.500.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				94.110.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	94.110.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				19.404.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	19.404.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					569.795.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	569.795.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.145.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	125.145.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				438.650.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	438.650.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					504.350.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	73	504.350.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.850.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	200.850.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	250.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				53.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	53.500.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	100	2.882.801.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					185.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	35	185.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				185.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	35	185.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					421.106.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	421.106.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.425.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	17.425.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				72.945.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	72.945.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.218.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.218.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				57.945.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	57.945.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1008	5.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				218.703.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	218.703.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				18.870.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	18.870.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.228.130.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.228.130.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.108.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12.108.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				230.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	230.200.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				985.822.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	985.822.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.048.565.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	88	1.048.565.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				278.675.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	278.675.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				700.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	700.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				69.890.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	71	69.890.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	100	1.356.377.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					47.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	9	47.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				47.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	9	47.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					265.613.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	265.613.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	17.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	40.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	14.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				39.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	39.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.500.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	672	2.500.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				134.465.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	134.465.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				18.648.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	18.648.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					579.538.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	579.538.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.500.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				84.700.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	84.700.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				492.338.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	492.338.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					464.226.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	37	464.226.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				182.226.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	182.226.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	250.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	27	32.000.000	Kasubag Tata Usaha	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	%	100	1.974.164.000	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					235.653.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	235.653.000	Kasubag Tata Usaha	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.250.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.250.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.982.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	48.982.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.190.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	10.190.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.500.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	672	2.500.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				103.161.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	103.161.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				21.570.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	21.570.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.308.956.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.308.956.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				212.220.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	212.220.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.094.736.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1.094.736.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					429.555.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	72	429.555.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				152.100.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	152.100.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	200.000.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				77.455.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	59	77.455.000	Kasubag Tata Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Bengawan Solo	%	100	715.406.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					87.697.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	87.697.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.917.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	18.917.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.480.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	8.480.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.100.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.100.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.600.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	6.600.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51.600.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	51.600.000	Sub Bagian Tata Usaha	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					473.749.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	473.749.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				850.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	850.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				190.071.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	190.071.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				282.828.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	282.828.000	Sub Bagian Tata Usaha	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					153.960.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	72	153.960.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				37.714.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	37.714.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				63.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	63.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				53.246.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	49	53.246.000	Sub Bagian Tata Usaha	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Jratun Seluna	%	100	1.776.259.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					119.233.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	119.233.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.944.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	33.944.000	Sub Bagian Tata Usaha	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18.649.000		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	18.649.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.900.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	10.900.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.740.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	55.740.000	Sub Bagian Tata Usaha	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.071.275.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.071.275.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.500.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				383.510.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	383.510.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				685.265.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	685.265.000	Sub Bagian Tata Usaha	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					585.751.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	72	585.751.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				194.406.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	56	194.406.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				220.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	220.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				171.345.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	171.345.000	Sub Bagian Tata Usaha	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Pemali Comal	%	100	990.873.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					64.234.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	64.234.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.234.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.234.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	20.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.500.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	2.500.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	9.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	17.500.000	Sub Bagian Tata Usaha	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					664.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	664.900.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.200.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				301.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	301.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				362.700.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	362.700.000	Sub Bagian Tata Usaha	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					261.739.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	74	261.739.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				108.999.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	108.999.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	90.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				62.740.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	44	62.740.000	Sub Bagian Tata Usaha	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	1.576.684.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					75.512.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	75.512.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.981.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	14.981.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.555.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	11.555.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				970.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	970.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.250.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.250.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.756.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	41.756.000	Sub Bagian Tata Usaha	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.140.683.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	26	1.140.683.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.328.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.328.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				646.788.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	646.788.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				492.567.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	492.567.000	Sub Bagian Tata Usaha	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					360.489.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	88	360.489.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				101.700.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	101.700.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	80.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				178.789.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	34	178.789.000	Sub Bagian Tata Usaha	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	162.170.725.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					137.626.945.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	59	137.626.945.000	Sub Bagian Keuangan	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				134.578.493.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	942	134.578.493.000	Sub Bagian Keuangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.435.280.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	26	2.435.280.000	Sub Bagian Keuangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				613.172.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	19	613.172.000	Sub Bagian Keuangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					771.850.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	771.850.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				771.850.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	771.850.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					300.169.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	300.169.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				56.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	56.700.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				243.469.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	846	243.469.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.992.931.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.992.931.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				116.324.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	116.324.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				583.290.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	583.290.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	80.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				30.250.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2450	30.250.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.503.568.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.503.568.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	150.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				429.499.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	429.499.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.577.473.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	82	1.577.473.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.577.473.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	82	1.577.473.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					14.978.314.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	55	14.978.314.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	30.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.800.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.800.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				13.148.314.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	31	13.148.314.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.923.043.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	712	3.923.043.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.712.897.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	64	1.712.897.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				999.600.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	999.600.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.210.546.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	642	1.210.546.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								1.121.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Angka	3.05	1.121.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.121.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	1.121.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.121.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.121.000.000	Sub Bagian Program	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				571.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	23	571.000.000	Sub Bagian Program	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				450.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	45	450.000.000	Sub Bagian Program	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	140	50.000.000	Sub Bagian Program	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	50.000.000	Sub Bagian Program	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (IKLH)									102.812.990.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
						Indeks Pelayanan Keciptakaryaan	%	43.95		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Keterwujudan Penataan Ruang	%	58.58		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
						Persentase Tingkat Kualitas Pelayanan Sumber Daya Air	%	67.76		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Aman								37.577.660.000		
						Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	41.2	23.013.309.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						23.013.309.000		
						Persentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	100	14.954.847.000	BIDANG CIPTA KARYA	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					14.954.847.000		
						Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota (Liter/ Detik)	Liter/Detik	12	14.954.847.000	Pokja Pengembangan Air Minum	
		1.03.03.1.01.0017			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				13.599.672.000		
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	12	13.599.672.000	Pokja Pengembangan Air Minum	OPD Provinsi
		1.03.03.1.01.0025			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				1.355.175.000		
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	9	1.355.175.000	Pokja Pengembangan Air Minum	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	31.02	7.808.462.000	BIDANG CIPTA KARYA	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					7.808.462.000		
						Jumlah Sambungan Rumah di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Rumah Tangga)	Sambungan Rumah (SR)	109004	7.808.462.000	Pokja Pengembangan Air Minum	
		1.03.03.1.01.0014			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota				7.808.462.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/ Kota	35	30.891.000	Pokja Pengembangan Air Minum	OPD Provinsi
						Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Perdesaan	Kabupaten/ Kota	7	168.075.000	Pokja Pengembangan Air Minum	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa (lokasi)	Lokasi	12	7.609.496.000	Pokja Pengembangan Air Minum	OPD Provinsi
						Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	42.6	250.000.000	BIDANG CIPTA KARYA	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sambungan Rumah yang mengakses air minum jaringan perpipaan PDAM bersumber dari SPAM Regional	Sambungan Rumah (SR)	154181	250.000.000	Pokja Pengembangan Air Minum	
		1.03.03.1.01.0020			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				250.000.000		
						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit	4	250.000.000	Pokja Pengembangan Air Minum	
						Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	17.83	14.564.351.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						11.770.900.000		
						Persentase Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang terbangun	%	100	11.770.900.000	BIDANG CIPTA KARYA	
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					11.770.900.000		
						Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab/kota yang terbangun (Unit)	Unit	6	11.770.900.000	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	
		1.03.04.1.01.0013			Pembangunan TPA/TPST/SPA				11.325.900.000		
						Jumlah Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kab/kota yang terbangun	Ton/hari	26	11.325.900.000	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.04.1.01.0016			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				445.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	3	445.000.000	Pokja Pengembangan Penyehatan Lingkungan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						2.793.451.000		
						Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terhadap kebutuhan pembinaan dan pemberdayaan	%	100	2.793.451.000		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					2.793.451.000		
						Jumlah Rumah Tangga di Jawa Tengah yang Sudah Mengakses air limbah domestik aman Th-N (Rumah Tangga)	Rumah Tangga	1746439	2.793.451.000		
		1.03.05.1.01.0015			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	1	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.05.1.01.0023			Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				2.693.451.000		
						Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	1625	2.693.451.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD)								15.616.340.000		
						Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) Dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar	%	72.82	15.616.340.000		
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						13.470.116.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	11.17	13.470.116.000		
				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					13.470.116.000		
						Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudahdilakukan pendataan teknis pada tahun n (Lokasi)	Lokasi	115	13.470.116.000		
		1.03.08.1.01.0012			Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				109.668.000		
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang	240	109.668.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.08.1.01.0019			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				13.360.448.000		
						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	2	13.010.089.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n (Dokumen)	Dokumen	2	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	60	100.359.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						2.146.224.000		
						Persentase Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	%	100	146.224.000		
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					146.224.000		
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Dokumen	4	146.224.000		
		1.03.11.1.01.0012			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				146.224.000		
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	160	146.224.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Tersertifikasi	%	49.31	2.000.000.000		
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					1.251.000.000		
						Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang Tersertifikasi S.D Tahun N	Dokumen	3	1.251.000.000		
		1.03.11.1.01.0009			Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				115.000.000		
						Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Orang	20	115.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.01.0011			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				469.537.000		
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang	720	469.537.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.01.0014			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli				666.463.000		
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang	400	666.463.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi					597.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Dokumen	2	597.000.000		
		1.03.11.1.02.0008			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi				544.000.000		
						Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen	2	240.608.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengadaan Buku Konstruksi	Buah	50	6.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani	Kegiatan	1	49.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah stand pameran yang dilaksanakan	Unit	3	248.392.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.02.0009			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI				53.000.000		
						Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	70	53.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					152.000.000		
						Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi	Dokumen	2	152.000.000		
		1.03.11.1.03.0004			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				28.000.000		
						Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	65	28.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11.1.03.0006			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				124.000.000		
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	80	124.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang								997.688.000		
						Persentase implementasi pemanfaaaatan ruang	%	75.31	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						300.000.000		
						Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Program	%	58.86	152.611.000	BIDANG PENATAAN RUANG	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					152.611.000		
						Jumlah dokumen implementasi pemanfaatan ruang	Dokumen	2	152.611.000	Pokja Pemanfaatan Ruang	
		1.03.12.1.03.0007			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				152.611.000		
						Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	2	152.611.000	Pokja Pemanfaatan Ruang	
						Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	%	100	147.389.000	BIDANG PENATAAN RUANG	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					147.389.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	2	147.389.000	Pokja Pemanfaatan Ruang	
		1.03.12.1.03.0004			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				147.389.000		
						Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	2	147.389.000	Pokja Pemanfaatan Ruang	
						Persentase ketersediaan rencana tata ruang	%	52.44	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						300.000.000		
						Persentase Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota	%	39.87	300.000.000	BIDANG PENATAAN RUANG	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang					300.000.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	9	300.000.000	Pokja Perencanaan Tata Ruang	
		1.03.12.1.02.0008			Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota				170.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	8	170.000.000	Pokja Perencanaan Tata Ruang	
		1.03.12.1.02.0013			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				130.000.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	1	130.000.000	Pokja Perencanaan Tata Ruang	
						Persentase Tertib Ruang	%	48	397.688.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						397.688.000		
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	100	21.238.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					21.238.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA	Dokumen	1	21.238.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				21.238.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	21.238.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Jratun Seluna	%	100	20.000.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					20.000.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA	Dokumen	1	20.000.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	20.000.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	100	20.025.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					20.025.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA	Dokumen	1	20.025.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				20.025.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	20.025.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
						Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	36.425.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					36.425.000		
						Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA	Dokumen	1	36.425.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				36.425.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	36.425.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	%	42	107.143.000	BIDANG PENATAAN RUANG	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					107.143.000		
						Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang	Dokumen	2	107.143.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		1.03.12.1.04.0006			Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat				62.789.000		
						Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen	1	62.789.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		1.03.12.1.04.0007			Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan				44.354.000		
						Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	1	44.354.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
						Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	52	192.857.000	BIDANG PENATAAN RUANG	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					192.857.000		
						Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen	2	192.857.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		1.03.12.1.04.0004			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				192.857.000		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	2	192.857.000	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
	Meningkatnya Pengelolaan SDA								48.621.302.000		
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Angka	70.14	24.028.818.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						24.028.818.000		
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Angka	69.3	3.908.392.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.908.392.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA	%	73.01	3.908.392.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.02.002 1			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				3.908.392.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	419.42	3.908.392.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Angka	69.64	7.570.000.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					7.570.000.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA	%	67.05	7.570.000.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.02.002 1			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				7.570.000.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	408.808	7.570.000.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Angka	65.71	4.872.963.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.872.963.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA	%	60.3	4.872.963.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				4.872.963.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	202.39	4.872.963.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Angka	75.9	6.762.463.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					6.762.463.000		
						Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA	%	73.45	6.762.463.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				6.762.463.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	326.51	6.762.463.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	%	68.45	915.000.000	BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					915.000.000		
						Jumlah DI yang direhab	Daerah	2	565.000.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
		1.03.02.1.02.0014			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				565.000.000		
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	0.08	565.000.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
						Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi	Dokumen	2	250.000.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.02.0046			Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air				250.000.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	Dokumen	2	250.000.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	100.000.000	Pokja Pemberdayaan Kelembagaan	
		1.03.02.1.02.0030			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi				100.000.000		
						Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga	1	100.000.000	Pokja Pemberdayaan Kelembagaan	
						Persentase Pengelolaan Sungai dan Penampungan Air	%	70.45	18.465.172.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						18.465.172.000		
						Kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya Kewenangan Provinsi	m3	2688058.55	250.000.000	BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000		
						jumlah laporan peningkatan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama	Dokumen	2	250.000.000	Pokja Pemberdayaan Kelembagaan	
		1.03.02.1.01.0075			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				250.000.000		
						Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga	2	250.000.000	Pokja Pemberdayaan Kelembagaan	
						Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	58.97	100.000.000	BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		
						Persentase Bangunan Embung dan Penampung Air lainnya yang dievaluasi dan dipantau	%	100	100.000.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0125			Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku				100.000.000		
						Jumlah Bangunan Embung dan Penampung Air lainnya yang dievaluasi dan dipantau	Unit	101	100.000.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	%	67.35	491.608.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					491.608.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA	%	100	491.608.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0137			Operasi dan Pemeliharaan Embung				491.608.000		
						Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	20	491.608.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	56.96	900.000.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					900.000.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA	%	100	900.000.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0137			Operasi dan Pemeliharaan Embung				900.000.000		
						Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	32	900.000.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	35.08	747.931.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					747.931.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA	%	81.48	747.931.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0137			Operasi dan Pemeliharaan Embung				747.931.000		
						Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	22	747.931.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	%	76.5	466.527.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					466.527.000		
						Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA	%	100	466.527.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0137			Operasi dan Pemeliharaan Embung				466.527.000		
						Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	14	466.527.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	50.1	530.000.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					530.000.000		
						Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA	%	100	530.000.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				530.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	0.5	530.000.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	53	1.229.106.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.229.106.000		
						Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA	%	100	1.229.106.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				1.229.106.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	0.15	1.229.106.000	Pokja Operasi dan Pemeliharaan	
						Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	%	52.38	13.750.000.000	BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					13.750.000.000		
						akumulasi panjang sarpras sungai dan pantai terbangun	Km	4	11.000.000.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
		1.03.02.1.01.0079			Normalisasi/Restorasi Sungai				1.000.000.000		
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	4	1.000.000.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
		1.03.02.1.01.0127			Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai				10.000.000.000		
						Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	Km	1	10.000.000.000	Pokja Pembangunan dan Rehabilitasi	
						Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Sarana Prasarana SDA, pengelolaan dan peringatan dini banjir	Dokumen	4	300.000.000	Pokja Penanggulangan Banjir dan Hidrologi	
		1.03.02.1.01.0136			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				300.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	300.000.000	Pokja Penanggulangan Banjir dan Hidrologi	
						Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi	Dokumen	1	150.000.000	Pokja Bina Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0117			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi				150.000.000		
						Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	150.000.000	Pokja Bina Operasi dan Pemeliharaan	
						Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	Kegiatan	1	300.000.000	Pokja Bina Operasi dan Pemeliharaan	
		1.03.02.1.01.0090			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi				300.000.000		
						Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	2	300.000.000	Pokja Bina Operasi dan Pemeliharaan	
						Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir	Km	0.5	2.000.000.000	Pokja Penanggulangan Banjir dan Hidrologi	
		1.03.02.1.01.0107			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				2.000.000.000		
						Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	0.5	2.000.000.000	Pokja Penanggulangan Banjir dan Hidrologi	
						Persentase Penyediaan Rencana Teknis terhadap Rencana Pembangunan Infrastruktur SDA	%	62.7	6.127.312.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						6.127.312.000		
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo	%	100	978.762.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					978.762.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	978.762.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.02.1.01.0136			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				978.762.000		
						Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pedayagunaan SDA di BPSDA Bengawan Solo	Dokumen	5	978.762.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	OPD Provinsi
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna	%	100	1.480.000.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.480.000.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	1.480.000.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.02.1.01.0136			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.480.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	1.480.000.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal	%	100	979.975.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					979.975.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	979.975.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.02.1.01.0136			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				979.975.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	979.975.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
						Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	1.213.575.000	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.213.575.000		
						Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	Dokumen	5	1.213.575.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
		1.03.02.1.01.0136			Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1.213.575.000		
						Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pedayagunaan SDA di BPSDA Serayu Bogowonto	Dokumen	5	1.213.575.000	Pokja Pengendalian dan Pendayagunaan	
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Teknis dan Pengembangan Sumber Daya Air	%	100	1.475.000.000	BIDANG BINA TEKNIK	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.287.974.000		
						Jumlah Dokumen Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	2	100.000.000	Pokja Pengelolaan Sistem Informasi	
		1.03.02.1.01.0104			Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)				100.000.000		
						Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	Unit	1	100.000.000	Pokja Pengelolaan Sistem Informasi	
						Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi dan Pengelolaan Aset	Dokumen	2	700.000.000	Seksi Pengelolaan Aset	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.03.02.1.01.0087			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				700.000.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	700.000.000	Seksi Pengelolaan Aset	OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA	Dokumen	1	487.974.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		1.03.02.1.01.0122			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				487.974.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	1	487.974.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					187.026.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi	Dokumen	1	187.026.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		1.03.02.1.02.0032			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				187.026.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	1	187.026.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PE)									349.789.477.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
						Persentase Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Kondisi Mantap	%	48.75		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Terjaganya Kondisi Jalan Mantap								349.789.477.000		
						Persentase Panjang Jaian Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	%	93.61	43.750.502.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						43.750.502.000		
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	95.37	6.324.866.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					6.324.866.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap	Unit	163	2.079.746.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				2.079.746.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	2688.27	2.079.746.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap	Km	196.33	4.245.120.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.003			Rehabilitasi Jalan				4.245.120.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	2	4.245.120.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	94.17	4.367.320.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					4.367.320.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang	Unit	173	1.244.760.000	Pokja Wilayah I	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.244.760.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	2300.6	1.244.760.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Panjang Jalan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang	Km	244.96	3.122.560.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				3.122.560.000		
						Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di BPJ Wilayah Magelang	Km	0.041	991.667.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1	2.130.893.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	92.03	7.795.376.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					7.795.376.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati	Unit	178	1.427.696.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.427.696.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	2725.9	1.427.696.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati	Km	228.99	6.367.680.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				6.367.680.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	3	6.367.680.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	91.36	5.710.253.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					5.710.253.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi	Unit	233	5.710.253.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0052			Rehabilitasi Jembatan				3.173.000.000		
						Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	112.1	3.173.000.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				2.537.253.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	3850.5	2.537.253.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	94.95	3.625.753.000	BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					3.625.753.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	Unit	246	1.503.193.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.503.193.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	3312.65	1.503.193.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	Km	286.82	2.122.560.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				2.122.560.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1	2.122.560.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	92.25	5.384.555.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					5.384.555.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta	Unit	320	3.261.995.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				3.261.995.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	4683.32	3.261.995.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Panjang Jalan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Km	383.74	2.122.560.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				2.122.560.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1	2.122.560.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	95.7	6.608.209.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					6.608.209.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Tegal	Unit	290	2.363.089.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				2.363.089.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	4647.12	2.363.089.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal	Km	359.8	4.245.120.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				4.245.120.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	2	4.245.120.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	94.11	3.934.170.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					3.934.170.000		
						Jumlah Jembatan Provinsi yang di jaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo	Unit	154	1.811.610.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0052			Rehabilitasi Jembatan				809.000.000		
						Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	16.5	809.000.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.03.10.1.01.0057			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.002.610.000		
						Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	2237.41	1.002.610.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	232.62	2.122.560.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0030			Rehabilitasi Jalan				2.122.560.000		
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1	2.122.560.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap	%	63.71	157.094.234.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						157.094.234.000		
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	75.41	13.066.759.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					13.066.759.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJWilayah Cilacap	Km	155.24	13.066.759.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				13.066.759.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	203.85	13.066.759.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	73.4	16.035.366.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					16.035.366.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Magelang	Km	190.93	16.035.366.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				16.035.366.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	259.13	16.035.366.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	70.53	15.892.729.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					15.892.729.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Pati	Km	175.49	15.892.729.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				15.892.729.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	243.82	15.892.729.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	50.84	26.493.201.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					26.493.201.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	Km	195.28	26.493.201.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				26.493.201.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	379.14	26.493.201.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	64.59	19.188.976.000	BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					19.188.976.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Semarang	Km	195.1	19.188.976.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				19.188.976.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	300.07	19.188.976.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	65.54	26.315.888.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					26.315.888.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	Km	277.64	26.315.888.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				26.315.888.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	412.98	26.315.888.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	59.5	24.856.265.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					24.856.265.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Tegal	Km	223.71	24.856.265.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				24.856.265.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	369.96	24.856.265.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	59.12	15.245.050.000	BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					15.245.050.000		
						Panjang jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	Km	146.12	15.245.050.000	Pokja Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				15.245.050.000		
						Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	245.17	15.245.050.000	Pokja Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	%	48.75	148.944.741.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						148.944.741.000		
						Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	Km	1189.63	132.660.096.000	BIDANG BINA MARGA	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					132.660.096.000		
						Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor	Km	15	132.660.096.000	Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	
		1.03.10.1.01.0051			Pelebaran Jalan Menuju Standar				104.520.096.000		
						Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Km	15	104.520.096.000	Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.0054			Pembangunan Jembatan				28.140.000.000		
						Panjang jembatan yang dibangun	Meter	37.3	28.140.000.000	Pokja Pelaksana Jalan Wilayah I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	%	100	5.880.000.000	BIDANG BINA TEKNIK	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					5.880.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	Dokumen	6	5.880.000.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		1.03.10.1.01.0041			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				4.380.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	4	3.405.000.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
						Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan dan jembatan	m2	250	975.000.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		1.03.10.1.01.0043			Survey Kondisi Jalan/Jembatan				1.500.000.000		
						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	2440.12	1.500.000.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
						Persentase Panjang Jalan yang Dileger	%	59.69	380.000.000	BIDANG BINA TEKNIK	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					380.000.000		
						Panjang Jalan yangDilegerkan S.d Tahun-N (KM)	Km	1456.52	380.000.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
		1.03.10.1.01.0044			Pengelolaan Leger Jalan				380.000.000		
						Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	1	380.000.000	Pokja Studi dan Perencanaan Teknis	
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan	%	99.81	5.241.888.000	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					5.241.888.000		
						Jumlah Peralatan yang Tersedia	Unit	1142	5.241.888.000	Seksi Peralatan dan Alat Berat	
		1.03.10.1.01.0045			Pemeliharaan Rutin Jalan				5.241.888.000		
						Jumlah Peralatan bertambah	Unit	120	725.000.000	Seksi Peralatan dan Alat Berat	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Peralatan yang dipelihara (Unit)	Unit	1079	3.528.970.000	Seksi Peralatan dan Alat Berat	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah persediaan bahan/material konstruksi penanganan kerusakan khusus (Unit)	Unit	1050	987.918.000	Seksi Peralatan dan Alat Berat	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pengawasan teknis yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	2.000.000.000	BIDANG BINA MARGA	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					2.000.000.000		
						Jumlah dokumen pengawasan teknis kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Dokumen	4	2.000.000.000	Pokja Pengawasan	
		1.03.10.1.01.0053			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi				2.000.000.000		
						Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	Km	15	2.000.000.000	Pokja Pengawasan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Pengendalian Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi	%	19.67	2.782.757.000	BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					2.782.757.000		
						Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi (Sertifikat)	Sertifikat	1430	2.782.757.000	Seksi Pengujian Mutu	
		1.03.10.1.01.0059			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi				2.782.757.000		
						Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO9001 (Dokumen)	Dokumen	2	419.320.000	Seksi Pengujian Mutu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah pemeliharaan alat uji (Unit)	Unit	116	249.800.000	Seksi Pengujian Mutu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah penambahan alat uji (Unit)	Unit	2	1.648.634.000	Seksi Pengujian Mutu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu (Orang)	Orang	60	31.934.000	Seksi Pengujian Mutu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi (Sertifikat)	Sertifikat	1430	433.069.000	Seksi Pengujian Mutu	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
JUMLAH									639.333.897.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Permukiman dan Agraria bagi Masyarakat									20.344.323.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan	%	62.66		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	55.5		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	74.54		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni								13.215.000.000		
						Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	%	9.88	7.405.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						7.405.000.000		
						Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	16.9	7.405.000.000	Bidang Perumahan	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					50.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Dokumen	1	50.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	
		1.04.02.1.01.0010			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen	1	50.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					130.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Dokumen	1	130.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	
		1.04.02.1.02.0001			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				130.000.000		
						Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang	200	130.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					5.643.000.000		
						Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit	111	5.643.000.000	Pokja Perumahan Umum	
		1.04.02.1.03.0001			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				1.635.000.000		
						Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah	74	1.635.000.000	Pokja Perumahan Umum	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.03.0004			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				4.008.000.000		
						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	37	4.008.000.000	Pokja Perumahan Umum	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					1.582.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit	10000	1.582.000.000	Pokja Perumahan Swadaya	
		1.04.02.1.04.0005			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				1.582.000.000		
						Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	10000	1.582.000.000	Pokja Perumahan Swadaya	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat	%	9.65	5.810.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						5.440.000.000		
						Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan	%	0.47	5.440.000.000	Bidang Perumahan	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					120.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	120.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	
		1.04.02.1.01.0007			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				120.000.000		
						Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	120.000.000	Pokja Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					5.320.000.000		
						Jumlah Unit Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi	Unit	20	950.000.000	Pokja Perumahan Umum	
		1.04.02.1.03.0008			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi				950.000.000		
						Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	20	950.000.000	Pokja Perumahan Umum	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Unit Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Unit	100	4.370.000.000	Pokja Perumahan Swadaya	
		1.04.02.1.03.0008			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi				4.370.000.000		
						Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang Disediakan	Unit	100	4.370.000.000	Pokja Perumahan Swadaya	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						370.000.000		
						Persentase Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan	%	6.84	370.000.000	Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah					370.000.000		
						Jumlah Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	50	370.000.000	Pokja Pembinaan dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman	
		1.04.06.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah				370.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	1	370.000.000	Pokja Pembinaan dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman								5.929.323.000		
						Persentase Kawasan Kumuh	%	37.34	5.929.323.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						3.266.323.000		
						Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	1.254.800.000	Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					1.254.800.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Laporan	2	479.800.000	Pokja Keterpaduan Infrastruktur	
		1.04.03.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum				479.800.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Laporan	2	479.800.000	Pokja Keterpaduan Infrastruktur	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	2	775.000.000	Pokja Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
		1.04.03.1.01.0017			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				775.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	2	775.000.000	Pokja Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%	14.9	2.011.523.000	Bidang Kawasan Permukiman	
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					142.500.000		
						Jumlah Laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	7	142.500.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	
		1.04.03.1.01.0018			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh				142.500.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	245	142.500.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					1.869.023.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	2	171.950.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	
		1.04.03.1.02.0005			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				171.950.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	2	171.950.000	Pokja Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Ha	100	1.697.073.000	Pokja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	
		1.04.03.1.02.0003			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				14.520.000		
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	600	14.520.000	Pokja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.03.1.02.0014			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1.682.553.000		
						Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	Ha	6	1.682.553.000	Pokja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						2.663.000.000		
						Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang disediakan	%	7.69	2.663.000.000	Bidang Kawasan Permukiman	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman					2.663.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Laporan	1	2.663.000.000	Pokja Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman	
		1.04.05.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				25.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	1	25.000.000	Pokja Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.05.1.01.0009			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman				2.638.000.000		
						Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	5	2.638.000.000	Pokja Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terlaksananya Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum								270.000.000		
						Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100	270.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM						270.000.000		
						Persentase Fasilitasi Penetapan Lokasi	%	100	270.000.000	Bidang Pertanahan	
				Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi					270.000.000		
						Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	2	270.000.000	Pokja Fasilitasi Pengadaan Tanah	
		2.10.03.1.01.0003			Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				270.000.000		
						Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Dokumen	2	270.000.000	Pokja Fasilitasi Pengadaan Tanah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terlaksananya Reforma Agraria di Jawa Tengah								930.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria oleh GTRA	%	22.2	930.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						500.000.000		
						Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%	100	500.000.000	Bidang Pertanahan	
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					500.000.000		
						Jumlah Dokumen Permasalahan Pertanahan yang Difasilitasi	Dokumen	1	500.000.000	Pokja Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	
		2.10.04.1.01.0005			Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				375.000.000		
						Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	375.000.000	Pokja Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.04.1.01.0006			Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				125.000.000		
						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	5	125.000.000	Pokja Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						430.000.000		
						Persentase Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	%	100	430.000.000	Bidang Pertanahan	
				Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					430.000.000		
						Jumlah Dokumen Penataan Akses Reforma Agraria	Dokumen	3	430.000.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	
		2.10.06.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota				365.000.000		
						Jumlah Berita Acara dalam rangka Fasilitasi Koordinasi Penataan Akses Reforma Agraria	Berita Acara	2	15.600.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Berita Acara	8	349.400.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.06.1.01.0004			Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi				65.000.000		
						Jumlah Berita Acara dalam rangka Fasilitasi Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Berita Acara	2	6.300.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Laporan	4	58.700.000	Pokja Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									19.466.548.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Angka	79		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								18.627.159.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Angka	91.6	18.627.159.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18.627.159.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	100	18.627.159.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.844.944.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	13.844.944.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.368.944.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	87	13.368.944.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				386.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	386.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				30.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					170.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				155.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					62.305.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	62.305.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	2	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	4	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				11.641.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	79	11.641.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15.664.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	79	15.664.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.115.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.115.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				33.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	33.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				28.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	28.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	13.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				78.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	78.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				630.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	630.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				21.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	2	21.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				200.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.830.515.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	2.830.515.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.325.515.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.325.515.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					604.395.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	294	604.395.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				89.395.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	89.395.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	19	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				13.000.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	56	13.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	145	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	70	42.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								839.389.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Angka	3.06	839.389.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						839.389.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	100	839.389.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					839.389.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	20	839.389.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				497.234.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	497.234.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				292.155.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	292.155.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	2	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									39.810.871.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum									4.792.690.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka	84.5		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah								2.250.000.000		
						Skor kinerja penegakan produk hukum daerah	Angka	6.15	2.250.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.250.000.000		
						Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	%	85.71	2.250.000.000	Bidang Penegakan Hukum Daerah	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					200.000		
						Persentase Penerapan SPM Trantibumlinmas	%	100	200.000	Pokja Penindakan	
		1.05.02.1.01.0015			Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				200.000		
						Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1	200.000	Pokja Penindakan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur					2.221.680.000		
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi	Orang	125	70.850.000	Pokja Pembinaan dan Pengawasan	
		1.05.02.1.02.0002			Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				70.850.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	4	70.850.000	Pokja Pembinaan dan Pengawasan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani	Orang	100	2.150.830.000	Pokja Penindakan	
		1.05.02.1.02.0010			Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20.790.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	20.790.000	Pokja Penindakan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.02.0012			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2.130.040.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Laporan	4	2.130.040.000	Pokja Penindakan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi					28.120.000		
						Jumlah PPNS yang dilakukan pembinaan	Orang	100	28.120.000	Pokja Penindakan	
		1.05.02.1.03.0005			Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				19.920.000		
						Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	1	19.920.000	Pokja Penindakan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.03.0007			Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				8.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	1	8.200.000	Pokja Penindakan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat								2.542.690.000		
						Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Angka	13.2	2.542.690.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.182.690.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas berkategori baik	%	8.57	610.000.000	Bidang Pelindungan Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					610.000.000		
						Jumlah Komandan Regu (Danru) Satlinmas yang dibina	Orang	225	350.000.000	Pokja Pembinaan Satlinmas	
		1.05.02.1.01.0030			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				350.000.000		
						Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang	225	350.000.000	Pokja Pembinaan Satlinmas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Linmas yang diberdayakan	%	0.09	260.000.000	Pokja Pemberdayaan Satlinmas	
		1.05.02.1.01.0022			Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat				260.000.000		
						Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Laporan	1	260.000.000	Pokja Pemberdayaan Satlinmas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pengendalian Tibumtranmas	%	80.71	1.572.690.000	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					1.572.690.000		
						Jumlah tindakan penanganan gangguan Tibumtranmas	Kegiatan	32	231.940.000	Pokja Penanganan	
		1.05.02.1.01.0020			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				231.940.000		
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	4	231.940.000	Pokja Penanganan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah tindakan pencegahan gangguan Tibumtranmas	Kegiatan	81	1.340.750.000	Pokja Pencegahan	
		1.05.02.1.01.0021			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan				1.340.750.000		

					Pengawasan						
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Laporan	4	1.340.750.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						360.000.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	%	29	360.000.000	Bidang Penanganan Kebakaran	
				Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran					360.000.000		
						Persentase Kab/Kota yang dibina terkait penanganan kebakaran	%	29	200.000.000	Pokja Pembinaan	
		1.05.04.1.01.0009			Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota				200.000.000		
						Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Orang	210	200.000.000	Pokja Pembinaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kab/Kota yang telah dilakukan Pemetaan Rawan Kebakaran	%	29	160.000.000	Pokja Pencegahan dan Penanggulangan	
		1.05.04.1.01.0022			Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				160.000.000		
						Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	10	160.000.000	Pokja Pencegahan dan Penanggulangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Satuan Polisi Pamong Praja									17.742.868.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Angka	78		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Satuan Polisi Pamong Praja								17.590.503.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Angka	84.5	17.590.503.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17.590.503.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	17.590.503.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.148.333.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	13	13.148.333.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.846.333.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80	12.846.333.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				282.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	282.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					415.835.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	415.835.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				130.835.000		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	130.835.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				250.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					655.707.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	655.707.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.400.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	75.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				95.155.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	95.155.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				320.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	320.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				40.152.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	40.152.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.559.171.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	2.559.171.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				330.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.227.171.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.227.171.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					761.457.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	75	761.457.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				309.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	309.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	52	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				348.457.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	348.457.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	39.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Satuan Polisi Pamong Praja								152.365.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Angka	3.15	152.365.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						152.365.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	152.365.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					152.365.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	152.365.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				103.305.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	103.305.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				44.060.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	44.060.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				2.500.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	2	2.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	2	2.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
JUMLAH									22.535.558.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah									14.421.444.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Angka	74.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah								14.161.444.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Angka	91.75	14.161.444.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14.161.444.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	14.161.444.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.182.223.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	7.182.223.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.832.223.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	39	6.832.223.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				350.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	350.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					61.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	61.500.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				61.500.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	61.500.000	BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	15.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.000 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	39	5.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.001 0			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	39	10.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					537.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	537.500.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	20.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	1.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				130.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	130.500.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				316.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	316.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				40.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	40.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.528.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	31	1.528.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				828.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	828.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				700.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	700.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.931.721.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	3.931.721.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.500.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				529.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	529.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.401.221.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	3.401.221.000	BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					905.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	163	905.500.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				685.500.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	61	685.500.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	75.000.000	BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	70.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	93	75.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah								260.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Angka	2.735	260.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						260.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	260.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					260.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	260.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	100.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	150.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	6	5.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	5.000.000	BAGIAN TATA USAHA	
Menurunkan Risiko Bencana									5.975.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Indeks Risiko Bencana	Angka	94.75		Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam								5.975.000.000		
						Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0.77	5.975.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						5.975.000.000		
						Persentase data kejadian bencana yang terverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam	%	90	350.000.000	Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase kejadian bencana yang tertangani	%	100	250.000.000	Pokja Pengendalian Operasi	
		1.05.03.1.03.0030			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				150.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	150.000.000	Pokja Pengendalian Operasi	
		1.05.03.1.03.0031			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				100.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	100.000.000	Pokja Pengendalian Operasi	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					100.000.000		
						Jumlah personil kab/kota yang di tingkatkan kapasitas pengolahan data dan informasi bencana	Orang	70	100.000.000	Pokja Pengelolaan Data dan Informasi	
		1.05.03.1.04.0022			Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				100.000.000		
						Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Dokumen	35	100.000.000	Pokja Pengelolaan Data dan Informasi	
						Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam pemulihan pasca bencana	%	100	300.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					300.000.000		
						Jumlah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana	Kegiatan	1	50.000.000	Pokja Rehabilitasi	
		1.05.03.1.04.0009			Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi				50.000.000		
						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Laporan	1	50.000.000	Pokja Rehabilitasi	
						Persentase peningkatan kapasitas Kab/kota dalam pemulihan pasca bencana	%	20	250.000.000	Pokja Rekonstruksi	
		1.05.03.1.04.0007			Penanganan Pasca Bencana Provinsi				80.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	80.000.000	Pokja Rekonstruksi	
		1.05.03.1.04.0013			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi				130.000.000		
						Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	35	130.000.000	Pokja Rekonstruksi	
		1.05.03.1.04.0023			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				40.000.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten/Kota	35	40.000.000	Pokja Rekonstruksi	
						Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam penanganan bencana	%	100	2.500.000.000	Bidang Penanganan Darurat dan Logistik	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					2.500.000.000		
						Persentase masyarakat yang terpenuhi kebutuhan logistik di wilayah rawan bencana	%	100	2.100.000.000	Pokja Logistik	
		1.05.03.1.03.0028			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2.100.000.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	7000	2.100.000.000	Pokja Logistik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	400.000.000	Pokja Kedaruratan	
		1.05.03.1.03.0025			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				200.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	35	200.000.000	Pokja Kedaruratan	
		1.05.03.1.03.0026			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi				200.000.000		
						Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	200	200.000.000	Pokja Kedaruratan	
						Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	%	6.8	2.825.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi					700.000.000		
						Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana	%	0.023	700.000.000	Pokja Pencegahan	
		1.05.03.1.01.0004			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)				700.000.000		
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	3000	700.000.000	Pokja Pencegahan	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					2.125.000.000		
						Persentase penanganan pra bencana	%	100	2.125.000.000	Pokja Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.02.0013			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana				400.000.000		
						Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	30	400.000.000	Pokja Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.02.0023			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				75.000.000		
						Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	200	75.000.000	Pokja Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.02.0025			Penyusunan Rencana Kontinjensi				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Dokumen	2	100.000.000	Pokja Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.02.0026			Pengelolaan Risiko Bencana				1.250.000.000		
						Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	10	1.250.000.000	Pokja Kesiapsiagaan	
		1.05.03.1.02.0030			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				300.000.000		
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	400	300.000.000	Pokja Kesiapsiagaan	
JUMLAH									20.396.444.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Sosial									134.126.589.000	Dinas Sosial	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Sosial	Angka	81.25		Dinas Sosial	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Sosial								133.276.589.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Sosial	Angka	89	133.276.589.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						133.276.589.000		
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial	%	100	124.332.974.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					95.930.738.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	95.930.738.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				94.255.738.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	550	94.255.738.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.300.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	1.300.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	200.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				175.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	175.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					225.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 6			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75.000.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					150.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 5			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				75.000.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				75.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.024.100.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.024.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				60.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.600.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	3.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				75.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				145.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	145.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.300.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1.300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				75.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.509.693.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	20	1.509.693.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				17.500.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	17.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				734.193.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	734.193.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				443.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	443.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				315.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	315.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					18.910.193.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	16	18.910.193.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2026				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4		35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					700.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					200.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4		200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					17.975.193.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4		17.975.193.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.583.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5		5.583.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					150.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6		150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					300.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20		300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					75.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10		75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					4.843.250.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12		4.843.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					215.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24		215.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pantti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100		337.600.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						94.700.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Pantti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100		94.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4		2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.500.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.200.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				12.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					36.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Unit	1	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					114.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Laporan	4	114.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				113.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	113.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					92.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Unit	4	92.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				74.400.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	74.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	542.250.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					160.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				56.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				18.000.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.700.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	46.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					47.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Unit	1	47.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.500.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	47.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					194.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Laporan	4	194.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				192.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	192.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					140.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Unit	4	140.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				95.500.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	95.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	694.955.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					223.155.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	223.155.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.415.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	19.415.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21.120.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.650.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				600.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				18.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				111.370.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	111.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Unit	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					177.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Laporan	4	177.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				177.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	177.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					286.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Unit	4	286.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				51.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.400.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	17.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				203.400.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	203.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	444.025.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					152.100.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	152.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				600.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				24.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.500.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	61.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					24.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit		24.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.700.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	24.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					199.550.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit	4	199.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				196.550.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	196.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.675.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Unit		67.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				39.275.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	39.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.400.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	357.140.000	Dinas Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					116.130.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	116.130.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				18.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	18.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.830.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	41.830.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.760.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Unit	1	9.760.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.760.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	9.760.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					146.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Laporan	4	146.250.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				144.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	144.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Unit	2	85.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	20.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	50.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	493.700.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					99.860.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	99.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				18.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.560.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	30.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.650.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	30.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.650.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	30.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					221.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	221.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				219.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	219.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					141.940.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	141.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				94.040.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	94.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.400.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	13.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	%	100	317.914.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					87.414.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	87.414.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				12.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.214.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	41.214.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					21.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	61.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					148.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit		148.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	503.209.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					118.339.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	118.339.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.915.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	11.915.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.900.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.995.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	20.995.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.500.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				25.507.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	25.507.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.222.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	37.222.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					162.650.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Laporan	4	162.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				160.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	160.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					202.220.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Unit	4	202.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.200.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	49.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.700.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	17.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				111.720.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	111.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.600.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	23.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	548.866.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					166.126.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	166.126.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.750.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				30.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.750.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.626.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	42.626.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					55.990.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	55.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.990.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	55.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					132.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	132.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					194.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	194.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				63.830.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	63.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.670.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	15.670.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	412.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					110.700.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	110.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.200.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				12.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Unit		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					108.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Laporan	4	108.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				107.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					188.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Unit		188.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				170.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	276.750.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					89.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	89.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.200.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				13.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					68.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit		68.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				68.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	68.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit	4	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				61.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	61.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.550.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Unit		54.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.350.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	12.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				22.200.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	437.000.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					98.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	98.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.200.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				12.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36.300.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	36.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					13.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit		13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					220.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	220.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				219.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	219.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					105.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				77.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	308.040.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					93.700.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	93.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.200.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				12.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					13.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Unit		13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					77.740.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Laporan	4	77.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				740.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				77.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Unit		123.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				98.600.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	98.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	528.581.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					164.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	164.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.400.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				20.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	67.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					49.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Unit	1	49.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				49.500.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	49.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					149.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Laporan	4	149.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				146.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	146.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165.681.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Unit	4	165.681.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.536.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	21.536.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				124.145.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	124.145.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	482.627.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					144.177.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	144.177.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.359.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.359.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				21.128.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	21.128.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.000.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	50.890.000		
									50.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					44.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Unit	1	44.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				44.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	44.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					159.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Laporan	4	159.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				157.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	157.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					134.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Unit	4	134.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.700.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	8.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	100	529.050.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					132.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	132.800.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				18.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	18.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	56.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					193.750.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	193.750.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				191.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	191.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					195.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit		195.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	30.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	150.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	7.500.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	458.458.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					163.248.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	163.248.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.259.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.259.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.300.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.952.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	29.952.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.350.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	25.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.055.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	8.055.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				22.132.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	22.132.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.700.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	46.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					34.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.500.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	165.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				160.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.310.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	95.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.960.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	24.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.400.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	7.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				56.200.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	56.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.750.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	6.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pantii Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	287.320.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					97.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Pantii Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	97.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.200.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				12.000.000		
		X.XX.01.1.06.0008				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
					Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51.200.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	51.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12.420.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Unit	1	12.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.420.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	12.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					137.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Laporan	4	137.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				136.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	136.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	373.050.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					115.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	115.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				18.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Unit		7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					163.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Laporan	4	163.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.250.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				161.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	161.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					87.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Unit		87.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	100	610.880.000	Dinas Sosial	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					150.230.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	150.230.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.230.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	9.230.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.400.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.400.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				24.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	24.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.600.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	47.600.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					34.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	34.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	34.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					303.300.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	303.300.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	300.300.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.350.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	123.350.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.800.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	25.800.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				77.550.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	77.550.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Sosial								850.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Sosial	Angka	3.075	850.000.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						850.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Sosial	%	100	850.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					850.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	850.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				400.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)									199.768.275.000	Dinas Sosial	
						Persentase Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	10.01		Dinas Sosial	
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial								10.486.000.000		
						Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	8.88	10.486.000.000	Dinas Sosial	
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						10.286.000.000		
						Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	%	8.88	10.286.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	
				Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					200.000.000		
						Jumlah Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	100	200.000.000	Pokja Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial	
		1.06.02.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	100	200.000.000	Pokja Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial	
				Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					10.086.000.000		
						Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Orang	2300	850.000.000	Pokja Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial	
		1.06.02.1.02.0003			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi				750.000.000		
						Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga	2300	750.000.000	Pokja Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0015			Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan				100.000.000		
						Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Badan Usaha	60	100.000.000	Pokja Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						jumlah orang yang mendapatkan penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	670	400.000.000	Pokja Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.02.1.02.0011			Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				355.720.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	670	355.720.000	Pokja Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0017			Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional				44.280.000		
						Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	Orang	5	44.280.000	Pokja Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Orang	1733	8.836.000.000	Pokja Pemberdayaan Sosial Masyarakat	
		1.06.02.1.02.0004			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				4.384.000.000		
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	100	4.384.000.000	Pokja Pemberdayaan Sosial Masyarakat	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0006			Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi				150.000.000		
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	Lembaga	50	150.000.000	Pokja Pemberdayaan Sosial Masyarakat	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0008			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi				4.002.000.000		
						Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	1318	4.002.000.000	Pokja Pemberdayaan Sosial Masyarakat	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0012			Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota				150.000.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	Layanan	35	150.000.000	Pokja Pemberdayaan Sosial Masyarakat	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.02.1.02.0016			Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota				150.000.000		
						Jumlah Puskesmas Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi	Lembaga	15	150.000.000	Pokja Pemberdayaan Sosial Masyarakat	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						200.000.000		
						Persentase Taman makam pahlawan terkelola	%	100	200.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	
				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi					200.000.000		
						Jumlah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Unit	1	200.000.000	Pokja Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
		1.06.07.1.01.0001			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen	2	150.000.000	Pokja Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
		1.06.07.1.01.0002			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				50.000.000		
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	1	50.000.000	Pokja Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
	Menurunnya Populasi PPKS Fakir Miskin								26.200.000.000		
						Persentase Populasi PPKS Fakir Miskin	%	9.48	26.200.000.000	Dinas Sosial	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						26.200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase PPKS Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	%	0.27	26.200.000.000	Bidang Penanganan Fakir Miskin	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					26.200.000.000		
						Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi (Kelompok)	Orang	7500	17.250.000.000	Pokja Penanganan Fakir Miskin Kelompok	
		1.06.05.1.02.0003			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				17.250.000.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	7500	17.250.000.000	Pokja Penanganan Fakir Miskin Kelompok	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi pengembangan ekonomi (Perseorangan)	Orang	2000	7.250.000.000	Pokja Penanganan Fakir Miskin Perseorangan	
		1.06.05.1.02.0003			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				7.250.000.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	2000	7.250.000.000	Pokja Penanganan Fakir Miskin Perseorangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kab./Kota yang melaksanakan pemutakhiran data	Kabupaten/Kota	35	1.700.000.000	Pokja Pengelolaan Data Fakir Miskin	
		1.06.05.1.02.0008			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				1.700.000.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kabupaten/Kota	35	1.700.000.000	Pokja Pengelolaan Data Fakir Miskin	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)								163.082.275.000		
						Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	163.082.275.000	Dinas Sosial	
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						200.000.000		
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	200.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal					200.000.000		
						Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	Orang	100	200.000.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
		1.06.03.1.01.0003			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				200.000.000		
						Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	200.000.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						74.090.123.000		
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosia di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	100	3.312.095.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					1.032.015.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi	Orang	75	932.015.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				707.410.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	75	707.410.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				136.905.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	75	136.905.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				74.950.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	75	74.950.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				12.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	75	12.750.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti penganthi	Orang	75	100.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				2.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	75	2.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				59.810.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	75	59.810.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	75	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				13.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	75	13.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				370.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	75	370.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.640.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	75	5.640.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	75	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				3.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	75	3.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				11.880.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	11.880.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					2.280.080.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan penyantunan sosial pada panti penganthi	Orang	120	1.782.870.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	120	500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				359.580.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	359.580.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				270.790.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	120	270.790.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				12.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	120	12.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				1.140.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	1.140.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada panti pengganti	Orang	120	497.210.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				39.675.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	120	39.675.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				6.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	120	6.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				437.450.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	437.450.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				470.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	470.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	6.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				6.310.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	6.310.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				250.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	120	250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				455.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	120	455.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	2.336.180.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					2.336.180.000		
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	160	2.103.030.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.553.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	160	1.553.600.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				437.430.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	160	437.430.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				97.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	160	97.600.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				14.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	160	14.400.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Orang	160	233.150.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	160	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				126.350.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	160	126.350.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	160	14.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				8.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	160	8.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	160	8.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				36.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	160	36.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	160	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				30.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	160	30.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				8.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	8.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	100	3.817.310.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					636.040.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	50	562.240.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				470.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	470.500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				60.740.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	60.740.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				21.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	21.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	10.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	50	73.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				37.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	37.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				17.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	17.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				2.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				7.500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	50	7.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				2.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					3.181.270.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	215	2.895.845.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				2.087.650.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	215	2.087.650.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				655.320.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	215	655.320.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				112.875.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	215	112.875.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				40.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	215	40.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Orang	215	285.425.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	215	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				134.875.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	215	134.875.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	215	14.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				8.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	215	8.750.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	215	8.750.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				72.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	215	72.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	215	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				35.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	215	35.900.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				8.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	8.750.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	100	4.350.654.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					1.690.894.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	130	1.526.134.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.227.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	130	1.227.900.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				228.574.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	130	228.574.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				54.660.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	130	54.660.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	130	15.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	133	164.760.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	130	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				91.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	130	91.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	130	14.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				20.440.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	130	20.440.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				3.720.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	130	3.720.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.440.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	130	6.440.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	130	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				3.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	130	3.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				23.760.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	23.760.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					2.659.760.000		
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	195	2.453.795.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.818.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	195	1.818.900.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				382.165.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	195	382.165.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				204.730.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	195	204.730.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				48.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	195	48.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	Orang	195	205.965.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	195	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				104.645.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	195	104.645.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	195	14.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				3.720.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	195	3.720.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.440.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	195	6.440.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				36.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	195	36.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	195	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				15.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	195	15.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				23.760.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	23.760.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	2.593.013.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					497.852.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	35	436.052.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				329.350.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	35	329.350.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				42.320.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	35	42.320.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				61.232.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	35	61.232.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				3.150.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	35	3.150.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	35	61.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	35	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				44.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	35	44.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	35	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	35	6.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				1.140.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	35	1.140.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	35	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	35	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				3.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	35	3.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				1.060.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	1.060.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					1.404.111.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	80	1.120.891.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				500.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	80	500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				186.310.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80	186.310.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				182.536.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	182.536.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	80	800.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				750.745.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80	750.745.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	80	283.220.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				10.800.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80	10.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	80	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				254.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80	254.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				1.940.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	1.940.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				2.710.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	2.710.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				2.710.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	2.710.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	80	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				2.960.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	80	2.960.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					691.050.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	50	625.900.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				473.450.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	473.450.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				61.700.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	61.700.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				84.750.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	84.750.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				6.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	6.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Orang	50	65.150.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				12.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	12.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				9.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	9.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				30.990.000		
						Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	30.990.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				7.300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	7.300.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				3.160.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	50	3.160.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				1.600.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	4	1.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	3.157.773.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.671.232.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada PPS Kasih Mesra	Orang	135	1.551.102.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.270.350.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	135	1.270.350.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				244.127.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	135	244.127.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				29.625.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	135	29.625.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				7.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	135	7.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada PPS Kasih Mesra	Orang	135	120.130.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	135	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				55.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	135	55.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				5.800.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	135	5.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				17.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	135	17.250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				6.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	135	6.750.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	135	6.750.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	135	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				13.500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	135	13.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				12.880.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	12.880.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					1.486.541.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	80	1.154.181.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				750.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	80	750.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				208.880.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80	208.880.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				183.593.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	183.593.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				6.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	80	6.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				754.958.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80	754.958.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	145	332.360.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80	25.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				12.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	80	12.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				272.610.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80	272.610.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				3.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	3.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	7.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				9.400.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	9.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	80	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				2.250.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	80	2.250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	4.623.520.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					3.264.180.000		
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	210	340.850.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				4.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	210	4.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				135.450.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	210	135.450.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	210	14.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				21.570.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	210	21.570.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				10.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	210	10.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				110.250.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	210	110.250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	210	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				35.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	210	35.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				8.280.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	8.280.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial	Orang	210	2.923.330.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				2.023.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	210	2.023.600.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				640.080.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	210	640.080.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				211.650.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	210	211.650.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				48.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	210	48.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					1.359.340.000		
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial	Orang	110	1.263.240.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				1.035.100.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	110	1.035.100.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0002			Penyediaan Sandang				141.240.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	110	141.240.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				62.900.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	110	62.900.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				24.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	110	24.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Orang	110	96.100.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.04.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	110	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.04.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	110	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				45.500.000		
						Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	110	45.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				12.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	110	12.700.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				17.500.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	110	17.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				5.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	4	5.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	110	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	%	100	2.049.206.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					663.416.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS mardi yuwono	Orang	50	583.750.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				472.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	472.750.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				84.450.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	84.450.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.550.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	20.550.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				6.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	6.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada PPS Mardi Yuwono	Orang	50	79.666.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				49.366.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	49.366.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				900.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	900.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				10.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	10.700.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	5.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				3.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	50	3.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				7.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	7.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					1.385.790.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	Orang	70	1.000.630.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				500.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	70	500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				183.080.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	70	183.080.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				146.750.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	70	146.750.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	70	10.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				660.300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	70	660.300.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	Orang	70	385.160.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				35.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	70	35.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				1.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	70	1.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				332.850.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	70	332.850.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				1.110.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	70	1.110.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				3.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	70	3.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	10.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	70	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				1.000.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	70	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	100	3.797.341.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					786.118.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayananpenyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	60	711.128.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				570.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	60	570.600.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				72.888.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	60	72.888.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				62.240.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	60	62.240.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				5.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	60	5.400.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA BARAT
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	60	74.990.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	60	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				37.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	60	37.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	60	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				14.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	60	14.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	60	5.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	60	5.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	60	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA BARAT
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				4.800.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	60	4.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				3.390.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	3.390.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					879.189.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyatuan sosial pada PPS Margo Widodo	Orang	50	631.050.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				500.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				110.450.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	110.450.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				47.100.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	47.100.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				2.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				470.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	470.500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada PPS Margo Widodo	Orang	50	248.139.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				47.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	47.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	14.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				175.239.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	175.239.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				2.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				2.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	50	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				2.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					2.132.034.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	170	1.991.984.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				1.591.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	170	1.591.200.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				293.674.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	170	293.674.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				86.710.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	170	86.710.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				20.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	170	20.400.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Orang	170	140.050.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	170	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	170	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				84.900.000		
						Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	170	84.900.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				15.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	170	15.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				18.000.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	170	18.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				6.650.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	4	6.650.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS				500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang	170	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	4.577.556.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.349.981.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada PPS Ngudi Rahayu	Orang	190	2.181.272.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.787.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	190	1.787.900.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				254.562.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	190	254.562.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				121.710.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	190	121.710.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				17.100.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	190	17.100.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada PPS Ngudi Rahayu	Orang	190	168.709.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	190	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				87.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	190	87.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				6.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	190	6.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				35.202.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	190	35.202.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				9.930.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	190	9.930.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				8.620.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	190	8.620.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	190	1.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				9.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	190	9.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				9.357.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	9.357.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					2.227.575.000		
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Orang	140	2.018.220.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.359.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	140	1.359.400.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				426.720.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	140	426.720.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				219.500.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	140	219.500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				12.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	140	12.600.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Orang	140	209.355.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	140	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				96.520.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	140	96.520.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	140	14.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				6.240.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	140	6.240.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.240.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	140	6.240.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				31.500.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	140	31.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	140	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				48.180.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	140	48.180.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				4.275.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	4.275.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	100	2.465.760.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.465.760.000		
						Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Orang	200	2.257.260.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.907.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	1.907.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				242.960.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200	242.960.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				89.300.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	200	89.300.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				18.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	200	18.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS penyandang disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Orang	200	208.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	200	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				94.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	200	94.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	200	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				54.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	200	54.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	10.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.515.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	200	5.515.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	200	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				30.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	200	30.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				5.885.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	5.885.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	1.585.750.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.585.750.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Orang	115	1.386.550.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.068.650.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	115	1.068.650.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				199.900.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	115	199.900.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				108.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	115	108.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	115	10.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Orang	115	199.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				3.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	115	3.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				128.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	115	128.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				6.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	115	6.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				24.100.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	115	24.100.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	115	5.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	115	5.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	115	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				15.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	115	15.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				11.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	11.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	2.676.195.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					1.350.680.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	100	1.241.880.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				941.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	941.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				197.980.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	197.980.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				93.900.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	93.900.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				9.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	100	9.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	100	108.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	100	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				48.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	48.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	100	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	27.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	5.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	5.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	100	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				13.500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	100	13.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	5.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.325.515.000		
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	85	1.208.665.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				825.350.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	85	825.350.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				327.490.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	85	327.490.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				48.175.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	85	48.175.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				7.650.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	85	7.650.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Orang	85	116.850.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				8.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	85	8.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				52.100.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	85	52.100.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	85	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	85	5.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	85	5.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				18.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	85	18.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	85	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				15.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	85	15.700.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				8.950.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	8.950.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	100	4.563.239.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					1.365.882.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	1.232.750.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				941.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	941.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				197.550.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	197.550.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				89.200.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	89.200.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	100	5.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	133.132.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	100	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				64.500.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	64.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	100	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.418.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	27.418.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				6.240.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	6.240.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.624.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	6.624.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	100	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				10.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	100	10.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				9.650.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	9.650.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					1.836.113.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	1.422.538.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				500.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	100	500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				244.300.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100	244.300.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				239.828.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	239.828.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	100	1.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				936.910.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100	936.910.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	100	413.575.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				14.925.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	14.925.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	100	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				373.940.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	373.940.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				3.480.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	3.480.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	5.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				3.970.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	3.970.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	100	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				4.560.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	100	4.560.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					765.984.000		
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	50	667.434.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				486.875.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	486.875.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				146.370.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	146.370.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				29.689.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	29.689.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				4.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	4.500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	50	98.550.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				44.250.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	44.250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				11.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	11.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				2.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				11.250.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	50	11.250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				23.350.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	23.350.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				2.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					595.260.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	40	512.490.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				381.330.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	40	381.330.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				84.760.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	40	84.760.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				43.400.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	40	43.400.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				3.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	40	3.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Orang	40	82.770.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				12.300.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	40	12.300.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				9.624.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	40	9.624.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				34.800.000		
						Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	40	34.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				21.546.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	40	21.546.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				2.000.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	40	2.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				2.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	4	2.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS				500.000		
						Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang	40	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	100	3.165.280.000		
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					2.602.940.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	215	2.425.620.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				2.001.850.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	215	2.001.850.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				267.475.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	215	267.475.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				138.295.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	215	138.295.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				18.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	215	18.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Orang	215	177.320.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	215	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				99.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	215	99.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	215	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				28.700.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	215	28.700.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				7.440.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	215	7.440.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.440.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	215	7.440.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	215	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				18.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	215	18.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				7.440.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	7.440.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					562.340.000		
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial samekto karti	Orang	40	481.620.000		
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				386.990.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	40	386.990.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				67.465.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	40	67.465.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				19.425.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	40	19.425.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				7.740.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	40	7.740.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial	Orang	40	80.720.000		
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				8.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	40	8.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				40.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	40	40.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				900.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	40	900.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				1.220.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	40	1.220.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				1.220.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	40	1.220.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				9.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	40	9.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	40	500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				10.880.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	40	10.880.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				9.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	9.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	100	3.963.440.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					2.610.620.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	145	1.854.620.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				1.500.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	145	1.500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				365.000.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	145	365.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				120.670.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	145	120.670.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				3.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	145	3.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA BARAT
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				1.364.450.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	145	1.364.450.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	145	756.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				21.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	145	21.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	145	14.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				690.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	145	690.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				7.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	145	7.250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	145	7.250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				7.250.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	7.250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	145	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				7.250.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	145	7.250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.352.820.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Orang	90	1.210.470.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				873.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	90	873.900.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				274.320.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	90	274.320.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				47.250.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	90	47.250.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				15.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	90	15.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Orang	90	142.350.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	90	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				65.250.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	90	65.250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	90	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				7.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	90	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				4.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	90	4.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				36.000.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	90	36.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	90	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				16.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	90	16.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				4.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	4.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	3.795.580.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					2.266.061.000		
						Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Penyantunan Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	185	2.123.346.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.743.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	185	1.743.800.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				236.351.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	185	236.351.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				131.195.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	185	131.195.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				12.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	185	12.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	185	142.715.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				2.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	185	2.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				87.145.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	185	87.145.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				14.760.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	185	14.760.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				10.800.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	185	10.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.740.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	185	2.740.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				3.480.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	185	3.480.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	185	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				6.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	185	6.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				14.390.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	14.390.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					1.529.519.000		
						Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Penyantunan Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	80	1.169.835.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				500.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	80	500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				217.680.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80	217.680.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				178.655.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80	178.655.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	80	10.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				763.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80	763.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah anak terlantar mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Orang	80	359.684.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				298.856.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80	298.856.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				10.870.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	80	10.870.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	80	900.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.740.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	2.740.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				29.940.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	80	29.940.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				14.460.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	14.460.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				550.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	80	550.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				1.368.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	80	1.368.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	2.240.215.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					2.240.215.000		
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial Penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Orang	145	2.002.035.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				1.407.950.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	145	1.407.950.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0002			Penyediaan Sandang				441.960.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	145	441.960.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				116.125.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	145	116.125.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				36.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	145	36.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Orang	145	238.180.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				10.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	145	10.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.03.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				112.625.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	145	112.625.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				5.400.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	145	5.400.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				5.940.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	145	5.940.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.940.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	145	5.940.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0012			Pemulasaraan				61.125.000		
						Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	145	61.125.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0015			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar				1.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	145	1.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0016			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar				28.900.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	145	28.900.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				7.250.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	7.250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	3.441.200.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					668.450.000		
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	50	578.850.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				470.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	470.500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0002			Penyediaan Sandang				76.100.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	76.100.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0003			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				27.750.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	27.750.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				4.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	4.500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rahabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	50	89.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				52.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	52.800.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				17.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	17.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				2.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0017			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	50	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0019			Pemulasaraan				7.500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	50	7.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				2.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	2.500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					1.263.700.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	75	976.550.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				500.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	75	500.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				168.300.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	75	168.300.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				101.250.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	75	101.250.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	75	750.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				705.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	75	705.750.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	75	287.150.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				7.200.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	75	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				7.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	75	7.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				257.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	75	257.250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				3.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	75	3.750.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				3.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	75	3.750.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				3.750.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	3.750.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				500.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	75	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				3.750.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	75	3.750.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.509.050.000		
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	120	1.384.150.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.05.0001			Penyediaan Permakanan				1.129.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	120	1.129.200.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0002			Penyediaan Sandang				184.080.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	184.080.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0003			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				63.000.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	120	63.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0004			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				7.870.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	120	7.870.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Orang	120	124.900.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.05.0005			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	120	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0006			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				3.600.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	120	3.600.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.04.1.05.0007			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				92.000.000		
						Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	92.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0009			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				13.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	120	13.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0010			Pemulangan ke Daerah Asal				6.000.000		
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	120	6.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				6.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	4	6.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.05.0013			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS				500.000		
						Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang	120	500.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	100	5.725.910.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					5.725.910.000		
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan penyantunan sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	310	4.330.560.000	Pokja Penyantunan	
		1.06.04.1.02.0001			Pengasuhan				2.000.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	310	2.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0003			Penyediaan Sandang				709.560.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	310	709.560.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0004			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				631.600.000		
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	310	631.600.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0005			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				14.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	310	14.400.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				2.973.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	310	2.973.000.000	Pokja Penyantunan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	Orang	310	1.395.350.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	
		1.06.04.1.02.0006			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				195.000.000		
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	310	195.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0007			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				38.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	310	38.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0009			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				1.063.300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	310	1.063.300.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0010			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				9.250.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	310	9.250.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0011			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				21.200.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	310	21.200.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				62.900.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	62.900.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0022			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar				2.000.000		
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	310	2.000.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0023			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti				3.700.000		
						Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	310	3.700.000	Pokja Bimbingan Rehabilitasi Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti	%	100	5.852.906.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti					2.769.900.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan reahabilitasi di dalam Panti	Orang	2100	2.769.900.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	
		1.06.04.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				1.882.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	2100	1.882.500.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0004			Penyediaan Alat Bantu				487.400.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	20	487.400.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.01.0021			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				400.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	4	400.000.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti					1.840.656.000		
						Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	1700	1.840.656.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Anak	
		1.06.04.1.02.0015			Penyediaan Permakanan				1.542.300.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	1700	1.542.300.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Anak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.02.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				298.356.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	4	298.356.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Anak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					652.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah lanjut usia terlantr yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	400	652.100.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	
		1.06.04.1.03.0001			Penyediaan Permakanan				477.600.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	400	477.600.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0004			Penyediaan Alat Bantu				49.500.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	20	49.500.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.03.0017			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantr di dalam Panti				125.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantr Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	125.000.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					439.750.000		
						Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti	Orang	250	439.750.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	
		1.06.04.1.04.0001			Penyediaan Permakanan				254.750.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	250	254.750.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.04.1.04.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantr di dalam Panti				185.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	4	185.000.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					150.500.000		
						Jumlah PMKS lain diluar HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan reahabilitasi di dalam Panti	Orang	20	150.500.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	
		1.06.04.1.05.0011			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				150.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	4	150.500.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						84.394.572.000		
						Persentase rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan atas Pengajuan Pengangkatan Anak	%	100	350.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
				Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal					350.000.000		
						Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan	Dokumen	200	350.000.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Anak	
		1.06.05.1.01.0001			Pengangkatan Anak antar WNI				350.000.000		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	200	350.000.000	Pokja Rehabilitasi Sosial Anak	
						Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima pelayanan jaminan sosial	%	100	84.044.572.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					84.044.572.000		
						Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	Orang	10250	84.044.572.000	Pokja Jaminan Sosial	
		1.06.05.1.02.0006			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				84.044.572.000		
						Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	10250	84.044.572.000	Pokja Jaminan Sosial	
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						4.397.580.000		
						Persentase Perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	4.397.580.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					4.397.580.000		
						Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Orang	5000	3.146.080.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				2.115.018.000		
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	5000	2.115.018.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.00011			Penyediaan Sandang				215.000.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	5000	215.000.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.00013			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				177.000.000		
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Orang	5000	177.000.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.00016			Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana				364.750.000		
						Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	300	364.750.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				174.312.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	300	174.312.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial				100.000.000		
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	100	100.000.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	Orang	500	1.251.500.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
		1.06.06.1.01.0001			Penyediaan Permakanan				234.000.000		
						Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	250	234.000.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.00011			Penyediaan Sandang				32.500.000		
						Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	250	32.500.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.00013			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				70.000.000		
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Orang	250	70.000.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.00022			Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam				165.000.000		
						Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	150	165.000.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.06.06.1.01.0004			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				650.000.000		
						Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	500	650.000.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		1.06.06.1.01.0005			Pelayanan Dukungan Psikososial				100.000.000		
						Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	75	100.000.000	Pokja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									333.894.864.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi									77.615.772.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Angka	79.8		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								77.237.407.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Angka	87.6	77.237.407.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						77.237.407.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	%	100	851.688.000	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.560.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	43.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.600.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	42.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				960.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					18.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				18.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					69.520.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	69.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.223.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.223.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.266.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.266.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.461.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.461.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.550.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33.020.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	33.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					543.268.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	543.268.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.812.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.812.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.900.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	202.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				332.556.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	332.556.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					177.340.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	50	177.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				94.940.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	94.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				72.400.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	72.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	%	100	1.300.000.000	Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					54.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen		2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					177.354.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	177.354.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.970.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.303.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.303.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.273.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.160.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.100.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				113.548.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	113.548.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					879.596.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	27	879.596.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.920.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	1.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	180.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				697.476.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	697.476.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					187.050.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	15	187.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.860.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	19.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				62.300.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	62.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				93.890.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	93.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	%	100	1.300.000.000	Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				45.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					146.073.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	146.073.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.350.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.439.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.439.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.811.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2.811.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.500.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.800.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.173.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	78.173.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					170.177.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	22	170.177.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				170.177.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	170.177.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					872.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	872.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				301.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	301.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				565.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	565.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.950.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	9	65.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34.500.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.450.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	31.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	%	100	1.111.155.000	Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					53.286.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	53.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				53.286.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	53.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					144.495.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	144.495.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.601.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				158.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	158.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105.736.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	105.736.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					26.201.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	26.201.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.201.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	26.201.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					765.173.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	765.173.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				639.173.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	639.173.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					122.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	40	122.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	%	100	1.350.000.000	Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	34.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34.800.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	34.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					104.076.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	104.076.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.093.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	21.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				27.908.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	27.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.671.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.671.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.124.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	9.124.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.720.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	16.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18.560.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	18.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					765.080.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	765.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				225.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				538.680.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	538.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					446.044.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	40	446.044.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.679.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	13.679.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.733.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	38.733.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				17.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				376.632.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	376.632.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	71.324.564.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					62.755.977.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	62.755.977.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				62.251.652.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	420	62.251.652.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				412.980.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	412.980.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				91.345.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	91.345.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					36.100.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	36.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				7.300.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	7.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10.900.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	10.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7.900.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	7.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.234.695.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.234.695.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32.385.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	32.385.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				62.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	62.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				54.093.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	54.093.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				108.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	108.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.632.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	21.632.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				63.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	63.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				875.085.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	875.085.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				18.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	18.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					26.048.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	30	26.048.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.048.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	26.048.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.633.036.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	40	6.633.036.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.125.458.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.125.458.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				145.939.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	145.939.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.356.639.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.356.639.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					588.708.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	75	588.708.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				198.407.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	198.407.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				62.800.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	62.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				65.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				157.496.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	157.496.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				62.010.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	62.010.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.995.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	32.995.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								378.365.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Angka	3.01	378.365.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						378.365.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	378.365.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					378.365.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	81	378.365.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				237.284.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	237.284.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.691.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	100.691.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				28.290.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	17	28.290.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				12.100.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	12.100.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Penduduk Yang Bekerja									12.052.164.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (EPR)	%	69.54		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja								6.303.845.000		
						Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	%	10	6.303.845.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						6.303.845.000		
						Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	14.29	93.677.000	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja					93.677.000		
						Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	%	31.82	93.677.000	Pokja Standarisasi dan Sertifikasi	
		2.07.03.1.02.0001			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				93.677.000		
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK	26	93.677.000	Pokja Standarisasi dan Sertifikasi	
						Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	9.28	331.323.000	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					331.323.000		
						Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	%	33.33	331.323.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				279.463.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	165	279.463.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				51.860.000		
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	3	51.860.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	
						Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian	%	10	2.065.542.000	Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					2.065.542.000		
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	%	100	3.845.000	Pokja Pemasaran	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				3.845.000		
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	3	3.845.000	Pokja Pemasaran	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	%	55,6	2.036.697.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				2.036.697.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	580	2.036.697.000	Pokja Pelatihan	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	25.000.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				25.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	4	25.000.000	Pokja Pelatihan	
						Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri	%	83,68	1.550.000.000	Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					1.550.000.000		
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	%	83,68	1.550.000.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				1.550.000.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	264	1.550.000.000	Pokja Pelatihan	
						Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	%	23,38	2.263.303.000	Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					2.263.303.000		
						Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI) diberikan pelatihan	%	23,38	2.218.553.000	Pokja Pelatihan	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				2.218.553.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	424	2.218.553.000	Pokja Pelatihan	
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	%	40	11.750.000	Pokja Pemasaran	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				11.750.000		
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	8	11.750.000	Pokja Pemasaran	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	33.000.000	Pokja Pelatihan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				33.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	3	33.000.000	Pokja Pelatihan	
	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja								1.781.635.000		
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	63.15	121.635.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						121.635.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	85.71	121.635.000	SEKRETARIAT	
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					121.635.000		
						Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	84	121.635.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0001			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				51.510.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	51.510.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0003			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				31.605.000		
						Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Orang	35	31.605.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0004			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				38.520.000		
						Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	Orang	35	38.520.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
						Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	%	74.39	1.660.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						1.510.000.000		
						Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	21.75	14.290.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					14.290.000		
						Persentase penyandang disabilitas yang ditempatkan	%	58.82	14.290.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.01.0006			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				14.290.000		
						Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Orang	49300	14.290.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
						Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	%	68.5	450.915.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					320.609.000		
						Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	%	47.68	320.609.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.01.000			Perluasan Kesempatan Kerja				320.609.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	210	320.609.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					130.306.000		
						Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI Purna diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	%	51.25	110.697.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.04.0001			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				27.063.000		
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	80	27.063.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.07.04.1.04.0004			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				83.634.000		
						Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	60	83.634.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
						Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	%	1.68	19.609.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.04.0002			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik				15.089.000		
						Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Perusahaan	10	15.089.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.04.0003			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				4.520.000		
						Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang	100	4.520.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
						Pesentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	67.71	37.470.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					37.470.000		
						Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	38.63	37.470.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.03.0001			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				37.470.000		
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	37.470.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
						Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	44.05	1.007.325.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					356.380.000		
						Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi perantaraan kerja	%	75	356.380.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.01.0001			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja				69.870.000		
						Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	100	69.870.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.01.0002			Pelayanan Antar Kerja				245.290.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	1040	245.290.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				24.860.000		
						Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	200	24.860.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.01.0004			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)				16.360.000		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	50	16.360.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					3.820.000		
						Persentase ijin LPTKS yang diterbitkan	%	60	3.820.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
		2.07.04.1.02.0002			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS				3.820.000		
						Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	2	3.820.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					638.040.000		
						Presentase pelaporan Informasi Pasar Kerja Kabupaten/Kota yang meliputi data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja	%	83.33	638.040.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.07.04.1.03.0003			Job Fair/Bursa Kerja				638.040.000		
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	638.040.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
				Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					9.085.000		
						Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	%	100	9.085.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.07.04.1.05.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				9.085.000		
						Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang	200	9.085.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						150.000.000		
						Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian	%	1.2	60.000.000	Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					60.000.000		
						Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan	%	100	60.000.000	Pokja Pelatihan	
		3.32.03.1.01.0006			Pelatihan Transmigrasi				60.000.000		
						Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	10	60.000.000	Pokja Pelatihan	
						Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	%	2.06	90.000.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					90.000.000		
						Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	%	10.31	90.000.000	Pokja Transmigrasi	
		3.32.03.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				90.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	90.000.000	Pokja Transmigrasi	
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja								3.966.684.000		
						Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah	56.4	3.966.684.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						1.268.372.000		
						Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	68	375.000.000	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					334.000.000		
						Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	%	21.5	334.000.000	Pokja Produktivitas	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				334.000.000		
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	275	334.000.000	Pokja Produktivitas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi					41.000.000		
						Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan	%	2	41.000.000	Pokja Produktivitas	
		2.07.03.1.04.0001			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				41.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1	41.000.000	Pokja Produktivitas	
						Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas	%	73	893.372.000	Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					857.088.000		
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	%	27.78	79.192.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				79.192.000		
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	3	79.192.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan lembaga pendidikan diberikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas / kewirausahaan	%	72.99	772.896.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				772.896.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	861	772.896.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	5.000.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				5.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	1	5.000.000	Pokja Pelatihan Produktivitas	
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					36.284.000		
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	5	36.284.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				36.284.000		
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	12	36.284.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkatan Produktivitas	
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						950.000.000		
						Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	51.03	141.605.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota					141.605.000		
						Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	%	93.75	141.605.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	
		2.07.05.1.01.0001			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial				53.333.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	70	53.333.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.07.05.1.01.0002			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial				14.158.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Perusahaan	70	14.158.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	
		2.07.05.1.01.0003			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				74.114.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	35	74.114.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	
						Persentase LKS Bipartit yang terbentuk	%	49.8	295.084.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					295.084.000		
						Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	50.66	208.536.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
		2.07.05.1.02.0003			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				13.316.000		
						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	1000	13.316.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
		2.07.05.1.02.0004			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi				195.220.000		
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	36	195.220.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
						Persentase perusahaan yang telah dibina pembuatan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	%	86.85	86.548.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
		2.07.05.1.02.0005			Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				86.548.000		
						Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	39	86.548.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96.75	216.272.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					216.272.000		
						Persentase Penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI)	%	96.77	47.272.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
		2.07.05.1.02.0002			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				47.272.000		
						Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	125	47.272.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
						Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	%	96.74	169.000.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.07.05.1.02.0001			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				169.000.000		
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	%	196	169.000.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
						Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	43.26	297.039.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)					297.039.000		
						Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	%	1.41	297.039.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
		2.07.05.1.03.0001			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)				245.476.000		
						Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	245.476.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
		2.07.05.1.03.0003			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)				23.197.000		
						Jumlah penetapan UMK	Surat Keputusan	1	23.197.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
		2.07.05.1.03.0005			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				28.366.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	100	28.366.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						1.748.312.000		
						Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	80.8	1.300.000.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					1.300.000.000		
						Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	%	55.21	231.305.000	Pokja Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	
		2.07.06.1.01.0002			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan				231.305.000		
						Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	180	231.305.000	Pokja Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	%	37.87	306.975.000	Pokja Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				306.975.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	92	306.975.000	Pokja Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	%	62.92	761.720.000	Pokja Norma Kerja	
		2.07.06.1.01.0001			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				761.720.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	500	761.720.000	Pokja Norma Kerja	
						Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	27.06	448.312.000		
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					448.312.000		
						Persentase kegiatan penerapan K3 di perusahaan yang dilakukan oleh Balai K3 (semula Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan)	%	62.86	448.312.000		
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				448.312.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	60	448.312.000		
JUMLAH									89.667.936.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Keluarga Berkualitas									727.020.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Angka	77.06		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga								337.353.000		
						Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64.5	337.353.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						160.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	%	75	160.000.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					151.230.000		
						Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 pilar dalam pembangunan	Kabupaten/ Kota	28	151.230.000	Pokja Pengendalian Penduduk	
		2.14.02.1.01.0007			Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				36.170.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen	1	36.170.000	Pokja Pengendalian Penduduk	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.0021			Advokasi dan Sosialisasi GDPK				22.488.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	3	22.488.000	Pokja Pengendalian Penduduk	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.0022			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				26.780.000		
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	2	26.780.000	Pokja Pengendalian Penduduk	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.02.1.01.0024			Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain				65.792.000		
						Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Daerah	2	65.792.000	Pokja Pengendalian Penduduk	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi					8.770.000		
						Jumlah dokumen profil pembangunan kependudukan.	Dokumen	1	8.770.000	Pokja Pengendalian Penduduk	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.14.02.1.02.0010			Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				8.770.000		
						Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	1	8.770.000	Pokja Pengendalian Penduduk	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						177.353.000		
						Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	34	177.353.000	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	
				Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					88.586.000		
						Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	per 1000 WUS 15 -19	16	88.586.000	Pokja Keluarga Sejahtera	
		2.14.04.1.01.0008			Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB				27.109.000		
						Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Organisasi	3	27.109.000	Pokja Keluarga Sejahtera	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.01.0019			Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				25.570.000		
						Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Kelompok	3	25.570.000	Pokja Keluarga Sejahtera	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.01.0020			Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				35.907.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Daerah	3	35.907.000	Pokja Keluarga Sejahtera	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					88.767.000		
						Persentase kelomppok tribina yang aktif	%	95	39.629.000	Pokja Keluarga Sejahtera	
		2.14.04.1.02.0008			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				39.629.000		
						Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Organisasi	2	39.629.000	Pokja Keluarga Sejahtera	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kelomppok UPPKA yang aktif	%	95	49.138.000	Pokja Keluarga Sejahtera	
		2.14.04.1.02.0006			Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas				13.210.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten/Kota	3	13.210.000	Pokja Keluarga Sejahtera	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.04.1.02.0007			Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota				35.928.000		
						Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	2	35.928.000	Pokja Keluarga Sejahtera	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terkendalinya Jumlah Penduduk								389.667.000		
						Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2.1	389.667.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						389.667.000		
						Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	%	69.48	389.667.000	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
				Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					352.667.000		
						Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	%	27.9	352.667.000	Pokja Keluarga Berencana	
		2.14.03.1.01.0007			Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				148.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	10	148.000.000	Pokja Keluarga Berencana	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.03.1.01.0010			Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana				35.856.000		
						Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Daerah	4	35.856.000	Pokja Keluarga Berencana	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.14.03.1.01.0012			Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				168.811.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Daerah	4	168.811.000	Pokja Keluarga Berencana	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					37.000.000		
						Unmetneed KB	%	9.25	37.000.000	Pokja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KB	
		2.14.03.1.02.0002			Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				37.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	2	37.000.000	Pokja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KB	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kesenjangan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak									4.468.080.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
						Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0.304		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya peran dan kapasitas perempuan dalam bidang pembangunan								3.782.040.000		
						Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93.47	3.782.040.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						2.698.800.000		
						Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi	%	12	121.730.000	Bidang Kesenjangan Gender dan Perlindungan Perempuan	
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					121.730.000		
						Nilai Evaluasi PUG Provinsi	Nilai	900	121.730.000	Pokja Kesenjangan Gender	
		2.08.02.1.01.0010			Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				25.800.000		
						jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	Orang	35	25.800.000	Pokja Kesenjangan Gender	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.01.0011			Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				55.000.000		
						jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	5	55.000.000	Pokja Kesenjangan Gender	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.01.0012			Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi				40.930.000		
						Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	35	40.930.000	Pokja Kesenjangan Gender	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	%	80	2.577.070.000	Bidang Kesenjangan Gender dan Perlindungan Perempuan	
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi					2.577.070.000		
						Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya	%	40	2.577.070.000	Pokja Kesenjangan Gender	
		2.08.02.1.02.0005			Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				1.439.500.000		
						Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	Lembaga	3	1.439.500.000	Pokja Kesenjangan Gender	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.02.0008			sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				705.070.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang	35	705.070.000	Pokja Kesetaraan Gender	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.02.1.02.0009			peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				432.500.000		
						jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	80	432.500.000	Pokja Kesetaraan Gender	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						770.432.000		
						Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	136.040.000		
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					136.040.000		
						Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	%	100	136.040.000		
		2.08.03.1.02.0003			layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				9.270.000		
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	5	9.270.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0004			layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		
						Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0005			Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				17.720.000		
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10	17.720.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0007			layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				6.750.000		
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	2	6.750.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0008			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				87.300.000		
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	12	87.300.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0009			layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	7	3.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.02.0010			layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.500.000		
						Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	2	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan	%	85	634.392.000	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					115.750.000		
						Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan	%	25	115.750.000	Pokja Perlindungan Perempuan	
		2.08.03.1.01.0003			Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				14.750.000		
						Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	14.750.000	Pokja Perlindungan Perempuan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.01.0004			Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				50.000.000		
						Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Orang	35	50.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.01.0007			Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi				51.000.000		
						Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Kegiatan	5	51.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					518.642.000		
						Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi	Unit	15	518.642.000	Pokja Perlindungan Perempuan	
		2.08.03.1.03.0005			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				347.642.000		
						jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang	15	347.642.000	Pokja Perlindungan Perempuan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0006			penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				115.000.000		
						Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	1	115.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.03.1.03.0009			Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				56.000.000		
						Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	5	56.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						312.808.000		
						Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	%	20	312.808.000	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					312.808.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan intensif terkait kebijakan pembangunan ketahanan keluarga	%	20	312.808.000	Pokja Kesetaraan Gender	
		2.08.04.1.01.0007			Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				312.808.000		
						Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	10	312.808.000	Pokja Kesetaraan Gender	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Perlindungan Anak								686.040.000		
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	65.35	686.040.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						15.600.000		
						Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih	%	24	15.600.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					15.600.000		
						Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	15.600.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	
		2.08.04.1.03.0004			layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15.600.000		
						Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	20	15.600.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						373.720.000		
						Indeks Pemenuhan Hak Anak	Angka	61.5	373.720.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					271.100.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota dengan predikat KLA minimal Madya	Kabupaten/ Kota	30	271.100.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	
		2.08.06.1.01.0007			Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi				271.100.000		
						Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Lembaga	20	271.100.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					102.620.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak	Lembaga	35	102.620.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	
		2.08.06.1.02.0006			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak				43.840.000		
						Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	3	43.840.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.06.1.02.0007			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi				51.780.000		
						jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Dokumen	1	51.780.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.06.1.02.0010			pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				7.000.000		
						jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	10	7.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						296.720.000		
						Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	79	160.680.000	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
				Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					96.000.000		
						Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan anak	%	25	96.000.000	Pokja Perlindungan Anak	
		2.08.07.1.01.0006			Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				25.000.000		
						Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Orang	30	25.000.000	Pokja Perlindungan Anak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.01.0007			Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi				51.000.000		
						Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	35	51.000.000	Pokja Perlindungan Anak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.01.0009			Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				10.000.000		
						Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	10.000.000	Pokja Perlindungan Anak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.01.0010			monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				10.000.000		
						jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Laporan	1	10.000.000	Pokja Perlindungan Anak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					64.680.000		
						Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya	Lembaga	50	64.680.000	Pokja Perlindungan Anak	
		2.08.07.1.03.0010			pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2026				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Lembaga	3		15.000.000	Pokja Perlindungan Anak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.03.0011			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					34.680.000		
						jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	25		34.680.000	Pokja Perlindungan Anak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.03.0012			Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					15.000.000		
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	10		15.000.000	Pokja Perlindungan Anak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100		136.040.000		
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						136.040.000		
						Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	%	100		136.040.000		
		2.08.07.1.02.0008			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					17.720.000		
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10		17.720.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.02.0010			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					87.300.000		
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	12		87.300.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.02.0011			layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000		
						Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	10		10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.02.0012			layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					9.270.000		
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	5		9.270.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.02.0013			layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&					1.500.000		
						Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	2		1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.08.07.1.02.0014			layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3.500.000		
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	7	3.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.08.07.1.02.0015			layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				6.750.000		
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	2	6.750.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana									16.341.824.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Angka	87.7		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								16.134.824.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Angka	89	16.134.824.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						16.134.824.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	100	15.506.272.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.876.189.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	11.876.189.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.457.489.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	71	11.457.489.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				326.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	326.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				72.700.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	72.700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					60.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				60.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					40.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					601.383.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	601.383.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.462.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	55.462.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				116.921.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	116.921.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				276.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	276.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				71.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	71.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.325.510.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.325.510.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				395.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	395.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.928.510.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.928.510.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					596.190.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	596.190.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				175.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	20	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				340.190.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	340.190.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	%	100	628.552.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					40.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun di UPTD PPA	Dokumen	1	40.200.000		
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40.200.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	40.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					6.570.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan di UPTD PPA	%	90	6.570.000		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.570.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	6.570.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					27.248.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPTD PPA	%	90	27.248.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.999.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1.999.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	9.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.500.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	10.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.749.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	5.749.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan di UPTD PPA	Unit	3	2.500.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				2.500.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	2.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					511.071.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPTD PPA	Laporan	1	511.071.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				52.536.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	52.536.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				458.535.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	458.535.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.963.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPTD PPA	Unit	1	40.963.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.400.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	11.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.938.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.938.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.625.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	14.625.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								207.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Angka	2.95	207.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						207.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	55	207.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					207.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	50	207.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				55.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	55.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	62.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				60.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	60.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									21.536.924.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Ketahanan Pangan									23.986.170.000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	Angka	75.6		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan								23.586.170.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	Angka	85.5	23.586.170.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						23.586.170.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	%	87	811.014.000	Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					42.600.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	42.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.600.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	10.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					488.319.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	488.319.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				198.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	198.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				290.319.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	290.319.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					240.095.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	11	240.095.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				109.095.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	109.095.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				131.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	131.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	%	87	22.775.156.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.873.531.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	14.873.531.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.317.257.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	111	14.317.257.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				376.274.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	376.274.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				180.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	180.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					114.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	114.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14.000.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	14.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					6.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				6.000.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	50.000.000		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	50.000.000		OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					720.901.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	720.901.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	46.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				48.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	48.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				145.600.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	145.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				325.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	325.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				9.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	9.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				87.301.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	87.301.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					635.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	30	635.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				635.200.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	635.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.884.341.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	2.884.341.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.644.341.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.644.341.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.491.183.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	77	3.491.183.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				210.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	210.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.081.183.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.081.183.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan								400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	Angka	2.92	400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						400.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	%	90	400.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					400.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				130.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	130.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	10.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Mewujudkan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah									21.183.125.000	Dinas Ketahanan Pangan	
						Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85.6		Dinas Ketahanan Pangan	
						Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	7.83		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Keterjangkauan Pangan								11.630.030.000		
						Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	%	8	4.975.924.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						4.975.924.000		
						Persentase Daerah Rawan Pangan	%	14.6	4.975.924.000	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi					4.975.924.000		
						Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	12	1.633.205.000	Pokja Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
		2.09.04.1.02.0005			Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi				1.633.205.000		
						Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen	2	1.633.205.000	Pokja Kewaspadaan Pangan dan Gizi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI	%	6	3.025.402.000	Pokja Kerawanan Pangan	
		2.09.04.1.02.0002			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				275.000.000		
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	2	275.000.000	Pokja Kerawanan Pangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.09.04.1.02.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				2.750.402.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan	1	2.750.402.000	Pokja Kerawanan Pangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Pangan yang Diselamatkan	%	3	317.317.000	Pokja Penyelamatan Pangan	
		2.09.04.1.02.0003			Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				317.317.000		
						Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1	317.317.000	Pokja Penyelamatan Pangan	
						Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	%	8	6.654.106.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						6.654.106.000		
						Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	62.5	6.654.106.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					6.654.106.000		
						Persentase peningkatan kelembagaan usaha pangan	Angka	10	377.226.000	Pokja Pascapanen dan Kelembagaan Usaha Pangan	
		2.09.03.1.01.0011			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi				377.226.000		
						Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	10	377.226.000	Pokja Pascapanen dan Kelembagaan Usaha Pangan	
						Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP	%	100	3.138.440.000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
		2.09.03.1.01.0009			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi				3.138.440.000		
						Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	Laporan	2	3.138.440.000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN	Ton	725	3.138.440.000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
		2.09.03.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				3.138.440.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	3	3.138.440.000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan								5.096.389.000		
						Angka Ketersediaan Energi (AKE)	kkal/kapita/h	3625	5.096.389.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						5.096.389.000		
						Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD)	Angka	0.47	5.025.529.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					5.025.529.000		
						persentase penyaluran cppd	%	50	5.025.529.000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	
		2.09.03.1.02.0005			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				5.025.529.000		
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	Ton	320	5.025.529.000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rata-rata Ketersediaan Pangan	Angka	1.21	70.860.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					70.860.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan	Dokumen	1	70.860.000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.09.03.1.01.0013			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				70.860.000		
	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	2	70.860.000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
									4.456.706.000		
						Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah	Angka	94.5	4.456.706.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						1.864.500.000		
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/ta hun	87.3	1.864.500.000	Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					1.353.825.000		
						JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL YANG DIFASILITASI	Kelompok	10	1.006.835.000	Pokja Pengembangan Pangan Lokal	
		2.09.03.1.01.0007			Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1.006.835.000		
						Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	1	1.006.835.000	Pokja Pengembangan Pangan Lokal	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten Yang Terfasilitasi Penguatan Pangan B2SA	%	42	346.990.000	Pokja Pola Konsumsi Pangan B2SA	
		2.09.03.1.01.0006			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				346.990.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	1	346.990.000	Pokja Pola Konsumsi Pangan B2SA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi					510.675.000		
						Jumlah Pelaksanaan Promosi B2SA dan Pangan Lokal	Kali	7	510.675.000	Pokja Promosi Penganekaragaman Pangan Lokal	
		2.09.03.1.04.0001			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				510.675.000		
						Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	5	510.675.000	Pokja Promosi Penganekaragaman Pangan Lokal	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						2.592.206.000		
						Persentase Capaian Tertimbang Regristasi dan Sertifikasi Pangan Segar	%	40	1.657.085.000	Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.657.085.000		
						Jumlah LHU (Laporan Hasil Uji) yang diterbitkan	Dokumen	100	1.437.085.000	Pokja Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0010			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1.437.085.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1.437.085.000	Pokja Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	
						Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dlterbitkan	%	80	220.000.000	Pokja Sertifikasi dan Registrasi Pangan	
		2.09.05.1.01.0007			Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				220.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	50	220.000.000	Pokja Sertifikasi dan Registrasi Pangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90.1	935.121.000	Bidang Keamanan Pangan	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					935.121.000		
						JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN	Dokumen	1	150.000.000	Pokja Penanganan Ketidaksesuaian Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0011			Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				150.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	150.000.000	Pokja Penanganan Ketidaksesuaian Mutu dan Keamanan Pangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaku usaha / Kelompok yang dibina dalam penjaminan mutu dan kemanan pangan	Kelompok	50	338.743.000	Pokja Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0009			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				338.743.000		
						Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	338.743.000	Pokja Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	%	84	446.378.000	Pokja Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	
		2.09.05.1.01.0008			Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				446.378.000		
						Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	1	446.378.000	Pokja Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									45.169.295.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan (IKA)									1.405.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Indiks Kualitas Air (IKA)	Angka	68.82		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Menurunnya pencemaran air permukaan								1.405.000.000		
						Indeks Pencemaran Air	Angka	3.34	1.405.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP						200.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan	%	100	200.000.000	Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi					145.772.000		
						Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup	Dokumen	3	145.772.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	
		2.11.02.1.01.000 2			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi				101.088.000		
						Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	2	101.088.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.02.1.01.000 6			Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi				44.684.000		
						Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen	1	44.684.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi					54.228.000		
						Jumlah Dokumen KLHS yang tervalidasi	Dokumen	10	54.228.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	
		2.11.02.1.02.000 9			Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota				54.228.000		
						Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Dokumen	10	54.228.000	Pokja Penataan Lingkungan Hidup	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						750.000.000		
						Persentase pemantauan kualitas lingkungan hidup	%	100	600.000.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					600.000.000		
						Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan sistem mutu laboratorium lingkungan	Dokumen	70	150.000.000	Pokja Pengendalian Mutu dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan	
		2.11.03.1.01.001 5			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi				150.000.000		
						Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	2	150.000.000	Pokja Pengendalian Mutu dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah titik /sampel pada lokasi pemantauan kualitas lingkungan hidup	sampel	360	450.000.000	Pokja Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	
		2.11.03.1.01.000 9			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				450.000.000		
						Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	46	450.000.000	Pokja Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	4.76	150.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					150.000.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu	Usaha/Kegiat an	111	150.000.000	Pokja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
		2.11.03.1.01.0010			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				150.000.000		
						Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan	3	150.000.000	Pokja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						25.000.000		
						Persentase Limbah B3 Yang Terkelola	%	80	25.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					25.000.000		
						Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola	Ton	1476440	25.000.000	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	
		2.11.05.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	1	25.000.000	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						400.000.000		
						Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	57	200.000.000		
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					200.000.000		
						Jumlah pelaku usaha berizin yang taat	Pelaku Usaha	20	200.000.000		
		2.11.06.1.01.0009			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				200.000.000		
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Usaha/Kegiat an	35	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi lingkungan hidup yang diterbitkan	%	100	200.000.000	Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan / diterbitkan	Dokumen	10	200.000.000	Pokja Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup	
		2.11.06.1.01.0001			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				200.000.000		
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	10	200.000.000	Pokja Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						30.000.000		
						Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	30.000.000		
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi					30.000.000		
						Jumlah laporan aduan yang ditangani	Pengaduan	12	30.000.000		
		2.11.10.1.01.0009			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				30.000.000		
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	20	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan (IKL)									2.976.723.000		
						Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	59.47		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya kualitas lahan								2.626.375.000		
						Luas Tutupan Lahan	Ha	1022457	2.626.375.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						2.511.375.000		
						Persentase bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	%	100	73.375.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
				Perbenihan Tanaman Hutan					73.375.000		
						Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi	Batang	45000	47.575.000	Pokja Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Benih	
		3.28.03.1.09.000			Pembangunan Sumber Benih				20.150.000		
						Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	0.5	20.150.000	Pokja Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Benih	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0007			Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan				27.425.000		
						Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	Batang	45000	27.425.000	Pokja Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Benih	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH	Sertifikat	36	25.800.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	
		3.28.03.1.09.000			Sertifikasi Sumber Benih				2.610.000		
						Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	2	2.610.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.000			Sertifikasi Mutu Benih				2.610.000		
						Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	4	2.610.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.000			Sertifikasi Mutu Bibit				14.490.000		
						Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Sertifikat	30	14.490.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0005			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit				3.480.000		
						Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	2	3.480.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.09.0010			Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan				2.610.000		
						Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	Unit Usaha	2	2.610.000	Pokja Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih dan Bibit	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

						Persentase lahan kritis tertangani	%	0.11	60.000.000		
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					60.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove)	Ha	385.4	60.000.000		
		3.28.03.1.04.0001			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0008			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				40.000.000		
						Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	40.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 10	%	0.01	63.800.000	CDK WILAYAH X	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					63.800.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 10	Ha	14	63.800.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				63.800.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	14	63.800.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 11	%	0.01	85.600.000	CDK WILAYAH XI	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					85.600.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 11	Ha	21	85.600.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				69.600.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	19	69.600.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				16.000.000		
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	2	16.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 2	%	0.02	357.500.000	CDK WILAYAH II	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					357.500.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 2	Ha	53.4	357.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				89.500.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	30	89.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				268.000.000		
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	23.4	268.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 3	%	0.01	173.500.000	CDK WILAYAH III	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					173.500.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 3	Ha	19.7	173.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				91.640.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	18.2	91.640.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				81.860.000		
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	1.5	81.860.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 4	%	0.02	337.484.000	CDK WILAYAH IV	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					337.484.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 4	Ha	70	337.484.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				54.984.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	30	54.984.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				282.500.000		
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	40	282.500.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 5	%	0.08	377.396.000	CDK WILAYAH V	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					377.396.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 5	Ha	37.5	377.396.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				68.730.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	7.5	68.730.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				308.666.000		
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	30	308.666.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 6	%	0.01	269.720.000	CDK WILAYAH VI	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					269.720.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 6	Ha	28.2	269.720.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				53.720.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	20	53.720.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				216.000.000		
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	8.2	216.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 7	%	0.01	149.000.000	CDK WILAYAH VII	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					149.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 7	Ha	43.5	149.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				130.780.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	41.5	130.780.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0004			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				18.220.000		
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	2	18.220.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 8	%	0.01	201.000.000	CDK WILAYAH VIII	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					201.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 8	Ha	39.1	201.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				31.000.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	10	31.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				170.000.000		
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	29.1	170.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis tertangani CDK 9	%	0.01	58.000.000	CDK WILAYAH IX	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					58.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 9	Ha	26	58.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				58.000.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	26	58.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK I	%	0.01	200.000.000	CDK WILAYAH I	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					200.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK 1	Ha	33	200.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.0002			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				93.000.000		
						Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	30	93.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.04.0009			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan				107.000.000		
						Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	3	107.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%	100	50.000.000		
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					50.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan	Dokumen	1	50.000.000		
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				50.000.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 10	%	100	5.000.000	CDK WILAYAH X	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 10	Kelompok	2	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 11	%	100	5.000.000	CDK WILAYAH XI	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 11	Kelompok	2	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 2	%	100	5.000.000	CDK WILAYAH II	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 2	Kelompok	1	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 3	%	100	15.000.000	CDK WILAYAH III	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					15.000.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 3	Kelompok	1	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				15.000.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 4	%	100	5.000.000	CDK WILAYAH IV	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 4	Kelompok	1	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 5	%	100	5.000.000	CDK WILAYAH V	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 5	Kelompok	1	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 6	%	100	5.000.000	CDK WILAYAH VI	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 6	Kelompok	1	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 7	%	100	5.000.000	CDK WILAYAH VII	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 7	Kelompok	1	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 9	%	100	5.000.000	CDK WILAYAH IX	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					5.000.000		
						Jumlah Masyarakat Peduli Api / Masyarakat Mitra Polhut yang dibina CDK 9	Kelompok	2	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				5.000.000		
						Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	5.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						115.000.000		
						Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%	10	115.000.000		
				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					115.000.000		
						Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya	Unit	5	115.000.000		
		3.28.06.1.01.0004			Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				50.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	500	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.0005			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS				15.000.000		
						Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga	12	15.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.0008			Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS				50.000.000		
						Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen	12	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati								350.348.000		
						Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	0.487	350.348.000		
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						158.986.000		
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	0.4	64.386.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi					64.386.000		
						Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani	Ha	10	64.386.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.04.1.01.0004			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				64.386.000		
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	10	64.386.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan pelestarian kehati di Kebun Raya Baturraden	%	3	94.600.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi					94.600.000		
						Jumlah pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden	Unit	2	94.600.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		2.11.04.1.01.000			Pengelolaan Kebun Raya				94.600.000		
						Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	143.5	94.600.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						191.362.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura dinilai oleh Kementerian Kehutanan	Angka	73	90.000.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
				Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi					90.000.000		
						Jumlah luas kawasan yang bernilai kehati tinggi	Ha	20	60.000.000	Pokja Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.04.1.01.0013			Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi				55.000.000		
						Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Ha	20	55.000.000	Pokja Konservasi Sumber Daya Alam	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.01.0014			Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi				5.000.000		
						Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha	1	5.000.000	Pokja Konservasi Sumber Daya Alam	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaksanaan pengamanan kawasan Tahura	Kali	12	5.000.000	Pokja Konservasi Sumber Daya Alam	
		3.28.04.1.01.0015			Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi				5.000.000		
						Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	Ha	2549.3	5.000.000	Pokja Konservasi Sumber Daya Alam	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pemanfaatan Jasa lingkungan	Dokumen	2	25.000.000	Pokja Pemanfaatan	
		3.28.04.1.01.0006			Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi				10.000.000		
						Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Permohonan	2	10.000.000	Pokja Pemanfaatan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.01.0007			Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi				5.000.000		
						Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	Dokumen	2	5.000.000	Pokja Pemanfaatan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.01.0011			Perencanaan Pengelolaan TAHURA				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	Dokumen	1	10.000.000	Pokja Pemanfaatan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%	5	30.000.000		
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					30.000.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani	Jenis	2	30.000.000		
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				30.000.000		
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	1	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	21.362.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					21.362.000		
						Jumlah jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di Kebun Raya Baturraden	Jenis	554	21.362.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		3.28.04.1.02.0001			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				21.362.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	1	21.362.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%	100	50.000.000		
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					50.000.000		
						Jumlah Pengendalian pengelolaan KBEP	Dokumen	7	50.000.000		
		3.28.04.1.03.0005			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				50.000.000		
						Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	200	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan (IKU)									660.614.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	84.93		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Menurunnya pencemaran udara								660.614.000		
						Indeks NO2 dan SO2	Angka	0.3234	660.614.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						215.614.000		
						Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	%	3.26	215.614.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					215.614.000		
						Jumlah lokasi yang melakukan aksi penurunan emisi ditingkat tapak	Lokasi	50	215.614.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.11.03.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				14.370.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	14.370.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.03.1.01.0006			Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan				201.244.000		
						Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Laporan	2	201.244.000	Pokja Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						200.000.000		
						Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	%	100	200.000.000	Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Unit	50	200.000.000	Pokja Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup	
		2.11.08.1.01.0005			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				85.000.000		
						Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	3	85.000.000	Pokja Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.08.1.01.0007			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				115.000.000		
						Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	50	115.000.000	Pokja Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						245.000.000		
						Persentase Timbulan sampah yang terkelola	%	63	245.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					245.000.000		
						Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	23	245.000.000	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	
		2.11.11.1.01.0005			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				155.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Dokumen	1	155.000.000	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.11.1.01.0014			Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				90.000.000		
						Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1	90.000.000	Pokja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan (PE)									465.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kehutanan	%	0.47		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya kapasitas produksi hasil hutan								465.000.000		
						Pertumbuhan produksi hasil hutan	%	0.47	465.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						165.000.000		
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	21.96	165.000.000		
				Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi					50.000.000		
						Jumlah dokumen penatagunaan kawasan hutan	Dokumen	6	50.000.000		
		3.28.03.1.01.0010			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH)				50.000.000		
						Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penggunaan kawasan hutan	Dokumen	11	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen data informasi pemanfaatan hutan	Unit	1	20.000.000		
		3.28.03.1.03.0001			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				20.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					45.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang	Unit	8	45.000.000		
		3.28.03.1.06.0007			Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				25.000.000		
						Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	Unit Managemen	12	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.06.0008			Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				20.000.000		
						Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Managemen	4	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					50.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan	Unit	183	50.000.000		
		3.28.03.1.07.0004			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				50.000.000		
						Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	12	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						300.000.000		
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2.5	120.000.000		
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					120.000.000		
						Jumlah kelompok tani yang meningkat kelasnya	Kelompok	25	120.000.000		
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				31.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	1000	31.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0004			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan				49.000.000		
						Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	90	49.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.0009			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				40.000.000		
						Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	5	40.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 1	%	0.3	25.000.000	CDK WILAYAH I	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 1	Kelompok	3	25.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				25.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	130	25.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 10	%	0.2	15.000.000	CDK WILAYAH X	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 10	Kelompok	2	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	105	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 11	%	0.2	15.000.000	CDK WILAYAH XI	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 11	Kelompok	2	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	57	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 2	%	0.2	15.000.000	CDK WILAYAH II	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 2	Kelompok	2	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	101	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 3	%	0.2	15.000.000	CDK WILAYAH III	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 3	Kelompok	2	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	109	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 4	%	0.2	15.000.000	CDK WILAYAH IV	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 4	Kelompok	2	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	54	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 5	%	0.3	15.000.000	CDK WILAYAH V	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 5	Kelompok	3	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	75	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 6	%	0.2	15.000.000	CDK WILAYAH VI	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 6	Kelompok	2	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	107	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 7	%	0.3	15.000.000	CDK WILAYAH VII	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 7	Kelompok	3	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	121	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 8	%	0.2	20.000.000	CDK WILAYAH VIII	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					20.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 8	Kelompok	2	20.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				20.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	72	20.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 9	%	0.2	15.000.000	CDK WILAYAH IX	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya CDK 9	Kelompok	2	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.0002			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				15.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	69	15.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan									135.158.813.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Angka	70		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								134.773.313.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Angka	85	134.773.313.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						134.773.313.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	1.383.251.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					37.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah KRB	Dokumen	1	37.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				37.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	37.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					83.451.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan KRB	%	100	83.451.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA BARAT
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.451.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.451.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	15.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	25.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan KRB	Unit	1	10.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	10.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.147.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun KRB	Laporan	1	1.147.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	85.200.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.060.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.060.800.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					105.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan KRB	Unit	1	105.800.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	50.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.200.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1.200.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.600.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	34.600.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	%	100	669.432.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					22.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah BPL2H	Dokumen	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				22.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					57.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BPL2H	%	100	57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					453.332.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BPL2H	Laporan	1	453.332.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				58.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	58.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				393.332.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	393.332.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					137.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BPL2H	Unit	1	137.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				102.100.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	102.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	%	100	1.222.891.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					75.244.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BSPTH	%	100	75.244.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.799.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.799.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.525.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.400.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.520.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	42.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan BSPTH	Unit	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.500.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.095.897.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun BSPTH	Laporan	1	1.095.897.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				165.897.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	165.897.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				929.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	929.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					41.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BSPTH	Unit	1	41.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				36.250.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	36.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I	%	100	1.123.312.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah TAHURA	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan TAHURA	%	100	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan TAHURA	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					903.312.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun TAHURA	Laporan	1	903.312.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				818.312.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	818.312.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan TAHURA	Unit	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK I	%	100	616.060.000	CDK WILAYAH I	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 1	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					69.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1	%	100	69.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					431.760.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1	Laporan	1	431.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.537.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.537.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				75.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				355.223.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	355.223.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 1	Unit	1	110.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				95.700.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	95.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.600.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	14.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawalan, dan keuangan perangkat daerah CDK II	%	100	536.831.000	CDK WILAYAH II	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 2	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					57.582.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 2	%	100	57.582.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.800.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.277.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.277.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.005.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	35.005.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					379.249.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 2	Laporan	1	379.249.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				308.249.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	308.249.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 2	Unit	1	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK III	%	100	654.926.000	CDK WILAYAH III	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 3	Dokumen	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.500.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					72.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 3	%	100	72.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	13.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	30.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					499.426.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 3	Laporan	1	499.426.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	60.500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				437.926.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	437.926.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 3	Unit	1	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	70.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IV	%	100	599.975.000	CDK WILAYAH IV	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.550.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 4	Dokumen	1	10.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.550.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					57.038.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 4	%	100	57.038.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.118.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.118.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.920.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					448.387.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 4	Laporan	1	448.387.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				950.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.190.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	70.190.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				377.247.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	377.247.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					84.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 4	Unit	1	84.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				75.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IX	%	100	340.180.000	CDK WILAYAH IX	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					4.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 9	Dokumen	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					58.340.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 9	%	100	58.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.120.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.500.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.760.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	5.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.960.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	34.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					210.460.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 9	Laporan	1	210.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				159.960.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	159.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.380.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 9	Unit	1	67.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				57.680.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	57.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.700.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	9.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK V	%	100	481.788.000	CDK WILAYAH V	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.902.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 5	Dokumen	1	13.902.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13.902.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	13.902.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					59.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 5	%	100	59.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					353.386.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 5	Laporan	1	353.386.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.020.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				79.990.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	79.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				272.376.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	272.376.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 5	Unit	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VI	%	100	488.200.000	CDK WILAYAH VI	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 6	%	100	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					366.816.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 6	Laporan	1	366.816.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	90.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				275.616.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	275.616.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.384.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 6	Unit	1	66.384.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				63.884.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	63.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VII	%	100	425.000.000	CDK WILAYAH VII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 7	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					73.800.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 7	%	100	73.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.100.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	2.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53.700.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	53.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					263.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 7	Laporan	1	263.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				228.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	228.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.200.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 7	Unit	1	85.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.300.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	70.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.900.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	9.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VIII	%	100	434.000.000	CDK WILAYAH VIII	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.350.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 8	Dokumen	1	1.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.350.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					64.890.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 8	%	100	64.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.800.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.090.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					293.760.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 8	Laporan	1	293.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.760.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				240.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					74.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 8	Unit	1	74.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				69.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	69.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK X	%	100	605.070.000	CDK WILAYAH X	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.041.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 10	Dokumen	1	3.041.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.041.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	3.041.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					62.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 10	%	100	62.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					385.029.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 10	Laporan	1	385.029.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				111.512.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	111.512.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				273.117.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	273.117.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					155.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 10	Unit	1	155.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				71.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	71.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK XI	%	100	379.500.000	CDK WILAYAH XI	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.002.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 11	Dokumen	1	30.002.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.002.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30.002.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					63.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 11	%	100	63.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.500.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					212.998.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 11	Laporan	1	212.998.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				182.998.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	182.998.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					73.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11	Unit	1	73.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				65.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	100	124.812.897.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					120.250.739.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	120.250.739.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				120.165.739.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	665	120.165.739.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	35.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				50.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					140.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				140.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					45.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					642.259.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	642.259.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.259.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.259.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				120.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.308.499.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	3.308.499.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				593.499.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	593.499.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				155.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.550.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.550.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					426.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	426.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				270.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17	270.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				6.400.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	6.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								385.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Angka	3	385.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						385.500.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	100	385.500.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					385.500.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	385.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	150.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				225.500.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	225.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	60	10.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									140.666.150.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah									5.058.540.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Persentase Desa Mandiri	%	27.27			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Status Kemandirian Desa di Jawa Tengah								5.058.540.000		
						Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya di Jawa Tengah	%	11.69	5.058.540.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						155.000.000		
						Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	%	57.05	155.000.000	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	
				Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					155.000.000		
						Jumlah pengembangan kawasan prioritas Provinsi Jawa Tengah yang terfasilitasi	Kawasan	1	155.000.000	Pokja Fasilitasi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	
		2.13.03.1.01.0003			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				155.000.000		
						jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	155.000.000	Pokja Fasilitasi Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						1.033.540.000		
						Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa	%	100	385.000.000	Bidang Penataan dan Regulasi Desa	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					385.000.000		
						Jumlah Daerah yang terbina dalam pelaksanaan Pilkades	Daerah	29	10.000.000	Pokja Fasilitasi Regulasi Desa	
		2.13.04.1.01.0007			Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				10.000.000		
						jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang	1	10.000.000	Pokja Fasilitasi Regulasi Desa	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Daerah yang terbina dan termonitoring dalam evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan	Kabupaten/ Kota	35	200.000.000	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	
		2.13.04.1.01.0008			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	200.000.000	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa	Daerah	8	20.000.000	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	
		2.13.04.1.01.0016			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	20.000.000	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Daerah yang terfasilitasi Penyusunan regulasi Daerah yang berkaitan dengan Desa	Dokumen	50	85.000.000	Pokja Fasilitasi Regulasi Desa	
		2.13.04.1.01.0001			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa				85.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	Dokumen	1	85.000.000	Pokja Fasilitasi Regulasi Desa	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Desa yang terfasilitasi untuk penggunaan teknologi informasi dan Sistem Informasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa	Desa	29	70.000.000	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	
		2.13.04.1.01.0018			Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota				70.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	1	70.000.000	Pokja Penataan dan Perkembangan Desa	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa	%	100	648.540.000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					648.540.000		
						Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam Peningkatan kapasitas manajemen Pemerintahan Desa	Orang	200	418.540.000	Pokja Pembinaan Pemerintahan Desa	
		2.13.04.1.01.0010			Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa				418.540.000		
						jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	200	418.540.000	Pokja Pembinaan Pemerintahan Desa	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Aparatur yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan Desa	Orang	29	25.000.000	Pokja Perencanaan dan Keuangan Desa	
		2.13.04.1.01.0005			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	0	25.000.000	Pokja Perencanaan dan Keuangan Desa	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam bantuan keuangan peningkatan sarana prasarana Desa	Daerah	29	120.000.000	Pokja Perencanaan dan Keuangan Desa	
		2.13.04.1.01.0012			Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				120.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Dokumen	1	120.000.000	Pokja Perencanaan dan Keuangan Desa	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam tukar menukar tanah kas Desa (PSN, Kepentingan umum dan bukan kepentingan umum) dengan izin persetujuan dan/atau BA verifikasi data	Dokumen	50	85.000.000	Pokja Pengelolaan Aset Desa	
		2.13.04.1.01.0006			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				85.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	85.000.000	Pokja Pengelolaan Aset Desa	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						3.870.000.000		
						Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	45.96	165.000.000	Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa	
				Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					165.000.000		
						Jumlah pengelola BUMDes dengan klasifikasi pemula dan berkembang yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	300	165.000.000	Pokja Pengembangan Ekonomi Desa	
		2.13.05.1.01.0005			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				165.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	165.000.000	Pokja Pengembangan Ekonomi Desa	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatannya	%	100	3.000.000.000	Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat	
				Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.000.000.000		
						Jumlah Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	175	1.000.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
		2.13.05.1.01.0003			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1.000.000.000		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	35	1.000.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah TP, PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten/Kota	35	2.000.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
		2.13.05.1.01.0009			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				2.000.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	2.000.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa	%	100	705.000.000	Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat	
				Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					705.000.000		
						Jumlah Daerah yang difasilitasi Kelembagaan Posyantek Kabupaten Kota dalam pemanfaatan TTG	Kabupaten/Kota	35	50.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Partisipasi Masyarakat	
		2.13.05.1.01.0006			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	50.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Partisipasi Masyarakat	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Daerah yang difasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	35	550.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Partisipasi Masyarakat	
		2.13.05.1.01.0007			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				550.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	550.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Partisipasi Masyarakat	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Daerah yang difasilitasi Penguatan kapasitas LPMD/K	Orang	116	80.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
		2.13.05.1.01.0002			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				80.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	80.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Lembaga Adat Desa yang difasilitasi pembentukannya dalam pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat	Daerah	29	25.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Partisipasi Masyarakat	
		2.13.05.1.01.0001			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	25.000.000	Pokja Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Partisipasi Masyarakat	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									205.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah	Angka	85.5		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah								205.000.000		
						Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah	%	86.53	205.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						70.000.000		
						Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	99.07	70.000.000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Pelayanan Pendaftaran Kependudukan					70.000.000		
						Persentase penduduk yang terfasilitasi perekaman KTP-el	%	99.43	70.000.000	Pokja Pendaftaran Penduduk	
		2.12.02.1.01.0003			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				70.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	1	70.000.000	Pokja Pendaftaran Penduduk	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						60.000.000		
						Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	%	99.12	60.000.000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Pelayanan Pencatatan Sipil					60.000.000		
						Presentase penduduk usia 0-4 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	%	98	60.000.000	Pokja Pencatatan Sipil	
		2.12.03.1.01.0002			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				60.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	1	60.000.000	Pokja Pencatatan Sipil	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						75.000.000		
						Persentase Institusi/Lembaga/ Badan Hukum yang difasilitasi pemanfaatan data kependudukan	%	100	75.000.000	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan yang terpublish	%	100	75.000.000	Pokja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
		2.12.04.1.03.0001			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				75.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	75.000.000	Pokja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil									18.645.901.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	74.5		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil								18.360.901.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	84.75	18.360.901.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18.360.901.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	18.360.901.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.069.218.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	14.069.218.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.712.218.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80	13.712.218.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				357.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	357.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					651.683.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	651.683.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	9.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				53.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	53.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				85.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				115.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	115.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				205.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	205.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				142.683.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	142.683.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					75.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.945.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.945.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				496.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	496.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.424.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.424.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					520.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	520.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				170.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				130.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil								285.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	2.7	285.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						285.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	285.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					285.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	285.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				180.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	180.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	105.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									23.909.441.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi									138.755.679.000	Dinas Perhubungan	
						Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6.788		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah								11.758.693.000		
						Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi	%	99.9838	11.758.693.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						10.158.693.000		
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	81.84	358.208.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					358.208.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Unit	6889	358.208.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				337.978.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	337.978.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				20.230.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	20.230.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	86.2	94.520.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					94.520.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Unit	1261	94.520.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				84.520.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	84.520.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				10.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	10.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	57.12	181.700.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					181.700.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Unit	2241	181.700.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				169.200.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	169.200.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				12.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	12.500.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	92.83	166.530.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					166.530.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Unit	6889	166.530.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				151.530.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	151.530.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				15.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	15.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	88.66	198.855.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					198.855.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Unit	3500	198.855.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				183.855.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	183.855.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				15.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	15.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	87.09	166.570.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					166.570.000		
						Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Unit	3353	166.570.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.0003			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				151.570.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	36	151.570.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				15.000.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	15.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	%	6.94	5.564.416.000	Bidang Lalu Lintas Jalan	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					5.445.560.000		
						Persentase perlengkapan jalan terpenuhi	%	64.51	5.445.560.000	Pokja Rekayasa Lalu Lintas Jalan	
		2.15.02.1.02.0002			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				5.445.560.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	361	5.445.560.000	Pokja Rekayasa Lalu Lintas Jalan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					81.540.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	Kabupaten/Kota	19	22.916.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	
		2.15.02.1.05.0003			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				22.916.000		
						Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	30	22.916.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi hasil forum LLAJ	Dokumen	12	58.624.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan	
		2.15.02.1.05.0005			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				58.624.000		
						Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	7	58.624.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi					37.316.000		
						Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan rekomendasi andalalin	%	73.13	37.316.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	
		2.15.02.1.06.0007			Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin				37.316.000		
						Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	33	37.316.000	Pokja Manajemen Lalu Lintas Jalan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	%	98.03	192.113.000	Bidang Lalu Lintas Jalan	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					192.113.000		
						Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah	Unit	317984	192.113.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan	
		2.15.02.1.07.0004			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				173.460.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	135	173.460.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.02.1.07.0005			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				18.653.000		
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	66	18.653.000	Pokja Keselamatan Lalu Lintas Jalan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	3	645.080.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					645.080.000		
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	55.56	645.080.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				192.840.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	78	192.840.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				452.240.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	2	452.240.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3	474.210.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					474.210.000		
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	43.75	474.210.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				116.040.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	46	116.040.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				358.170.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	1	358.170.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	3	580.800.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					580.800.000		
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	33.33	580.800.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				140.040.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	56	140.040.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				440.760.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	2	440.760.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	3	470.344.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					470.344.000		
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	33.33	470.344.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				120.840.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	48	120.840.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				349.504.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	1	349.504.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	3	506.037.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					506.037.000		
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	45.83	506.037.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				130.440.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	52	130.440.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				375.597.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	1	375.597.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	3	559.310.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					559.310.000		
						Presentase rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	75	559.310.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.05.0004			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				164.040.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	66	164.040.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.15.02.1.05.0007			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				395.270.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit	1	395.270.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN						1.600.000.000		
						Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	%	28	1.600.000.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian					1.600.000.000		
						Persentase realisasi rencana induk perkeretaapian	%	70.48	1.600.000.000	Pokja Perkeretaapian	
		2.15.05.1.01.0003			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian				1.600.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	7	1.600.000.000	Pokja Perkeretaapian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah								126.996.986.000		
						Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0.302	126.996.986.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						126.280.003.000		
						Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	%	52.95	101.800.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi					101.800.000		
						Persentase implementasi dokumen RIJLLAJ	%	43.9	101.800.000	Pokja Perencanaan Transportasi	
		2.15.02.1.01.0002			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				101.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	2	101.800.000	Pokja Perencanaan Transportasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B	%	70.14	5.457.000.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					5.457.000.000		
						Presentase Keterpenuhan SPM Terminal Tipe B	%	53.48	5.457.000.000	Pokja Terminal Penumpang	
		2.15.02.1.03.0001			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				155.000.000		
						Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	2	155.000.000	Pokja Terminal Penumpang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		2.15.02.1.03.0007			Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1.107.000.000		
						Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	1	1.107.000.000	Pokja Terminal Penumpang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		2.15.02.1.03.0010			Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				4.195.000.000		
						Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1	4.195.000.000	Pokja Terminal Penumpang	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)	%	4.42	118.885.631.000	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					811.634.000		
						Persentase Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	%	28.06	811.634.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	
		2.15.02.1.02.0002			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				811.634.000		
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	6	811.634.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					118.073.997.000		
						Jumlah penumpang terlayani angkutan umum (Trans Jateng) di kawasan aglomerasi perkotaan	Orang	9557771	118.073.997.000	SEKSI OPERASIONAL	
		2.15.02.1.08.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				118.073.997.000		
						Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	115	118.073.997.000	SEKSI OPERASIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3.99	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					55.000.000		
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	40.06	55.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				55.000.000		
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	55.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	22.04	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					55.000.000		
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	31.91	55.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				55.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	55.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	8.04	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					55.000.000		
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	38.31	55.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				55.000.000		
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	55.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	28.16	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					55.000.000		
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	42.94	55.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				55.000.000		
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	55.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	43.53	55.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					55.000.000		
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	31.71	55.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				55.000.000		
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	55.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	45.11	80.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					80.000.000		
						Presentase terminal Tipe B dalam kondisi baik pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	28.44	80.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.03.0011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				80.000.000		
						Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1	80.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	69.85	696.815.000	Bidang Angkutan Jalan	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					696.815.000		
						Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	Orang	35063886	696.815.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	
		2.15.02.1.08.0002			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				696.815.000		
						Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	3	696.815.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Rasio Trayek Angkutan Jalan	Angka	46.74	783.757.000	Bidang Angkutan Jalan	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					19.810.000		
						Persentase angkutan barang yang berijin	%	68.95	19.810.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	
		2.15.02.1.08.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				19.810.000		
						Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	60	19.810.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					660.173.000		
						Persentase Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	48.72	660.173.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	
		2.15.02.1.09.0001			Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				586.551.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	6	586.551.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		2.15.02.1.09.0002			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				73.622.000		
						Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	7	73.622.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					18.000.000		
						Presentase jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	%	13.04	18.000.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	
		2.15.02.1.11.0002			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi				18.000.000		
						Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	18.000.000	Pokja Angkutan Aglomerasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					48.400.000		
						Persentase Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	%	53.1	48.400.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	
		2.15.02.1.13.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				48.400.000		
						Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit	26	48.400.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					17.374.000		
						Persentase angkutan taksi terpenuhi	%	18.85	17.374.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	
		2.15.02.1.14.0004			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				17.374.000		
						Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit	37	17.374.000	Pokja Angkutan Tidak Dalam Trayek	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					20.000.000		
						Presentase Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif	%	100	20.000.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	
		2.15.02.1.15.0003			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				20.000.000		
						Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	20.000.000	Pokja Angkutan Dalam Trayek	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						716.983.000		
						Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Angka	0.472	716.983.000	Bidang Pelayaran	
				Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan					56.400.000		
						Persentase dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya	%	51.52	56.400.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		2.15.03.1.03.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				56.400.000		
						Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Unit	3	56.400.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas					37.387.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang diawasi	%	56.84	37.387.000	Pokja Angkutan Laut	
		2.15.03.1.06.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				37.387.000		
						Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	30	37.387.000	Pokja Angkutan Laut	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional					38.536.000		
						Berth occupancy ratio	%	20.44	38.536.000	Pokja Kepelabuhanan	
		2.15.03.1.09.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				38.536.000		
						Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit	8	38.536.000	Pokja Kepelabuhanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					584.660.000		
						Persentase Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	%	60	584.660.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		2.15.03.1.10.0001			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				77.000.000		
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Laporan	1	77.000.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		2.15.03.1.10.0002			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				483.000.000		
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Unit	1	483.000.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		2.15.03.1.10.0009			Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				24.660.000		
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	18	24.660.000	Pokja Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perhubungan									68.792.811.000	Dinas Perhubungan	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	85.15		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Perhubungan								68.547.128.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	81.6	68.547.128.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						68.547.128.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	67.243.976.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					47.162.594.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	36	47.162.594.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				46.366.833.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	300	46.366.833.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				745.200.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	745.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				50.561.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	50.561.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					955.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	955.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				955.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	955.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					160.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.000 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.024.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.024.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				52.500.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	52.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	40	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				760.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	760.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				37.500.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	37.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.885.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	11	1.885.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.700.000.000		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1.700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				105.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					14.552.912.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	14.552.912.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.589.225.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.589.225.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.959.687.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12.959.687.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.504.470.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	288	1.504.470.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				857.400.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	73	857.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	29	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	92	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				117.070.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	93	117.070.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	100	247.100.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					132.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	100	132.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				44.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	44.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.500.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				52.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Laporan	24	46.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				45.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	45.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Unit	21	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	100	123.612.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					56.612.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	100	56.612.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.612.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.612.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Laporan	24	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					51.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Unit	6	51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	100	157.840.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.840.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	100	74.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.340.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	19.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					21.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Laporan	24	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Unit	9	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	100	164.700.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					76.700.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	100	76.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.200.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	21.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Laporan	24	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Unit	8	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	100	171.400.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	100	81.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				38.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					27.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Laporan	24	27.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				26.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Unit	16	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	100	141.500.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.700.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	100	74.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				36.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	36.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.200.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	22.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Laporan	24	5.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Unit	7	53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	%	100	297.000.000	Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	%	100	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.500.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					34.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	%	100	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					252.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Unit	7	252.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				200.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perhubungan								245.683.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Angka	3.11	245.683.000	Dinas Perhubungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						245.683.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	245.683.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					245.683.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	245.683.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				120.064.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	120.064.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62.619.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	62.619.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	126	50.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				13.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	13.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									207.548.490.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan									60.610.629.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	
						Indeks Pemerintahan Digital	Angka	2.1			
	Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data Terstruktur dan Sistematis								16.085.000.000		
						Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Angka	2.6	16.085.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						15.345.000.000		
						Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	Angka	85	15.345.000.000	Bidang Komunikasi Publik dan Media	
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					15.345.000.000		
						Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	Konten	190	3.729.008.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik dan Relasi Media	
		2.16.02.1.01.001			Relasi Media				2.588.285.000		
						Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	4	2.588.285.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik dan Relasi Media	OPD Provinsi
		2.16.02.1.01.002 4			Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1.140.723.000		
						Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	4	1.140.723.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik dan Relasi Media	OPD Provinsi
						Jumlah Rekomendasi isu publik yang disusun	Rekomendasi	135	4.499.192.000	Kelompok Kerja Analisis Isu, Kemitraan dan Kehumasan	
		2.16.02.1.01.001 9			Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				3.884.375.000		
						Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	1	3.884.375.000	Kelompok Kerja Analisis Isu, Kemitraan dan Kehumasan	OPD Provinsi
		2.16.02.1.01.002 3			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				614.817.000		
						Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	135	614.817.000	Kelompok Kerja Analisis Isu, Kemitraan dan Kehumasan	OPD Provinsi
						Persentase Komunitas Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi	%	40	4.815.000.000	Kelompok Kerja Analisis Isu, Kemitraan dan Kehumasan	
		2.16.02.1.01.001 6			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				95.000.000		
						Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	20	95.000.000	Kelompok Kerja Analisis Isu, Kemitraan dan Kehumasan	OPD Provinsi
		2.16.02.1.01.002 1			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				4.720.000.000		
						Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	20	4.720.000.000	Kelompok Kerja Analisis Isu, Kemitraan dan Kehumasan	OPD Provinsi
						Persentase Layanan Permohonan Informasi yang Diselesaikan	%	84	2.301.800.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	
		2.16.02.1.01.002 0			Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				1.700.000.000		
						Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	55	1.700.000.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.16.02.1.01.0022			Pelayanan Informasi Publik				601.800.000		
						Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	76	601.800.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	OPD Provinsi
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						740.000.000		
						Indeks Satu Data Indonesia	Indeks	86	740.000.000	Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi					740.000.000		
						Jumlah data geospasial yang dipublikasikan	Data	30	220.000.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Data Geospasial	
		2.20.02.1.01.0019			Peningkatan kualitas statistik sektoral				220.000.000		
						Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	40	220.000.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Data Geospasial	OPD Provinsi
						Jumlah perangkat daerah yang memiliki data sektoral sesuai prinsip SDI	Unit	10	260.000.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Data Statistik	
		2.20.02.1.01.0018			Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				260.000.000		
						Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%	40	260.000.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Data Statistik	OPD Provinsi
						Persentase Data Prioritas yang dapat diakses publik	%	30	260.000.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Integrasi Data	
		2.20.02.1.01.0016			Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				260.000.000		
						Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	40	260.000.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Integrasi Data	OPD Provinsi
	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK								44.525.629.000		
						Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Digital	Angka	4.03	44.525.629.000		
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						42.741.829.000		
						Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	%	65	20.173.604.000		
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					20.173.604.000		
						Persentase penyimpanan yang termanfaatkan	%	70	20.173.604.000		
		2.16.03.1.02.0037			Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				20.173.604.000		
						Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan	1	20.173.604.000		
						Tingkat Pembangunan/Pengembangan Aplikasi	%	12	20.027.500.000	Bidang Aplikasi Pemerintah Digital	
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					20.027.500.000		
						Jumlah aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi	Aplikasi	10	19.027.500.000	Pokja Pengembangan Pemerintah Digital	
		2.16.03.1.02.0033			Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				19.027.500.000		
						Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	5	19.027.500.000	Pokja Pengembangan Pemerintah Digital	
						Jumlah entitas yang mendapatkan pemahaman tentang Provinsi Cerdas	Entitas	10	450.000.000	Pokja Ekosistem Pemerintah Digital	
		2.16.03.1.02.0031			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas				450.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Laporan	4	450.000.000	Pokja Ekosistem Pemerintah Digital	
						Jumlah rekomendasi pengembangan aplikasi sesuai Arsitektur SPBE	Rekomendasi	5	550.000.000	Pokja Tata Kelola Pemerintah Digital	
		2.16.03.1.02.0035			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				550.000.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	3	550.000.000	Pokja Tata Kelola Pemerintah Digital	
						Tingkat Pemenuhan Layanan Digital	%	25	2.540.725.000	Bidang Infrastruktur Teknologi Digital	
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					2.540.725.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan layanan jaringan Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota	35	1.181.000.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Infrastruktur Digital	
		2.16.03.1.02.0019			Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				1.181.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota	35	1.181.000.000	Kelompok Kerja Pengelolaan Infrastruktur Digital	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah perangkat daerah yang layanan internetnya terpenuhi	Unit	250	1.213.000.000	Kelompok Kerja Strategi dan akselerasi Infrastruktur Digital	
		2.16.03.1.02.0032			Penyediaan Akses Internet				1.213.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	100	1.213.000.000	Kelompok Kerja Strategi dan akselerasi Infrastruktur Digital	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah perangkat daerah yang terpetakan kondisi perangkat dan jaringannya	Unit	250	146.725.000	Kelompok Kerja Layanan infrastruktur digital	
		2.16.03.1.02.0030			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				146.725.000		
						Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	107	146.725.000	Kelompok Kerja Layanan infrastruktur digital	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						1.783.800.000		
						Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Angka	3.59	1.783.800.000	Bidang Persandian dan Keamanan Siber	
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					1.164.140.000		
						Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan wawasan terkait implementasi kebijakan keamanan informasi dan persandian	Unit	50	213.520.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang Siber dan Sandi	
		2.21.02.1.01.0008			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				213.520.000		
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	Dokumen	1	213.520.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang Siber dan Sandi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah perangkat daerah yang mendukung pemanfaatan teknologi keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan nonelektronik	Unit	50	429.500.000	Kelompok Kerja Layanan Keamanan Informasi	
		2.21.02.1.01.0005			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				429.500.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	50	429.500.000	Kelompok Kerja Layanan Keamanan Informasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM persandian dan keamanan informasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	4	63.520.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang Siber dan Sandi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.21.02.1.01.0007			Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				63.520.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan	4	63.520.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang Siber dan Sandi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian	%	100	457.600.000	Kelompok Kerja Layanan Keamanan Informasi	
		2.21.02.1.01.0006			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				457.600.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	50	457.600.000	Kelompok Kerja Layanan Keamanan Informasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi					619.660.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Jaring Komunikasi Sandi	Unit	50	619.660.000	Kelompok Kerja Pengamanan Sistem Komunikasi Ruang Digital	
		2.21.02.1.02.0002			Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				619.660.000		
						Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Perangkat Daerah	50	619.660.000	Kelompok Kerja Pengamanan Sistem Komunikasi Ruang Digital	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital									36.762.703.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Angka	72		Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital								36.426.816.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Angka	79.5	36.426.816.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						36.426.816.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	%	79.5	36.250.807.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.824.042.000		
						Jumlah jenis laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	7	19.824.042.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.000.242.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	115	19.000.242.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				763.800.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	763.800.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				21.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	21.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				19.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	19.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					220.678.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	6	220.678.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				9.000.000		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	9.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				7.178.000		
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	7.178.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.500.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					93.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	20	93.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				13.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	13.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; Amerika Utara --> United States of America ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.055.280.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	30	1.055.280.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				28.300.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	28.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				165.200.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	165.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				78.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	78.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				169.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	169.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				88.780.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	88.780.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.200.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	12	5.200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.200.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	5.200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.894.507.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan / Dokumen	27	8.894.507.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.913.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2.913.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.600.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	18.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.273.594.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	7.273.594.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					963.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	171	963.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				11.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	11.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				90.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				37.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	37.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				278.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	278.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				101.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	106	101.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.300.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	46.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data	%	100	176.009.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					40.306.000		
						Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah pada UPT Pusat Data yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran	%	30	40.306.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.926.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.926.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.800.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.800.000		
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.000.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				27.580.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	27.580.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.703.000		
						Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UPT Pusat Data	Laporan	1	5.703.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.703.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.703.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					130.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	%	100	130.000.000		
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				130.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	130.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital								335.887.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Angka	3.02	335.887.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						335.887.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	%	100	335.887.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					335.887.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	335.887.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	200.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				135.887.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	135.887.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									97.373.332.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB (PE)									4.989.070.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	13.52		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi								3.278.390.000		
						Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	%	10.49	3.278.390.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						3.278.390.000		
						Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha	%	30	3.278.390.000	Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM	
				Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah					3.278.390.000		
						Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi pemasaran dan jaringan usahanya	%	60	3.072.040.000	Pokja Pemasaran dan Digitalisasi	
		2.17.08.1.01.000			Pengembangan Usaha Kecil				3.072.040.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	330	3.072.040.000	Pokja Pemasaran dan Digitalisasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase UMKM non Pertanian yang difasilitasi produksi usahanya	%	60	206.350.000	Pokja Produksi dan Literasi Hukum	
		2.17.08.1.01.000 1			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				185.551.000		
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	165	185.551.000	Pokja Produksi dan Literasi Hukum	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.08.1.01.000 2			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM				20.799.000		
						Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	60	20.799.000	Pokja Produksi dan Literasi Hukum	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB								1.710.680.000		
						Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2.16	1.710.680.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						938.680.000		
						Persentase Koperasi Berkualitas	%	27.1	938.680.000	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					400.000.000		
						Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	%	13.72	400.000.000	Pokja Kelembagaan	
		2.17.03.1.01.000 3			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				400.000.000		
						Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	110	400.000.000	Pokja Kelembagaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					538.680.000		

						Presentase koperasi yang telah dilakukan pengawasan	%	100	538.680.000	Pokja Pengawasan	
		2.17.03.1.02.000 2			Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				538.680.000		
						Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	250	538.680.000	Pokja Pengawasan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						195.000.000		
						Persentase SDM Koperasi yang berkualitas	%	91	195.000.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					195.000.000		
						Presentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya	%	91	195.000.000	Pokja Pelatihan Perkoperasian dan UKM	
		2.17.05.1.01.000 1			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				195.000.000		
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	225	195.000.000	Pokja Pelatihan Perkoperasian dan UKM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						577.000.000		
						Persentase Koperasi Produktif	%	53.3	577.000.000	Bidang Bina Usaha Koperasi	
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					577.000.000		
						Presentase pertumbuhan modal Koperasi	%	5.25	288.500.000	Pokja Manajemen Usaha dan Pembiayaan	
		2.17.06.1.01.000 2			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				238.500.000		
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	60	238.500.000	Pokja Manajemen Usaha dan Pembiayaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.06.1.01.000 8			Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				50.000.000		
						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	10	50.000.000	Pokja Manajemen Usaha dan Pembiayaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	%	4.1	288.500.000	Pokja Produktivitas Usaha	
		2.17.06.1.01.000 6			Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				53.500.000		
						Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	10	53.500.000	Pokja Produktivitas Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.06.1.01.000 9			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				235.000.000		

						Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	66	235.000.000	Pokja Produktivitas Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB (TPT)									855.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	13.52		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Jawa Tengah								855.000.000		
						Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3.53	855.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						855.000.000		
						Persentase SDM UMKM yang berkualitas	%	91	151.578.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					151.578.000		
						Presentase SDM UMKM yang meningkat pengetahuannya	%	91	151.578.000	Pokja Pelatihan Perkoperasian dan UKM	
		2.17.07.1.01.0002			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan				151.578.000		
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	725	151.578.000	Pokja Pelatihan Perkoperasian dan UKM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Wirausaha yang berkualitas	%	85	178.422.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					178.422.000		
						Presentase SDM Wirausaha yang meningkat pengetahuannya	%	85	178.422.000	Pokja Kewirausahaan	
		2.17.07.1.01.0001			Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				178.422.000		
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	425	178.422.000	Pokja Kewirausahaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	%	17.15	525.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM	
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					525.000.000		
						Presentase peningkatan tenaga kerja pada UMKM	%	5	395.000.000	Pokja Perlindungan Usaha	
		2.17.07.1.01.0010			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				52.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	30	52.000.000	Pokja Perlindungan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.07.1.01.0011			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha				270.000.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	90	270.000.000	Pokja Perlindungan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.07.1.01.0012			Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil				73.000.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	210	73.000.000	Pokja Perlindungan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Proporsi Akses Kredit bagi UMKM	%	51.77	130.000.000	Pokja Pembiayaan dan Data	
		2.17.07.1.01.0005			Penyusunan Basis Data Usaha Kecil				25.000.000		
						Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	4	25.000.000	Pokja Pembiayaan dan Data	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.07.1.01.0007			Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				105.000.000		
						Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	180	105.000.000	Pokja Pembiayaan dan Data	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									28.089.628.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Angka	71.5		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								27.969.628.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Angka	78.6	27.969.628.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						27.969.628.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	100	24.463.628.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.433.081.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	14.433.081.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.008.081.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	14.008.081.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				410.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	410.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				15.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					90.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				90.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					8.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				8.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					473.425.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	473.425.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	12.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				48.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	48.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.925.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	7.925.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				80.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.285.622.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	9.285.622.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				510.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	510.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.757.622.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	8.757.622.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					173.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12	173.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	33.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				20.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	%	100	3.506.000.000	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					109.550.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	%	100	109.550.000	Subbag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.550.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	34.550.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	5.000.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	25.000.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.269.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	Laporan	12	3.269.600.000	Subbag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				577.310.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	577.310.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	5.000.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.685.790.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.685.790.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					126.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	Unit	80	126.850.000	Subbag Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				41.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	41.000.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.850.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	14.850.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				31.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	31.000.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	62	40.000.000	Subbag Tata Usaha	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								120.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Angka	3.12	120.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						120.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	100	120.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					120.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	120.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				75.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	75.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	35.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	5.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
JUMLAH									33.933.698.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									19.521.177.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	84.5		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								19.254.517.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	92	19.254.517.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19.254.517.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	19.254.517.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.720.401.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	14.720.401.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.394.401.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	91	14.394.401.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				326.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	326.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					80.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				80.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					56.500.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	56.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 2			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1.500.000		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	1.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.000 5			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.000 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					624.110.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	624.110.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				70.891.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	70.891.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				56.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	56.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				55.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.500.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				79.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	79.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				244.219.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	244.219.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				13.500.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	13.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					218.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	6	218.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				178.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	178.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.049.660.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	3.049.660.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	9.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				534.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	534.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	53.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.453.660.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.453.660.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					505.846.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	197	505.846.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				305.846.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	160	305.846.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								266.660.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	3.05	266.660.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						266.660.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	266.660.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					266.660.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	266.660.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				121.660.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	121.660.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				115.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	115.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	15.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				15.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Penanaman Modal									3.532.154.000		
						Kontribusi PMTB terhadap PDRB	%	30.63			
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal								3.532.154.000		
						Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal	%	10.13	3.532.154.000		
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						667.200.000		
						Persentase peningkatan pengakses bahan promosi investasi yang telah dipublikasikan	%	10	667.200.000		
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi					667.200.000		
						Jumlah penyediaan bahan promosi yang dihasilkan	Dokumen	3	667.200.000		
		2.18.02.1.02.0003			Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				357.200.000		
						Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah	35	357.200.000		
		2.18.02.1.02.0004			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi				100.000.000		
						Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	8	100.000.000		
		2.18.02.1.02.0005			Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi				210.000.000		
						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen	1	210.000.000		
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						1.514.954.000		
						Persentase kepeminatan yang terealisasi	%	62	1.514.954.000		
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					1.514.954.000		
						Jumlah kepeminatan Penanaman Modal yang dilakukan Pengawasan	Unit	40	1.514.954.000		
		2.18.03.1.01.0002			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				1.439.954.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	40	1.439.954.000		
		2.18.03.1.01.0003			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				75.000.000		
						Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	75.000.000		
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						790.000.000		
						Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	91.5	480.000.000		
				Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					480.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi pelayanan perizinan yang disusun	Dokumen	4	160.000.000		
		2.18.04.1.02.0008			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				160.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2026				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	4		160.000.000		
						Jumlah pendampingan dan konsultasi perizinan dan non perizinan	Pelaku Usaha	6000		160.000.000		
		2.18.04.1.02.0006			Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					160.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	6000		160.000.000		
						Jumlah perizinan yang diterbitkan	Dokumen	1500		160.000.000		
		2.18.04.1.02.0007			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					160.000.000		
						Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1500		160.000.000		
						Persentase standar pelayanan yang ditetapkan	%	100		310.000.000		
				Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						310.000.000		
						Jumlah dokumen ISO yang diterapkan	Dokumen	2		175.695.000		
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					175.695.000		
						Jumlah dokumen standar pelayanan yang disusun dan dievaluasi	Dokumen	1		175.695.000		
						Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100		134.305.000		
		2.18.04.1.01.0008			Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					134.305.000		
						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	600		134.305.000		
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							350.000.000		
						Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	25		350.000.000		
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						350.000.000		
						Persentase LKPM yang disetujui	%	36		225.000.000		
		2.18.05.1.01.0006			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					225.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	400		225.000.000		
						Prosentase kepatuhan terhadap kegiatan usaha/proyek yang telah dilakukan pengawasan	%	51		125.000.000		
		2.18.05.1.01.0004			Pengawasan Penanaman Modal					125.000.000		
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	180		125.000.000		
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							210.000.000		
						Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10		210.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi					210.000.000		
						Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Unit	1	165.150.000		
		2.18.06.1.01.0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				165.150.000		
						Jumlah dokumen analisis pengembangan aplikasi	Dokumen	1	165.150.000		
						Persentase data dan informasi penanaman modal dan perizinan yang dipublikasikan	%	100	44.850.000		
		2.18.06.1.01.0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				44.850.000		
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	4	44.850.000		
JUMLAH									23.053.331.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Daya Saing Keolahragaan									100.444.700.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
						Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	0.389		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Meningkatnya Pembangunan Keolahragaan								100.444.700.000		
						Tingkat Kebugaran	%	0.16	11.564.700.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						11.564.700.000		
						Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	%	0.34	11.564.700.000	Bidang Pembudayaan Olahraga	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					200.000.000		
						Jumlah Dokumen pembinaan dan pelatihan yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha/lembaga/ instansi/ swas	Kegiatan	1	200.000.000		
		2.19.03.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen	1	200.000.000		
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					10.364.700.000		
						Jumlah kejuaraan olahraga masyarakat yang diselenggarakan level provinsi (sportourisme)	Kegiatan	3	10.364.700.000	Pokja Industri dan Olahraga Masyarakat	
		2.19.03.1.02.0006			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi				10.364.700.000		
						Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kegiatan	5	10.364.700.000	Pokja Industri dan Olahraga Masyarakat	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					1.000.000.000		
						Jumlah Sport Science yang dikembangkan	Unit	1	1.000.000.000	Pokja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga	
		2.19.03.1.03.0007			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1.000.000.000		
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	1	1.000.000.000	Pokja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga	
						Tingkat Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	%	25	88.880.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						88.880.000.000		
						Persentase Atlet pelajar dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	%	79	14.050.000.000	Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					300.000.000		
						Jumlah keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga nasional antar PPLOP	Orang	50	300.000.000	Seksi Kepelatihan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.19.03.1.02.0004			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				300.000.000		
						Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Orang	25	300.000.000	Seksi Kepelatihan	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					13.750.000.000		
						Jumlah Atlet Daerah yang terseleksi	Orang	81	300.000.000	Seksi Kepelatihan	
		2.19.03.1.03.0001			Seleksi Atlet Daerah				300.000.000		
						Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	320	300.000.000	Seksi Kepelatihan	
						Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga Pelajar prestasi tingkat nasional (PPLOP)	Orang	222	13.450.000.000	Seksi Pembinaan dan Pengasuhan	
		2.19.03.1.03.0007			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				13.450.000.000		
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	222	13.450.000.000	Seksi Pembinaan dan Pengasuhan	
						Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	%	79	15.900.000.000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					300.000.000		
						Jumlah Dokumen pembinaan dan pelatihan yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha/lembaga/ instansi/ swasta	Dokumen		150.000.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	
		2.19.03.1.01.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha				150.000.000		
						Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	1	150.000.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	
						Jumlah sarpras olahraga kewenangan daerah provinsi	Unit		150.000.000	Pokja Pengembangan Informasi dan Sarpras Olahraga	
		2.19.03.1.01.0004			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi				150.000.000		
						Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Unit	1	150.000.000	Pokja Pengembangan Informasi dan Sarpras Olahraga	
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					3.400.000.000		
						Jumlah keikutsertaan dalam kejuaraan olahraga nasional	Buah	50	3.000.000.000	Pokja Olahraga Prestasi	
		2.19.03.1.02.0004			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				3.000.000.000		
						Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Orang	100	3.000.000.000	Pokja Olahraga Prestasi	
						Jumlah kejuaraan olahraga Paralympic yang diselenggarakan level provinsi	Kegiatan	1	400.000.000	Pokja Olahraga Prestasi	
		2.19.03.1.02.0005			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kegiatan	1	400.000.000	Pokja Olahraga Prestasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					12.200.000.000		
						Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional	Orang	700	12.200.000.000	Pokja Olahraga Prestasi	
		2.19.03.1.03.0006			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				9.500.000.000		
						Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang	200	9.500.000.000	Pokja Olahraga Prestasi	
		2.19.03.1.03.0009			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi				2.700.000.000		
						Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	200	2.700.000.000	Pokja Olahraga Prestasi	
						Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	%	10	58.930.000.000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					150.000.000		
						Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi yang tervalidasi	Dokumen	1	150.000.000	Pokja Pengembangan Informasi dan Sarpras Olahraga	
		2.19.03.1.03.0008			Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				150.000.000		
						Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Dokumen	1	150.000.000	Pokja Pengembangan Informasi dan Sarpras Olahraga	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					58.780.000.000		
						Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Organisasi	6	58.780.000.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	
		2.19.03.1.04.0003			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				58.580.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen	4	58.580.000.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	
		2.19.03.1.04.0005			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				200.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Dokumen	1	200.000.000	Pokja Kemitraan dan Organisasi Keolahragaan	
Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan									11.965.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
						Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	60.25		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Meningkatnya Pembangunan Kepemudaan								11.965.000.000		
						Angka Lapangan dan Kesempatan Kerja Pemuda	Angka	45.8	1.900.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						1.900.000.000		
						Persentase pemuda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan	%	20.85	1.900.000.000	Bidang Pengembangan Kepemudaan	
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					1.900.000.000		
						Jumlah pemuda yang terfasilitasi pelatihan kepemimpinan dan kepeloporan	Orang	500	1.000.000.000	Pokja Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	
		2.19.02.1.01.0012			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi				400.000.000		
						Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	%	200	400.000.000	Pokja Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.19.02.1.01.0013			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi				600.000.000		
						Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	100	600.000.000	Pokja Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	
						Persentase pemuda wirausaha kerah putih (white collar)	%	0.56	900.000.000	Pokja Kewirausahaan Pemuda	
		2.19.02.1.01.0015			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi				900.000.000		
						Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	300	900.000.000	Pokja Kewirausahaan Pemuda	
						Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Angka	47.2	10.065.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						10.065.000.000		
						Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	%	8.6	9.345.000.000	Bidang Pelayanan Kepemudaan	
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					1.100.000.000		
						Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda	%	13.15	1.100.000.000	Pokja Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	
		2.19.02.1.01.0010			Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda				200.000.000		
						Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang	50	200.000.000	Pokja Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	
		2.19.02.1.01.0011			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi				700.000.000		
						Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	Dokumen	5	700.000.000	Pokja Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	
		2.19.02.1.01.0014			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi				200.000.000		
						Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	Orang	100	200.000.000	Pokja Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi					8.245.000.000		
						Jumlah dukumen Kerjasama bidang kepemudaan dengan lembaga terkait	Dokumen	1	1.000.000.000	Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan	
		2.19.02.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda				1.000.000.000		
						Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	%	20	1.000.000.000	Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan	
						Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	Orang	1000	7.245.000.000	Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.19.02.1.02.0004			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				7.245.000.000		
						Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Organisasi	50	7.245.000.000	Pokja Organisasi, Kemitraan dan Kepramukaan	
						Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	%	80.6	720.000.000	Bidang Pelayanan Kepemudaan	
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					720.000.000		
						Jumlah pemuda yang ditingkatkan penyadaran dan karakternya	Orang	3775	720.000.000	Pokja Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	
		2.19.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				720.000.000		
						Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	1500	720.000.000	Pokja Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Kepemudaan dan Olahraga									39.242.745.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Angka	81.55		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga								38.392.745.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Angka	77	38.392.745.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						38.392.745.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	%	100	6.249.000.000	Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	100.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					133.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	133.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.600.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.600.000	Sub Bagian Tata Usaha	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	15.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.400.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	71.400.000	Sub Bagian Tata Usaha	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.000.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	3.000.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				3.000.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	3.000.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.041.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	2.041.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.000.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.000.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	40.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					975.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	975.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	75.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				900.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	900.000.000	Sub Bagian Tata Usaha	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	%	86	32.143.745.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.683.731.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	17.683.731.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.917.871.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100	16.917.871.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				765.860.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	765.860.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					300.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				300.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					105.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				15.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.217.463.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.217.463.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				40.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.463.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	27.463.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				150.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				800.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					110.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				60.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	10	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					11.142.551.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	11.142.551.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.500.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.562.551.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	9.562.551.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.585.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	26	1.585.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				985.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	985.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga								850.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Angka	3.03	850.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						850.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	%	100	850.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					850.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	850.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				450.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	450.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	350.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	25	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
JUMLAH									151.652.445.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah									617.892.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Angka	96.27		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi Jawa Tengah								617.892.000		
						Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Angka	97.29	459.117.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						439.052.000		
						Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	44.74	261.125.000	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
				Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					261.125.000		
						Jumlah arsiparis yg tersertifikasi di Provinsi Jawa Tengah	Orang	5	10.000.000	Pokja Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	
		2.24.02.1.01.0009			Penyusunan Database Arsiparis				10.000.000		
						Jumlah arsiparis	Dokumen	1	10.000.000	Pokja Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	
						Jumlah OPD, BUMD, Ormas, Orpol yang mendapatkan pembinaan kearsipan	Instansi	51	116.125.000	Pokja Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	
		2.24.02.1.01.0008			Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi				116.125.000		
						Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Instansi	51	116.125.000	Pokja Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	
						Jumlah Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya minimal baik	Lembaga	34	135.000.000	Pokja Pengawasan Kearsipan	
		2.24.02.1.01.0012			Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi				135.000.000		
						Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	117	135.000.000	Pokja Pengawasan Kearsipan	
						Persentase pengelolaan arsip statis provinsi	%	79.15	177.927.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi					177.927.000		
						Jumlah arsip statis yang terkelola	Arsip	146012	177.927.000	Pokja Pengolahan Arsip	
		2.24.02.1.02.0003			Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan				13.508.000		
						Jumlah Orang yang diwawancarai	Orang	2	13.508.000	Pokja Pengolahan Arsip	
		2.24.02.1.02.000			Akuisisi Arsip Statis				34.225.000		
						Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	1500	34.225.000	Pokja Pengolahan Arsip	
		2.24.02.1.02.0006			Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				130.194.000		
						jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	Arsip	13500	130.194.000	Pokja Pengolahan Arsip	
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						20.065.000		
						Persentase pemulihan arsip akibat bencana	%	20.34	9.012.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi					9.012.000		
						Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana	Arsip	2034	9.012.000	Pokja Pelestarian Arsip	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.24.03.1.02.0001			Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				9.012.000		
						Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	600	9.012.000	Pokja Pelestarian Arsip	
						Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan melalui alih media	%	11.4	5.000.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi					5.000.000		
						Jumlah Arsip yang dialih-mediakan	Arsip	6545	5.000.000	Pokja Pelestarian Arsip	
		2.24.03.1.04.0002			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				5.000.000		
						Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	670	5.000.000	Pokja Pelestarian Arsip	
						Persentase peningkatan perangkat daerah yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	%	66.67	6.053.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					6.053.000		
						Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 thn	Arsip	10000	6.053.000	Pokja Akuisisi Arsip	
		2.24.03.1.01.0004			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				6.053.000		
						Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	10000	6.053.000	Pokja Akuisisi Arsip	
						Persentase arsip bersejarah yang ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)	%	50	158.775.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						158.775.000		
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85.7	158.775.000	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					158.775.000		
						Jumlah Arsip yang terlayankan	Arsip	1000	75.000.000	Pokja Layanan Arsip	
		2.24.02.1.03.0001			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				75.000.000		
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	3500	75.000.000	Pokja Layanan Arsip	
						Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	Unit	41	83.775.000	Pokja Pemanfaatan Arsip	
		2.24.02.1.03.0002			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				83.775.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Laporan	4	83.775.000	Pokja Pemanfaatan Arsip	
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan									30.309.985.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Angka	73.78		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan								30.131.669.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Angka	85.45	30.131.669.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						30.131.669.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	30.131.669.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					24.997.559.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	24.997.559.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.770.389.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	147	24.770.389.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				227.170.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	227.170.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					91.708.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	91.708.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.200.000		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				89.508.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	89.508.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					17.700.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	17.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.500.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	2.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.200.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	5.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					884.438.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	884.438.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				78.380.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	78.380.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				155.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	155.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.345.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12.345.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				246.279.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	246.279.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.184.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5.184.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				222.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	222.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					424.295.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	47	424.295.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				136.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	136.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				288.295.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	13	288.295.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.186.166.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	3.186.166.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.100.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1.100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.964.666.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.964.666.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					529.803.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	155	529.803.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				112.553.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	112.553.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	41	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				107.300.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	107.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				151.200.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	151.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				88.750.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	63	88.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan								178.316.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Angka	3.08	178.316.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						178.316.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	178.316.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					178.316.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	178.316.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				143.396.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	143.396.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.920.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	24.920.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	67	5.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan literasi masyarakat									1.572.289.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	42		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat								1.572.289.000		
						Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM)	Angka	68.5	1.572.289.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						1.469.708.000		
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85.2	788.796.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					502.480.000		
						Jumlah kunjungan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Orang	3166650	5.000.000	Pokja Layanan dan Otomasi	
		2.23.02.1.01.001 1			Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat				5.000.000		
						Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Dokumen	1	5.000.000	Pokja Layanan dan Otomasi	
						Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Jenis	12	46.500.000	Pokja Layanan dan Otomasi	
		2.23.02.1.01.000 2			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				26.500.000		
						Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	6	26.500.000	Pokja Layanan dan Otomasi	
		2.23.02.1.01.001 5			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				20.000.000		
						Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1	20.000.000	Pokja Layanan dan Otomasi	OPD Provinsi
						Peningkatan jumlah koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	%	3	450.980.000	Pokja Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	
		2.23.02.1.01.000 9			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				450.980.000		
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	10386	450.980.000	Pokja Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	OPD Provinsi
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					286.316.000		
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan TPBIS yang diselenggarakan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Orang	1070	286.316.000	Pokja Layanan dan Otomasi	
		2.23.02.1.02.000 4			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				286.316.000		
						Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	1	286.316.000	Pokja Layanan dan Otomasi	
						Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	%	45.27	680.912.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					126.604.000		
						Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	Perpustakaan	4	52.000.000	Pokja Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan	
		2.23.02.1.01.001 6			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				23.620.000		
						Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	1	23.620.000	Pokja Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan	
		2.23.02.1.01.001 7			Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi				28.380.000		
						Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan	10	28.380.000	Pokja Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Perpustakaan Sekolah sesuai kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya sesuai SNP	Perpustakaan	270	12.785.000	Pokja Pembinaan Perpustakaan	
		2.23.02.1.01.0004			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				12.785.000		
						Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	10	12.785.000	Pokja Pembinaan Perpustakaan	
						Jumlah Pustakawan yang lulus Sertifikasi	Orang	25	61.819.000	Pokja Pembinaan Perpustakaan	
		2.23.02.1.01.0006			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				61.819.000		
						Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	30	61.819.000	Pokja Pembinaan Perpustakaan	
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					554.308.000		
						Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat	Kegiatan	2	524.308.000	Pokja Kegemaran Membaca	
		2.23.02.1.02.0003			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				182.294.000		
						Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	12	182.294.000	Pokja Kegemaran Membaca	
		2.23.02.1.02.0006			Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				342.014.000		
						Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	1	342.014.000	Pokja Kegemaran Membaca	
						Jumlah pembudayaan gemar membaca di satuan pendidikan menengah, dan khusus	Kegiatan	2	30.000.000	Pokja Kegemaran Membaca	
		2.23.02.1.02.0001			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				30.000.000		
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	13	30.000.000	Pokja Kegemaran Membaca	
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						102.581.000		
						Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	%	9.43	102.581.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
				Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi					46.535.000		
						Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Penerbit	88	46.535.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.01.0001			Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				6.535.000		
						Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	3400	6.535.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	OPD Provinsi
		2.23.03.1.01.0002			Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				40.000.000		
						Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penerbit	6	40.000.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah					21.430.000		
						Jumlah naskah Katalog Induk Derah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Dokumen	2	21.430.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.02.0001			Penerbitan Katalog Induk Daerah				11.535.000		
						Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry	5000	11.535.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.02.0002			Penerbitan Bibliografi Daerah				9.895.000		
						Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	1	9.895.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi					14.326.000		
						Jumlah koleksi naskah kuno di Jawa Tengah yang dialih-mediakan	Eksemplar	269	14.326.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.03.0003			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				14.326.000		
						Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	6	14.326.000	Pokja Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
				Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					20.290.000		
						Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah	Eksemplar	415	20.290.000	Pokja Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.04.0001			Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				8.800.000		
						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	19	8.800.000	Pokja Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	
		2.23.03.1.04.0002			Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				11.490.000		
						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	22	11.490.000	Pokja Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	
JUMLAH									32.500.166.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Kelautan dan Perikanan									63.857.762.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	84		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan								63.404.071.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	85	63.404.071.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						63.404.071.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	%	100	742.039.000	Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					21.804.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	21.804.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.948.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.948.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.056.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.056.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.800.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					654.855.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	654.855.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				303.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	303.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				350.555.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	350.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.380.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	65.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.880.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	9.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	%	100	4.390.153.000	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					26.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.257.153.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	4.257.153.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				505.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	505.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.748.653.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.748.653.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	100	596.473.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					19.367.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	19.367.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.400.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.467.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	12.467.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					537.433.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	537.433.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44.272.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	44.272.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				490.161.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	490.161.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.673.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	39.673.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.815.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	24.815.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11.858.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	11.858.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	100	513.636.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					17.554.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	17.554.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.012.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.042.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	8.042.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					271.972.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	271.972.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				241.472.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	241.472.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					224.110.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	224.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.110.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	4.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	100	406.687.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					16.935.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	16.935.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.774.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.774.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.161.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	10.161.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					357.372.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	357.372.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	34.200.000		OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				322.172.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	322.172.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32.380.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	32.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.080.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	18.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.300.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	4.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	49.277.557.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.977.993.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	43.977.993.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				43.055.093.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	252	43.055.093.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				851.400.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	851.400.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				71.500.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	71.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					136.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	136.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				16.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	16.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				75.000.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.251.710.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.251.710.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				115.140.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	115.140.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				164.490.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	164.490.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				154.080.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	154.080.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				57.500.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	57.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				650.500.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	650.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				72.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	72.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.698.854.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.698.854.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				390.792.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	390.792.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.302.062.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.302.062.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.063.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.063.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				290.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	290.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				142.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	142.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				450.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				181.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	181.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	644.022.000	Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					32.134.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	32.134.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.974.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.974.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.750.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	23.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.410.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	5.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					543.336.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	543.336.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				61.100.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	61.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				479.236.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	479.236.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					68.552.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	68.552.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.409.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	25.409.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				18.143.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	18.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	1.444.788.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					73.960.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	73.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.960.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	9.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.226.908.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.226.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				201.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	201.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.024.308.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.024.308.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					143.920.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	143.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				56.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				64.920.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	64.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	1.220.856.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.200.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	50.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.200.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	21.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.061.156.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.061.156.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				203.980.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	203.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				855.676.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	855.676.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	109.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				52.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	%	100	491.265.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					25.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	25.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.800.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					432.960.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	432.960.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				391.460.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	391.460.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					33.005.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	33.005.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.875.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	12.875.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.130.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.130.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	507.428.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					36.252.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	36.252.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.896.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.896.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.356.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	27.356.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410.876.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	410.876.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				121.346.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	121.346.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				288.330.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	288.330.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.300.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	60.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.100.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	21.100.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.700.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				33.500.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	33.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	756.170.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					41.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	41.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				800.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					529.370.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	529.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				37.350.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	37.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				491.520.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	491.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	185.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				174.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	174.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	442.160.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					18.160.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	18.160.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.250.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.250.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.150.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.150.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.760.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	5.760.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					371.060.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	371.060.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.280.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.280.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				327.980.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	327.980.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					52.940.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	52.940.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.190.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	27.190.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.750.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.750.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	23.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	667.879.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.988.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	60.988.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.898.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.898.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.800.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18.290.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	18.290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					537.051.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	537.051.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	64.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				470.851.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	470.851.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					69.840.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	69.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				32.140.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	32.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.700.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	%	100	381.904.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					44.400.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	44.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.400.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	19.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					275.154.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	275.154.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				231.954.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	231.954.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					62.350.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	62.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.350.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	24.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	457.676.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					30.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	17.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					375.176.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	375.176.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44.880.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	44.880.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				324.296.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	324.296.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					52.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	52.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	463.378.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					18.830.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	18.830.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.850.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.980.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.980.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					387.048.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	387.048.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				356.048.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	356.048.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	21	57.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.500.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	25.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				22.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	22.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan								453.691.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	3.13	453.691.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						453.691.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	453.691.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					453.691.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	453.691.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				208.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	208.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				195.691.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	195.691.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	180	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (IKLH)									616.533.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Persentase Luasan Mangrove Yang Berkualitas Baik	%	66.88		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Luasan Mangrove yang Direhabilitasi								616.533.000		
						Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi	%	0.84	616.533.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						616.533.000		
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	0.07	200.732.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					200.732.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kawasan	2	200.732.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				48.898.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	4253.6	48.898.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				151.834.000		
						Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	2.42	151.834.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	0.16	184.824.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					184.824.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kawasan	1	184.824.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				10.506.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	288.98	10.506.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				174.318.000		
						Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	2.42	174.318.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
						Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	0.19	230.977.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					230.977.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Kawasan	3	230.977.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				87.930.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	772.78	87.930.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				143.047.000		
						Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	2.42	143.047.000	SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI	OPD Provinsi
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan (PE)									25.289.303.000		
						Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	%	2			
	Meningkatnya Produksi Perikanan								25.289.303.000		
						Produksi Garam	Ton	541775.75	491.310.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						491.310.000		
						Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	%	50.17	491.310.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					491.310.000		
						Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Kelompok	10	70.245.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				70.245.000		
						Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	120	70.245.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang meningkat teknologinya	Kelompok	10	421.065.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.03.0005			Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman				421.065.000		
						Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	Unit	10	421.065.000	Pokja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Produksi Perikanan	Ton	954029	24.797.993.000		
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						274.068.000		
						Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	%	25	274.068.000	Bidang Kelautan , Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					274.068.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Lokasi	1	200.000.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				200.000.000		
						Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	750.3	200.000.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang dimanfaatkan sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Lokasi	5	74.068.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		3.25.02.1.01.0006			Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir				74.068.000		
						Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Dokumen	4	74.068.000	Pokja Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						9.248.576.000		
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	1.381.613.000	Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.381.613.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	6600	72.051.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				72.051.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	15	72.051.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	1	1.309.562.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				1.309.562.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	29	1.309.562.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	230.988.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					230.988.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	6600	74.710.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				74.710.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	15	74.710.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi, termasuk penyediaan dokumen pendukung seperti Master Plan/DED/ WKOPP/ Dokumen Lingkungan(AMDAL,UKL-UPL, SPPL,Pertek Air Limbah, Andalalin,)/Dokumen ISO/WBK/KKPRL/KKPR/Studi Kelayakan/IMB atau PBG/Sertifikat Tanah	Unit	1	156.278.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				156.278.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	12	156.278.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	633.497.000	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					633.497.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	9725	192.182.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				192.182.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	18	192.182.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	441.315.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				441.315.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	26	441.315.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	%	100	92.096.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					92.096.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	950	40.226.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				40.226.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	10	40.226.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	51.870.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				51.870.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	22	51.870.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	204.283.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					204.283.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	800	117.158.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				117.158.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	15	117.158.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	2	87.125.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				87.125.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	23	87.125.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	91.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					91.400.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	4050	67.400.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				67.400.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	11	67.400.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	1	24.000.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				24.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	19	24.000.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	88.778.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					88.778.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	150	36.967.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				36.967.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	14	36.967.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	51.811.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				51.811.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	14	51.811.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	119.301.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					119.301.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	52	11.933.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				11.933.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	16	11.933.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	107.368.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				107.368.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	25	107.368.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; KEBUMEN --> AYAH --> DESA AYAH
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	91	1.116.347.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.116.347.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	4500	61.090.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				61.090.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	12	61.090.000	Pokja Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	Unit	1	1.055.257.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				1.055.257.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	19	1.055.257.000	Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	577.223.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					577.223.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	50	285.420.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				285.420.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	17	285.420.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah fasilitas kepelabuhanan (Fasilitas Pokok, Fungsional, Penunjang) yang dibangun/direhabilitasi	kg/kapita/tahun	1	291.803.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				291.803.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	17	291.803.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	127.772.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					127.772.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang Diterbitkan	Dokumen	1200	126.252.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				126.252.000		
						Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	12	126.252.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang Dibangun / Direhabilitasi	Unit	1	1.520.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				1.520.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	24	1.520.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Produksi Perikanan Tangkap	Ton	354029	4.585.278.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					4.147.175.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sektoral Perikanan Tangkap yang dikumpulkan dan diperiksa	Data	30	44.100.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		3.25.03.1.01.0001			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				44.100.000		
						Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	44.100.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
						Jumlah nelayan ditingkatkan kompetensinya	Orang	30	817.850.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		3.25.03.1.01.0010			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				817.850.000		
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	30	817.850.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah nelayan yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan	Orang	10000	3.285.225.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
		3.25.03.1.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				3.285.225.000		
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	1	3.285.225.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
				Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					260.035.000		
						Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	Unit	1000	260.035.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
		3.25.03.1.03.0004			Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				260.035.000		
						Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	%	100	260.035.000	Pokja Penangkapan, Sumber Daya Ikan, Kapal dan Alat Tangkap	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					178.068.000		
						Jumlah Dokumen Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan yang disusun	Dokumen	1	178.068.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	
		3.25.03.1.06.0001			Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				178.068.000		
						Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan	11	178.068.000	Pokja Kepelabuhanan dan Kenelayanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						12.612.050.000		
						Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	268.890.000	Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					268.890.000		
						Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium	sampel	450	220.325.000	Pokja Pengelolaan Kesehatan Ikan	
		3.25.04.1.05.0011			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				220.325.000		
						Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Unit	3	220.325.000	Pokja Pengelolaan Kesehatan Ikan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit pembudidaya ikan yang tertangani terkait kesehatan ikan dan lingkungannya	Unit	40	48.565.000	Pokja Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan	
		3.25.04.1.05.0013			Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				48.565.000		
						Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	35	48.565.000	Pokja Penerapan dan Kelayakan Produk Hasil Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	%	5	6.530.616.000	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					476.560.000		
						Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Lokasi	1	476.560.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	
		3.25.04.1.05.0002			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				105.200.000		
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	1	105.200.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				371.360.000		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	3	371.360.000	Pokja Kemitraan dan Pelayanan Usaha	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat					6.054.056.000		
						Jenis ikan endemik lokal yang dikembangkan	Jenis	1	1.948.168.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	
		3.25.04.1.06.0003			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.948.168.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	27	1.948.168.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Loka air tawar dan payau yang direhabilitasi sarana dan prasarananya	Lokasi	9	4.105.888.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	
		3.25.04.1.06.0004			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4.105.888.000		
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	4.105.888.000	Pokja Produksi dan Diseminasi Perikanan Budidaya	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Produksi Perikanan Budidaya	Ton	600000	5.812.544.000		
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					912.548.000		
						Jenis Pembinaan Yang Dilaksanakan	Jenis	3	43.358.000	Pokja Pengembangan Komoditas	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				43.358.000		
						Jumlah Pembudidaya	Orang	30	43.358.000	Pokja Pengembangan Komoditas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pembudidaya ikan yang difasilitasi sarana dan prasarana	Orang	10	869.190.000	Pokja Pengembangan Komoditas	
		3.25.04.1.05.0001			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				46.050.000		
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	46.050.000	Pokja Pengembangan Komoditas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				823.140.000		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	1	823.140.000	Pokja Pengembangan Komoditas	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat					4.899.996.000		
						Jenis teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Jenis	3	4.899.996.000		
		3.25.04.1.06.0003			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4.899.996.000		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	10	4.899.996.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.663.227.000		
						Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	72	182.011.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					182.011.000		
						Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	%	75	182.011.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0010			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				182.011.000		
						Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	12	182.011.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	103.390.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					103.390.000		
						Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	%	50	103.390.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0010			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				103.390.000		
						Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	8	103.390.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	61	244.953.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					244.953.000		
						Persentase jumlah operasi yang dilaksanakan sesuai target cakupan	%	50	244.953.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0010			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				244.953.000		
						Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	10	244.953.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	17	58.212.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					58.212.000		
						Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	10	10.061.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				10.061.000		
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	20	10.061.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	%	100	48.151.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				4.416.000		
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	5	4.416.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				2.500.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	3	2.500.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi				3.570.000		
						Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	3.570.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				37.665.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	3	37.665.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	50	56.960.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					56.960.000		
						Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	10	3.870.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				3.870.000		
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	15	3.870.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan Kelautan sampai dengan 12 mil	%	80	53.090.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				2.610.000		
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	1	2.610.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi				2.610.000		
						Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	3	2.610.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				47.870.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	3	47.870.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	17	64.710.000	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					64.710.000		
						Jumlah HPK dan SLO Kapal Perikanan Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	3	4.410.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				4.410.000		
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	4.410.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Tindak lanjut Pelanggaran Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan kelautan sampai dengan 12 mil	%	100	60.300.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				4.700.000		
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	5	4.700.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				2.105.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	2.105.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi				2.105.000		
						Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	2.105.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				51.390.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	2	51.390.000	SEKSI PENGAWASAN KELAUTAN	OPD Provinsi
						Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	%	70	952.991.000	Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					899.261.000		
						Jumlah pelaku usaha pergaraman dan pembudidaya ikan air payau yang mengetahui peraturan perundang-undangan	Orang	50	42.020.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				42.020.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	42.020.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha perikanan dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang diselesaikan	%	90	857.241.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.05.1.01.0008			Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi				56.784.000		
						Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	3	56.784.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0017			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				781.310.000		
						Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	5	781.310.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0018			Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah				19.147.000		
						Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Forum	1	19.147.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					53.730.000		
						Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	90	35.820.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				17.910.000		
						Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	17.910.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				17.910.000		
						Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	17.910.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota	%	90	17.910.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	

						Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya					
		3.25.05.1.02.0004			Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi				17.910.000		
						Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	17.910.000	Pokja Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						1.000.072.000		
						Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahu	17.71	637.000.000		
				Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					50.000.000		
						Jumlah Produk Olahan Ikan	Ton	161604	50.000.000		
		3.25.06.1.01.0004			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				50.000.000		
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	1	50.000.000		
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					585.000.000		
						Jumlah SDM dan Pelaku Usaha yang Difasilitasi Kegiatan	Orang	2000	585.000.000		
		3.25.06.1.02.0003			Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				585.000.000		
						Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	10	585.000.000		
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					2.000.000		
						Fasilitasi kegiatan kontinuitas bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan; dan distrbusi produk perikanan	Kegiatan	1	2.000.000		
		3.25.06.1.03.0004			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku				2.000.000		
						Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan	Ton	981000	2.000.000		
						Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	363.072.000		
				Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					82.037.000		
						Jumlah Unit Pengolahan Ikan Yang difasilitasi kelayakan mutunya	Unit	85	82.037.000		
		3.25.06.1.01.0005			Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				82.037.000		

						Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Rekomendasi	105	82.037.000		OPD Provinsi
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					281.035.000		
						Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan	Dokumen	550	281.035.000		
		3.25.06.1.02.0003			Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				281.035.000		
						Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	575	281.035.000		OPD Provinsi
JUMLAH									89.763.598.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									43.262.477.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Angka	81.55		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								42.712.477.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Angka	77	42.712.477.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						42.712.477.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	86	34.469.477.000	Sekretariat	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					23.133.641.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	23.133.641.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				22.533.641.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	170	22.533.641.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				600.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	600.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					150.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.305.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.305.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				240.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				700.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				75.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.000.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.000.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.955.836.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	7.955.836.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.226.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	9.226.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.180.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.716.610.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6.716.610.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					825.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	26	825.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				100.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	315	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita	%	100	3.468.000.000	Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					316.677.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	316.677.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32.192.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	32.192.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.568.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	65.568.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.053.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	26.053.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.400.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	27.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.888.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2.888.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.080.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	10.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117.496.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	117.496.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					239.415.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Unit	10	239.415.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				176.915.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	176.915.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				57.500.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.123.850.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.123.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.050.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				654.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	654.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.900.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.434.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.434.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					748.058.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	27	748.058.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				81.900.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	81.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				32.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				362.753.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	362.753.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				163.605.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	163.605.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				83.800.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	83.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Taman Budaya Jawa Tengah	%	100	4.775.000.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					558.996.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	558.996.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				80.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				85.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				49.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	49.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				174.496.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	174.496.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.815.996.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.815.996.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				630.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	630.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.165.996.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	1.165.996.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.350.008.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	117	2.350.008.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.060.008.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	2.060.008.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	105	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								550.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Angka	3.03	550.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						550.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	100	550.000.000	Sekretariat	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					550.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	550.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	200.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan									27.680.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	62.86		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Meningkatnya Partisipasi Budaya								27.680.000.000		
						Angka Melek Budaya	%	55.32	27.680.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						22.675.000.000		
						Persentase kesenian/tradisi budaya yang dilestarikan	%	72	1.150.000.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					1.150.000.000		
						Persentase kesenian yang direvitalisasi dan dikembangkan	%	1.21	1.150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		2.22.02.1.02.0001			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				1.150.000.000		
						Jumlah kesenian & tradisi budaya yang menjadi karya baru	Objek	1	51.795.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah kesenian yang di revitalisasi	Objek	1	98.205.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	200	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang berdayaguna	%	27.11	17.300.000.000	Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					17.300.000.000		
						Jumlah SDM Kebudayaan memperoleh sertifikat dan penghargaan	Orang	14	480.000.000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	
		2.22.02.1.01.0002			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				480.000.000		
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	14	480.000.000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	%	12.12	3.300.000.000	Pokja Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	
		2.22.02.1.01.0013			Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				3.300.000.000		
						Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan	20	1.300.000.000	Pokja Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah OPK yang dikembangkan	Angka	8	2.000.000.000	Pokja Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kapasitas lembaga/kelompok kesenian	%	16.66	13.520.000.000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	
		2.22.02.1.01.0002			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				13.520.000.000		
						Jumlah Lembaga Kesenian yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1221	13.520.000.000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Warisan Budaya Tak Benda berperingkat Nasional	%	26.1	4.225.000.000	Bidang Pelindungan Kebudayaan	
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					4.225.000.000		
						Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	10.3	4.225.000.000	Pokja Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.22.02.1.01.0010			Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan				4.225.000.000		
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	Objek	17	4.225.000.000	Pokja Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						1.750.000.000		
						Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	1.12	1.750.000.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.750.000.000		
						Persentase SDM & lembaga kesenian yang dilakukan pembinaan	%	0.14	1.750.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		2.22.03.1.01.0001			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				1.750.000.000		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	50	1.750.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						150.000.000		
						Persentase literasi kesejarahan dan tradisi	%	53.55	150.000.000		
				Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi					150.000.000		
						Jumlah literasi tradisi	Angka	317	150.000.000		
		2.22.04.1.01.0004			Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen	7	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						1.205.000.000		
						Persentase Cagar Budaya berdayaguna	%	16.12	580.000.000	Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan	
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					580.000.000		
						Jumlah Cagar Budaya berperingkat provinsi yg dimanfaatkan	Angka	13	300.000.000	Pokja Pemanfaatan dan Kerjasama Kebudayaan	
		2.22.05.1.02.0002			Pengembangan Cagar Budaya				100.000.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	14	100.000.000	Pokja Pemanfaatan dan Kerjasama Kebudayaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.22.05.1.02.0003			Pemanfaatan Cagar Budaya				200.000.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	29	200.000.000	Pokja Pemanfaatan dan Kerjasama Kebudayaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM Cagar Budaya memperoleh sertifikat dan penghargaan	Orang	224	280.000.000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	
		2.22.05.1.02.0004			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya				280.000.000		
						Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	44	280.000.000	Pokja Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Cagar Budaya berperingkat Nasional	%	13.6	625.000.000	Bidang Pelindungan Kebudayaan	
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					475.000.000		
						Persentase Cagar Budaya berperingkat provinsi	%	9.65	475.000.000	Pokja Pelindungan Cagar Budaya	
		2.22.05.1.01.0002			Penetapan Cagar Budaya				475.000.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	262	475.000.000	Pokja Pelindungan Cagar Budaya	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					150.000.000		
						Persentase Cagar Budaya berperingkat provinsi yang dilindungi	%	43.75	150.000.000	Pokja Pelindungan Cagar Budaya	
		2.22.05.1.02.0001			Pelindungan Cagar Budaya				150.000.000		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Objek	285	150.000.000	Pokja Pelindungan Cagar Budaya	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						1.900.000.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90.1	1.900.000.000	Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A	
				Pengelolaan Museum Provinsi					1.900.000.000		
						Jumlah pengunjung museum	Orang	60000	1.900.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		2.22.06.1.01.0001			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				675.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Unit	2020	675.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		2.22.06.1.01.0003			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				975.000.000		
						Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	7	975.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		2.22.06.1.01.0004			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				250.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	4	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
Meningkatkan pembangunan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									17.077.675.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	13.08		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3.6		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Meningkatnya pengeluaran wisatawan								15.777.675.000		
						Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	8243954	15.777.675.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						6.525.625.000		
						Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	10	6.525.625.000	Bidang Destinasi Pariwisata	
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi					6.000.625.000		
						Daya Tarik Wisata Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	Lokasi	2	6.000.625.000	Pokja Kawasan Pariwisata	
		3.26.02.1.01.0008			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi				6.000.625.000		
						Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	200	6.000.625.000	Pokja Kawasan Pariwisata	
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					175.000.000		
						Destinasi Pariwisata Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	Lokasi	1	175.000.000	Pokja Kawasan Pariwisata	
		3.26.02.1.03.0009			Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi				175.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Dokumen	1	175.000.000	Pokja Kawasan Pariwisata	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					350.000.000		
						Usaha Pariwiata yang memiliki TDUP/NIB	Unit Usaha	0	350.000.000	Pokja Usaha Pariwisata	
		3.26.02.1.04.0009			Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)				150.000.000		
						Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha	100	150.000.000	Pokja Usaha Pariwisata	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.26.02.1.04.0013			Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata				200.000.000		
						Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Laporan	100	200.000.000	Pokja Usaha Pariwisata	
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						8.652.050.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	75348282	8.652.050.000	Bidang Pemasaran Pariwisata	
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					8.652.050.000		
						Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Ribu Orang	70.79	8.652.050.000	Pokja Pengembangan Pasar Pariwisata	
		3.26.03.1.01.0001			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				165.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3	165.000.000	Pokja Pengembangan Pasar Pariwisata	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.26.03.1.01.0005			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				590.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	2	590.000.000	Pokja Pengembangan Pasar Pariwisata	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.26.03.1.01.0006			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				7.897.050.000		
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	30	7.897.050.000	Pokja Pengembangan Pasar Pariwisata	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						600.000.000		
						Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi Kompetensi	%	3.3	600.000.000	Bidang Destinasi Pariwisata	
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					600.000.000		
						Sumber Daya Manusia Pariwisata Tingkat Lanjutan	Orang	25	600.000.000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata	
		3.26.05.1.01.0004			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				150.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	25	150.000.000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata	
		3.26.05.1.01.0014			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				300.000.000		
						Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	150	300.000.000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.26.05.1.01.0016			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				150.000.000		
						Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	100	150.000.000	Pokja Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif								1.300.000.000		
						Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Juta Rupiah	102344465	1.300.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						850.000.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	Kabupaten/ Kota	1	850.000.000	Bidang Ekonomi Kreatif	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif					250.000.000		
						Uji Petik PMK3I Kab/Kota	Dokumen	1	250.000.000	Pokja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	
		3.26.04.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	1	50.000.000	Pokja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	
		3.26.04.1.01.0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar				50.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan	1	50.000.000	Pokja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	
		3.26.04.1.01.0006			Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik				150.000.000		
						Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen	2	150.000.000	Pokja Kemitraan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					600.000.000		
						Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Meningkatkan Kualitasnya	Dokumen	1	600.000.000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	
		3.26.04.1.02.0012			Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				100.000.000		
						Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen	1	100.000.000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	
		3.26.04.1.02.0013			Fasilitasi Kekayaan Intelektual				200.000.000		
						Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	Orang	100	200.000.000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	OPD Provinsi
		3.26.04.1.02.0014			Pendukungn Pemasaran Ekonomi Kreatif				50.000.000		
						Jumlah terlaksanakanya pendukungn pemasaran ekonomi kreatif	Promosi	2	50.000.000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	
		3.26.04.1.02.0015			Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah				200.000.000		
						Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	1	200.000.000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	
		3.26.04.1.02.0017			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	1	50.000.000	Pokja Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						450.000.000		
						Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Kompetensi	%	4.3	450.000.000	Bidang Ekonomi Kreatif	
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					150.000.000		
						Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Orang	100	150.000.000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	
		3.26.05.1.01.0008			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				150.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	150.000.000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					300.000.000		
						Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	150	300.000.000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	
		3.26.05.1.02.0001			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				100.000.000		
						Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	150	100.000.000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	
		3.26.05.1.02.0007			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif				200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	100	200.000.000	Pokja SDM Ekonomi Kreatif	
JUMLAH									88.020.152.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Pertanian dan Peternakan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pertanian dan Peternakan									168.558.597.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	Angka	74.5		Dinas Pertanian dan Peternakan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan								166.816.686.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	Angka	81.5	166.816.686.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						166.816.686.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	%	100	863.000.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					226.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	226.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				76.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	76.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					233.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	233.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				230.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					404.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	404.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				47.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	47.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				58.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	58.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				297.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	297.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	952.000.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					155.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	155.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				19.996.000		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	19.996.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.004.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	40.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					91.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	91.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				91.750.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	91.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					368.250.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	368.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.250.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				330.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					337.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	7	337.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				75.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	52	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				212.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	212.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	%	100	4.182.590.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah	%	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					122.610.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	122.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.810.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.190.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.190.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.783.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	20.783.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.008.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.008.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				21.034.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	21.034.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.785.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	47.785.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.158.849.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	100	3.158.849.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.900.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	30.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.052.949.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	28	3.052.949.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					350.619.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	100	350.619.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				349.619.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	349.619.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					545.512.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	100	545.512.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				360.512.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	360.512.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah	%	100	1.906.924.000	Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					283.396.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	283.396.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				101.705.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	101.705.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.275.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	17.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				31.680.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	31.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87.236.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	87.236.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					171.013.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	171.013.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				16.700.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	16.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				129.875.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	129.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.438.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	24.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					967.825.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	967.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				275.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	275.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.450.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	15.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				672.375.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	672.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					484.690.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	484.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.410.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	77.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				130.680.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	130.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				90.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				136.575.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	136.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.025.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian	%	100	12.518.445.000	Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000		
						Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah	%	100	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					221.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	221.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					11.460.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	11.460.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.460.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	34	11.460.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					180.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				175.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					607.445.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	607.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	105	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				457.445.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	457.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Pertanian	%	100	1.128.000.000	Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					125.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	1	125.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.500.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	71.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					186.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	186.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					301.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	301.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					515.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	515.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	125	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	29	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				195.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	195.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah	%	100	3.993.060.000	Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					519.377.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	519.377.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.610.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				96.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	96.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.105.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	45.105.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				102.432.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	102.432.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	50.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				55.350.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	55.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				135.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.380.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	10.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					469.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Unit	1	469.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				400.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.400.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	19.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.054.433.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.054.433.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				402.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	402.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				165.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	165.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.482.633.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.482.633.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					949.850.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	949.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				54.350.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	54.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				56.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				768.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	768.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				61.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	61.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelidungan Tanaman	%	100	900.000.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		
						Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah	%	100	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					105.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	265	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu				15.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					25.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					415.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	415.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				260.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	260.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					325.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	325.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				64.600.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	64.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.400.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah	%	100	5.183.485.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					656.919.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	656.919.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.800.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				198.769.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	198.769.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				59.850.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	59.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				225.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.500.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					578.975.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	578.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				78.975.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	78.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.598.491.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.598.491.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				323.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	323.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.272.191.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.272.191.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.349.100.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.349.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				74.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	74.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				112.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	112.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				305.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	305.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				840.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	840.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.600.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	17.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	%	100	1.759.003.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					32.240.000		
						Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah	%	100	32.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.240.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	2.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					110.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					879.948.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	879.948.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				879.948.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	879.948.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					258.770.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	258.770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				216.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	216.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.770.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	37.770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					478.045.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	478.045.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				228.575.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	228.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.550.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	25.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				223.920.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	223.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	%	100	133.430.179.000	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					110.646.685.000		
						Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	110.646.685.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				109.642.685.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	750	109.642.685.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				954.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	954.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				50.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					350.595.000		
						Meningkatnya kualitas barang perangkat daerah	%	100	350.595.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				255.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	255.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75.000.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				20.595.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	20.595.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					96.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	96.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				96.000.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	96.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					278.621.000		
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	278.621.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3.920.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	3.920.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3.920.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	3.920.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				258.294.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1445	258.294.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12.487.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	180	12.487.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.068.165.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.068.165.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				61.601.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	61.601.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				179.316.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	179.316.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				156.185.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	156.185.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				151.816.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	151.816.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				137.941.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	137.941.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				247.010.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	247.010.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.093.906.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1.093.906.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.390.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	40.390.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.189.820.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	1.189.820.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				215.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	31	215.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				615.720.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	43	615.720.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				44.100.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	37	44.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.271.675.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	15.271.675.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	11.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.645.719.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.645.719.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				13.604.956.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	13.604.956.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.528.618.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	3.528.618.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				849.700.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	48	849.700.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				30.200.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	6	30.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				483.560.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	307	483.560.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				185.500.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	185.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				49.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	49.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.230.099.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	1.230.099.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				580.559.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	580.559.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				120.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan								1.741.911.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	Angka	2.9	1.741.911.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.741.911.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	%	100	1.741.911.000	Sekretariat	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.741.911.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	1.741.911.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.016.754.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	1.016.754.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				725.157.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	725.157.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian									400.962.343.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor pertanian	%	1.05		Dinas Pertanian dan Peternakan	
	Meningkatnya Produksi Pertanian								330.929.905.000		
						Persentase kenaikan jumlah kelembagaan petani dan peternak yang meningkat kapasitas usahanya	%	100	35.004.978.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						35.004.978.000		
						Persentase kelembagaan petani yang terfasilitasi	%	0.2	30.032.978.000	Bidang Kelembagaan	
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					29.282.978.000		
						jumlah fasilitasi kerjasama dan kemitraan bidang pertanian	Dokumen	1	2.000.000.000	Pokja Kerja Sama	
		3.27.07.1.02.000 2			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				2.000.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kerjasama dan kemitraan bidang pertanian	Laporan	4	2.000.000.000	Pokja Kerja Sama	
						jumlah kelembagaan petani yang terfasilitasi	Kelompok	23	14.458.478.000	Pokja Kelembagaan	
		3.27.07.1.02.000 2			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				14.458.478.000		
						Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	79	14.458.478.000	Pokja Kelembagaan	
						Jumlah luas lahan petani yang terfasilitasi asuransi	Ha	10130	12.324.500.000	Pokja Pembiayaan	
		3.27.07.1.02.000 2			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				12.324.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi asuransi pertanian	Laporan	4	12.324.500.000	Pokja Pembiayaan	
						Jumlah petani yang terfasilitasi pembiayaan	Orang	800	500.000.000	Pokja Pembiayaan	
		3.27.07.1.02.000 2			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				500.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi pembiayaan pertanian	Laporan	4	500.000.000	Pokja Pembiayaan	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					750.000.000		
						jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok tani menuju korporasi	Unit	5	750.000.000	Pokja Kelembagaan	
		3.27.07.1.03.000 6			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				750.000.000		
						Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	5	500.000.000	Pokja Kelembagaan	
						Jumlah pendampingan korporasi petani	Unit	24	250.000.000	Pokja Kelembagaan	
						Persentase SDM pertanian yang dilatih	%	100	4.972.000.000	Balai Pelatihan Pertanian Kelas A	
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					4.972.000.000		
						Jumlah SDM petani yang terfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan pelayanan teknis	Orang	1410	4.523.000.000	Pokja Pelatihan	
		3.27.07.1.02.000 1			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				3.111.000.000		
						Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	4	3.111.000.000	Pokja Pelatihan	
		3.27.07.1.02.000 2			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				1.412.000.000		
						Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	9	1.412.000.000	Pokja Pelatihan	
						Jumlah SDM peternak yang terfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan pelayanan teknis	Orang	690	449.000.000	Pokja Bimbingan Teknis dan Penyebaran informasi	
		3.27.07.1.02.000 2			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				449.000.000		
						jumlah pelatihan Peternakan dan KesehatanHewan Ternak Perah	Kali	7	130.665.000	Pokja Bimbingan Teknis dan Penyebaran informasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						jumlah pelatihan Peternakan dan KesehatanHewan Ternak Petelur	Kali	5	94.800.000	Pokja Bimbingan Teknis dan Penyebaran informasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						jumlah pelatihan Peternakan dan KesehatanHewan Ternak Potong	Kali	11	223.535.000	Pokja Bimbingan Teknis dan Penyebaran informasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	1073636	9.902.149.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						9.557.329.000		
						Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman hortikultura di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	1.066.012.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					1.066.012.000		
						Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk	Batang	6500	603.850.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0007			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				603.850.000		
						Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan	Batang	6500	603.850.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi benih sayuran	Batang	0.2	46.300.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0007			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				46.300.000		
						Jumlah pengembangan benih sayuran	Kg	200	46.300.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi benih tanaman buah	Batang	10000	415.862.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0007			Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				415.862.000		
						Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	25000	415.862.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Persentase layanan sertifikasi benih tanaman hortikultura	%	100	847.491.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					847.491.000		
						Jumlah pengawasan peredaran benih hortikultura	Bulan	12	501.035.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0019			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura				210.398.000		
						Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat. Yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga. (hortik)	Laporan	12	210.398.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0020			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan				290.637.000		
						Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat. Yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga. (perkebunan)	Laporan	12	290.637.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Jumlah sertifikasi benih hortikultura buah	Batang	700000	231.764.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				231.764.000		
						Jumlah pemeriksaan sertifikasi bibit hortikultura buah	Batang	700000	231.764.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Jumlah sertifikasi benih hortikultura sayuran	Ton	6000	48.385.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				48.385.000		
						Jumlah pengujian mutu sertifikasi benih hortikultura sayuran	Sertifikat	125	48.385.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Jumlah sertifikasi benih hortikultura sayuran	Ton	6000	66.307.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				66.307.000		
						Luas pemeriksaan sertifikasi bibit hortikultura sayuran	Ha	500	66.307.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Produksi Bawang Merah	Ton	617015	1.786.616.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					1.786.616.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan bawang merah	Ha	25	1.786.616.000	Pokja Hortikultura	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.786.616.000		
						Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (bawang merah)	Laporan	4	1.786.616.000	Pokja Hortikultura	
						Produksi Cabai	Ton	456621	4.244.735.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					4.244.735.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan cabai	Ha	310	4.244.735.000	Pokja Hortikultura	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				4.244.735.000		
						Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (cabai)	Laporan	4	4.244.735.000	Pokja Hortikultura	
						Produksi Tanaman Buah dan Tanaman Obat	Ton	392201	1.612.475.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					1.612.475.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan tanaman buah	Ha	20	308.600.000	Pokja Hortikultura	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				308.600.000		
						Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (tanaman buah)	Laporan	4	308.600.000	Pokja Hortikultura	
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan tanaman obat	Ha	3	1.303.875.000	Pokja Hortikultura	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.303.875.000		
						Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (tanaman obat)	Laporan	4	1.303.875.000	Pokja Hortikultura	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						344.820.000		
						Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura	%	10	300.000.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					300.000.000		
						Jumlah luas pengendalian serangan OPT komoditas hortikultura	Ha	152542	300.000.000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	
		3.27.05.1.01.0001			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				300.000.000		
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Hortikultura)	Ha	55	300.000.000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	
						Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura	%	5	44.820.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					44.820.000		
						Jumlah gerakan penanganan DPI Komoditas Hortikultura	Unit	10	44.820.000	Pokja Perlindungan Tanaman Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.27.05.1.01.0002			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				44.820.000		
						Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	5	44.820.000	Pokja Perlindungan Tanaman Pangan	
						Produksi Tanaman Pangan	Ton	12734625	224.750.812.000		
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						47.206.452.000		
						Persentase alsintan yang direkayasa dan dikembangkan	%	100	228.993.000		
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					228.993.000		
						Jumlah rekayasa dan pengembangan alsintan	Dokumen	1	228.993.000		
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				228.993.000		
						Jumlah laporan rekomendasi rekayasa teknis alsintan	Dokumen	5	228.993.000		OPD Provinsi
						Persentase capaian alsintan dan pengelola alsintan yang diawasi	%	3	377.562.000		
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					377.562.000		
						Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran alsintan serta pengelola alsintan	Dokumen	12	377.562.000		
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				377.562.000		
						Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	377.562.000		
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	%	100	3.828.717.000		
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					3.828.717.000		
						Jumlah pemeliharaan tanaman produksi dan pohon induk hortikultura	Batang	12725	178.550.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0007			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				178.550.000		
						Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	5000	47.500.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi tanaman hias yang dihasilkan	Batang	12000	131.050.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi benih padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat	Ton	41	2.033.200.000	Pokja Tanaman Pangan	
		3.27.02.1.02.0013			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				2.033.200.000		
						Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	193.8	1.979.965.000	Pokja Tanaman Pangan	
						Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan lainnya berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	1.6	53.235.000	Pokja Tanaman Pangan	
						Jumlah produksi benih rempah penyegar	Setek	1	608.097.000		
		3.27.02.1.02.0010			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				608.097.000		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek	1300	129.833.000		
						Jumlah pohon tanaman produksi perkebunan yang dipelihara	Ha	67	478.264.000		
						Jumlah produksi benih tanaman buah	Batang	5000	912.870.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0007			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				912.870.000		
						Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan	Batang	12725	912.870.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi benih tanaman semusim	Mata	0	96.000.000		
		3.27.02.1.02.0008			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh				96.000.000		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata	8360000	96.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	%	100	4.657.200.000		
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					4.657.200.000		
						Jumlah produksi benih sayuran	Ton	3	3.573.300.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0007			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				1.109.280.000		
						Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	30000	456.262.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk umbi yang diperbanyak	Ton	1.8	460.783.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah pohon produksi dan pohon induk hortikultura yang difasilitasi pemeliharaan	Batang	3000	192.235.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
		3.27.02.1.02.0013			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				2.464.020.000		
						Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	313.2	2.464.020.000	Pokja Hortikultura dan Perkebunan	
						Jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar	Batang	0.5	79.485.000		
		3.27.02.1.02.0010			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				79.485.000		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek	0	79.485.000		
						Jumlah produksi benih tanaman tahunan	Batang	0	1.004.415.000		
		3.27.02.1.02.0012			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				1.004.415.000		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	20000	1.004.415.000		
						Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman pangan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	2.947.988.000	Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.947.988.000		
						Jumlah produksi benih tanaman padi dan tanaman pangan lainnya bersertifikat	Ton	212.2	2.947.988.000	Pokja Tanaman Pangan	
		3.27.02.1.02.0013			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				2.947.988.000		
						Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	353.4	2.873.613.000	Pokja Tanaman Pangan	
						Jumlah produksi benih tanaman pangan lainnya bersertifikat	Ton	4	74.375.000	Pokja Tanaman Pangan	
						Persentase layanan sertifikasi benih tanaman pangan	%	100	1.156.787.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					1.156.787.000		
						Jumlah pengawasan peredaran benih tanaman pangan	Bulan	12	442.303.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0018			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan				442.303.000		
						Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat. Yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga. (tanaman pangan)	Laporan	12	442.303.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan	Ton	1000	104.110.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				104.110.000		
						Jumlah pengujian mutu sertifikasi benih tanaman pangan	Sertifikat	1500	104.110.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan	Ton	20800	610.374.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				610.374.000		
						Jumlah sertifikat benih tanaman pangan	Ha	5200	532.830.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Luas sertifikasi benih tanaman pangan lainnya	Ha	390	77.544.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Produksi Jagung	Ton	3301024	3.208.005.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					3.208.005.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya Jagung dan serealia	Ha	3200	3.208.005.000	Pokja Palawija	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				3.208.005.000		
						Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (jagung dan serealia)	Laporan	4	3.208.005.000	Pokja Palawija	
						Produksi Kedelai	Ton	52790	8.700.000.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					8.700.000.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya Kedelai, Aneka kacang dan Umbi	Ha	3100	8.700.000.000	Pokja Palawija	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				8.700.000.000		
						Jumlah pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (kedelai, aneka kacang dan umbi)	Laporan	4	8.700.000.000	Pokja Palawija	
						Produksi Padi	Ton	9380811	22.101.200.000	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					22.101.200.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya Padi	Ha	47300	22.101.200.000	Pokja Padi	
		3.27.02.1.01.0001			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				22.101.200.000		
						Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	22.101.200.000	Pokja Padi	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						175.834.000.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana sarana pertanian	%	1	175.834.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana	
				Penataan Prasarana Pertanian					175.834.000.000		
						Jumlah fasilitasi pupuk/pembenah tanah	Ha	14800	23.300.000.000	Seksi Sarana	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				23.300.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	4	23.300.000.000	Seksi Sarana	
						Jumlah jaringan irigasi alternatif yang difasilitasi	Paket	75	9.038.950.000	Seksi Prasarana	
		3.27.03.1.01.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				9.038.950.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	4	9.038.950.000	Seksi Prasarana	
						jumlah jaringan irigasi tersier yang difasilitasi	Paket	334	66.541.050.000	Seksi Prasarana	
		3.27.03.1.01.0004			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				66.541.050.000		
						Jumlah Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani (irigasi tersier)	Dokumen	4	66.541.050.000	Seksi Prasarana	
						jumlah kelembagaan pengelola alsintan	Unit	240	76.654.000.000	Seksi Alat Mesin	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				76.654.000.000		
						Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan penataan sarana pendukung pertanian lainnya (alsintan)	Dokumen	4	76.654.000.000	Seksi Alat Mesin	
						jumlah luasan lahan yang dioptimasi	Ha	50	300.000.000	Seksi Sarana	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah stimulan benih mendukung optimasi lahan	Kg	1875	28.125.000	Seksi Sarana	
						Jumlah stimulan pupuk mendukung optimasi lahan	Kg	133200	271.875.000	Seksi Sarana	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						1.710.360.000		
						Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	%	20	1.500.000.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					1.500.000.000		
						Jumlah Luas pengendalian serangan OPT komoditas tanaman pangan	Ha	4014129	1.500.000.000	Pokja Perlindungan Tanaman Pangan	
		3.27.05.1.01.0001			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				1.500.000.000		
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	640	1.500.000.000	Pokja Perlindungan Tanaman Pangan	
						Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan	%	5	210.360.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					210.360.000		
						Jumlah gerakan penanganan DPI Komoditas Tanaman Pangan	Unit	29	210.360.000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	
		3.27.05.1.01.0002			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				210.360.000		
						Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Tanaman Pangan)	Ha	5	210.360.000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	
						Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	3868066	61.271.966.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						57.477.146.000		
						Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman perkebunan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	950.000.000		
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					950.000.000		
						Jumlah produksi benih tanaman tahunan	Batang	0	950.000.000		
		3.27.02.1.02.0012			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				950.000.000		
						Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	1500	950.000.000		
						Persentase layanan sertifikasi benih tanaman perkebunan	%	100	486.719.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					486.719.000		
						Jumlah sertifikasi benih perkebunan	Batang	874180	486.719.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.0001			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				486.719.000		
						Jumlah pemeriksaan sertifikasi bibit perkebunan	Batang	874180	486.719.000	POKJA PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Produksi Kelapa	Ton	166955	4.630.000.000	Bidang Perkebunan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					4.630.000.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan kelapa dan tanaman tahunan lainnya	Ha	630	4.630.000.000	Pokja Tanaman Tahunan	
		3.27.02.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				4.630.000.000		
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pereedaran sarana pertanian (kelapa dan tanaman tahunan lainnya)	Dokumen	4	4.630.000.000	Pokja Tanaman Tahunan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Produksi Kopi	Ton	26875	5.550.000.000	Bidang Perkebunan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					5.550.000.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan kopi dan rempah penyegar lainnya	Ha	960	5.550.000.000	Pokja Tanaman Rempah dan Penyegar	
		3.27.02.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				5.550.000.000		
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	4	5.550.000.000	Pokja Tanaman Rempah dan Penyegar	
						Produksi Tebu	Ton	3674236	45.860.427.000	Bidang Perkebunan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					45.860.427.000		
						Jumlah luas tanam fasilitasi bantuan budidaya pengembangan tebu dan tanaman semusim lainnya	Ha	1408	45.860.427.000	Pokja Semusim	
		3.27.02.1.01.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				45.860.427.000		
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pereebaran sarana pertanian (tebu dan tanaman semusim lainnya)	Dokumen	4	45.860.427.000	Pokja Semusim	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						3.794.820.000		
						Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Perkebunan	%	10	3.750.000.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					3.750.000.000		
						Jumlah Luas pengendalian serangan OPT komoditas perkebunan	Ha	1929741	3.750.000.000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	
		3.27.05.1.01.0001			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				3.750.000.000		
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Perkebunan)	Ha	1065	3.750.000.000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	
						Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Perkebunan	%	5	44.820.000	Balai Pelindungan Tanaman Kelas A	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					44.820.000		
						Jumlah gerakan penanganan DPI Komoditas Perkebunan	Unit	10	44.820.000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	
		3.27.05.1.01.0002			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				44.820.000		
						Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Perkebunan)	Ha	20	44.820.000	Pokja Perlindungan Perkebunan dan Hortikultura	
	Meningkatnya Produksi Peternakan								70.032.438.000		
						Produksi Ternak	Ton	1936930	70.032.438.000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						45.040.601.000		
						Jumlah Populasi ternak	(ST)/(AU)	6135083	29.692.000.000	Bidang Peternakan	
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi					6.337.000.000		
						Jumlah kelompok atau usaha budidaya ternak yang menerapkan Good Farming Practices	Unit	3	6.337.000.000	Pokja Produksi	
		3.27.02.1.03.0003			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				6.337.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Generasi Muda/Milenial yang Mengikuti Pelatihan/Seminar Budidaya Ternak	Orang	30	97.296.000	Pokja Produksi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	4	6.119.750.000	Pokja Produksi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan good farming practice	Orang	40	119.954.000	Pokja Produksi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					23.355.000.000		
						Jumlah pelaku usaha pakan ternak yang produknya sesuai standar kualitas pakan	Unit	3	5.440.365.000	Pokja Pakan	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				5.440.365.000		
						Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	37.590.000	Pokja Pakan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pengujian pakan/bahan pakan	sampel	520	216.000.000	Pokja Pakan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak	Unit	3	5.186.775.000	Pokja Pakan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan	Buah	3	17.914.635.000	Pokja Perbibitan	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				17.914.635.000		
						Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	4	121.012.000	Pokja Perbibitan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan good breeding practice	Orang	40	176.465.000	Pokja Perbibitan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan benih/bibit ternak	Unit	4	17.617.158.000	Pokja Perbibitan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan produksi ternak non ruminansia penghasil telur	%	1	2.213.100.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					2.213.100.000		
						Jumlah produksi ternak non ruminansia petelur yang diedarkan	Ekor	16399	2.213.100.000	Pokja Pembibitan Ternak Nonruminansia	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2.213.100.000		
						Jumlah produksi ternak nonruminansia petelur	Ekor	27331	2.213.100.000	Pokja Pembibitan Ternak Nonruminansia	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	%	1	6.878.612.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					6.878.612.000		
						Jumlah bibit ternak ruminansia pedaging yang ber sklb	Ekor	62	4.986.357.000	Pokja Pembibitan Ternak Ruminansia	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				4.986.357.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	4	2.823.207.000	Pokja Pembibitan Ternak Ruminansia	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah produksi ternak ruminansia potong	Ekor	144	2.163.150.000	Pokja Pembibitan Ternak Ruminansia	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah produksi ternak non ruminansia pedaging yang diedarkan	Ekor	14433	1.892.255.000	Pokja Pembibitan Ternak Nonruminansia	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.892.255.000		
						Jumlah produksi ternak nonruminansia pedaging	Ekor	20618	1.892.255.000	Pokja Pembibitan Ternak Nonruminansia	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia penghasil susu	%	1	960.818.000	Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					960.818.000		
						Jumlah bibit ternak ruminansia perah yang ber sklb	Ekor	4	960.818.000	Pokja Pembibitan Ternak Ruminansia	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				960.818.000		
						Jumlah produksi ternak ruminansia perah	Ekor	11	960.818.000	Pokja Pembibitan Ternak Ruminansia	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peredaran obat Hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	%	81	860.000.000	Bidang Veteriner	
				Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor					860.000.000		
						Jumlah laporan pemeriksaan pengawasan pelaku usaha obat hewan dan produk hewan	Laporan	4	860.000.000	Pokja Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan	
		3.27.02.1.06.0001			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				860.000.000		
						Jumlah pelaku usaha obat hewan dan alsin obat hewan yang diawasi	Unit	5	80.816.000	Pokja Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan keamanan produk hewan	Unit	12	43.810.000	Pokja Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	4	735.374.000	Pokja Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	1	4.436.071.000	Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					4.436.071.000		
						Jumlah produksi semen segar	Liter	15.36	2.912.581.000	Pokja Pemeliharaan Ternak	
		3.27.02.1.04.0001			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2.912.581.000		
						Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	150.450.000	Pokja Pemeliharaan Ternak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah ternak pejantan yang layak diproses semen segarnya	Ekor	20	2.762.131.000	Pokja Pemeliharaan Ternak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase semen beku layak edar	%	80	1.523.490.000	Pokja Produksi dan Distribusi	
		3.27.02.1.04.0004			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.523.490.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	4	47.088.000	Pokja Produksi dan Distribusi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah produksi semen beku	Dosis	407000	1.476.402.000	Pokja Produksi dan Distribusi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						2.400.000.000		
						Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana peternakan	%	5	2.400.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana	
				Penataan Prasarana Pertanian					2.400.000.000		
						Jumlah fasilitasi sarpras peternakan	Unit	10	2.400.000.000	Seksi Prasarana	
		3.27.03.1.01.0009			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2.400.000.000		
						Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya (Lahan dan prasarana peternakan)	Dokumen	4	2.400.000.000	Seksi Prasarana	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						4.637.563.000		
						Persentase Layanan Veteriner	%	100	2.497.563.000	Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A	
				Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					2.497.563.000		
						Jumlah hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Jawa Tengah	Ekor	24950	1.005.933.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Hewan	
		3.27.04.1.03.0003			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1.005.933.000		
						Jumlah laporan pemeriksaan dan pengobatan hewan	Laporan	4	1.005.933.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Hewan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengujian di Laboratorium Veteriner di Jawa Tengah	sampel	44930	1.491.630.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		3.27.04.1.03.0003			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1.491.630.000		
						Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	4	1.491.630.000	Pokja Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	%	1	1.230.000.000	Bidang Veteriner	
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.080.000.000		
						Jumlah laporan Situasi Penyakit Menular Strategis (PHMS)	Laporan	4	1.080.000.000	Pokja Kesehatan Hewan	
		3.27.04.1.01.0007			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.080.000.000		
						Jumlah Ternak/hewan Tersurveilans PHMS	Ekor	2000	256.742.000	Pokja Kesehatan Hewan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	4	823.258.000	Pokja Kesehatan Hewan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi					150.000.000		
						Jumlah Ternak yang diberikan rekomendasi keluar masuk Jawa Tengah	Ekor	2920000	150.000.000	Pokja Kesehatan Hewan	
		3.27.04.1.02.0007			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	4	150.000.000	Pokja Kesehatan Hewan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV	%	30	910.000.000	Bidang Veteriner	
				Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					910.000.000		
						Jumlah unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV	Unit	45	910.000.000	Pokja Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		3.27.04.1.03.0002			Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan				910.000.000		
						jumlah sasaran yang terfasilitasi pembinaan higiene sanitasi	Unit	15	582.020.000	Pokja Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	4	327.980.000	Pokja Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						17.954.274.000		
						Persentase peningkatan fasilitasi kelembagaan dan kemitraan peternak	%	1.25	17.954.274.000	Bidang Kelembagaan	
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					50.000.000		
						Jumlah peternak yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	Orang	30	50.000.000	Pokja Pembiayaan	
		3.27.07.1.02.0002			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				50.000.000		
						jumlah laporan fasilitasi asuransi dan pembiayaan peternakan	Laporan	4	50.000.000	Pokja Pembiayaan	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					17.904.274.000		
						Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok peternak menuju korporasi	Kelompok	2	17.904.274.000	Pokja Kelembagaan	
		3.27.07.1.03.0005			Pendampingan dan pengawalan korporasi petani				17.904.274.000		
						jumlah fasilitasi sarpras penguatan kelembagaan	Unit	2	14.356.149.000	Pokja Kelembagaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah korporasi/kelompok ternak yang mendapat pelatihan manajemen usaha peternakan	Kelompok	2	23.149.000	Pokja Kelembagaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	3	3.474.976.000	Pokja Kelembagaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha produk ternak yang terfasilitasi promosi & akses pasar	Unit	3	50.000.000	Pokja Kelembagaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									569.520.940.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral									48.653.595.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Angka	79.71		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								48.096.095.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Angka	89.2	48.096.095.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						48.096.095.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	%	100	619.465.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					72.012.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	72.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.633.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	5.633.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.875.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	13.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					444.852.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	444.852.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				98.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	98.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				345.352.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	345.352.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.601.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	54.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				31.601.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	31.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	%	100	538.173.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.236.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	74.236.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.732.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.732.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					361.433.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	361.433.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				274.933.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	274.933.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.504.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	54.504.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.111.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	14.111.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32.393.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	32.393.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	%	100	562.349.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					80.386.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	80.386.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.315.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	17.315.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.006.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.006.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.565.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	46.565.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					45.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					351.659.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	351.659.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				59.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	59.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				290.759.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	290.759.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.304.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	37.304.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.304.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	20.304.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				9.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	%	100	930.780.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.808.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	74.808.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.304.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	12.304.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					729.972.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	729.972.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				129.947.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	129.947.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				598.525.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	598.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					78.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target (9)	Rp (000) (10)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	%	100	538.526.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.799.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	77.799.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.009.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	12.009.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.010.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.486.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.486.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.294.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	49.294.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					372.006.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	372.006.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				89.713.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	89.713.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				280.793.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	280.793.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.721.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	40.721.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.686.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	17.686.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.035.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.035.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	%	100	471.644.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.698.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	74.698.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.194.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	13.194.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.600.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					298.792.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	298.792.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				65.548.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	65.548.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				231.744.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	231.744.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					44.554.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	44.554.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.964.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	17.964.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.590.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	11.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	%	100	523.562.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					67.908.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	67.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.404.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	11.404.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					371.654.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	371.654.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				280.154.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	280.154.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	%	100	518.303.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					80.866.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	80.866.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.937.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	16.937.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.425.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	47.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					342.880.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	342.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				251.380.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	251.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.557.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	46.557.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.818.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	16.818.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.739.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	14.739.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	%	100	506.976.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					76.936.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	76.936.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.882.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.882.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				14.550.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	14.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					330.540.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	330.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	82.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				246.240.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	246.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					51.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	6	51.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	%	100	1.004.321.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					75.231.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di Cabdin ESDM Wilayah Solo	%	100	75.231.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.727.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	12.727.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					792.699.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	792.699.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				152.550.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	152.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				638.649.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	638.649.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					88.391.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	10	88.391.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.391.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	40.391.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	41.448.297.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					36.653.286.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	36.653.286.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				36.149.286.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	234	36.149.286.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				294.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	294.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				110.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	110.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				100.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					318.218.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	318.218.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				294.500.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	294.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				23.718.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	23.718.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					99.901.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	99.901.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				45.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				14.901.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	14.901.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					567.269.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	567.269.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				22.418.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	22.418.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.772.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	46.772.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.940.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	16.940.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				46.140.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	46.140.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.438.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	11.438.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.049.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	22.049.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				378.022.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	378.022.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				23.490.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	23.490.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.332.051.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	3.332.051.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				614.246.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	614.246.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13.250.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	13.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.702.055.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.702.055.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					477.572.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	42	477.572.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				202.572.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	202.572.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	433.699.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					65.958.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	65.958.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.004.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.525.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	13.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.004.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.004.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.925.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	22.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					209.953.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	209.953.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.003.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	70.003.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				138.450.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	138.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.788.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	5	109.788.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.745.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	8.745.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.330.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.713.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	70.713.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								557.500.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Angka	3.11	557.500.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						557.500.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	557.500.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					557.500.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	557.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				160.592.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	160.592.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				334.701.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	334.701.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				31.427.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	4	31.427.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				30.780.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	2	30.780.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan									5.344.901.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Intensitas Energi Primer	SBM/Rp	203.21		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Konsumsi Listrik per Kapita	KWh/Kapita	883.94		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Kontribusi PDRB sektor pertambangan	%	2.01		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya penerapan Good Mining Practice (GMP)								1.077.356.000		
						Persentase Penerapan Good Mining Practice (GMP)	%	63.5	1.077.356.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						1.077.356.000		
						Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	95.000.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					95.000.000		
						Persentase realisasi pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	95.000.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	
		3.29.03.1.01.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				95.000.000		
						Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	242	95.000.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	%	72.9	418.787.000		
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					295.333.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	Kabupaten/ Kota	35	295.333.000		
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				295.333.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	5	295.333.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					123.454.000		
						Persentase deviasi harga pasar dengan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	%	9.88	123.454.000		
		3.29.03.1.07.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				123.454.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	1	123.454.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	%	72.9	43.366.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					43.366.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	Kabupaten/Kota	3	43.366.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				9.789.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	6	9.789.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				33.577.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	7	33.577.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	%	72.9	56.484.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					56.484.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2026				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	Kabupaten/Kota	3		56.484.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				14.474.000			
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	10		14.474.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				42.010.000			
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	22		42.010.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	%	72.9		74.163.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					74.163.000			
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	Kabupaten/Kota	4		74.163.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				17.406.000			
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	10		17.406.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
					Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka							

		3.29.03.1.03.0004			Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				56.757.000			
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	28		56.757.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	%	72.9		76.135.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						76.135.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	Kabupaten/Kota	6		76.135.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					21.725.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	15		21.725.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					54.410.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	21		54.410.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	%	72.9		39.878.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						39.878.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2026				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	Kabupaten/Kota	3		39.878.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					9.989.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	7		9.989.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					29.889.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	9		29.889.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	%	72.9		35.768.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						35.768.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	Kabupaten/Kota	2		35.768.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					8.608.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	6		8.608.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				27.160.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	7	27.160.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	%	72.9	40.018.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					40.018.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	Kabupaten/Kota	3	40.018.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				10.799.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	7	10.799.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				29.219.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	10	29.219.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	%	72.9	58.019.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut					58.019.000		

				sampai dengan 12 Mil Laut							
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	Kabupaten/Kota	2		58.019.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					11.915.000	
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	7		11.915.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					46.104.000	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	15		46.104.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	%	72.9		54.450.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						54.450.000	
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	Kabupaten/Kota	4		54.450.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					16.309.000	
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	10		16.309.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut					38.141.000	

					sampai dengan 12 Mil Laut						
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	11	38.141.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	%	72.9	85.288.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					85.288.000		
						Jumlah cakupan wilayah layanan usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	Kabupaten/Kota	5	85.288.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.0003			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				24.866.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	10	24.866.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.03.1.03.0004			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				60.422.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	20	60.422.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
	Meningkatnya porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer								2.135.551.000		
						Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	21.6	2.135.551.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN						2.135.551.000		
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM	972.99	500.631.000		
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					400.631.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah	Orang	990	400.631.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.29.05.1.07.0002			Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				400.631.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan	1	400.631.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral					100.000.000		
						Jumlah Bangunan yang Telah Menerapkan Konservasi Energi	Unit	2	100.000.000		
		3.29.05.1.09.0002			Pelaksanaan kegiatan konservasi energi				100.000.000		
						Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit	3	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	SBM	26.08	47.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					47.520.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria	Orang	8	47.520.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.05.0008			Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				47.520.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	2	47.520.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	SBM	98.93	140.760.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					140.760.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	Orang	150	140.760.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				140.760.000		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	1	140.760.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	SBM	28.97	91.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					91.520.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Merapi	Orang	24	91.520.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.05.0008			Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				91.520.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	2	91.520.000	SEKSI ENERGI	
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang - Demak	SBM	127.91	232.280.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					91.520.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Semarang - Demak	Orang	24	91.520.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.05.0008			Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				91.520.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	2	91.520.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					140.760.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Semarang - Demak	Orang	150	140.760.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				140.760.000		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	1	140.760.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	SBM	57.95	131.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					131.520.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan	Orang	40	131.520.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.05.0008			Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				131.520.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	2	131.520.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	SBM	98.93	140.760.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					140.760.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Serayu Tengah	Orang	150	140.760.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				140.760.000		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	1	140.760.000	SEKSI ENERGI	
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	144.05	261.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					261.520.000		
						Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara	Orang	320	261.520.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				261.520.000		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	2	261.520.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	SBM	165.42	182.760.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					182.760.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Slamet Selatan	Orang	20	182.760.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				182.760.000		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	1	182.760.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	SBM	45.11	120.760.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi					120.760.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Slamet Utara	Orang	20	120.760.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.29.05.1.07.0007			Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				120.760.000		
						Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	1	120.760.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM	179.64	285.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi					285.520.000		
						Jumlah Penerima Manfaat dari Infrastruktur EBT Terbangun di Wilayah Solo	Orang	84	285.520.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.05.0008			Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				285.520.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	7	285.520.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
	Terjaganya ketersediaan daya listrik								2.131.994.000		
						Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1	2.131.994.000		
		3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						2.131.994.000		
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	43.02	600.000.000		
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					600.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Jawa Tengah	%	97.4	600.000.000		
		3.29.06.1.06.0005			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				600.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan	6	600.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Muria	%	43.13	89.682.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					13.520.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Muria	%	100	13.520.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				13.520.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	9	13.520.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					13.412.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.7	13.412.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				13.412.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	7	13.412.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					62.750.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria	%	97.4	62.750.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				61.250.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	50	61.250.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan	%	43.1	141.280.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					7.538.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan	%	100	7.538.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				7.538.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	5	7.538.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					9.742.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.33	9.742.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				9.742.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	7	9.742.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Selatan	%	97.4	124.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	SEKSI ENERGI	
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi	%	43.03	148.168.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					14.554.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi	%	100	14.554.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				14.554.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	10	14.554.000	SEKSI ENERGI	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					9.614.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.12	9.614.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				9.614.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	7	9.614.000	SEKSI ENERGI	
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi	%	97.4	124.000.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	SEKSI ENERGI	
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak	%	42.31	184.307.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					41.859.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang - Demak	%	100	41.859.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				41.859.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	29	41.859.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					17.948.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.04	17.948.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				17.948.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	13	17.948.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.500.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang - Demak	%	97.4	124.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				2.000.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	2.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Selatan	%	43.13	147.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					8.910.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan	%	100	8.910.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				8.910.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	6	8.910.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					14.090.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.7	14.090.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				14.090.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	9	14.090.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan	%	97.4	124.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah	%	43.07	135.977.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					6.479.000		

						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah	%	100	6.479.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				6.479.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	5	6.479.000	SEKSI ENERGI	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					5.498.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	42.81	5.498.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				5.498.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	4	5.498.000	SEKSI ENERGI	
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah	%	97.5	124.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	SEKSI ENERGI	
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Utara	%	43.11	147.578.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					12.028.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara	%	100	12.028.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				12.028.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	9	12.028.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					11.550.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.37	11.550.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				11.550.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	8	11.550.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara	%	97.4	124.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan	%	43.11	158.376.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					17.426.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan	%	100	17.426.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				17.426.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	11	17.426.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					16.950.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.31	16.950.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				16.950.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	11	16.950.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan	%	97.4	124.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Utara	%	43.07	147.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					8.910.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara	%	100	8.910.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				8.910.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	6	8.910.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					14.090.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.29	14.090.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				14.090.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	10	14.090.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					124.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara	%	97.4	124.000.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.500.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				122.500.000		
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	100	122.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo	%	43.11	232.626.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi					22.970.000		
						Persentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan di Wilayah Solo	%	100	22.970.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.01.0002			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				22.970.000		
						Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	6	22.970.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					23.906.000		
						Persentase Ketaatan Pemenuhan Kewajiban Ketenagalistrikan (%)	%	43.17	23.906.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.0002			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				23.906.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	6	23.906.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					185.750.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo	%	97.4	185.750.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				2.000.000		
						Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	2.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.06.1.06.0006			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				183.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	150	183.750.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan									923.631.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
						Indeks Pengelolaan Air Tanah	Angka	360		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya ketersediaan air tanah								923.631.000		
						Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3.67	923.631.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN						923.631.000		
						Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	300.000.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					300.000.000		
						Persentase realisasi pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	300.000.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	
		3.29.02.1.03.0001			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah				300.000.000		
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Dokumen	1100	300.000.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Pengambilan Air Tanah di Jawa Tengah	%	27.58	358.631.000		
				Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					251.266.000		
						Jumlah Cakupan Wilayah Penyediaan Data Geologi Untuk Konservasi Di Jawa Tengah	Kabupaten/ Kota	35	251.266.000		
		3.29.02.1.01.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah				251.266.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	4	251.266.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					107.365.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Jawa Tengah	%	100	107.365.000		
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				107.365.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	4	107.365.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	3.3	17.001.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					17.001.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Muria	%	100	17.001.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				17.001.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	5	17.001.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2.27	15.127.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					15.127.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Selatan	%	100	15.127.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				15.127.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	11	15.127.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2.65	18.746.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					18.746.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Merapi	%	100	18.746.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				18.746.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	11	18.746.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	6.99	52.574.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					52.574.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Semarang Demak	%	100	52.574.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				52.574.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	32	52.574.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1.98	14.408.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					14.408.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Selatan	%	100	14.408.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				14.408.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	8	14.408.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1.49	15.210.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					15.210.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Tengah	%	100	15.210.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				15.210.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	5	15.210.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1.58	41.127.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					41.127.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Utara	%	100	41.127.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				41.127.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	25	41.127.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2.6	19.031.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					19.031.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Selatan	%	100	19.031.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				19.031.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	6	19.031.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	3.95	39.991.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					39.991.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Utara	%	100	39.991.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				39.991.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	22	39.991.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	2.98	31.785.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					31.785.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Solo	%	100	31.785.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.0003			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				31.785.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	11	31.785.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
JUMLAH									54.922.127.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan									53.787.345.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Angka	83.85		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan								53.000.652.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Angka	95.52	53.000.652.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						53.000.652.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	%	100	3.848.955.000	Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					77.880.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	77.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				77.880.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	77.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.960.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	30.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.960.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					197.559.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	197.559.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000 3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000 4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000 5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2026				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	16		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					55.559.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48		55.559.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						233.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4		233.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					233.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4		233.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.773.556.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	2		2.773.556.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					340.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		340.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.433.556.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2		2.433.556.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						536.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	36		536.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					50.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16		25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					440.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3		440.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					21.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11		21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	%	100		2.204.177.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						86.280.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12		86.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					86.280.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2		86.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						35.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				35.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					168.945.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	168.945.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	22.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	35.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.945.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.945.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	40.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					45.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Unit	13	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.608.952.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	2	1.608.952.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				325.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	325.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.283.952.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.283.952.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					260.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	82	260.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				135.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	%	100	1.357.782.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					77.040.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	404	77.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				77.040.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	77.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					325.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	325.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				141.500.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	17	141.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				18.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				112.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	112.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					761.028.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	24	761.028.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				185.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	185.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				576.028.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	576.028.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					184.214.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	40	184.214.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				121.214.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	121.214.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	%	100	2.040.364.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					78.120.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	78.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				78.120.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	78.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					45.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					404.750.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	404.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	21.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				301.820.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	301.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.405.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.025.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	12.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.365.494.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	6	1.365.494.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				307.050.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	307.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.058.444.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1.058.444.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					147.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	33	147.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	41.923.196.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					31.811.706.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	31.811.706.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				30.761.706.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	187	30.761.706.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.000.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				50.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					125.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					615.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	615.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				55.000.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				510.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	287	510.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					855.150.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	855.150.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				133.750.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	133.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				399.400.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	399.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					580.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	23	580.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				580.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	23	580.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.746.740.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	0	6.746.740.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.320.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.320.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.426.740.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5.426.740.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.189.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	0	1.189.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				245.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	245.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				160.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	250	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				25.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				550.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	550.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				189.600.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	75	189.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	%	100	1.626.178.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					76.080.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	76.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				76.080.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	76.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					138.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	138.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				28.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				18.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.280.249.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	3	1.280.249.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				213.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	213.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.066.249.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.066.249.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					111.849.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	77	111.849.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	6	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				34.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.349.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	13.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan								786.693.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Angka	3.07	786.693.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						786.693.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	786.693.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					786.693.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	786.693.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				261.693.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	261.693.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (INF)									33.550.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4.3		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya Sistem Logistik D?aerah								33.550.000.000		
						Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	6.6	33.550.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						33.550.000.000		
						Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau	%	0.52	33.550.000.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi					95.000.000		
						Jumlah gudang distribusi yang dilakukan pantauan stok	Unit	0	95.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.04.1.01.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				95.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	0	95.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					33.455.000.000		
						Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas	Lokasi	0	33.315.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.04.1.02.0002			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				33.315.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	0	33.315.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Pasar Pantauan	Kabupaten/ Kota	0	140.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.04.1.02.0001			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				140.000.000		
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	0	140.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (PE)									10.210.600.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4.3		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan							10.210.600.000		
						PDRB Sektor Perdagangan	Milyar	272562	10.210.600.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						70.000.000		
						Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah	%	9	70.000.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
				Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)					70.000.000		
						Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal	%	4.65	70.000.000	Pokja Ekspor dan Impor	
		3.30.02.1.04.000 1			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				70.000.000		
						Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	107000	70.000.000	Pokja Ekspor dan Impor	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						200.000.000		
						Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan	%	3	200.000.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas					200.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang di fasilitasi	Orang	0	200.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	
		3.30.03.1.01.000 2			Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				200.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	0	200.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						2.150.000.000		
						Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	11.12	2.150.000.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi					2.150.000.000		
						Jumlah Kesepakatan Kerjasama Dagang Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi	Dokumen	3	1.500.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri	
		3.30.05.1.01.000 1			Pameran Dagang Internasional/Nasional				1.000.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	12	1.000.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.30.05.1.01.000 3			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				500.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	30	500.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah ketersediaan informasi Ekspor Jawa Tengah	Dokumen	1	650.000.000	Pokja Informasi dan Analisa Pasar Luar Negeri	
		3.30.05.1.01.000 4			Peningkatan Citra Produk Ekspor				650.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	4	650.000.000	Pokja Informasi dan Analisa Pasar Luar Negeri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						999.054.000		
						Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen	%	1.05	425.000.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					300.000.000		
						Jumlah kasus yang ditangani BPSK	Kasus	12	300.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	
		3.30.06.1.01.0001			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen				300.000.000		
						Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	1	300.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					125.000.000		
						Jumlah Barang Beredar Yang diawasi	Unit	30	125.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	
		3.30.06.1.03.0003			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				125.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	1	125.000.000	Pokja Pengendalian Bapokting, Pengembangan Informasi dan Sarana Perdagangan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	%	5	173.342.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					173.342.000		
						Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi	Dokumen	2695	140.000.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	
		3.30.06.1.02.0004			Pengembangan Layanan Kalibrasi				70.000.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	2537	70.000.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.30.06.1.02.0005			Pengembangan Layanan Pengujian				70.000.000		
						Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Laporan	158	70.000.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaksanaan sertifikasi	Dokumen	5	33.342.000	Pokja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi	
		3.30.06.1.02.0007			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi				33.342.000		
						Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	Sertifikat	5	33.342.000	Pokja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	%	2	400.712.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					400.712.000		
						Jumlah pelaksanaan pengujian dan kalibrasi	Sertifikat	2100	250.712.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	
		3.30.06.1.02.0004			Pengembangan Layanan Kalibrasi				120.000.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	800	120.000.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.30.06.1.02.0005			Pengembangan Layanan Pengujian				130.712.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Laporan	1300	130.712.000	Pokja Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaksanaan sertifikasi	Dokumen	45	150.000.000	Pokja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi	
		3.30.06.1.02.0007			Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi				150.000.000		
						Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	Sertifikat	45	150.000.000	Pokja Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						6.791.546.000		
						Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	10	6.791.546.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri					6.336.546.000		
						Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi	UMKM	0	6.336.546.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		3.30.07.1.01.0002			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				6.336.546.000		
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	UMKM	0	6.336.546.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri					455.000.000		
						Jumlah Fasilitasi kemitraan	Kelompok	0	455.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	
		3.30.07.1.02.0002			Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				455.000.000		
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	0	455.000.000	Pokja Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dalam Negeri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (PE)									10.438.146.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian	%	3.95		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian								10.438.146.000		
						PDRB Sektor Perindustrian	Milyar	675350	10.438.146.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						9.876.146.000		
						Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	%	10	1.830.000.000	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					1.830.000.000		
						Jumlah Sertifikasi Industri	Industri	87	1.830.000.000	Pokja Sarana Prasarana Industri	
		3.31.02.1.01.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1.830.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1.830.000.000	Pokja Sarana Prasarana Industri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4.4	140.000.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					140.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitas, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan	Pelaku Usaha	20	70.000.000	Pokja Pengembangan Kemasan	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				70.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	70.000.000	Pokja Pengembangan Kemasan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	Industri	1	70.000.000	Pokja Industri Kreatif Digital	
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				70.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	70.000.000	Pokja Industri Kreatif Digital	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	5	110.000.000	Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					110.000.000		
						Jumlah pelaku usaha/ binaan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna	Pelaku Usaha	180	70.000.000	Pokja Penerapan dan Rekayasa	
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				70.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	70.000.000	Pokja Penerapan dan Rekayasa	
						Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan	Pelaku Usaha	70	40.000.000	Pokja Pelayanan Jasa Keteknikan	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				40.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	40.000.000	Pokja Pelayanan Jasa Keteknikan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%	2.41	2.428.000.000		
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					2.428.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengembangan Perwilayahan Industri	Kegiatan	2	1.875.000.000		
		3.31.02.1.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1.875.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	2	1.875.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM Industri Yang dilatih dan Jumlah Kegiatan fasilitasi Pengembangan Teknologi Industri	Orang	95	553.000.000		
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				553.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	4	553.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	%	6.23	5.368.146.000		
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					5.368.146.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan fasilitasi pengembangan industri	Industri	256	5.368.146.000		
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				5.368.146.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	6	5.368.146.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						502.000.000		
						Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	6	502.000.000	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi					502.000.000		
						Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	Laporan / Dokumen	6	502.000.000	Pokja Pengawasan dan Pengendalian Industri	
		3.31.03.1.01.0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi				477.000.000		
						-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	6	477.000.000	Pokja Pengawasan dan Pengendalian Industri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.31.03.1.01.0004			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				25.000.000		
						Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Dokumen	10	25.000.000	Pokja Pengawasan dan Pengendalian Industri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						60.000.000		
						Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	10	60.000.000	Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri	
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah penambahan Industri dalam SIINAS	Unit	1200	60.000.000	Pokja Data dan Informasi Industri	
		3.31.04.1.01.0001			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	2	30.000.000	Pokja Data dan Informasi Industri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.31.04.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	2	30.000.000	Pokja Data dan Informasi Industri	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (TPT)									885.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian	%	3.95		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki								885.000.000		
						Persentase pe?ningkatan jumlah tenaga kerja industri teksil dan alas kaki	%	0.32	885.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						885.000.000		
						Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	86	885.000.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					885.000.000		
						Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki	Orang	100	314.500.000	Pokja Pengembangan Produk Alas Kaki	
		3.31.02.1.01.0005			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				314.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	314.500.000	Pokja Pengembangan Produk Alas Kaki	
						Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil	Orang	200	570.500.000	Pokja Pengembangan Produk Tekstil	
		3.31.02.1.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				570.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	570.500.000	Pokja Pengembangan Produk Tekstil	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									108.871.091.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah									427.000.853.000		
						Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	66.4			
	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil								427.000.853.000		
						Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Angka	29.5	3.191.539.000		
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						1.410.458.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	71.42	120.398.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					120.398.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	2	120.398.000		
		4.01.02.1.02.000 1			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				120.398.000		
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	Dokumen	4	120.398.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	91.43	144.920.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					144.920.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	144.920.000		
		4.01.02.1.01.000 2			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				144.920.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	144.920.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat	%	71.43	214.847.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					214.847.000		
						Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	2	214.847.000		
		4.01.02.1.02.000 2			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				214.847.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	2	120.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit kerja yang difasilitasi pembangunan zona integritasnya	Unit Kerja	15	94.847.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	93	217.896.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					217.896.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	2	217.896.000		
		4.01.02.1.02.000 4			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				217.896.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	4	217.896.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif	%	92	164.094.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					164.094.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	1	164.094.000		
		4.01.02.1.01.000			Penataan Analisis Jabatan				164.094.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	4	164.094.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	%	59.52	145.202.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					145.202.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	2	145.202.000		
		4.01.02.1.02.0001			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				145.202.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4	145.202.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi	%	71	199.101.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					199.101.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	2	199.101.000		
		4.01.02.1.01.0001			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				199.101.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Dokumen	2	189.071.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan fasilitasi penilaian tingkat kematangan organisasi	Laporan	0	10.030.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas	%	39.21	204.000.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					204.000.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	2	204.000.000		
		4.01.02.1.02.0005			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				204.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	4	204.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						1.781.081.000		
						Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	85	475.139.000		
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					475.139.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	4	475.139.000		
		4.01.07.1.02.0001			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				130.282.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	4	130.282.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0002			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				300.374.000		
						Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	300.374.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.0003			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				44.483.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	44.483.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	92	839.176.000		
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					839.176.000		
						Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	4	549.326.000		
		4.01.07.1.01.0002			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				312.326.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	312.326.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		4.01.07.1.01.0003			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				237.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	157.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal	Laporan	4	80.000.000		
						Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif	%	75	289.850.000		
		4.01.07.1.01.0001			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				289.850.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	149.897.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah Laporan Penyusunan SHB	Laporan	2	139.953.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	%	83	466.766.000		
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					466.766.000		
						Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	4	466.766.000		
		4.01.07.1.03.0001			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				130.063.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	8	130.063.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.0002			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				86.703.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	86.703.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.0003			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				250.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Angka	44	6.395.000.000		
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						4.640.000.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral	%	85	206.218.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					206.218.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan Energi Sumber Daya Mineral	Dokumen	2	206.218.000		
		4.01.06.1.02.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				206.218.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	4	206.218.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup	%	85	175.870.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					175.870.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	175.870.000		
		4.01.06.1.02.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				175.870.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	4	175.870.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	85	600.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					600.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	4	600.000.000		
		4.01.06.1.01.0002			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				600.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	4	400.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	4	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	%	87	1.462.912.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					1.462.912.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	2	106.133.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				106.133.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	4	106.133.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan	Dokumen	2	125.000.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				125.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pangan	Dokumen	4	125.000.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Dokumen	2	1.231.779.000		
		4.01.06.1.02.0001			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1.231.779.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	4	231.779.000		
						Jumlah Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	Laporan	2	1.000.000.000		
						Persentase nilai kemandirian BLUD	%	55	355.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					355.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Dokumen	2	180.000.000		
		4.01.06.1.03.0004			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				180.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	2	180.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Dokumen	2	175.000.000		
		4.01.06.1.03.0005			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				175.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen	2	175.000.000		
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	80	215.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					215.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	4	215.000.000		
		4.01.06.1.01.0001			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				215.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	4	215.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	%	2.3	750.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					750.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan	Dokumen	4	750.000.000		
		4.01.06.1.03.0002			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				750.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2026				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan BUMD Non Keuangan	Dokumen	4		400.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	4		350.000.000		
						Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	%	1.95		875.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						875.000.000		
						Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	4		875.000.000		
		4.01.06.1.03.0001			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha					875.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	4		400.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	4		475.000.000		
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							1.755.000.000		
						Persentase realisasi bantuan keuangan	%	86		740.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						740.000.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Dokumen	4		740.000.000		
		4.01.08.1.01.0003			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah					740.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	4		370.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II	Laporan	4		370.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	%	90		625.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						625.000.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Dokumen	4		625.000.000		
		4.01.08.1.01.0001			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD					575.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang infrastruktur yang bersumber dari APBD	Laporan	12		75.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia yang bersumber dari APBD	Laporan	12		225.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang bersumber dari APBD	Laporan	12		125.000.000		
						Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan bidang PU dan Perhubungan	Laporan	4		150.000.000		
		4.01.08.1.01.0002			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN					50.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	4		50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan	%	100	195.000.000		
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					195.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	1	195.000.000		
		4.01.08.1.02.0002			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				95.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	4	95.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.08.1.02.0003			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	%	86.5	195.000.000		
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					195.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	4	195.000.000		
		4.01.08.1.02.0001			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				195.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	4	195.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Angka	37	417.414.314.000		
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						2.919.557.000		
						Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	%	100	1.686.294.000		
				Fasilitasi Kerja Sama Daerah					1.686.294.000		
						Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	100	1.214.294.000		
		4.01.03.1.03.0001			Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah				1.214.294.000		
						Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	8	524.294.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri	Dokumen	4	690.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	100	347.000.000		
		4.01.03.1.03.0002			Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta				347.000.000		
						Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	4	75.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri	Dokumen	4	272.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama daerah	%	95	125.000.000		
		4.01.03.1.03.0003			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				125.000.000		
						Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi	Laporan	4	40.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	4	60.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	%	100	25.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	100	675.000.000		
				Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					675.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	8	675.000.000		
		4.01.03.1.01.0001			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				480.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	4	480.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		4.01.03.1.01.0002			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				90.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	4	90.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.03.1.01.0003			Fasilitasi Penataan Wilayah				105.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	4	105.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	100	558.263.000		
				Pelaksanaan Otonomi Daerah					558.263.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	3	80.000.000		
		4.01.03.1.02.0002			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				80.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	4	80.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	100	100.000.000		
		4.01.03.1.02.0001			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	7	100.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	378.263.000		
		4.01.03.1.02.0003			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				378.263.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	37	378.263.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						411.638.757.000		
						Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	%	85	600.000.000		
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar					600.000.000		
						Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar	Dokumen	4	600.000.000		
		4.01.04.1.02.0001			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	4	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.04.1.02.0002			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	4	160.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	4	40.000.000		
		4.01.04.1.02.0003			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	4	157.043.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi	Dokumen	4	42.957.000		
						Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	%	85	650.000.000		
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					650.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar	Dokumen	4	650.000.000		
		4.01.04.1.03.0001			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	4	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.04.1.03.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				450.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	4	200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	Dokumen	4	250.000.000		
						Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	63	410.388.757.000		
				Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual					410.388.757.000		
						Persentase pelaksanaan pelayanan keagamaan	%	100	3.061.700.000		
		4.01.04.1.01.0002			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				3.061.700.000		
						Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Dokumen	1	1.206.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	4	1.855.700.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	85	407.327.057.000		
		4.01.04.1.01.0001			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				407.327.057.000		
						Jumlah dokumen laporan pelaksanaan hibah keagamaan	Dokumen	2	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	2500	407.077.057.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						2.856.000.000		
						Capaian Pemberian Bantuan Hukum	%	100	1.321.326.000		
				Fasilitasi Bantuan Hukum					1.321.326.000		
						Persentase bantuan hukum yang tertangani	%	100	1.321.326.000		
		4.01.05.1.02.0001			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				1.321.326.000		
						Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	12	301.326.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pemberian Bantuan Hukum	Kasus	340	1.020.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks Reformasi Hukum	Angka	92	866.821.000		
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					866.821.000		
						Persentase Hasil Anev Peraturan Perundang-Undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	%	30	169.967.000		
		4.01.05.1.01.0003			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				169.967.000		
						Jumlah Produk Hukum yang dilakukan Analisis dan Evaluasi	Dokumen	13	169.967.000		OPD Provinsi
						Persentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	%	91	175.530.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.01.05.1.01.0003			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				175.530.000		
						Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	350	175.530.000		OPD Provinsi
						Persentase rancangan Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan	%	91	64.361.000		
		4.01.05.1.01.0002			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				64.361.000		
						Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	250	64.361.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan	%	89.5	456.963.000		
		4.01.05.1.01.0001			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				456.963.000		
						Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	40	456.963.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Angka	86	151.540.000		
				Fasilitasi Bantuan Hukum					151.540.000		
						Persentase Fasilitasi HAM Daerah	%	100	58.199.000		
		4.01.05.1.02.0002			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				58.199.000		
						Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Daerah	Laporan	4	58.199.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase masalah hukum non litigasi yang tertangani	%	85	93.341.000		
		4.01.05.1.02.0002			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				93.341.000		
						Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	20	93.341.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	%	96	516.313.000		
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					516.313.000		
						Persentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji	%	96	516.313.000		
		4.01.05.1.01.0004			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				516.313.000		
						Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	125	162.480.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Wilayah II	Dokumen	130	179.093.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Wilayah III	Dokumen	130	174.740.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Daerah									275.716.004.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah								275.546.004.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Angka	83	275.546.004.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						275.546.004.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	228.284.149.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					103.175.104.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	103.175.104.000		
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100.550.104.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	100.550.104.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	2.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				475.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	475.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				150.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.250.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	1.250.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				750.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	750.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				500.000.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					50.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	50.000.000		
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				50.000.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					14.325.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	14.325.000.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				550.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	550.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				700.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	700.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				600.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	600.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				175.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	175.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				300.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.000.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	9.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.000.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					28.004.338.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Paket	2	28.004.338.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				700.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	700.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.304.338.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	27.304.338.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.468.016.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Laporan	12	39.468.016.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.000.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	8.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.200.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				30.268.016.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	29.218.516.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Laporan	12	299.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Laporan	2	750.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.100.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	833	15.100.000.000		
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				400.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.000.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	182	4.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				100.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.000.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	300	2.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.000.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	17	8.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				600.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	300	600.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					26.911.691.000		
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	26.911.691.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.11.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.743.094.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	2.743.094.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.0004			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24.168.597.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	24.168.597.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	204.272.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					204.272.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	204.272.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	180.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				24.272.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	24.272.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	%	100	421.074.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					421.074.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	%	100	421.074.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				386.283.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Laporan	12	240.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	146.283.000		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				34.791.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	12	10.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	24.791.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	%	100	631.018.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					380.622.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	%	100	380.622.000		
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				380.622.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1000	380.622.000		OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					250.396.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	%	100	250.396.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				213.686.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	213.686.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				36.710.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	36.710.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	511.956.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					511.956.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	%	100	511.956.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	200.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	250.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				61.956.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	12	8.956.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	53.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	10.535.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					150.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	150.000.000		
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	40.000.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	40.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					460.000.000		
						Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	460.000.000		
		X.XX.01.1.11.0002			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				400.000.000		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	8	400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.0003			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				60.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	60.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					9.385.000.000		
						Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	%	100	9.385.000.000		
		X.XX.01.1.12.0001			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				4.000.000.000		
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	4.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0002			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				3.200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	3.200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.0003			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				2.185.000.000		
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	1.885.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Paket Kebutuhan Staf Ahli Gubernur Disediakan	Paket	12	300.000.000		OPD Provinsi
				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					500.000.000		
						Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	500.000.000		
		X.XX.01.1.13.0001			Penyiapan Materi Pimpinan				500.000.000		
						Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	12	500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	32.173.932.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					238.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	%	100	238.000.000		
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				68.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	68.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				170.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	170.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					28.564.057.000		
						Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol	Laporan	12	28.564.057.000		
		X.XX.01.1.13.0002			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				24.071.431.000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	24.071.431.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13.0003			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				4.492.626.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	12	4.492.626.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Keprotokolan					3.371.875.000		
						Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Laporan	1	3.371.875.000		
		X.XX.01.1.14.0001			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				3.001.846.000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	12	3.001.846.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0002			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				300.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	12	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.0003			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				70.029.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	1	70.029.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	1.630.155.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.630.155.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	1.630.155.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				565.120.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	565.120.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.065.035.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	1.065.035.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	590.064.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					135.678.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	%	100	135.678.000		
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				80.682.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	80.682.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				54.996.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	54.996.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					454.386.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	454.386.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				395.969.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	Laporan	12	207.193.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	188.776.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				58.417.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	Dokumen	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	38.417.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	%	100	346.500.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					346.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	346.500.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				331.281.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	331.281.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.219.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	15.219.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	217.884.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					217.884.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	%	100	217.884.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				202.884.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	202.884.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	15.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Daerah								170.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Angka	3	170.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						170.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah	%	100	170.000.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					170.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	170.000.000		
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				70.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	70.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									702.716.857.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat DPRD									231.064.554.000	Sekretariat DPRD	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	Angka	72.1		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat DPRD								62.544.937.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	Angka	90.75	62.544.937.000	Sekretariat DPRD	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						62.544.937.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat DPRD	%	100	62.544.937.000	Bagian Umum	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.330.474.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	14	1.330.474.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.330.474.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	14	1.330.474.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					586.602.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	586.602.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	150.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				436.602.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	436.602.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					8.019.369.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	8.019.369.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				244.485.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	244.485.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				187.269.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	187.269.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				136.750.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	136.750.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.500.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	6.500.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				780.453.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	780.453.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				170.412.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	170.412.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.309.086.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	279	10.309.086.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4.002.240.000		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	8	4.002.240.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				2.048.833.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	25	2.048.833.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.443.188.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	114	1.443.188.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.814.825.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	132	2.814.825.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					28.904.952.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	48	28.904.952.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				179.542.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	179.542.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.474.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4.474.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.047.586.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.047.586.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				23.203.824.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	23.203.824.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					11.435.453.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	495	11.435.453.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				596.253.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	596.253.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.865.858.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	77	2.865.858.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				86.425.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	335	86.425.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.191.084.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	5.191.084.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.695.833.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	70	2.695.833.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					1.959.001.000		
						Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar	%	100	1.959.001.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		X.XX.01.1.15.0002			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.392.880.000		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	4	1.392.880.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.15.0003			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				566.121.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	120	566.121.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat DPRD								168.519.617.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	Angka	2.75	168.519.617.000	Sekretariat DPRD	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						168.519.617.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat DPRD	%	100	168.519.617.000	BAGIAN KEUANGAN	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					827.739.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	827.739.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				526.015.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	526.015.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				251.724.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	251.724.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	25.000.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.578.455.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	24	19.578.455.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.570.007.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	116	18.570.007.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.008.448.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	1.008.448.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					148.113.423.000		
						Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar	%	100	148.113.423.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		X.XX.01.1.15.0001			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				148.113.423.000		
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	120	148.113.423.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Pelayanan Kedewanan									336.517.695.000	Sekretariat DPRD	
						Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	92		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang tersedia								234.499.088.000		
						Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	Angka	77	234.499.088.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						234.499.088.000		
						Nilai survei kepuasan layanan kehumasan	Angka	75	234.499.088.000	Bagian Hubungan Masyarakat	
				Peningkatan Kapasitas DPRD					132.659.088.000		
						Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas rencana kerja DPRD dan layanan kehumasan	Angka	4	132.659.088.000	Pokja Publikasi	
		4.02.02.1.04.000 4			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				1.939.086.000		
						Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	42	1.939.086.000	Pokja Publikasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.04.000 5			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				418.741.000		
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	8	418.741.000	Pokja Publikasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.04.000 6			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12.781.261.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	6	12.781.261.000	Pokja Publikasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.04.000 7			Penyusunan Program Kerja DPRD				117.520.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	7	117.520.000.000	Pokja Publikasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembahasan Kerja Sama Daerah					101.840.000.000		
						Jumlah publikasi melalui berbagai media	Angka	4	101.840.000.000	Pokja Publikasi	
		4.02.02.1.07.000 2			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				101.840.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	12	101.840.000.000	Pokja Publikasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terwujudnya Hubungan Sekretariat DPRD dengan DPRD Yang baik								102.018.607.000		
						Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	Angka	77	102.018.607.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						102.018.607.000		
						Nilai survei kepuasan layanan persidangan	Angka	75	102.018.607.000	Bagian Persidangan	
				Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					7.206.440.000		
						Jumlah Fasilitasi penyusunan RAPERDA	Angka	22	7.206.440.000	Pokja Rapat dan Risalah	
		4.02.02.1.01.000 1			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				4.262.440.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	22	4.262.440.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.01.000 6			Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				2.944.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang	600	2.944.000.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembahasan Kebijakan Anggaran					2.210.534.000		
						Jumlah Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	Angka	2	2.210.534.000	Pokja Rapat dan Risalah	
		4.02.02.1.02.0003			Pembahasan APBD				2.210.534.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	2	2.210.534.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					12.515.582.000		
						Jumlah fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Angka	3	12.515.582.000	Pokja Rapat dan Risalah	
		4.02.02.1.03.0001			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1.850.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	17	1.850.000.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.03.0002			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1.850.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	17	1.850.000.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.03.0003			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1.850.000.000		
						Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	17	1.850.000.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.03.0004			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1.850.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	17	1.850.000.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.03.0005			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1.850.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	17	1.850.000.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.03.0006			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1.169.722.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1.169.722.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.03.0007			Pengawasan Penggunaan Anggaran				2.095.860.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	21	2.095.860.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Peningkatan Kapasitas DPRD					4.380.000.000		
						Jumlah DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pendalaman tugas	Orang	120	4.380.000.000	Pokja Rapat dan Risalah	
		4.02.02.1.04.0002			Pendalaman Tugas DPRD				4.380.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	4.380.000.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					50.243.046.000		
						Jumlah Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Angka	5	50.243.046.000	Pokja Rapat dan Risalah	
		4.02.02.1.05.0001			Kunjungan Kerja dalam Daerah				11.461.502.000		
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	11.461.502.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.05.0002			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				175.000.000		
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	175.000.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.02.02.1.05.0003			Pelaksanaan Reses				38.606.544.000		
						Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	24	38.606.544.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					1.152.000.000		
						Jumlah fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Angka	45	1.152.000.000	Pokja Rapat dan Risalah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.02.02.1.06.0001			Penyusunan Kode Etik DPRD				1.152.000.000		
						Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	45	1.152.000.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Tugas DPRD					24.311.005.000		
						Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	Angka	30	24.311.005.000	Pokja Rapat dan Risalah	
		4.02.02.1.08.0001			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				24.311.005.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	30	24.311.005.000	Pokja Rapat dan Risalah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									567.582.249.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah									10.085.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	Angka	94.19		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah								4.700.000.000		
						Skor Aspek Sinergi dalam IPPN	Angka	27.75	4.700.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						1.100.000.000		
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	80.31	1.100.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					1.100.000.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Yang Selaras Dengan Nasional	Kabupaten/ Kota	27	1.100.000.000	POKJA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.03.0004			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				1.100.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	70	1.100.000.000	POKJA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						3.600.000.000		
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	83.84	1.155.000.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					1.155.000.000		
						Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur	Angka	83.44	490.000.000	Pokja Infrastruktur	
		5.01.03.1.03.0001			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				490.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	490.000.000	Pokja Infrastruktur	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Kewilayahan	Angka	84.25	665.000.000	Pokja Kewilayahan	
		5.01.03.1.03.0005			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				665.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	665.000.000	Pokja Kewilayahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	80.49	1.315.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					1.315.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Manusia	Angka	82.42	710.000.000	Pokja Pembangunan Manusia	
		5.01.03.1.01.0005			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				710.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	710.000.000	Pokja Pembangunan Manusia	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan	Angka	78.56	605.000.000	Pokja Pemerintahan	
		5.01.03.1.01.0001			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				605.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	605.000.000	Pokja Pemerintahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	76.59	1.130.000.000	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					1.130.000.000		
						Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang Perekonomian	Angka	75.47	655.000.000	Pokja Perekonomian	
		5.01.03.1.02.0001			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				655.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	655.000.000	Pokja Perekonomian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Tingkat keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Bidang SDA	Angka	77.7	475.000.000	Pokja Sumber Daya Alam	
		5.01.03.1.02.0005			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				475.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	475.000.000	Pokja Sumber Daya Alam	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah								1.885.000.000		
						Skor Aspek Kualitas Perencanaan dalam IPPN	Angka	56.44	1.885.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						830.000.000		
						Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	%	87.29	830.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					180.000.000		
						Jumlah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Perencanaan Berbasis Risiko	Urusan	37	180.000.000	POKJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.01.0002			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				180.000.000		
						Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	180.000.000	POKJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					450.000.000		
						Jumlah urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perumusan masalah berbasis Data	Urusan	37	450.000.000	POKJA ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.02.0001			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				350.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	350.000.000	POKJA ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.01.02.1.02.0004			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi				100.000.000		
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	100.000.000	POKJA ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					200.000.000		
						Jumlah urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perumusan masalah berbasis hasil evaluasi	Urusan	37	200.000.000	POKJA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.03.0003			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				200.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	200.000.000	POKJA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						1.055.000.000		
						Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	87.03	385.000.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					385.000.000		
						Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Infrastruktur Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko	%	87.06	150.000.000	Pokja Infrastruktur	
		5.01.03.1.03.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				150.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	150.000.000	Pokja Infrastruktur	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kewilayahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko	%	87.01	235.000.000	Pokja Kewilayahan	
		5.01.03.1.03.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				235.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	235.000.000	Pokja Kewilayahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	89.08	220.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					220.000.000		
						Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko	%	89.2	120.000.000	Pokja Pembangunan Manusia	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.01.03.1.01.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				120.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	120.000.000	Pokja Pembangunan Manusia	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko	%	88.97	100.000.000	Pokja Pemerintahan	
		5.01.03.1.01.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				100.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	100.000.000	Pokja Pemerintahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	85.76	450.000.000	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					450.000.000		
						Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko	%	85.79	300.000.000	Pokja Perekonomian	
		5.01.03.1.02.0003			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				300.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	300.000.000	Pokja Perekonomian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang SDA Berbasis Data, Hasil Evaluasi dan Risiko	%	85.73	150.000.000	Pokja Sumber Daya Alam	
		5.01.03.1.02.0007			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				150.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1	150.000.000	Pokja Sumber Daya Alam	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Daerah								3.500.000.000		
						Skor Aspek Keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja	Angka	10	3.500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						2.920.000.000		
						Persentase Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah Dengan Kinerja Daerah	%	98.74	2.920.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					2.920.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun penjenjangan kinerja selaras dengan kinerja daerah	OPD	43	2.920.000.000	POKJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.01.0006			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi				2.920.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	2.920.000.000	POKJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						580.000.000		
						Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	99.29	100.000.000	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					100.000.000		
						Persentase Capaian Kinerja Bidang Infrastruktur yang selaras dengan kinerja daerah	%	99.73	50.000.000	Pokja Infrastruktur	
		5.01.03.1.03.0002			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				50.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	50.000.000	Pokja Infrastruktur	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Capaian Kinerja Bidang Kewilayahan yang selaras dengan kinerja daerah	%	98.75	50.000.000	Pokja Kewilayahan	
		5.01.03.1.03.0006			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				50.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	50.000.000	Pokja Kewilayahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	99.07	380.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					380.000.000		
						Persentase Capaian Kinerja Bidang Pembangunan Manusia yang selaras dengan kinerja daerah	%	99.34	330.000.000	Pokja Pembangunan Manusia	
		5.01.03.1.01.0006			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				330.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	330.000.000	Pokja Pembangunan Manusia	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan yang selaras dengan kinerja daerah	%	98.8	50.000.000	Pokja Pemerintahan	
		5.01.03.1.01.0002			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				50.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2	50.000.000	Pokja Pemerintahan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	97.84	100.000.000	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					100.000.000		
						Persentase Capaian Kinerja Bidang Perekonomian yang selaras dengan kinerja daerah	%	97.9	50.000.000	Pokja Perekonomian	
		5.01.03.1.02.0002			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				50.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	50.000.000	Pokja Perekonomian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target (9)	Rp (000) (10)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Capaian Kinerja Bidang SDA yang selaras dengan kinerja daerah	%	97.74	50.000.000	Pokja Sumber Daya Alam	
		5.01.03.1.02.0006			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				50.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1	50.000.000	Pokja Sumber Daya Alam	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									30.989.576.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	82.5		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								30.494.576.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	94.25	30.494.576.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						30.494.576.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	30.494.576.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					21.008.081.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	21.008.081.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.391.201.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	118	20.391.201.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				341.880.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	341.880.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				75.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	75.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				50.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					237.001.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	237.001.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				190.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				47.001.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	47.001.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					334.174.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	334.174.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				138.729.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	138.729.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				195.445.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35	195.445.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.047.492.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.047.492.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				70.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				155.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	155.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				850.001.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	850.001.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				61.480.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	61.480.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				510.511.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	510.511.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					720.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	4	720.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				180.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				440.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	440.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.165.478.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	4.165.478.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.050.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.050.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.115.478.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.115.478.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.982.350.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	57	1.982.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				720.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	39	720.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				30.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				338.350.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	338.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				34.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	34.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				110.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								495.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	3.1	495.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						495.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	495.000.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					495.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	495.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				240.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	240.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									41.074.576.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Badan Pengelola Pendapatan Daerah									230.746.052.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Angka	80.21		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Badan Pengelola Pendapatan Daerah								230.371.295.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Angka	80	230.371.295.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						230.371.295.000		
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen	%	95	1.350.567.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					111.676.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	111.676.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.157.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.157.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.764.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	17.764.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.864.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	9.864.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.120.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.000			Penyediaan Bahan/Material				32.017.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	32.017.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.923.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	8.923.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.831.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	32.831.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					913.265.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Unit	4	913.265.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.281.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.714.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	250.714.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				660.270.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	660.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					275.126.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	275.126.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				129.700.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	129.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				2.960.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	2.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.366.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	50.366.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				68.850.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	68.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.250.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	%	95	173.322.892.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					140.259.511.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	140.259.511.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				139.514.175.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	605	139.514.175.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				634.767.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	634.767.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				110.569.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	110.569.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					372.400.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	372.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				372.400.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	372.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					234.144.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	234.144.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				184.144.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	184.144.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					7.328.052.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	7.328.052.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				85.067.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	85.067.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				341.623.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	341.623.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.559.810.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.559.810.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				39.821.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	39.821.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				545.814.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	545.814.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				719.917.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	719.917.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.606.387.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	3.606.387.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				500.000.000		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.106.387.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3.106.387.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					19.493.006.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	19.493.006.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	6.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.116.126.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	2.116.126.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.707.654.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	2.707.654.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				14.662.826.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	14.662.826.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.029.392.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	2.029.392.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				526.062.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	526.062.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				768.640.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	768.640.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				63.548.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	63.548.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				671.142.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	671.142.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara	%	95	1.349.213.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	9.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9.800.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	9.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					154.423.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	154.423.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.125.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.125.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				37.393.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	37.393.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.580.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				35.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.200.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56.625.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	56.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					833.690.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	833.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				157.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	157.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				670.590.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	670.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					308.800.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	308.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16.750.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	16.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				154.550.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	154.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	30.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang	%	95	1.369.277.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13.500.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					135.717.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	135.717.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.439.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.439.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				23.119.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	23.119.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.352.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.352.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				47.169.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	47.169.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.910.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.728.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	39.728.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					917.058.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	917.058.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				204.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	204.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				712.058.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	712.058.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					260.502.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	260.502.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				55.536.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	55.536.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				131.823.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	131.823.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.043.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	27.043.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.600.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	23.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora	%	95	1.664.910.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.550.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	145.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				36.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.800.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				23.710.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.550.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.490.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	50.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.193.935.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.193.935.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.820.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				223.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	223.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				965.415.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	965.415.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					272.925.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	272.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				14.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				104.225.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	104.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.200.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	36.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali	%	95	1.493.881.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					44.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	44.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				44.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	44.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					126.416.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	126.416.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.030.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.166.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	21.166.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.400.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	14.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				21.572.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	21.572.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.620.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	13.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51.628.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	51.628.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.001.125.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.001.125.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.700.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				177.305.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	177.305.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				822.120.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	822.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					322.340.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	322.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.650.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	35.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				184.016.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	184.016.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				1.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.449.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	29.449.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				45.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.225.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes	%	95	2.086.024.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					180.809.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	180.809.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.882.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.882.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.838.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.838.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.320.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	8.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.500.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				50.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu				10.660.000		
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	10.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				81.609.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	81.609.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.553.281.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.553.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.921.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.921.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				381.990.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	381.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.169.370.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.169.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					299.434.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	299.434.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.330.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	17.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	120.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.005.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	44.005.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.589.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	71.589.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.110.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	34.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap	%	95	1.974.787.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					14.600.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	14.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				14.600.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	14.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					184.719.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	184.719.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.084.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.084.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.794.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.794.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.436.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.436.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				50.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.226.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	10.226.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.179.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	71.179.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.302.760.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.302.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				296.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	296.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.460.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	2.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.002.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.002.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					430.208.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	430.208.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				37.952.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	37.952.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				217.056.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	217.056.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.950.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	40.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				87.500.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	87.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.750.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	24.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak	%	95	1.349.132.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					155.147.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	155.147.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.764.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.764.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.890.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	40.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.160.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	11.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.800.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				34.412.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	34.412.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	8.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53.011.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	53.011.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					865.858.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	865.858.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.150.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	162.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				700.908.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	700.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					280.627.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	280.627.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.375.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	27.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				133.346.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	133.346.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.606.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	34.606.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				52.500.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	52.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.800.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	22.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara	%	95	1.515.708.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.200.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.200.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					112.607.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	112.607.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.365.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.365.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.132.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	20.132.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				18.240.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	18.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.260.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	8.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48.610.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	48.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.049.505.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.049.505.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.530.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.530.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				311.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	311.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				736.975.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	736.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					311.396.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	311.396.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.788.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	15.788.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				156.073.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	156.073.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.228.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	47.228.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.107.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	35.107.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.200.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen	%	95	1.344.862.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					161.890.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	161.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.163.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.163.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.380.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	45.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.794.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.794.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				44.118.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	44.118.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.900.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	9.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.535.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	50.535.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					843.518.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	843.518.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				650.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	186.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.640.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				654.828.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	654.828.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					271.954.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	271.954.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.854.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	22.854.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				123.950.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	123.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.400.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	46.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				43.500.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	43.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.250.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar	%	95	1.474.579.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.360.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	43.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.360.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	43.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					152.342.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	152.342.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.277.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.277.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.484.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	32.484.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.760.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				31.821.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	31.821.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.750.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	9.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.250.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	67.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.013.729.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.013.729.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				189.705.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	189.705.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				823.524.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	823.524.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					265.148.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	265.148.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				134.800.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	134.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				11.250.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	11.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.929.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	32.929.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				53.143.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	53.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.026.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	26.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal	%	95	1.332.485.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.514.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.514.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.514.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.514.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					121.446.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	121.446.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.677.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.677.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.076.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	21.076.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.660.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				840.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				32.787.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	32.787.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.990.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	13.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.416.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	41.416.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					905.777.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	905.777.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.377.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.377.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				234.569.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	234.569.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				669.831.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	669.831.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					262.748.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	262.748.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.285.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	27.285.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				92.105.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	92.105.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.787.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	35.787.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				65.778.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	65.778.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				31.793.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	31.793.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten	%	95	2.313.640.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.131.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	162.131.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.150.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.060.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	6.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.026.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				55.154.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	55.154.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu				21.131.000		
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	21.131.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.610.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	67.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.775.957.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.775.957.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				960.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				353.159.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	353.159.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.421.838.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.421.838.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					323.052.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	323.052.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				19.701.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	19.701.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				153.950.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	153.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.491.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	48.491.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.300.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				61.020.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	61.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				28.590.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	28.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus	%	95	1.438.657.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.700.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.700.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	6.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.166.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	162.166.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.950.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	9.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				44.950.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	44.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.884.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46.982.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	46.982.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.400.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					901.029.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	901.029.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.281.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	202.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.230.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	1.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				696.318.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	696.318.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					326.262.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	326.262.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.226.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	22.226.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				134.200.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	134.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.110.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	49.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				22.500.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.226.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40.226.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang	%	95	1.015.425.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					133.650.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	133.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.204.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.204.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.250.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	15.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.660.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	8.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				825.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				41.496.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	41.496.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.575.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	16.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.640.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	45.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					681.576.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	681.576.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.280.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.740.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	162.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				517.556.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	517.556.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					151.699.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	151.699.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.511.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	20.511.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				72.820.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	72.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.968.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	18.968.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.350.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	13.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.050.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	6.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid	%	95	1.624.624.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.250.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.250.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	8.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					150.559.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	150.559.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.764.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.764.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.590.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	34.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.600.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				29.821.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	29.821.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.463.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	14.463.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.571.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	52.571.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.114.850.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.114.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.562.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				204.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	204.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				820.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				906.868.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	906.868.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					308.465.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	308.465.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.080.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	18.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				135.793.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	135.793.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.229.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	35.229.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.100.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				62.360.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	62.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.903.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	45.903.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati	%	95	1.513.868.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.456.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.456.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.456.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.456.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.307.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	162.307.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.986.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	45.986.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.223.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.223.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				500.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				20.038.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	20.038.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				18.950.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	18.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.610.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	67.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.012.615.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.012.615.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				980.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				272.160.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	272.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				739.475.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	739.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					276.490.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	276.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				147.750.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	147.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				58.690.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	58.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32.810.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	32.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.240.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan	%	95	1.363.328.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.880.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	9.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9.880.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	9.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					133.759.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	133.759.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.731.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.731.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.045.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	19.045.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.275.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				950.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				45.320.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	45.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.850.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	2.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53.338.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	53.338.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.250.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	1.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					912.564.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	912.564.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				640.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				205.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	205.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.230.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				705.494.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	705.494.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					264.625.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	264.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.541.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	18.541.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				117.840.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	117.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.029.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	27.029.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				68.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	68.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.965.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.965.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang	%	95	1.492.296.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					27.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				27.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					149.772.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	149.772.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.087.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.087.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.998.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	24.998.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.110.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				31.922.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	31.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.315.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68.340.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	68.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					926.232.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	926.232.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				199.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	199.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				723.732.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	723.732.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					347.292.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	347.292.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.028.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	21.028.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				181.884.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	181.884.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				79.360.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	79.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.520.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga	%	95	1.369.057.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Mengukur hasil pelaksanaan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					187.149.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	187.149.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				31.062.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	31.062.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.037.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12.037.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				840.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				35.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.990.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	9.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				96.220.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	96.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					880.450.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	880.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.340.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				204.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	204.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.910.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				667.900.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	667.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					248.958.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	248.958.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.168.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	24.168.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				127.460.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	127.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.037.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	37.037.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.093.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.200.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi	%	95	1.400.360.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					178.217.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	178.217.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.683.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.683.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.720.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	39.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				35.940.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	35.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				23.340.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	23.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66.534.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	66.534.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					905.550.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	905.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				231.700.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	231.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				673.350.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	673.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					269.093.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	269.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.993.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	18.993.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				115.700.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	115.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.400.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	8.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto	%	95	1.874.332.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					44.887.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	44.887.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				44.887.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	44.887.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					16.100.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	16.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				16.100.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	16.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					156.368.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	156.368.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.100.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	17.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.310.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12.310.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.500.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				50.008.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.008.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	7.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.100.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	60.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.345.327.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.345.327.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.260.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				233.397.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	233.397.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.081.670.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.081.670.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					311.650.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	311.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.540.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	17.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.036.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	140.036.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				8.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.754.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	18.754.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				79.320.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	79.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo	%	95	1.581.937.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.485.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.485.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.485.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.485.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					165.388.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	165.388.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.855.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	35.855.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.287.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.287.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				56.250.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	56.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.600.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	15.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.396.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	43.396.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.131.772.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.131.772.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.590.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.590.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.090.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	180.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				949.092.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	949.092.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					232.292.000		
						umlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	232.292.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12.667.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	12.667.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				106.215.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	106.215.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.800.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	16.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				67.330.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	67.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.280.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	23.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang	%	95	1.064.914.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					101.729.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	101.729.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.201.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.201.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.693.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	17.693.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.999.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.999.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				25.136.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.136.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	9.600.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	9.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.100.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	42.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					693.764.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	693.764.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.920.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				193.387.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	193.387.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				478.457.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	478.457.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					216.921.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	216.921.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.445.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	18.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				118.919.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	118.919.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.443.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	27.443.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.150.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	27.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.764.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.764.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.200.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga	%	95	1.228.838.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.550.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.550.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					175.495.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	175.495.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.921.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.921.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				72.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.596.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	13.596.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				35.720.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	35.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.228.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	13.228.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.030.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	39.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					713.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	713.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				166.320.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	166.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				546.480.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	546.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					296.993.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	296.993.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.918.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	18.918.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				99.772.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	99.772.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.788.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	37.788.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				82.086.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	82.086.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.429.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40.429.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I	%	95	2.038.741.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.500.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					142.962.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	142.962.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.280.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.375.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	17.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.748.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	16.748.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				600.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				56.683.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	56.683.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.120.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	20.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27.156.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	27.156.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.640.936.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.640.936.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				930.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				329.150.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	329.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				227.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	227.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.083.356.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.083.356.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					206.843.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	206.843.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.060.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	90.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				8.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.193.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	30.193.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.940.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.400.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	29.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.250.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	45.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II	%	95	1.493.589.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					129.677.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	129.677.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.500.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	24.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.860.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	16.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				45.917.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	45.917.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.400.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	20.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.087.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.087.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				366.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	366.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				715.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	715.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					234.412.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	234.412.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.437.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	24.437.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.425.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	91.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.400.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	35.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.150.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawalan, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III	%	95	1.766.041.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					138.723.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	138.723.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.124.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.124.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				44.350.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	44.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				29.224.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	29.224.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.400.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	17.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.625.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	32.625.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.286.520.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.286.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.250.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				370.925.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	370.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				888.345.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	888.345.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					298.298.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	298.298.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.410.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	15.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				108.448.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	108.448.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.440.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	70.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				53.400.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	53.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42.600.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	42.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi	%	95	1.519.843.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.500.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.025.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	145.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.405.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.405.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				28.941.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	28.941.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.092.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	6.092.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				900.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				41.894.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	41.894.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.200.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.593.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	55.593.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					993.456.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	993.456.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				880.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.360.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	186.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.460.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	2.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				803.756.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	803.756.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					328.362.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	328.362.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.444.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	27.444.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				136.555.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	136.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.663.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	37.663.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				85.100.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	85.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				33.900.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	33.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.700.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen	%	95	1.215.494.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.470.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.470.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					138.026.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	138.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.393.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.393.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.906.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.906.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.990.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.825.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.825.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				35.497.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	35.497.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.820.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	13.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.595.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	49.595.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					772.263.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	772.263.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.240.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				178.300.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	178.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				591.723.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	591.723.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					262.735.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	262.735.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				31.345.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	31.345.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				110.460.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	110.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				4.125.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	4.125.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.175.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	23.175.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.890.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	55.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.390.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	27.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.350.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo	%	95	1.521.260.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					140.284.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	140.284.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.054.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.054.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.800.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	29.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.973.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	8.973.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.100.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	2.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				41.787.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	41.787.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.790.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	10.790.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.780.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	40.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.037.806.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.037.806.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.850.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				242.225.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	242.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				703.731.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	703.731.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					301.170.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	301.170.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				31.980.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	31.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				126.090.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	126.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.200.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.800.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	2.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				71.100.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	71.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta	%	95	1.467.999.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					111.541.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	111.541.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				300.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				50.000.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.750.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.491.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	34.491.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.085.408.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.085.408.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				295.600.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	295.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				789.808.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	789.808.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					229.050.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	229.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				11.704.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	11.704.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				82.459.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	82.459.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.927.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	41.927.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				45.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38.960.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	38.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal	%	95	1.554.592.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					158.046.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	158.046.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				43.203.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	43.203.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.012.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	6.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				36.715.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	36.715.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.950.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.166.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	49.166.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.101.260.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.101.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				342.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	342.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				756.060.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	756.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					232.786.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	232.786.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10.156.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	10.156.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				77.180.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	77.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.250.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	47.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.200.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung	%	95	1.371.567.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.026.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	145.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.487.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.487.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.525.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	41.525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.640.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	8.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.320.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				34.820.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	34.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.411.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	8.411.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.823.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	43.823.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.001.386.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.001.386.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.180.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				181.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	181.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				818.006.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	818.006.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					182.655.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	182.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				11.838.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	11.838.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.246.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	91.246.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.137.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	21.137.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				38.354.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	38.354.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.091.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.091.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.989.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.989.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran	%	95	2.213.840.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					177.477.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	177.477.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.019.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.019.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.451.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	34.451.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				50.024.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	50.024.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.573.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	22.573.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48.410.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	48.410.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.607.560.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.607.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				408.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	408.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	17.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.180.660.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.180.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					386.303.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	386.303.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.320.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	40.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				206.510.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	206.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.473.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	50.473.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				4.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				45.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	45.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.600.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri	%	95	2.062.516.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.774.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	145.774.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.560.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.876.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	33.876.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.810.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				33.528.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	33.528.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.600.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	12.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51.400.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	51.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.504.027.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	1.504.027.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.800.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				317.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	317.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.147.827.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.147.827.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					370.215.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	370.215.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				27.655.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	27.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				155.760.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	155.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.800.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	54.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonosobo	%	95	1.236.220.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.500.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	42.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					192.977.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	192.977.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.483.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.483.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.063.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	32.063.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.960.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	17.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1.142.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	1.142.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				43.724.000		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	43.724.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.255.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	15.255.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.350.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	78.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					710.623.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	710.623.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				572.423.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	572.423.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					284.120.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	284.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.630.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	22.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				116.270.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	116.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.620.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	40.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				6.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.600.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	24.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Badan Pengelola Pendapatan Daerah								374.757.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Angka	3.723	374.757.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						374.757.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	%	90	374.757.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					374.757.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	374.757.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				202.138.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	202.138.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				172.619.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	172.619.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah									31.324.592.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
						Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	%	5.41		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain								3.819.325.000		
						Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	%	-6.63	3.819.325.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						315.905.000		
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	%	100	315.905.000	Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					315.905.000		
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Penilaian Barang Milik Daerah	%	100	315.905.000	Subbidang Pemanfaatan Aset	
		5.02.03.1.01.0008			Penilaian Barang Milik Daerah				315.905.000		
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	4	315.905.000	Subbidang Pemanfaatan Aset	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						3.503.420.000		
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	58.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					58.150.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	58.150.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				58.150.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	58.150.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	%	100	99.878.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					99.878.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	%	100	99.878.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				99.878.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	99.878.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	%	100	69.020.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					69.020.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	%	100	69.020.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				69.020.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	69.020.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	%	100	51.140.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					51.140.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	%	100	51.140.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				51.140.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	51.140.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	%	100	96.789.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					96.789.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	%	100	96.789.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				96.789.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	96.789.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	%	100	85.350.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					85.350.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	%	100	85.350.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				85.350.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	85.350.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	%	100	56.250.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					56.250.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	%	100	56.250.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				56.250.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	56.250.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	%	100	61.750.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					61.750.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	%	100	61.750.000		
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				61.750.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	61.750.000		OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	%	100	69.925.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					69.925.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	%	100	69.925.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				69.925.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	69.925.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	%	100	37.363.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					37.363.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	%	100	37.363.000		
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				37.363.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	37.363.000		OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	%	100	89.870.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					89.870.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	%	100	89.870.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				89.870.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	89.870.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal	%	100	63.000.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					63.000.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD kendal	%	100	63.000.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				63.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	63.000.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	%	100	68.700.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					68.700.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	%	100	68.700.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				68.700.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	68.700.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	%	100	109.650.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					109.650.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	%	100	109.650.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				109.650.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	109.650.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	%	100	44.858.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					44.858.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	%	100	44.858.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				44.858.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	44.858.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	%	100	165.070.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					165.070.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	%	100	165.070.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				165.070.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	165.070.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	%	100	32.200.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					32.200.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	%	100	32.200.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				32.200.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	32.200.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	%	100	26.675.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					26.675.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	%	100	26.675.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				26.675.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	26.675.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	%	100	92.250.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					92.250.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	%	100	92.250.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				92.250.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	92.250.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	%	100	73.100.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					73.100.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	%	100	73.100.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				73.100.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	73.100.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	%	100	81.400.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					81.400.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	%	100	81.400.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				81.400.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	81.400.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	%	100	215.750.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					215.750.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	%	100	215.750.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				215.750.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	215.750.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	%	100	69.000.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					69.000.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	%	100	69.000.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				69.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	69.000.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	%	100	59.650.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					59.650.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	%	100	59.650.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				59.650.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	59.650.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	%	100	29.550.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					29.550.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	%	100	29.550.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				29.550.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	29.550.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	%	100	176.520.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					176.520.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	%	100	176.520.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				176.520.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	176.520.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	%	100	85.400.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					85.400.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	%	100	85.400.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				85.400.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	85.400.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	%	100	78.156.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					78.156.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	%	100	78.156.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				78.156.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	78.156.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	%	100	56.711.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					56.711.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	%	100	56.711.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				56.711.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	56.711.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	%	100	59.330.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					59.330.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	%	100	59.330.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				59.330.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	59.330.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	46.800.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					46.800.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	46.800.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				46.800.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	46.800.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	%	100	69.400.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					69.400.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	%	100	69.400.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				69.400.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	69.400.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	%	100	54.000.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					54.000.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	%	100	54.000.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				54.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	54.000.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	%	100	68.420.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					68.420.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	%	100	68.420.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				68.420.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	68.420.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	%	100	80.600.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					80.600.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	%	100	80.600.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				80.600.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	80.600.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	%	100	75.500.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					75.500.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	%	100	75.500.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				75.500.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	75.500.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	%	100	28.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					28.150.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	%	100	28.150.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				28.150.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	28.150.000	SEKSI PELAYANAN RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	%	100	718.095.000	Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					718.095.000		
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	%	100	718.095.000	Subbidang Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain	
		5.02.04.1.01.0013			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				718.095.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	718.095.000	Subbidang Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah								27.505.267.000		
						Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	%	8.91	27.505.267.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						27.505.267.000		
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	267.115.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					267.115.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	%	100	267.115.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				267.115.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	267.115.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	%	100	343.481.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					343.481.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	%	100	343.481.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				343.481.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	343.481.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	%	100	267.850.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					267.850.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	%	100	267.850.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				267.850.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	267.850.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	%	100	257.625.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					257.625.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	%	100	257.625.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				257.625.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	257.625.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	%	100	383.013.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					383.013.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	%	100	383.013.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				383.013.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	383.013.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	%	100	395.160.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					395.160.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	%	100	395.160.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				395.160.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	395.160.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	%	100	416.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					416.150.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	%	100	416.150.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				416.150.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	416.150.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	%	100	369.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					369.150.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	%	100	369.150.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				369.150.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	369.150.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	%	100	325.170.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					325.170.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	%	100	325.170.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				325.170.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	325.170.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	%	100	294.850.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					294.850.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	%	100	294.850.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				294.850.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	294.850.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen	%	100	291.540.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					291.540.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen	%	100	291.540.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				291.540.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	291.540.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	%	100	399.033.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					399.033.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	%	100	399.033.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				399.033.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	399.033.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	%	100	364.300.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					364.300.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	%	100	364.300.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				364.300.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	364.300.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	%	100	251.100.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					251.100.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	%	100	251.100.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				251.100.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	251.100.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	%	100	232.435.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					232.435.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	%	100	232.435.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				232.435.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	232.435.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	%	100	301.091.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					301.091.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	%	100	301.091.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				301.091.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	301.091.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	%	100	340.565.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					340.565.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	%	100	340.565.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				340.565.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	340.565.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	%	100	205.477.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					205.477.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	%	100	205.477.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				205.477.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	205.477.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang	%	100	406.635.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					406.635.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang	%	100	406.635.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				406.635.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	406.635.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	%	100	251.718.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					251.718.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	%	100	251.718.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				251.718.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	251.718.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	%	100	312.900.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					312.900.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	%	100	312.900.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				312.900.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	312.900.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	%	100	409.659.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					409.659.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	%	100	409.659.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				409.659.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	409.659.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	%	100	238.700.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					238.700.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	%	100	238.700.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				238.700.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	238.700.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	%	100	271.915.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					271.915.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	%	100	271.915.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				271.915.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	271.915.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	%	100	157.690.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					157.690.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	%	100	157.690.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				157.690.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	157.690.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	%	100	485.745.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					485.745.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	%	100	485.745.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				485.745.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	485.745.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	%	100	347.150.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					347.150.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	%	100	347.150.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				347.150.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	347.150.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	%	100	327.900.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					327.900.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	%	100	327.900.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				327.900.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	327.900.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	%	100	409.412.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					409.412.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	%	100	409.412.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				409.412.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	409.412.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	%	100	325.920.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					325.920.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	%	100	325.920.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				325.920.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	325.920.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	296.425.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					296.425.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	%	100	296.425.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				296.425.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	296.425.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	%	100	357.837.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					357.837.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	%	100	357.837.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				357.837.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	357.837.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	%	100	215.970.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					215.970.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	%	100	215.970.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				215.970.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	215.970.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	%	100	237.610.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					237.610.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	%	100	237.610.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				237.610.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	237.610.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	%	100	324.300.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					324.300.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	%	100	324.300.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				324.300.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	324.300.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	%	100	279.650.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					279.650.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	%	100	279.650.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				279.650.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	279.650.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	%	100	209.340.000	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					209.340.000		
						Realisasi Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	%	100	209.340.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	
		5.02.04.1.01.0008			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				209.340.000		
						Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4	209.340.000	SEKSI PELAYANAN PAJAK DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	%	100	11.248.986.000	Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.248.986.000		
						Persentase Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	%	100	332.956.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		5.02.04.1.01.0004			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				332.956.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	1	332.956.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	%	100	10.916.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		5.02.04.1.01.0006			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				916.030.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	4	916.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.04.1.01.0014			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				10.000.000.000		
						Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	4	10.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	%	100	600.000.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					600.000.000		
						Persentase Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	%	100	369.673.000	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	
		5.02.04.1.01.0012			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				369.673.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	4	369.673.000	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	%	100	230.327.000	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah	
		5.02.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				230.327.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	230.327.000	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	%	100	1.370.700.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.370.700.000		
						Persentase Terlaksananya Analisis Data dan Perencanaan Pendapatan Daerah	%	100	850.700.000	Subbidang Analisis data dan Perencanaan Pendapatan	
		5.02.04.1.01.0001			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				850.700.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4	850.700.000	Subbidang Analisis data dan Perencanaan Pendapatan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Terlaksananya Pengembangan Pendapatan Daerah	%	100	520.000.000	Subbidang Pengembangan Pendapatan	
		5.02.04.1.01.0002			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				520.000.000		
						Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	520.000.000	Subbidang Pengembangan Pendapatan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	%	100	2.714.000.000	Bidang Pengelolaan Pajak Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.714.000.000		
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	%	100	773.000.000	Subbidang Keberatan dan Penagihan Pajak	
		5.02.04.1.01.0010			Penagihan Pajak Daerah				723.000.000		
						Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	4	723.000.000	Subbidang Keberatan dan Penagihan Pajak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.02.04.1.01.0011			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetuj	4	50.000.000	Subbidang Keberatan dan Penagihan Pajak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Tersusunnya Kebijakan Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak Daerah	%	100	1.941.000.000	Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak	
		5.02.04.1.01.0005			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				1.941.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	1.941.000.000	Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									262.070.644.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah									6.857.812.348.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	97.85		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan								6.857.812.348.000		
						Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	%	100	6.853.312.348.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						6.853.312.348.000		
						Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	6.846.312.348.000	SEKRETARIAT	
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					6.846.312.348.000		
						Jumlah Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun	Dokumen	1	6.846.312.348.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		5.02.02.1.05.0008			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2.425.944.120.000		
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	2.425.944.120.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		5.02.02.1.05.0009			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				20.000.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	20.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		5.02.02.1.05.0010			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				4.400.368.228.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	1	4.400.368.228.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
						Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	100	481.800.000	Bidang Anggaran	
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					481.800.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	70	481.800.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	
		5.02.02.1.02.0002			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				168.600.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	35	168.600.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	OPD Provinsi
		5.02.02.1.02.0003			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				168.600.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	35	168.600.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	OPD Provinsi
		5.02.02.1.02.0011			Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				144.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	35	144.600.000	Pokja Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota	OPD Provinsi
						Persentase Penetapan APBD Provinsi Tepat Waktu	%	100	6.518.200.000	Bidang Anggaran	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					6.518.200.000		
						Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	2	4.760.200.000	Pokja Penyusunan Anggaran	
		5.02.02.1.01.0007			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2.731.200.000		
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2.731.200.000	Pokja Penyusunan Anggaran	OPD Provinsi
		5.02.02.1.01.0008			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2.029.000.000		
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2.029.000.000	Pokja Penyusunan Anggaran	OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	2	116.000.000	Pokja Perencanaan Anggaran	
		5.02.02.1.01.0001			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				58.000.000		
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	58.000.000	Pokja Perencanaan Anggaran	OPD Provinsi
		5.02.02.1.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				58.000.000		
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	58.000.000	Pokja Perencanaan Anggaran	OPD Provinsi
						Jumlah Laporan Regulasi dan Kebijakan Anggaran Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan	2	1.642.000.000	Pokja Perencanaan Anggaran	
		5.02.02.1.01.0009			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1.642.000.000		
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2	1.642.000.000	Pokja Perencanaan Anggaran	OPD Provinsi
						Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	%	100	3.500.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						3.500.000.000		
						Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	100	3.500.000.000	Bidang Akuntansi	
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					125.720.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	35	125.720.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	
		5.02.02.1.02.0004			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				125.720.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	35	125.720.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	OPD Provinsi
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					3.374.280.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	1	2.306.774.000	Pokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	
		5.02.02.1.04.0005			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				1.624.625.000		
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	2	1.624.625.000	Pokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	OPD Provinsi
		5.02.02.1.04.0008			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				682.149.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	682.149.000	Pokja Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	OPD Provinsi
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan	Dokumen	1	333.116.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	
		5.02.02.1.04.0002			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				273.286.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	1	273.286.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	OPD Provinsi
		5.02.02.1.04.0004			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				59.830.000		
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	0	59.830.000	Pokja Evaluasi dan Informasi data Keuangan Daerah	OPD Provinsi
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Pengeluaran	Dokumen	1	734.390.000	Pokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		5.02.02.1.04.0009			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				292.165.000		
						Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	0	292.165.000	Pokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	OPD Provinsi
		5.02.02.1.04.0011			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				442.225.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	41	442.225.000	Pokja Pembinaan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	OPD Provinsi
						Persentase realisasi APBD	%	94.2	1.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						1.000.000.000		
						Persentase pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	%	100	1.000.000.000	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					900.000.000		
						Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD	Dokumen	2	250.000.000	Pokja Verifikasi Dokumen Keuangan	
		5.02.02.1.03.0003			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				250.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	4	250.000.000	Pokja Verifikasi Dokumen Keuangan	OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen Juknis Transaksi Non Tunai	Dokumen	2	250.000.000	Pokja Penatausahaan Keuangan	
		5.02.02.1.03.0006			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				250.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	2	250.000.000	Pokja Penatausahaan Keuangan	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Manajemen Kas yang telah disusun	Dokumen	1	400.000.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	
		5.02.02.1.03.0009			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				400.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	3	400.000.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	OPD Provinsi
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					100.000.000		
						Jumlah Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan yang tersusun	Dokumen	2	100.000.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	
		5.02.02.1.06.0002			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2	100.000.000	Pokja Pengelolaan Kas Daerah	OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah									78.751.028.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Angka	76		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah								78.066.028.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Angka	81.5	78.066.028.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						78.066.028.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	%	100	69.671.780.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					55.829.727.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	55.829.727.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				53.639.727.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	150	53.639.727.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.750.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1.750.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.000 5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				240.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	240.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	200.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					400.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				400.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					150.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.005.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	4.005.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				400.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				850.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	850.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				550.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	550.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				450.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				400.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				950.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	950.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				405.500.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	405.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					948.750.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	15	948.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				150.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				798.750.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	798.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.210.207.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	4.210.207.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	10.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				750.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.249.707.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	3.249.707.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.127.596.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	50	4.127.596.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.100.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	40	1.100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.777.596.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	2.777.596.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	%	81.5	8.394.248.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					465.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	81.5	465.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				105.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	105.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				200.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	200.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	40.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	120.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					196.060.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	20	196.060.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				40.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	20	40.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				156.060.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	156.060.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.191.948.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	4.191.948.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.260.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.260.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.230.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1.230.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.960.688.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.960.688.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.541.240.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	730	3.541.240.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	140.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				73.500.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	350	73.500.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.543.940.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	350	1.543.940.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.783.800.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	1.783.800.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah								685.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Angka	2.7	685.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						685.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	%	100	685.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					685.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	685.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				305.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	305.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				240.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	240.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	60.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				80.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	80.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah									2.500.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Indek Pengelolaan Aset (IPA)	Angka	3.12		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan								2.500.000.000		
						Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	2.500.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						2.500.000.000		
						Persentase Kenaikan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	%	50.5	593.261.000	Bidang Aset Daerah	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					593.261.000		
						Jumlah Tindak lanjut Pengelolaan BMD	Dokumen	1	518.381.000	Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0010			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				518.381.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	518.381.000	Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	OPD Provinsi
						Jumlah Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	Dokumen	1	74.880.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0004			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				74.880.000		
						Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	74.880.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	OPD Provinsi
						Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	%	9	541.875.000	Bidang Aset Daerah	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					541.875.000		
						Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD	Dokumen	1	541.875.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0006			Inventarisasi Barang Milik Daerah				223.875.000		
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	42	223.875.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	OPD Provinsi
		5.02.03.1.01.0012			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				318.000.000		
						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	84	318.000.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	OPD Provinsi
						Tingkat Administrasi BMD yang Andal	%	70.5	584.864.000	Bidang Aset Daerah	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					584.864.000		
						Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Sertifikasi dan Pengamanan BMD	Dokumen	1	584.864.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0007			Pengamanan Barang Milik Daerah				584.864.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	584.864.000	Pokja Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	100	780.000.000	Bidang Aset Daerah	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					780.000.000		
						Persentase Ketepatan waktu penetapan RKBMD	%	100	450.000.000	Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0003			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				450.000.000		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	42	450.000.000	Pokja Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	OPD Provinsi
						Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD	%	100	330.000.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	
		5.02.03.1.01.0005			Penatausahaan Barang Milik Daerah				330.000.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	330.000.000	Pokja Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah	OPD Provinsi
JUMLAH									6.939.063.376.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Badan Kepegawaian Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Kepegawaian Daerah									30.372.842.000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah	Angka	86.5		Badan Kepegawaian Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah								30.066.842.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah	Angka	92	30.066.842.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						30.066.842.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	%	100	30.026.842.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					26.226.255.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	14	26.226.255.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				25.317.611.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	150	25.317.611.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				858.644.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	858.644.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000 3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	7	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000 5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				10.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					110.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				110.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					10.000.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	2	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.000 7			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					99.087.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	99.087.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				74.087.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	74.087.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	140	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					697.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	697.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	42.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				140.500.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	140.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				65.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					375.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5	375.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				100.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud				75.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.992.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	1.992.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				710.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	710.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.248.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.248.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					517.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	27	517.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				140.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				15.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				242.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	242.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				120.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Penilaian Kompetensi ASN	%	100	40.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					40.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%		40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah								306.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah	Angka	3.1	306.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						306.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	%	100	306.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					306.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	306.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				130.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18	130.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				136.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	23	136.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				20.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	20	20.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
Mewujudkan Manajemen ASN Berdasarkan Meritokrasi									5.871.840.000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Indeks Sistem Merit	Angka	0.87		Badan Kepegawaian Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN								5.871.840.000		
						Indeks NSPK Manajemen ASN	Angka	93	5.871.840.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						5.871.840.000		
						Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi	%	100	790.000.000	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					790.000.000		
						Persentase pelaksanaan seleksi pengadaan CASN sesuai formasi	%	100	790.000.000	Pokja Pengadaan dan Pemberhentian ASN	
		5.03.02.1.01.0002			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	50.000.000	Pokja Pengadaan dan Pemberhentian ASN	
		5.03.02.1.01.0003			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				600.000.000		
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	600.000.000	Pokja Pengadaan dan Pemberhentian ASN	
		5.03.02.1.01.0006			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				140.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1979	140.000.000	Pokja Pengadaan dan Pemberhentian ASN	
						Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta	%	92	675.000.000	Bidang Mutasi dan Promosi	
				Mutasi dan Promosi ASN					675.000.000		
						Persentase Kenaikan Pangkat ASN tepat Waktu	%	100	145.000.000	Pokja Kenaikan Pangkat ASN dan Layanan Adminstrasi Kepegawaian	
		5.03.02.1.02.0002			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				145.000.000		
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	10000	145.000.000	Pokja Kenaikan Pangkat ASN dan Layanan Adminstrasi Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Keterisian Jabatan ASN melalui mekanisme mutasi & promosi	%	92	530.000.000	Pokja Mutasi dan Promosi ASN	
		5.03.02.1.02.000			Pengelolaan Mutasi ASN				130.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	2	130.000.000	Pokja Mutasi dan Promosi ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.02.000			Pengelolaan Promosi ASN				400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	2	400.000.000	Pokja Mutasi dan Promosi ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemetaan kompetensi ASN	%	100	620.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
				Pengembangan Kompetensi ASN					620.000.000		
						Persentase ASN yang dinilai kompetensinya	%	100	500.000.000	POKJA PENILAIAN KOMPETENSI	
		5.03.02.1.03.0002			Pengelolaan Assessment Center				500.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	11250	500.000.000	POKJA PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN	%	100	120.000.000	POKJA PERENCANAAN DAN EVALUASI	
		5.03.02.1.03.0002			Pengelolaan Assessment Center				120.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kompetensi ASN	Dokumen	2	120.000.000	POKJA PERENCANAAN DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	%	70	410.000.000	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					410.000.000		
						Persentase Data kepegawaian yang tervalidasi	%	70	180.000.000	Pokja Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
		5.03.02.1.01.0010			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				180.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	180.000.000	Pokja Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Dokumen kepegawaian yang tervalidasi	%	70	230.000.000	Pokja Pengelolaan Data, Dokumen Kepegawaian dan Korps Profesi ASN	
		5.03.02.1.01.0008			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				75.000.000		
						Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	75.000.000	Pokja Pengelolaan Data, Dokumen Kepegawaian dan Korps Profesi ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.01.0011			Pengelolaan Data Kepegawaian				155.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	155.000.000	Pokja Pengelolaan Data, Dokumen Kepegawaian dan Korps Profesi ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan kinerja ASN	%	85	150.000.000	Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					150.000.000		
						Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	%	100	150.000.000	Pokja Penilaian Kinerja	
		5.03.02.1.04.0002			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				150.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	5	150.000.000	Pokja Penilaian Kinerja	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN	%	85	2.695.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi	
				Pengembangan Kompetensi ASN					2.695.000.000		
						Persentase ASN yang menempuh pendidikan lanjutan hasil verifikasi	%	100	2.490.000.000	Pokja Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
		5.03.02.1.03.0004			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				2.490.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	150	2.490.000.000	Pokja Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Keterisian Jabatan Fungsional ASN	%	100	205.000.000	Pokja Pengembangan Jabatan Fungsional	
		5.03.02.1.03.0014			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				160.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	1500	160.000.000	Pokja Pengembangan Jabatan Fungsional	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.03.0015			Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				45.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	2	45.000.000	Pokja Pengembangan Jabatan Fungsional	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	10	531.840.000	Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					531.840.000		
						Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa	%	100	211.840.000	Pokja Kesejahteraan ASN	
		5.03.02.1.04.0004			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				170.000.000		
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	200	170.000.000	Pokja Kesejahteraan ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0005			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai				41.840.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	1000	41.840.000	Pokja Kesejahteraan ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pembinaan disiplin ASN	%	20	320.000.000	Pokja Pembinaan Disiplin Pegawai	
		5.03.02.1.04.0007			Pembinaan Disiplin ASN				180.000.000		
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	15000	180.000.000	Pokja Pembinaan Disiplin Pegawai	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.0008			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				140.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	5	140.000.000	Pokja Pembinaan Disiplin Pegawai	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									36.244.682.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah									26.892.349.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Indeks Kompetensi ASN	Angka	3.1		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Meningkatnya daya saing kompetensi sumber daya manusia ASN								25.300.000.000		
						Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	26.1	25.300.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						25.300.000.000		
						Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	95.5	3.200.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					3.200.000.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Orang	1200	3.200.000.000	Pokja Penjenjangan Jabatan Fungsional	
		5.04.02.1.02.0007			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3.200.000.000		
						Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	Orang	1082	1.291.242.000	Pokja Penjenjangan Jabatan Fungsional	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	Orang	350	959.913.000	Pokja Penjenjangan Jabatan Fungsional	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	Orang	240	948.845.000	Pokja Penjenjangan Jabatan Fungsional	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	95.5	2.100.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	
				Pengembangan Kompetensi Teknis					2.100.000.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	Orang	23000	2.100.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	
		5.04.02.1.01.0003			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				2.100.000.000		
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	Orang	7320	613.915.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	Orang	8600	832.085.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Pengukuran jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis inti	Orang	7280	654.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat kelulusan pengembangan kompetensi manajerial, sosiokultural dan pemerintahan dalam negeri	%	95.5	20.000.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri	
				Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri					20.000.000.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	3920	20.000.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.04.02.1.03.0002			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				20.000.000.000		
						Jumlah Peserta Orientasi Pim Pemdagri	Orang	30	95.800.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta Pealtihan Pim pemdagri jenjang Pengawas	Orang	18	252.750.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	Orang	850	2.886.680.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta Pelatihan Pim Pemdagri jenjang administrator	Orang	14	285.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Orang	176	3.102.090.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Orang	216	3.216.730.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	Orang	110	2.358.330.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	Orang	1710	7.802.620.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terpenuhinya kebutuhan sertifikasi kompetensi ASN								1.592.349.000		
						Persentase ASN yang tersertifikasi Kompetensi	%	100	1.592.349.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						1.592.349.000		
						Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)	Angka	3.5	532.104.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Pengembangan Kompetensi Teknis					30.253.000		
						Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	3	30.253.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	
		5.04.02.1.01.0002			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				8.000.000		
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	8.000.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.04.02.1.01.0004			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				22.253.000		
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	17	3.856.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Dokumen	20	18.397.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					501.851.000		
						Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Dokumen	3	501.851.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	
		5.04.02.1.02.0006			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				117.719.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	18	117.719.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.04.02.1.02.0008			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				384.132.000		
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	18	100.712.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	Dokumen	1	125.191.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelatihan yang diakreditasi	Jenis	1	84.966.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angka	28	73.263.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengendalian Mutu dan Kerjasama	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ASN lulus dan tersertifikasi kompetensi	%	50	752.349.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					429.305.000		
						Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi	Dokumen	2	429.305.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	
		5.04.02.1.02.0002			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				110.922.000		
						Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi	Dokumen	2	61.962.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah kualifikasi asessor kompetensi yang dimiliki	Orang	4	48.960.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.04.02.1.02.0003			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				318.383.000		
						Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang	350	318.383.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri					323.044.000		
						Jumlah Dokumen Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Dokumen	1	323.044.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	
		5.04.02.1.03.0003			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				323.044.000		
						Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	200	323.044.000	Pokja Jabatan Fungsional Sertifikasi Kompetensi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	100	307.896.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Pengembangan Kompetensi Teknis					176.991.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen	3	176.991.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	
		5.04.02.1.01.0001			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				87.551.000		
						Jumlah dokumen analisis pengembangan kompetensi bagi OPD/Kab/Kota	Dokumen	2	84.311.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah dokumen metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	3.240.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.04.02.1.01.0002			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				89.440.000		
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	20	89.440.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					130.905.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional	Dokumen	3	130.905.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	
		5.04.02.1.02.0001			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional				125.290.000		
						Jumlah dokumen analisis pengembangan kompetensi bagi OPD/Kab/Kota	Dokumen	2	35.529.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	3.357.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	Dokumen	60	86.404.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.04.02.1.02.0006			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				5.615.000		
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	5.615.000	Pokja Jabatan Fungsional Pengembangan Perangkat dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah									45.516.428.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Angka	85.3		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah								45.135.928.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Angka	80	45.135.928.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						45.135.928.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	%	100	45.135.928.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					26.975.423.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	26.975.423.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.578.023.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	133	23.578.023.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.200.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	3.200.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				77.200.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	77.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				65.500.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	65.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				54.700.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	54.700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					255.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	255.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				255.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	255.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					77.600.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	1	77.600.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				77.600.000		
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	77.600.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					257.970.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	257.970.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				24.200.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	24.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				233.770.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	65	233.770.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.253.243.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	2.253.243.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				400.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				303.560.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	303.560.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				73.987.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	73.987.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				18.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	18.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				96.750.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	96.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				364.846.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	364.846.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				31.150.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	31.150.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				514.950.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	514.950.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.421.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	2.421.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				993.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	69	993.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				35.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.393.500.000		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	22	1.393.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.949.942.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	9.949.942.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.975.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.975.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.964.942.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6.964.942.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.945.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Dokumen	1	2.945.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				171.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	27	171.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.250.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	763	20.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.673.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	41	1.673.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.081.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	376	1.081.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah								380.500.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Angka	2.89	380.500.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						380.500.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	%	100	380.500.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					380.500.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	380.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				84.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	84.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				261.500.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	261.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				15.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	11	15.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				20.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	20.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									72.408.777.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Badan Penghubung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung									4.732.269.000		
						Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	86			
	Meningkatnya Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah								4.732.269.000		
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	86	4.732.269.000		
		5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						4.732.269.000		
						Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan penghubung	%	100	4.732.269.000	Badan Penghubung	
				Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					4.732.269.000		
						Jumlah Jenis Dokumen Hasil Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Dokumen	18	4.732.269.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	
		5.07.02.1.01.000 1			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				3.681.080.000		
						Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan	10	3.681.080.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		5.07.02.1.01.000 3			Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				1.051.189.000		
						Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	15	1.051.189.000	SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Penghubung									21.512.206.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Penghubung	Angka	71.7			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Badan Penghubung								21.457.471.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Penghubung	Angka	85.1	21.457.471.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						21.457.471.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung	%	100	21.457.471.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.506.572.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	9.506.572.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.433.572.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	55	9.433.572.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				65.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.000 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				8.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					307.787.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	307.787.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				307.787.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	41	307.787.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					130.487.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	130.487.000		
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				34.271.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	34.271.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				96.216.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	68	96.216.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.788.997.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.788.997.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				56.035.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	56.035.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				158.556.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	158.556.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				436.859.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	436.859.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				74.967.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	74.967.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				35.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	35.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				630.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	630.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				397.580.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	397.580.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.127.220.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	9	1.127.220.000		
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				362.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	362.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				765.220.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	28	765.220.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.547.088.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	12	5.547.088.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	35.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.100.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.100.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				87.036.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	87.036.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.325.052.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.325.052.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.049.320.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	3.049.320.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.319.720.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	1.319.720.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				27.500.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	27.500.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				350.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	350.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				47.100.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	47.100.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.305.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1.305.000.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Resiko di Badan Penghubung								54.735.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Penghubung	Angka	3.1	54.735.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						54.735.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Penghubung	%	96	54.735.000	Badan Penghubung	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					54.735.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	54.735.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.535.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	30.535.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.648.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24	16.648.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				3.776.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	5	3.776.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.776.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	5	3.776.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									26.244.475.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
INSPEKTORAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif									6.492.766.000	INSPEKTORAT	
						Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Angka	3.52		INSPEKTORAT	
	Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal								6.492.766.000		
						Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	3.196	1.797.497.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						1.797.497.000		
						Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB lebih dari (>) 80	%	61.9	114.520.000	SEKRETARIAT	
				Pendampingan dan Asistensi					114.520.000		
						Jumlah laporan pendampingan dan/atau evaluasi pengelolaan risiko dan reformasi birokrasi perangkat daerah	Laporan	84	114.520.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.02.000 2			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				114.520.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	42	114.520.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
						Persentase perangkat daerah yang memperoleh predikat Zona Integritas	%	42.85	110.758.000	SEKRETARIAT	
				Pendampingan dan Asistensi					110.758.000		
						Jumlah laporan hasil evaluasi pengajuan Zona Integritas OPD dan BLUD	Laporan	8	110.758.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
		6.01.03.1.02.000 4			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				110.758.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	8	110.758.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
						Persentase perangkat daerah yang mendapatkan IEPK level 3	%	35.71	1.572.219.000	SEKRETARIAT	
				Pendampingan dan Asistensi					1.572.219.000		
						Jumlah laporan pengendalian korupsi di perangkat daerah	Laporan	3	1.572.219.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		6.01.03.1.02.000 3			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1.572.219.000		
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	9	1.572.219.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
						Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3.4	4.695.269.000	INSPEKTORAT	
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						4.568.089.000		
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	100	982.440.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					982.440.000		
						Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang terbit	Dokumen	100	982.440.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.000 2			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				982.440.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	80	982.440.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Khusus	%	100	864.840.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					864.840.000		
						Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi bidang Pengawasan Khusus yang terbit	Dokumen	23	864.840.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	
		6.01.02.1.02.0002			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				864.840.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	23	864.840.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	OPD Provinsi
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	1.246.920.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.246.920.000		
						Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang terbit	Dokumen	80	1.246.920.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	
		6.01.02.1.01.0001			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.246.920.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	64	1.246.920.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	1.278.120.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.278.120.000		
						Jumlah Berita Acara Pengawasan yang meliputi temuan, rekomendasi, dan rencana aksi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbit	Dokumen	64	1.278.120.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.0005			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				1.278.120.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	100	1.278.120.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi
						Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	96.23	195.769.000	SEKRETARIAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					195.769.000		
						Jumlah Dokumen Kajian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan	Dokumen	14	195.769.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
		6.01.02.1.01.0007			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				195.769.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	92	195.769.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	OPD Provinsi
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						127.180.000		
						Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	%	100	127.180.000	SEKRETARIAT	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					127.180.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Dokumen	1	127.180.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.01.0002			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				127.180.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	127.180.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di INSPEKTORAT									29.616.394.000	INSPEKTORAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Angka	83.49		INSPEKTORAT	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di INSPEKTORAT								29.426.411.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Angka	85.25	29.426.411.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						29.426.411.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT	%	100	29.426.411.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					24.388.628.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	24.388.628.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.378.628.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	139	24.378.628.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.000 5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					208.006.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	208.006.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				208.006.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	208.006.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					365.819.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	365.819.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05.000 3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				40.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	40.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.000 9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				325.819.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	325.819.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					883.944.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	883.944.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.820.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	13.820.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.602.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	34.602.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.000 4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				169.350.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	169.350.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				150.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	150.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				251.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	251.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240.172.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	240.172.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	25.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					34.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	6	34.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.500.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	34.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.779.168.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	4	2.779.168.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				14.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	14.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	500.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.400.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	14.400.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.250.768.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.250.768.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					766.346.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	136	766.346.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				380.025.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	380.025.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				11.010.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	7	11.010.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				181.511.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	181.511.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				6.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	6.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				161.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	161.300.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.500.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	26.500.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di INSPEKTORAT								189.983.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah INSPEKTORAT	Angka	3.35	189.983.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						189.983.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah INSPEKTORAT	%	100	189.983.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					189.983.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	189.983.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				144.765.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	144.765.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.218.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	35.218.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	4	5.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
JUMLAH									36.109.160.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Ketahanan Wilayah									310.151.273.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD	Angka	3.02		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Ketahanan Bangsa								41.608.400.000		
						Indeks Harmoni Indonesia	Angka	6.5	41.608.400.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						2.608.336.000		
						Indeks Aktualisasi Pancasila	Angka	76.31	2.608.336.000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					2.608.336.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	86	1.407.000.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
		8.01.02.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				710.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1100	710.000.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		8.01.02.1.01.0007			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				15.890.000		
						Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	35	15.890.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		8.01.02.1.01.0008			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				15.110.000		
						Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	4	15.110.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		8.01.02.1.01.0009			Pelaksanaan tugas Paskibraka				56.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	4	56.000.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		8.01.02.1.01.001			Pembentukan Paskibraka				610.000.000		
						Jumlah Paskibraka	Orang	70	610.000.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan Bela Negara dan Karakter Bangsa	%	86	1.201.336.000	Pokja Bela Negara dan Karakter Bangsa	
		8.01.02.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1.103.336.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	3350	1.103.336.000	Pokja Bela Negara dan Karakter Bangsa	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		8.01.02.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah				98.000.000		

					Kebangsaan						
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4	98.000.000	Pokja Bela Negara dan Karakter Bangsa	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						36.626.664.000		
						Indeks Kinerja Ormas	Angka	78.26	36.626.664.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					36.626.664.000		
						PersentaseMasyarakat yangpaham terhadappemberdayaan Ormas	%	86	2.276.664.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	
		8.01.04.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1.211.664.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1500	1.211.664.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		8.01.04.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1.065.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1500	1.065.000.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penanganan Pengawasan Ormas	%	100	34.350.000.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	
		8.01.04.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				34.350.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4	34.350.000.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						2.373.400.000		
						Indeks ketahanan Ekonomi	Angka	2.89	1.169.434.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					1.169.434.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi	%	88	1.169.434.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		8.01.05.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas				1.169.434.000		

					Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	2020	1.169.434.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks Toleransi	Angka	75.4	1.203.966.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					1.203.966.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	%	75.4	1.203.966.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		8.01.05.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1.173.966.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1800	1.173.966.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		8.01.05.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				30.000.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	30.000.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Stabilitas Politik								268.542.873.000		
						Indeks Ketahanan Politik	Angka	3.12	268.542.873.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						61.299.273.000		
						Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Angka	80.47	58.070.318.000	Bidang Politik Dalam Negeri	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					58.070.318.000		
						Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik	%	89.7	58.070.318.000	Pokja Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		8.01.03.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				645.000.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1030	645.000.000	Pokja Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		8.01.03.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				57.425.318.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	12	57.425.318.000	Pokja Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan	Angka	88.11	3.228.955.000	Bidang Politik Dalam Negeri	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					3.228.955.000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi	%	89.6	95.890.000	Pokja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	
		8.01.03.1.01.0002			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				95.890.000		
						Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	3	95.890.000	Pokja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentasi masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik	%	89.7	3.133.065.000	Pokja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	
		8.01.03.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan				3.133.065.000		

					Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	3115		3.133.065.000	Pokja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							207.243.600.000		
						Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	74		207.243.600.000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						207.243.600.000		
						Persentase konflik sosial yang tertangani	%	100		205.533.449.000	Pokja Penanganan Konflik	
		8.01.06.1.01.0003			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					819.379.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1100		819.379.000	Pokja Penanganan Konflik	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		8.01.06.1.01.0005			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					204.714.070.000		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	4		204.714.070.000	Pokja Penanganan Konflik	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan Nasional	%	80		1.710.151.000	Pokja Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen	
		8.01.06.1.01.0002			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					73.661.000		
						Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	4		73.661.000	Pokja Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		8.01.06.1.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				636.490.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1200	636.490.000	Pokja Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		8.01.06.1.01.0006			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1.000.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	12	1.000.000.000	Pokja Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									16.545.275.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	74		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								14.173.275.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	88.17	14.173.275.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14.173.275.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	14.173.275.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.867.419.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	8.867.419.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.496.019.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	62	8.496.019.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				350.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	350.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				700.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				700.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				20.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					80.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				80.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					203.500.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	203.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.000.000		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				33.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	33.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150.500.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	150.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.218.135.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.218.135.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				115.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	115.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				80.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				7.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				90.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				656.135.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	656.135.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				45.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					246.031.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	32	246.031.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				50.000.000		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				196.031.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	196.031.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.848.131.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	84	2.848.131.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				587.941.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	587.941.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.259.190.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.259.190.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					710.059.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	352	710.059.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				280.000.000		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	36	280.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				271.000.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	271.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				76.059.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	80	76.059.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								2.372.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	2.9	2.372.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.372.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	2.372.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.372.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	2.372.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.266.033.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	1.266.033.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.055.967.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	1.055.967.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0008			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	4	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	3	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									326.696.548.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Badan Riset dan Inovasi Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan budaya kreatif dan inovatif									3.379.000.000		
	Meningkatnya kebermanfaatan penelitian					Kapabilitas Inovasi	Angka	4.66			
									2.429.000.000		
						Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	%	100	2.429.000.000		
		5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						2.429.000.000		
						Persentase Fasilitas dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	949.000.000		
				Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					233.000.000		
						Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	1	233.000.000		
		5.05.03.1.01.0005			Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				233.000.000		
						Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	1	233.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Invensi dan Inovasi					716.000.000		
						Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	1	716.000.000		
		5.05.03.1.02.0001			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				223.000.000		
						Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	1	223.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.03.1.02.0016			Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi				396.000.000		
						Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan	1	396.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.03.1.02.0025			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual				97.000.000		
						Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan	1	97.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	800.000.000		
				Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					150.000.000		
						Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	1	150.000.000		
		5.05.03.1.01.0001			Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				150.000.000		
						Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	1	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Invensi dan Inovasi					650.000.000		
						Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Laporan	1	650.000.000		
		5.05.03.1.02.0023			Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi				650.000.000		
						Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Laporan	1	650.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Peningkatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sesuai kebutuhan	%	100	680.000.000		
				Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					380.000.000		
						Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelatihan	1	380.000.000		
		5.05.03.1.01.0004			Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				380.000.000		
						Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelatihan	3	380.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Invensi dan Inovasi					300.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Laporan	1	300.000.000		
		5.05.03.1.02.0007			Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi				250.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Laporan	1	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.05.03.1.02.0020			Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah				50.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Laporan	1	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi								950.000.000		
						Indeks Inovasi Daerah	Angka	73.5	950.000.000		
		5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						950.000.000		
						Persentase Pengkajian Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi sesuai prioritas Daerah	%	100	950.000.000		
				Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					500.000.000		
						Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen	1	50.000.000		
		5.05.03.1.01.0002			Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				50.000.000		
						Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen	1	50.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	1	450.000.000		
		5.05.03.1.01.0003			Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset				450.000.000		
						Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	1	450.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Invensi dan Inovasi					450.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Laporan	1	450.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5.05.03.1.02.0013			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi				450.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Laporan	1	450.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Riset dan Inovasi Daerah									13.794.842.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	Angka	73.75		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah								13.574.842.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	Angka	91.5	13.574.842.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						13.574.842.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	13.574.842.000	Sekretariat	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.300.499.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	9.300.499.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.000 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.955.499.000		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	62	8.955.499.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				225.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	225.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	60.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.000 5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				60.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	60.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					114.500.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	114.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.000 2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				110.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.000 6			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.500.000		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					157.508.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	157.508.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.000 3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				120.000.000		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000		
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12.508.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	12.508.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					487.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	487.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12.000.000		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6.000.000		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	6.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				70.000.000		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					205.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	3	205.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				175.000.000		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.599.080.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	2.599.080.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				473.580.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	473.580.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				166.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	166.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.956.500.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.956.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					711.255.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1034	711.255.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				30.000.000		
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				30.000.000		
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				137.255.000		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	137.255.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				104.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	104.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah								220.000.000		
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	Angka	2.65	220.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						220.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	220.000.000	Sekretariat	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					220.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2026			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	220.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				130.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	130.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	40.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.0010			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	50.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH									17.173.842.000		

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng